

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

TAHUN 2022



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (2) RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang.
- (3) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP

- (2) Uraian dari sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIF MARGIANTO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah.....	II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografis	II-4
2.1.1.3 Kondisi Geologis.....	II-5
2.1.1.4 Keadaan Hidrologis	II-6
2.1.1.5 Kondisi Klimatologis.....	II-7
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	II-8
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-18
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana	II-44
2.1.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-54
2.1.1.10 Kondisi Demografi	II-66
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-70
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-70
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-86
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-90
2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-90
2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-130
2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan.....	II-155
2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan.....	II-165
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-177

2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-177
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur	II-179
2.1.4.3	Fokus Iklim Investasi	II-182
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-184
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan	II-185
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10
3.2.1.1	Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target.....	III-13
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-17
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-22
3.2.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	III-23
3.2.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	III-24
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-4
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV-4
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur.....	IV-5
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun.....	IV-6
4.2.4	Standart Pelayanan Minimal (SPM)	IV-19
4.3	Pelaksanaan Pilkada Serentak	IV-20
4.3	Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-21
BAB V	RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1	Penerapan Indikator Kinerja Utama.....	VI-1
6.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI-2
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun.....	II-1
Tabel 2.2	Jenis dan Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun.....	II-4
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun.....	II-5
Tabel 2.4	Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun.....	II-6
Tabel 2.5	Inventarisasi Sungai di Kabupaten Madiun.....	II-6
Tabel 2.6	Waduk/Embung di Kabupaten Madiun.....	II-7
Tabel 2.7	Sistem Perkotaan dan Pedesaan Dalam Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Madiun.....	II-19
Tabel 2.8	Ruas Jalan Kabupaten Madiun yang Termasuk Jalur Selingkar Wilis	II-28
Tabel 2.9	Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis	II-29
Tabel 2.10	Jalan Tembusan Potensial.....	II-31
Tabel 2.11	Capaian Tingkat Pelayanan Persampahan di Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021.....	II-39
Tabel 2.12	Lokasi TPS, TPST dan TPS3R.....	II-39
Tabel 2.13	Distribusi Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Madiun.....	II-46
Tabel 2.14	Distribusi Wilayah Rawan Bencana Kebakaran di Kabupaten Madiun.....	II-48
Tabel 2.15	Distribusi Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Madiun...	II-50
Tabel 2.16	Distribusi Wilayah Rawan Bencana Putting Beliung di Kabupaten Madiun.....	II-52
Tabel 2.17	Kejadian Bencana Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun.....	II-54
Tabel 2.18	Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Madiun.....	II-54
Tabel 2.19	Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Madiun.....	II-56
Tabel 2.20	Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kabupaten Madiun.....	II-56
Tabel 2.21	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....	II-66
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	II-67
Tabel 2.23	Rasio Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Madiun Tahun 2021.....	II-67
Tabel 2.24	Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....	II-68

Tabel 2.25	Perkembangan Angka Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....	II-68
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	II-69
Tabel 2.27	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021 Kabupaten Madiun.....	II-69
Tabel 2.28	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....	II-70
Tabel 2.29	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017– 2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun.....	II-72
Tabel 2.30	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017 – 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun..	II-74
Tabel 2.31	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun.....	II-75
Tabel 2.32	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2019 – 2020 Kabupaten Madiun.....	II-75
Tabel 2.33	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun...	II-77
Tabel 2.34	Indeks Gini Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.35	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	II-78
Tabel 2.36	Indikator Kemiskinan Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun.....	II-80
Tabel 2.37	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Madiun	II-81
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun Dibandingkan Dengan Jawa Timur Tahun 2017-2021.....	II-82
Tabel 2.39	Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....	II-83
Tabel 2.40	Indeks Kesalehan Social Kabupaten Madiun Tahun 2019-2021	II-85
Tabel 2.41	Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Dibandingkan dengan Jawa Timur Tahun 2017-2021.....	II-86
Tabel 2.42	Rata-Rata Lama Sekolah(RLS) Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun dan Jawa Timur.....	II-87
Tabel 2.43	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Madiun Dibandingkan dengan Jawa Timur Tahun 2017-2021.....	II-87
Tabel 2.44	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini.....	II-88
Tabel 2.45	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Pada Sekolah Dasar.....	II-88
Tabel 2.46	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan.....	II-89

Tabel 2.47	Angka Kelulusan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-95
Tabel 2.48	Pemerataan Tenaga Guru di Kabupaten Madiun Tahun 2021.....	II-96
Tabel 2.49	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Madiun Tahun 2017– 2021.....	II-100
Tabel 2.50	Angka Kematian Bayi Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-100
Tabel 2.51	Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita Kabupaten Madiun sampai dengan 2021.....	II-103
Tabel 2.52	Data kasus Covid-19 tahun 2020 – 2021.....	II-106
Tabel 2.53	Data Jumlah Sasaran Yang Vaksin Covid-19 Tahun 2021.....	II-108
Tabel 2.54	Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Kabupaten Madiun Tahun 2021.....	II-109
Tabel 2.55	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-110
Tabel 2.56	Indikator rasio rumah sakit per jumlah penduduk Tahun 2017 - 2021.....	II-110
Tabel 2.57	Standar ketenagaan pada Puskesmas di Kabupaten Madiun Tahun 2021.....	II-110
Tabel 2.58	Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021 di Kabupaten Madiun.....	II-111
Tabel 2.59	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun.....	II-111
Tabel 2.60	Data IKM Rumah Sakit di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021...	II-111
Tabel 2.61	Standar Ketenagaan pada Puskesmas Wilayah Perkotaan.....	II-112
Tabel 2.62	Jumlah ketenagaan pada Puskesmas di Kabupaten Madiun Tahun 2021.....	II-113
Tabel 2.63	Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.	II-113
Tabel 2.64	Realisasi Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2021.....	II-114
Tabel 2.65	Perkembangan Desa ODF di Kabupaten Madiun Tahun 2017 –2021.	II-119
Tabel 2.66	Prevalensi Stunting tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-121
Tabel 2.67	Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-122
Tabel 2.68	Capaian Urusan Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-127
Tabel 2.69	Capaian Urusan Sosial Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-128
Tabel 2.70	Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....	II-130

Tabel 2.71	Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun....	II-130
Tabel 2.72	Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-132
Tabel 2.73	Capaian Urusan Pangan Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Madiun.....	II-132
Tabel 2.74	Capaian Urusan Pertanahan Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Madiun.....	II-135
Tabel 2.75	Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017– 2021 Kabupaten Madiun.....	II-135
Tabel 2.76	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-137
Tabel 2.77	Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017 -2021 Kabupaten Madiun.....	II-139
Tabel 2.78	Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 20172021.....	II-140
Tabel 2.79	Indikator Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2017 – 2021.....	II-141
Tabel 2.80	Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2018-2021.....	II-142
Tabel 2.81	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017- 2021.....	II-144
Tabel 2.82	Jumlah Koperasi dan Struktur Komponen Tahun 2017-2021.....	II-146
Tabel 2.83	Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2021.....	II-148
Tabel 2.84	Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021.....	II-149
Tabel 2.85	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017 – 2021.....	II-150
Tabel 2.86	Capaian Urusan Statistik Tahun 2017-2021.....	II-151
Tabel 2.87	Capaian Indikator Persandian Tahun 2017-2021.....	II-151
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2017-2021.....	II-153
Tabel 2.89	Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021.....	II-154
Tabel 2.90	Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2017-2021.....	II-155
Tabel 2.91	Perkembangan Bidang Pariwisata Tahun 2017 – 2021.....	II-156
Tabel 2.92	Obyek Wisata di Kabupaten Madiun.....	II-157
Tabel 2.93	Pertumbuhan Produksi Tanaman Utama Tahun 2017 – 2021.....	II-159
Tabel 2.94	Luas Lahan Tebu tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun.....	II-160
Tabel 2.95	Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – 2021.....	II-160
Tabel 2.96	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017– 2021.....	II-161

Tabel 2.97	Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2017 – 2021.....	II-163
Tabel 2.98	Indikator Perencanaan Pembangunan Tahun 2017-2021.....	II-165
Tabel 2.99	Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021.....	II-166
Tabel 2.100	Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017- 2021.....	II-167
Tabel 2.101	Capaian Indikator Kepegawaian Kabupaten Madiun Tahun 2017- 2021.....	II-168
Tabel 2.102	Pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021.....	II-169
Tabel 2.103	Persentase Fungsional Auditor Tahun 2017-2021.....	II-169
Tabel 2.104	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017-2021.....	II-170
Tabel 2.105	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021.....	II-171
Tabel 2.106	Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.....	II-173
Tabel 2.107	Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021.....	II-176
Tabel 2.108	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2017 – 2021.....	II-177
Tabel 2.109	Nilai Tukar Petani Tahun 2017 – 2021.....	II-178
Tabel 2.110	Jumlah Pasar Daerah dan Pedagang Kabupaten Madiun Tahun 2021.....	II-180
Tabel 2.111	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-181
Tabel 2.112	Kondisi Infrastruktur Tahun 2021.....	II-181
Tabel 2.113	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017 – 2021.....	II-183
Tabel 2.114	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Madiun.....	II-197
Tabel 2.115	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Madiun.....	II-204
Tabel 3.1	Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022...	III-5
Tabel 3.2	Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Madiun Tahun 2023 & Tahun 2024	III-7
Tabel 3.3	Realisasi Tahun 2018-2021 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun 2023.....	III-16
Tabel 3.4	Realisasi Tahun 2018-2021 dan Target Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023.....	III-21
Tabel 3.5	Realisasi Tahun 2018-2021 dan Target Pembiayaan Daerah	III-25

	Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.....	
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Madiun Tahun 2023.....	IV-2
Tabel 4.2	Hubungan RKP dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	IV-6
Tabel 4.3	Keselarasn Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023.....	IV-8
Tabel 4.4	Keselarasn sasaran pembangunan daerah kabupaten madiun dengan indikator tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023.	IV-10
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023.....	V-2
Tabel 6.1	Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2023.....	VI-1
Tabel 6.2	Target Capaian Indikator Sasaran (<i>Impact</i>) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2023.....	VI-1
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Madiun.....	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Madiun.....	II-3
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II-18
Gambar 2.3	Wilayah Agropolitan Kabupaten Madiun.....	II-23
Gambar 2.4	Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun.....	II-27
Gambar 2.5	Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis.....	II-30
Gambar 2.6	Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Madiun.....	II-45
Gambar 2.7	Peta Kawasan Tanah Longsor Kabupaten Madiun.....	II-47
Gambar 2.8	Peta Kawasan Kebakaran Kabupaten Madiun.....	II-49
Gambar 2.9	Peta Kawasan Banjir Kabupaten Madiun.....	II-51
Gambar 2.10	Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun	II-53
Gambar 2.11	Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.....	II-57
Gambar 2.12	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih.....	II-59
Gambar 2.13	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim.....	II-61
Gambar 2.14	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir.....	II-63
Gambar 2.15	Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam.....	II-64
Gambar 2.16	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara.....	II-65

DAFTAR GRAFIK

Garfik 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021.....	II-72
Grafik 2.2	Variabel pembentuk IPM Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-79
Garfik 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021	II-84
Garfik 2.4	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2017 – 2021.....	II-90
Garfik 2.5	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun..	II-91
Garfik 2.6	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2021.....	II-92
Garfik 2.7	APM Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-93
Garfik 2.8	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun dan Jawa Timur Tahun 2017 – 2021.....	II-94
Garfik 2.9	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-95
Garfik 2.10	Rasio Guru/Murid Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-96
Garfik 2.11	Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-97
Garfik 2.12	APK PAUD di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021	II-98
Garfik 2.13	Angka Kematian Ibu Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-99
Garfik 2.14	Angka Kematian Balita Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-101
Garfik 2.15	Perkembangan Kasus HIV/AIDS Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....	II-103
Garfik 2.16	Perkembangan Cakupan Pengobatan Lengkap dan Kesembuhan TB Paru Tahun 2017-2021.....	II-105
Garfik 2.17	Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021.....	II-129
Garfik 2.18	Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun.....	II-131
Garfik 2.19	Data Perkembangan BUMDes Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021.....	II-140
Garfik 2.20	Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2021.....	II-152
Garfik 2.21	Indikator Urusan Transmigrasi Tahun 2017 – 2021.....	II-164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2023 merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan RKPD pada setiap tahun. RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya diselaraskan dengan dokumen RPJPD dan RPJMD. Ketiga dokumen tersebut saling berhubungan dan bersinergi satu sama lain.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka diperlukan effort yang besar dalam penyusunan RKPD sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

Dokumen RKPD disebut berkualitas bila telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang SMART bersifat spesifik, bias dicapai, realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun terakhir atau tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan bahwa APBD yang disusun telah berpedoman pada RKPD. Dalam rangka penyusunan RKPD perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Dalam satu tahun perjalanannya RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Penyusunan dan penetapan RKPD harus tepat waktu, tepat sasaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan selaras dengan prioritas pembangunan propinsi dan prioritas pembangunan nasional. Bagi Kepala Daerah yang tidak menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan RKPD dilakukan dan disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017

- Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66133);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan , Kawasan Bromo - Tengger Semeru , Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Balai 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

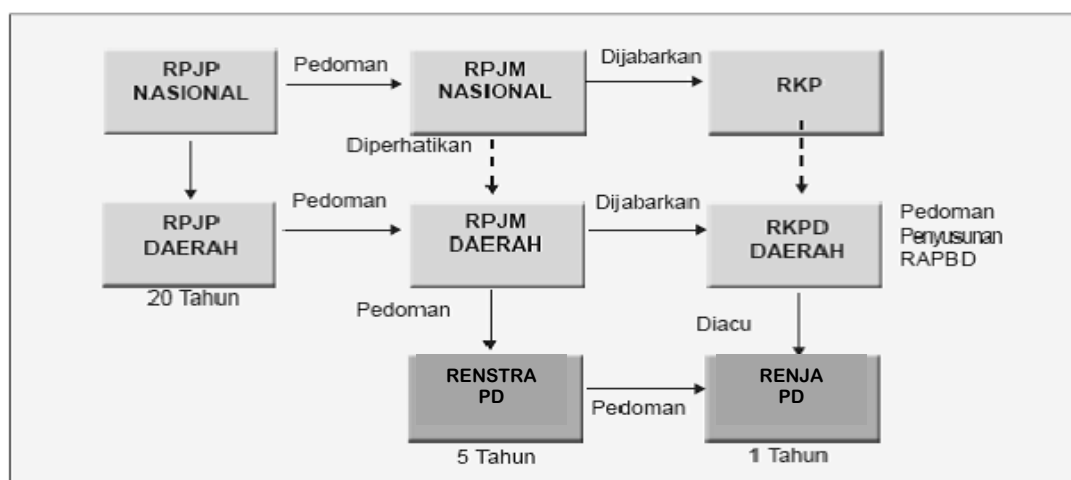
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat tentang gambaran umum pembangunan daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang disinergikan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur untuk tahun yang sama. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) harus berpedoman pada dokumen RKPD ini.

Dokumen RKPD ini merupakan acuan bagi seluruh perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) tahun 2023. Materi penyusunan RKPD Tahun 2023 diambil dari Dokumen P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu pada tahun kelima maka

RKPD pasti selaras dengan P-RPJMD. Demikian juga dengan Perangkat Daerah, dalam menyusun rancangan awal Renja PD materi diambil dari Perubahan Renstra PD tahun 2018-2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan beriringan saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD. Penyusunan RKPD harus disusun saling bersinergis dan saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan prioritas propinsi maupun nasional.

Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Madiun yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Mensinkronkan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat tahun 2023 dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Madiun;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Madiun;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Memberikan gambaran mengenai proyeksi rencana kerangka daerah sebagai referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pelaku pembangunan daerah ;
5. Menjamin kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subjek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Madiun lima tahun ke depan.

2.1.1.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau Tahun 2021 bahwa luas Kabupaten Madiun 1.113,63 Km². Sebelum adanya pemutakhiran ini luas Kabupaten Madiun adalah 1.010,86 Km². Secara astronomis terletak pada 111^o25'45"-111^o51' Bujur Timur dan 7^o12' -7^o48'30" Lintang Selatan dengan batas-batas secara administratif adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
2. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan Dan Ngawi

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri atas 206 desa/kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 kecamatan.

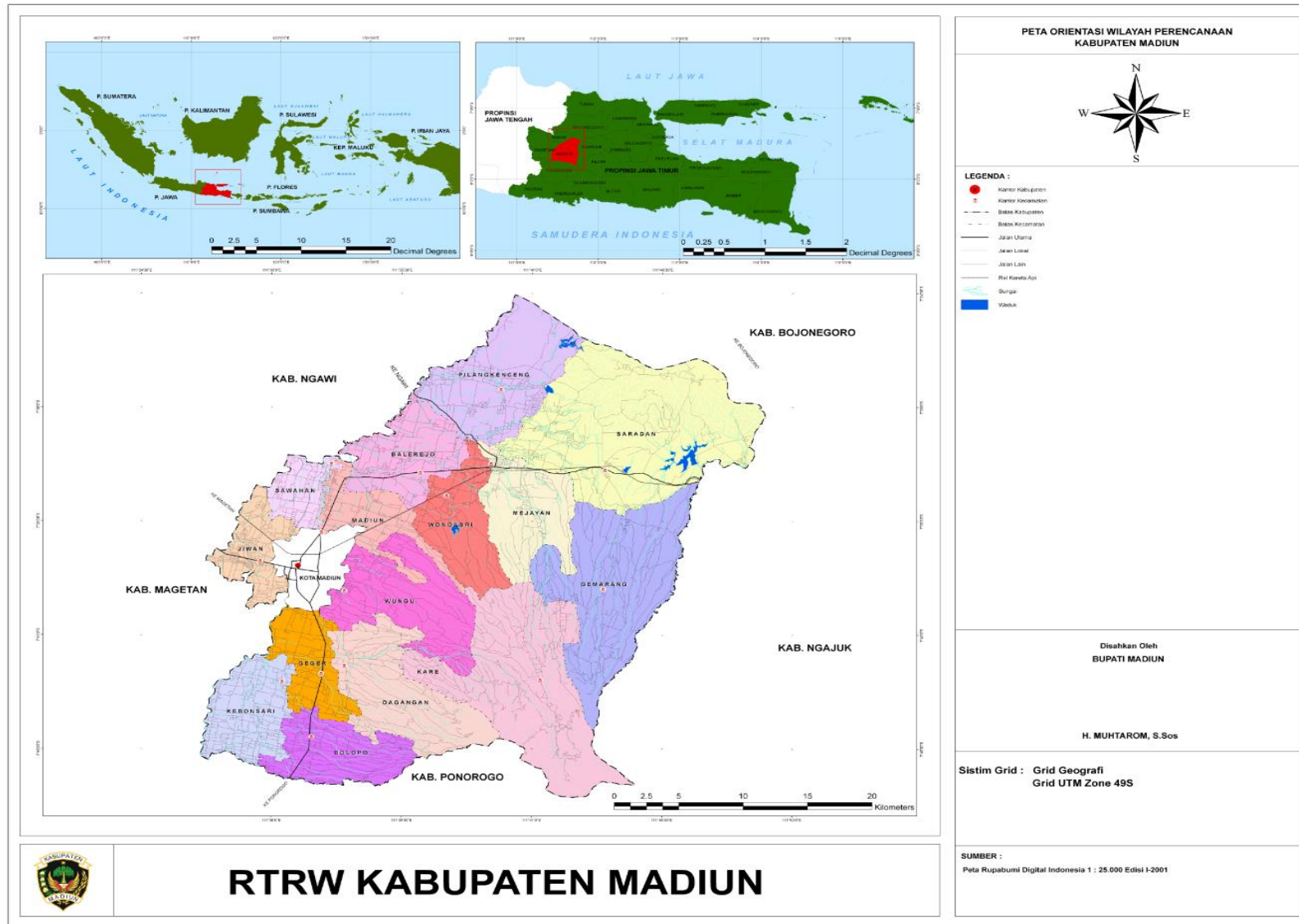
Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan
di Kabupaten Madiun

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Kebonsari	14	-
2	Geger	19	-
3	Dolopo	10	2
4	Dagangan	17	-
5	Wungu	12	2
6	Kare	8	-
7	Gemarang	7	-

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
8	Saradan	15	-
9	Pilangkenceng	18	-
10	Mejayan	11	3
11	Wonoasri	10	-
12	Balerejo	18	-
13	Madiun	12	1
14	Sawahan	13	-
15	Jiwan	14	-
JUMLAH		198	8

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Madiun



Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.1.2. TOPOGRAFI

a. Kemiringan Lahan

Sebagaimana halnya topografi, kelerengan di Kabupaten Madiun juga bervariasi, mulai dari kelerengan 0-8% sampai lebih dari 45%. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare.

Kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1.000 sampai lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di atas 25%. Kecamatan dimaksud antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri, dimana kecamatan-kecamatan tersebut umumnya berada di bagian selatan berdekatan dengan Pegunungan Wilis.

Tabel 2.2
Jenis dan Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Kemiringan Lahan (Ha)					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1.	Kebonsari	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	3.403,50	255,45	2,04	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.890,02	1.562,29	1.406,07	21,04	21,04	4.885,00
4.	Dagangan	1.021,50	1.948,52	1.112,50	2.499,55	2.499,55	7.236,00
5.	Wungu	1.075,50	1.589,73	1.853,53	19,48	19,48	4.554,00
6.	Kare	0,00	231,47	5.425,47	10.685,75	10.685,75	19.085,00
7.	Gemarang	1.538,62	1.797,02	3.685,77	1.523,53	1.523,53	10.197,00
8.	Saradan	14.881,34	410,66	0,00	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	1.602,27	2.128,89	1.448,12	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	1.406,66	513,63	1.147,45	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	3.055,90	95,02	411,48	0,00	0,00	3.59,00
14.	Sawahan	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		53.543,31	10.532,67	16.492,43	5.768,23	14.749,36	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

b. Ketinggian Lahan

Topografi di Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan. Posisi terendah berada di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21-100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Kecamatan-kecamatan dengan ketinggian antara 1.000-2.000 mdpl diantaranya adalah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan sedangkan kecamatan dengan ketinggian >2.000 mdpl adalah Kecamatan Kare.

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Topografi (Ha)						Jumlah
		0-50 mdpl	50-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	>2000 mdpl	
1.	Kebonsari	0,00	3.940,16	804,84	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	0,00	2.427,94	1.233,06	0,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	0,00	0,41	4.881,93	2,66	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	0,00	485,14	5.134,75	1.378,99	237,12	0,00	7.236,00
5.	Wungu	0,00	1.809,78	2.744,22	0,00	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	0,00	0,00	8.885,10	6.125,13	4.002,56	72,21	19.085,00
7.	Gemarang	0,00	0,00	0,18	8.790,93	1.391,16	14,73	10.197,00
8.	Saradan	0,00	2.540,13	12.579,44	172,42	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	6.034,58	2.099,42	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	0,00	2.290,89	3.231,11	0,00	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	0,00	2.059,79	1.333,21	0,00	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	1,89	3.263,73	327,38	0,00	0,00	0,00	3.593,00
14.	Sawahan	12,07	2.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		13,96	35.629,49	43.254,63	16.470,13	5.630,84	86,95	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.1.3. GEOLOGI

Jenis tanah di Kabupaten Madiun cukup bervariasi. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Madiun. Dari jenis tanah ini pun dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan data yang didapat, jenis tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh jenis tanah alluvial dengan prosentase sebesar 36% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Madiun dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Gemarang. Disusul kemudian jenis tanah mediteran dengan prosentase sebesar 26% dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pilangkenceng, Jiwan dan Sawahan. Jenis tanah grumosol dengan prosentase sebesar 21% dengan penyebaran hanya beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dan Sawahan. Jenis tanah latosol dengan prosentase sebesar 13% penyebarannya meliputi Kecamatan Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Untuk jenis tanah dengan luasan terkecil yaitu jenis tanah litosol dengan prosentase sebesar 4% penyebarannya meliputi Kecamatan Dagangan, Kare dan Saradan. Jenis tanah di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Tanah (Ha)					Jumlah
		Mediteran	Latosol	Alluvial	Litosol	Grumosol	
1.	Kebonsari	129,27	0,00	4.615,73	0,00	0,00	4.475,00
2.	Geger	1.951,00	9,01	1.701,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.285,74	758,03	2.841,24	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	6.116,44	0,00	1.020,77	98,79	0,00	7.236,00
5.	Wungu	2.934,65	1.314,79	304,55	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	5.133,95	9.511,10	0,00	4.439,95	0,00	19.085,00
7.	Gemarang	6.437,24	3.759,76	0,00	0,00	0,00	10.197,00
8.	Saradan	3.082,14	0,00	12.044,43	165,43	10.747,49	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	0,00	8.134,00	0,00	1.694,23	8.134,00
10.	Mejayan	3.438,37	638,65	1.444,99	0,00	860,73	5.522,00
11.	Wonoasri	2.050,28	0,93	1.341,78	0,00	48,32	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	399,02	203,93	2.990,05	0,00	38,96	3.593,00
14.	Sawah	0,00	0,00	2.215,00	0,00	13.655,28	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		32.958,09	16.196,20	47.227,54	4.704,17	27.045,01	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.1.4. HIDROLOGI

Di Kabupaten Madiun terdapat 41 (empat puluh satu) sungai yang memuat debit aliran dan manfaat irigasi dari masing-masing sungai tersebut. Pola aliran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Madiun tersebut pada umumnya memiliki pola radial, dengan sebagian besar merupakan sungai musiman yaitu sungai yang meresapkan air hujan ke dalam tanah, atau disebut juga sungai *influent*. Sedangkan sungai pola radial merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi.

Tabel 2.5
Inventarisasi Sungai di Kabupaten Madiun

No	Nama sungai	Panjang Sungai	Manfaat Irigasi
		(km)	(ha)
1.	Kali Madiun	27,90	3.278,00
2.	Kali Asin	8,00	2.803,00
3.	Kali Jerohan	50,60	-
4.	Kali Berangkal	14,50	227,00
5.	Kali Catur	32,00	2.854,00
6.	Kali Gunting	32,25	252,00
7.	Kali Glonggong	4,70	232,00
8.	Sungai Kelepek	12,50	433,00
9.	Kali Sareng	20,25	1.366,00
10.	Kali Batil	17,25	1.108,00
11.	Sungai Gondang	9,10	372,00
12.	Sungai Semawur	4,55	404,00
13.	Kali Sono	10,00	314,00
14.	Kali Piring	10,00	280,00
15.	Kali Bribis	10,00	197,00
16.	Kali Blodro	10,00	422,00
17.	Kali Kentar	10,40	106,00
18.	Kali Kembang	30,40	2.167,00
19.	Kali Abu	14,40	374,00

No	Nama sungai	Panjang Sungai	Manfaat Irigasi
		(km)	(ha)
20	Kali Gondang	15,00	14,00
21	Kali Mundu	30,40	479,00
22	Kali Sukoliman	5,00	30,00
23	Kali Uluh	21,20	86,00
24	Kali Sarangan	20,00	630,00
25	Kali Jumok	15,00	320,00
26	Kali Padas	13,00	86,00
27	Kali Lengkowo	7,00	242,00
28	Kedung Brubus	9,00	-
29	Ngasinan	12,50	-
30	Notopuro	33,75	3.089,00
31	Gede	21,25	483,00
32	Tangkil	5,00	-
33	Gruwok	13,75	2.238
34	Nampu	7,50	47,00
35	Sukorejo	5,00	-
36	Kali Palem	5,00	Suplisi Waduk Notopuro
37	Sumber Agung	6,75	-
38	Kali Gendo	1,75	Saluran Suplisi Waduk Notopuro
39	Kali Ulomati	1,25	Suplisi Waduk Saradan
40	Kali Lemah bang	1,00	Suplisi Waduk Saradan
41	Saradan/Blangambi	6,25	-

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

Beberapa sungai yang ada di wilayah Kabupaten Madiun ada yang menyuplai kebutuhan air di 5 (lima) waduk di Kabupaten Madiun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Waduk/Embung di Kabupaten Madiun

No.	Nama Waduk	Lokasi Desa	Kecamatan
1.	Dawuhan	Sidomulyo	Wonoasri
2.	Notopuro	Duren	Pilangkenceng
3.	Saradan	Sugihwaras	Saradan
4.	Kedungbrubus	Bulu	Pilangkenceng
5.	Kresek	Kresek	Wungu

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2017 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.5. KLIMATOLOGIS

Keadaan iklim di Kabupaten Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dengan intensitas hujan sedang, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Dengan tipe iklim yang ada di Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20°-35° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing-masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.

2.1.1.6. PENGGUNAAN LAHAN

2.1.1.6.1. Kawasan Budidaya

2.1.1.6.1.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Madiun kurang lebih 40.631 ha (kurang lebih 40% dari luas wilayah Kabupaten Madiun), yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun.

2.1.1.6.1.2. Kawasan Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Madiun mencapai luas kurang lebih 5.821 ha (kurang lebih 5% dari luas wilayah Kabupaten Madiun) yang tersebar di kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri.

2.1.1.6.1.3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Madiun meliputi persawahan sepanjang tahun yang dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, misal: kacang hijau,

kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Alokasi pemanfaatan kawasan budidaya pertanian dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Pertanian Sawah

Penggunaan sawah di Kabupaten Madiun meliputi sawah irigasi teknis, sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, irigasi desa/Non PU dan sawah tadah hujan. Perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun menuntut adanya penyediaan lahan untuk pengembangan kegiatan budidaya, permukiman, perdagangan dan jasa, industri maupun fasilitas umum. Dengan akan ditetapkannya Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun, maka secara tidak langsung pada kawasan tersebut akan berkembang kegiatan terbangun. Konsekuensinya akan terjadi perubahan penggunaan lahan non budidaya ke budidaya. Kenyataannya Perkotaan Mejayan berada pada kawasan yang sebagian besar wilayahnya peruntukan areal persawahan. Kondisi ini tidak bisa dihindari, sehingga perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi lahan terbangun di Perkotaan Mejayan dapat diganti pada wilayah lain dengan melakukan peningkatan dari sawah tadah hutan, sawah irigasi sederhana menjadi sawah irigasi teknis. Luasan kawasan pertanian sawah yang direncanakan kurang lebih 31.594 ha (kurang lebih 31% dari luas wilayah Kabupaten Madiun), dengan perincian sistem irigasi meliputi Sawah Irigasi Teknis, Sawah Irigasi Setengah Teknis, Sawah irigasi Sederhana, Sawah Irigasi Non PU, dan Sawah Tadah Hujan.

Dari rencana luas lahan pertanian sawah tersebut diatas, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 21.587,4 ha yang tersebar di 15 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. Adapun penyebaran lahan sawah beririgasi di Kabupaten Madiun meliputi Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan. Sedangkan penyebaran lahan sawah tadah hujan meliputi Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, dan Madiun.

b. Tegal/Kebun/Ladang

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang biasanya pada saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami

jagung, tembakau atau palawija, misalnya kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Kawasan pertanian lahan kering yang dimaksud adalah tegal/kebun/ladang yang direncanakan seluas kurang lebih 2.643 ha (kurang lebih 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun). Luas tegal/kebun/ladang mengalami penurunan karena dimanfaatkan untuk lahan terbangun. Adapun penyebarannya berada di seluruh kecamatan. Untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya.

c. Hortikultura

Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 2.321 ha (kurang lebih 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun).

2.1.1.6.1.4. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing serta prospek ekonomi yang dimiliki. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti kopi, coklat dan karet, dan perkebunan tanaman semusim antara lain tembakau, tebu, panili dan sebagainya. Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikelola oleh perusahaan seperti perkebunan kopi Kandangan yang terletak di Kecamatan Kare dengan luas mencapai kurang lebih 862 ha dan di Kecamatan Wungu seluas kurang lebih 1 ha, dimana kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai fungsi hutan lindung. Luas keseluruhan kawasan peruntukkan perkebunan kurang lebih 18.912 ha, meliputi kecamatan Gemarang, Kare, Dagangan, Dolopo, dan Saradan.

2.1.1.6.1.5. Kawasan Peruntukan Perikanan

2.1.1.6.1.5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Madiun adalah perikanan darat yang dikembangkan di kolam/sungai, waduk. Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan adalah mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan khususnya kolam/sungai dan waduk. Pengembangan budidaya perikanan kolam diarahkan di Kecamatan Dolopo, Kebonsari, dan Balerejo sedangkan pengembangan budidaya perikanan waduk diarahkan di Kecamatan Wungu, Wonoasri, Pilangkenceng, dan Saradan.

2.1.1.6.1.6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pada dasarnya penambangan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dengan demikian kemungkinan terjadinya degradasi semakin besar pula, metode penambangan akan mempengaruhi besar kecilnya perubahan terhadap bentang alam. Potensi jenis tambang yang ada di Kabupaten Madiun meliputi kecamatan Kare dan Dagangan berupa pertambangan mineral logam berupa emas, seluruh wilayah kabupaten Madiun berupa pertambangan mineral bukan logam serta pertambangan batuan berupa tanah urug dan sirtu. Potensi Panas Bumi di Desa Mendak Kecamatan Dagangan dan Desa Klangon Kecamatan Saradan, Sedangkan dalam proses eksplorasi adalah panas bumi berada di Desa Mendak Kecamatan Dagangan.

2.1.1.6.1.7. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Madiun merupakan kebutuhan pembangunan wilayah mengingat peran strategis sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan kawasan industri didasarkan pada aspek ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan perekonomian regional.

Industri di Kabupaten Madiun sebagian besar berupa industri kecil dan sedang. Lokasi industri pada umumnya berkembang ke arah selatan, tepatnya di Kecamatan Geger dan Wungu yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun. Industri yang ada di Kabupaten Madiun antara lain Pabrik Gula Pagotan, *chemical industry*, Pabrik Gula Kanigoro yang semuanya berada di Kecamatan Geger dan Wungu. Selain ke arah selatan, industri dan pergudangan juga tumbuh dan berkembang ke arah Timur karena pengaruh dari Jalan arteri primer Surabaya–Madiun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Madiun termasuk dalam program percepatan dalam pengembangan kawasan industri. Luas kawasan industri ini direncanakan seluas ±431 Ha yang berada di Kecamatan Pilangkenceng dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di sebelah Barat

Exit Toll Caruban.

2.1.1.6.1.8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Madiun sebenarnya cukup berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Madiun. Potensi pariwisata di kabupaten Madiun meliputi, pariwisata di bidang agro yang terletak di kawasan Gunung Wilis dengan perkebunan kopi dan kakao, pariwisata seni budaya dengan kesenian Dongkreng. Untuk pariwisata sejarah dengan Monumen Kresek yang merupakan saksi sejarah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, dan pariwisata pelestarian lingkungan dan pembenihan berupa waduk dan persemaian kayu jati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Madiun, untuk perwilayahan pariwisata di Kabupaten Madiun yaitu :

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Caruban Raya, dengan arahan
 - a. tema produk pariwisata adalah pariwisata budaya tradisi dan pariwisata kreatif;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Mejayan, Madiun, Wonoasri, Balerejo, Jiwan, dan Sawahan;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya budaya tradisi dan industri kreatif sebagai produk pariwisata kreatif berdaya saing internasional;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus olahraga tradisional, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus olahraga tradisional.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Wilis dan sekitarnya, dengan arahan :
 - a. tema produk pariwisata adalah pariwisata sejarah dan wisata agro;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, Dolopo, Kebonsari, dan Geger;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah masa lalu dengan pengembangan sumber daya alam berbasis agro sebagai produk pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dunia;

- d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus sejarah, cagar budaya, dan pendidikan agro, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus sejarah dan cagar budaya.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Pandan dan sekitarnya, dengan arahan :
- a. tema produk pariwisata adalah ekowisata alam dan warisan budaya;
 - b. mencakup wilayah Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng;
 - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk ekowisata alam dan budaya berdaya saing internasional;
 - d. target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya.

2.1.1.6.1.9. Kawasan Peruntukan Permukiman

Tujuan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

- Mendistribusikan perkembangan fisik, kependudukan dan keramaian Kabupaten Madiun ke arah selatan, barat dan utara;
- Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman di Kabupaten Madiun;
- Menciptakan generator bagi Kabupaten Madiun, khususnya pada bagian selatan, barat dan utara.

Berdasarkan konsep tersebut, maka permukiman di Kabupaten Madiun dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1) Permukiman perkotaan dan 2) Permukiman perdesaan dengan luas rencana pengembangan kurang lebih 13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.1.6.1.10. Kawasan Peruntukan Lainnya

Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya difokuskan pada pemanfaatan kawasan peternakan. Pada saat ini, di wilayah Kabupaten Madiun mulai tumbuh pada beberapa kawasan peternakan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini terjadi aglomerasi pengembangan ternak ayam pada suatu lokasi seperti di kecamatan Wungu tepatnya di Desa Bantengan. Kawasan peternakan dalam skala besar diarahkan di

Kecamatan Wungu seluas kurang lebih 16 ha dan Kecamatan Mejayan seluas kurang lebih 16 ha. Pengembangan peternakan yang dilakukan setiap keluarga diarahkan disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

2.1.1.6.2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Madiun adalah kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung yang terdapat di bagian selatan dan sebagian di utara meliputi Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dengan luas mencapai 4.938,7 ha.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah adanya perubahan alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan budidaya pada beberapa titik. Cara menjaga kawasan lindung agar tetap lestari diperlukan pengelolaan sebagai berikut :

1. Membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
2. Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
3. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
4. Melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk obyek wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
5. Mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung;
6. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
7. Mengendalikan kawasan sekitar secara ketat.
8. Menjaga keseimbangan fungsi ekosistem dan lingkungan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Madiun meliputi, kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi.

2.1.1.6.2.1. Kawasan Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Madiun seluas kurang lebih 5.314 ha, yang tersebar di kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan, dan Saradan.

2.1.1.6.2.2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi kawasan resapan air di Kabupaten Madiun. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk menjaga fungsi kawasan tersebut agar tetap berfungsi dengan optimal. Luasan kawasan ini di Kabupaten Madiun adalah seluas kurang lebih 70.887 ha.

2.1.1.6.2.3. Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar sumber mata air. Untuk lebih jelas mengenai penjelasan diatas dapat dilihat dibawah ini.

a. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Adapun luasan kawasan sempadan sungai yang ada di Kabupaten Madiun adalah kurang lebih 2.573 ha meliputi Kali Madiun, Kali Asin, Kali Jerohan, Kali Brangkal, Kali Catur, Kali Bunting, Kali Glonggong, Sungai Klepek, Kali Sareng, Kali Batil, Sungai Gondang, Sungai Semawur, Kali Sono, Kali Piring, Kali Bribis, Kali Blodro, Kali Kentar, Kali Kembang, Kali Abu, Kali Gondang, Kali Mundu, Kali Sukoliman, Kali Uluh, Kali Sarangan, Kali Jumok, Kali Padas, Kali Lengkowo, Sungai Kedungbrubus, Sungai Ngasinan, Sungai Notopuro, Sungai Gede, Sungai Tangkil, Sungai Bruwok, Sungai

Nampu, Sungai Sukorejo, Kali Palem, Sungai Sumber Agung, Kali Gendo, Kali Ulomati, Kali Lemahbang, dan Sungai Saradan/Blangambi.

b. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Embung

Kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Adapun kriteria penetapan sempadan danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempadan danau atau waduk mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk sebagai potensi sumberdaya air permukaan. Sempadan waduk atau danau yang direncanakan di Kabupaten Madiun antara lain : Sempadan Waduk Widias, Waduk Saradan dan Notopuro, Dawuhan dan Kedungbrubus serta Embung Kresek.

c. Kawasan Sekitar Mata Air

Mata air yang ada di Kabupaten Madiun cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, mata air yang ada di Kabupaten Madiun sebanyak 114 mata air yang sudah dimanfaatkan untuk air irigasi dan air minum. Dari 114 mata air yang ada di Kabupaten Madiun, mata air dengan debit maksimum 100 liter/detik antara lain Mata Air Dilem di Desa Kare Kecamatan Kare, Mata Air Sambong di Desa Batok Kecamatan Kare, Mata Air Sekebo di Desa Randualas Kecamatan Kare, Mata Air Jirak di Desa Tawangrejo Kecamatan Kare dan Mata Air Gebangarum di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, dimana mata air tersebut dimanfaatkan untuk irigasi.

2.1.1.6.2.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bantuan geologi alami yang telah ada. Adapun tujuan perlindungan adalah melindungi kekayaan hasil budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan astrologi, monumen nasional, keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan dari ancaman

kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun bencana. Di Kabupaten Madiun terdapat cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dapat dikategorikan menjadi empat bagian yakni lingkungan non-bangunan, lingkungan bangunan non-gedung, lingkungan bangunan gedung dan halamannya dan kebun raya. Kabupaten Madiun yang dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

a. Lingkungan Non Bangunan

Di Kabupaten Madiun dijumpai kawasan lingkungan non-bangunan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut

- Monumen Kresek/ *Madiun Affair 48*
- Peninggalan Sejarah Nglambangan

b. Lingkungan Bangunan Gedung

Di Kabupaten Madiun lingkungan bangunan non-gedung yang berfungsi sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

- Makam Kuncen
- Situs Sewulan
- Makam Mbah Moch Bin Oemar dan Masjid Al Muttaqin
- Makam Patih Kutho Miring Dusun Gentong Desa Putat Kecamatan Geger dan Makam Ki Ageng Rendeng Desa Kincangwetan Kecamatan Jiwan
- Komplek Madiun Lama (Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo)

c. Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya

Kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya merupakan cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar budaya setempat. Bangunan gedung cagar budaya di Jawa Timur meliputi Pabrik Gula Pagotan dan Kanigoro.

2.1.1.6.2.5. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam diantaranya, rawan banjir, rawan longsor, angin topan/puting beliung dan rawan kebakaran.

2.1.1.6.2.6. Kawasan Lindung Geologi.

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam diantaranya, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

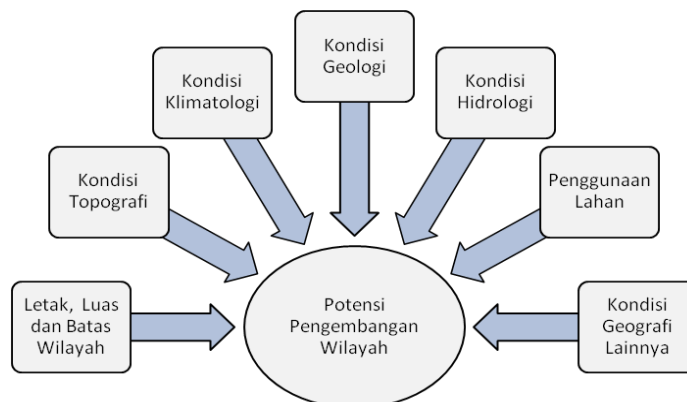
2.1.1.6.2.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertanahan dan keamanan Kabupaten Madiun merupakan kawasan militer dengan luas 94,3 Ha. Kawasan militer tersebut yaitu berupa Gudang Amunisi Divisi Peralatan TNI AD yang berlokasi di Kecamatan Saradan dan Pangkalan Udara Iswahyudi yang berada di Kecamatan Jiwan.

2.1.1.7. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Potensi wilayah yang akan dikembangkan disajikan melalui kerangka pemikiran sebagaimana berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : Gambar.G-C.2 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Pada Subbab 2.1 dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis potensi pengembangan wilayah dikaitkan dengan kondisi kependudukan dengan merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, sistem perkotaan dan pedesaan dibagi dalam 15 kecamatan, yang dijabarkan dalam Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Madiun yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7

Sistem Perkotaan dan Pedesaan Dalam Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Perkotaan	Pedesaan
1	Kebonsari	Singgahan, Balerejo	Tambakmas, Tanjungrejo, Sukorejo, Pucanganom, Krandegan, Sidorejo, alur, Mojorejo, Kebonsari, Rejosari, Bacem, Kedondong
2	Geger	Kertosari, Kertobayon, Sangen, Pagotan, Uteran, Jatisari	Banaran, Klorogan, Slambur, Geger, Sareng, Purworejo, Sumberejo, Jogodayuh, Nglandung, Samberejo, Putat, Kertosari, Kertobayon, Kaibon
3	Dolopo	Bangunsari, Dolopo, Mlilir, Glonggong	Lembah, Kradinan, Suluk, Blimbing, Bader, Candimulyo, Glonggong, Doho, Ketawang
4	Dagangan	Dagangan, Sewulan, Jetis, Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan	Ketandan, Tileng, Mendak, Segulung, Padas, Ngranget, Joho, Kepet, Dagangan, Prambon, Banjarejo, Mruwak, Sukosari
5	Wungu	Munggut, Wungu, Mojopurno, Karangrejo	Sidorejo, Pilangrejo, Brumbun, Kresek, Mojoyayung, Bantengan, Tempursari, Nglanduk, Nglambangan, Sobrah
6	Kare	Morang	Bodag, Kepel, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo, Kare
7	Gemarang	Gemarang	Batok, Durenan, Winong, Tawangrejo, Sebayi, Nampu
8	Saradan	Desa Sugihwaras, Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Bongsopotro, Desa Banjulan dan Ngepeh	Bandungan, Pajaran, Klumutan, Sumbersari, Bener, Tulung, Samberejo, Sumberbendo, Klangan
9	Pilangkenceng	Kenongorejo, Sumbergandu, Kedungrejo, Wonoayu, Purworejo	Kedungmaron, Duren, Pilangkenceng, Muneng, Pulorejo, Ngale, Krebbe, Kedungbanteng, Luworo, Gandul, Ngengor, Bulu, Dawuhan
10	Mejayan	Kaligunting, Krajan, Pandean, Mejayan, Bangunsari, Ngampel	Blabakan, Wonorejo, Kebonagung, Darmarejo, Sidodadi, Kuncen, Klecorejo, Kaliabu
11	Wonoasri	Purwosari, Klitk, Buduran	Ngadirejo, Jatirejo, Banyukambang, Sidomulyo, Pumpungrejo, Wonoasri, Bancong
12	Balerejo	Balerejo, Kebonangung	Garon, Gading, Jerukgulung, Sumberbening, Bulakrejo, Tapelan, Babadan Lor, Warurejo, Kedungiati, Glonggong, Sogo, Banaran, Kedungrejo, Kuwu, Pacinan, Simo

No	Kecamatan	Perkotaan	Pedesaan
13	Madiun	Tiron, Nglames, Bagi, Gunungsari	Dempelan, Betek, Sendangrejo, Sirapan, Dimong, Tulungrejo, Sumberejo, Tanjungrejo, Banjarsari
14	Sawahan	Pucangrejo, Sidomulyo, Bakur	Kanung, Rejosari, Krokeh, Lebakayu, Golan, Cabean, Sawahan, Pule, Kajang, Klumpit
15	Jiwan	Sukolilo, Kincang Wetan, Jiwan, Sambirejo, Metesih, Kwangsen	Bukur, Grobogan, Wayut, Klangenserut, Teguhan, Ngetrep, Bedoho, Bibrik

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

2.1.1.7.1. Rencana Sistem Pedesaan

Sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan antar desa
2. Pusat pelayanan setiap desa
3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

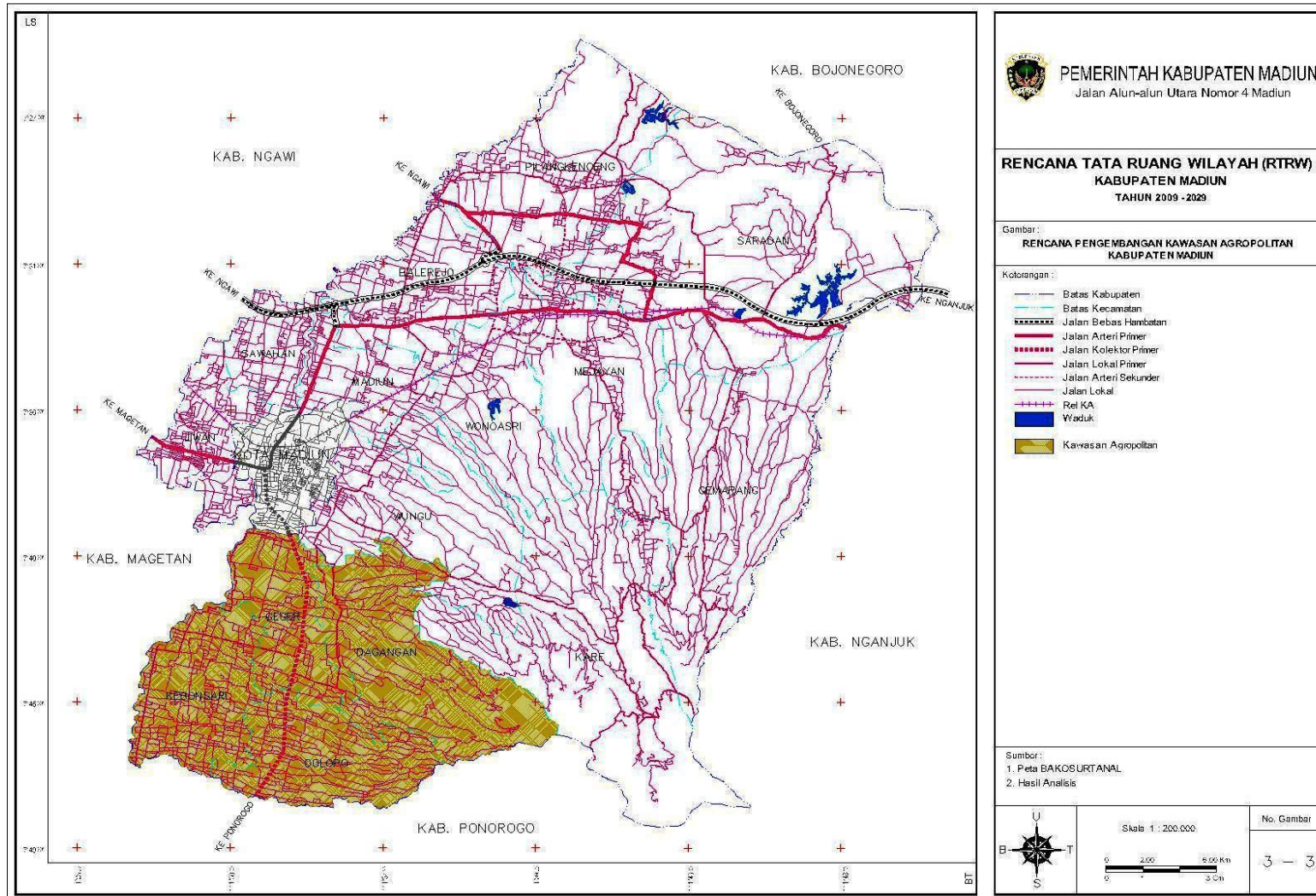
Pusat pelayanan desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat dengan perkotaan pusat SSWP dan dengan perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota kabupaten maupun dengan Kota Madiun sebagai Pusat SWP di Jawa Timur bagian barat. Struktur ruang perdesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP.

Salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Madiun adalah pengembangan kawasan agropolitan di Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari serta kawasan agropolitan Wilis. Kawasan agropolitan yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis yang merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan pedesaan pertanian. Kawasan agropolitan dengan ketersediaan sumber dayanya, tumbuh dan berkembang dengan mengakses, melayani, dan mendorong usaha agrobisnis di desa-desa kawasan (*hinterland*) dan desa-desa sekitarnya.

Sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 24 Januari 2007 Nomor 050/41/201.2/2007 tentang Penetapan Kabupaten Madiun sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor 271 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Agropolitan Gedangsari,

yaitu meliputi Kecamatan Geger, Dolopo, Dagangan, dan Kebonsari atau disebut Gedangsari. Produk unggulan yang dikembangkan di kawasan Agropolitan Gedangsari meliputi kakao, buah-buahan, tebu, sapi potong, domba dan ikan segar.

Gambar 2.3
Wilayah Agropolitan Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.7.2. Rencana Sistem Perkotaan

1. Hierarki atau Besaran Perkotaan

Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Berdasarkan potensi perkembangan perkotaan tersebut hirarki perkotaan di Kabupaten Madiun berdasarkan tipe perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perkotaan Kecil (jumlah penduduk 50.000 – 100.000 jiwa) yaitu Perkotaan Mejayan.
- b. Perkotaan Lainnya (jumlah penduduk < 25.000 jiwa) meliputi seluruh Ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

2. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan hierarki perkotaan masing-masing. Penentuan Sub Satuan Wilayah Pengembangan dilakukan dengan pendekatan homogenitas, pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang dilakukan. Untuk itu, dibuat sesuai dengan hierarki perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap wilayah pendukung. Satuan wilayah pengembangan ini memiliki fungsi:

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah.
- b. Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterland, sehingga diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.
- c. Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
- d. Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk:

- a. Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarki dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional.
- b. Mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Madiun.
- c. Mendukung rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Madiun yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah Propinsi.

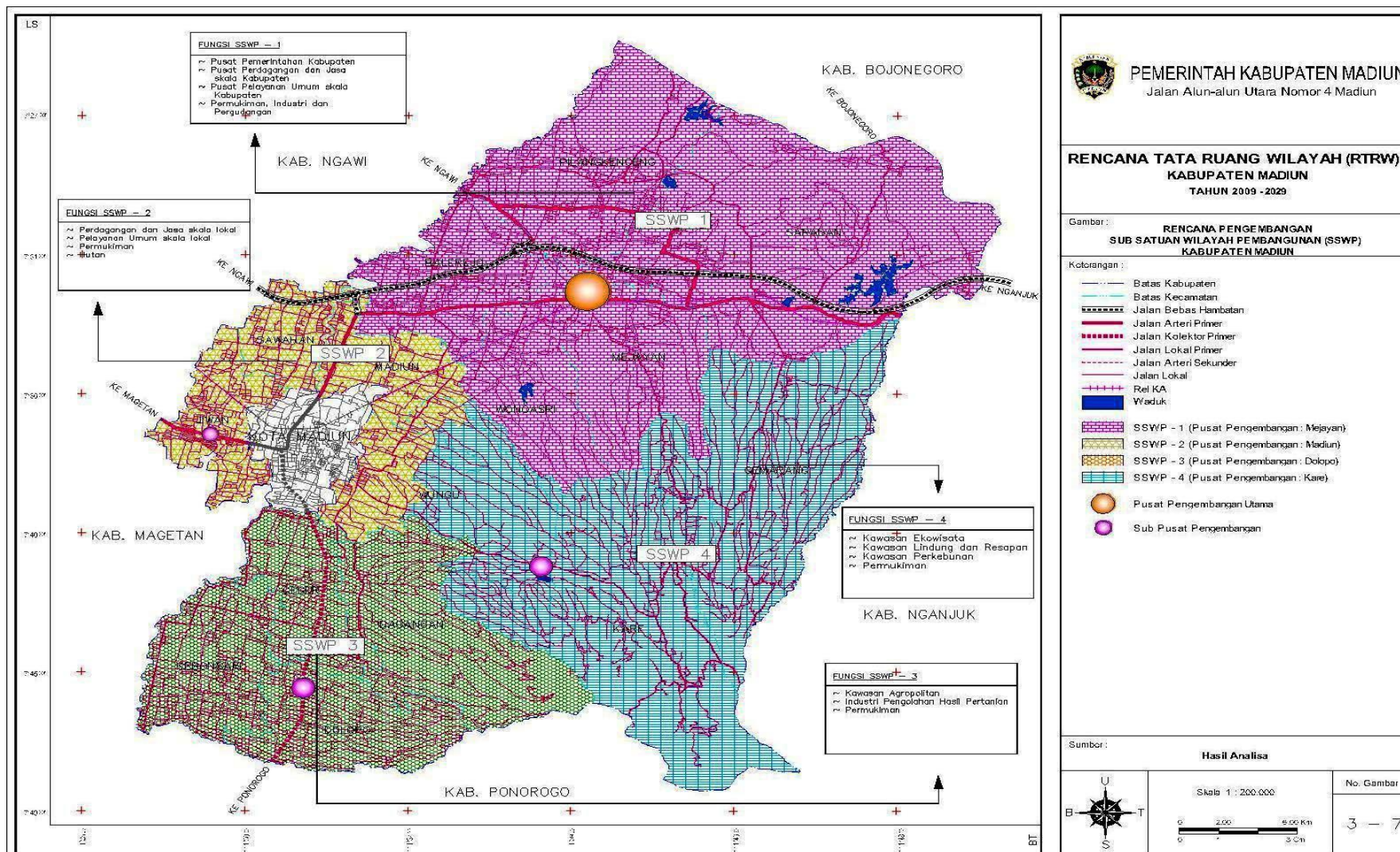
Kabupaten Madiun terbagi dalam 4 (empat) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang dibentuk di Kabupaten Madiun adalah:

- a. SSWP – I adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari ibukota kabupaten dengan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan. SSWP I merupakan pusat pengembangan Mejayan, meliputi Kecamatan Mejayan, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan dan Kecamatan Balerejo. Fungsi wilayah SSWP I adalah:
- Pusat pemerintahan Kabupaten
 - Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten
 - Pusat pelayanan umum skala kabupaten
 - Kawasan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan dan industri.
- b. SSWP – II adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman, meliputi Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Sidorejo, Desa Munggut, Desa Pilangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojoyayung, Desa Bantengan, Desa Tempursari, dan Desa Nglanduk). Fungsi wilayah SSWP II adalah:
- Pertahanan dan keamanan
 - Perdagangan dan jasa
 - Pertanian
 - Peternakan
 - Perkebunan
 - Industri kecil
- c. SSWP – III adalah kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan agroforestry, di Kabupaten Madiun, meliputi Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Kebonsari. Fungsi wilayah SSWP III adalah:
- Perdagangan dan jasa
 - Pertanian
 - Peternakan
 - Perikanan
 - Perkebunan
 - Industri kecil pengolah hasil
 - Kawasan lindung
 - Pariwisata

d. SSWP – IV adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten Madiun (*Ecological City*), meliputi Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Karangrejo, Desa Brumbun, Desa Kresek, Desa Wungu, Desa Nglambangan dan Desa Sobrah). Fungsi wilayah SSWP IV adalah:

- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan
- Kawasan lindung
- Pariwisata

Gambar 2.4
Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.7.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

1. Jaringan Jalan (Jalan Tol)

Mengantisipasi permasalahan prasarana transportasi yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang serta upaya pengembangan wilayah secara optimal, maka pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Madiun antara lain:

- 1) Rencana Peningkatan Jalan Menuju *Interchange* (Pintu Tol) Jalan Tol dan Stasiun Kereta Api.

Dengan telah dibangunnya jalan tol untuk ruas jalan di wilayah Kabupaten Madiun dan Pengembangan Stasiun serta Peningkatan Status Stasiun Kereta Api, perlu direncanakan pembangunan dan peningkatan jalan, yaitu

- a). Pada ruas-ruas jalan menuju *Interchange* (Pintu Tol) Madiun (Bagi/Dumpil) dan Muneng (Purworejo), baik dari Arah Kota Madiun-Dolopo, Madiun-Maospati dan Kota Caruban-Saradan.
 - b). Pada ruas-ruas jalan menuju Stasiun Caruban, Saradan dan Babatan.
- 2) Jalan penghubung antara jalan nasional dengan rencana jalan selingkar willis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, kawasan Selingkar Wilis menjadi Kawasan prioritas pembangunannya, terutama infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten.

Adapun ruas jalan Kabupaten Madiun yang termasuk dalam jalur Selingkar Wilis yang menjadi prioritas pembangunannya adalah:

Tabel 2.8

Ruas Jalan Kabupaten Madiun yang Termasuk Jalur Selingkar Wilis

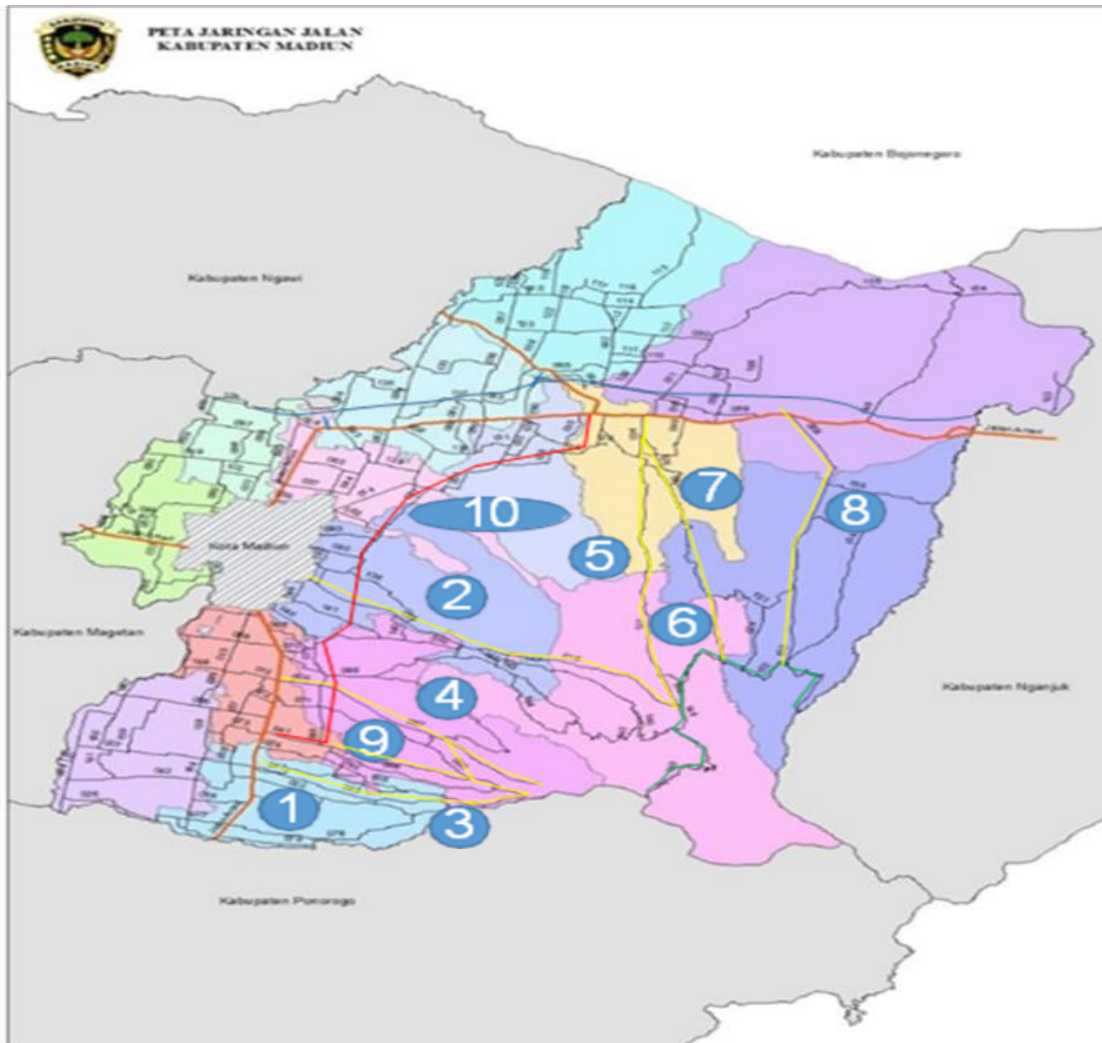
No	Ruas	Panjang (Km)
1	Jl. Mundu -Bts. Nganjuk (153)	11,18
2	Jl. Kare - Mundu (024)	14,24
3	Jl. Kare - Plosorejo (148)	4,71
4	Jl. Plosorejo - Bts. Ponorogo (149)	8,38
Jumlah		38,51

Untuk rencana pembangunan jalan penghubung menuju Selingkar Wilis, sebagai berikut

Tabel 2.9
Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis

No	Ruas	Panjang (Km)
1	Jl. Dolopo - Bts. Ponorogo (022)	5,67
2	Jl. Batas Kota Madiun – Dungus – Kare(016)	9,74
3	Jl. Segulung - Suluk (090)	14,96
4	Jl. Dagangan – Pesanggrahan(087)	11,5
5	Jl. Blabakan - Randualas (127)	14,52
6	Jl. Kare - Randualas (150)	3,43
7	Caruban – Morang - Kare	20,00
8	Jl. Saradan - Mundu (008)	12,11
9	Jl. Slambur – Segulung (041)Ketandan - Mendak (089) Mendukung Pembangkit Listrik Panas Bumi	16,55
10	Jalan lingkar selatan	28,30
	Jumlah	139,78

Gambar 2.5
Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Selingkar Wilis



3) Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan meliputi:

- a) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi ruas Nganjuk – Mejayan – Ngawi.
- b) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Mejayan – Madiun – Maospati – Ngawi.
- c) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Madiun – Ponorogo.
- d) Jalan strategis nasional meliputi ruas Madiun – Ponorogo.
- e) Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer meliputi ruas :
 - Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono);
 - Sawahan (Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (Bojonegoro);
 - Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan);
 - Bulu – Kenongorejo – Sekar (Kabupaten Bojonegoro);
 - Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare –

Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur;

- Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Kreet – Kenongorejo – Bulu – Sekar (Kabupaten Bojonegoro);
- Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedondong – Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.

f) Jalan kota, meliputi : Ruas lingkaran perkotaan Mejayan.

4) Jalan Tembus Potensial

Jalan potensial yang dikembangkan di Kabupaten Madiun, merupakan jalan-jalan yang menuju perbatasan, meliputi:

a) Lingkaran Wilis/Ngadipono (Nganjuk – Madiun –Ponorogo)

Jalan tembus ini direncanakan untuk optimalisasi pengembangan kawasan wisata Gunung Wilis dan agrowisata sehingga diharapkan kawasan wisata Gunung Wilis dapat dikembangkan dan sekaligus mempermudah distribusi hasil kegiatan pertanian disekitarnya.

b) Sawahan (Kabupaten Nganjuk) – Gemarang – Saradan Pilangkenceng – Sekar (Kabupaten Bojonegoro)

Jalan tembus ini dikembangkan untuk optimalisasi Waduk Kedungbrubus sebagai salah satu objek wisata di Kabupaten Madiun, maupun meningkatkan aksesibilitas dari Bojonegoro ke Perkotaan Mejayan.

c) Randualas – Kawasan Agrowisata Gunung Wilis.

Untuk lebih rinci sebagai tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Jalan Tembusan Potensial

NO.	Nama Ruas	Panjang (Km)
1.	Jl. Lembahbang - Bts. Bojonegoro (Klino) (048)	11,98
2.	Jl. Ngepeh-Tulung (011) - Klangon (105)	19,00
3.	Jl. Bajulan-Kengorejo (002) –Sumbergandu-Bulu (112)- Bts Bojonegoro (Sekar) (115)	14,5
4.	Jl. Balerejo-muneng	7,8
5.	Jl. Teguhan-Bibrik (093)- Sidomulyo-Kanung (102) - Tiron	6,5
6.	Jl. Uteran – Batas Magetan (006)	7,1
7.	Jembatan Tiron (melintasi Kali Madiun)	0,280
	Jumlah	66.88

2.1.1.7.4. Rencana Fungsi Jaringan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan membagi sistem jaringan jalan dalam dua sistem yaitu sistem primer dan sistem sekunder. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan primer ini meliputi arteri primer, kolektor primer dan lokal primer. Secara administratif sistem jaringan jalan primer merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Sistem jaringan sekunder ini meliputi arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan lingkungan. Secara administratif sistem jaringan jalan sekunder merupakan kewenangan pemerintah kota atau kabupaten.

Berdasarkan kriteria tersebut, jaringan jalan di Kabupaten Madiun berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

- a. Jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi Ruas Nganjuk – Mejayan – Ngawi.
- b. Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer meliputi Ruas Mejayan – Madiun – Maospati – Ngawi.
- c. Pengusulan ruas jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi, yang merupakan ruas penghubung dengan perbatasan daerah sekitar, meliputi ruas:
 - 1) Ruas jalan Bagi – Batas Ngawi sepanjang 2,71 km;
 - 2) Ruas jalan Pule – Batas Ngawi sepanjang 1,50 km;
 - 3) Ruas jalan Balerejo – Muneng sepanjang 7,80 km;
 - 4) Ruas jalan Kaligunting – Bajulan sepanjang 4,96 km;
 - 5) Ruas jalan Pattimura sepanjang 1,00 km;
 - 6) Ruas jalan Uteran – Batas Magetan sepanjang 7,11 km;
 - 7) Ruas jalan Lemahbang – Klino sepanjang 11,98 km;
 - 8) Ruas jalan Krokeh – Batas Magetan sepanjang 5,37 km;
 - 9) Ruas jalan Jiwan – Batas Magetan sepanjang 3,52 km.
- d. Jalan strategis nasional meliputi ruas Madiun – Ponorogo, ruas Caruban – Saradan, ruas Caruban – Batas Kota Madiun, ruas Madiun – Maospati serta ruas Caruban – Ngawi.

- e. Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer, meliputi ruas:
- 1) Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono).
 - 2) Sawahan (Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (Bojonegoro).
 - 3) Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan).
 - 4) Bulu – Kenongorejo – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
 - 5) Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare – Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur.
 - 6) Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Kreet – Kenongorejo – Bulu – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
 - 7) Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedondong – Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.
- f. Jalan kota meliputi ruas lingkaran perkotaan Mejayan.
- g. Jalan lingkungan meliputi ruas di lingkungan permukiman dan ruas yang menghubungkan antar permukiman di seluruh kecamatan.

2.1.1.7.5. Rencana Sistem Pelayanan Angkutan Umum

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Madiun, untuk itu perlu direncanakan pengembangan terminal baik terminal barang maupun penumpang. Pengembangan terminal tersebut dapat menunjang segala aktivitas maupun kegiatan terutama sektor perekonomian. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan terminal angkutan darat dimana bus antar wilayah baik antar propinsi ataupun antar kabupaten dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan. Seiring dengan perkembangan angkutan penumpang Kabupaten Madiun, maka perlu pembenahan sarana dan prasarana penunjang terminal yang sesuai dengan fungsinya/kelasnya. Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Madiun adalah :

- 1) Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan Terminal Mejayandi Perkotaan Mejayan sebagai terminal tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Rencana pengembangan

terminal di Mejayan dari tipe B menjadi Tipe A, memerlukan lahan pengembangan yang lebih luas, sehingga terminal ini perlu untuk dipindahkan pada wilayah yang strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terminal Mejayan sebagai terminal Tipe A melayani jalur antar kota atau propinsi dengan trayek Surabaya – Mejayan – Madiun – Ponorogo/Magetan dan Surabaya – Mejayan – Ngawi – Solo.

- 2) Selain terminal utama, pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Madiun meliputi pengoptimalan Sub Terminal di Perkotaan Dolopo (terminal tipe C) baik pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana maupun pengembangan jalur angkutan.
- 3) Pengembangan kawasan parkir di koridor jalan arteri primer.

b. Terminal Agribis

Selain pengembangan terminal barang, Kabupaten Madiun memerlukan terminal induk sebagai pusat pengembangan agribis (terminal agrobis) yang direncanakan di Kecamatan Dolopo.

2.1.1.7.6. Jalur Kereta Api Umum

Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api umum yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Jaringan jalur ganda (*double track*) kereta api umum pada jalur Nganjuk – Madiun – Ngawi, telah selesai dilaksanakan;
- b. Mengembangkan kereta api komuter ruas Madiun – Ponorogo melalui konservasi jaringan jalur kereta api umum yang mati.

Sedangkan rencana pengembangan stasiun kereta api yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan di Stasiun Kereta Api Caruban, Saradan dan Babatan;
- 2) Mengembangkan meningkatkan Status Stasiun Kereta Api Caruban dan Saradan menjadi stasiun pemberangkatan dan pemberhentian dengan menambah frekuensi kelas eksekutif, dan Stasiun babadan sebagai stasiun barang.

c. Sempadan Jaringan Kereta Api

- 1) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan kereta api adalah jalan rel beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel. Daerah milik jalan kereta

api yaitu daerah manfaat jalan kereta api beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi.

- 2) Milik Jalan (Rumija) Kereta Api;
- 3) Ruang Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) Kereta Api;
- 4) Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) Kereta Api.

Untuk perlindungan sempadan kereta api antara lain meliputi upaya penataan kawasan dengan cara merelokasi pada penduduk yang berada di sempadan rel, pengadaan taman, jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa, serta penataan/perbaikan lahan sempadan.

2.1.1.7.7. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

a. Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik

Pengembangan pembangkit tenaga listrik pada kawasan perencanaan diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan daya listrik, antara lain meliputi:

- 1) Mengoptimalkan PLTA Golang dan Giringan di Kecamatan Kare
- 2) Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi. Pembangkit listrik yang sekarang sedang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di Desa Mendak Kecamatan Dagangan, dalam tahap explorasi.
- 3) Pengembangan energi baru dan terbarukan meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga biogas bagi kawasan terpencil yang tidak memperoleh pasokan tenaga listrik dari PLN baik secara swadaya masyarakat, bantuan dari Pemerintah maupun bantuan dari swasta.

b. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Energi

Tujuan dari rencana pengembangan jaringan prasarana energi adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana dan sarana jaringan energi yang berfungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan/pembangunan daerah, terdiri dari:

- 1) Pengembangan Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- 2) Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk Distribusi Listrik

2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower *BTS (Base Transceiver Station)* sangat penting untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi masyarakat, sehingga *BTS* dapat menjangkau ke pelosok perdesaan. Dalam pemanfaatannya *BTS* direncanakan menjadi *BTS* terpadu, hal ini dilakukan untuk menghindari terciptanya hutan *tower*.

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten/ Kota.

Kabupaten Madiun memiliki sumberdaya air cukup besar baik dari beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Madiun maupun dari sumber-sumber air yang berada di waduk/embung. Dari 41 sungai yang melalui Kabupaten Madiun terdapat tiga sungai yang berada pada perbatasan Wilayah Kabupaten Madiun dengan wilayah lainnya. Sungai-sungai tersebut adalah: 1) Kali Madiun yang melalui Kota Madiun dan menjadi wilayah perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, serta perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, 2) Kali Asin yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, serta 3) Kali Widas yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Kali Madiun dan Kali Asin dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi di kabupaten/kota tersebut, sehingga dalam pengelolaannya perlu melibatkan kerjasama antara kabupaten/kota tersebut.

b. Rencana Pengembangan Wilayah Sungai Kabupaten Termasuk Waduk, Situ dan Embung

1) Usaha menambah penampungan air pada musim hujan (*retarding*) untuk dimanfaatkan pada musim kemarau/kering, dengan menambah waduk-waduk atau embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada.

2) Rekayasa daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah. Salah satunya dengan memanfaatkan sumur dangkal yang sudah tidak berfungsi menjadi sumur resapan air.

- 3) Menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum.
- 4) Melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasinya.

c. Pengembangan Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan prasarana pengairan lebih ditekankan pada upaya-upaya perbaikan saluran yang sebagian besar dalam kondisi rusak. Pengembangan akan dilakukan untuk setiap wilayah pelayanan pengairan di wilayah Kabupaten Madiun antara lain perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; dan perluasan daerah tangkapan air. Sedangkan upaya pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
- 2) Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
- 3) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
- 4) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.

d. Pengembangan Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Arahan pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih adalah sebagai berikut:

- 1) Air di badan-badan sungai yang berada di luar kawasan lindung dan merupakan sumber utama dengan debit yang besar dan kualitas air yang sedang sampai baik, dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan;
- 2) Air di badan-badan sungai yang termasuk kawasan lindung tidak boleh dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, kecuali untuk kondisi khusus atau telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- 3) Air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi tutupan lahannya terpelihara dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya;
- 4) Air tanah dangkal di kawasan permukiman dapat dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih domestik pada skala penggunaan individu (unit rumah tangga) yang relatif kecil;

5) Air tanah dalam, jika potensinya mencukupi maka dapat dimanfaatkan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

4. Pengembangan Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Madiun terbagi dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem air bersih yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat (HIPAM/swakelola).

5. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir

Banjir merupakan momok bagi kawasan rawan banjir, terutama pada kawasan dengan ketinggian yang lebih rendah dari muka air sungai/air laut, kawasan pertemuan sungai dengan sungai, kawasan dengan drainase yang buruk, dan kawasan yang mempunyai tingkat porositas tanah yang rendah. Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan pendekatan secara struktur dan non struktur.

2.1.1.7.8. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

1. Rencana Sistem Persampahan

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Madiun berupa pengurangan sampah dari sumbernya. Pada tahun 2021 dapat dihitung pengurangan sampah dari berbagai sumber sebesar 589,35 ton. Sumber sampah berasal dari bank sampah, rumah kompos, sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, perkantoran, pasar, fasilitas kesehatan, retail modern, swalayan, minimarket, pertokoan, kios, warung, hotel, rumah makan, restoran dan kegiatan bersih sampah. Sedangkan jumlah sampah yang masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kaliabu pada tahun 2021 sebesar 11.860,88 ton.

Di Kabupaten Madiun terdapat 15 Kecamatan dengan 206 Desa/Kelurahan dimana pada tahun 2021 layanan pengelolaan sampah sebanyak 89 Desa/Kelurahan atau 43,203 % dari total wilayah Kabupaten Madiun.

Capaian tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.11
Capaian Tingkat Pelayanan Persampahan di Kabupaten Madiun
Tahun 2017 - 2021

NO	KOMPONEN	CAPAIAN (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencapaian pengurangan kuantitas sampah dari sumbernya	3,13	3,93	4,74	3,93	4,97
2	Pencapaian layanan pengelolaan sampah	30,87	36,44	42,02	36,44	43,20

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota, Tahun 2022

a. Jumlah Timbunan Sampah

Pola pembuangan sampah yang ada di Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan sistem individual dan komunal yang sudah dilayani oleh sistem pengelolaan sampah umum, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jumlah timbunan sampah perbulan antara 3400-4400 m³ atau 900-1100 ton. Saat ini Kabupaten Madiun terdapat total 7 TPS3R, 1 TPST dan 25 TPS serta 121 Bank Sampah, untuk Tempat Pembuangan Sampah yang berupa container dan landasannya terdapat 34 unit.

b. Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan meliputi seluruh desa di Kabupaten Madiun. Dengan sistem manajemen pengelolaan sampah, terutama untuk pengangkutan dari TPS menuju TPA yang dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.12
Lokasi TPS, TPST dan TPS3R

No.	Lokasi TPS, TPST DAN TPS3R	Ket.
1	Madiun Umbul Square, Kec. Dolopo, Kab. Madiun	TPS
2	Pasar Dolopo, Jl. Raya Ponorogo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun	TPS
3	Kel. Bangunsari, Kec. Dolopo, Kab. Madiun	TPST
4	Perumahan Segaran Permai, Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun	TPS
5	Pasar Pagotan, Jl. Raya Ponorogo, Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun	TPS
6	Kel. Munggut, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS3R
7	Kel. Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS
8	Pasar Dungus, Jl. Raya Dungus, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS
9	Ds. Bantengan, Kec. Wungu, Kab. Madiun	TPS
10	Pasar Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun	TPS
11	Pasar Kincang Wetan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun	TPS
12	Pasar Sukolilo, Jl. Raya Solo, Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun	TPS

No.	Lokasi TPS, TPST DAN TPS3R	Ket.
13	Ds. Kajang, Kec. Sawahan, Kab. Madiun	TPS3R
14	Ds. Buduran, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun	TPS3R
15	Kantor DPRD Kab. Madiun, Ds. Klitik, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun	TPS
16	SMAN 1 Mejayan, Jl. Panglima Sudirman kowang, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun	TPS
17	RSUD Caruban, Jl. Ahmad Yani, Caruban, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
18	SMPN 3 Mejayan, Jl. Ahmad Yani, Karangpilang, Ngampel, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
19	Ds. Ngampel, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS3R
20	Pasar Sayur Mejayan, Jl. Anggrek No.14, Bangunsari, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
21	SMAN 2 Mejayan Jl. Panglima Sudirman No.58, Kronggahan, Mejayan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
22	Pasar Burung Caruban Jl. Panglima Sudirman, Mejayan, Caruban, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
23	SMPN 1 Mejayan, Jl. Panglima Sudirman No. 71, Caruban, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
24	Terminal Caruban Jl. Panglima Sudirman No.69, Kronggahan, Mejayan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
25	Kantor Imigrasi Caruban Jl. Panglima Sudirman, Caruban, Kaligunting, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
26	Rusunawa, Jl. Panglima Sudirman No.12, Kec. Mejayan, Kab. Madiun	TPS
27	Ds. Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun	TPS3R
28	Pasar Saradan, Jl. Raya Surabaya - Madiun, Kedungrejo, Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun	TPS
29	Ds. Kenongorejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun	TPS3R
30	Pasar Muneng Jl. Raya Ngawi - Caruban No.14-16, Muneng, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun	TPS
31	Ds. Simo, Kec. Balerejo, Kab. Madiun	TPS3R
32	PT. Inka Multi Solusi Jalan Raya Surabaya - Madiun Km. 161, Bagi, Kec. Madiun, Kab. Madiun	TPS
33	PT. Surya Madistrindo (Gudang Garam) Jl. Raya Surabaya - Madiun km 7, Gunungsari, Kec. Madiun, Kab. Madiun	TPS

c. Kebutuhan Peralatan Persampahan

Berdasarkan prediksi jumlah timbulan sampah Kabupaten Madiun, maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan peralatan persampahan yang harus dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun khususnya untuk pelayanan Kabupaten Madiun.

1) Umur TPA

Berdasarkan data eksisting, TPA Kaliabu seluas 6 ha diperkirakan masih mampu menampung kebutuhan sampah Kabupaten Madiun sampai Tahun 2023.

2) Arahan Pengembangan

Berdasarkan hasil prediksi dan permasalahan yang ada, maka arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi :

- a) Umur TPA Kaliabu diperkirakan sampai Tahun 2023. Perlu adanya alternatif lokasi TPA baru, mengingat lokasi TPA Kaliabu berdekatan dengan penetapan Kawasan Perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota Kabupaten Madiun. Selain itu perlu juga alternatif lokasi TPA baru untuk wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan.
- b) Pemilihan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir harus sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan.
- c) Pengurangan masukan sampah ke TPA dengan konsep *reduce-reuse-recycle* (3R) di sekitar wilayah sumber sampah.
- d) Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
- e) Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak.
- f) Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

2. Rencana Sistem Sanitasi Lingkungan

Tujuan rencana sistem sanitasi lingkungan adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan air limbah domestik (air limbah rumah tangga) yang berasal dari perumahan dan permukiman, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Arahan pengembangan pengelolaan sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Limbah Rumah Tangga
- b. Untuk Limbah Cair Rumah Sakit/Puskesmas
- c. Untuk Limbah Cair Industri

3. Rencana Sistem Pengembangan Jaringan Drainase

Tujuan dari rencana sistem pengembangan saluran drainase di Kabupaten Madiun adalah mengalirkan air permukaan ke badan air penerima atau bendungan resapan buatan, dalam mencapai ruang hidup

yang sehat dan produktif. Sistem drainase di Kabupaten Madiun masih menggunakan sistem drainase gabungan yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama baik untuk air permukaan maupun air limbah yang diolah. Penanganan pada sistem drainase di Kabupaten Madiun adalah:

- a. Saluran primer : melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya.
- b. Saluran sekunder, saluran tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem jaringan jalan.

2.1.1.7.9. Rencana Pengembangan Prasarana Pendukung

1. Fasilitas Pendidikan

Arahan pembangunan fasilitas pendidikan di kabupaten Madiun sebagai berikut:

- a. Pembangunan fasilitas pendidikan ditekankan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembenahan prasarana dan sarana yang telah ada maupun pembangunan fasilitas baru mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai SLTP.
- b. Pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan baru tingkat dasar sampai SLTP dilakukan secara tersebar pada lokasi-lokasi fasilitas umum disekitar kawasan permukiman yang sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

2. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan diarahkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang ada maupun pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- b. Pembangunan fasilitas kesehatan baru dilakukan tersebar pada lokasi-lokasi yang strategis, dekat dengan lingkungan permukiman dan mudah dijangkau.

3. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan fasilitas peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan skala pelayanannya.

4. Fasilitas Perdagangan

Kebutuhan fasilitas utama perdagangan adalah pasar. Selain fasilitas tersebut pada kawasan Perkotaan Mejayan dibutuhkan juga

hotel, restoran, *show room*, aktivitas perbankan dan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya.

5. Fasilitas Pemerintahan

Pembangunan gedung-gedung pemerintahan terus dikembangkan di pusat pemerintahan di Perkotaan Caruban, Mejayan.

6. Taman dan Fasilitas Olah Raga

Pengembangan fasilitas olah raga di Kabupaten Madiun dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan olah raga baik pada skala kabupaten maupun kecamatan. Kabupaten Madiun membutuhkan fasilitas olah raga berupa:

- a. Lapangan olah raga skala kecamatan.
- b. Lapangan olah raga skala kabupaten.

7. Fasilitas Seni dan Budaya

Penyediaan fasilitas seni dan budaya dilakukan dengan pengembangan fasilitas yang sudah ada maupun pembangunan fasilitas baru. Fasilitas baru berupa gedung pertemuan dan balai budaya dibutuhkan untuk pengembangan seni dan budaya di wilayah di Perkotaan Mejayan;

8. Fasilitas Pemakaman

Pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di daerah. Beberapa kelurahan akan menyiapkan lokasi untuk pemakaman umum.

9. Ruang Terbuka Hijau

RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik/terbuka merupakan RTH yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti Taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Madiun adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

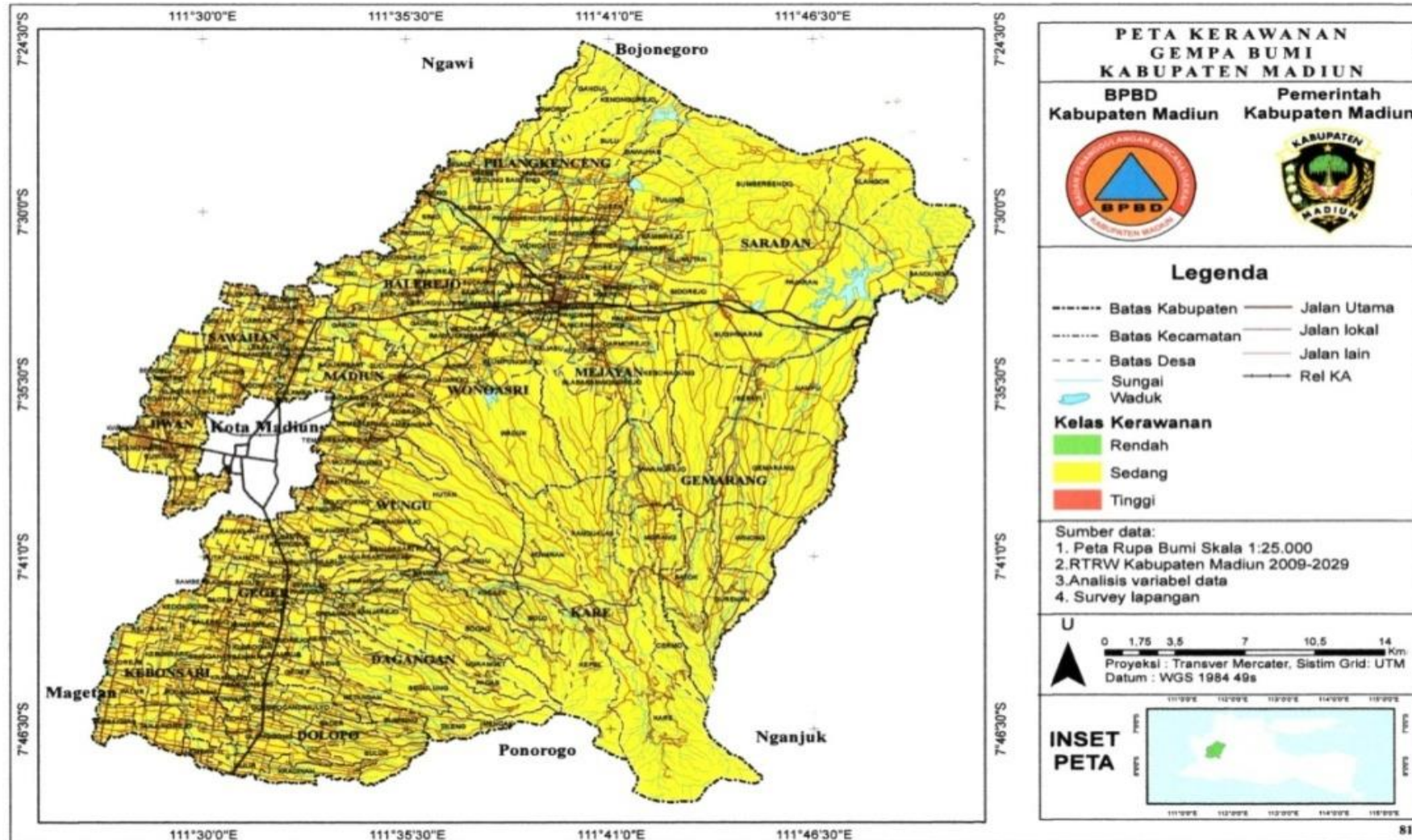
2.1.1.8. WILAYAH RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi:

2.1.1.8.1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah bagian utara Kecamatan Saradan. Di daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klangon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa goncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya–timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral).

Gambar 2.6
Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun, Tahun 2022

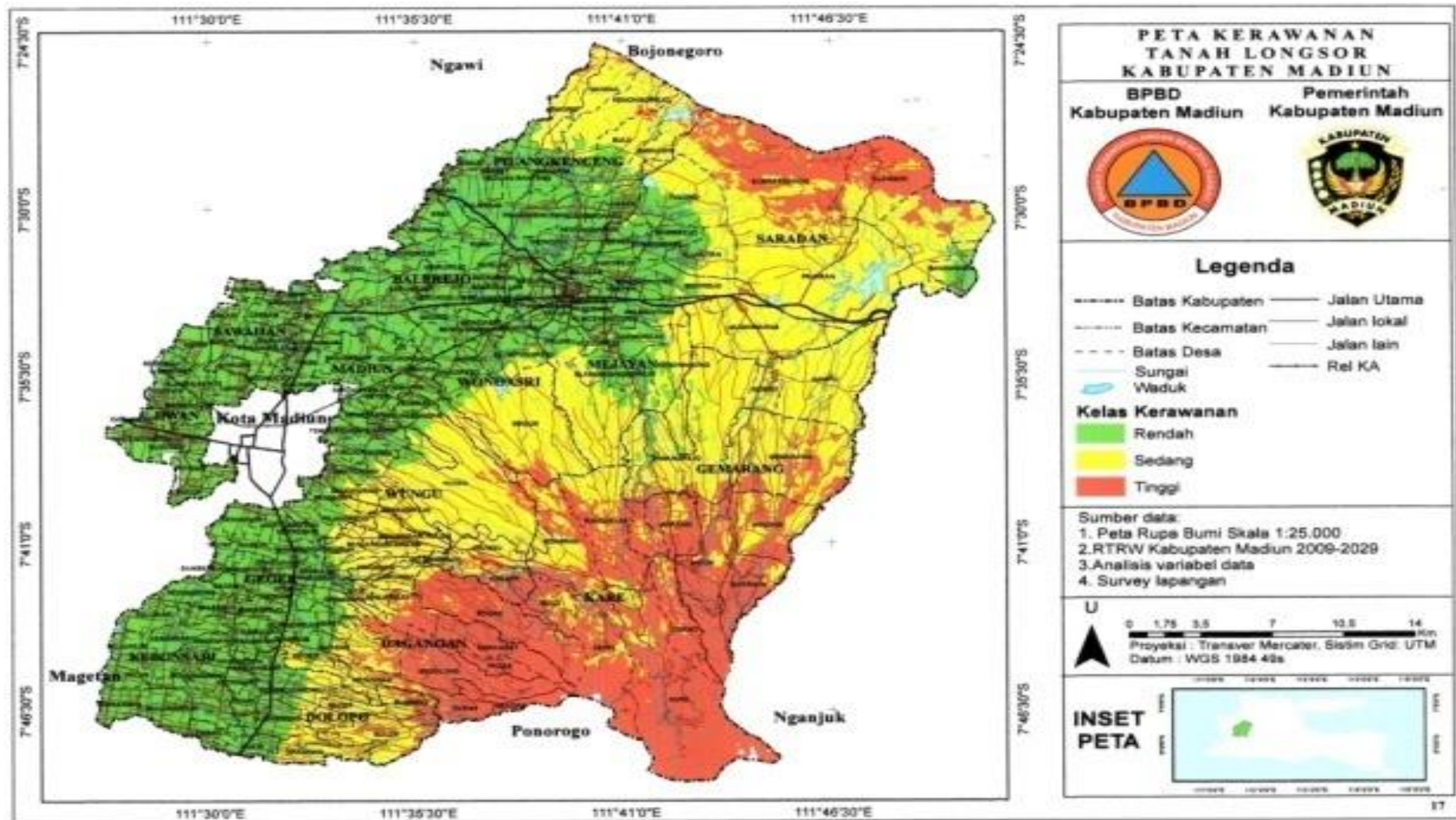
Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1.000 sampai lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di atas 25%. Kondisi lereng demikian memiliki potensi ancaman gerakan tanah (tanah longsor) cukup tinggi. Beberapa wilayah yang terdapat pada kawasan tersebut antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri.

Tabel 2.13
Distribusi Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor di
Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi
1	BALEREJO	5445.05	0.00	0.00
2	DAGANGAN	908.16	3158.84	4168.96
3	DOLOPO	2113.14	2710.38	331.65
4	GEGER	3662.19	346.33	0.00
5	GEMARANG	230.05	8779.34	3804.70
6	JIWAN	3304.18	0.00	0.00
7	KARE	14.01	3273.11	10828.95
8	KEBONSARI	4983.50	0.00	0.00
9	MADIUN	3189.29	475.16	17.90
10	MEJAYAN	3249.82	2777.56	0.00
11	PILANGKENCENG	5113.39	3450.34	240.04
12	SARADAN	3278.60	11874.53	3785.53
13	SAWAHAN	2286.52	0.00	0.00
14	WONOASRI	2493.35	2631.46	152.28
15	WUNGU	2409.90	4769.59	575.50
	Total	42681.16	44246.64	23905.51

Sumber: BPBD Kab. Madiun , Tahun 2016

Gambar 2.7
Peta Kawasan Tanah Longsor Kabupaten Madiun



Sumber : BPBD Kab. Madiun , Tahun 2016

2.1.1.8.2.Kawasan Rawan Kebakaran

Bencana kebakaran tidak terlepas dari kondisi kerawanan kekeringan di Kabupaten Madiun. Sebagian dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tergolong sebagai kawasan rawan kekeringan. Rawan kekeringan di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

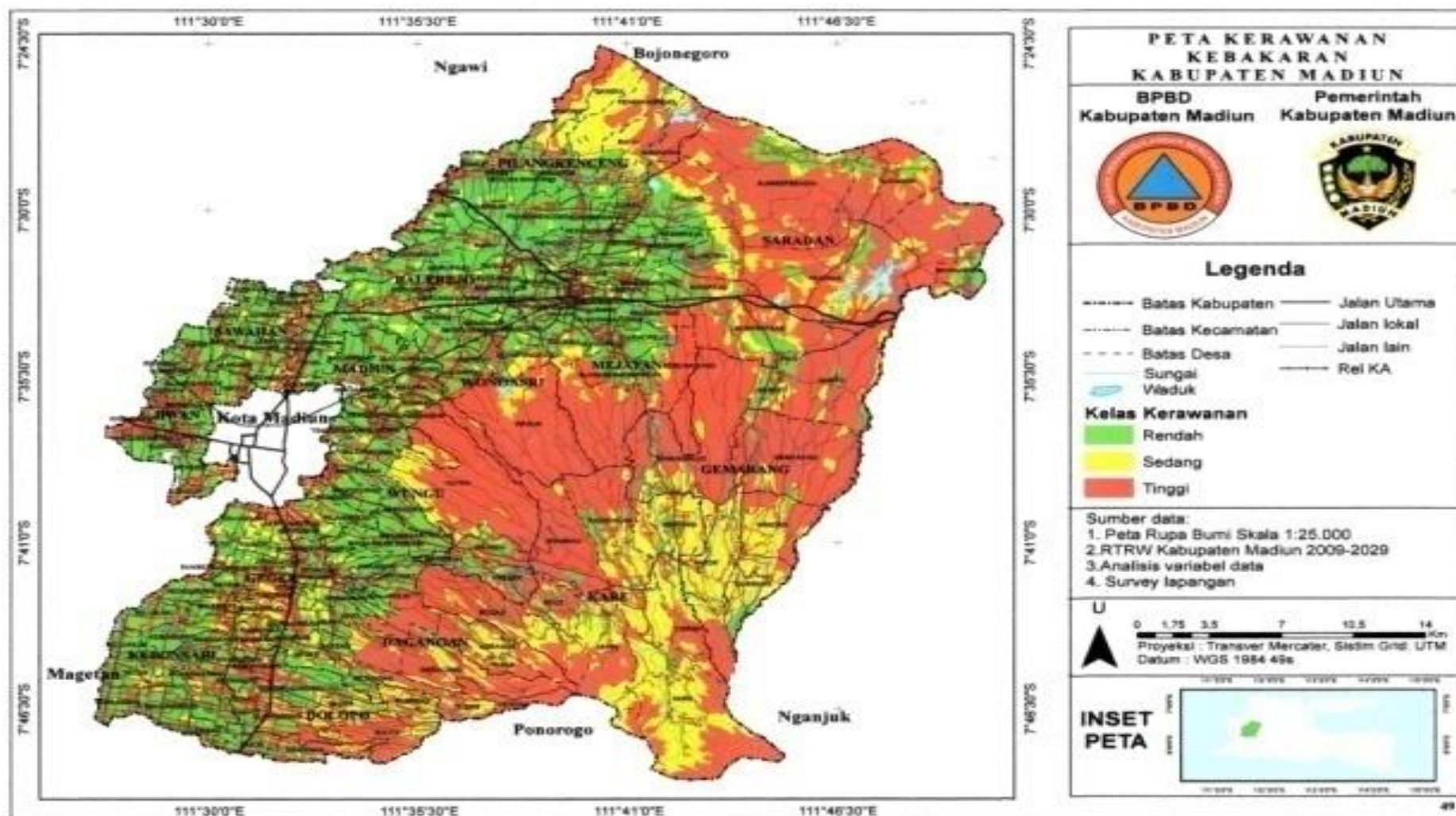
- a. Kawasan rawan kekeringan karena wilayah tersebut memiliki potensi air tanah sangat kecil;
- b. Kawasan rawan kekeringan terutama untuk pertanian karena berada di tepian hutan dan berada di dataran tinggi kapur seperti Kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Geger dan Wungu.

Tabel 2.14
Distribusi Wilayah Rawan Bencana Kebakaran di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi
1	BALEREJO	3754.157	688.8966	1108.439
2	DAGANGAN	2476.605	1673.473	4115.107
3	DOLOPO	1370.974	1581.653	2254.053
4	GEGER	1547.837	1274.17	1213.926
5	GEMARANG	894.8983	3400.054	8588.753
6	JIWAN	2005.371	205.2752	1150.18
7	KARE	748.7385	5988.443	7476.507
8	KEBONSARI	3131.013	467.3473	1440.55
9	MADIUN	1946.724	426.8643	1317.732
10	MEJAYAN	1838.999	684.7915	3511.151
11	PILANGKENCENG	3902.937	2423.693	2637.449
12	SARADAN	4438.069	3152.994	11706.98
13	SAWAHAN	1458.506	340.8105	499.3889
14	WONOASRI	1573.616	563.3108	3197.715
15	WUNGU	2615.725	1042.892	4105.483
Total		33704.17	23914.67	54323.42

Sumber: BPBD Kab. Madiun , Tahun 2016

Gambar 2.8
Peta Kawasan Kebakaran Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2022

Sebagian besar dari Kabupaten Madiun merupakan daerah hutan dengan luas mencapai kurang lebih 40.631 ha yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Kawasan hutan ini sebagian besar merupakan hutan jati. Pada musim kemarau pohon jati pada umumnya akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Pada saat inilah kawasan hutan jati tampak kering dan gersang sehingga dengan terik matahari yang panas maka kawasan ini sangat rawan terhadap kebakaran.

2.1.1.8.3. Kawasan Rawan Banjir

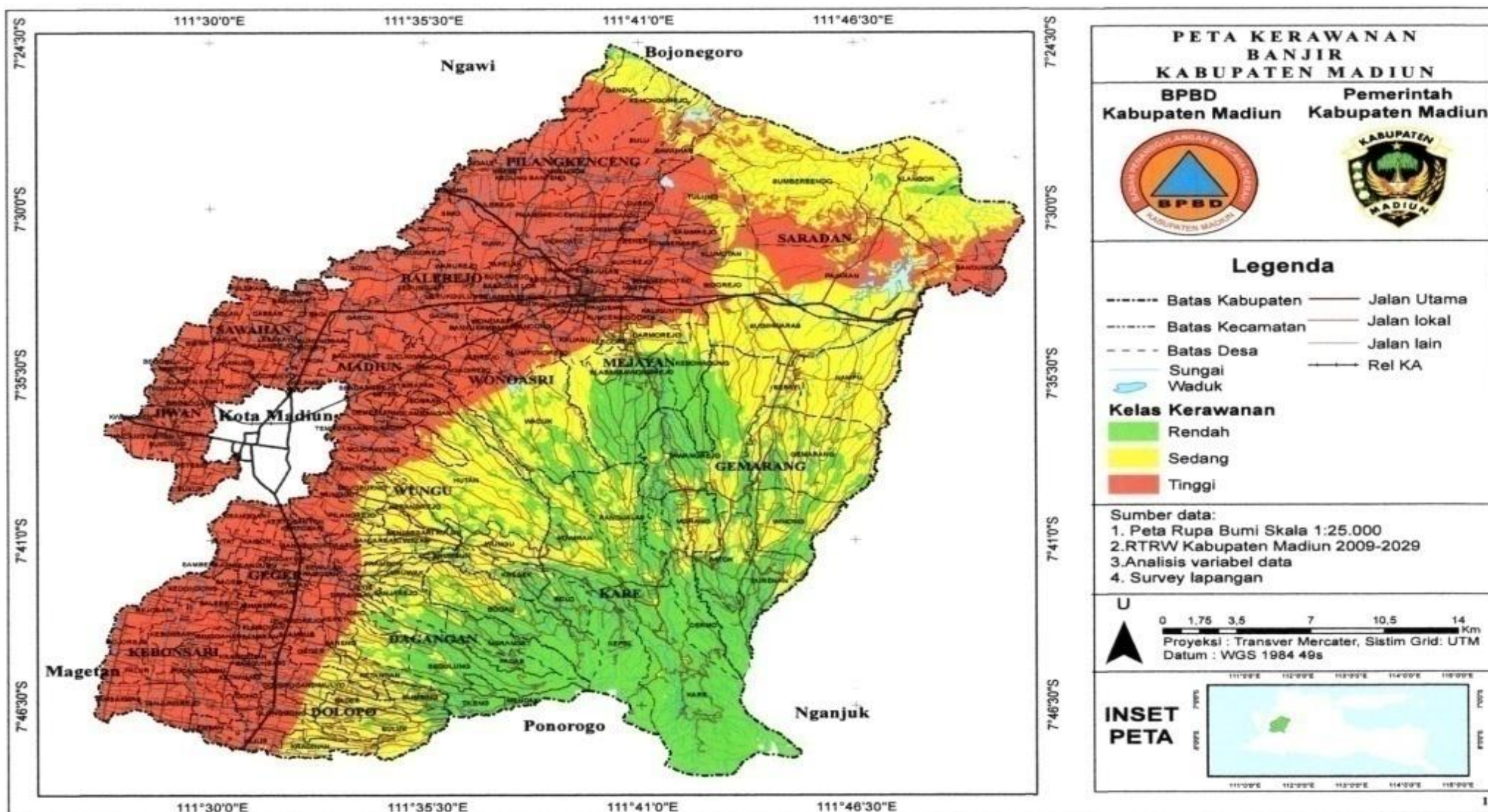
Apabila ditinjau dari kondisi topografi Kabupaten Madiun, lokasi banjir pada umumnya merupakan lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo.

Tabel 2.15
Distribusi Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Luas wilayah rawan (ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	BALEREJO	0	0	5445.061
2	DAGANGAN	4030.04	3026.29	1179.63
3	DOLOPO	368.3369	2638.731	2148.121
4	GEGER	5.48E-05	205.371	3806.221
5	GEMARANG	5819.547	6994.717	0
6	JIWAN	0	0	3406.52
7	KARE	11242.29	2873.802	0.001033
8	KEBONSARI	0	0	4994.379
9	MADIUN	76.28907	401.262	3250.078
10	MEJAYAN	2666.42	1632.729	1728.233
11	PILANGKENCENG	78.80148	1333.335	7391.66
12	SARADAN	241.1212	10833.88	7863.667
13	SAWAHAN	0	0	2331.989
14	WONOASRI	816.0288	1765.279	2695.779
15	WUNGU	1058.792	4017.691	2698.255
Total		26397.6	35723.09	48939.59

Sumber: BPBD Kab. Madiun, Tahun 2016

Gambar 2.9
Peta Kawasan Banjir Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun, Tahun 2022

Selain itu kondisi klimatologi Kabupaten Madiun juga mempengaruhi kejadian bencana banjir dan kekeringan. Rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Berdasarkan data-data kejadian bencana di Kabupaten Madiun, bencana banjir sebagian besar terjadi pada saat musim hujan di sekitar awal tahun. Beberapa daerah yang rawan akan bencana banjir seperti Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun, Kecamatan Balerejo Kecamatan Pilangkenceng, dan Kecamatan Saradan. Banjir di Kabupaten Madiun selain diakibatkan oleh hujan lokal dengan intensitas curah hujan yang tinggi juga dapat diakibatkan oleh luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo. Genangan banjir sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati kawasan perkotaan Mejayan. Banjir besar yang pernah terjadi pada tahun 2018 menggenangi beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Wungu, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Saradan, Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Madiun.

2.1.1.8.3. Kawasan Rawan Puting Beliung

Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun Juga meliputi bencana angin Topan atau angin puting beliung. Sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tercatat 100 kejadian bencana Angin puting beliung.

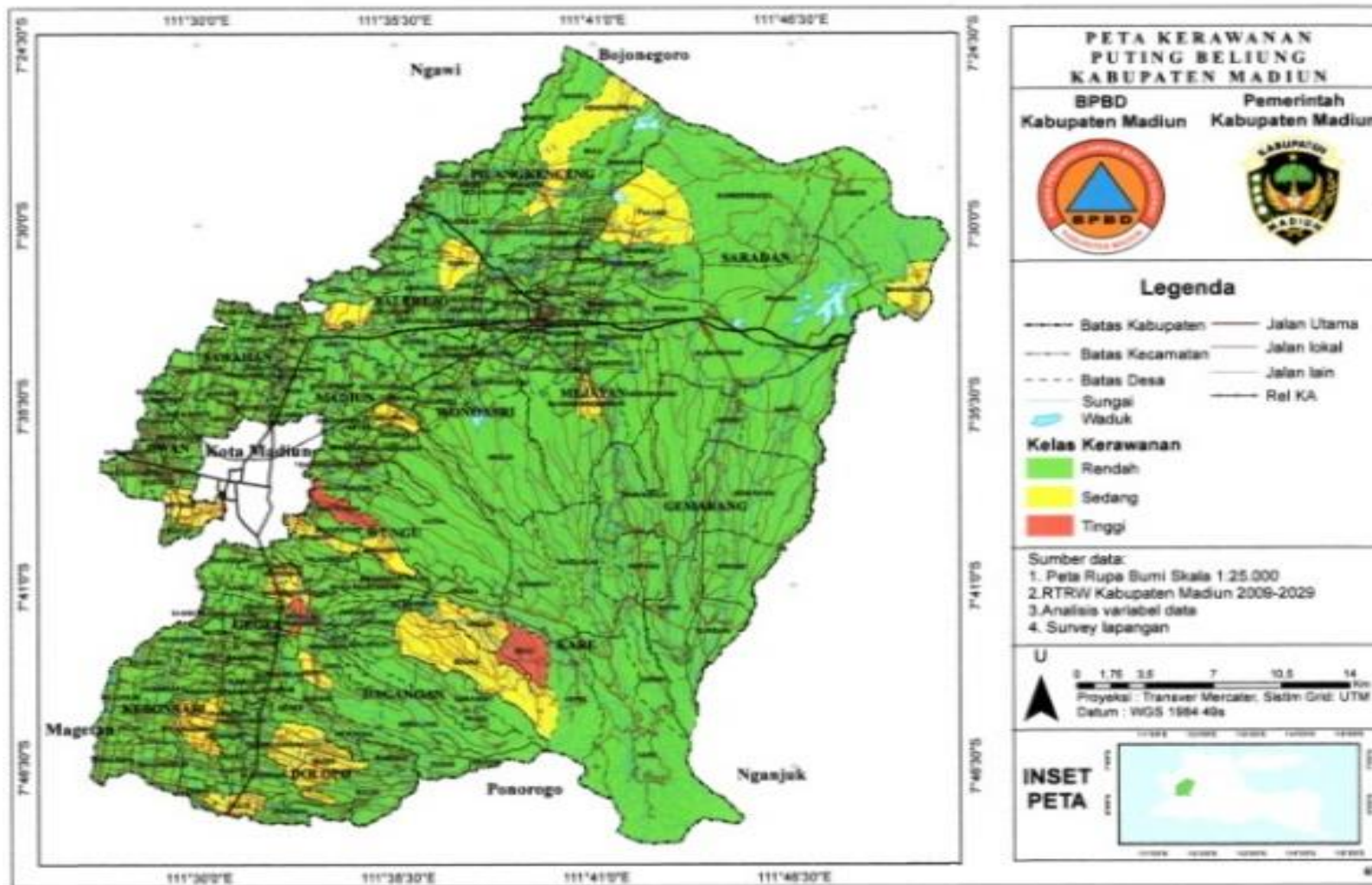
Tabel 2.16

Distribusi Wilayah Rawan Bencana Putting Beliung di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Luas wilayah rawan (ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	BALEREJO	4690.991	803.9062	0
2	DAGANGAN	7786.953	326.3198	148.8891
3	DOLOPO	3674.802	1528.013	0
4	GEGER	3735.201	303.7272	0
5	GEMARANG	12883.99	0	0
6	JIWAN	3025.019	467.0264	0
7	KARE	11645.7	1981.429	586.134
8	KEBONSARI	4411.224	642.186	0
9	MADIUN	3505.413	237.8221	0
10	MEJAYAN	5778.037	249.3446	0
11	PILANGKENCENG	7429.46	1441.813	0
12	SARADAN	17001.23	1990	0
13	SAWAHAN	2360.801	0	0
14	WONOASRI	5277.087	0	0
15	WUNGU	6228.592	1247.007	322.2729
Total		99434.49	11218.59	1057.296

Sumber: BPBD Kab. Madiun , Tahun 2016

Gambar 2.10
Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun



Sumber : BPPD Kab. Madiun , Tahun 2022

Gambaran lebih rinci terkait bencana yang terjadi di Kabupaten Madiun, kami sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Kejadian Bencana Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angin Topan/Puting Beliung	1	7	32	29	31
2	Banjir	9	13	36	26	48
3	Tanah Longsor	27	9	5	12	10
4	Kebakaran	1	2	22	11	37
5	Gempa Bumi	0	0	1	0	0

Sumber : BPPD Kab. Madiun, Tahun 2022

2.1.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.9.1 Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air meliputi kapasitas lingkungan dalam mendukung penggunaan sumberdaya air di Kabupaten Madiun. Aspek pengukuran daya dukung air meliputi ketersediaan air dan kebutuhan air. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh koefisien limpasan yang menginterpretasikan jumlah air limpasan yang dihasilkan oleh hujan di setiap jenis penggunaan lahan yang berbeda. Kebutuhan air diukur berdasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung air di suatu wilayah. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika $SA > DA$, status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika $SA < DA$.

Tabel 2.18
Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Madiun

Tahun	2019	2029
Ketersediaan (juta m³/tahun)	1264,26	1209,21
Luas Area (Ha)	101.086	101.086
Curah Hujan (mm/tahun)	1603	1603
Koefisien	0,78	0,75
Kebutuhan Air (juta m³/tahun)	622,5	817,6
Domestik (juta m ³ /tahun)	32,9	35,9
Non Domestik (juta m ³ /tahun)	9,9	10,8
Industri (juta m ³ /tahun)	1,2	6,8
Pertanian (juta m ³ /tahun)	574,9	760,4
Peternakan (juta m ³ /tahun)	3,6	3,7
Daya Dukung Air (DDA)	2,03	1,48
Keterangan	Surplus	Surplus

Sumber: Analisis Tim, 2021

Hasil perhitungan daya dukung air permukaan di Kabupaten Madiun ditunjukkan pada tabel 3.45. Ketersediaan air diproyeksikan

mengalami penurunan dari 1264,26 juta m³/tahun menjadi 1209,21 juta m³/tahun dengan asumsi rata-rata curah hujan yang relatif konstan. Perubahan penggunaan lahan dari 2019 sampai 2029 diperkirakan akan memberikan kontribusi terhadap perubahan koefisien cadangan air $\pm 0,03$ yang berdampak terhadap menurunnya ketersediaan air di Kabupaten Madiun. Disisi lain jumlah kebutuhan air memiliki trend meningkat dari 622,5 juta m³/tahun pada tahun 2019 menjadi 817,6 juta m³/tahun pada tahun 2029. Sektor Pertanian memiliki kontribusi paling besar terhadap meningkatnya kebutuhan air di Kabupaten Madiun. Hasil analisis daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara potensi ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air. Secara lebih jelas daya dukung air permukaan Kabupaten Madiun dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DDA}_{2019} &= \mathbf{1264,26} \text{ juta} / 622,5 \text{ juta} \\ &= \mathbf{2,03} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{DDA}_{2029} &= \mathbf{1209,21} \text{ juta} / 817,6 \text{ juta} \\ &= \mathbf{1,48} \end{aligned}$$

Keterangan :

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Madiun Tahun 2019 berdasarkan perhitungan di atas yakni 2,03 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori aman atau baik. Sedangkan pada tahun 2029 nilai DDA Kabupaten Madiun menjadi 1,48 yang juga masih dalam kategori aman atau baik. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun diproyeksikan maemiliki kondisi surplus air sampai tahun 2029 atau daya dukung air yang masih terkendali.

2.1.1.9.2 Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan diperoleh melalui pendekatan kuantitatif untuk memetakannya serta menggunakan sistem grid skala ragam. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Konsep skala ragam (*multiscale*) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan.

Tabel 2.19
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Madiun

Tahun	Tingkat Produktivitas Lahan Sawah / Supply Beras (ton/kap/th)	Keterangan	Daya Dukung Lahan (α)	Keterangan
2019	0.31	Surplus	2.47	Swasembada Pangan
2020	0.33	Surplus	2.66	Swasembada Pangan
2024	0.38	Surplus	3.00	Swasembada Pangan
2029	0.43	Surplus	3.44	Swasembada Pangan

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, 2020

Hasil perhitungan daya dukung pangan yang ditunjukkan pada Tabel 2.13 memperlihatkan bahwa secara umum penyediaan pangan di Kabupaten Madiun masih akan mengalami surplus serta memungkinkan adanya swasembada pangan sampai tahun 2029. Ketersediaan pangan hasil panen padi atau beras masih relatif lebih besar disbanding dengan kebutuhan konsumsi pangannya selama periode 2019-2029.

2.1.1.9.3 Daya Dukung Lahan Bangun

Daya dukung lahan bangun (DDLB) menunjukkan kapasitas atau kemampuan lahan untuk pengembangan lahan bangunan. DDLB Kabupaten Madiun secara umum termasuk dalam klasifikasi baik artinya pemanfaatan lahan terbangun masih cukup terbuka untuk perencanaan dan pembangunan daerah ke depan. Namun untuk masa yang akan datang, harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Madiun.

Tabel 2.20
Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kabupaten Madiun

Tahun	LB	LTp	LTb	Lw	α	DDLB	Keterangan
2019	14387	4316.105	18703	101086	0.7	5.4	Baik
2029	18707	5611.997	24319	101086	0.7	4.2	Baik

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, 2020

Keterangan:

LB : Luas lahan bangunan (Ha)

LTp : Luas lahan untuk infrastruktur (Permen PR No 11 Tahun 2008 : 30% luas lahan bangunan)

LTb : Luas lahan terbangun (LB+LTp)

Lw : Luas wilayah (Ha)

α : Koefisien luas lahan terbangun maksimal (UU No. 26 Tahun 2017: 70%) DDLB : Daya dukung lahan untuk bangunan ($(\alpha \times Lw)/LTb$)

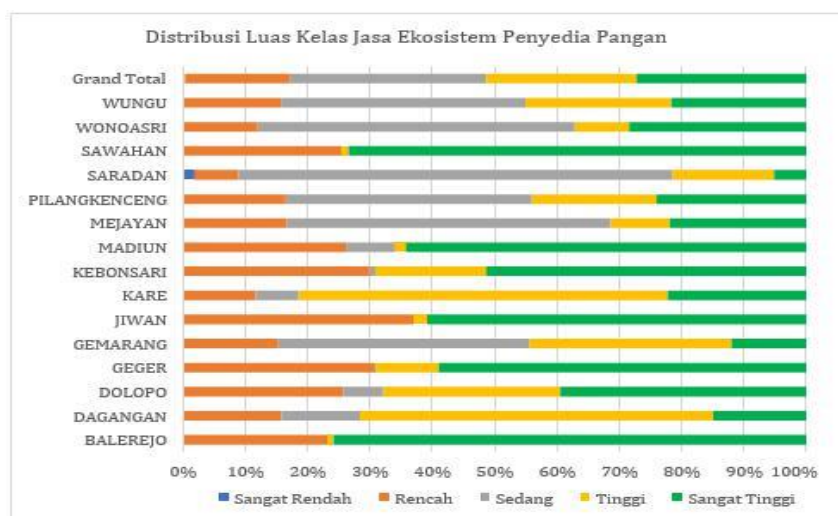
2.1.1.9.4 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Kinerja layanan atau jasa ekosistem berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari 20 jenis yang terbagi atas empat kelompok utama yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan. Berikut ini beberapa jasa ekosistem yang cukup penting bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Madiun.

2.1.1.9.4.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis- jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah h, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Gambar 3.23 menunjukkan distribusi serta luas jasa penyedia pangan di setiap Kecamatan di Kabupaten Madiun. Jasa ekosistem tersebut di bagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Gambar 2.11
Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi memberikan gambaran/cerminan bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan tinggi. Diamati dari grafik pada Gambar menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Madiun didominasi oleh jasa ekosistem penyedia pangan dengan kelas sedang. Sekitar 350.456,57 ha atau 31,35% lahan merupakan kategori sedang dan sekitar 348,43 ha atau sekitar 0,31% termasuk dalam kategori sangat rendah. Kecamatan dengan luasan jasa ekosistem penyedia pangan terluas pada kelas sedang adalah Kecamatan Saradan dengan luas lahan 13.229,5 ha. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Jiwan dengan luas lahan 0 ha. Sedangkan untuk kelas sangat rendah sendiri yang tertinggi luasannya adalah Kecamatan Saradan dengan luas 342,18 ha.

Kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Madiun memang sangat dominan pada kategori sedang. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa distribusi jasa ekosistem penyedia pangan kategori sangat tinggi dan tinggi merupakan kelas jasa ekosistem yang dominan setelah kelas jasa ekosistem kategori sedang. Luas jasa ekosistem kategori sangat tinggi memiliki luas 30418,36 ha atau sekitar 27,21% dari luas wilayah sedangkan jasa ekosistem kategori tinggi memiliki luasan 27.007 ha atau sekitar 24,16%.

Luasnya lahan yang memiliki kategori jasa ekosistem dari sangat tinggi, tinggi dan sedang dipengaruhi luasnya tutupan lahan yang masih berupa sawah dan tegalan. Luasan kawasan pertanian sawah yang direncanakan kurang lebih 31.594 ha (kurang lebih 31% dari luas wilayah Kabupaten Madiun) dan dari rencana luas lahan wasah tersebut, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha. Sedangkan luas lahan tegalan ialah 2.643 atau sekitar 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun.

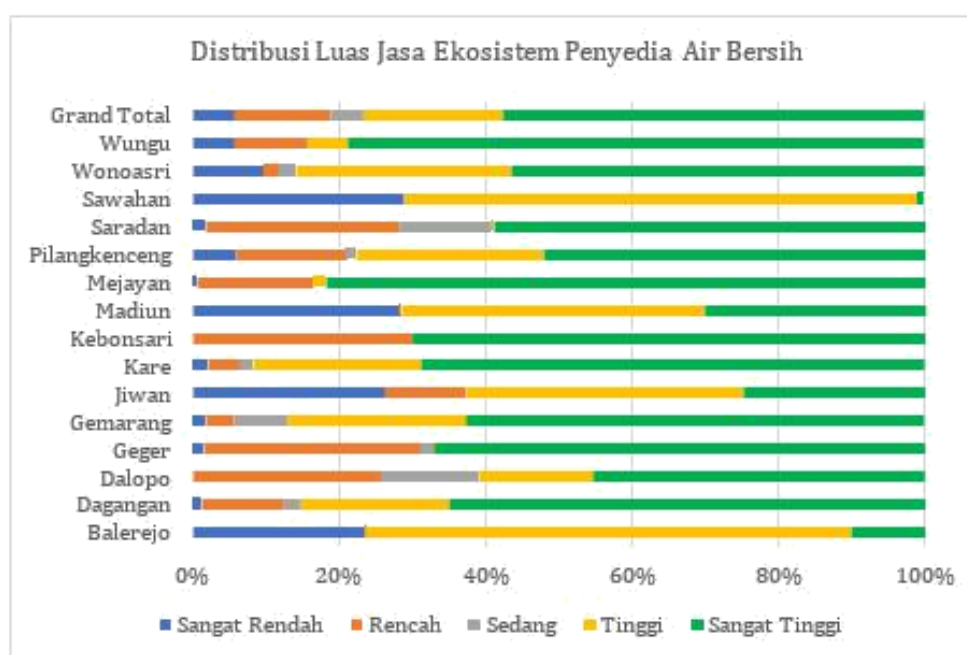
2.1.1.9.4.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan

dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan.

Sama halnya dengan jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih dikategorikan ke dalam lima kelas. Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan air bersih untuk penggunaan oleh makhluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi mempunyai daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih manusia. Tabel dan gambar di bawah menunjukkan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Madiun. Sebesar 64.258,26 ha atau 57,48% dari luas wilayah Kabupaten Madiun diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem penyedia air bersih sangat tinggi, sementara 21.313,77 ha (19,7%) diklasifikasikan sebagai area dominan dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih sedang.

Gambar 2.12
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Dua klasifikasi ini mendominasi di Kabupaten Madiun yang menandakan bahwa daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Madiun masih baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun secara morfologi merupakan Dataran Fluvio Vulkanik. Kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluvio vulkanik umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. Hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil,

dan kerakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Ekosistem dataran fluvio vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai dengan kemiringan lereng secara umum 0-3% dan pada beberapa lokasi mempunyai kemiringan lereng 3-8%. Dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Daya dukung penyedia air bersih yang masih baik juga dibuktikan dengan data prediksi jumlah kebutuhan air baku pada tahun 2029 di Kabupaten Madiun ialah 325,08 liter/detik, sedangkan kapasitas terpasang PDAM hingga tahun 2008 sebesar 383 liter/detik.

Artinya, hingga 10 tahun mendatang kapasitas yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air di Kabupaten Madiun.

Kecamatan dengan dengan luasan jasa ekosistem penyedia air bersih terluas pada kelas sangat tinggi adalah Kecamatan Saradan dengan luas lahan 11173,99 ha, sedangkan pada kelas tinggi, Kecamatan Gemarang merupakan kecamatan dengan luas terbesar yaitu 4171,54 ha. Analisis jasa ekosistem penyedia air bersih yang dilakukan diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan Kabupaten Madiun, dengan kondisi lingkungan yang terjaga serta didukung dengan keberadaan ruang terbuka hijau dan vegetasi yang terus ditingkatkan jumlahnya maka kebutuhan air di Kabupaten Madiun dapat dipenuhi di masa yang akan datang.

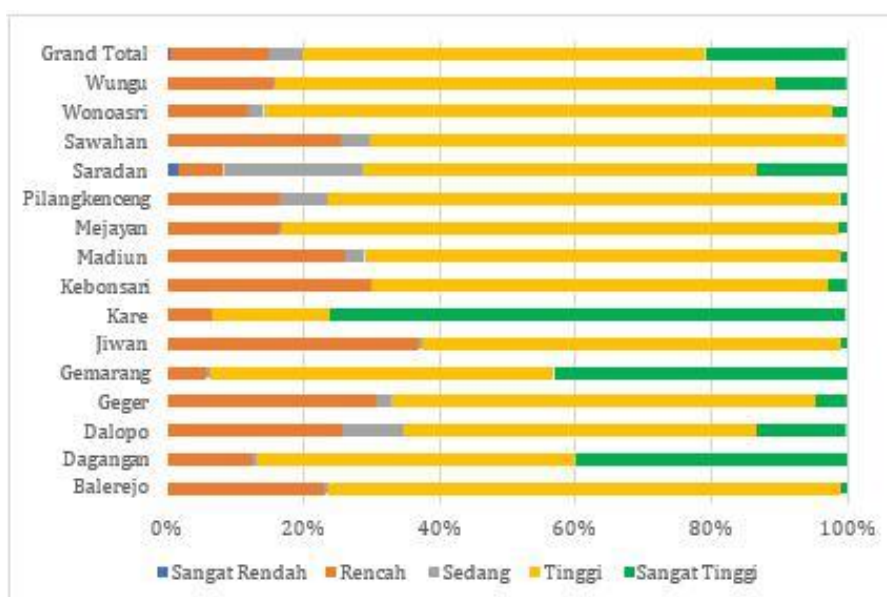
2.1.1.9.4.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem Pengaturan (*regulating*) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Terdapat delapan jenis jasa ekosistem pengatur, yang pertama dan akan dipaparkan dalam pembahasan ini adalah jasa ekosistem pengatur iklim. Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang

bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Untuk menentukan daya tampung yang dimiliki suatu kawasan dilakukanlah klasifikasi jasa ekosistem di wilayah tersebut menjadi lima kelas yaitu kelas jasa pengaturan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Klasifikasi ini dapat membantu untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan perencanaan wilayah, area dengan jasa ekosistem kelas tinggi dan sangat tinggi diartikan bahwa area tersebut memiliki kemampuan daya tampung lingkungan yang baik. Persebaran kelas jasa ekosistem di Kabupaten Madiun dipaparkan dalam tabel di bawah.

Gambar 2.13
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Secara umum perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim yang sangat baik. Luasan jasa ekosistem pengaturan iklim yang paling dominan berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi dengan luas berturut turut yaitu 66.331,92 ha (59,33%) dan 23.027 ha (20,60%). Tingginya jasa pengaturan iklim di Kabupaten Madiun diasumsikan terjadi karena lahan di Kabupaten Madiun masih banyak berupa area bervegetasi seperti lahan pertanian, hutan, dan kebun/tegalan. Menurut data penggunaan lahan, area bervegetasi non bangunan di Kabupaten Madiun pada tahun 2016 ialah seluas 75.671,16 ha atau sekitar 67,7% dari luas wilayah Kabupaten Madiun. Area bervegetasi dengan luasan yang cukup akan mengurangi efek pemanasan akibat radiasi matahari karena

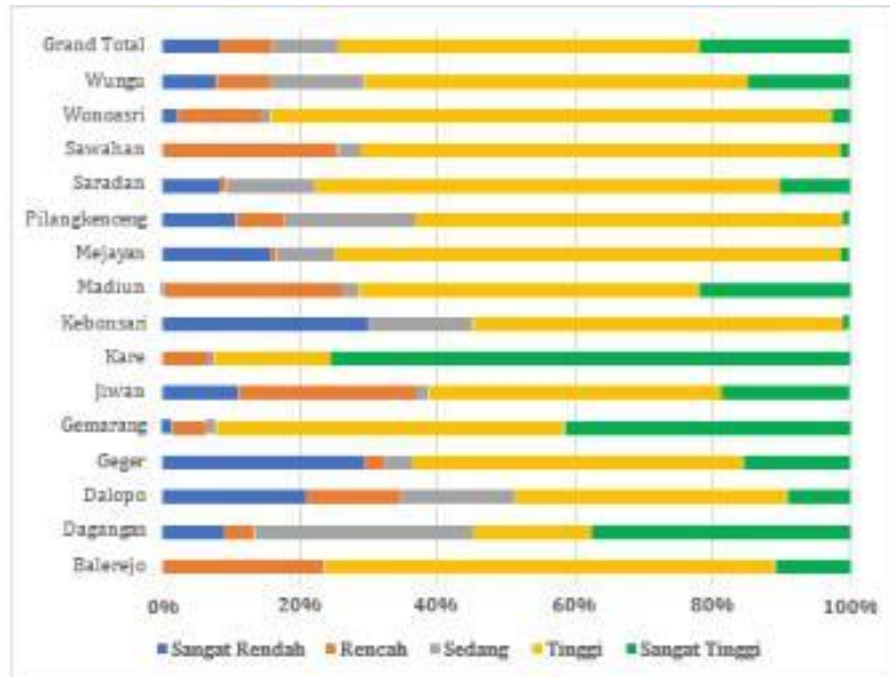
kemampuannya dalam mengintersepsi, merefleksikan, dan mengabsorpsi serta mentransmisikan sinar matahari.

2.1.1.9.4.4 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir (R2) sangat dipengaruhi oleh Siklus hidrologi. Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir di Kabupaten Madiun yang memiliki kelas tinggi yang relatif luas dan melebihi separuh luas wilayah secara keseluruhan yaitu 58.634,33 ha atau sekitar 52,45%. Luas tertinggi kedua ialah pada kategori sangat tinggi dengan luasan 24.425,41 ha atau 21,85%. Tingginya luasan lahan yang memiliki pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Madiun berkaitan dengan luas tutupan lahan yang terbangun yang memiliki luasan lebih rendah dibandingkan area non terbangun. Area terbangun memiliki luasan kurang lebih 36.121,15 ha atau hanya sekitar 32,3% dari luas wilayah keseluruhan. Persentase luas lahan nonterbangun yang lebih besar dan terdapatnya vegetasi memungkinkan vegetasi yang berada di kecamatan ini mampu mencegah runoff berlebihan yang sering memicu terjadinya banjir karena kemampuan akar serta seresah yang mampu menyerap serta menyimpan air sehingga akan menghambat atau menunda bagian hujan ini mencapai limpasan permukaan dan memberi kesempatan bagi air untuk melakukan infiltrasi.

Gambar 2.14
 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

2.1.1.9.4.5 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

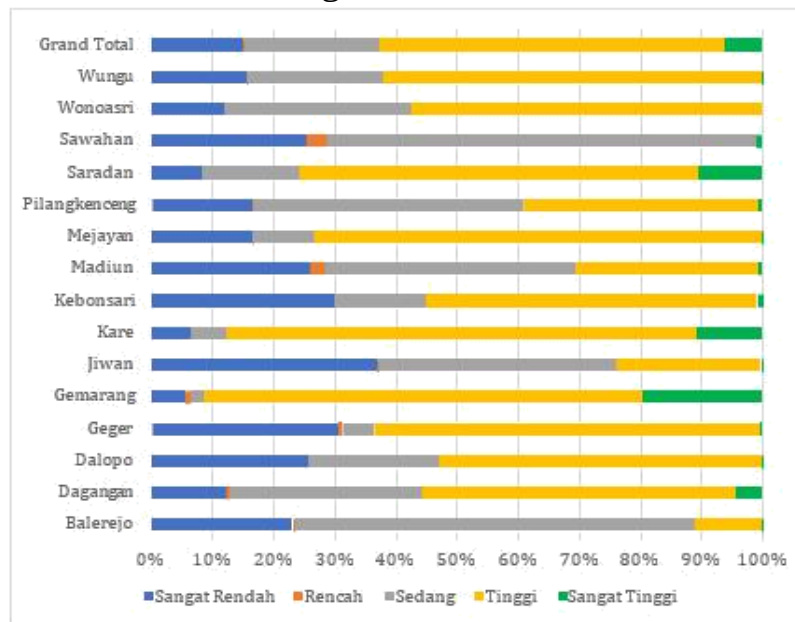
Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa Gambar 3.30. yang merupakan peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam di Kabupaten

Madiun memiliki klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Gambar 2.15

Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Secara umum, Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan pencagahan dan perlindungan bencana dalam kategori tinggi sampai sedang dengan lahan berturut-turut seluas 63.140,96 ha atau 58,48% dan 24.543,17 ha atau 21,95%. Diantara luas lahan dengan jasa ekosistem pengaturan dan pengendalian terhadap bencana yang tinggi, terdapat 15% lahan dengan fungsi jasa ekosistem yang sangat rendah atau setara dengan 16.771,47 ha. Terdapatnya fungsi jasa ekosistem kategori sangat rendah tersebut menandakan bahwa di Kabupaten Madiun masih mempunyai kerentanan bencana. Hal tersebut dikarenakan secara geologis, Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah utara Kecamatan Saradan.

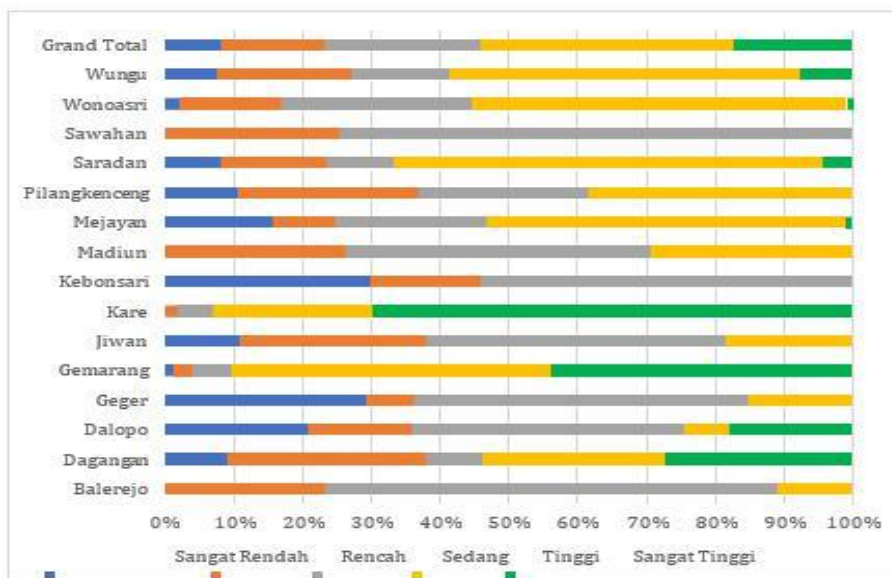
Di daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klangon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa goncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya – timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral). Selain itu secara hidrologi, Kabupaten Madiun juga memiliki kerentanan terhadap bencana banjir karena dilalui oleh 41 sungai

sehingga memungkinkan terjadinya banjir luapan sungai terutama pada daerah-daerah yang terdapat di lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo. Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun Juga meliputi bencana angin Topan atau angin puting beliung. Sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tercatat 61 kejadian bencana Angin puting beliung.

2.1.1.9.4.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara. sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor - faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Pada gambar 3.32 dan gambar 3.33 dapat terlihat daerah-daerah di Kabupaten Madiun yang memiliki fungsi pengaturan terhadap kualitas udara yang terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi (hijau tua), Tinggi (hijau muda), sedang (kuning), rendah (merah muda) dan sangat rendah (merah tua).

Gambar 2.16
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yang tinggi sampai sedang. Seluas 41.134,82 ha area di Kabupaten Madiun dikategorikan

sebagai kelas jasa ekosistem tinggi dan 25.255,45 ha dikategorikan sebagai kelas jasa ekosistem sedang. Luas yang paling kecil ialah kelas jasa ekosistem sangat rendah dengan luasan 9.431,06 ha. Daya dukung lingkungan pengaturan kualitas udara yang dimiliki Kabupaten Madiun berkaitan dengan tutupan vegetasi seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya. Perbaikan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara wilayah dengan kelas sangat rendah dapat dilakukan secara biologis dan fisik, secara biologis penanaman pohon dan vegetasi lain akan membantu proses fotosintesis yang menghasilkan udara bersih yang dapat dimanfaatkan oleh manusia juga organisme hidup lainnya dalam menjalankan kehidupan. Proses fisik sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas aktivitas manusia yang bisa menimbulkan pencemaran terhadap udara seperti pemantauan uji emisi kendaraan

2.1.1.10 DEMOGRAFI

2.1.1.10.1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Madiun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Madiun dari tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun
Tahun 2017-2021

NO	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	(%)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	2017	365.550	365.779	731.329	5.513	0,75
2	2018	368.957	373.302	742.259	10.930	1,47
3	2019	372.047	377.019	749.066	6.807	0,97
4	2020	374.371	379.794	754.165	5.099	0,68
5	2021	374.235	380.221	754.456	235	0,0036

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2022

Penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2021 berjumlah 754.456 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 374.235 jiwa dan perempuan sebanyak 380.221 jiwa. Data jumlah penduduk per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	KEBONSARI	29.649	30.846	60.495
2.	DOLOPO	30.540	31.297	61.837
3.	GEGER	32.656	33.575	66.231
4.	DAGANGAN	27.074	27.128	54.202
5.	KARE	17.193	17.245	34.438
6.	GEMARANG	18.122	17.810	35.932
7.	WUNGU	29.379	30.009	59.388
8.	MADIUN	19.168	20.056	39.224
9.	JIWAN	28.975	29.724	58.699
10.	BALEREJO	22.458	23.028	45.486
11.	MEJAYAN	23.668	23.787	47.455
12.	SARADAN	36.567	36.374	72.941
13.	PILANGKENCENG	27.941	28.150	56.091
14.	SAWAHAN	12.788	13.097	25.885
15.	WONOASRI	18.057	18.095	36.152
Jumlah		374.235	380.221	754.456

Kecamatan Saradan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 72.941 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Sawahan yaitu 25.885 jiwa.

Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Rasio Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk
di Kabupaten Madiun Tahun 2021

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Kebonsari	96,12
2	Geger	97,36
3	Dolopo	97,33
4	Dagangan	98,80
5	Wungu	97,90
6	Kare	99,73
7	Gemarang	102,11
8	Saradan	100,16
9	Pilangkenceng	98,78
10	Mejayan	99,59
11	Wonoasri	98,79
12	Balerejo	97,07
13	Madiun	95,17
14	Sawahan	97,56
15	Jiwan	98,07
Jumlah		98,07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Dilihat dari *sex ratio*, maka ada nilai tertinggi di Kecamatan Gemarang dengan nilai 1,02 dan nilai terendah Kecamatan Madiun dengan nilai 0,95.

2.1.1.10.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Keadaan penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021

Kelompok Umur	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
0 - 9	89.886	93.050	91.822	90.382	88.745
10 - 19	94.511	97.261	100.926	101.243	101.362
20 - 29	98.303	97.619	98.108	100.616	100.926
30 - 39	109.340	107.102	105.782	107.280	104.581
40 - 49	115.415	113.993	113.527	118.225	117.297
50 - 59	103.281	106.130	107.631	108.927	109.736
60 - 69	67.742	73.158	76.327	76.712	78.445
> 70	49.516	53.946	54.943	50.780	52,264
JUMLAH	727.994	742.259	749.066	754.165	754.456

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 40-49 tahun, diikuti kelompok umur 30-39 tahun dan kelompok usia 50-59 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia produktif. Dari data tersebut diatas dapat dihitung perkembangan angka ketergantungan (*dependency ratio*) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) di
Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Umur 15-64	Jumlah Penduduk Umur 0-14 + Umur > 65	DR
1	2017	509.665	216.151	42,41
2	2018	511.184	220.145	43,07
3	2019	515.045	227.214	44,11
4	2020	519.996	229.070	44,05
5	2021	527.874	226.582	42,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, Tahun 2022

Dilihat dari kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia, diperoleh nilai angka ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 44,05 pada tahun 2020 menjadi sebesar 42,92 artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban 42 jiwa yang tidak produktif. Oleh karena itu, angka beban tanggungan Kabupaten Madiun dikategorikan rendah. Kategorisasi angka beban tanggungan yaitu:

- Angka beban tanggungan tinggi : ≥ 70
- Angka beban tanggungan sedang : 51 – 69
- Angka beban tanggungan rendah : ≤ 50

2.1.1.10.3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan situasi penyebaran tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat suatu wilayah.

Gambaran tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak /belum sekolah	54.214	58.466	112.680
2.	Belum tamat SD/ sederajat	74.826	86.864	161.690
3.	Tamat SD/ sederajat	58.013	60.742	118.755
4.	SLTP/ sederajat	67.462	66.301	133.763
5.	SLTA/ sederajat	102.271	85.252	187.523
6.	D-I/II	1.014	1.644	2.658
7.	Akademi /D-III /sarjana muda	3.102	4.865	7.967
8.	D-IV/Strata-I	12.426	15.425	27.851
9.	Strata-II	868	634	1.502
10.	Strata-III	39	28	67
Jumlah		374.235	380.221	754.456

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan terbanyak penduduk di Kabupaten Madiun adalah SLTA/ sederajat, urutan kedua belum tamat SD/ sederajat dan diikuti pada urutan ketiga terbanyak adalah tamat SLTP/ sederajat.

2.1.1.10.4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebanyak 754.165 Jiwa, dan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 754.456 jiwa, atau mengalami penambahan sebanyak 291 Jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk masing-masing kecamatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021
Kabupaten Madiun

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2021	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1.	KEBONSARI	60.495	0,0761
2.	DOLOPO	61.837	0,0144
3.	GEGER	66.231	0,0038
4.	DAGANGAN	54.202	0,0093
5.	KARE	34.438	0,0067
6.	GEMARANG	35.932	0,0139

7.	WUNGU	59.388	0,0058
8.	MADIUN	39.224	-0,0064
9.	JIWAN	58.699	-0,0054
10.	BALEREJO	45.486	-0,0033
11.	MEJAYAN	47.455	0,0036
12.	SARADAN	72.941	0,0099
13.	PILANGKENCENG	56.091	-0,0013
14.	SAWAHAN	25.885	-0,0061
15.	WONOASRI	36.152	0,0013
Jumlah		754.456	0,0036

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 2.28
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	5,40	5,17	5,02	2,07	3,69
2	Jawa Timur	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,57
3	Kab. Madiun	5,42	5,10	5,42	-1,69	3,34

Sumber: BPS, Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2021 mengalami *recovery* dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,34% dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,69%.

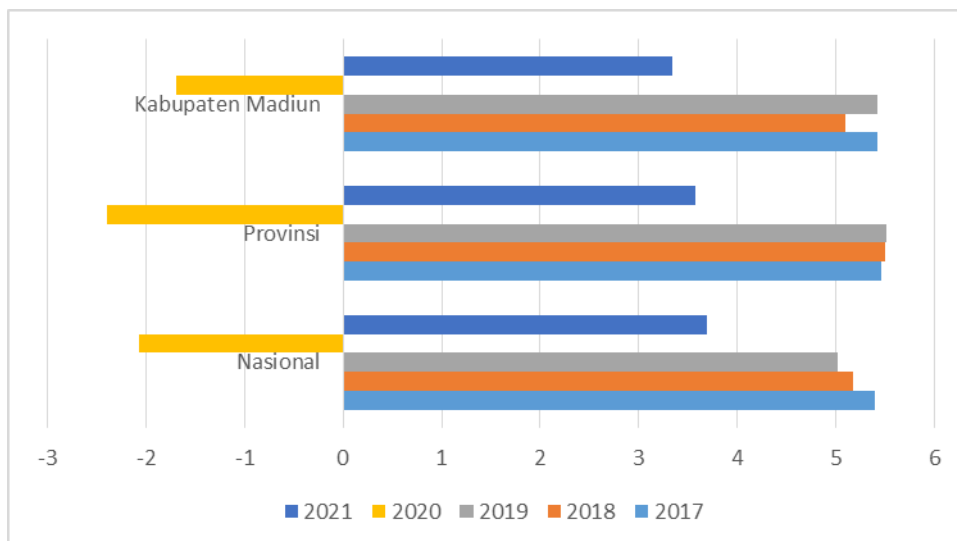
Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2021 terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 9,43%, diikuti lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 7,79% dan lapangan usaha industri pengolahan 7,05%. Lapangan usaha yang mengalami perlambatan, yaitu pertambangan dan penggalan sebesar -0,03 persen serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar -5,77 persen.

Dilihat dari kontribusinya maka terlihat bahwa Kabupaten Madiun berciri agraris. Dilihat dari perkembangannya, peran sektor pertanian semakin berkurang. Hal ini disebabkan adanya peralihan fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Madiun serta naiknya peran dari sector Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor pendukung pertanian yang utama disumbang dari sektor Industri Pengolahan dan saat ini masih didominasi oleh subsector Industri Makanan dan Minuman dengan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan struktur pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, salah satunya industri pengolahan yang berbahan baku dari hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Perdagangan merupakan sektor yang juga memberikan kontribusi pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Madiun. Perdagangan besar maupun eceran tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun. Kontribusi aktif perdagangan disebabkan semakin baiknya infrastruktur, sarana prasarana, transportasi yang menunjang perdagangan. Salah satu infrastruktur utama yaitu adanya kualitas jalan yang baik dan dilaluinya wilayah Kabupaten Madiun oleh jalur Tol Trans Jawa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional dapat disajikan pada table 2.21 diatas dan grafik 2.1 sebagai berikut :

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun dengan Provinsi
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 - 2021



Sumber: BPS Tahun 2022

2.1.2.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Peningkatan produktifitas, skala usaha, dan nilai tambah barang dan jasa melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna dan ekonomi kreatif di semua sektor merupakan strategi yang sangat efektif untuk mendorong peningkatan PDRB di semua sektor. Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.29
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017– 2021
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)
Kabupaten Madiun

No	Kategori	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.492.699,27	29,40	3.413.896,41	27,34	3.489.565,93	26,51	3.529.158,6	27,27	3.586.512,7	26,82
2	Pertambangan dan Penggalian	121.489,84	1,02	124.515,21	1,00	125.121,78	0,95	117.176,8	0,91	117.136,2	0,88
3	Industri Pengolahan	1.231.189,27	10,36	1.351.346,64	10,82	1.448.367,99	11,00	1.427.885,1	11,04	1.534.977,4	11,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.496,37	0,10	12.583,60	0,10	13.433,87	0,10	13.233,2	0,10	13.851,0	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.284,28	0,17	21.431,83	0,17	23.003,20	0,17	23.810,5	0,18	25.666,4	0,19

No	Kategori	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
6	Konstruksi	1.396.635,65	11,76	1.535.716,03	12,30	1.626.630,42	12,36	1.526.666,4	11,80	1.538.194,1	11,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.962.849,99	16,52	2.129.366,30	8,48	2.304.013,04	17,51	2.171.576,9	16,78	2.294.309,5	17,16
8	Transportasi dan Pergudangan	288.979,93		211.184,47		230.613,88	7,17	218.561,2	1,69	239.164,1	1,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	963.749,64		313.605,27		336.092,19	7,14	309.100,7	2,39	327.316,8	2,45
10	Informasi dan Komunikasi	342.134,85		1.040.985,96		1.115.302,78	3,57	1.196.824,2	9,25	1.261.805,9	9,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	216.238,73		370.963,05		384.197,38	6,06	380.011,0	2,94	383.465,4	2,87
12	Real Estate	40.497,24		232.646,68		246.753,62	6,62	255.848,0	1,98	262.860,2	1,97
14	Jasa Perusahaan	668.956,88		43.638,20		46.526,91	3,80	43.092,8	0,33	43.674,7	0,33
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	525.804,07		682.624,46		708.587,05	6,16	692.972,0	5,36	705.029,7	5,27
16	Jasa Pendidikan	104.394,34		560.188,96		594.679,30	7,27	603.620,4	4,66	606.662,6	4,54
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	297.525,01		112.549,19		120.729,96	6,24	131.928,8	1,02	124.321,9	0,93
18	Jasa lainnya	288.979,93		327.765,43		348.220,94	7,17	298.117,3	2,30	307.381,4	2,30
	PDRB	11.879.336,61		12.485.007,71		13.161.840,22	5,42	12.939.583,9	100,00	13.372.329,8	100,00

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2022

Tabel diatas merupakan gambaran PDRB dan kontribusi ekonomi menurut kategori selama tahun 2017 - 2021 atas dasar Harga Konstan Tahun 2010. Bersumber dari cara perhitungan tersebut, maka angka PDRB adalah angka yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari capaian PDRB Kabupaten Madiun pada Tahun 2021 mengalami *recovery* di hampir semua sector sebesar 13.372,329, 85 juta rupiah, sedangkan PDRB tahun 2021 atas dasar harga berlaku sebesar 19.760.012, 93 juta rupiah.

Tabel 2.30
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2017 – 2021
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Madiun

No	Kategori	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,193,231.2	31.71	5.238.173,45	29.70	5.462.368,54	28.85	5.584.019,16	29,52	5.614.613,8	28,41
2	Pertambangan dan Penggalian	168,427.8	1.03	178.352,01	1.01	181.271,30	0.96	171.624,03	0,91	175.489,2	0,89
3	Industri Pengolahan	1,670,199.4	10.20	1.879.372,63	10.66	2.054.893,70	10.85	2.080.044,45	11,00	2.336.552,6	11,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,257.8	0.09	17.316,58	0.10	18.781,35	0.10	18.694,95	0,10	20.013,9	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,066.8	0.15	26.667,86	0.15	28.290,29	0.15	9.358,12	0,16	31.915,0	0,16
6	Konstruksi	2,121,269.0	12.95	2.354.269,37	13.35	2.506.518,83	13.24	2.358.085,42	12,47	2.402.935,0	12,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,597,440.3	15.86	2.936.344,16	16.65	3.254.290,39	17.19	3.176.178,14	16,79	3.450.453,8	17,46
8	Transportasi dan Pergudangan	273,538.6	1.67	302,493.7	1.72	338,142.30	1.79	327.372,46	1,73	358.645,5	1,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	385,858.2	2.36	423,765.2	2.40	459,827.91	2.43	427.623,29	2,26	472.824,0	2,39
10	Informasi dan Komunikasi	1,064,849.2	6.50	1,150,789.7	6.53	1,248,415.84	6.59	1.344.341,37	7,11	1.420.460,7	7,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	444,342.8	2.71	494,350.5	2.80	516,855.25	2.73	518.329,58	2,74	543.369,1	2,75
12	Real Estate	272,176.4	1.66	303,331.9	1.72	330,169.10	1.74	350.005,25	1,85	362.643,2	1,84
14	Jasa Perusahaan	55,851.1	0.34	62,689.5	0.36	68,594.09	0.36	65.135,35	0,34	67.239,1	0,34
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	932,518.2	5.69	996,364.6	5.65	1,089,978.35	5.76	1.112.746,53	5,88	1.130.455,4	5,72
16	Jasa Pendidikan	664,239.2	4.06	720,324.5	4.08	777,423.67	4.11	799.763,51	4,23	801.217,8	4,05
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,472.2	0.78	139,069.5	0.79	153,036.97	0.81	170.051,63	0,90	163.983,9	0,83
18	Jasa lainnya	362,103.5	2.21	412,421.5	2.34	442,692.89	2.34	383.781,70	2,03	407.201,0	2,06
	PDRB	16,374,841.5	100	17,636,096.7	100	18,931,550.75	100	18.917.154,93	100	19.760.012,9	100

Tabel 2.31
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
 dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2017-2021
 Kabupaten Madiun

No	Kategori	2017		2018		2019		2020		2021	
		HHb	HHk	HHb	HHk	HHb	HHk	HHb	HHk	HHb	HHk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.71	29.40	29.70	27.34	28.85	26.51	29,52	27,27	28,41	26,82
2	Pertambangan dan Penggalian	1.03	1.02	1.01	1.00	0.96	0.95	0,91	0,91	0,89	0,88
3	Industri Pengolahan	10.20	10.36	10.66	10.82	10.85	11.00	11,00	11,04	11,82	11,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.17	0.15	0.17	0.15	0.17	0,16	0,18	0,16	0,19
6	Konstruksi	12.95	11.76	13.35	12.30	13.24	12.36	12,47	11,80	12,16	11,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.86	16.52	16.65	17.06	17.19	17.51	16,79	16,78	17,46	17,16
8	Transportasi dan Pergudangan	1.67	1.64	1.72	1.69	1.79	1.75	1,73	1,69	1,82	1,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.36	2.43	2.40	2.51	2.43	2.55	2,26	2,39	2,39	2,45
10	Informasi dan Komunikasi	6.50	8.11	6.53	8.34	6.59	8.47	7,11	9,25	7,19	9,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.71	2.88	2.80	2.97	2.73	2.92	2,74	2,94	2,75	2,87
12	Real Estate	1.66	1.82	1.72	1.86	1.74	1.87	1,85	1,98	1,84	1,97
14	Jasa Perusahaan	0.34	0.34	0.36	0.35	0.36	0.35	0,34	0,33	0,34	0,33
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.69	5.63	5.65	5.47	5.76	5.38	5,88	5,36	5,72	5,27
16	Jasa Pendidikan	4.06	4.43	4.08	4.49	4.11	4.52	4,23	4,66	4,05	4,54
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.78	0.88	0.79	0.90	0.81	0.92	0,90	1,02	0,83	0,93
18	Jasa lainnya	2.21	2.50	2.34	2.63	2.34	2.65	2,03	2,30	2,06	2,30
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2022

Tabel 2.32
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
 (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2019 - 2020
 Kabupaten Madiun

No	Kategori	Pertumbuhan 2020		Pertumbuhan 2021	
		Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.28	2.22	0,55	1,63
2	Pertambangan dan Penggalian	1.64	0.49	2,25	-0,03
3	Industri Pengolahan	9.34	7.18	12,33	7,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.46	6.76	7,05	4,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	6.08	7.33	8,71	7,79

No	Kategori	Pertumbuhan 2020		Pertumbuhan 2021	
		Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang				
6	Konstruksi	6.47	5.92	1,90	0,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.83	8.20	8,64	5,65
8	Transportasi dan Pergudangan	11.78	9.20	9,55	9,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.51	7.17	10,57	5,89
10	Informasi dan Komunikasi	8.48	7.14	5,66	5,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.55	3.57	4,83	0,91
12	Real Estate	8.85	6.06	3,61	2,74
14	Jasa Perusahaan	9.42	6.62	3,23	1,35
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.40	3.80	1,59	1,74
16	Jasa Pendidikan	7.93	6.16	0,18	0,50
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.04	7.27	-3,57	-5,77
18	Jasa lainnya	7.34	6.24	6,10	3,11
	PDRB	7.35	5.42	4,46	3,34

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2022

2.1.2.1.3. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Beberapa penyebab inflasi antara lain:

1. Adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi (*Demand Pull Inflation*)
2. Kenaikan biaya produksi (*Cost Push Inflation*)
3. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat
4. Inflasi dari luar negeri (*Imported Inflation*)
5. Inflasi dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat inflasi, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Permintaan barang dapat ditekan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berbelanja dalam jumlah yang wajar sesuai kebutuhan. Dianjurkan agar tidak membiasakan berbelanja dalam jumlah yang berlebihan dan menimbun barang untuk persediaan dalam jangka yang relatif lama. Sementara itu, penawaran barang

dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan produktifikasi semua sektor.

2. Efisiensi ekonomi untuk menekan biaya produksi dengan cara penyediaan fasilitas infrastuktur yang menunjang kegiatan ekonomi
3. Menekan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara menumbuhkan budaya menabung mulai usia dini.

Laju inflasi tahun kalender di Kabupaten Madiun pada bulan Desember 2021 berada pada angka 2,00 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2020.

Tabel 2.33
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
Madiun (%)	4,78	2,71	2,20	1,86	2,00	2,71
Jawa Timur (%)	4,04	2,86	2,12	1,44	2,45	2,58
Nasional (%)	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60

Sumber : Hasil koordinasi Bappeda Kabupaten Madiun dengan BPS, 2022

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mendeteksi ketimpangan pendapatan antar golongan yang terjadi. Semakin tinggi angka Gini Indeks maka semakin tinggi ketimpangan itu. Sampai dengan tahun 2021, tercatat angka gini indeks Kabupaten Madiun berada pada angka 0,36 (lihat tabel 2.24), sebuah angka yang rendah, Angka tersebut lebih rendah dari angka Jawa Timur maupun nasional yang pada tahun 2021 masing-masing mencapai 0,37 dan 0,38. Namun demikian terlihat kecenderungan angka ini terus meningkat. Angka Gini indeks yang rendah banyak ditemukan di daerah-daerah yang belum berkembang. Tampaknya terdapat hubungan yang cukup signifikan antara perkembangan ekonomi dengan Gini Indeks, semakin bercorak agraris sebuah wilayah, maka semakin rendah Gini Indeksnya.

Tabel 2.34
Indeks Gini Kabupaten Madiun dan Jawa Timur
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Madiun	0,32	0,33	0,33	0,36	0,36
2	Provinsi Jawa Timur	0,42	0,38	0,36	0,37	0,37

Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2022

Angka Indeks Gini yang rendah ini cukup selaras dengan angka yang lain, data kontribusi PDRB dan penduduk menunjukkan hal itu. Tabel 2.27 menyajikan fenomena ketidakmerataan antar golongan secara lebih detail. Selain menunjukkan fenomena ketidakmerataan, data ini juga menunjukkan produktivitas masing masing sektor ekonomi.

2.1.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Madiun dari tahun 2017-2021 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2021
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	IPM Kab. Madiun	70,27	71,01	71,69	71,73	71,88
2	IPM Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
3	IPM Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

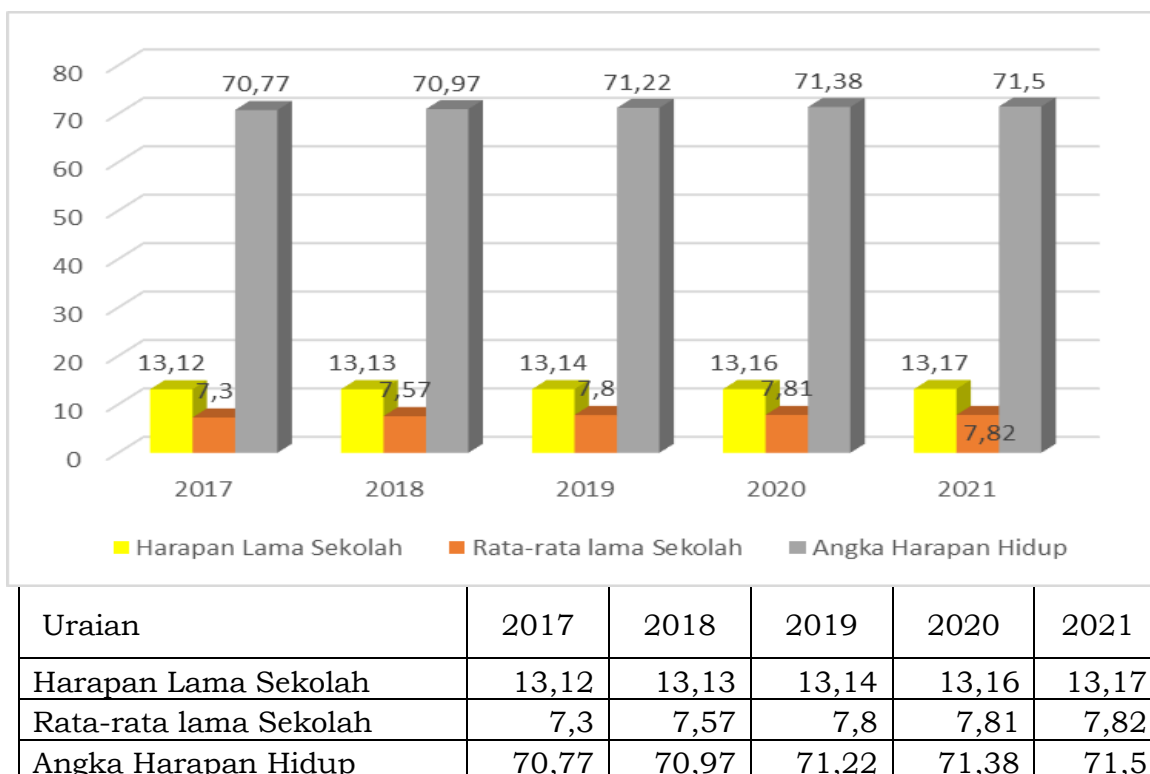
Sumber : BPS, 2022

Dari tabel di atas terlihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Madiun telah fokus terhadap pembangunan manusianya, sehingga dapat meningkatkan mutu penduduk Kabupaten Madiun sebagai subyek pembangunan. Dapat

dikatakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2021 sebesar 71,88 masih dibawah capaian Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 72,14. Capaian diatas angka 70 ini termasuk tinggi. Peningkatan IPM dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pendidikan yang diindikasikan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan daya beli masyarakat.

Indikator kesehatan yang dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi dimensi umur panjang dan sehat/cerminan kualitas fisik penduduk suatu daerah, indikator pendidikan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang mencerminkan *output* pengetahuan atau memberikan gambaran, kualitas non fisik penduduk, sedangkan indikator ekonomi dihitung dari kemampuan daya beli yang digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Grafik 2.2
Variabel pembentuk IPM Kabupaten Madiun
Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS, 2022

Indikator kesejahteraan IPM dapat dilengkapi dengan kinerja kesejahteraan yang lebih detail yakni penduduk miskin. Data yang tersedia menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun masih tinggi. Dilihat dari

perkembangannya, persentase penduduk miskin Madiun juga berfluktuasi.

Tabel 2.36
Indikator Kemiskinan Tahun 2017-2021
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Miskin (000)	83.43	77.75	71.91	78.30	81,61
2	Prosentase Penduduk Miskin	12.28	11.42	10,54	11,46	11,91
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	306.679	327.536	344.994	364.638	380.287
4	P1	2.65	1.60	1.53	1.63	1,65
5	P2	0.78	0.34	0.34	0.35	0,38

Sumber : BPS 2022

Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari masalah klasik pembangunan yang belum terpecahkan sampai sekarang karena bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektoral. Padahal pada satu sisi, pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Miskin merupakan suatu kondisi belum terpenuhinya hak – hak dasar kebutuhan primer individu secara manusiawi dan belum mampu mengembangkan kehidupannya secara lebih bermartabat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, dan budaya.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau yang dikenal dengan istilah P1 yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami kenaikan dan indeks Keparahan (P2) yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin berada dilevel diatasnya dari tahun sebelumnya,

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2019 jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, hal ini karena adanya program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun tepat sasaran dan tepat waktu.

Sedangkan pada tahun 2020 - 2021 akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi, sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Sedangkan Garis kemiskinan Kabupaten Madiun dari tahun 2017 – 2021 terus mengalami peningkatan, yaitu tahun 2017 sebesar 306,679 rupiah menjadi 380.287 rupiah pada tahun 2021.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut P1, dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2). Pada tahun 2020 dan 2021 indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 0,35 di tahun 2020 dan 0,38 di tahun 2021. Nilai P2 yang kembali meningkat ini menandakan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin mulai melebar.

Tabel 2.37
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Madiun
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Madiun	11,41	10,47	9,6	11,46	11,91
Provinsi Jatim	11,2	10,85	10,2	11,09	11,40

Sumber: BPS, Jawa Timur dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk miskin kabupaten madiun pada tahun 2020 sejumlah 78.300 jiwa atau 11,46. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin kabupaten madiun sejumlah 81.610 atau 11,91. Ada kenaikan sejumlah 3.310 jiwa atau 0,45 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021

Pada 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 sejumlah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa, dan pada Susenas September 2021 menjadi sebesar 9,71 persen atau 26,50 juta jiwa. Arahan Presiden saat Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%, validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa, Validasi data agar

mencakup nama (*by name*) dan lokasi (*by address*), Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran`

Pemerintah menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dalam pembangunan SDM, perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk menjadi prioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial.

Perlindungan sosial dapat diartikan bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan social. Bantuan social dengan mengoptimalkan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bantuan paket sembako, bantuan siswa miskin untuk siswa SD dan SMP sedangkan jaminan social dengan mengoptimalkan Jaminan Kesehatan Daerah/penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dapat berimplikasi kepada pembangunan perempuan.

Tabel 2.38
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun Dibandingkan Dengan Jawa Timur Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Madiun	91,57	91,13	91,81	91,79	91,77
2	Jawa Timur	91,07	90,77	90,91	91,07	91,67

Sumber: BPS Kabupaten Madiun, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Madiun pada Tahun 2021 mengalami penurunan dengan angka 91,77 dibandingkan tahun 2020 sebesar 91,79.

Indikator Persentase Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak yang di tindak lanjuti dengan target 100% dan realisasi 100%, pada tahun 2021 terdapat laporan 19 tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat ditangani sebanyak 19 kasus.

2.1.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

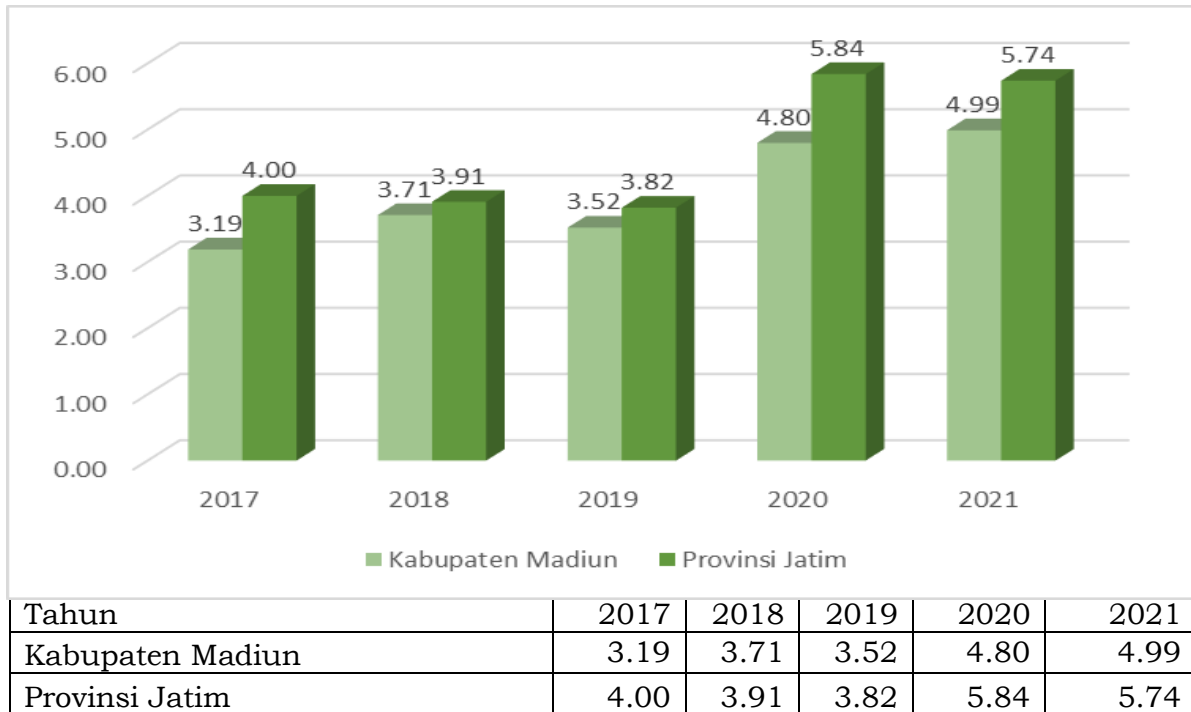
Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah adalah terserapnya penduduk pada lapangan kerja yang tersedia yang ditunjukkan oleh rasio penduduk bekerja. Ketika penduduk banyak bekerja artinya semakin sedikit penduduk yang tidak bekerja atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Tabel 2.31 menunjukkan rasio penduduk yang bekerja yang dicapai Madiun ternyata cukup fluktuatif, walaupun pada tahun terakhir terlihat berada pada tingkat yang cukup tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang tersedia. Sejalan dengan fluktuasi rasio penduduk yang bekerja, maka tingkat pengangguran terbukapun fluktuatif.

Tabel 2.39
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Penduduk Bekerja	97,1	96,29	96,48	95,20	95,01

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Madiun, 2022

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Madiun secara umum lebih rendah dari pada Jawa Timur, tetapi mengalami fluktuasi. TPT di Kabupaten Madiun disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Rata-rata jumlah usia produktif di Kabupaten Madiun tahun 2016 sampai dengan 2020 yang cukup besar yaitu sebesar 517.251 jiwa, pada tahun 2021 jumlah usia produktif (15-64 tahun) sebesar 527.874 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2019 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan bencana demografi karena kesenjangan *demand and supply*;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Madiun yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal; dan
5. Kurang optimalnya pengawasan terhadap tenaga kerja (lembaga/ perusahaan, dan pekerja).

2.1.2.1.7. . Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial (IKS) adalah merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama pada pemeluk agama. Aspek kesalehan social meliputi solidaritas social (kesediaan untuk memberi dan peduli kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan) , toleransi (mampu menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai pada orang lain serta tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda), kerjasama (melakukan pekerjaan atau aktifitas secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan atau mencapai tujuan bersama), adil (perilaku yang mampu bertindak sesuai proporsi, tersedianya kesempatan untuk mencapai tujuan bersama pula), dan stabilitas (tindakan yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu, merugikan dan melanggar kesejahteraan orang lain). Definisi Operasional, kesalihan sosial adalah skor yang diperoleh dari responden sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, yang diukur dengan; (1) Kepedulian Sosial (caring, giving), (2) Relasi Antarmanusia (kebhinnekaan), (3) etika dan budi pekerti, (4) Pelestarian Lingkungan, (5) Kepatuhan kepada Negara dan Pemerintah. Realitas dalam kehidupan beragama khususnya di Kabupaten Madiun, masih ada kesenjangan dalam keberagaman masyarakat yaitu : **Pertama**, belum sepenuhnya nilai-nilai ajaran keagamaan menjiwai perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari , **Kedua** Agama sebagai daya tangkal terhadap kecenderungan manusia berperilaku menyimpang dan bersikap anti sosial belum cukup optimal, **Ketiga**, kegiatan sosial keagamaan belum maksimal atau belum mencerminkan interaksi sosial dalam kehidupan beragama sehingga relasi sosial dalam kehidupan beragama belum maksimal dalam berkontribusi dalam pembangunan. Nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Indeks Kesalehan Social Kabupaten Madiun Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	Indeks kesalehan sosial	61,67	61,90	65,86

Pada tahun 2019 dan 2020 indeks kesalehan social Kabupaten Madiun masuk predikat baik sedangkan untuk tahun 2021 mendapat predikat tinggi.

2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Analisis kinerja fokus kesejahteraan social dilakukan terhadap indicator angka melek huruf yang diperbarui dengan angka harapan lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja.

2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.41

Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Dibandingkan dengan Jawa Timur Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Madiun	91,71	91,50	90,50	92,16	90,73
2	Jawa Timur	91,82	91,85	92,32	92,50	92,56

Sumber : BPS Jawa Timur Dalam Angka, 2022

Sejak Tahun 2017 sudah tidak dilakukan perhitungan Angka Melek Huruf karena dunia pendidikan telah berkembang sebagaimana ditetapkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui metode baru dimana pengukuran IPM tidak lagi menggunakan Angka Melek Huruf sebagai indicator pendidikan karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan daerah dengan baik.

2.1.1.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kabupaten Madiun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar 7,82 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Madiun usia 25 tahun keatas telah menyelesaikan pendidikan formal hingga 8 tahun atau menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama

bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya dan kerja keras lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Berikut gambaran rata-rata lama sekolah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.42
Rata-Rata Lama Sekolah(RLS) Tahun 2017-2021
Kabupaten Madiun dan Jawa Timur

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Madiun	7,3	7,57	7,80	7,81	7,82
2	Provinsi Jawa Timur	7,34	7,39	7,59	7,78	7,88

Sumber :Jawa Timur Dalam Angka (BPS), 2022

Capaian angka RLS Kabupaten Madiun pada tahun 2021 naik dibandingkan capaian tahun 2020 yang menunjukkan angka 7,82. Hal ini perlu ditingkatkan lagi mengingat capaian ini masih pada jenjang tamat 7 tahun atau setara SMP.

2.1.1.2.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah gambaran lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak usia 7 tahun ke atas sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.43
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Madiun Dibandingkan dengan
Jawa Timur Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Madiun	13,12	13,13	13,14	13,16	13,17
2	Provinsi Jawa Timur	13,09	13,10	13,16	13,19	13,36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, 2022

Kecenderungan angka HLS di perkotaan lebih besar dari wilayah kabupaten disebabkan karakteristik penduduk perkotaan lebih beragam dan memiliki cara pandang lebih terbuka terhadap pendidikan sehingga penduduk perkotaan bersekolah lebih lama atau berpendidikan lebih tinggi. Selain itu, juga sarana dan prasarana pendidikan lebih memadai.

Harapan lama sekolah Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, dari 13,12 pada tahun 2017 menjadi 13,17 pada tahun 2021.

Angka Harapan Lama Sekolah diatas 13 menunjukkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun terutama untuk jenjang sekolah dasar.

SPM Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar; dan
3. pendidikan kesetaraan.

Berikut adalah target capaian SPM di Kabupaten Madiun yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.44
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Indikator	Target	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100%	88,02%	99,33%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Th. 2022

Tabel. 2.45
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Pada Sekolah Dasar

No.	Indikator	Target	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100%	93,68%	95,42%	98,32%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Th. 2022

Tabel 2.46
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

No.	Indikator	Target	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	100%	0,91%	3,10%	5,82%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun Th. 2022

Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM Pendidikan tahun 2021.

a. Permasalahan :

- 1) Belum tersedianya integrasi data kependudukan dengan pendidikan yang valid dan up to date.
- 2) Verifikasi dan validasi data Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan untuk satuan pendidikan yang di bawah Kementerian Agama belum dilakukan.
- 3) Masih kurangnya pemahaman dan komitmen PNS yang menangani urusan pendidikan terhadap penerapan SPM Pendidikan.

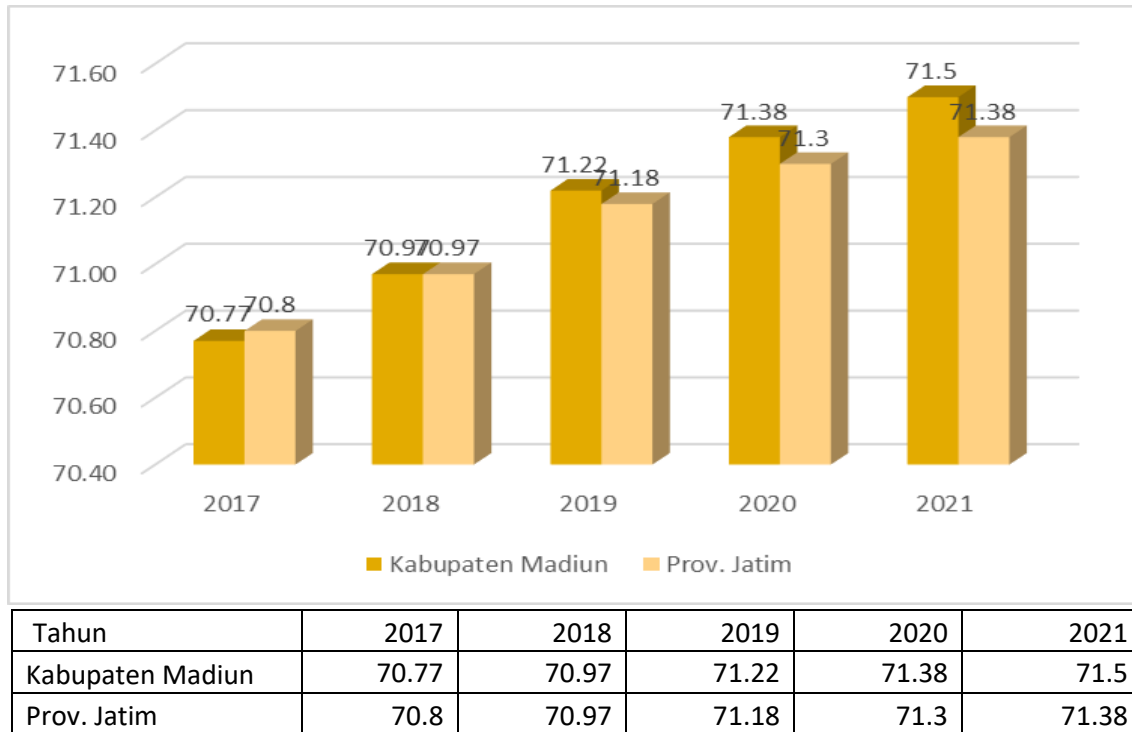
b. Solusi

- 1) Pemanfaatan aplikasi SPM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghitung capaian SPM Pendidikan Tahun 2021.
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi anak Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan pada aplikasi Verval DO dan LTM pada laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/> yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.1.2.2.5. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup dapat mencerminkan lama hidup sekaligus status kesehatan suatu masyarakat.

Grafik 2.4
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun dan Jawa Timur
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2022

Grafik yang disajikan menunjukkan bahwa angka harapan hidup yang dicapai Kabupaten Madiun terus meningkat setiap tahun mulai tahun 2017 – 2021. Apabila dibandingkan dengan capaian Jawa Timur rata-rata capaian pada tiap tahunnya masih lebih tinggi. Hanya pada tahun 2017 capaian angka harapan hidup lebih tinggi dari Jawa Timur.. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Madiun relatif lebih baik dari tahun ke tahun.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Kinerja pendidikan secara umum telah disajikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini disajikan berbagai aspek pendidikan yang menjadi pendukung capaian pendidikan itu. Untuk itu bagian ini disajikan dalam dua kelompok yakni pendidikan dasar dan PAUD.

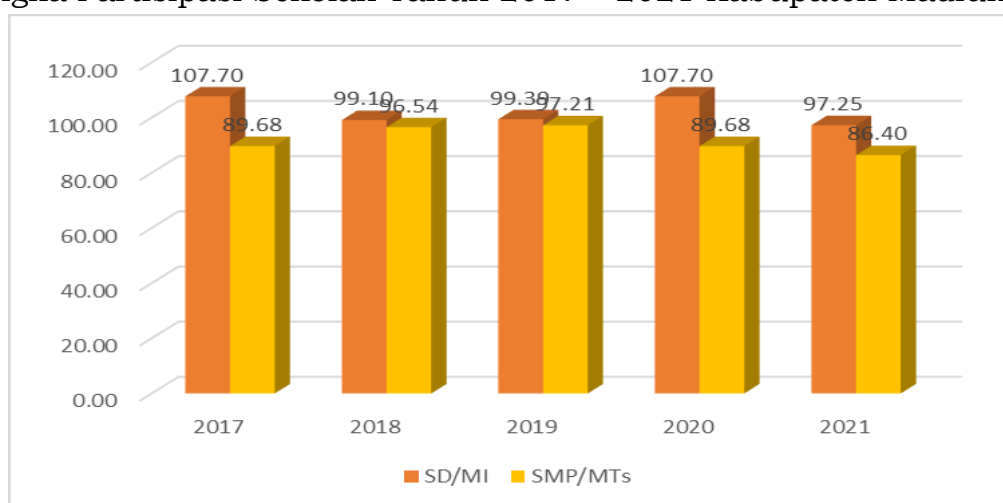
a. Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi

Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Grafik 2-12 menyajikan capaian kinerja partisipasi sekolah di kabupaten Madiun. Grafik menunjukkan APS tingkat SMP/MTs masih fluktuatif, namun pada dasarnya APS di Kabupaten Madiun tidak menjadikan masalah dikarenakan capaian APS mendekati 100 atau bahkan lebih, hal ini disebabkan masih ada penduduk usia sekolah yang melanjutkan ke pondok pesantren, bersekolah diluar Kabupaten Madiun/pindah sekolah dan bahkan ada yang tidak melanjutkan/*Drop out*.

Grafik 2.5
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun

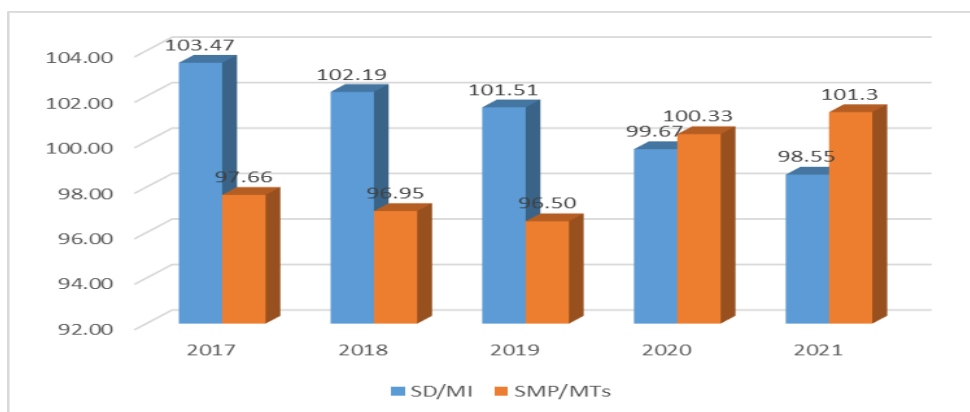


Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	107.70	99.10	99.39	107.70	97.25
SMP/MTs	89.68	96.54	97.21	89.68	86.40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

APS untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan, dengan melihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin terbuka peluang yang lebih besar bagi penduduk usia sekolah untuk mengakses pendidikan. APS Kabupaten Madiun jika dilihat dari jenjang pendidikan pada tahun 2021, baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah APS. Hal ini mencerminkan semakin tinggi jenjang pendidikan menunjukkan bahwa makin rendah kesempatan menikmati akses pendidikan.

Grafik 2.6
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017 – 2021



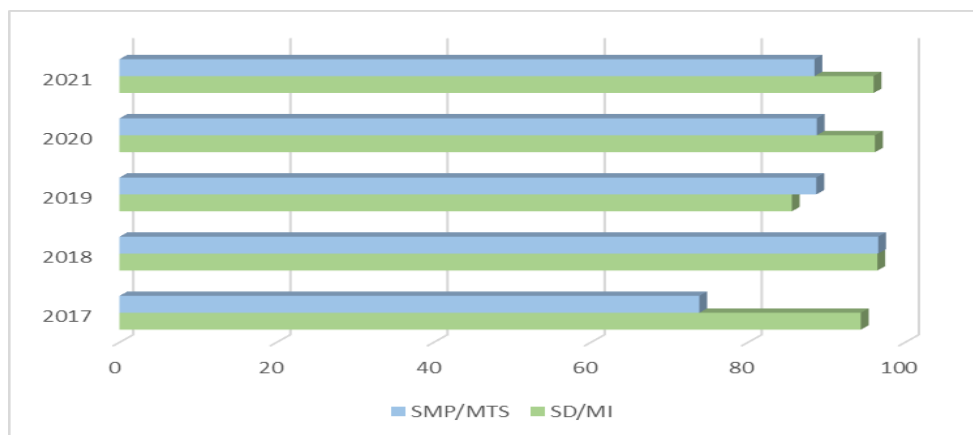
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	103.47	102.19	101.51	99.67	98.55
SMP/MTs	97.66	96.95	96.50	100.33	101.3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Th. 2022

Pada grafik di atas, APK pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 103,47 menjadi 98,55 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berusia di atas 12 tahun atau di bawah 7 tahun yang bersekolah di SD/MI menurun. Adanya siswa usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya adanya siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk di jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK pada jenjang SMP/MTs dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan lebih dari 100.

Untuk mengetahui daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni.

Grafik 2.7
APM Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021



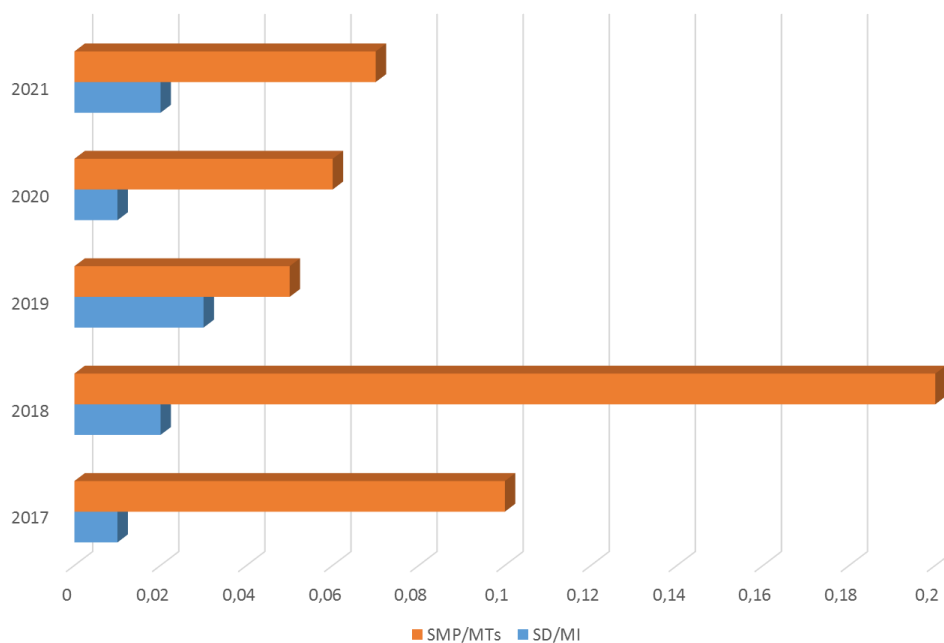
APM	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	94,36	96,47	85,58	96,17	95,99
SMP/MTS	73,81	96,57	88,7	88,76	88,46

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Th. 2022

APM Kabupaten Madiun masih fluktuatif namun tidak signifikan. Selama periode 2017-2021 APM jenjang SMP/MTs masih dibawah APM jenjang SD/MI. Secara umum terlihat APS selalu lebih tinggi dibandingkan dengan APM. APS lebih tinggi dari APM ini karena beberapa sebab, yakni (1) Terdapat siswa yang pada usia tersebut masih sekolah di jenjang lebih rendah; (2) Ada siswa yang sudah menduduki jenjang pendidikan di atasnya; (3) Ada siswa yang melanjutkan ke Pondok Pesantren; (4) Ada yang tidak melanjutkan sekolah atau *drop out*.

Angka putus sekolah dan angka kelulusan. Melengkapi kinerja rata-rata lama sekolah, dapat disajikan angka tingkat angka putus sekolah yang tingkat kelulusan. Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 1000 siswa disuatu daerah. Makin kecil nilainya makin baik, artinya putus sekolah makin kecil. Nilai ideal=0, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Madiun tahun 2017 – 2021 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.8
Angka Putus Sekolah Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	0,01	0,02	0,03	0,01	0,002
2	SMP/MTs	0,1	0,20	0,05	0,06	0,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2022

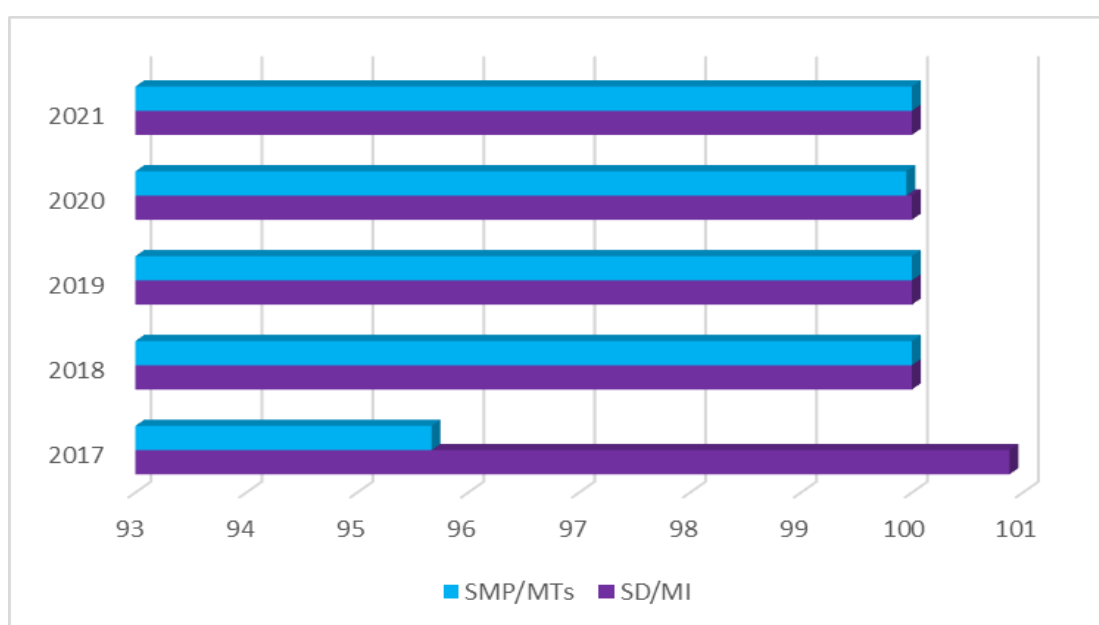
Grafik di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs. Angka putus sekolah berfluktuasi. Angka Putus Sekolah SD/MI tahun 2021 sebesar 0,002 dan SMP/MTs 0,07. Tahun 2021 terjadi penurunan tajam dibanding tahun 2020, hanya terdapat 1 siswa SD yang putus sekolah dan dari MI 0 siswa. Sedangkan untuk SMP/MTs tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,07 dari tahun 2020 sebesar 0,06. Angka kelulusan menunjukkan persentase siswa yang dapat lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tabel berikut menyajikan capaian tingkat kelulusan di Kabupaten Madiun. Dari tabel yang tersaji dapat dilihat bahwa angka kelulusan SD/MI dan angka kelulusan SMP/MTs Kabupaten Madiun sudah mencapai 100% pada tahun 2021, namun bila dibandingkan dengan angka melanjutkan ke jenjang di atasnya belum mencapai 100%. Artinya dari angka kelulusan tersebut tidak semua siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Masih perlu terus diupayakan agar masyarakat mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Tabel 2.47
Angka Kelulusan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelulusan SD/MI	100,88	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	95,67	100	100	99,95	100
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,99	90,99	114,23	86,07	92,77
4	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	96,77	97,95	101,9	93,99	95,50
5	Guru yang memiliki Kualifikasi S1 / D-IV	95,32	96,39	97,36	97,07	97,36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2022

Grafik 2.9
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Madiun
Tahun 2017 – 2021



Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI	100,88	100	100	100	100
SMP/MTs	95,67	100	100	99,95	100

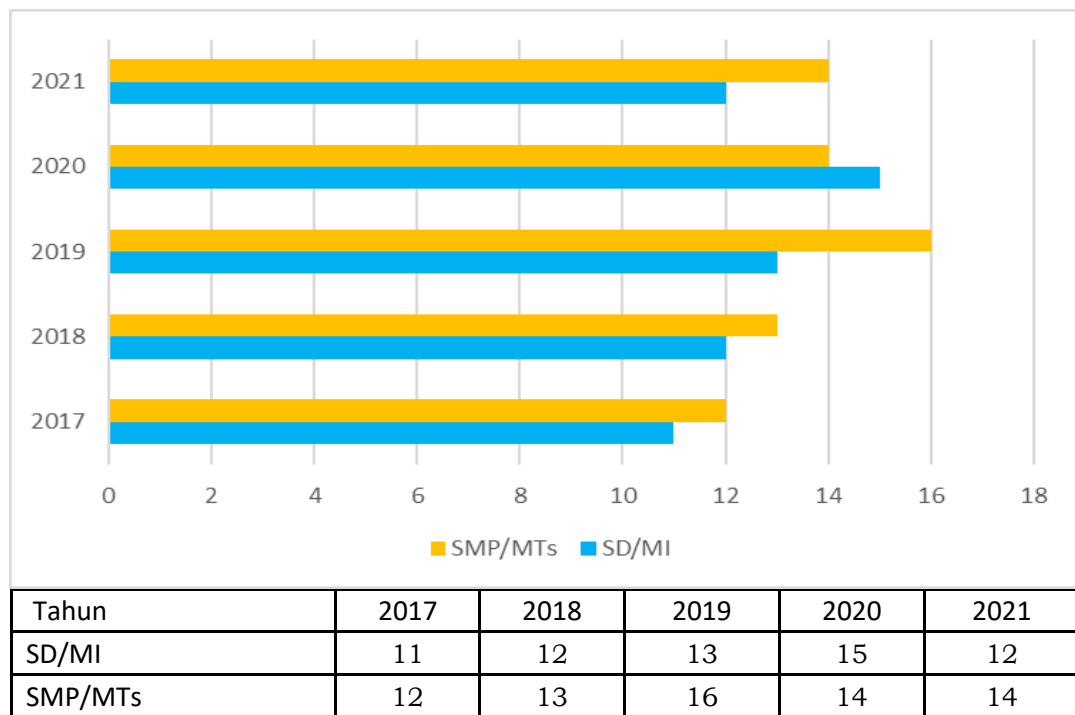
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2022

Ketersediaan tenaga pendidik (Guru)

Ketersediaan tenaga pendidik dapat dilihat dari dua aspek yakni jumlah guru dan jumlah siswa. Rasio guru dan siswa merupakan perbandingan antar jumlah siswa dengan guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Rasio tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah. Grafik 2.12 menyajikan rasio guru siswa SD dan SMP.

Grafik 2.10
Rasio Guru/Murid Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Tahun 2022

Pada aspek pemerataan, dapat dilihat bahwa masih terdapat kekurangan pada guru kelas, guru Agama Islam dan guru Penjaskes serta Kepala Sekolah yang PNS untuk SD Negeri dan SDLB Negeri di Kabupaten Madiun. Kekurangan jumlah guru tersebut terjadi di semua wilayah kecamatan Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk jenjang SMP juga masih terdapat beberapa sekolah yang kekurangan guru di beberapa mata pelajaran.

Tabel 2.48
Pemerataan Tenaga Guru di Kabupaten Madiun Tahun 2021

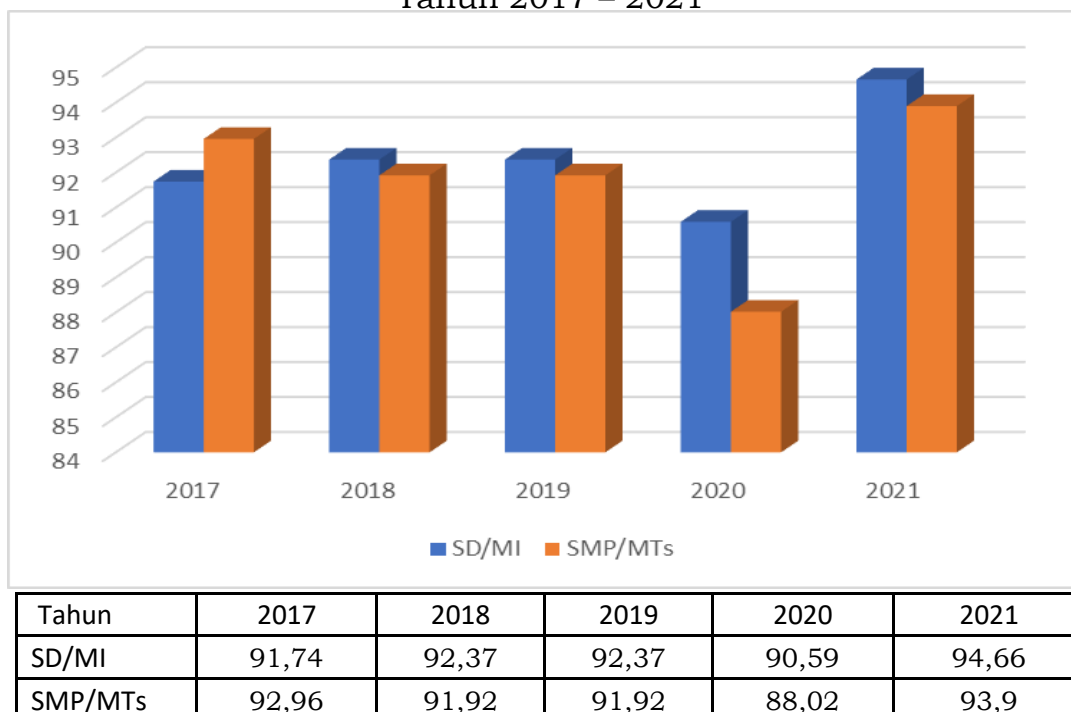
No.	Uraian	Jumlah	Kekurangan
1.	Lembaga SDN	402	0
2.	Jumlah Rombel	2481	0
3.	Kepala SDN	279	123
4.	Guru Kelas	1530	951
5.	Guru Agama Islam	122	280
6.	Guru Agama Kristen	8	0
7.	Guru Penjaskes	235	167
8.	Guru Bahasa Inggris	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2022

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dengan kondisi baik merupakan salah satu fasilitas pendukung pembangunan manusia. Data sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Madiun sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.11
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Madiun
Tahun 2017 – 2021



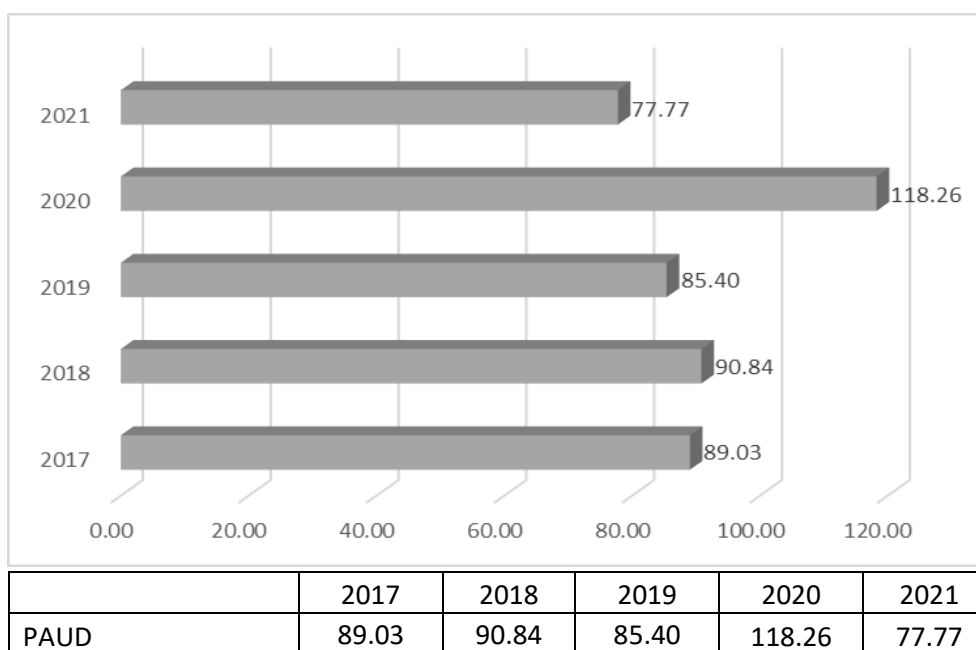
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Tahun 2022

Data di atas, menunjukkan bahwa bangunan sekolah baik SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Madiun dengan kondisi baik pada tahun 2017 – 2021 masih fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Sarana pendidikan belum sepenuhnya dalam kondisi baik, kurang lebih 6% bangunan sekolah yang masih dalam kondisi kurang baik. Kerusakan itu disebabkan oleh tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang diakibatkan karena penyusutan/berakhirnya umur bangunan.

b. Pendidikan Anak usia Dini

Partisipasi Anak Usia Dini di Kabupaten Madiun dapat diketahui dari capaian angka Partisipasi Kasar / APK PAUD dengan capaian sebagai berikut :

Grafik 2.12
APK PAUD di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun, Th. 2022

APK PAUD Kabupaten Madiun pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 masih fluktuatif, namun pada tahun 2021 menurun secara signifikan pada angka 77,77. Partisipasi PAUD masih rendah jika dibandingkan dengan APK SD/MI. Hal ini dikarenakan masih terdapat anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang sudah bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar.

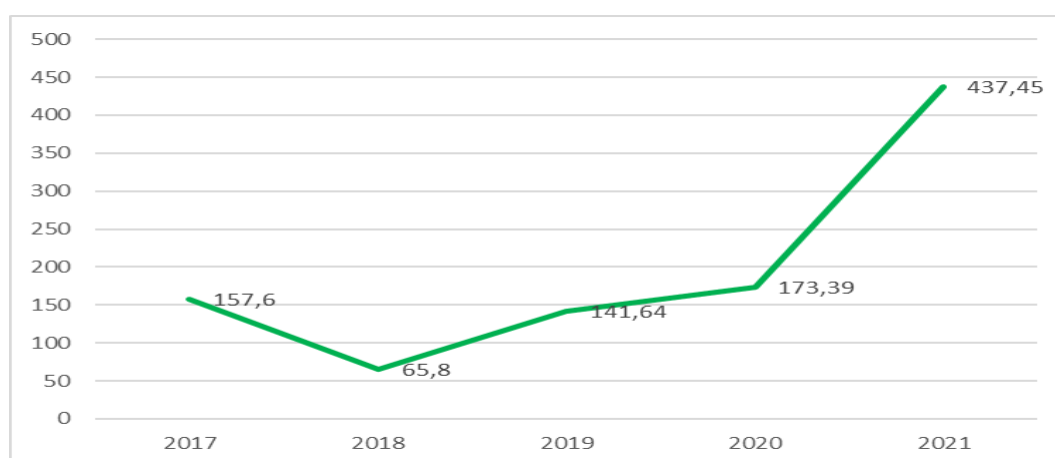
2.1.3.1.2. Kesehatan

Situasi kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun dapat digambarkan melalui angka mortalitas yang terdiri atas Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) serta status gizi pada balita serta indikator pendukung lainnya.

a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

Grafik 2.13
Angka Kematian Ibu Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Madiun cenderung meningkat. Pada tahun 2017 angka kematian ibu sebesar 157,6, dan pada tahun 2021 angka kematian ibu mengalami peningkatan dengan angka 437,45, angka realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2021. Untuk itu harus dilakukan upaya antara lain dengan meningkatkan kompetensi bidan dalam kegawatdaruratan maternal, pelaksanaan kelas ibu hamil, *Ante Natal Care (ANC)* secara terpadu dan pembinaan petugas pada puskesmas, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan persalinan di puskesmas dan rumah sakit.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

AKHB adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran. Dari Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan, yang puncaknya pada tahun 2018, jumlah kematian bayi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir hidup. Tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi dibawah 1 ini menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi lebih rendah dibandingkan dari jumlah bayi yang lahir.

Tabel 2.49
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten
Madiun Tahun 2017– 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	AKHB	2,24	2,65	0,89	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2021

c. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Berikut adalah grafik angka kematian bayi tahun 2017-2021.

Tabel 2.50
Angka Kematian Bayi Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi	6.38	6.47	6.8	7.3	8,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Karena bayi yang baru lahir sangat sensitive terhadap keadaan lingkungan orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat Angka Kematian Bayi. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitive dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Di Kabupaten Madiun tahun 2021 dari target 0 terdapat kematian bayi sebesar 66 bayi (8,25). Dilihat dari data 5 tahun terakhir Angka Kematian Bayi (AKB) kisaran 6 sd 7 %. Tahun 2020 dan 2021 sedikit mengalami kenaikan dikarenakan situasi pandemi covid 19.

Upaya upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengurangi angka kematian bayi adalah sebagai berikut:

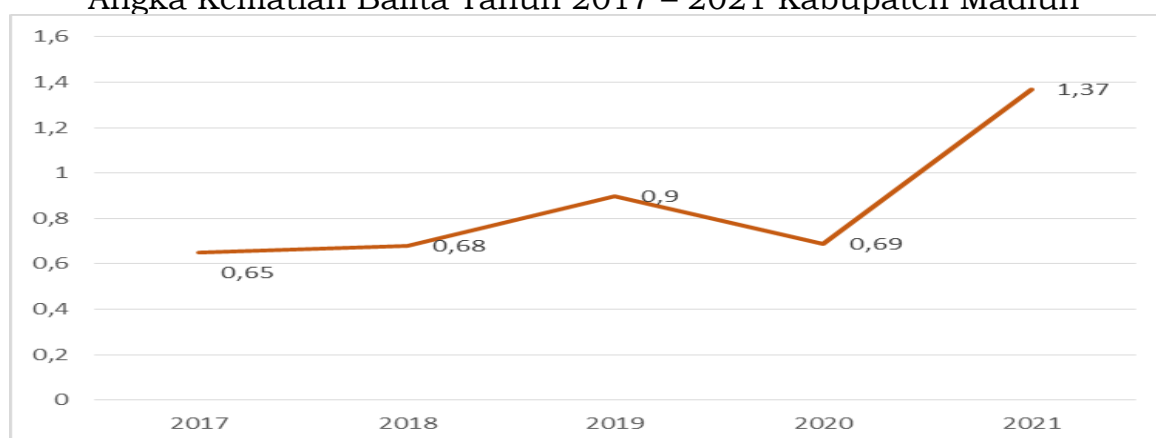
1. Pemberian imunisasi dasar pada bayi.
2. Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mencegah kasus kematian pada ibu dan bayi agar tidak terulang kembali.

3. Peningkatan kompetensi petugas dalam penanganan Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), lahir premature, dan cacat bawaan.
4. Peningkatan rujukan yang tepat dan cepat untuk kasus gawat darurat neonatal ke Rumah Sakit PONEK.

d. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian Anak umur 0–4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Grafik 2.16 menunjukkan angka kematian anak balita tahun 2017-2021.

Grafik 2.14
Angka Kematian Balita Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun



Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Balita	0.65	0.68	0.9	0.69	1.37

Angka kematian balita pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019 angka kematian anak balita mengalami peningkatan dari 0,65 per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 0,9 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2020 menurun menjadi 0,69 per 1000 kelahiran hidup dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 1,37 per 1000 kelahiran hidup. Diperlukan upaya yang terus menerus untuk menurunkan angka kematian balita antara lain dengan melakukan pengawasan pada anak balita, peningkatan gizi, dan pemantauan melalui posyandu.

e. Hipertensi

Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2021 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari target sejumlah 238.839 orang, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 18.697 orang disebabkan pada kegiatan pemeriksaan dan pemantauan pasien dengan penyakit hipertensi tidak dapat dilaksanakan

dengan optimal di pusat pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dioptimalkan pemantauan dengan komunikasi melalui grup WA yang sudah dibentuk petugas kesehatan, sehingga permasalahan bisa terdeteksi lebih awal.

f. Diabetes Melitus

Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus pada tahun 2021 penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari target sejumlah 17.302 orang, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 12.271 orang disebabkan pada kegiatan pemeriksaan dan pemantauan pasien dengan penyakit diabetes melitus tidak dapat dilaksanakan dengan optimal di pusat pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dioptimalkan pemantauan dengan komunikasi melalui grup WA yang sudah dibentuk petugas kesehatan, sehingga permasalahan bisa terdeteksi lebih awal.

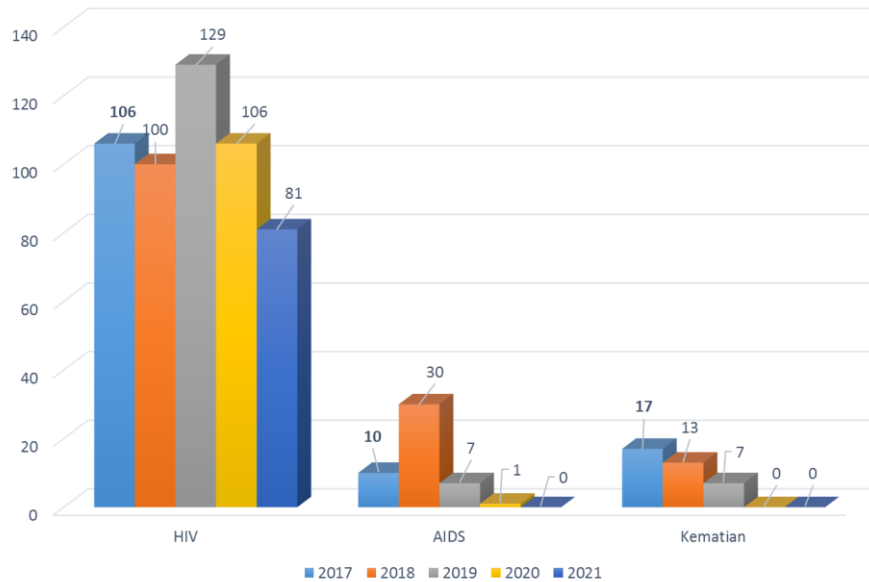
g. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Orang Dengan Gangguan Jiwa pada tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart sejumlah 1.074 orang dari target pelayanan kesehatan sejumlah 1.304 orang. Indikator utama Indeks Keluarga Sehat, pada indikator ke 8 yakni penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak di telantarkan.

h. HIV dan AIDS

Perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Madiun dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus HIV dari 106 kasus tahun 2020 turun menjadi 81 kasus di tahun 2021. Sedangkan untuk kasus AIDS, sampai dengan Desember 2021 dilaporkan 0 kasus. Kasus HIV/AIDS mengikuti fenomena gunung es dimana di puncak tidak ada kasus tetapi didasarnya banyak kasus yang tidak dilaporkan. Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada kematian akibat kasus HIV/AIDS.

Grafik 2.15
Perkembangan Kasus HIV/AIDS Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	HIV	106	100	129	106	81
2	AIDS	10	30	7	1	0
3	Kematian	17	13	7	0	0

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Madiun, 2022

Berdasarkan jenis kelamin, kasus HIV pada tahun 2021 kelompok laki-laki sebesar 47 (58,02%) dan wanita sebesar 34 kasus (41,97%). Dari segi kelompok umur, maka kasus HIV didominasi oleh kelompok umur seksual aktif, yang tertinggi adalah kelompok usia 25-49 tahun sebanyak 71,6% .

Tabel 2.51
Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita Kabupaten Madiun sampai dengan 2021

No	Uraian	2020	2021
1	IDU Narkoba Suntik	13	14
2	WPSL	66	76
3	WPSTL	0	0
4	Waria	14	14
5	Gay	22	25
6	Pelanggan WPS	123	123
7	IRT/Pasangan	95	191
8	Perinatal	21	21

9	Faktor Lainnya	108	108
10	Dari Ibu	8	10
11	Heteroseksual	423	399

Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Madiun, 2022

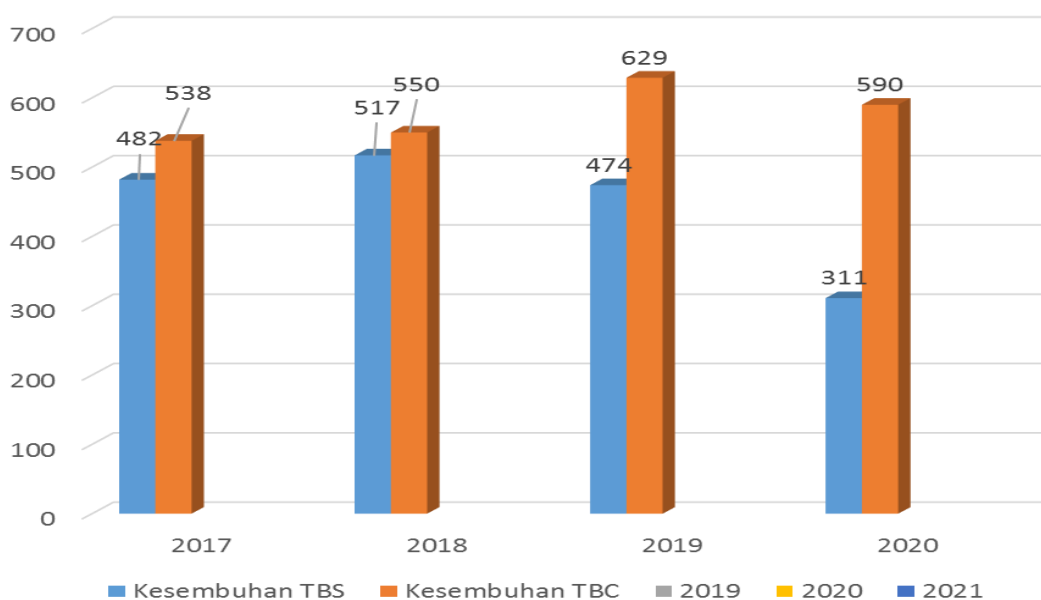
Ditinjau dari cara penularan pada kasus AIDS dari data laporan surveilans nampak bahwa faktor resiko tertinggi adalah heteroseksual 423 kasus, Pelanggan WPS 123 kasus dan faktor lainnya sebesar 108 kasus.

i. Tuberculosis

Angka Kesembuhan TBC cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penurunan terjadi pada tahun 2020, tahun 2019 terdapat 474 orang dan pada tahun 2020 turun menjadi 311 orang. Tahun 2021 jumlah angka kesembuhan meningkat lagi menjadi 538 orang (88,93%).

Perkembangan Pengobatan TBC di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sejumlah 605 kasus di tahun 2021. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Madiun terus melakukan kegiatan Investigasi Kontak (IK) pada pasien TBC. Dan jika dalam kegiatan IK tersebut ditemukan anggota keluarga yang bergejala segera di ambil dahak dan di lakukan pemeriksaan TCM. Kemudian bisa dilakukan tindak lanjut dan pengobatan sampai sembuh.

Grafik 2.16
Perkembangan Cakupan Pengobatan Lengkap dan Kesembuhan TB Paru Tahun 2017-2021



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kesembuhan TBS	482	517	474	311	538
Pengobatan TBC	538	550	629	590	605

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2022

j. Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta

Kasus kusta yang dilakukan PFS secara rutin pada tahun 2021 sejumlah 82 orang dari target 82 orang. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan melalui spesialisasi mencegah kusta yaitu dengan menghindari kontak dekat dalam jangka panjang pada seseorang yang terinfeksi tetapi tidak di obati. Selain itu, hindari juga daerah yang menjadi endemik dari penyakit kusta.

k. Pandemi COVID-19

Perkembangan kasus Covid-19 di Wilayah Kabupaten Madiun sejak dilaporkannya kasus pertama pada tanggal 31 Maret 2020 terus mengalami kenaikan. Upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran Covid 19 sebagaimana dimulai dengan dikeluarkannya SK Bupati Nomor : 188.45/252/402.013/2020 pada tanggal 19 Maret 2020 tentang Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Kabupaten Madiun yang diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Nomor : 4/Instruksi/2020 untuk mengantisipasi meningkatnya resiko penyebaran covid 19 di bidang kemasyarakatan.

Tabel 2.52
Data kasus Covid-19 tahun 2020 – 2021

No.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Jumlah kasus konfirmasi	390	8.457
2	Jumlah kasus sembuh	258	7.895
3	Jumlah kasus meninggal	32	666
4	Jumlah yang dirawat di RS	313	6.782
5	Jumlah yang isolasi mandiri	77	1.675

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2022

Data kasus konfirmasi Covid 19 sampai dengan 31 Desember 2021 di Kabupaten Madiun sebanyak 8.457, kasus ini meningkat sangat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau naik 21 kali lipat dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat 390 kasus. Peningkatan tajam juga terjadi pada jumlah kasus yang sembuh sebanyak 7.895 kasus dan meninggal sebanyak 666 kasus. Prosentase kasus meninggal (Case Fatality Rate/CFR) pada tahun 2021 juga tinggi yaitu sebesar 7,87%.

Kesiapsiagaan dan antisipatif dari Pemda hingga RT/RW menjadi kunci penanganan Covid-19 yang cepat dan tepat sehingga kematian dapat dihindari sedini mungkin.

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan untuk menekan penyebaran covid-19 diantaranya:

1. Pelaksanaan tracing terhadap kontak erat yaitu orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus dari pasien yang terkonfirmasi sehingga bisa segera diketahui status kesehatan dari kontak erat
2. Testing melalui pemeriksaan Rapid antigen ataupun PCR terhadap kontak erat agar segera diketahui status dari kontak erat apakah terkonfirmasi covid-19 atau tidak.
3. Treatment kepada pasien confirm positif covid 19 dengan memantau pelaksanaan isolasi mandiri ataupun perawatan di RS sesuai tingkatan gejala yang dialami pasien.
4. Sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat dengan menggunakan berbagai media baik media cetak, brosur, Televisi, Radio ataupun siaran keliling kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari

kerumunan dan mengurangi mobilitas). Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan dengan sasaran masyarakat baik bagi pedagang, kelompok potensial, ormas, PKK, Darma Wanita, Organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan.

5. Pelaksanaan Penyemprotan desinfeksi pada tempat-tempat yang sering digunakan secara bersama yang memungkinkan terjadinya penularan Covid-19
6. Penegakan disiplin protokol kesehatan juga dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Madiun dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 39 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di kabupaten Madiun.
7. Penerapan One Gate System di pintu masuk desa untuk memantau penerapan protokol kesehatan dan monitoring keluar masuk warga terutama bagi masyarakat luar yang akan masuk ke wilayah desa tersebut.

g. Vaksinasi COVID-19

Sebagai upaya mempercepat penanggulangan penyebaran penyakit Covid-19 maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah vaksin pemberian vaksin secara massal kepada penduduknya. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri/virus penyebab penyakit tertentu sehingga bila terpapar bakteri/virus tersebut akan menjadi lebih kebal. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok (Herd Imunity) sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, maka Kabupaten Madiun juga melaksanakan pemberian vaksin (vaksinasi) kepada penduduknya yang dimulai pada awal Tahun 2021 dengan sasaran awal tenaga kesehatan. Sasaran selanjutnya adalah pemberi pelayanan public dan lanjut usia. Apabila sasaran tersebut diatas sudah tercover semua maka sasaran berikutnya adalah anak usia 12-20 tahun. Sedangkan target yang harus di vaksin sampai dengan bulan September/Okttober sebesar 470 ribu jiwa atau 70% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Madiun. Data sasaran yang sudah divaksin Covid-19 tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.53
Data Jumlah Sasaran Yang Vaksin Covid-19 Tahun 2021

No.	Sasaran	Jumlah Sasaran	Dosis 1		Dosis 2		Dosis 3	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Nakes	2.588	3.376	130,45	3.289	127,09	2.501	96,64
2.	Lansia	103.818	71.532	68,90	49.689	47,86	4	0,00
3.	Petugas Publik	53.137	48.888	92,00	44.651	84,03	16	0,03
4.	Masyarakat Rentan & Umum	376.078	246.160	65,45	188.984	50,25	103	0,03
5.	Remaja	58.273	52.029	89,28	42.506	72,94	1	0,00
6.	Anak-Anak	57.885	5.350	9,24	104	0,18	0	0,00
	JUMLAH	593.894	427.352	71,96	329.239	55,44	2.625	0,44

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang sudah divaksin dosis 3 masih jauh di bawah target yang harus dicapai. Cakupan dosis 1 mencapai 71,96% dan dosis 2 mencapai 55,44% dan dosis 3 masih sangat rendah yaitu 0,44% . Hal ini menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengejar agar seluruh sasaran bisa tervaksinasi sampai dengan dosis 3. Pelaksanaan vaksinasi ini belum optimal disebabkan ketersediaan vaksin covid-19 belum tercukupi karena masih tergantung alokasi dari pemerintah pusat. Hal ini belum seimbang dengan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi covid-19 yang sudah tinggi. Pelaksanaan vaksinasi sudah didukung dengan SDM tenaga kesehatan yang cukup dan kerjasama lintas sektor yang cukup memadai.

Dengan adanya kendala tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya secara intens berkoordinasi baik dengan Kementerian Kesehatan RI maupun dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Dengan kecukupan vaksin yang memadai diharapkan cakupan pelaksanaan vaksinasi kepada sasaran secara merata terwujud sehingga herd immunity untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan covid-19 meningkat. Apabila herd immunity ini terwujud maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang juga akan meningkat.

h. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Kinerja kesehatan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Terdapat standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi

oleh daerah untuk itu. Tabel 2.48 menyajikan komponen pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.54
Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Kabupaten Madiun
Tahun 2021

No	Uraian	2021
1.	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	28,07
2.	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	57,42
3.	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	7,83
4.	Persentase penyandang Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70,92
5.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	82,49
6.	Persentase Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas (%)	131,82
7.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan keluarga bagi anak SD (%)	78,67
8.	Persentase jamaah haji yang diperiksa kebugarannya (%)	0
9.	Cakupan Pelayanan Kesehatan jamaah haji (%)	100
10.	Persentase kesehatan dengan alat kesehatan memenuhi standart (%)	96,25
11.	Cakupan sarana kesehatan penunjang yang memenuhi standart (%)	0
12.	Persentase pelayanan kesehatan tradisional memenuhi standart (%)	54,94
13.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	66,74
14.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	94,83
15.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan (%)	90,32
16.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	107,1
17.	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	91,68
18.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	50,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Madiun tahun 2021 telah dilakukan cukup baik.

i. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu di tengah-tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga saat ini perkembangan ketersediaan sarana layanan kesehatan tersebut memang belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, sehingga rasionya selalu meningkat setiap tahunnya. Tabel 2.38 menyajikan ketersediaan sarana kesehatan itu. Rasio sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing Kecamatan menggambarkan tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Standart Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk, sedangkan rasio sarana kesehatan di Kabupaten Madiun masih belum memenuhi syarat.

Tabel 2.55
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel 2.56
Indikator rasio rumah sakit per jumlah penduduk Tahun 2017 - 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,004	3/731329	2/742259	2/749066	2/750143

Tabel 2.57
Standar ketenagaan pada Puskesmas di Kabupaten Madiun Tahun 2021

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga (orang)	
		Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
1.	Dokter atau Dokter Layanan Primer	17	19
2.	Dokter Gigi	10	15
3.	Perawat	194	121
4.	Bidan	183	177
5.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	13	17
6.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	13	15
7.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	13	17
8.	Tenaga Gizi	13	18
9.	Tenaga Kefarmasian	24	32
10.	Tenaga Administrasi	97	88
11.	Pekarya		
	JUMLAH	577	519

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Rasio tenaga dokter dan tenaga paramedis per 100.000 jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh dokter dan paramedis dibanding jumlah penduduk. Rasio dokter dan tenaga paramedis di Kabupaten Madiun masih belum

memenuhi standart sehingga masih perlu adanya penambahan tenaga dokter dan para medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standart.

Tabel 2.58
Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021 di Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio dokter per 100.000 penduduk	11,80	12,94	12,77	14,60	14,92
2	Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk	79,50	104,28	102,44	116,30	122,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2022

Rasio jumlah rumah sakit dibandingkan dengan satuan penduduk dapat disajikan sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 2.59
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,004	0,004	3/749.066	2/754.165	2/750.143

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah rumah sakit di Kabupaten Madiun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak ada penambahan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kualitas dan mutu pelayanan Rumah Sakit antara lain dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun IKM dari 2 Rumah Sakit milik Pemerintah di Kabupaten Madiun dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.60
Data IKM Rumah Sakit di Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	RSUD Caruban	77,08%	80,93%	81,04%	81,14%	81,31%
2	RSUD Dolopo	74,66%	74,80%	80,56%	80,70%	81,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Madiun, 2022

Selama periode tahun 2017–2021 capaian IKM pada RSUD Caruban dan RSUD Dolopo terus mengalami peningkatan. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan semakin puas dengan kinerja layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit tersebut. Namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

- Peningkatan Sarana dan prasarana
- Peningkatan kompetensi petugas termasuk sikap dan perilaku petugas pelayanan
- Peningkatan sistem pelayanan melalui pemenuhan dan kedisiplinan dalam pemenuhan SOP

Ketenagaan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan pelayanan terutama pelayanan di puskesmas. Berikut standar ketenagaan pada puskesmas wilayah perkotaan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.61
Standar Ketenagaan pada Puskesmas Wilayah Perkotaan

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga (orang)	
		Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
1	Dokter atau dokter primer lainnya	2	1
2	Dokter Gigi	1	1
3	Perawat	6	5
4	Bidan	7	4
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1
7	Ahli Teknologi Laboartorium Medik	1	1
8	Tenaga Gizi	2	1
9	Tenaga Kefarmasian	2	1
10	Tenaga Administrasi	3	3
11	Pekarya	2	2

Situasi ketenagaan di puskesmas sebagaimana tabel dibawah menunjukkan bahwa ada jumlah tenaga belum sesuai standart, Sebagai contoh tenaga apoteker sesuai standart kebutuhan di Kabupaten Madiun 32 orang untuk puskesmas rawat inap maupun non rawat inap baru tercukupi 23 orang.

Tabel 2.62

Jumlah ketenagaan pada Puskesmas di Kabupaten Madiun Tahun 2021

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga (orang)	
		Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap
1.	Dokter atau Dokter Layanan Primer	26	25
2.	Dokter Gigi	11	17
3.	Perawat	185	118
4.	Bidan	166	173
5.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	10	12
6.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	11	14
7.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	14	15
8.	Tenaga Gizi	14	17
9.	Tenaga Kefarmasian	15	15
10.	Apoteker	9	14
11.	Tenaga Dukungan Manajemen	29	31
	JUMLAH	490	451

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelayanan kesehatan itu bermuara pada terlayannya penduduk. Terkait dengan hal tersebut tabel 2.57 menyajikan capaian urusan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi. Dari tabel dapat dilihat bahwa belum semua cakupan urusan kesehatan dapat dilaksanakan 100%.

Grafik 2.63

Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91,15	93,36	94,74	87,82	83,13

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	81,1	85,44	88,35	83,01	81,76
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
4	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA positif	73,24	77,24	83,47	99,08	37,80
5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100
6	Cakupan Kunjungan Bayi	95,24	94,47	96,34	97,30	97,90
7	Cakupan Puskesmas	173,33	173,33	173,33	173,33	173,33
8	Cakupan Puskesmas Pembantu	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15
9	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	99,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

j. SPM Bidang Kesehatan

Disamping urusan bidang kesehatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana tersebut diatas, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban melaksanakan standart pelayanan minimal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal. Realisasi capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan sebagaimana table dibawah

Tabel 2.64
Realisasi Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2021

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM			
		INDIKATOR	TARGET	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	90,40%	91,99%	96,59%	94,83%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	91,49%	93,61%	91,35%	88,69%

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM			
		INDIKATOR	TARGET	2018	2019	2020	2021
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	96,01%	98,38%	96,82%	93,08%
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	85,85%	87,86%	67,00%	79,50%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	98,63%	32,84%	30,42%	52,56%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	1,49%	40,43%	66,65%	28,07%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	16,37%	54,03%	37,72%	24,54%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	10,29%	14,05%	10,04%	7,83%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	36,04%	47,81%	31,66%	70,92%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	64,06%	102,93%	97,23%	82,49%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	73,04%	34,56%	35,72%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immuno deficiency Virus/ HIV</i>)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi <i>HIV</i> mendapatkan pelayanan deteksi dini <i>HIV</i> sesuai standar	100%	100%	71,89%	75,14%	78,96%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang belum mencapai target antara lain adalah:

- a. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- 1) Permasalahan
 - a) Pelaksanaan skrining pada anak usia sekolah terkendala adanya pandemi covid-19 dimana pada saat sekolah kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring;
 - b) Pelaksanaan skrining kesehatan pada anak usia sekolah dasar diluar satuan pendidikan masih terkendala SDM dan akses ke sasaran.
- 2) Solusi
 - a) Pelaksanaan skrining pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan media internet melalui *google form*;
 - b) Pelaksanaan skrining pada anak usia sekolah di luar satuan pendidikan bisa melalui media posyandu remaja.
- b. Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - 1) Permasalahan
 - a) Kegiatan skrining di Posbindu tidak bisa maksimal karena masih terkendala pandemi covid-19;
 - b) Masih terbatasnya jumlah petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan skrining kesehatan di Posbindu;
 - c) Ketersediaan sarana dan prasarana di Posbindu berupa Posbindu KIT yang belum mencukupi terutama bahan medis habis pakai.
 - 2) Solusi
 - a) Posbindu yang ada dan bisa berjalan sesuai dengan zonasi dimaksimalkan kegiatannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat;
 - b) Pemberdayaan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan di Posbindu;
 - c) Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan posbindu untuk kelancaran kegiatan skrining kesehatan di Posbindu;
 - d) Berkoordinasi dengan desa agar memanfaatkan dana desa untuk pengadaan Posbindu KIT atau bahan medis habis pakai untuk keperluan skrining kesehatan.
- c. Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - 1) Permasalahan
 - a) Pelayanan posyandu lansia dimasa pandemi covid-19 terkendala situasi pandemi covid-19, dimana tidak banyak Posyandu lansia

yang buka pelayanan sehingga tidak semua lansia terlayani kesehatannya sesuai standar;

- b) Pelayanan posyandu lansia dimasa pandemi covid-19 terkendala keterbatasan tenaga dan sarana prasarana untuk melakukan skrining, dimana banyak petugas (pengelola program lansia) melaksanakan kegiatan vaksinasi di wilayah kerja masing – masing.

2) Solusi

- a) Peningkatan kapasitas kader lansia dalam pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia, sehingga tidak tergantung pada petugas kesehatan saja;
- b) Pelayanan kesehatan lansia mandiri oleh para lansia di rumah masing – masing dengan bantuan keluarga dibimbing/diawasi oleh petugas kesehatan;
- c) Pelayanan kesehatan lansia melalui kegiatan kunjungan rumah terjadwal atau janji temu untuk memberikan pelayanan skrining kesehatan bagi lansia berusia >60 tahun yg tidak bisa melakukan kunjungan ke posyandulansia atau fasilitas kesehatan lainnya;
- d) Pemberdayaan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan bagi penduduk usia 60 tahun keatas guna membantu petugaskesehatan.

d. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

1) Permasalahan

- a) Kegiatan pemeriksaan dan pemantauan penderita hipertensi belum bisa dilaksanakan dengan optimal di pusat layanan kesehatan dikarenakan adanya pandemi covid-19;
- b) Penderita hipertensi yang mengalami masalah kesehatan biasanya datang ke fasilitas kesehatan swasta dan praktik mandiri petugas kesehatan untuk mendapatkan terapi sehingga tidak tercatat kondisinya.

2) Solusi

- a) Peningkatan pelayanan pemeriksaan dan pemantauan penderita hipertensi di pusat layanan kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan FKTP/ dokter swasta/ klinik terkaitdengan pelayanan penderita hipertensi.

e. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

1) Permasalahan

- a) Selama terjadinya pandemi covid-19 kunjungan pasien ke pelayanan kesehatan menurun sehingga pengawasan dan penemuan penderita TBC juga menurun drastis;
- b) Adanya stigma Covid-19 dari masyarakat, sehingga cenderung menyembunyikan gejala batuk yang dialami, sedangkan investigasi kontak pada pasien yang bergejala, pasien memilih menghindari kunjungan dari petugas/ kader;
- c) Terbatasnya jumlah tenaga pelacakan TBC dikarenakan tugas tracing covid-19 dan input data terkait pandemi, sehingga program TBC sedikit terkesampingkan;
- d) Adanya pencatatan dan pelaporan TBC menggunakan aplikasi baru yaitu SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) sehingga memerlukan pemahaman yang lebih untuk menyamakan persepsi programmer. Untuk itu data TBC yang seharusnya bisa di entry pada aplikasi jadi tidak bisa masuk.

2) Solusi

- a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyakit TBC baik melalui kunjungan pasif maupun aktif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- b) Penemuan kasus secara Pasif Intensif, penemuan kasus Aktif dan Massif berbasis keluarga dan masyarakat melalui Investigasi Kontak, identifikasi kontak, kunjungan rumah, penapisan/skrining TBC, Rujukan terduga TBC, Diagnosis dan Pengobatan sesuai Standar;
- c) Edukasi masyarakat tentang Covid-19 serta pendekatan secara persuasive;
- d) Melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan di layanan, serta pendekatan dengan penentu kebijakan (Puskesmas dan RumahSakit) terkait program TBC;
- e) Melakukan pendampingan serta pelatihan pencatatan dan pelaporan TBC pada aplikasi SITB dengan monev yang berkesinambungan.

k. Open Defecation Free (ODF)

Open Defecation Free (ODF) adalah kondisi dimana seluruh masyarakat di wilayah desa / kelurahan telah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Upaya – upaya untuk mencapai ODF sudah dilakukan melalui program STBM sejak tahun 2009 berupa

pemicuan, advokasi lintas program lintas sektor, sosialisasi dan sebagainya.

Untuk menentukan suatu desa / kelurahan sudah ODF atau belum dilakukan verifikasi ODF yang dilaksanakan oleh desa dengan bantuan petugas Kesehatan lingkungan puskesmas dengan melibatkan kader Kesehatan atau petugas Kesehatan dari luar desa yang diverifikasi, dari hasil verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi akan diterbitkan sertifikat ODF desa dari dinas Kesehatan Kabupaten. Perkembangan desa ODF dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.65

Perkembangan Desa ODF di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah desa ODF	28	58	38	27	55
2.	Jumlah Desa ODF kumulatif	35	93	131	158	206
3.	Prosentase Desa ODF	17%	45,1%	65,6%	76,7%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Tahun 2017 desa ODF bertambah sebanyak 28 desa dari tahun 2016 jumlah desa ODF di Kabupaten Madiun baru 7 desa (3,4%), sehingga secara komulatif tahun 2017 menjadi 35 Desa (17%), upaya yang dilakukan untuk percepatan peningkatan desa ODF melalui dukungan kegiatan menu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun tingkat puskesmas, pengadaan cetakan jamban murah yang didistribusikan kepada 26 puskesmas yang ditujukan untuk membantu mempermudah tenaga sanitarian dalam mensosialisasikan peningkatan akses jamban sehat, untuk masyarakat miskin diberikan intervensi bantuan sosial stimulant material jamban murah sebanyak 260 unit yang diberikan pada masyarakat di 26 puskesmas masing-masing puskesmas 10 unit.

Pada tahun 2018 pencapaian desa ODF sebanyak 58 desa dengan jumlah komulatif 93 desa (45,1%), ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan dan upaya tersebut akan terus dilanjutkan, dan adanya dukungan keberadaan tenaga fasilitator kabupaten program STBM yang sangat membantu pelaksanaan program STBM dan program Pamsimas terutama komponen B, guna lebih meningkatkan pencapaian desa ODF

menuju kabupaten ODF maka dilakukan Sharing Learning Review (SLR) yang menampilkan strategi, potensi, inovasi, hasil kegiatan program STBM pilar 1 dari 26 puskesmas, sekaligus menghadirkan Forkopimda, lintas sector, TP PPK kabupaten kecamatan desa, Polsek dan koramil sewilayah kabupaten, kepala desa/kelurahan sekabupaten Madiun. sebagai output kegiatan tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama untuk ODF Kabupaten Madiun tahun 2020.

Secara bertahap tahun 2019 desa ODF bertambah sebanyak 38 desa atau secara komulatif 131 desa (65,6%), pencapaian ini didukung oleh kebijakan ADD desa yang digunakan untuk bantuan jamban guna percepatan pencapaian ODF, serta dukungan tenaga faskab STBM dalam pelaksanaan dan MONEV STBM baik di lokus Pamsimas maupun seluruh wilayah. Dan tahun 2020 pencapaian desa ODF sebanyak 27 desa atau secara komulatif 158 desa (76,7%). Berdasarkan komitmen Kabupaten Madiun ODF tahun 2020, maka pada tahun 2020 belum bisa dilaksanakan verifikasi ODF kabupaten, hal ini disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh pada realokasi dan refocusing pendanaan dan kegiatan baik di Dinas kesehatan, Puskesmas, desa/kelurahan sehingga rencana percepatan ODF desa ditangguhkan, dan adanya pembatasan kegiatan di wilayah sehingga kegiatan verifikasi ODF, pemecuan, sosialisasi diminimalisir.

Walaupun masih dalam kondisi pandemic covid-19 pada tahun 2021 desa ODF sudah mencapai 206 desa (100 %) berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi ODF oleh Tim verifikator Propinsi Jawa Timur, Kabupaten dan Tim Verifikasi Desa (Kepala Desa beserta perangkat Desa, BABINSA dan BABINKAMTIBMAS dan Kader Kesehatan Lingkungan. Kabupaten Madiun telah dinyatakan sebagai Kabupaten ODF ke 20 Di Jawa Tmur. Hal ini bisa terwujud berkat dukungan dan kerjasama semua stakeholder guna lebih menekan desa supaya mempercepat ODF desa.

Capaian ini harus tetap dipertahankan dan perlu terus dilakukan peningkatan sarana untuk Buang Air Besar. Dari sarana yang layak menjadi sarana yang aman. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah timbulnya penyakit menular.

1. Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama. Beberapa penyebab stunting antara lain kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk. Serta rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.

Angka prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 sebesar 24,4 %. Propinsi Jawa Timur sebesar 23,5 %. Di Kabupaten Madiun sebesar 15,9 %. Perkembangan kasus stunting Kabupaten Madiun sejak tahun 2017 – 2021 dapat digambarkan pada table dibawah ini.

Tabel. 2.66
Prevalensi Stunting tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prevalensi stunting	15,11	15,74	19,31	16,98	14,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Prevalensi stunting Kabupaten Madiun selama 5 tahun berfluktuatif dari tahun 2017 sebesar 15.11%, naik pada tahun 2018 sebesar 15.74 %, dan meningkat tajam pada tahun 2019 sebesar 19.31 %. Tahun 2020 turun menjadi 16,98 % dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 14.94%. Angka tersebut masih di bawah angka prevalensi nasional maupun Jawa Timur

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting disebutkan bahwa target nasional yang harus dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar 14 %.

Upaya – upaya yang dilaksanakan dalam menurunkan prevalensi stunting meliputi :

A. Lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu :

1. Komitmen kepemimpinan
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku
3. Peningkatan konvergensi Spesifik dan Sensitif
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

B. Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi yakni :

1. Analisis situasi.
2. Rencana kegiatan
3. Rembuk Stunting
4. Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan,
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia,
6. Sistem Manajemen Data,
7. Pengukuran dan Publikasi Data
8. Review kinerja tahunan.

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi angka di Indonesia dari 24 persen menjadi 14 persen perlunya penguatan pelayanan kesehatan dalam Upaya integrasi Posyandu aktif dengan PAUD yang dapat menunjukkan bahwa pola asuh merupakan core dalam pencegahan stunting. Posyandu menjadi garda utama terdepan serta dukungan alat kesehatan dasar dalam

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sesuai Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan sarana prasarana ke-PU-an yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum (jalan, jembatan, irigasi), air minum, penyediaan dan pengelolaan air bersih.

Tabel 2.67
Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	492,03	486,04	507,32	546,20	-
2	Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	59,46	59,69	67,46	72,50	-
3	Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (m)	657.253	722.978	743.467,9	302.316,45	-
4	Jumlah rumah tangga penggunaan air bersih	18.380	19.619	20.824	21.204	-
5	Persentase Penduduk berakses air minum	-	63,66	68,93	74,20	-

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
6	Jumlah pengolahan air limbah domestik	-	1	1	1	-
7	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100	100	-
8	Jumlah produk hukum pemanfaatan ruang	1	1	1	1	-
9	Luas wilayah produktif (Ha)	42.513,56	42.513,56	50.764,04	50.764,04	-
10	Luas wilayah industry (Ha)	495,97	495,97	788,46	788,46	-
11	Luas wilayah kebanjiran (Ha)	13.345,00	13.345,00	11.106,35	11.106,35	-
12	Luas wilayah kekeringan (Ha)	31.641,00	31.641,00	11.106,35	11.106,35	-
13	Luas wilayah perkotaan (Ha)	4.605,82	4.605,82	18.298,56	18.298,56	-
14	Persentase jembatan kondisi baik (%)	95,26	95,26	96,55	96,55	85,71
15	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap (%)	-	-	-	-	74,13
16	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik	-	-	-	-	21,13
17	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	-	-	-	-	84,98
18	Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola	-	-	-	-	98,81
19	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	-	-	-	-	94,15
20	Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	-	-	-	-	2,26
21	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang	-	-	-	-	94,12

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	terpenuhi					
22	Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	-	-	-	-	6,98
23	Persentase pengembangan domestik air limbah domestik yang terpenuhi	-	-	-	-	97,12
24	Persentase saluran drainase kondisi baik	-	-	-	-	4,149
25	Persentase trotoar kondisi baik	-	-	-	-	2,45
26	Persentase panjang saluran drainase / gorong-gorong dan trotoar dalam kondisi baik	-	-	-	-	6,59
27	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	-	-	-	-	49,099
28	Persentase jumlah infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah yang ditingkatkan	-	-	-	-	49,09
29	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	-	-	-	-	98,95
30	Persentase jumlah sarpras dan gedung pemerintah kondisi baik sesuai rencana	-	-	-	-	1,69
31	Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	-	-	-	-	52,05
32	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat tenaga terampil	-	-	-	-	86,66
33	Persentase ketersediaan perangkat pendukung	-	-	-	-	57

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	layanan informasi jasa konstruksi yang terpenuhi					
34	Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang terpenuhi	-	-	-	-	91,97
35	Persentase jumlah kajian teknis tata ruang yang dikeluarkan	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, terdapat perubahan beberapa indikator dikarenakan terjadi perubahan Dokumen RPJMD. Untuk indikator yang digunakan pada RPJMD lama digunakan pada nomor 1 sampai 13, sedangkan Perubahan RPJMD menggunakan indikator dengan nomor 14 sampai 35. Persentase jembatan kondisi baik, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam), Jumlah rumah tangga penggunaan air bersih, mengalami peningkatan setiap tahun, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kewilayahan. Pada sektor pengolahan air limbah domestik, tidak mengalami peningkatan dikarenakan jumlah pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Madiun hanya 1 unit.

Sementara itu, untuk Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik menurun, dikarenakan adanya perubahan jumlah status ruas jalan lingkungan di Kabupaten Madiun berdasarkan SK Bupati Madiun tentang Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Perkotaan di Kabupaten Madiun.

Panjang irigasi kabupaten madiun mengacu pada Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa DI kewenangan Kabupaten yang sudah tidak berfungsi, sehingga ditetapkanlah SK Bupati Madiun Nomor 188.45/577/KPTS/402.013/2020 tentang Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Kewenangan Kab. Madiun, yang mengatur panjang irigasi yang ditangani. Dengan adanya SK Bupati tersebut, maka tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan panjang dan fungsi jaringan irigasi di Kabupaten Madiun, yang awalnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier menjadi jaringan irigasi primer dan sekunder saja.

Dalam rangka peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat terampil dan ketersediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang terpenuhi dilaksanakan berbagai kegiatan, seperti Bimbingan Teknis dan Pelatihan.

Ketaatan terhadap RTRW 100% dikarenakan semua bentuk pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029. Untuk produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2021 adalah Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) BWP (Bagian Wilayah Perkotaan) Pilangkenceng.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga Perubahan RPJMD 2018-2023, yaitu meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome). Pengukuran IKLI mulai dihitung pada tahun 2021 dengan target awal sebesar 76. Hasil perhitungan IKLI Tahun 2021 sebesar 76,6 termasuk katagori cukup.

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Kebutuhan perumahan dan Permukiman merupakan hal yang bersifat primer bagi setiap orang. Bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan kualitas baik, sehat dan layak huni akan memberikan rasa nyaman bagi orang yang menempatinnya. Data dasar jumlah rumah di Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029 adalah sebanyak 184.168 unit. Pada Tahun 2018 jumlah RTLH sebanyak 9.719 unit. Sampai dengan tahun 2020 telah tertangani sebanyak 5.188 unit, sehingga menyisakan 4.531 unit.

Grafik 2.68
Capaian Urusan Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017 – 2021
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah RTLH	0	9.719	6.445	11.998	45.615
2	Persentase Rumah tidak layak huni	0	18,99	27,29	15,95	18,29
3	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	181.440	171.721	174.995	176.909	196.432
4	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	98,52	93.24	95.02	96.06	78
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0	0	0	0,1	0,01

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan perumahan dan pemukiman tahun 2017–2021. Jumlah RTLH paling banyak tahun 2018 sebanyak 9.719, persentase rumah tidak layak huni tertinggi pada tahun 2019 sebesar 27,29%. Persentase lingkungan pemukiman kumuh, tahun 2020 sebesar 0,1% mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,01%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan lingkungan permukiman sehingga permukiman yang kumuh menjadi berkurang.

Persentase Rumah Layak Huni (RLH) terjadi penurunan capaian tahunan pada tahun 2021 dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait Covid-19.

2.1.3.1.5. Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu mencakup 26 item dalam penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan

sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Madiun dapat dilihat bahwa Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan diikuti kenaikan Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sampai dengan tahun 2021 mencapai 130%. Namun demikian yang masih perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya tidak sekedar pemenuhan kebutuhan dasarnya agar penyandang masalah sosial tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya dan mandiri.

Grafik 2.69
Capaian Urusan Sosial Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)		305.556	329.181	335.007	297.773
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	116	106	123	131	130
3	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,75	1,14	1,28	1,3	2,6

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tahun 2022

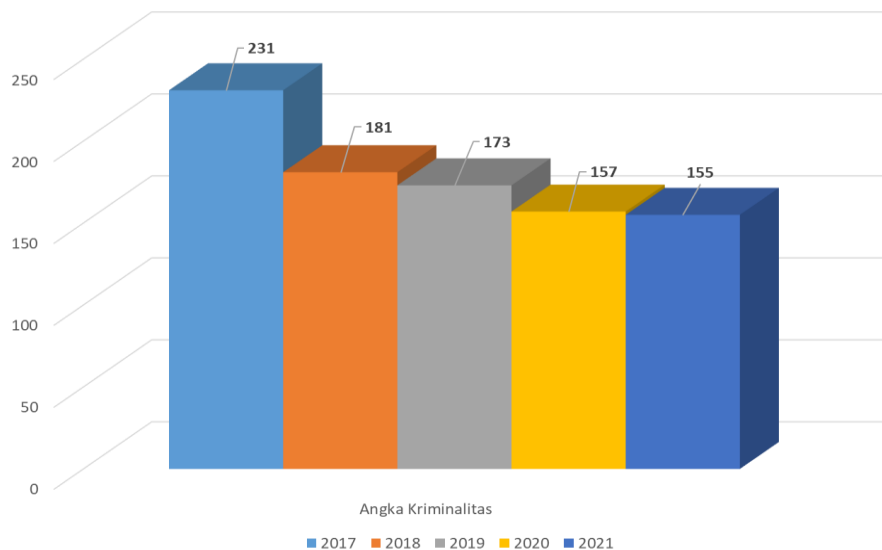
2.1.3.1.6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.6.1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Madiun. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Madiun dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Berdasarkan hasil capaian kinerja keamanan dan ketertiban Kabupaten Madiun terlihat bahwa angka kriminalitas dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2017 angka

kriminalitas mencapai 231, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 155, sebagaimana yang tersaji pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021



Sumber : Satpol PP Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Adanya angka kriminalitas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Madiun. Sedangkan penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Madiun disebabkan karena adanya tambahan petugas keamanan dan ketertiban yang dapat membantu mengantisipasi tindakan kriminalitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Madiun. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Madiun juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, penegak hukum, perangkat daerah serta seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Madiun. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut memberikan dampak terhadap penurunan kasus pelanggaran perda.

2.1.3.1.6.2. Bidang Bencana

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana, kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Adapun indikator Urusan

Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70
Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio relawan bencana kabupaten (%)	60	60	60	60	61
2	Rasio desa tanggap bencana yang terlatih (%)	7	9	15	44	53

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Madiun, Tahun 2022

Indikator urusan Pemerintahan Bidang Bencana yaitu rasio relawan bencana kabupaten dan rasio desa tanggap bencana yang terlatih. Rasio relawan bencana dari tahun 2017-2020 memiliki nilai tetap yaitu 60% namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 61%. Rasio desa tanggap bencana yang terlatih terus meningkat pada tahun 2017-2021, dari 7% desa pada tahun 2017, 9% tahun 2018, 15% pada tahun 2019, 44% tahun 2020 dan meningkat menjadi 53% desa pada tahun 2021.

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1.Ketenagakerjaan

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/ kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja. Tabel 2.69 menyajikan capaian kinerja ketenagakerjaan.

Tabel 2.71
Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	76,2	69,52	70,73	79,9	67,77
2	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	1,02	1,5	15	20	125
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,84	66,5	89,64	42,15	75
4	Tingkat pengangguran terbuka	6,72	3,71	3,52	4,80	4,99
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (perusahaan)	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi

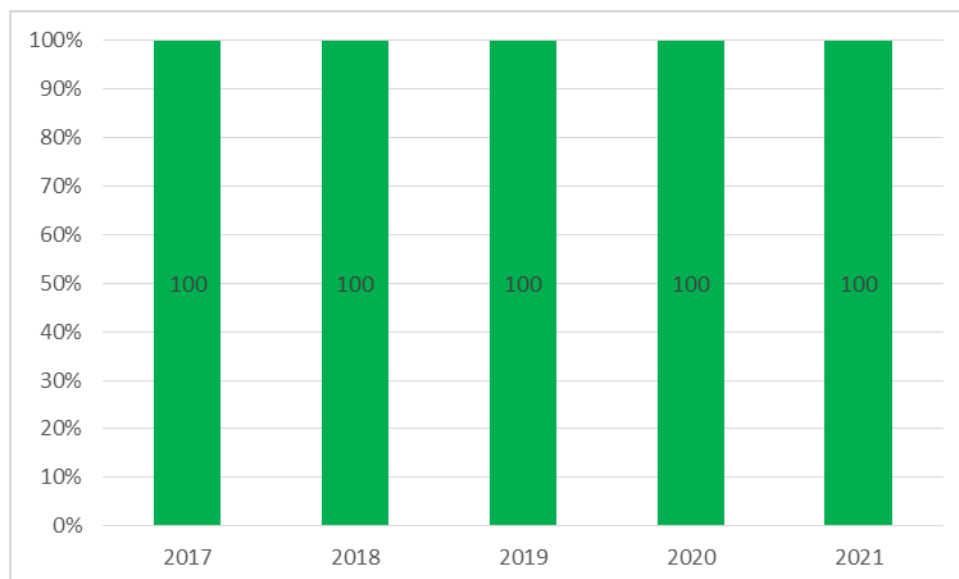
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
6	Persentase keselamatan dan perlindungan (%)	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi
7	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda (%)	8	4	3	5	25

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2022

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan dari sisi kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menyebabkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Grafik 2-18
Indikator Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Grafik diatas menunjukkan persentase angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani, tahun 2017-2021 semua kasus tertangani 100%. Mulai tahun 2017-2021 di Kabupaten Madiun kasus terbanyak yang ditangani adalah pelecehan seksual terhadap anak dan kekerasan fisik terhadap anak. Berikut jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.

Tabel 2.72
Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2017 – 2021
Kabupaten Madiun

No.	Kasus	2017			2018			2019			2020			2021		
		D	D	A	J	D	D	A	J	D	D	A	J	D	A	J
1.	Fisik	3	0	3	1	0	1	2	0	2	0	2	2	2	1	3
2.	Psikis	0	0	0	3	1	4	2	3	5	0	7	7	0	3	3
3.	Seksual	0	17	17	1	13	14	0	6	6	0	10	10	2	7	9
4.	Penelantaran ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
6.	TKI/TKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	17	20	5	14	19	4	9	13	0	19	19	4	15	19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2022

Catatan : D = Dewasa A = Anak J = Jumlah

2.1.3.2.3. Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan memiliki aspek yang luas menyangkut bagaimana pangan berproduksi secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, aman, merata dan harga terjangkau oleh masyarakat. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi, distribusi dan pola konsumsi bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan utama di Kabupaten Madiun yaitu beras lebih banyak daripada kebutuhan konsumsi pangan penduduk atau terjadi surplus beras, begitu pula dengan ketersediaan jagung. Kabupaten Madiun merupakan salah satu penyangga pangan provinsi Jawa Timur. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di kabupaten lainnya. Dilihat dari PPH yang dicapai menunjukkan angka yang terus membaik. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dari 73,30 menjadi 83,3. Capaian ini termasuk dalam kategori daerah sangat tahan pangan.

Tabel 2.73
Capaian Urusan Pangan Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Pangan Utama	314.774.47	344.858.41	385.532.45	347.181.06	29.471
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,70	73,30	80,20	80,20	83,3
4	Indeks Ketahanan Pangan	n/a	81,94	82,45	85,00	84,85

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Ketersediaan pangan utama

Dalam perhitungan Ketersediaan pangan utama di tahun 2021 dimana di Kabupaten Madiun beras sebagai komoditasnya, terdapat sedikit perubahan. Untuk tahun-tahun sebelumnya, ketersediaan dihitung langsung pertahun dan bersifat kumulatif, sedangkan untuk tahun 2021 dan kedepannya, ketersediaan dihitung tiap bulan dan tidak bersifat kumulatif.

Indeks Ketahanan Pangan

Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah 84,85. Kabupaten Madiun menempati peringkat ke-34 dari 416 kabupaten yang ada di Indonesia. Jika dilihat pada tabel diatas ada penurunan dari tahun 2020 dari 85,00 turun pada tahun 2021 menjadi 84,85. Hal ini wajar mengingat tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang meruntuhkan semua sektor urusan baik tingkat nasional maupun lokal. Penilaian Indeks Ketahanan Pangan menggunakan sumber data n-1, dimana untuk Indeks Ketahanan Pangan 2021 menggunakan data tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan 2020 menggunakan data tahun 2019, begitupun untuk tahun-tahun sebelumnya.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

PMK atau dikenal juga sebagai Food and Mouth Disease (FMD) adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan virus. Penyebab PMK yaitu virus tipe A dari family Picornaviridae, genus apthovirus. Masa inkubasi virus ini adalah 2-14 hari (masa sejak hewan tertular penyakit sampai timbul gejala penyakit. Adapun jenis hewan yang rentan tertular yaitu sapi , kerbau, unta, gajah, rusa kambing, domba dan babi.

Cara penularan PMK:

1. Kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita (droplet, leleran hidung, serpihan kulit);
2. Vektor hidup (terbawa manusia, dll);
3. Bukan vektor hidup (terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang dll);
4. Tersebar melalui angin, daerah beriklim khusus (mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut)

Gejala hewan yang terserang PMK yang paling umum adalah demam dan munculnya lepuh, bisul serta koreng pada mulut, lidah, hidung, kaki dan puting. Kemudian lesi atau kerusakan (ketidaknormalan) di bagian atau jaringan pada sela jari kaki. Ternak yang terinfeksi biasanya mengalami depresi, enggan bergerak, cairan hidung dan air liur

berlebihan dan hilang nafsu makan. Akibatnya terjadi penurunan pada produksi susu, berat badan dan pertumbuhannya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor: 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 06 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur maka diperlukan penanganan dan pengendalian wabah PMK di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun termasuk salah satu daerah terdampak PMK di Jawa Timur. Ada 2 (dua) Kecamatan yang terdampak yaitu Kecamatan Kebonsari dan Kecamatan Saradan.

Langkah yang telah dilakukan antara lain meningkatkan kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular agar kasus tidak meluas. Sebagai tindakan preventif/pencegahan PMK dilakukan koordinasi dengan Forkompinda, Muspika dan Petugas Lapangan DKPP untuk memantau perkembangan kasus di wilayah, pemberian obat, vitamin, desinfektan, pelaksanaan vaksinasi pada hewan dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk sapi yang akan diperjualbelikan untuk hewan kurban.

2.1.3.2.4. Pertanahan

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP).

Urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun antara lain ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten sebanyak tiga bidang.

Program nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Madiun dari target 74.750 sertifikat hak atas tanah (SHAT) sudah diserahkan ke masyarakat sebanyak 33.428 buah, yang belum diserahkan dan siap diserahkan pada tahun 2022 sebanyak 12.526 buah.

Tabel 2.74

Capaian Urusan Pertanahan Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten (m2)	13.472	4.104	13.225	13.228	3.220

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Madiun. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan tutupan hutan sebagai indikator.

Tabel 2.75

Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017– 2021
Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,87	82,39	84,07	84,66	84,99
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,09	56,96	48,71	50,00	50
3	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	90,22	90,26	90,38	90,38	61,49
4	Pencemaran Pemantauan status mutu air	51,61	44,04	51,61	51,61	100
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
6	Persentase penanganan sampah (Persentase sampah yang terangkut)	27,23	28,92	28,92	28,92	-

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)	7,14	7,09	7,07	7,09	-
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen (amdal, UKL-ULP) (%)	100	100	100	100	-
9	Rasio tempat penampungan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	9,07	9,07	9,07	9,07	-
10	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	-
11	Rasio Ruang Terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (Urusan Lingkungan Hidup)	9,12	9,12	9,12	9,12	-
12	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	60
13	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	2
14	Presentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	-	-	-	-	100
15	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang teratasi	-	-	-	-	100
16	Presentase pencemaran yang bisa ditanggulangi	-	-	-	-	50
17	Presentase pemulihan Lingkungan yang terlaksana	-	-	-	-	5
18	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air (%)	-	-	-	-	7
19	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di kelola (ha)	-	-	-	-	22
20	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman hayati yang terlaksana	-	-	-	-	50
21	Presentase usaha /Kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan Limbahnya	-	-	-	-	100
22	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan Limbah B3	-	-	-	-	10
23	Presentase izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di terbitkan	-	-	-	-	100
24	Jumlah usaha yang memenuhi persyaratan Lingkungan	-	-	-	-	10
25	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	-	-	-	-	30
26	Jumlah akumulasi penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	20
27	Presentase penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	-	-	-	-	40
28	Jumlah penerima penghargaan lingkungan Hidup	-	-	-	-	3
29	Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	-	-	-	-	60
30	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	2
31	Presentase sampah yang tertangani	-	-	-	-	40
32	Jumlah sarana yang dikelola	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan capaian urusan lingkungan hidup, untuk tahun 2018- tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Udara meningkat dari tahun 2019-2020, tahun 2019 sebesar 84,07 menjadi 84,66 di tahun 2020.
 2. Indeks Kualitas Air meningkat dari tahun 2017-2018, tahun 2017 sebesar 56,09 menjadi 56,96 ditahun 2018. Tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu menjadi 48,71. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 50,00.
 3. Indeks Tutupan Hutan tahun 2018 sebesar 90,26 meningkat menjadi 90,38 ditahun 2019, stagnan pada tahun 2020.
 4. Pencemaran pemantauan status mutu air cenderung meningkat, tahun 2018 sebesar 44,09.
 5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen, tahun 2017-2020 sebesar 100%.
 6. Penegakan hukum lingkungan tahun 2017-2020 sebesar 100%.
 7. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tetap yaitu 9,12.
- Sedangkan untuk tahun 2021 hasil capaian kinerja Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table 2.63 angka 12 sampai dengan 32.

Tabel 2.76
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	66,46	71,67	66,55	70,27	71,43
2	Provinsi Jawa Timur	66,29	66,36	67,10	67,07	68,29
3	Kabupaten Madiun	78,37	77,91	75,98	76,55	66,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 - 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 - 58
7. Waspada : <50

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan sejak RPJMN 2015-2019 dengan baseline tahun 2014 sebesar 63,0-64,0

(kurang) dan target sampai dengan 2019 sebesar 66,5-68,5 (cukup). Dan pada RPJMN 2019-2024 IKLH masih menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan hidup. Adapun IKLH Kabupaten Madiun Tahun 2017 sebesar 78,37 turun menjadi 66,69 pada tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan formula perhitungan IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup No: S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH Tahun 2020-2024, perhitungan IKLH menggunakan rumus perhitungan baru sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = $(0,376 \cdot IKA) + (0,405 \cdot IKU) + (0,219 \cdot IKL)$. Perhitungan untuk status mutu air dan koefisiennya (IKA) masih sama akan tetapi ada penghilangan parameter Total Coliform sehingga ada penurunan dalam hasil yang didapat. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih menggunakan rumus yang sama, sedangkan untuk Indeks Tutupan Lahan (ITL), daerah kabupaten/kota hanya bisa menambah di wilayah belukar saja, untuk target maksimal di angka 61 dan diharapkan tidak lebih dari angka ini karena wilayah hutan yang diakui sebatas itu (harus memasukkan di aplikasi web site kementerian melalui *google earth*). ITL sampai dengan tahun 2020, nilai bisa diatas 90 dan mulai tahun 2021 tidak boleh lebih dari 61. Capaian nilai IKLH mulai tahun 2021 sebesar 66,69. Capaian ini masih dibawah angka Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013. Sedangkan di Kabupaten Madiun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut merupakan gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.77
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017 -2021
Kabupaten Madiun

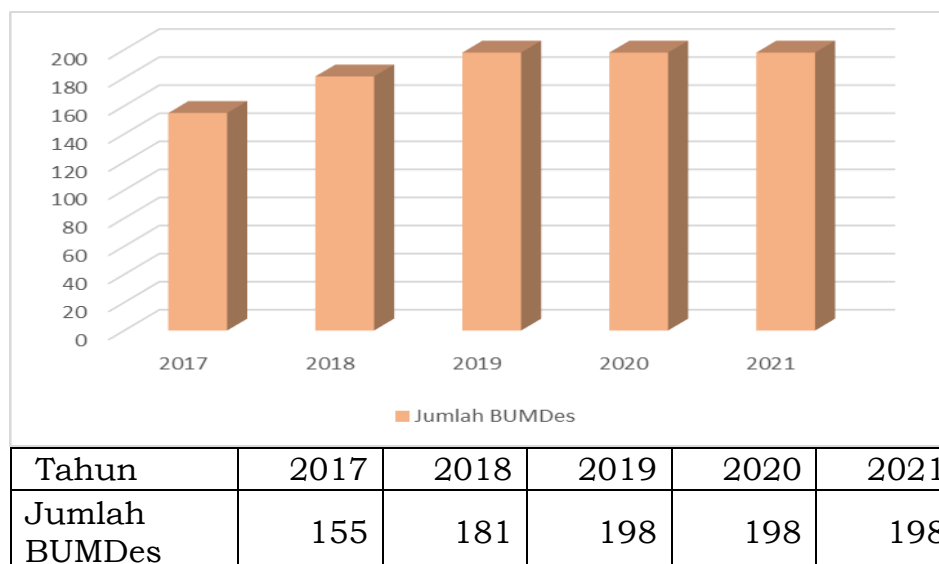
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP)(%)	n/a	83	84	84	95,51
2	Rasio bayi berakte kelahiran (persentase kepemilikan akta kelahiran)(%)	n/a	45.71	43.55	44.52	97,47
3	Rasio pasangan berakte menikah	n/a	19,63	66,25	70,69	51
4	Persentase kepemilikan KTP (%)	94	82.69	83.52	84.63	95,51
5	Rasio Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	882	457	326,204	340,504	344,744
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	ada	Ada	ada	ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Rasio penduduk yang ber KK	n/a	92.29	93.17	93.71	13.446
9	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA)	na	10	33	55	66,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2022

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Mandiri Perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangan desa/kelurahan melalui kegiatan lomba desa/kelurahan dan pendataan profil desa.

Grafik 2.19
Data Perkembangan BUMDes Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021



Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah membuat beberapa langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable melalui program pembangunan desa. Untuk pelaksanaan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk menetapkan status kemajuan suatu desa. Status desa yang disebut dengan klasifikasi desa berdasarkan IDM ini dijelaskan dalam Permen desa PDTTrans No 2 Tahun 2016, yang menggolongkan desa kedalam 5 status, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Jumlah dan status desa di Kabupaten Madiun berdasarkan Indeks Desa Membangun tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.78
Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa Mandiri	-	1	4	19	44
2	Desa Maju	-	51	100	133	150
3	Desa berkembang	-	146	94	46	4
4	Desa Tertinggal	-	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	-	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2022

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah

penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%). Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga kesejahteraan adalah diukur dengan indikator, sebagai berikut:

Tabel 2.79
Indikator Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) / Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (%)	76,05	77,19	76,29	77,11	77,53
2	Laju pertumbuhan penduduk	0,28	0,22	0,19	1,14	1,14
3	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi (<i>Total Fertility Rate / TFR</i>)	2,02	2,19	2,23	2,17	2,31
4	Unmet Need KB (%)	10,36	9,93	9,78	8,63	8,04
5	ASFR 15 - 19 atau <i>Age Specific Fertility Rate 15 - 19</i>	23	37	11,07	0	0

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB PPPA Kab. Madiun, Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan indikator pengendalian penduduk dan KB tahun 2017 - 2021. Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif meningkat setiap tahun, tahun 2017 sebanyak 76,05 menjadi 77,53 di tahun 2021. Laju pertumbuhan Penduduk tahun 2017 sebanyak 0,28. Laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun di tahun 2018 menjadi 0,22 di tahun 2019 dan meningkat signifikan di tahun 2020 yaitu 1,14. Dan pada tahun 2021 tetap 1,14. Rata-rata jumlah anak yang lahir tahun 2017 sebanyak 2,02 dan meningkat sebesar 2,31 di tahun 2021

2.1.3.2.9. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat strategis dan penting dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Madiun. Pembangunan sektor perhubungan sangat berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya. Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jalan, memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan

lalu lintas di jalan, maka ditetapkan beberapa indikator perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.80
Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2018-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PJU kondisi baik (titik)	4.568	4.673	4.696	4.892	
2	Rasio ijin trayek	0,0000601	0,00007704	0,0000809	0,0000956	
3	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	5.071	5.130	5.294	5.682	
4	Pemasangan rambu-rambu					
	- rambu - rambu (%)	96	100	-	-	
	- warning light (%)	100	100	-	-	
	- marka (m2)	99	100	-	-	
	- Guard Rail (m)	83	100	-	-	
5	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan berkeselamatan (%)	n/a	n/a	56,5	65	
6	Persentase kendaraan yang layak jalan (%)	116	127,05	154,28	117,44	
7	Panjang median jalan dalam kondisi baik (m)	9.000	9.000	9.000	9.000	
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00238	0,00259	0,00251	0,00256	
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	167.800	159.410	151.439	143.867	
10	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	8.375	7.956	7.558	7.180	
11	Jumlah Shelter	-	-	2	2	
12	Jumlah Halte	15	15	17	17	
13	Prosentase Sarana Prasarana dan perlengkapan yang berfungsi baik	-	-	-	-	75
14	Persentase kendaraan laik Jalan	-	-	-	-	91,5
15	Prosentase Angka tertib Lalulintas	-	-	-	-	64
16	Prosentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota	-	-	-	-	100
17	Prosentase penerbitan izin	-	-	-	-	100

	penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir					
18	Prosentase Pengujian berkala kendaraan Bermotor	-	-	-	-	91,5
19	Prosentase Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	64
20	Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat PJU kondisi baik terus meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dari 4.673 titik meningkat menjadi 4.892 titik. Beberapa indikator capaian urusan perhubungan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berfluktuatif. Sebagai contoh persentase kendaraan yang layak jalan pada tahun 2018 sebesar 127,05 persen naik menjadi 154,28 persen tahun 2019, dan turun lagi menjadi 117,44 pada tahun 2020.

Sesuai dokumen perubahan RPJMD 2018-2023 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja. Yang ditunjukkan pada table 2.68 angka 13 sampai 20.

Presentase jumlah sarana dan prasarana jalan meningkat, demikian juga untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). Sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan dikarenakan penumpang lebih memilih angkutan system *on-line* daripada menggunakan angkutan umum yang tersedia.

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator :

- Jumlah jaringan komunikasi;
- Jumlah pertemuan dengan media massa;
- Jumlah *website* milik pemda;
- Jumlah PD yang memiliki jaringan internet;
- Jumlah *website* Perangkat Daerah yang aktif;
- Diseminasi informasi kepada masyarakat; dan

- Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Strategi dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan akses data informasi bagi instansi dan masyarakat dengan kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan instansi kemitraan dan kerjasama dengan media massa sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.81
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jaringan komunikasi (1 Unit/Kecamatan)	0	15	15	15	
2	Jumlah pertemuan dengan media massa	6	6	6	1	
3	Ketersediaan Webside milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	52	61	61	61	
5	Jumlah <i>website/blog</i> resmi SKPD yang aktif	47	45	46	53	
6	Pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui :					
	- Media massa radio	12X	12X	12X	setiap hari	
	- Media Baru / <i>online website</i>	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	
	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)					
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tingkat Kecamatan	0	0	18	9	
	- Jumlah Aplikasi <i>E – Government</i>	79	79	84	11	
7	Ketersediaan <i>Website</i> milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	-	-	-	100
9	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun	-	-	-	-	1.644
10	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah	-	-	-	-	106
11	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	-	-	-	-	100
12	Jumlah nama domain Perangkat Daerah	-	-	-	-	53
13	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2021 sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD. Indikator yang ditetapkan pada tahun 2021 meliputi persentase desiminasi layanan informasi publik, Jumlah informasi yang dipublikasikan, Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi

layanan SPBE, Jumlah nama domain Perangkat Daerah, Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Dari indikator tersebut peningkatan pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media massa radio dilakukan yang semula dari 12 kali dalam setiap tahun menjadi setiap hari. Terdapat penurunan dalam cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tingkat kecamatan pada tahun 2019 sebesar 18 kelompok menjadi 9 kelompok pada tahun 2020. Demikian juga untuk jumlah aplikasi *E-Government* juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena penyesuaian kebutuhan pengembangan dan pembangunan aplikasi setiap tahun berbeda, sehingga jumlah aplikasi dapat berubah setiap tahun sesuai kebutuhan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Kabupaten Madiun secara bertahap telah melaksanakan SPBE dan dilakukan pengukuran indeks SPBE pada tahun 2021. Nilai indeks merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut

No.	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil pengukuran indeks SPBE Kabupaten Madiun pada tahun 2021 sebesar 3,21 termasuk predikat 3 kategori baik.

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Madiun masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Madiun terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Jumlah Koperasi dan Struktur Komponen Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	790	792	792	792	792
2	Koperasi Aktif	674	677	685	685	381
3	Koperasi Tidak Aktif	116	115	107	107	411
4	Jumlah Anggota	210.579	145.877	155.851	188.963	179.109
5	Jumlah Simpanan (Rp.000.000,-)	181.314		354.878	365.037	165.531,493

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
6	Volume Usaha (Rp.000.000,-)	723.045	604.980	635.608	664.805	431.947,828
7	SHU (Rp.000.000,-)	23.335	46.427	47.121	48.005	12.349,103
8	Pengurus Koperasi(orang)	2.370	2.376	2.376	2.376	1.143
9	Karyawan	1.367	1.241	1.214	1.143	508
10	Modal Sendiri (Rp.000.000,-)	265.615	309.426,497	354.878,097	365.037,624	165.531,493
11	Modal Luar (Rp.000.000,-)	452.858	555.503,327	498.147,911	505.345,552	161.080,406
12	Asset (Rp.000.000,-)	718.473	864.929,824	853.026,008	870.383,176	325.722,12

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Koperasi Aktif merupakan salah satu sarana atau alat Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program-program pembangunan di Kabupaten Madiun. Secara kebijakan makro perekonomian, Pemerintah dapat mempengaruhi, mengendalikan atau mengawasi secara langsung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan anggota yang lebih baik melalui program dan kegiatan sesuai dengan bidang koperasi tersebut. Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2021 kriteria koperasi aktif mengacu pada sistem ODS Kementerian Koperasi yang salah satu syaratnya adalah melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut. Sedangkan asumsi koperasi aktif tahun-tahun sebelumnya adalah yang pernah melaksanakan RAT maka sudah dikategorikan sebagai koperasi aktif.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam peningkatan Koperasi Aktif tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas kinerja koperasi dan sumberdaya pengurus koperasi.
- b. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan melalui laporan keuangan koperasi.
- c. Insentif bantuan permodalan bagi koperasi.
- d. Revitalisasi peran koperasi.

UMKM juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena berdampak pada peningkatan tenaga kerja dan berpengaruh pada meningkatnya PDRB atau pendapatan perkapita. Karakteristik utama yang dimiliki oleh UMKM salah satunya merupakan usaha padat karya yang menyerap tenaga kerja dimana peningkatan tenaga kerja. Langkah-

langkah optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam peningkatan UMKM tersebut adalah meliputi:

- a. Inventarisasi data perkembangan UMKM dan peningkatan kualitas lembaga UMKM meliputi Manajemen, SDM dan Sarana Prasarana.
- b. Fasilitasi UMKM dengan Lembaga Keuangan dan Non Keuangan dalam segi permodalan.
- c. Fasilitasi promosi dan jaringan pemasaran. Fasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak swasta dalam bentuk CSR, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.83
Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	UMKM (unit)	45.521	128.090	128.114	128,143	128.169
2	Tenaga Kerja (orang)	96.630	207.748	207.788	207.856	207.912
3	Usaha Mikro	n/a	12.860	13.012	13.166	13.516
4	Usaha Mikro yang di bina	n/a	240	230	297	1.175
5	Usaha mikro yang naik kelas	n/a	6	32	89	170

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Madiun dan BPS Kab Madiun, Data Diolah

Di masa pandemi jumlah UMKM meningkat karena banyak SDM pabrik yang dirumahkan sehingga banyak yang buka usaha dirumah. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun terdapat program kegiatan pembinaan usaha mikro sehingga ikut menambah jumlah usaha mikro yang dibina dan menambah jumlah usaha mikro yang naik kelas diantaranya fasilitasi halal, merek, uji nutrisi, PIRT, NIB.

Dilihat dari jumlah, maka UMKM di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dari 45.521 pada tahun 2017 hingga mencapai 128.143 di tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat menjadi 128.169 Dengan terjadinya peningkatan jumlah unit UMKM tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang semakin besar. Jika di tahun 2017 terdapat 96.630 tenaga kerja, capaian tersebut meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 207.912 tenaga kerja.

Usaha Mikro merupakan irisan yang tidak terpisahkan dalam kaitannya terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Madiun. Capaian optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro pada setiap tahunnya meningkat yaitu sejumlah 12.860 unit pada tahun 2018. Dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 13.516 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen terhadap penumbuhan dan

pengembangan perekonomian di sektor bawah yaitu Usaha Mikro, yang mendominasi kondisi perekonomian khususnya di Kabupaten Madiun dengan melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia (SDM) secara berkelanjutan menjadi Usaha Mikro yang naik kelas yang mampu bertahan, berkembang dan bersaing di era digital saat ini.

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perijinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.84
Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Lama proses perijinan (dalam hari)	1-10	10	10	10	14
2.	Jumlah ijin yang diterbitkan (buah)	3.698	2.140	1.784	2.255	2.255

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Mengukur capaian urusan penanaman modal diukur berdasarkan 2 indikator yaitu lama proses perijinan dan jumlah ijin yang diterbitkan. Lama proses perijinan dari tahun 2017 – 2021 tetap sama yaitu dalam rentang waktu 1-10 hari. Jumlah ijin yang diterbitkan 2 (dua) tahun terakhir mengalami kenaikan, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 3.243 ijin dan di tahun 2017 tercatat sebanyak 3.698 ijin. Adanya suatu peningkatan permohonan ijin usaha sebanyak 455 ijin. Hal ini mengindikasikan bahwa para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sudah mulai melihat peluang investasi yang baik di wilayah Kabupaten Madiun. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2018 yang hanya 2.140, kemudian semakin berkurang menjadi 1.784 di tahun 2019, dan mengalami penambahan pada tahun 2020 dengan menjadi 2.255 dan pada tahun 2021 jumlahnya tetap.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi. Capaian urusan kepemudaan dapat di lihat pada tabel 2.82.

Tabel 2.85
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	13	23	23	23	9
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	16	15	17	23	27
3.	Jumlah Aktivitas dan Pengembangan Kepemudaan	7	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah organisasi pemuda mengalami penurunan pada tahun 2021 dikarenakan banyak organisasi pemuda belum melakukan update data dan belum melaporkan susunan kepengurusan serta AD/ART organisasi pemuda yang bersangkutan.

Jumlah organisasi Olahraga mengalami peningkatan dari 23 pada tahun 2021 menjadi 27 pada tahun 2022 karena terbentuknya kepengurusan organisasi olahraga baru diantaranya ISSI (Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia), E-SPORT, KICK BOXING, dan AEROMODELLING.

Jumlah aktifitas dan pengembangan kepemudaan pada tahun 2021 kosong, karena sudah tidak dijadikan sebagai indikator pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun.

2.1.3.2.14. Statistik

Dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan

pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Tabel 2.86
Capaian Urusan Statistik Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Buku “PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Indikator capaian urusan statistik tahun 2017-2021 yaitu ketersediaan buku kabupaten dalam angka dan PDRB Kabupaten.

2.1.3.2.15. Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Urusan Pemerintah Bidang Persandian merupakan urusan pendukung pencapaian kinerja dalam meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 2.87
Capaian Indikator Persandian Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SDM Persandian	6	7	6	5	5
2	Persentase Informasi yang diamankan	104	94,25	96,97	67,50	100
3.	Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Indikator capaian urusan persandian tahun 2017 – 2021 yaitu Jumlah SDM persandian dan persentase informasi yang diamankan. Jumlah SDM persandian tahun 2017 yaitu sebesar 6 sedangkan di tahun 2018 jumlah SDM persandian menjadi 7. Jumlah ini terus menurun sampai dengan tahun 2020. Dan pada tahun 2021 jumlah SDM persandian stagnan, Persentase informasi yang diamankan tahun 2017 sebesar 104 dan menurun pada tahun 2018 menjadi 94,25 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 67,50. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 100 %.

Sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD terdapat penambahan indicator kinerja yaitu persentase pengamanan informasi pemerintah daerah.

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Madiun terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2.20
Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2021



Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	409	409	260	315	96
jumlah sarana peneyelenggaraan seni dan budaya	51	32	34	34	52
jumlah benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan	207	207	212	216	458

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam untuk melestarikan budaya daerah yaitu dengan melakukan update data pokok kebudayaan yang meliputi 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Seni Budaya yang dikembangkan dan dilestarikan	100%	100%	57,57%	99,54%	100%
2	Persentase seni budaya yang dikembangkan	-	-	18,42%	55,57%	94,57%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2022

Sesuai dengan tabel diatas, persentase seni dan budaya yang dipelihara dan dilestarikan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan adanya pembaharuan data melalui data pokok kebudayaan yang dipersiapkan dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (PPKD) Kabupaten Madiun, berdasarkan klasifikasi obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan persentase seni dan budaya yang dikembangkan, baru dilakukan pengembangan pada tahun 2019. Prioritas pada penataan data pokok kebudayaan yang disesuaikan dengan obyek pemajuan kebudayaan, sebagai tahap awal dalam melakukan pengembangan.

Beberapa obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan di Kabupaten Madiun sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu:

1. Manuskrip sebanyak 43: Naskah kuno ciptaan masyarakat Kabupaten Madiun, yang ada Kab Madiun 12 buku dan 31 buku di Luar Kab. Madiun (di perpustakaan Jogjakarta, Perpustakaan Solo, Perpustakaan UI dll), rencana akan dilakukan digitalisasi manuskrip tahu Kuning Desa Nglambang
2. Tradisi Lesan yaitu Cerita rakyat yang diwariskan turun temurun, (Cerita Keris Tundung Mediu, Cerita Raden Ajeng Retno Tradisi Lesan sebanyak 8 yaitu Djumilah, Cerita Dongkrek Madiun, Cerita Kerajaan Gelang-gelang, Cerita Berdirinya Masjid Basyariyah Sewulan, Cerita Putri Cacing Dolopo, Cerita Ratu Kencana Wungu, Cerita Nyai Lambang Kuning Desa Nglambangan)
3. Bahasa yaitu Bahasa yang beredar di Masyarakat Kabupaten Madiun (bahasa Jawa, indonesia, Inggris, Arab, Jepang, Korea dll)
4. Adat Istiadat (Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Krebet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil (Panen Padi), Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman Silaturahmi dll)

5. Pengetahuan Tradisi bersumber dari tradisi yang ada di Kabupaten Madiun(Pembuatan Jamu tradisional, Pembuatan brem, manco, Membatik dll)
6. Teknologi Tradisi yaitu pemanfaatan Teknologi tradisional yang diwariskan pada generasi berikutnya (Teknologi pembuatan alat dongkrek, teknologi pembuatan Gerabah, Dokar, Teknik ani-ani, pembuatan jamu, brem, gula merah dll)
7. Seni, di Kabupaten Madiun terdapat 29 jenis Kesenian, 732 jumlah pelaku seni yang memiliki KIKK (Kartu Induk Kesenian dan Kebudayaan)
8. Permainan rakyat, yaitu permainan tradisi yang berkembang di masyarakat (Egrang, tlompah panjang, dakon, Macanan, betengan, patil lele, bekelan, nekeran dll)
9. Olah raga Tradisional, yaitu Olah raga yang masuk data KONI, untuk diikuti lomba Olahraga Tradisional (Pencak silat dan Egrang, Tlompah panjang, Dagongan, Gobak sodor)
10. Ritus (Upacara Kelahiran, Upacara Tingkepan, Upacara 7 Bulanan (Piton-piton), Tradisi Lamaran, Upacara Pernikahan, Upacara Kematian, Upacara Labuhan Tulak Bilahi Desa Kreet, Bersih Desa, Pembagian Warisan, Pembagian Air Irigasi, Metil (Panen Padi), Tradisi Syukuran Kemerdekaan, Tradisi Sungkeman Silaturahmi dll)

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Gambaran umum pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan yang didukung peran perpustakaan di Kabupaten Madiun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.89
Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan (Unit)	57	57	57	57	57
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)	28.934	31.001	35.169	14.415	10.247
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	27.407	32.600	34.353	34.444	34.367

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, baik dari jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan maupun jumlah koleksi

buku, meskipun jumlah perpustakaan pada tahun 2017 – 2021 tidak ada peningkatannya, namun jumlah koleksi buku perpustakaan terdapat peningkatan sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan yang semakin meningkat.

Tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan menurun drastis menjadi 14.415 pengunjung atau turun sebesar (59,01%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jumlah tersebut terus pada tahun 2021 menjadi 10.247 pengunjung. Hal ini masih terpengaruh oleh adanya pandemic covid-19 pada tahun 2021.

2.1.3.2.18. Kearsipan

Pembangunan urusan kearsipan di Kabupaten Madiun dapat dilihat melalui peningkatan SDM pengelola arsip dan pengelolaan arsip secara baku. Capaian kinerja kearsipan di Kabupaten Madiun tahun 2016–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.90
Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	2	4	11	14,8	28
2	Jumlah peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	80	80	80	80	80
3	Jumlah perangkat daerah yang tertib arsip	0	0	1	8	20
4.	Nilai Audit Kearsipan Eksternal	35,65	68,21	67,94	78,23	71,64

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Kinerja urusan kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2017– 2021 beberapa indikator mengalami peningkatan yaitu persentase pengelolaan arsip secara baku dan jumlah perangkat daerah yang tertib arsip. Sedangkan untuk Jumlah peningkatan SDM pengelolaan kearsipan stagnan.

Nilai Audit Kearsipan Eksternal dari tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuatif, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 68,21turun pada tahun 2019 menjadi 67,94. Pada tahun 2020 naik lagi menjadi 78,23 dan turun kembali pada tahun 2021 menjadi 71,64.

2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Pariwisata

Urusan pariwisata yang dilaksanakan di setiap wilayah Kabupaten / Kota di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata. Maraknya pembangunan pariwisata di berbagai daerah yang selama ini berlangsung, dapat

dijadikan acuan dan motivasi untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Madiun karena dari aspek sumber daya alam Kabupaten Madiun memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi salah satu tujuan pariwisata nasional maupun internasional.

Tabel 2.91
Perkembangan Bidang Pariwisata Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kunjungan Wisata (orang)	438.906	544.781	464.597	130.024	119.738
2.	Jumlah Obyek Wisata Yang Telah Dikembangkan (Unit)	11	12	13	22	24
3.	Spending of Money/ Pengeluaran Wisatawan (Rp.000,-)	0	0	0	0	442.753.297,14

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kunjungan wisata pada tahun 2021 masih mengalami penurunan dari tahun 2019 karena masih dalam kondisi pandemi covid-19, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Madiun tentang perpanjangan PPKM bagi destinasi wisata, yang mana ada pembatasan jumlah pengunjung selama 7 bulan pada tahun 2021. Hal ini berdampak pada jumlah kunjungan wisata. Sedangkan jumlah objek wisata yang telah dikembangkan mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dari 22 unit meningkat menjadi 24 unit. Hal ini didasarkan pada sarana dan prasarana pariwisata yang ditempatkan di destinasi wisata. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Madiun.

Sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Spending of Money menjadi salah satu indikator sasaran dari kepala daerah mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 . Spending of Money adalah jumlah uang atau jumlah pengeluaran yang dibelanjakan oleh Wisatawan dimulai dari pengeluaran saat meninggalkan atau keluar dari rumah sampai tiba dan meninggalkan destinasi wisata. Bertujuan untuk mengukur potensi tingkat pengeluaran wisatawan dari sisi profil geografis asal wisatawan serta preferensi konsumsi yang mereka lakukan dalam rangka memenuhi unsur kebutuhan, keinginan dan harapan dari wisatawan selama tinggal pada destinasi pada durasi lama tinggal serta faktor demografis wisatawan berdasarkan lima kategori pengeluaran, yaitu akomodasi, transportasi, makan dan minum, belanja lainnya(fasilitas wahana, tiket, dll), dan pengeluaran lainnya(belanja souvenir, belanja hiburan, dll).

Capaian spending of money pada tahun 2021 sebesar Rp. 442.753.297,14. Upaya untuk meningkatkan nilai spending of money akan terus dilakukan dengan menarik sebanyak banyaknya pengunjung wisata baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dengan cara meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata baik berupa sarana fisik maupun pengembangan SDM Pariwisata guna mendukung pengembangan wisata minat khusus di Kabupaten Madiun. Upaya lain yang dilakukan untuk mendatangkan wisatawan adalah dengan melaksanakan promosi wisata melalui penguatan promosi wisata melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.

Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/441/KPTS/402.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/396A/KPTS/402.013/2016 tentang Destinasi Wisata Kabupaten Madiun, dapat disampaikan obyek wisata di Kabupaten Madiun, antara lain:

Tabel 2.92
Obyek Wisata di Kabupaten Madiun

NO	OBYEK WISATA	LOKASI
A. WISATA ALAM		
1	Wana Wisata Grape	Desa Kresek, Kec. Wungu
2	DungusForest Park	Kel. Wungu, Kec. Wungu
3	Air Terjun Seweru/Slampir	Desa Kare, Kecamatan Kare
4	Agro Wisata Perkebunan Kopi Kandangan	Desa Kare, Kecamatan Kare
5	Wana Wisata Tambak Lare	Desa Kare, Kecamatan Kare
6	Wana Wisata Nongkoljo	Desa Kare, Kecamatan Kare
7	Air Terjun KrecekanDenu	Desa Kepel, Kecamatan Kare
8	Air Terjun Banyu Lawe	Desa Kepel, Kecamatan Kare
9	GligiForest Park	Desa Kepel, Kecamatan Kare
10	Air Terjun Selo Aji	Desa Randu Alas, Kec. Kare
11	Air Terjun Coban Kromo	Desa Bodag, Kecamatan Kare
12	Wana Wisata Selo Gedong	Desa Bodag, Kecamatan Kare
13	Air Terjun Panguripan	Desa Cermo, Kecamatan Kare
14	Hutan Pinus Hargo Wilis Poleng	Desa Cermo, Kecamatan Kare
15	Wana Wisata Watu Rumpuk	Desa Mendak, Kec. Dagangan
16	Air Terjun Jambu	Desa Mendak, Kec. Dagangan
17	Pesanggrahan	Desa Segulung, Kec. Dagangan
18	Bukit Asmara Puyangan	Desa Durenan, Kec. Saradan
19	Air Terjun Coban Drajat	Desa Durenan, Kec. Gemarang
20	Air Terjun Jomblang Tengah	Desa Sidomulto, Kecamatan Wonoasri
B. WISATA BUATAN		
1	Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 Madiun	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Madiun Umbul Square	Desa Glonggong, Kec. Dolopo
3	Waduk Bening Widas	Desa Pajaran, Kec. Saradan
4	Waduk Notopuro	Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng

NO	OBYEK WISATA	LOKASI
5	Waduk Saradan	Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan
6	Waduk Kedung Brubus	Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng
7	Waduk Dawuhan	Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri
8	Pesona Kali Wungu	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu
C. DESA WISATA		
1	Desa Wisata Kresek	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Desa Wisata Brumbun	Desa Brumbun, Kecamatan Wungu
3	Desa Wisata Nglambangan	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Desa Wisata Batok	Desa Batok, Kecamatan Gemarang
5	Desa Wisata Durenan	Desa Durenan, Kecamatan Gemarang
6	Desa Wisata Gunungsari	Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun
7	Desa Wisata Segulung	Desa Segulung, Kecamatan Dagangan
8	Desa Wisata Mendak	Desa Mendak, Kecamatan Dagangan
9	Desa Wisata Kare	Desa Kare, Kecamatan Kare
10	Desa Wisata Candimulyo	Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo
11	Desa Wisata Singgahan	Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari
12	Desa Wisata Tambakmas	Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari
13	Desa Wisata Kaliabu	Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan
D. WISATA SEJARAH		
1	Candi Wonorejo	Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan
2	Prasasti Mruwak	Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan
3	Prasasti Klagenserut	Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan
4	PrasatiBibrik	Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan
5	Situs Ngurawan	Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo
E. WISATA RELIGI		
1	Makam KH. Basyariah	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan
2	Masjid Agung dan Makam Desa Sewulan	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan
3	Makam/Punden Lambang Kuning	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Makam Kuncen	Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan
5	Masjid Quba	Kecamatan Mejayan
6	Makam Syekh Maulana Abdullah	Desa Bodag, Kecamatan Kare
F. WISATA BUDAYA		
1	Sanggar Kesenian Dongkreng	Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan
2	Padepokan Seni Kirun	Desa Bagi, Kecamatan Madiun
3	SEPASMA	Kecamatan Mejayan
4	Perguruan Ilmu Sejati	Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan
5	Padepokan IKS (Ikatan Kera Sakti)	Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri
6	Padepokan Pencak Silat Pandan Alas	Desa Kare, Kecamatan Kare
7	Larung Sesaji Wadung Bening Widas	Desa Pajaran, Kecamatan Saradan
8	Kurasan Sumber Belerang di Umbul	Desa Glonggong, Kec. Dolopo
G. RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN MADIUN		
1	Lapangan Sugihwaras	Kecamatan Saradan
2	Lapangan Ngale	Kecamatan Pilangkenceng

NO	OBYEK WISATA	LOKASI
3	Lapangan Buduran	Kecamatan Wonoasri
4	Lapangan Simo	Kecamatan Balerejo
5	Lapangan Kelurahan Nglames	Kecamatan Madiun
6	Lapangan Sawahan	Kecamatan Sawahan
7	Lapangan Wayut	Kecamatan Jiwan
8	Lapangan Purworejo	Kecamatan Geger
9	Lapangan Sewulan	Kecamatan Dagangan
10	Lapangan Balerejo	Kecamatan Balerejo
11	Lapangan Mojopurno	Kecamatan Wungu
12	Lapangan Batok Dusun Kebatu	Kecamatan Gemarang
13	RTH Seweru Kare	Kecamatan Kare
14	Lapangan Mlilir	Kecamatan Dolopo

Sumber : Disparpora Kabupaten Madiun, Tahun 2022(SK Destinasi Wisata 2019)

2.1.3.3.2. PENGGUNAAN LAHAN

PENGGUNAAN LAHAN meliputi semua sub sektor mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan hingga perkebunan. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian itu disumbang oleh pertumbuhan produksi pertanian yang juga relatif rendah. Tabel dibawah menyajikan pertumbuhan produksi beberapa komoditas pertanian utama.

Tabel 2.93
Pertumbuhan Produksi Tanaman Utama Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	541.250,84	543.260,00	564.295,07	617.483,67	573.113,76
2	Jagung	59.126,57	56.730,62	89.322,51	66.795,95	47.976,73
3	Kedelai	3.491,00	2.580,47	1.483,00	1.638,61	1.282,32
4	Mangga	37.684,24	53.439,42	46.587,00	37.681,96	38.310,89
5	Porang	8.704,95	8.704,95	9.060,15	10.325,01	50.427,78
6	Kakao	917,69	848,90	860,10	511,92	891,98
7	Tebu	11.187,77	19.225,00	14.213,44	12.477,79	12.537,11
8	Cengkeh	451,66	360,73	356,08	178,02	343,82
9	Ikan	3.444,38	3.467,97	4.408,53	4.050,85	4.120,77

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, data diolah Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa komoditas pertanian yang mengalami penurunan produksi. Porang dan kakao adalah produk yang diunggulkan dan memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Namun demikian hingga saat ini porang dan kakao masih menjadi produk yang dijual dalam bentuk mentah. Dengan demikian maka nilai tambah dari produk-produk unggulan ini masih relatif rendah dan belum bisa menambah pendapatan petani secara signifikan. Menurunnya beberapa komoditas sektor pertanian disebabkan oleh beberapa aspek. Pertama, untuk tanaman padi, produksi cenderung naik pada tahun 2017 – 2020, akan tetapi menurun drastic pada tahun 2021. Produksi padi tahun 2017 tercatat 541.250,84 ton, meningkat pada tahun 2020

menjadi 617.483,67 ton. Pada tahun 2021 produksi menurun menjadi 573.113,76 ton atau turun sebesar 7,18%.

Komoditas jagung produksinya mengalami penurunan dikarenakan curah hujan yang cenderung tinggi. Tercatat penurunan produksi jagung yang signifikan pada tahun 2021. Tahun 2020 tercatat sebanyak 66.795,95 ton turun menjadi 47.976,73 ton.

Komoditas tebu yang mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan berkurangnya luas lahan yang ditanami tebu. Luas lahan tebu dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.94
Luas Lahan Tebu tahun 2017-2021 Kabupaten Madiun

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas lahan tebu (Ha)	3.187,40	2.746,56	2.272,23	2.272,23	2.222,15

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, data diolah Tahun 2022

2.1.3.3.3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan disegala bidang. Hal tersebut akan meningkatkan aktifitas pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berdampak terjadinya ketidakseimbangan fungsi lindung dan ekosistem serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Indikator urusan energy dan sumberdaya mineral tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 2.95
Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	5,35	2,49	0,49	-6,35	-0,03
2	Jumlah Pertambangan Berijin (Lokasi)	15	5*	1*	2*	-
3	Kontribusi Pertambangan PAD (Rp.000)	535.426	448.927	234.246	46.102	43.893

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Madiun, data diolah Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah, Data Diolah 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun (MDA.2022)

Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Madiun mengalami penurunan akibat kontraksi terdampak Pandemi yaitu sebesar -6,35 % pada Tahun 2020, sedangkan di Tahun 2021 telah mengalami pertumbuhan menjadi -0,03 %.

Jumlah pertambangan berijin pada tahun 2021 tidak melaporkan karena sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.1.3.3.4. Perdagangan

Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%), Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%) dan Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (PKL). Perdagangan di wilayah kabupaten Madiun didominasi oleh para pedagang dengan modal kecil. Modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan pertumbuhan sektor perdagangan. Perdagangan di Kabupaten Madiun yang ditunjukkan dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mulai tahun 2017-2019. Tahun 2020 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Akan tetapi kenaikannya kurang signifikan. Kenaikan yang kurang signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah keterbatasan modal usaha, masih rendahnya jiwa entrepreneur pada masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun dan pandemi covid-19. Indikator urusan perdagangan selama kurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.96
Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017– 2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,86	16,65	17,19	16,79	16,85
2	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal (%)	32,70	35,80	28,67	28,78	-
3	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%)	-	-	-	-	8,92
4	Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (PKL)	447	600	650	680	744

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Tahun 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2022

Perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam wilayah daerah. Perdagangan ini hanya memiliki pangsa pasar di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan kenaikan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 0,06 persen menandakan bahwa sektor perdagangan masih mengalami perlambatan. Para pelaku perdagangan yang sudah melakukan aktivitas perdagangan antar daerah maupun antar pulau dari wilayah Kabupaten Madiun masih relatif kecil.

2.1.3.3.5. Perindustrian

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun, kebijakan industri pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis agro yang ramah lingkungan. Sedangkan strategi yang dikembangkan adalah:

1. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
2. Mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
3. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil usaha mikro dan industri kecil;
4. Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
5. Mengembangkan kawasan industri menengah – besar pada lokasi khusus yang strategis;
6. Menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal.
7. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri, antara lain penyediaan hunian dan berbagai fasilitas lingkungan bagi karyawan atau buruh industri, serta sarana dan prasarana pendukung keterkaitan proses produksi (hulu – hilir) seperti:
 - a. Menggunakan metode dan/atau teknologi ramah lingkungan;
 - b. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
 - c. Menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri;
 - d. Menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan industri terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
 - e. Meningkatkan nilai tambah, termasuk menggunakan kembali dan mendaur ulang;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan;

- g. Menjalin kerjasama dengan investor maupun dengan kabupaten/kota sekitar dalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
- h. Mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan;
- i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM);
- j. Mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
- k. Mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak dan lain-lain; dan,
- l. Menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan.

Dari sentra industri yang sudah berkembang juga didukung dengan adanya peningkatan cakupan wilayah penambahan tenaga kerja yang semula hanya dalam wilayah satu kecamatan saja berkembang menjadi beberapa kecamatan yang berada disekitaran sentra industri tersebut. Sentra industri dengan skala besar hanya terdapat di sekitaran wilayah perbatasan dengan Kota Madiun, selebihnya sentra industri tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dengan skala sedang dan kecil. Ukuran sedang maupun kecilnya sentra industri ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang diserap serta komoditas apa yang diolah ataupun diperdagangkan.

Contoh dari sentra industri sedang adalah sentra industri pengolahan gembol/akar kayu jati yang tersentra di wilayah Kecamatan Saradan. Pengembangan sentra sentra lainnya harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun bersama dengan pelaku industri lainnya.

Capaian indikator urusan Perindustrian Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	10,2	10,66	10,85	11,00	11,82
2	Pertumbuhan Industri (%)	60,34	62,24	66,38	68,35	4,60
3	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	19	22	23	24	24
4	Jumlah sentra industri yang telah berkembang (unit)	104	108	113	135	157

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sebesar 0,82 persen dari Tahun 2020 sebesar 11,00

persen menjadi 11,82 persen di Tahun 2021. Kenaikan kontribusi tersebut banyak dipengaruhi oleh semakin tertariknya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun. Sedangkan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Madiun mengalami penurunan yang drastic pada tahun 2021. Tahun 2020 sebesar 68,35 persen dan tahun 2021 hanya 4,60 persen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rumus hitung dalam menentukan pertumbuhan industri, yang semula urusan bidang industri berada dibawah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro beralih ke Dinas Tenaga Kerja.

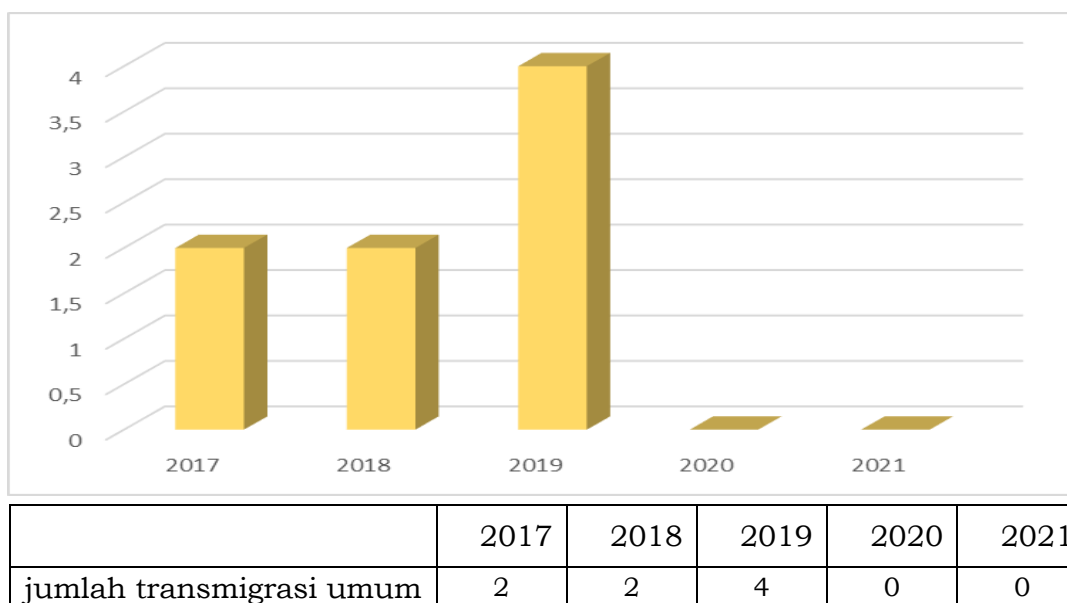
2.1.3.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan diadakan transmigrasi:

1. Untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara;
2. Untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional;
3. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.

Capaian urusan transmigrasi tahun 2017 -2021 dapat di lihat pada grafik berikut.

Grafik 2.21
Indikator Urusan Transmigrasi Tahun 2017 – 2021



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Capaian Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi secara umum tidak ada realisasi. Hal ini didasarkan pada keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 188/311/108.1/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 188/143/KPTS/108.1/2021 tanggal 1 April 2021 tentang penetapan program perpindahan dan penempatan transmigrasi provinsi Jatim Tahun 2021. Didalam surat keputusan tersebut Kabupaten Madiun tidak termasuk dalam daftar pemberangkatan transmigrasi. Secara umum terjadi pengurangan kuota untuk pemberangkatan calon transmigrasi wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehingga tahun 2021 tidak ada pemberangkatan calon transmigrasi sama seperti tahun 2020.

2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.1.3.4.1. Perencanaan

Bappeda Kabupaten Madiun merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Madiun, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.98
Indikator Perencanaan Pembangunan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (buah)	10	7	6	6	7
5	Persentase keterisian SIPD	80	80	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Indikator Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu terealisasinya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi perubahan RPJMD tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan RKPD tahun 2022, perubahan RKPD tahun 2021 dan perubahan RENSTRA perangkat daerah telah ditetapkan dengan peraturan bupati. Persentase keterisian SIPD telah mencapai 100 persen sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sejak tahun 2020 sistem perencanaan sudah terintegrasi dengan penganggaran.

2.1.3.4.2. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 ayat (1) huruf e dan Pasal 219 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Capaian urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.99
Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Madiun	83,33	83,33	83,33	83,33	100%
2.	Prosentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Madiun dan Prosentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah telah mencapai 100 persen.

2.1.3.4.3. Administrasi Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK.

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun mulai Tahun 2014 sampai tahun 2021 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah.

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Madiun masih sangat rendah khususnya kinerja pendapatan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan dalam APBD tahun 2021 mencapai 13,76%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Madiun masih rendah. Hal ini disebabkan karena potensi PAD belum tergali secara optimal. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Realisasi PAD (Milyar)	243,86	219,04	229,20	258,21	333,10
3.	Realisasi PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (%)	13,86	11,97	11,77	14,01	16,11

Sumber : BPKAD, Bapenda Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Sementara itu proporsi anggaran belanja untuk aparatur dari keseluruhan belanja masih di atas 50 persen atau masih lebih besar dari belanja publik. Secara rinci penjelasan mengenai proporsi anggaran belanja ada di bab III. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolalan keuangan daerah belum efektif dan efisien. Kondisi ini disebabkan antara lain:

- a. Kultur *budget maximer* belum bisa dihilangkan;
- b. Sering terjadi perubahan regulasi dan kurang sinkronnya regulasi terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat;
- c. Keterlambatan petunjuk dan pelaksanaan teknis sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah;
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah belum optimal.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai. Beberapa aset pemerintah daerah Kabupaten Madiun belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

2.1.3.4.5. Kepegawaian

Untuk Capaian Indeks PIP (Pengukuran Indeks profesionalitas) ASN pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 indeks PIP 80,48, sedangkan tahun 2021 turun drastis menjadi 48,77. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi BKN yang dulu penghitungan di lakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah sejak oktober 2021 penilaian dilakukan oleh BKN pusat. Sedangkan dalam penilaian BKN pusat terlihat nilai kompetensi sangat kurang. Untuk meningkatkan nilai kompetensi perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: peningkatan kompetensi ASN melalui diklat Workshop, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Pejabat Kabupaten Madiun yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 68,7 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 80 persen. Sebagaimana persentase jabatan struktural yang telah terisi juga mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Tabel 2.101
Capaian Indikator Kepegawaian Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pejabat yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (%)	72,9	77,7	70,8	68,7	80
2	Persentase jabatan struktural yang telah terisi	85,5	76,7	100	91,5	96,5

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Tahun 2022

2.1.3.4.6. Pembinaan dan Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Madiun sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Penguatan pengawasan di Kabupaten Madiun memiliki nilai terendah di komponen variabel Indeks Reformasi Birokrasi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Pelaksanaan *Quality Assurance (QA)* atas Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021

No	Unsur-Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil <i>Self Assessment</i>		Hasil QA	
			Skor	Nilai	Skor	Nilai
1	Lingkungan Pengendalian	30,00 %	-	-	2,233	0,670
2	Penilaian Resiko	20,00 %	-	-	1,200	0,240
3	Kegiatan Pengendalian	25,00 %	-	-	3,000	0,750
4	Informasi dan Komunikasi	10,00 %	-	-	2,200	0,220
5	Pemantauan	15,00 %	-	-	1,867	0,280
Jumlah		100 %				2,160

Sumber: Inspektorat Kabupaten Madiun, 2022

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Madiun belum berlangsung secara optimal disebabkan antara lain:

1. Kurangnya kompetensi APIP di bidang pengawasan.
2. Jumlah APIP yang tidak sebanding dengan jumlah OBRIK
3. Penerapan SPIP belum maksimal
4. Belum adanya aplikasi e-LHP

Level kapabilitas APIP di Kabupaten Madiun masih pada level 2, guna meningkatkan ke level 3, diperlukan persyaratan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Satgas
2. Menyusun Perbup tentang pedoman penilaian resiko
3. Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri level maturitas SPIP
4. Standarisasi evaluator sejumlah ± 40 evaluator.

Disisi lain persentase fungsional auditor di Kabupaten Madiun tahun 2017 masih sekitar 20% dan meningkat menjadi 50% di tahun 2021, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Persentase Fungsional Auditor Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Fungsional Auditor	20 %	20 %	48 %	50 %	50%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Madiun, Tahun 2022

2.1.3.4.7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan

umum diundangkan. Adapun indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.104
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Demo	11	0	0	2	3
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	7	4	6	4
3	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	6	5	4	3
4	Jumlah LSM	76	76	51	53	92

Sumber : Bakesbang Poldagri Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Indikator urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021 diantaranya yaitu jumlah demo, kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas, dan OKP, kegiatan pembinaan politik daerah, dan jumlah LSM. Jumlah demo cenderung menurun, terjadi demo sebanyak 11 kali pada tahun 2017, kemudian tahun 2018-2019 menurun menjadi 0 dan di tahun 2020 terjadi sebanyak 2 kali demo dan pada tahun 2021 menjadi 3 kali. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP tahun 2017 sebanyak 5, terbanyak di tahun 2018 yaitu sebanyak 7, tahun 2019 sebanyak 4 dan tahun 2020 sebanyak 6 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 4 kegiatan. Kegiatan Pembinaan politik dan daerah tahun 2017 sebanyak 4, tahun 2018 sebanyak 6, tahun 2019 menurun menjadi 5, dan semakin menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 4 dan 3. Jumlah LSM di kabupaten Madiun fluktuatif dari tahun 2017 – 2021, tahun 2017-2018 sebanyak 76, kemudian menurun menjadi 51 di tahun 2019, dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 53 dan naik drastis pada tahun 2021 menjadi 92. Penurunan Jumlah LSM pada tahun 2019 karena adanya pendataan dan verifikasi ulang database LSM yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2019 melalui aplikasi e-ormas.

2.1.3.4.8. Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan persentase Adaodari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut..

Sesuai dengan Permen PAN Dan RB nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Permen PAN Dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilakukan reuiu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Tujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik. Selain itu, juga meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Madiun

Adapun pokok-pokok hasil Reuiu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB menampilkan komponen penilaian yang terdiri dari Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Hasil ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.105
Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	17,93
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,79
	III. Reform	30,00	26,90
	Total Komponen Pengungkit	60,00	49,62
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,06
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,78
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	9,18
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,72
	Total Komponen Hasil	40,00	33,37
	Indeks RB (Total A + Total B)	100,00	83,27

Sumber : Inspektorat Kab. Madiun, Tahun 2022

Nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2021 berdasarkan hasil reuiu yaitu 83,27 dengan kategori A (sangat baik) memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran reformasi birokrasi baik secara instansional maupun tingkat unit kerja.

Beberapa hal yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi, diantaranya masih terdapat catatan sebagai berikut :

- a. Kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal;
- b. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum diformalkan;
- c. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum melibatkan semua perangkat daerah;
- d. Evaluasi atas kinerja Agent Of Change/Kelompok Budaya Kerja belum dilakukan;
- e. Evaluasi kelembagaan belum berjalan optimal;
- f. Belum optimalnya penguatan system manajemen SDM atara lain tindak lanjut hasil assessment sebagai dasar pembangunan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai belum menyeluruh dan belum dilakukan pemetaan talenta/manajemen talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi;
- g. Peraturan Bupati tentang Whistleblowing System belum diformalkan;
- h. Penerapan SPIP masih perlu ditingkatkan;
- i. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara belum dilaksanakan oleh seluruh ASN baru eselon III.

Sementara itu, nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Madiun dari tahun 2017 mengalami peningkatan. Hasil Penilaian LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak dipublish ke Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi hasil penilaian tersebut langsung dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Alokasi DAU Kabupaten/Kota.

Penataan organisasi sebagai salah satu komponen pada Indeks Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk merespon perubahan kewenangan dan urusan dalam tata kelembagaan daerah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan wajib dan urusan pilihan diampu oleh 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Adanya 38 Perangkat Daerah yang mengampu masing-masing urusan diharapkan dapat lebih berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Tabel 2.106

Daftar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun

No	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Sekretariat Daerah (3 Asisten, 3 Staf Ahli dan 9 Bagian)	Fungsi penunjang untuk: a. Perumusan penyusunan kebijakan daerah b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah c. Pengoordinasian pelayanan administrative dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara d. Penetapan pemantauan dan evaluasi perangkat daerah
2.	Sekretariat DPRD	Fungsi penunjang pendukung kegiatan DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
4.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan
5.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi penunjang keuangan
6.	Badan Kepegawaian Daerah	Fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
7.	Inspektorat	Fungsi penunjang pengawasan
8.	Dinas Kependudukan dan	Urusan pemerintahan bidang

No	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
	Pencatatan Sipil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
9.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian.
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
14.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan
15.	Dinas Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan
16.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta bidang pertanahan
18.	Dinas Sosial	Urusan pemerintahan bidang sosial
19.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
21.	Dinas Tenaga Kerja	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi
22.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro	Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang peternakan
24.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
25.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan pemerintahan bidang kenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang pemadam kebakaran
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sub Urusan pemerintahan bidang Bencana
28.	Bakesbangpol	Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
29.	Kecamatan (15),	Fungsi penunjang untuk:

No	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
	Kelurahan (8)	a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum b. Pengoordinasian urusan ketentraman dan ketertiban c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun Tahun 2022*

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Indonesia pada sidang paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 yang salah satu arahnya adalah perlunya dilakukan penyederhaan birokrasi pada Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah hanya menjadi 2 level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang berbasis keahlian/ketrampilan dan kompetensi tertentu. Keuntungan dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah antara lain :

- Mendorong kepemimpinan dari JPT demi menggerakkan birokrasi yang ramping, cepat dalam mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan yang cepat.
- Penyederhanaan birokrasi diyakini mampu menghemat anggaran negara.
- Pengalihan ke jabatan. fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi masing-masing PNS.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.
- Penyederhanaan Birokrasi dinilai mampu mengurangi temuan yang dihasilkan dari Instansi Pemeriksa.

Pada tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang memiliki peran strategis dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang sudah menjadi tuntutan sehari-hari untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam segala hal, utamanya pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Madiun telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.

Tahapan yang dilaksanakan meliputi:

1. Penyederhanaan struktur organisasi pada 261 jabatan
2. Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebanyak 257 jabatan (pensiun sebelum pengalihan jabatan)
3. Penyesuaian sistem kerja

Penataan organisasi ini diharapkan dapat menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right-size).

2.1.3.4.9. Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.107
Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survey IKM	15	18	15	15	26
2	ISO (SKPD)	0	1	2	-	-
3	Restrukturisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	53	53	53	53	53
4	Jumlah SPM yang telah dilaksanakan (bidang)	6	6	6	6	5
5	Penilaian predikat Laporan Kineja Pemerintah Daerah	B	B	BB	BB	
6	Persentase SKPD yang sudah memiliki SOP	84,6	95	80,7	61,5	75,5
7	Jumlah Produk hukum yang diterbitkan	67	850	214	1.038	1022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
8	Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum	2	4	5	0	0
9	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah	137	158	215	91	303
10	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan wakil kepala daerah	123	135	119	26	89

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum, Bagian Prokopim Setda Kabupaten Madiun, Tahun 2022

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel 2.108
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	422.919	922.114	891.858	917.158	866.944
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita	382.376	443.865	449.233	468.958	418.303

Sumber : BPS 2022

2.4.1.1. Nilai Tukar Petani

Indeks nilai tukar petani (NTP) telah menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun 2017 – 2019 cenderung mengalami percepatan, tetapi pada tahun 2020 saat terjadi Pandemi Covid-19 mengalami perlambatan. Perlambatan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Penurunan kondisi kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun selama Pandemi Covid-19 memberikan

dampak meningkatnya biaya produksi (harga pupuk, sewa tanah). Serta kenaikan bahan makanan.

Tabel 2.109
Nilai Tukar Petani Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,25	106,53	102,43 107,12*	101,52	100,62

Sumber: BPS Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Keterangan: Tahun 2016 sampai dengan 2018, cara perhitungan menggunakan tahun dasar 2012. Tahun 2019 sampai dengan 2021, cara perhitungan menggunakan tahun dasar 2018

*Tahun dasar 2012

Kesejahteraan petani yang diindikasikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan perbandingan atau rasio antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).

Arti Angka NTP, yaitu :

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat dari pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebagai berikut:

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Sedangkan Cakupan Komoditas dari pengukuran Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi:

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- Sub Sektor Hortikultura seperti: Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antar daerah
- Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

NTP di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan Petani sudah mampu mencukupi kebutuhan faktor produksi pertanian dan konsumsi sehari-hari dari hasil usaha bertani.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Kewilayahan

Kabupaten Madiun terdiri atas 15 kecamatan terdiri dari 206 desa/kelurahan dengan rincian 198 Desa dan 8 kelurahan.

Kecamatan dan kelurahan mempunyai fungsi penunjang sebagai berikut:

- Pengoordinasian urusan pemerintahan umum
- Pengoordinasian urusan ketentraman dan ketertiban
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan
- Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

g. Pengekoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

h. Pengkoordinasian pemerintahan kelurahan

Sedangkan pemerintahan desa diatur melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014.

2.1.4.2.2 Aksesabilitas Daerah

Kabupaten Madiun merupakan wilayah yang dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta dengan kode Jalan Nasional Rute 17 dari Kota Surabaya hingga Kecamatan Mejayan dan Jalan Nasional Rute 32 dari Kecamatan Mejayan hingga Kecamatan Madiun. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa Daerah Operasi VII Madiun. Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah Caruban, Saradan, Dolopo, Dagangan dan Balerejo.

Dengan dibangunnya Tol Trans Jawa wilayah Kabupaten Madiun termasuk wilayah strategis karena terdapat dua titik exit tol di wilayah Kabupaten Madiun yaitu exit tol Caruban dan exit tol Dumpil.

2.1.4.2.3 Fasilitas Perdagangan

Fasilitas perdagangan yang ada di Kabupaten Madiun salah satunya adalah pasar tradisional. Jumlah pasar daerah di Kabupaten Madiun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.110
Jumlah Pasar Daerah dan Pedagang Kabupaten Madiun Tahun 2021

No.	Kecamatan	Pasar Tradisional	Pedagang
1.	Kebonsari	0	0
2.	Dolopo	5	1239
3.	Geger	1	413
4.	Dagangan	1	62
5.	Kare	0	0
6.	Gemarang	0	0
7.	Wungu	1	293
8.	Madiun	1	102
9.	Jiwan	2	502
10.	Balerejo	2	0
11.	Mejayan	3	1504
12.	Saradan	2	55
13.	Pilangkenceng	2	307
14.	Sawah	0	0
15.	Wonoasri	0	0
Jumlah		20	4477

Sumber: Dinas Perdagkop UM, Tahun 2022

2.1.4.2.4 Penataan Wilayah

Ketaatan terhadap RTRW 100% dikarenakan semua bentuk pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029. Untuk produk hukum yang dihasilkan terkait dengan penataan ruang pada tahun 2021 meliputi Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) BWP (Bagian Wilayah Perkotaan) Pilangkenceng.

2.1.4.2.5 Ketersediaan Air Bersih, Sanitasi Dan Persampahan

Sejalan dengan perwujudan struktur ruang RTRW maka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Madiun terus mendorong peningkatan layanan air bersih dan irigasi, program pembangunan terpadu, pembangunan trotoar serta peningkatan sarana prasanana drainase dan air limbah dan persampahan yang dikelola dengan melibatkan pemerintah tingkat desa. Ketersediaan air bersih dapat dihat dari Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%). Kebutuhan air bersih dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan seperti tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.111
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
di Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	9,54	9,78	10,38	10,57	12,83

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2022

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih selalu naik setiap tahun. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 9,54 % , kondisi ini terus meningkat dan pada tahun 2021 menjadi 12,83%.

2.1.3.2.6 Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan kondisi infrastruktur tahun 2021 dalam mendukung pembangunan daerah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.112
Kondisi Infrastruktur Tahun 2021

No	Uraian	%
1	Persentase jembatan kondisi baik	85,71
2	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap	74,13
3	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik	21,13
4	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84,98
5	Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola	98,81

No	Uraian	%
6	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	94,15
7	Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	2,26
8	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpenuhi	94,12
9	Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	6,98
10	Persentase pengembangan air limbah domestik yang terpenuhi	97,12
11	Persentase saluran drainase kondisi baik	4,149
12	Persentase trotoar kondisi baik	2,45
13	Persentase panjang saluran drainase / gorong-gorong dan trotoar dalam kondisi baik	6,59
14	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	49,099
15	Persentase jumlah infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah yang ditingkatkan	49,09
16	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	98,95
17	Persentase jumlah sarpras dan gedung pemerintah kondisi baik sesuai rencana	1,69
18	Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	52,05
19	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat tenaga terampil	86,66
20	Persentase ketersediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang terpenuhi	57
21	Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang terpenuhi	91,97
22	Persentase jumlah kajian teknis tata ruang yang dikeluarkan	100

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

2.1.4.3.1 Proses Perijinan

Salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian nasional adalah melalui peningkatan investasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat mendukung peningkatan ekosistem investasi, penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Implementasi dari peraturan pemerintah dimaksud adalah Perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dalam tiga klaster yaitu:

- a. Kegiatan usaha beresiko rendah;
- b. Kegiatan usaha beresiko menengah atau;
- c. Kegiatan usaha beresiko tinggi

Pada kegiatan usaha beresiko rendah dan menengah pelaku usaha hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar telah dapat melakukan persiapan dan operasional. Sedangkan untuk kegiatan usaha beresiko tinggi dipersyaratkan Nomor Induk Berusaha dan Izin. Hal ini akan semakin memudahkan pelaku berusaha sehingga iklim investasi dapat terjaga dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan kemudahan berusaha, Kabupaten Madiun telah membangun Mal Pelayanan Publik yang merupakan integrasi pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Madiun, Instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu lokasi. Saat ini terdapat 23 perangkat daerah/ instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun dengan jumlah layanan sebanyak 193 jenis layanan.

2.1.4.3.2 Kondusifitas Daerah

Iklim investasi pada suatu daerah dapat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban pada daerah tersebut, disamping pelayanan perijinan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kondusifitas suatu daerah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.113
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Demo	11	0	0	2	3
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	7	4	6	4
3	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	6	5	4	3
4	Jumlah LSM	76	76	51	53	92

Sumber : Bakesbang Poldagri Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Indikator urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021 diantaranya yaitu jumlah demo, kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas, dan OKP, kegiatan pembinaan politik daerah, dan jumlah LSM. Jumlah demo cenderung menurun, tahun 2017 jumlah demo sebanyak 11 menjadi 0 di tahun 2018 dan 2019. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP tahun 2017-2021 sebanyak 26 kegiatan, Jumlah LSM di kabupaten Madiun terus menurun dari tahun 2017 – 2019, Tahun 2017 sebanyak 76 menjadi 92 ditahun 2021.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Madiun. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Madiun. Gambaran umum kondisi daerah dan aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan di Kabupaten Madiun adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk usia di atas 64 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan penduduk ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar 42,92 lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 44,05. Hal ini dapat diartikan bahwa usia produktif pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun 2021.

2.1.4.5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Madiun 3 (tiga) BUMD, terdiri :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “TIRTA DHARMA PURABAYA”, Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “ TIRTA DHARMA PURABAYA “ diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.
2. Perusahaaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun beralih status badan hukumnya menjadi Perusahan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun yang selanjutnya di singkat dengan Perumda Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun. Perusahan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2019.
3. Perusahaaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
Pembentukan Perusahaaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 merupakan data dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja atau keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Madiun secara rinci, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.114

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Madiun

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK							
M I S I	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
MISI 1 Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparat pemerintah Kabupaten Madiun	<i>Membangun Harmonisasi sosial yang berpondasi pada nilai religius dan kearifan lokal</i>		<i>Indeks Kesalehan Sosial</i>	65,69 (B)	65,86 (B)	100,2	
		Menguatkan karakteristik kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100 %	100 %	100	Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi		76,97	77,40	100,5
Indeks Solidaritas	85,66			90,17	105,2	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
		Terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Stabilitas	77,08	78,37	101,6	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik	<i>Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik</i>		<i>Indeks Reformasi Birokrasi (RB)</i>	73,10 (BB)	83,27 (A)	113,9	
	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	A (80,01)	BB (72,28)	90,3	Unsur Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan Inspektorat Unsur Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
		Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	100	Unsur Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Unsur Pengawasan Inspektorat	

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
			Tingkat Maturitas SPIP	3,3 Level 3	3,033 Level 3	91,9	Unsur Pengawasan Inspektorat
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	80,50	48,77	60,6	Unsur Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital	Indeks SPBE	2,65	3,21	121,1	Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai IKM	81,95	81,09	98,9	Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Unsur Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang	<i>Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan</i>		<i>Angka Pertumbuhan Ekonomi</i>	3,87	3,34	94,1	
			<i>Angka Kemiskinan</i>	11,81	11,91	99,2	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang	Pertumbuhan PDRB Unggulan	3 %	4,02 %	134	Urusan Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Urusan Perindustrian

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

M I S I	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
berkelanjutan		Inklusif dan mandiri	(Pertanian, Industri, Perdagangan)				Dinas Tenaga Kerja Urusan Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Mikro
			Pengeluaran Wisatawan	Rp. 333 Milyar	Rp. 442,7 Milyar	132,9	Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Persentase Desa Mandiri	19,7 %	22,22 %	112,79	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76	76,22	100,3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan
		Terjaganya Keseimbangan	Indeks Kualitas Lingkungan	64,96	66,69	103,1	Urusan Lingkungan Hidup

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
		Kualitas Lingkungan Hidup	Hidup (IKLH)				Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	162	162	100	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,56	4,99	91,4	Urusan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	<i>Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</i>		<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	71,80 (Tinggi)	71,88 (Tinggi)	100,1	
		Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita makanan	Rp. 500.000	Rp. 448.641	89,7	Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Urusan Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Urusan Sosial Dinas Sosial

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

M I S I	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,79	0,792	100,3	Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD caruban RSUD Dolopo
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,6	91,77	100,1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB, PPPA
			Indeks Pendidikan	0,630	0,627	99,5	Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib atau pilihan pemerintahan daerah dan realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.115
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Madiun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD</i>	86	1.350.575.533.755			86	425.888.296.368	96	375.021.097.514	111,63	88,06	96	375.021.097.514	111,63	27,77	
		<i>Nilai SAKIP PD</i>	90				80,01		86,1		107,61		86,1		95,67		
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	<i>Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan (%)</i>					100	389.396.285	100	387.495.048	100,00	99,51	100	387.495.048			
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan peraturan (buah)</i>					13	335.959.485	13	334.546.910	100,00	99,58	13	334.546.910			
1.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (Dokumen)</i>					22	53.436.800	22	53.148.138	100,00	99,46	22	53.148.138			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pegawai yang terpenuhi pengajiannya (%)</i>					100	423.308.486.990	100	372.488.609.472	100,00	87,99	100	372.488.609.472			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gajinya (orang)					3.611	423.308.486.990	3.848	372.488.609.472	106,56	87,99	3848	372.488.609.472			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia (%)					100	525.900.244	100	505.870.575	100,00	96,19	100	505.870.575			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia (buah)					242	14.997.456	242	14.973.500	100,00	99,84	242	14.973.500			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia (buah)					1	3.000.000	1	3.000.000	100,00	100,00	1	3.000.000			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia (buah)					2	30.053.285	2	29.776.250	100,00	99,08	2	29.776.250			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (bulan)					12	246.330.249	12	239.546.825	100,00	97,25	12	239.546.825			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (buah)					3	66.005.254	3	63.215.500	100,00	95,77	3	63.215.500			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia (buah)					84	13.860.000	84	13.860.000	100,00	100,00	84	13.860.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan (kali)					50	151.654.000	110	141.498.500	220,00	93,30	110	141.498.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan (kali)</i>					515		703		136,50		703				
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi (%)</i>					100	448.629.855	100	431.359.400	100,00	96,15	100	431.359.400			
1.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah mebel baru yang tersedia (buah)</i>					25	140.338.550	25	138.318.400	100,00	98,56	25	138.318.400			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia (buah)</i>					42	308.291.305	42	293.041.000	100,00	95,05	42	293.041.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang tercukupi (%)</i>					100	749.842.713	100	745.882.816	100,00	99,47	100	745.882.816			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi (unit)</i>					4	132.196.075	4	130.946.178	100,00	99,05	4	130.946.178			
1.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang tersedia (orang)</i>					37	617.646.638	37	614.936.638	100,00	99,56	37	614.936.638			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana prasarana yang layak fungsi (%)</i>					100	466.040.281	100	461.880.203	100,00	99,11	100	461.880.203			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)					10	125.260.905	10	123.341.203	100,00	98,47	10	123.341.203			
1.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara (buah)					82	5.940.000	82	5.935.000	100,00	99,92	82	5.935.000			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara (buah)					497	95.589.340	497	95.291.000	100,00	99,69	497	95.291.000			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara (buah)					1	239.250.036	1	237.313.000	100,00	99,19	1	237.313.000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	6,49	472.102.706.479			4,23	159.717.111.382	5,82	150.901.295.667	137,59	94,48	5,82	150.901.295.667	89,68	31,96	
		Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi (%)	100				75		66,67		88,89		66,67		66,67		
		APS SD (%)	100				100		98,79		98,79		98,79		98,79		
		Persentase lembaga SD terakreditasi A (%)	4,58				2,96		2,96		100,00		2,96		64,63		
		APS SMP (%)	100				100		97,25		97,25		97,25		97,25		
		Persentase lembaga SMP terakreditasi A (%)	77,08				66,67		66,67		100,00		66,67		86,49		
		APS PAUD (%)	100				100		86,4		86,40		86,4		86,40		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
		<i>Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi (%)</i>	62				57		57		100,00		57		91,94			
1.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>APK SD (%)</i>				100	85.934.541.171	98,55	84.390.423.260	98,55	98,20	98,55	84.390.423.260					
		<i>APM SD (%)</i>				96,17		95,99		99,81		95,99						
		<i>Angka Melanjutkan SD ke SMP</i>				97,37		95,5		98,08		95,5						
		<i>Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD (%)</i>				40												
		<i>Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD (%)</i>				20												
		<i>Persentase bangunan SD kondisi baik (%)</i>				90		86,94		96,60		86,94		94,66				
		<i>Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (%)</i>				100		94,66		94,66		94,66		94,66				
1.01.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang dibangun (unit)</i>				11	1.132.851.000	11	1.103.019.800	100,00	97,37	11	1.103.019.800					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun (unit)					21	4.016.817.000	21	3.907.294.500	100,00	97,27	21	3.907.294.500			
I.01.02.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun (unit)					32	3.287.946.000	32	3.262.062.000	100,00	99,21	32	3.262.062.000			
I.01.02.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab (unit)					35	3.005.028.250	35	3.005.028.250	100,00	100,00	35	3.005.028.250			
I.01.02.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia (buah)					995	1.185.500.000	995	1.184.391.000	100,00	99,91	995	1.184.391.000			
I.01.02.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Lembaga Sekolah yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah (unit)					88	15.000.000.000	88	15.000.000.000	100,00	100,00	88	15.000.000.000			
I.01.02.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia (buah)					103	4.685.000.000	103	4.683.595.000	100,00	99,97	103	4.683.595.000			
I.01.02.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka kelulusan SD					100	64.159.512	100	63.344.750	100,00	98,73	100	63.344.750			
I.01.02.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Prestasi Peserta didik SD di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional (orang)					8	50.000.000	10	48.610.000	125,00	97,22	10	48.610.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
I.01.02.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang terdata (orang)					1.526	11.150.510.409	1.526	11.095.402.920	100,00	99,51	1526	11.095.402.920				
I.01.02.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK jenjang SD yang dikembangkan karirnya (orang)					40	48.200.000	40	47.799.600	100,00	99,17	40	47.799.600				
I.01.02.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga sekolah yang dibina (unit)					5	575.000.000	5	575.000.000	100,00	100,00	5	575.000.000				
I.01.02.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Operasional SD yang terpenuhi (bulan)					12	39.697.979.000	12	38.481.038.340	100,00	96,93	12	38.481.038.340				
I.01.02.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan danaBOS-nya (lembaga)					406	40.800.000	406	40.684.400	100,00	99,72	406	40.684.400				
I.01.02.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium SD yang dibangun (unit)					10	1.994.750.000	10	1.893.152.700	100,00	94,91	10	1.893.152.700				
I.01.02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs (%)					100	42.760.174.557	101,3	36.707.386.588	101,30	85,84	101,3	36.707.386.588				
		APM SMP/MTs (%)					88,76		88,46		99,66	88,46						
		Angka Melaanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)					95		92,77		97,65	92,77						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP (%)</i>					40				0,00		0				
		<i>Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP (%)</i>					20				0,00		0				
		<i>Persentase bangunan SMP kondisi baik (%)</i>					88		93,9		106,70		93,9				
		<i>Persentase jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama (%)</i>					100		97,6		97,60		97,6				
I.01.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<i>Jumlah sarana, prasarana dan utilitas SMP yang dibangun (unit)</i>					2	420.000.000	2	420.000.000	100,00	100,00	2	420.000.000			
I.01.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<i>Jumlah ruang kelas SMP yang direhab (ruang)</i>					29	6.557.606.600	29	5.805.728.143	100,00	88,53	29	5.805.728.143			
I.01.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	<i>Jumlah ruang guru SMP yang direhab (ruang)</i>					3	605.934.000	3	539.401.968	100,00	89,02	3	539.401.968			
I.01.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	<i>Jumlah ruang UKS SMP yang direhab (ruang)</i>					3	180.592.200	3	153.499.520	100,00	85,00	3	153.499.520			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SMP yang direhab (unit)					2	634.431.000	2	561.976.376	100,00	88,58	2	561.976.376			
I.01.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium SMP yang direhab (unit)					7	4.504.917.600	7	4.138.893.219	100,00	91,88	7	4.138.893.219			
I.01.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP yang direhab (unit)					2	1.538.011.800	2	1.384.391.618	100,00	90,01	2	1.384.391.618			
I.01.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel SMP baru yang tersedia (buah)					68	1.472.500.000	68	1.472.456.070	100,00	100,00	68	1.472.456.070			
I.01.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan bantuan perlengkapan siswa (orang)					2.930	1.025.587.525	2.930	974.224.900	100,00	94,99	2930	974.224.900			
I.01.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa baru yang tersedia (buah)					28	1.725.960.000	28	1.628.093.000	100,00	94,33	28	1.628.093.000			
I.01.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka kelulusan SMP (%)					100	73.465.300	100	73.413.600	100,00	99,93	100	73.413.600			
I.01.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Prestasi Peserta didik SMP di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional (orang)					28	160.000.000	73	160.000.000	260,71	100,00	73	160.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terdata (orang)					286	2.027.957.732	286	2.015.701.426	100,00	99,40	286	2.015.701.426			
1.01.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK jenjang SMP yang meningkat karirnya (orang)					41	38.200.000	41	29.083.500	100,00	76,13	41	29.083.500			
1.01.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Operasional SMP yang terpenuhi (bulan)					12	21.196.813.000	12	19.954.745.534	100,00	94,14	12	19.954.745.534			
1.01.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS nya (lembaga)					48	12.000.000	48	10.246.600	100,00	85,39	48	10.246.600			
1.01.02.44	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU SMP yang direhab (ruang)					4	482.968.200	4	429.109.006	100,00	88,85	4	429.109.006			
1.01.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang Kepala Sekolah SMP yang direhab (ruang)					3	103.229.600	3	91.857.008	100,00	88,98	3	91.857.008			
1.01.02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD (%)					100	21.894.248.104	77,77	21.061.417.954	77,77	96,20	77,77	21.061.417.954			
		Persentase bangunan PAUD kondisi baik (%)					50		60		120,00		60				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini (%)</i>					100		100		100,00		100				
1.01.01.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun (unit)</i>					1	269.916.500	1	269.916.500	100,00	100,00	1	269.916.500			
1.01.01.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	<i>Jumlah Sarana Prasarana dan utilitas PAUD yang dibangun (unit)</i>					2	254.750.000	2	254.750.000	100,00	100,00	2	254.750.000			
1.01.01.03.03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab (unit)</i>					4	416.442.639	4	416.442.600	100,00	100,00	4	416.442.600			
1.01.01.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	<i>Jumlah perlengkapan PAUD baru yang tersedia (unit)</i>					7	50.200.000	7	50.194.000	100,00	99,99	7	50.194.000			
1.01.01.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	<i>Jumlah alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD baru yang tersedia (buah)</i>					70	279.556.650	70	275.150.000	100,00	98,42	70	275.150.000			
1.01.01.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	<i>Jumlah peserta didik PAUD (orang)</i>					20.000	100.000.000	19.511	99.891.220	97,56	99,89	19511	99.891.220			
1.01.01.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap bagi Satuan PAUD yang terdata (orang)</i>					1.786	7.436.182.315	1.786	7.430.232.315	100,00	99,92	1786	7.430.232.315			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK PAUD yang meningkat karirnya (orang)					160	442.200.000	160	399.614.800	100,00	90,37	160	399.614.800			
I.01.01.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Operasional PAUD yang terpenuhi (bulan)					12	12.645.000.000	12	11.865.226.519	100,00	93,83	12	11.865.226.519			
I.01.02.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C (%)				100	9.128.147.550	8.742.067.865	100	100,00	95,77	100	8.742.067.865				
		Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi (%)			100	100			100								
		Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas (%)			20	18,84			94,20			18,84					
		Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan (%)			3,1	5,82			187,74			5,82					
I.01.02.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perlengkapan PNF baru yang tersedia (buah)				15	217.117.550	15	216.780.200	100,00	99,84	15	216.780.200				
I.01.02.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik PNF yang terlayani (orang)				1.442	448.670.000	1.489	445.942.565	103,26	99,39	1.489	445.942.565				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I.01.02.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK PNF yang terdata (orang)					114	410.400.000	114	408.900.000	100,00	99,63	114	408.900.000			
I.01.02.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK PNF yang meningkat karirnya (orang)					20	10.000.000	20	9.953.100	100,00	99,53	20	9.953.100			
I.01.02.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PNF yang dibina (lembaga)					223	7.281.560.000	223	7.280.292.000	100,00	99,98	223	7.280.292.000			
I.01.02.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Operasional BOP Kesetaraan yang terpenuhi (Bulan)					12	760.400.000	12	380.200.000	100,00	50,00	12	380.200.000			
I.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik yang tersertifikasi (%)	56,18	8.267.156.975			55,45	3.218.460.000	51,78	3.216.911.600	93,38	99,95	51,78	3.216.911.600	92,17	38,91	
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV (%)	99,32				97,72		97,36		99,63		97,36		98,03		
I.01.04.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru murid SD					01:28	3.218.460.000	01:12	3.216.911.600	81,82	99,95	0,05	3.216.911.600			
		Rasio Guru murid SMP					01:32		01:15		81,52		0,052083				
		Rasio Guru murid PAUD					01:10		01:15		107,14		0,052083				
		Rasio Tutor PNF dengan Peserta didik PNF/Kesetaraan					01:20		01:21		101,25		0,05625				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
I.01.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase Satuan Pendidikan yang terpenuhi kebutuhan PTK nya (%)</i>					100	9.000.000	5,63	8.597.600	5,63	95,53	5,63	8.597.600				
I.01.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah penataan pendistribusian PTK (kali)</i>					2	3.209.460.000	2	3.208.314.000	100,00	99,96	2	3.208.314.000				
I.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	<i>Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan (%)</i>	100	538.234.375			100	184.000.000	100	188.709.800	100,00	97,27	100	188.709.800	100,00	35,06		
		<i>Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan (%)</i>	100				100			100		100,00		100		100,00		
I.01.03.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD yang tersusun (dokumen)</i>					1	169.000.000	1	163.740.900	100,00	96,89	1	163.740.900				
I.01.03.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Jumlah Kompetensi Dasar Muatan lokal SD yang tersusun (dokumen)</i>					1	35.885.687	1	34.358.700	100,00	95,74	1	34.358.700				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.03 .01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal SD yang tersusun					1	34.535.803	1	34.360.200	100,00	99,49	1	34.360.200			
I.01.03 .01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal SD yang tersedia (buah)					5.694	79.012.840	2.550	77.633.000	44,78	98,25	2550	77.633.000			
I.01.03 .01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal SD yang tersusun (orang)					180	19.565.670	180	17.389.000	100,00	88,88	180	17.389.000			
I.01.03 .02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal PAUD yang tersusun (dokumen)					1	25.000.000	1	24.968.900	100,00	99,88	1	24.968.900			
I.01.03 .02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar PAUD yang disusun (dokumen)					1	7.000.000	1	6.984.600	100,00	99,78	1	6.984.600			
I.01.03 .02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal PAUD yang disusun (dokumen)					1	7.000.000	1	6.984.300	100,00	99,78	1	6.984.300			
I.01.03 .02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal PAUD yang tersedia (buah)					750	11.000.000	712	11.000.000	94,93	100,00	712	11.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN																Dinas Kesehatan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (angka)	86	265.327.744.756			80,01	66.711.417.324	78,41	64.576.262.799	98,00	96,80	78,41	64.576.262.799	91,17	24,34	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (indeks)	90				77		79,5		103,25		79,5		88,33		
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas (%)					100	65.338.303.443	100	63.379.918.834	100,00	97,00	100	63.379.918.834			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibayarkan gaji dan tunjangan di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas (%)					100	65.115.437.333	100	63.157.760.794	100,00	96,99	100	63.157.760.794			
1.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tenaga kesehatan yang menerima insentif pelayanan covid (%)					100	222.866.110	100	222.158.040	100,00	99,68	100	222.158.040			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan dana untuk kebutuhan komponen instalasi listrik, Peralatan kebutuhan kantor, penyediaan barang cetakan dan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD yang terpenuhi (%)</i>					100	484.817.569	100	335.365.800	100,00	69,17	100	335.365.800			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah jenis alat listrik yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor (buah)</i>					8	28.107.485	8	18.881.450	100,00	67,18	8	18.881.450			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah per jenis alat tulis kantor yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor (buah)</i>					36	50.000.000	36	49.459.850	100,00	98,92	36	49.459.850			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah per jenis alat rumah tangga yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor (buah)</i>					9	147.535.630	9	86.861.000	100,00	58,87	9	86.861.000			
I.01.01.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah barang cetakan yang disediakan dan kebutuhan penggandaan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor (buah)</i>					10	33.285.145	10	19.864.500	100,00	59,68	10	19.864.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor (kali)					20	225.889.309	20	160.299.000	100,00	70,96	20	160.299.000			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)					100	562.514.717	100	542.160.865	100,00	96,38	100	542.160.865			
I.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan untuk surat menyurat dalam pemenuhan kebutuhan kantor (buah)					165	2.150.000	165	2.100.000	100,00	97,67	165	2.100.000			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan waktu operasional jasa telepon, air, listrik dan internet yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor (bulan)					4	312.364.717	4	292.587.584	100,00	93,67	4	292.587.584			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah per jenis peralatan dan bahan yang disediakan, serta jumlah kebutuhan waktu layanan jasa keamanan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor					8 jenis alat & 68 orang	248.000.000	8 jenis alat & 68 orang	247.473.281	100,00	99,79	100	247.473.281			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk dinas kesehatan (%)					100	325.781.595	100	318.817.300	100,00	97,86	100	318.817.300			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas untuk kebutuhan dinas kesehatan (paket)					37	58.000.000	37	52.798.800	100,00	91,03	37	52.798.800			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor Dinkes dan IFK yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan kantor (paket)					5	92.000.000	5	91.655.000	100,00	99,63	5	91.655.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							18.865.900		18.865.900		100,00	0	18.865.900				
1.01.01.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (komputer, printer, AC split, mesin ketik, CCTV dan WIFI LAN) (paket)</i>					1	156.915.695	1	155.497.600	0,00	100,00	0	18.865.900				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERDRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Angka Kematian Ibu</i>	0	218.373.837.637			0	71.712.948.257	437,45	54.256.422.430	437,45	75,66	437,45	54.256.422.430	437,45	24,85		
		<i>Angka Kematian Bayi</i>	0				0			8,25		8,25		8,25		8,25		
		<i>Prevalensi Balita Stunting</i>	20				21,1			14,9		70,62		14,9		74,50		
		<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas (%)</i>	0,79				73			73		100,00		73		9.240,51		
		<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (%)</i>	63				61			61		100,00		61		96,83		
		<i>Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan (%)</i>	81				77			77		100,00		77		95,06		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.02.0 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah (%)</i>					100	21.500.393.891	100	13.464.161.423	100,00	62,62	100	13.464.161.423			
1.02.0 2.01.0 2	Pembangunan Puskesmas	<i>Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai dengan prototype (unit)</i>					1	6.257.563.600	1	5.309.128.229	100,00	84,84	1	5.309.128.229			
1.02.0 2.01.0 3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Persentase kebutuhan anggaran operasional untuk PMI yang terpenuhi (%)</i>					100	750.000.000	100	750.000.000	100,00	100,00	100	750.000.000			
1.02.0 2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah pagar puskesmas yang dibangun / rehab dalam waktu 1 tahun (unit)</i>					3	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
1.02.0 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan (buah)</i>					32	4.407.727.249	8	2.887.146.620	25,00	65,50	8	2.887.146.620			
1.02.0 2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	<i>Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan Kedokteran Terkalibrasi pada Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (buah)</i>					14	99.230.918	9	91.957.000	64,29	92,67	9	91.957.000			
1.02.0 2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	<i>Jumlah jenis obat yang diadakan (buah)</i>					105	9.879.923.055	102	4.320.201.574	97,14	43,73	102	4.320.201.574			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
		<i>Jumlah jenis bahan habis medis pakai yang diadakan (buah)</i>					30		27		90,00		27				
		<i>jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar (unit)</i>				26		26		100,00		26					
1.02.0 2.01.17	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan Kedokteran Terpelihara pada Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (buah)</i>				24	105.949.069	24	105.728.000	100,00	99,79	24	105.728.000				
1.02.0 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM Bidang Kesehatan (%)</i>				100	49.676.436.526	61,25	40.448.362.432	61,25	81,42	61,25	40.448.362.432				
1.02.0 2.02.0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)</i>				100	122.539.107	94,83	85.226.240	94,83	69,55	94,83	85.226.240				
1.02.0 2.02.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)</i>				100	1.554.144.731	90,32	764.648.240	90,32	49,20	90,32	764.648.240				
1.02.0 2.02.0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<i>Cakupan posyandu purnama mandiri (%)</i>				81,06	9.440.400	82,69	3.141.700	102,01	33,28	82,69	3.141.700				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (%)</i>					100		79,5		79,50		79,5				
1.02.0 2.02.0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)</i>					100	72.168.450	50,59	64.321.060	50,59	89,13	50,59	64.321.060			
1.02.0 2.02.0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<i>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)</i>					100	115.552.227	28,07	96.671.750	28,07	83,66	28,07	96.671.750			
		<i>Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (orang)</i>					16.008		1.427		8,91		1427				
1.02.0 2.02.0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard (%)</i>					100	30.914.179	57,42	17.732.500	57,42	57,36	57,42	17.732.500			
1.02.0 2.02.0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)</i>					238.839	2.864.400	18,697	2.800.000	7,83	97,75	18697	2.800.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.0 2.02.0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)</i>					17.302	2.864.400	12.271	2.600.000	70.92	90.77	12271	2.600.000			
1.02.0 2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)</i>					100	777.525.000	37.8	759.700.000	37.80	97.71	37.8	759.700.000			
1.02.0 2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<i>Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standart (%)</i>					100	677.640.000	66.74	677.036.886	66.74	99.91	66.74	677.036.886			
1.02.0 2.02.1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	<i>Persentase pemberiann insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19 (%)</i>					100	7.971.714.772	100	7.517.553.441	100,00	94.30	100	7.517.553.441			
		<i>Persentase Penanganan Covid-19 yang bisa tertangani (%)</i>					100		100		100,00		100				
1.02.0 2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	<i>Persentase Klaim Rujukan dan Penjemputan pasien Covid-19 oleh Petugas Puskesmas (%)</i>					100	1.575.128.970	100	325.538.196	100,00	20.67	100	325.538.196			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
		<i>cakupan Pemulasaraan Jenazah Covid-19 yang ditangani (%)</i>					100		100		100,00		100				
1.02.0 2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<i>Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)</i>					68,79	2.704.169.091	73,73	1.311.937.800	107,18	48,52	73,73	1.311.937.800			
		<i>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan</i>					100		100		100,00		100				
		<i>Cakupan Balita ditimbang di Pasyandu (D/S) (%)</i>					80,1		53,6		66,92		53,6				
		<i>Cakupan Balita Naik berat badan di Pasyandu (N/D) (%)</i>					75		57,96		77,28		57,96				
		<i>Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A (%)</i>					90		88,07		97,86		88,07				
		<i>Cakupan ibu hamil mendapat Fe 3 (%)</i>					90		86,23		95,81		86,23				
		<i>Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)</i>					90		87,87		97,63		87,87				
		<i>Cakupan remaja putri mendapat TTD (%)</i>					25		63,04		252,16		63,04				
		<i>Cakupan Kecamatan bebas rawan Gizi (%)</i>					83		100		120,48		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi) (%)</i>					90,2		94,76		105,06		94,76				
		<i>Persentase Rumah Tangga Sehat (ID Indikator) (%)</i>					55,98		55,8		99,68		55,8				
		<i>Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM (desa)</i>					206		2		0,97		2				
		<i>Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan (%)</i>					45		95		211,11		95				
1.02.0 2.02.1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<i>Persentase Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani (%)</i>					30	67.566.703	0	50.711.400	0,00	75,05	0	50.711.400			
		<i>Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya (%)</i>					100		0		0,00		0				
		<i>Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK</i>					22		29		131,82		29				
1.02.0 2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<i>Jumlah desa yang melaksanakan program kab/kota sehat (desa)</i>					114	526.791.715	155	402.573.915	135,96	76,42	155	402.573.915			
		<i>Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM (desa)</i>					5		2		40,00		2				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
		<i>Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Sesuai Peraturan (%)</i>					75		100		133,33		100				
		<i>Persentase Keluarga yang menggunakan Jamban Sehat (%)</i>					100		100		100,00		100				
		<i>Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan</i>					97,5		95		97,44		95				
		<i>Persentase TPM yang Memenuhi Syarat (%)</i>					35		30		85,71		30				
1.02.0 2.02.1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	<i>Cakupan kelurahan / desa siaga aktif</i>					100	391.097.297	100	324.721.345	100,00	83,03	100	324.721.345			
		<i>cakupan posyandu purnama dan mandiri (%)</i>					81,6		82,69		101,34		82,69				
		<i>Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator) (%)</i>					55,98		55,8		99,68		55,8				
		<i>Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM (desa)</i>					5		2		40,00		2				
		<i>Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan (%)</i>					45		95		211,11		95				
		<i>Persentase TPM yang Memenuhi Syarat (%)</i>					35		36		102,86		36				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
		<i>Persentase Anak Sekolah (SD) Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani (%)</i>					30		0		0,00		0				
		<i>Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK (unit)</i>					22		0		0,00		0				
		<i>Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya (%)</i>					22		29		131,82		29				
1.02.0 2.02.1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	<i>Persentase pembinaan ke penyehat tradisional (%)</i>					55	133.118.640	15,14	112.188.700	27,53	84,28	15,14	112.188.700			
		<i>Persentase penyehat tradisional yg memiliki STPT</i>					40		4,64		11,60		4,64				
		<i>Persentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar (%)</i>					35		19,23		54,94		19,23				
		<i>Persentase terbentuknya kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN) (%)</i>					15		25,24		168,27		25,24				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.0 2.02.2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<i>Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)</i>					95	195.247.250	77,67	108.310.217	81,76	55,47	77,67	108.310.217			
		<i>Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)</i>					93		95,29		102,46		95,29				
		<i>Cakupan Imunisasi Lanjutan BADUTA (%)</i>					95		86,48		91,03		86,48				
		<i>Jumlah Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Non Polio (kasus)</i>					3		0		0,00		0				
		<i>Persentase kelengkapan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) (%)</i>					90		90		100,00		90				
		<i>Persentase ketepatan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) (%)</i>					80		80		100,00		80				
		<i>Persentase KLB di Desa/Kelurahan yang Ditanggulangi Kurang Dari 24 Jam (%)</i>					100		100		100,00		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji (%)</i>					100		100		100,00		100				
1.02.0 2.02.2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	<i>Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (orang)</i>					1.302	31.969.400	1.074	31.792.000	82,49	99,45	1074	31.792.000			
1.02.0 2.02.2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	<i>Persentase kejadian bencana yang ditangani (%)</i>					88	27.000.000	80	24.006.300	90,91	88,91	80	24.006.300			
1.02.0 2.02.2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<i>Jumlah Fogging Fokus yang dilakukan (kali)</i>					100	889.945.478	100	678.478.450	100,00	76,24	100	678.478.450			
		<i>Persentase Penderita DBD yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi (%)</i>				100	100		100,00		100						
		<i>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan hepatitis (%)</i>				64,87	70,08		108,03		70,08						
		<i>Penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan dan kader di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu (kali)</i>				100	100		100,00		100						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Presentase kasus kusta yang dilakukan PFS secara rutin (%)</i>					82		82		100,00		82				
		<i>Persentase penderita malaria mendapatkan pelayanan kesehatan (%)</i>				100			100		100,00		100				
		<i>Kasus Pneumonia Balita yg ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu (kali)</i>				90			90		100,00		90				
		<i>Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (orang)</i>				17075			1427		8,36		1427				
		<i>Rasio gigi tetap yang ditambah terhadap gigi tetap yang dicabut</i>				>1			1,48		48,00		1,48				
		<i>Presentase penduduk yang dideteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran (%)</i>				40			24,55		61,38		24,55				
		<i>Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)</i>				93					0,00		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.0 2.02.2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	<i>Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (PBI-D) (orang)</i>					50.000	22.554.283.936	95,29	20.764.085.920	0,19	92,06	95,29	20.764.085.920			
		<i>Persentase pemenuhan biaya klaim pelayanan kesehatan yang belum dijamin oleh PBI-D (%)</i>					100		47,717		47717,00		47717				
1.02.0 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	<i>jumlah dokter kontrak Banprop yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap (orang)</i>					2	6.484.916.980	2	5.407.450.600	100,00	83,39	2	5.407.450.600			
		<i>Persentase pelayanan vaksinasi Covid-19 (%)</i>					100				0,00		0				
1.02.0 2.02.3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Persentase pelayanan vaksinasi Covid-19 (%)</i>					100	1.067.443.400		770.004.380	0,00	72,14	0	770.004.380			
1.02.0 2.02.3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Puskesmas terakreditasi (pusk)</i>					26	1.690.390.000	26	145.131.392	100,00	8,59	26	145.131.392			
1.02.0 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal (%)</i>					0	536.117.840	0	343.898.575	0,00	64,15	0	343.898.575			
		<i>Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan, (%)</i>					100		100		100,00		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.0 2.04.0 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<i>jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS. (pusk)</i>					26	205.898.500	26	89.651.875	100,00	43,54	26	89.651.875			
		<i>Jumlah Puskesmas yang terakreditasi. (pusk)</i>					26		26		100,00		26				
		<i>Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memberikan pelayanan UKM dan UKP (pusk)</i>						26		26		100,00		26			
1.02.0 2.04.0 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	<i>Persentase Ketersediaan posko kegawatdaruratan (%)</i>					100	330.219.340	98	254.246.700	98,00	76,99	98	254.246.700			
		<i>Presentasi RS yang terakreditasi (%)</i>					100		0		0,00		0				
		<i>Jumlah anak yang mendapat khitan massal (orang)</i>						100		0		0,00		0			
		<i>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal. (%)</i>						93		0		0,00		0			
		<i>Presentase Pelayanan Kesehatan Rujukan (%)</i>						19		15,45		81,32		15,45			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi (%)</i>	100	299.999.999			100	2.984.271.367	100	2.527.419.472	100,00	84,69	100	2.527.419.472	100,00	842,47	
		<i>Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan (%)</i>	100				100		100		100,00		100		100,00		
1.02.0 3.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase tenaga kesehatan yang mendapatkan izin praktek (%)</i>					100	22.676.250	100	18.000.000	100,00	79,38	100	18.000.000			
		<i>Prosentase sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan (%)</i>					20		20		100,00		20				
1.02.0 3.01.0 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	<i>Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin praktek (orang)</i>					116	22.676.250	116	18.000.000	100,00	79,38	116	18.000.000			
		<i>Jumlah sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan (unit)</i>					91		91		100,00		91				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.0 3.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Prosentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid (%)</i>					100	2.641.541.862	100	2.241.195.872	100,00	84,84	100	2.241.195.872			
1.02.0 3.02.0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	<i>Persentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid (%)</i>					100	2.641.541.862	100	2.241.195.872	100,00	84,84	100	2.241.195.872			
		<i>Jumlah perawat pankesdes memberikan pelayanan kesehatan (arang)</i>					40		40		100,00		40				
1.02.0 3.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Prosentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi (%)</i>					96,6	320.053.255	96,6	268.223.600							
		<i>Prosentase tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang (%)</i>					82,2		82,2		100,00		82,2				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.02.0 3.03.0 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi (orang)</i>					29	320.053.255	29	268.223.600	100,00	83,81	29	268.223.600			
		<i>Jumlah Petugas Pengelola Kefarmasian yang memperoleh bimtek Standart Kefarmasian (orang)</i>					171		171		100,00		171				
		<i>Jumlah Petugas Pengelola Keamanan Pangan yang memperoleh bimtek Keamanan Pangan (orang)</i>					33		57		172,73		57				
		<i>Jumlah tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang</i>					88		88		100,00		88				
		<i>Jumlah SDM Kesehatan yang diusulkan melalui perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut) (orang)</i>					501		501		100,00		501				
		<i>Jumlah sarana kesehatan yang data SDMK terupdate di aplikasi SI-SDMK (unit)</i>					173		173		100,00		173				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Jumlah dokter yang mengikuti Program Intersip Dokter Indonesia (orang)</i>					9		9		100,00		9				
		<i>Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat Tenaga Kesehatan (orang)</i>					0		0		0,00		0				
		<i>Persentase pelayanan vaksinasi Covid-19 (%)</i>					100		100		100,00		100				
1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standar (%)</i>	85	719.201.690			80	233.839.200	77	215.493.000	96,25	92,15	77	215.493.000	90,59	29,96	
1.02.0 4.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin (%)</i>					100	20.410.000	77	13.480.000	77,00	66,05	77	13.480.000			
1.02.0 4.01.0 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	<i>Jumlah Data Apotek yang berijin (unit)</i>					77	20.410.000	77	13.480.000	100,00	66,05	77	13.480.000			
		<i>Jumlah Data Toko Obat yang berijin (unit)</i>					5		0		0,00		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
	Tradisional (UMOT)	<i>Jumlah Data Toko Alat Kesehatan yang berijin (unit)</i>					2		0		0,00		0				
		<i>Jumlah Data Optikal yang berijin (unit)</i>					3		0		0,00		0				
1.02.0 4.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<i>Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (%)</i>					100	111.745.000	100	109.539.500	100,00	98,03	100	109.539.500			
1.02.0 4.03.0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<i>Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (%)</i>					100	111.745.000	100	109.539.500	100,00	98,03	100	109.539.500			
		<i>Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan (orang)</i>					200		200		100,00		200				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang telah diperiksa sarana dan terbit sertifikat PIIRT (orang)</i>					200		200		100,00		200				
		<i>Jumlah Kegiatan Pengkajian Sertifikasi Produksi (kegiatan)</i>				1			1		100,00		1				
1.02.0 4.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Presentase Sampel makanan Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji laboratorium yang memenuhi syarat (%)</i>				62	101.684.200	59	92.473.500	95,16	90,94	59	92.473.500				
1.02.0 4.06.0 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	<i>jumlah pengawasan sarana Industri rumah tangga pangan (kali)</i>				155	101.684.200	100	92.473.500	64,52	90,94	100	92.473.500				
		<i>jumlah pengawasan produk pangan industri rumah tangga (kali)</i>				62		62		100,00		62					
1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (%)</i>	21	7.113.836.968		19,6	561.843.300	0	381.744.800	0,00	67,95	0	381.744.800	0,00	5,37		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
1.02.0 5.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (%)</i>					19,6	561.843.300	19,42	381.744.800	99,08	67,95	19,42	381.744.800				
1.02.0 5.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah Poskestren Yang dilakukan pendampingan (buah)</i>				10	561.843.300	10	381.744.800	100,00	67,95	10	381.744.800					
		<i>Cakupan Taman Posyandu Optimal (%)</i>				10		0		0,00		0						
		<i>Jumlah sasaran yang mengikuti KIE Keamanan Pangan (unit)</i>				360		352		97,78		352						
		<i>Jumlah petugas kesehatan yang memberikan konseling (orang)</i>				40		40		100,00		40						
																	RSUD CARUBAN	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar (%)</i>	86	235.533.847.156		100	119.899.047.213	100	92.190.019.794,54	100,00	76,89	100	92.190.019.795	116,28	39,14			
		<i>Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar (%)</i>	90			75		75		100,00		75		83,33				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar (%)</i>	100				87,5		87,5		100,00		87,5		87,50		
		<i>Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar (%)</i>	78				90		94		104,44		94		120,51		
		<i>NILAI SAKIP Perangkat Daerah</i>	89				80,01		79,55		99,43		79,55		89,38		
		<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (indeks)</i>	92				77		93,1		120,91		93,1		101,20		
I.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (%)</i>					100	25.437.002.865	100	24.247.342.578,00	100,00	95,32	100	24.247.342.578			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN (orang)</i>					295	25.437.002.865	294	24.247.342.578	99,66	95,32	294	24.247.342.578			
		<i>Jumlah tenaga kesehatan ASN yang menangani Covid-19 (orang)</i>					138		138		100,00		138				
I.01.01.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Verifikasi dan Akutansi yang memenuhi standar (%)</i>					100	94.462.044.348	100	67.942.677.216.54	100,00	71,93	100	67.942.677.217			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana yang memenuhi standar (%)</i>					100		100		100,00		100				
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag Umum yang memenuhi standar (%)</i>					100		100		100,00		100				
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag Kepegawaian yang memenuhi standar (%)</i>					100		66,67		66,67		66,67				
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag perencanaan informasi yang memenuhi standar (%)</i>					60		60		100,00		60				
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Medis yang memenuhi standar (%)</i>					84,62		86,89		102,68		86,89				
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Keperawatan yang memenuhi standar (%)</i>					100		100		100,00		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Medis yang memenuhi standar (%)</i>					95.24		95.24		100.00		95.24				
		<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Non Medis yang memenuhi standar (%)</i>					90		90		100.00		90				
1.01.01.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Verifikasi dan Akutansi yang memenuhi standar (buah)</i>					2	94.462.044.348	2	67.942.677.216.54	100.00	71.93	2	67.942.677.217			
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana yang memenuhi standar (buah)</i>					2		2		100.00		2				
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Subbag Umum yang memenuhi standar (buah)</i>					4		4		100.00		4				
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Subbag Kepegawaian yang memenuhi standar (buah)</i>					3		2		66.67		2				
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Subbag perencanaan informasi yang memenuhi standar (buah)</i>					3		3		100.00		3				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Medis yang memenuhi standar (buah)</i>					55		53		96,36		53				
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Keperawatan yang memenuhi standar (buah)</i>				3		3		100,00		3					
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Medis yang memenuhi standar (Buah)</i>				20		20		100,00		20					
		<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Non Medis yang memenuhi standar (buah)</i>				9		9		100,00		9					
1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar (%)</i>	78	80.981.438.613			100	28.074.467.776	100	24.453.984.730	100,00	87,10	100	24.453.984.730	128,21	30,20	
		<i>Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar (%)</i>					75		75		100,00		75				
		<i>Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar (%)</i>	89				87,5		87,5		100,00		87,5				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar (%)</i>	92				90		94		104,44		94				
1.02.0 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Rumah Sakit yang sesuai standar (%)</i>					60	28.074.467.776	61.53	24.453.984.730	102.55	87.10	61.53	24.453.984.730			
1.02.0 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sesuai standar (buah)</i>					155	23.915.822.525	155	20.711.616.532	100,00	86.60	155	20.711.616.532			
1.02.0 2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	<i>Jumlah obat/vaksin/ Reagen/ BAHp/Bahan Kimia yang tersedia sesuai standar (buah)</i>					3	2.150.820.000	3	2.031.159.113	100,00	94.44	3	2.031.159.113			
1.02.0 2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	<i>Jumlah Reagen/BAHP/Bahan Kimia yang tersedia sesuai standar (buah)</i>					2	2.007.825.251	2	1.711.209.085	100,00	85.23	2	1.711.209.085			
1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	<i>Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi (%)</i>	100	300.000.000			100	5.330.442.016	100	4.432.545.381	100,00	83,16	100	4.432.545.381	100,00	1477,51 51	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.0 3.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	<i>Persentase tenaga kesehatan yang memperoleh insentif penanganan Covid-19 (%)</i>					100	5.330.442.016	100	4.432.545.381	100,00	83,16	100	4.432.545.381			
1.02.0 3.02.0 2	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	<i>Jumlah tenaga kesehatan non ASN yang menangani Covid-19 (orang)</i>					91	5.330.442.016	91	4.432.545.381	100,00	83,16	91	4.432.545.381			
																	RSUD DOLOPO
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	107.460.427.043			80,01	154.114.265.155	79,59	109.935.390.423	99,48	71,33	79,59	109.935.390.423	92,55	102,30	
		<i>Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (indeks)</i>	90				77		91,8		119,22		91,8		102,00		
		<i>Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan yang sesuai standar (%)</i>	100				75		100		133,33		100		100,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase capaian indikator SPM bagian tata usaha yang sesuai standar (%)</i>	87,5				87,5		87,5		100,00		87,5		100,00		
		<i>Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang sesuai standar (%)</i>	97,83				95,65		93,62		97,88		93,62		95,70		
		<i>Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang sesuai standar (%)</i>	100				96,88		100		103,22		100		100,00		
1.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (%)</i>					100	13.634.671.317	100	13.476.992.342	100,00	98.84	100	13.476.992.342			
		<i>Presentase pemenuhan insentif nakes ASN yang menangani Covid-19 (%)</i>					100		100		100,00		100				
1.01.01.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN (orang)</i>					155	13.634.671.317	155	13.476.992.342	100,00	98.84	155	13.476.992.342			
		<i>Jumlah nakes ASN yang menangani Covid-19 (orang)</i>					75		75		100,00		75				
1.01.01.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase capaian indikator SPM subbagian umum sesuai dengan standar (%)</i>					100	140.479.593.838	100	96.458.398.081	100,00	68.66	100	96.458.398.081			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Presentase capaian indikator SPM subbagian kepegawaian sesuai dengan standar (%)</i>					66,67		66,67		100,00		66,67				
		<i>Presentase capaian indikator SPM subbagian perencanaan sesuai dengan standar (%)</i>					100		100		100,00		100				
		<i>Presentase capaian indikator SPM seksi pelayanan medis sesuai dengan standar (%)</i>					95,45		95,45		100,00		95,45				
		<i>Presentase capaian indikator SPM seksi keperawatan sesuai dengan standar (%)</i>					96		92		95,83		92				
		<i>Presentase capaian indikator SPM seksi penunjang medis sesuai dengan standar (%)</i>					95,83		100		104,35		100				
		<i>Presentase capaian indikator SPM seksi penunjang medis sesuai dengan standar (%)</i>					100		100		100,00		100				
		<i>Presentase capaian indikator SPM seksi anggaran dan mobilisasi dana sesuai dengan standar. (%)</i>					66,67		100		149,99		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Presentase capaian indikator SPM seksi verifikasi dan akuntansi sesuai dengan standar (%)</i>					100		100		100,00		100				
I.01.01. 10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah indikator SPM subbagian umum sesuai dengan standar (buah)</i>					4	140.479.593.838	4	96.458.398.081	100,00	68,66	4	96.458.398.081			
		<i>Jumlah indikator SPM subbagian kepegawaian sesuai dengan standar (Buah)</i>					3		3		100,00		3				
		<i>Jumlah indikator SPM subbagian perencanaan sesuai dengan standar (buah)</i>					1		1		100,00		1				
		<i>Jumlah indikator SPM seksi pelayanan medis sesuai dengan standarn (buah)</i>					21		21		100,00		21				
		<i>Jumlah indikator SPM seksi keperawatan sesuai dengan standar (buah)</i>					25		23		92,00		23				
		<i>Jumlah indikator SPM seksi penunjang medis sesuai dengan standar (buah)</i>					24		24		100,00		24				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah indikator SPM seksi penunjang medis sesuai dengan standar (buah)</i>					7		7		100,00		7				
		<i>Jumlah indikator SPM seksi anggaran dan mobilisasi dana sesuai dengan standar. (buah)</i>					3		3		100,00		3				
		<i>Jumlah indikator SPM seksi verifikasi dan akuntansi sesuai dengan standar (buah)</i>					1		1		100,00		1				
1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERDRANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Presentase capaian indikator SPM bidang pelayanan sesuai dengan standar</i>	97,8 3	53.662.179.377			95,65	17.474.979.995	93,62	16.958.786.573	97,88	97,05	93,62	16.958.786.573	95,70	31,60	
		<i>Presentase capaian indikator SPM bidang penunjang sesuai dengan standar</i>	100				96,88		100		103,22		100		100,00		
1.02.0 2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Presentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralayan rumah sakit yang sesuai standar (%)</i>					64	17.474.979.995	67,26	16.958.786.573	105,09	97,05	67,26	16.958.786.573			
1.02.0 2.01.0 5	Pengembangan Rumah Sakit	<i>Jumlah gedung rumah sakit yang diadakan (unit)</i>					3	4.519.176.545	1	4.343.295.313	33,33	96,11	1	4.343.295.313			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.0 2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pelayanan rumah sakit yang diadakan (buah)					2	8.711.703.450	92	8.374.343.700	4600,00	96,13	92	8.374.343.700			
1.02.0 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan (buah)					20	4.244.100.000	24	4.241.147.560	120,00	99,93	24	4.241.147.560			
1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Presentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi (%)</i>	100	303.709.372			100	3.500.000.000	100	3.116.607.183	100,00	89,05	100	3.116.607.183	100,00	1026,18	
1.02.0 3.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	<i>Presentase pemenuhan insentif nakes non ASN yang menangani Covid-19 (%)</i>					100	3.500.000.000	100	3.116.607.183	100,00	89,05	100	3.116.607.183			
1.02.0 3.02.0 2	Sub Kegiatan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	<i>Jumlah tenaga kesehatan non ASN yang menangani Covid-19 (orang)</i>					75	3.500.000.000	75	3.116.607.183	100,00	89,05	75	3.116.607.183			
1.03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	43.541.751.901			80,01	13.697.482.168	75,31	11.624.173.147	94,13	84,86	75,31	11.624.173.147	87,57	26,70	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (indeks)	90				77		-		0,00		0				
1.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)					100	60.721.925	90,9	55.197.500	90,90	90,90	90,9	55.197.500			
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan laporan pemerintah yang disusun (buah)					6	60.721.925	6	55.197.500	100,00	90,90	6	55.197.500			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (%)					100	10.923.803.406	85,91	9.384.729.011	85,91	85,91	85,91	9.384.729.011			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan)					12	10.923.803.406	12	9.384.729.011	100,00	85,91	12	9.384.729.011			
1.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan dokumen aset yang terpenuhi (%)					100	9.998.800	92,76	9.275.000	92,76	92,76	92,76	9.275.000			
1.01.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen aset yang tersusun (dokumen)					1	9.998.800	1	9.275.000	100,00	92,76	1	9.275.000			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)					100	717.227.613	76,63	549.604.279	76,63	76,63	76,63	549.604.279			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi (bulan)					12	9.175.529	12	6.371.700	100,00	69,44	12	6.371.700			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang terpenuhi (bulan)					12	94.428.840	12	50.843.500	100,00	53,84	12	50.843.500			
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan spanduk dan alat / bahan kebersihan kantor yang terpenuhi (bulan)					12	61.757.573	12	40.116.900	100,00	64,96	12	40.116.900			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan ATK dan mamin rapat yang terpenuhi (bulan)					12	242.221.497	12	207.001.750	100,00	85,46	12	207.001.750			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan fotocopy, cetak dan jilid yang terpenuhi (bulan)					12	43.488.389	12	18.974.200	100,00	43,63	12	18.974.200			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan publikasi yang terpenuhi (bulan)					12	69.545.785	12	53.610.000	100,00	77,09	12	53.610.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam yang terpenuhi (kali)					12	196.610.000	12	172.686.229	100,00	87,83	12	172.686.229			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (%)					100	0	-	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang diadakan (unit)					0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
I.01.01.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat berat, alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan (buah)					1	0	-	0	0,00	0,00	0	0			
I.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kebutuhan kantor yang diadakan (buah)					5	0	-	0	0,00	0,00	0	0			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)					100	729.630.458	94,64	690.552.906	94,64	94,64	94,64	690.552.906			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air, listrik dan telepon kebutuhan kantor yang terpenuhi (bulan)					12	164.237.004	12	127.685.794	100,00	77,74	12	127.685.794			
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi, jasa kebersihan dan jasa keamanan yang terpenuhi (bulan)					12	565.393.454	12	562.867.112	100,00	99,55	12	562.867.112			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan (%)					100	1.256.099.966	74,42	934.814.451	74,42	74,42	74,42	934.814.451			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara (unit)					8	252.214.370	8	208.014.047	100,00	82,48	8	208.014.047			
I.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang terpelihara (bulan)					12	98.060.620	12	48.172.454	100,00	49,13	12	48.172.454			
I.01.01.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah sarana prasarana alat berat yang dipelihara (unit)					15	650.017.730	15	541.867.400	100,00	83,36	15	541.867.400			
		Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dicetak (buah)					600		875		145,83		875				
		Jumlah lokasi yang terlayani alat berat (lokasi)					50		89		178,00		89				
I.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang terpelihara (bulan)					12	9.150.460	12	5.263.500	100,00	57,52	12	5.263.500			
I.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan sarpras gedung kantor yang terpelihara (bulan)					12	246.656.786	12	131.497.050	100,00	53,31	12	131.497.050			
I.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi (%)	84,79	67.049.385.875			84,53	17.666.851.810	84,98	16.796.326.981	100,53	95,07	84,98	16.796.326.981	100,22	25,05	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.0 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola (%)</i>					100	3.497.461.162	98,81	3.455.697.300	98,81	98,81	98,81	3.455.697.300			
1.03.0 2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku (Dinas PUPR)	<i>Jumlah sumur pompa dalam kondisi baik (unit)</i>					254	2.304.285.293	261	2.293.450.000	102,76	99,53	261	2.293.450.000			
1.03.0 2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	<i>Panjang saluran pembuang kondisi baik (m)</i>					6.126,76	817.101.021	4.202,55	790.783.000	68,59		4202,55				
		<i>Jumlah sarana pengendali banjir yang terbangun / terpelihara (unit)</i>					6		6		100,00		6				
1.03.0 2.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	<i>Jumlah wilayah rawan banjir yang dipelihara (lokasi)</i>					3	376.074.848	3	371.464.300	100,00	98,77	3	371.464.300			
1.03.0 2.01.6 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan dan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Administrasi penunjang operasional kegiatan yang diadakan (tahun)</i>					1	0	-	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.03.0 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik (%)</i>					100	19.561.090.648	94,15	18.415.489.781	94,15	94,14	94,15	18.415.489.781			
1.03.0 2.02.0 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	<i>Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi (dokumen)</i>					1	104.555.095	1	103.836.000	100,00	99,31	1	103.836.000			
1.03.0 2.02.0 8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan (m)</i>					3.871	10.768.507.237	6.682	10.182.870.929	172,62	94,56	6682	10.182.870.929			
1.03.0 2.02.1 3	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	<i>Jumlah saluran perpipaan sumur pompa dalam yang ditingkatkan (unit)</i>					1	99.637.963	1	99.545.000	100,00	99,91	1	99.545.000			
1.03.0 2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (m)</i>					5	1.407.730.880	5	1.398.253.300	100,00	99,33	5	1.398.253.300			
1.03.0 2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	<i>Jumlah wilayah irigasi yang dipelihara (lokasi)</i>					2	1.456.006.647	2	1.410.922.300	100,00	96,90	2	1.410.922.300			
		<i>Panjang saluran irigasi yang dipelihara (m)</i>					63.158		63.158		100,00		63.158				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.0 2.02.2 8	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	<i>Administrasi penunjang operasional kegiatan DAK yang dipelihara (tahun)</i>					1	332.952.826	1	145.202.152	100,00	43,61	1	145.202.152			
1.03.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR) (%)</i>	2,69	18.297.284.499			2,26	5.391.700.000	2,26	5.074.860.100	100,00	94,12	2,26	5.074.860.100	84,01	27,74	
1.03.0 3.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum yang terpenuhi (%)</i>					100	5.391.700.000	94,12	5.074.860.100	94,12	94,12	94,12	5.074.860.100			
1.03.0 3.01.0 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	<i>Jumlah jaringan SPAM yang ditingkatkan (unit)</i>					2	285.544.000	7	245.000.000	350,00	85,80	7	245.000.000			
1.03.0 3.01.0 6	Peningkatan SPAM Jaringan di Kawasan Perdesaan	<i>Jumlah SR yang dibangun (SR)</i>					665	4.976.156.000	669	4.699.860.100	100,60	94,45	669	4.699.860.100			
1.03.0 3.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	<i>Panjang jaringan perpipaan yang ditingkatkan (m)</i>					2.700	130.000.000	8.640	130.000.000	320,00	100,00	8640	130.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.03.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun (%)</i>	8,64	5.107.220.124			7,69	1.831.997.000	6,98	1.779.248.200	90,77	97,12	6,98	1.779.248.200	80,79	34,84	
1.03.0 5.01	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengembangan domestik air limbah domestik yang terpenuhi (%)</i>					100	1.831.997.000	97,12	1.779.248.200	97,12	97,12	97,12	1.779.248.200			
1.03.0 5.01.0 6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	<i>Jumlah SPALD-S yang dibangun (SR)</i>					200	1.618.997.000	200	1.567.143.600	100,00	96,80	200	1.567.143.600			
1.03.0 5.01.01 0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<i>Administrasi penunjang operasional kegiatan IPLT (paket)</i>					1	213.000.000	1	212.104.600	100,00	99,58	1	212.104.600			
1.03.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DRAINASE	<i>Persentase saluran drainase kondisi baik (%)</i>	4,86	11.376.072.137			4,13	3.310.583.549	4,149	3.290.110.646	100,46	99,38	4,149	3.290.110.646	85,37	28,92	
		<i>Persentase trotoar kondisi baik (%)</i>	3,83				2,45		2,45		100,00		2,45				
1.03.0 6.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	<i>Persentase panjang saluran drainase / gorong-gorong dan trotoar dalam kondisi baik (%)</i>					6,58	3.310.583.549	6,599	3.290.110.646	100,29	99,38	6,599	3.290.110.646			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.0 6.01.0 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	<i>Panjang saluran drainase yang ditingkatkan (m)</i>					2,44	3.310.583.549	2.747	3.290.110.646	112,58	99,38	2.747	3.290.110.646			
		<i>Panjang trotoar yang ditingkatkan (m)</i>					0		0		0,00		0				
1.03.0 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	<i>Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik (%)</i>	50,7 8	16.010.266.516			48,38	2.467.744.372	49,099	2.454.500.356	101,49	99,46	49,09 9	2.454.500.356	96,69	15,33	
1.03.0 7.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah yang ditingkatkan (%)</i>					48,38	2.467.744.372	49,099	2.454.500.356	101,49	99,46	49,099	2.454.500.356			
1.03.0 7.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/ Kota	<i>Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan (m)</i>					1896	2.467.744.372	1.068	2.454.500.356	56,33	99,46	1068	2.454.500.356			
		<i>Jumlah akses jalan wisata yang dipelihara / direhabilitasi</i>					-		-		0,00		0				
1.03.0 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi (%)</i>	100	30.744.154.976			100	9.965.101.424	98,95	9.860.424.060	98,95	98,95	98,95	9.860.424.060	98,95	32,07	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.03.0 8.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Persentase jumlah sarpras dan gedung pemerintah kondisi baik sesuai rencana (%)</i>					1,69	9.965.101.424	1,69	9.860.424.060	100,00	98,95	1,69	9.860.424.060			
1.03.0 8.01.01	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	<i>Jumlah dokumen pendukung penyelenggaraan bangunan gedung (dokumen)</i>					1	55.703.818	1	1.168.000	100,00	2,10	1	1.168.000			
1.03.0 8.01.0 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah gedung kantor / dinas / badan yang direhabilitasi (unit)</i>					1	9.909.397.606	1	9.859.256.060	100,00	99,49	1	9.859.256.060			
1.03.1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap (%)</i>	29,54	101.752.337.106			74,89	24.733.133.451	74,13	24.445.395.431	98,99	98,84	74,13	24.445.395.431	250,95	24,02	
		<i>Persentase jumlah jembatan kondisi baik (%)</i>	86,61				85,94		85,71		99,73		85,71				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.03.10.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik (%)					26,79	24.733.133.451	21,13	24.445.395.431	78,87	98,84	21,13	24.445.395.431			
I.03.10.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan (m)					8.378	10.356.809.000	8.637	10.308.305.500	103,09	99,53	8.637	10.308.305.500			
I.03.10.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (m)					2,47	3.165.799.964	1,262	3.110.516.010	51,09	98,25	1,262	3.110.516.010			
I.03.10.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah wilayah jalan yang dipelihara (lokasi)					2	9.228.448.390	2	9.071.824.421	100,00	98,30	2	9.071.824.421			
		Panjang jalan kondisi sedang (m)					313,44		393,787		125,63		393,787				
I.03.10.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan (unit)					2	1.460.928.977	1	1.436.591.800	50,00	98,33	1	1.436.591.800			
I.03.10.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	Administrasi penunjang operasional kegiatan DAK jalan yang diadakan (tahun)					1	521.147.120	1	518.157.700	100,00	99,43	1	518.157.700			
I.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat (%)	67,69	770.668.999			29,23	76.292.812	52,05	41.322.000	178,07	54,16	52,05	41.322.000	76,89	5,36	
I.03.11.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat tenaga terampil (%)					100	30.350.000	86,66	26.300.000	86,66	86,66	86,66	26.300.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.03.II.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang bersertifikat (orang)					60	30.350.000	44	26.300.000	73,33	86,66	44	26.300.000			
I.03.II.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang terpenuhi (%)					100	26.355.362	57	15.022.000	57,00	57,00	57	15.022.000			
I.03.II.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen jasa konstruksi yang disusun (dokumen)					3	26.355.362	3	15.022.000	100,00	57,00	3	15.022.000			
I.03.II.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah pelaksanaan seminar / sosialisasi / bimtek jasa konstruksi yang diadakan (%)					100	19.587.450	0	0	0,00	0,00	0	0			
I.03.II.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan pengawasan penyediaan jasa konstruksi (kali)					30	19.587.450	0	0	0,00	0,00	0	0			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun (%)</i>	40	4.307.068.026			-	739.642.010	-	684.276.600	0,00	92,51	0	684.276.600	0,00	15,89	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.03.12.01	Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	<i>Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang terpenuhi (%)</i>					100	684.692.830	91,97	629.736.900	91,97	91,97	91,97	629.736.900			
1.03.12.02.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	<i>Jumlah dokumen kelengkapan RTRW yang disusun (dokumen)</i>				3	436.366.300	3	385.556.300	100,00	88,36	3	385.556.300				
		<i>Berkas kelengkapan dokumen RTRW yang terinci (berkas)</i>				15		5		33,33		5					
1.03.12.02.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen kelengkapan RRTR yang disusun (dokumen)</i>				3	248.326.530	6	244.180.600	200,00	98,33	6	244.180.600				
		<i>Berkas kelengkapan dokumen RRTR yang terinci (berkas)</i>				15		10		66,67	#DIV/0!	10	0				
1.03.12.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah kajian teknis tata ruang yang dikeluarkan (%)</i>				100	54.949.180	100	54.539.200	100,00	99,25	100	54.539.200				
1.03.12.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Ruang	<i>Jumlah dokumen kajian dan informasi pemanfaatan ruang (dokumen)</i>				2	54.949.180	2	54.539.200	100,00		2					
		<i>Berkas kelengkapan dokumen kajian dan informasi pemanfaatan ruang (dokumen)</i>				1		1		100,00		1					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Survei Kepuasan ASN (indeks)	86	13.109.674.732			80,01	4.279.156.982	86,1	4.110.292.242	107,61	96,05	86,1	4.110.292.242	100,12	31,35	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan (%)	90				86		96		111,63		96		106,67		
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan peraturan (dokumen)					1	818.400	1	815.000	100,00	99,58	1	815.000			
1.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (dokumen)					3	10.428.460	3	10.412.700	100,00	99,85	3	10.412.700			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terpenuhi pengajiannya (%)					100	3.247.535.331	100	3.186.124.408	100,00	98,11	100	3.186.124.408			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gajinya (orang)					38	3.247.535.331	38	3.186.124.408	100,00	98,11	38	3.186.124.408			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia (%)					100	339.094.788	100	296.833.290	100,00	87,54	100	296.833.290			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia (tahun)					1	79.734.545	1	78.650.000	100,00	98,64	1	78.650.000			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (bulan)					12	140.514.568	12	137.475.100	100,00	97,84	12	137.475.100			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (buah)					3	28.824.675	3	25.691.000	100,00	89,13	3	25.691.000			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia (bulan)					12	8.870.000	12	8.040.000	100,00	90,64	12	8.040.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan (bulan)					12	81.151.000	12	46.977.190	100,00	57,89	12	46.977.190			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi(%)					100	88.764.500	100	88.350.000	100,00	99,53	100	88.350.000			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia (buah)					2	73.364.500	2	73.150.000	100,00	99,71	2	73.150.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia (buah)					1	15.400.000	1	15.200.000	100,00	98,70	1	15.200.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tercukupi (%)					100	307.674.743	100	284.242.054	100,00	92,38	100	284.242.054			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi (buah)					3	62.039.365	3	44.973.335	100,00	72,49	3	44.973.335			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang tersedia (orang)					6	245.635.378	6	239.268.719	100,00	97,41	6	239.268.719			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi (%)					100	284.840.760	100	243.514.790	100,00	85,49	100	243.514.790			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)					5	188.590.760	5	148.264.790	100,00	78,62	5	148.264.790			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara (buah)					15	30.250.000	15	30.250.000	100,00	100,00	15	30.250.000			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara (unit)					1	66.000.000	1	65.000.000	100,00	98,48	1	65.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (%)</i>	4,86	1.001.325.305			60	242.382.293	72,25	238.337.992	120,42	98,33	72,25	238.337.992	1.486,63	23,80	
		<i>Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana (%)</i>	100				100		0		0,00		0		0,00		
		<i>Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (%)</i>	100				100		0		0,00		0		0,00		
1.04.0 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (tahun)</i>					1	242.382.293	1	238.337.992	100,00	98,33	1	238.337.992			
1.04.0 2.05.0 1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (kali)</i>					1	182.586.070	1	179.493.992	100,00	98,31	1	179.493.992			
1.04.0 2.05.0 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum	<i>Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terpelihara (unit)</i>					1	59.796.223	1	58.844.000	100,00	98,41	1	58.844.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.04.0 3	PROGRAM KAWASAN PRMUKIMAN	<i>Cakupan kawasan kumuh yang tertangani (%)</i>	0,05 5	14.470.815.625			100	2.870.000.000	100	2.841.011.561	100,00	98,99	100	2.841.011.561	181.818, 18	19,63	
1.04.0 3.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<i>Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen)</i>					1	323.770.000	1	322.769.700	100,00	99,69	1	322.769.700			
1.04.0 3.02.0 2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (dokumen)</i>					1	198.770.000	1	198.770.000	100,00	100,00	1	198.770.000			
1.04.0 3.02.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (kali)</i>					44	125.000.000	44	123.999.700	100,00	99,20	44	123.999.700			
1.04.0 3.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<i>Luas Kawasan Kumuh Tertangani (m2)</i>					14,2	2.546.230.000	14,2	2.518.241.861	100,00	98,90	14,2	2.518.241.861			
		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (unit)</i>					0		0		0,00		0				
1.04.0 3.03.0 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (unit)</i>					245	2.035.000.000	245	2.011.593.821	100,00	98,85	245	2.011.593.821			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.04.0 3.03.0 6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	<i>Luas Kawasan Kumuh Tertangani (m2)</i>					14,2	511.230.000	14,2	506.648.040	100,00	99,10	14,2	506.648.040			
1.04.0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	<i>Jumlah kawasan kumuh baru yang tumbuh (lokasi)</i>	100	6.916.745.382			109	2.248.891.000	109	2.248.891.000	100,00	100,00	109	2.248.891.000	109,00	32,51	
1.04.0 4.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/ Kota	<i>Jumlah kawasan kumuh baru yang tumbuh (lokasi)</i>					109	2.248.891.000	109	2.248.891.000	100,00	100,00	109	2.248.891.000			
1.04.0 4.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (sepuluh) Ha	<i>Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha (lokasi)</i>					109	2.248.891.000	109	2.248.891.000	100,00	100,00	109	2.248.891.000			
1.04.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya (%)</i>	73	1.455.454.955			0	514.109.597	0	511.697.094	0,00	99,53	0	511.697.094	0,00	35,16	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.04.0 5.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Persentase Rumah Terlayani PSU (%)</i>					100	514.109.597	100	511.697.094	100,00	99,53	100	511.697.094			
1.04.0 5.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (dokumen)</i>					1	100.000.139	1	99.869.000	100,00	99,87	1	99.869.000			
1.04.0 5.01.0 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<i>Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)</i>					18	170.977.014	18	170.028.400	100,00	99,45	18	170.028.400			
1.04.0 5.01.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (kali)</i>					3	243.132.444	3	241.799.694	100,00	99,45	3	241.799.694			
1.05	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																Satuan polisi Pamong Praja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	18.658.777.039			80,01	2.242.027.910		2.208.928.666	0,00	98,52	0	2.208.928.666	0,00	11,84	
		<i>Hasil Survei Kepuasan ASN (indeks)</i>	90				77										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)					100	5.189.200.994	100	5.105.829.870	100,00	98,39	100	5.105.829.870			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan yang terpenuhi (%)					100	5.149.292.364	100	5.072.641.570	100,00	98,51	100	5.072.641.570			
1.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Teseleenggaranya Pelaporan Keuangan OPD (%)					90	39.908.630	90	33.188.300	100,00	83,16	90	33.188.300			
1.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana (%)					100	197.034.700	100	194.749.500	100,00	98,84	100	194.749.500			
1.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (tahun)					1	197.034.700	1	194.749.500	100,00	98,84	1	194.749.500			
1.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)					90	226.600.000	90	197.586.434	100,00	87,20	90	197.586.434			
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (buah)					90	7.000.000	90	6.758.074	100,00	96,54	90	6.758.074			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (buah)					90	61.500.000	90	39.141.080	100,00	63,64	90	39.141.080			
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (buah)					90	14.200.000	90	14.051.504	100,00	98,95	90	14.051.504			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan (buah)					90	14.450.000	90	14.450.000	100,00	100,00	90	14.450.000			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (buah)					90	3.600.000	90	3.480.000	100,00	96,67	90	3.480.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Jumlah Rapat Koordinasi yang terlaksana (%)					90	125.850.000	90	119.705.776	100,00	95,12	90	119.705.776			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan (%)					100	469.387.869	100	448.787.974	100,00	95,61	100	448.787.974			
		Persentase kebutuhan pengiriman surat yang terpenuhi (%)				100	100		100,00		0,00	100					
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (bulan)					12	130.037.315	12	114.245.462	100,00	87,86	12	114.245.462			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (bulan)					12	7.558.000	12	3.500.000	100,00	46,31	12	3.500.000			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (bulan)					12	331.792.554	12	331.042.512	100,00	99,77	12	331.042.512			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan (%)					12	180.750.000	12	180.533.520	100,00	99,88	12	180.533.520			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)					12	180.750.000	12	180.533.520	100,00	99,88	12	180.533.520			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan (%)					100	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
1.01.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam waktu 1 (satu) tahun					1	0	0	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)</i>	100	5.067.836.866			100	1.079.905.495	100	1.056.217.480	100,00	97,81	100	1.056.217.480	100,00	20,84	
		<i>Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)</i>	100				100		100		100,00		100		100,00		
1.05.0 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti (buah)</i>					25	1.028.331.495	4	1.005.224.680	16,00	97,75	4	1.005.224.680			
1.05.0 2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<i>Jumlah pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (kali)</i>					10	377.505.000	10	376.962.780	100,00	99,86	10	376.962.780			
1.05.0 2.01.0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Kawasan Bebas Asap Rokok Terpantau (lokasi)</i>					2	32.672.000	0	29.890.250	0,00	91,49	0	29.890.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.0 2.01.0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (kali)</i>					2	85.000.000	2	82.596.250	100,00	97,17	2	82.596.250			
1.05.0 2.01.0 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah anggota LINMAS aktif (orang)</i>					4.250	152.823.000	4.250	138.845.400	100,00	90,85	4250	138.845.400			
1.05.0 2.01.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	<i>Jumlah SDM satpol pp dan linmas dalam pelaksanaan tugas (orang)</i>					15	0	15	0	100,00	0,00	15	0			
1.05.0 2.01.0 6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah kerjasama dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (kerjasama)</i>					30	238.105.495	15	234.947.200	50,00	98,67	15	234.947.200			
1.05.0 2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban umum kondisi baik (unit)</i>					15	0	0	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.05.0 2.01.0 8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	<i>Jumlah SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (buah)</i>					10	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
1.05.0 2.01.0 9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	<i>Jumlah pelanggaran perda dan perkada yang menurun (kali)</i>					185	142.226.000	29	141.982.800	15,68	99,83	29	141.982.800			
1.05.0 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	<i>Jumlah Penegakan perda dan perbub sesuai ketentuan (kali)</i>					40	0	29	0	72,50	0,00	29	0			
1.05.0 2.02.0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi perda dan perbub yang Terlaksana (kali)</i>					35	0	2	0	5,71	0,00	2	0			
1.05.0 2.02.0 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	<i>Jumlah pengawasan kepatuhan perda dan perbub (kali)</i>					35	0	29	0	82,86	0,00	29	0			
1.05.0 2.02.0 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	<i>jumlah penanganan atas pelanggaran perda dan perbub (kali)</i>					25	0	29	0	116,00	0,00	29	0			
1.05.0 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PPNS yang aktif (orang)</i>					15	51.574.000	4	50.992.800	26,67	98,87	4	50.992.800			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.05.0 2.04.0 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan karier PPNS (orang)					15	51.574.000	4	50.992.800	26,67	98,87	4	50.992.800			
1.05.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kasus kebakaran yang tertangani (%)	100	4.473.699.457			100	1.173.459.687	85	1.167.573.046	85,00	99,50	85	1.167.573.046	85,00	26,10	
		Persentase kasus non kebakaran yang tertangani (%)	100				100		203		203,00	0,00	203		203,00		
1.05.0 4.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus pencegahan Kebakaran dan Non kebakaran sesuai dengan ketentuan (kali)					20	568.413.205	3	563.984.280	15,00	99,22	3	563.984.280			
		Jumlah Kasus penanganan Kebakaran dan Non kebakaran sesuai dengan ketentuan (kasus)					50		237		474,00	0,00	237				
1.05.0 4.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran (kali)					5	0	3	0	60,00	0,00	3	0			
1.05.0 4.01.0 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi kebakaran (kali)					40	330.250.000	34	326.819.280	85,00	98,96	34	326.819.280			
1.05.0 4.01.0 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran (kali)					100	0	203	0	203,00	0,00	203	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.0 4.01.0 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran dan non kebakaran (kali)					12	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
1.05.0 4.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah pembinaan aparatur pemadam kebakaran (kali)					3	238.163.205	5	237.165.000	166,67	99,58	5	237.165.000			
1.05.0 4.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran yang sesuai kualifikasi (orang)					35	605.046.482	32	603.588.766	91,43	99,76	32	603.588.766			
1.05.0 4.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan sesuai standart operasional (kali)					10	605.046.482	9	603.588.766	90,00	99,76	9	603.588.766			
																	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	7.735.928.255			80,01	2.242.027.910	80,04	2.208.928.666	100,04	98,52	80,04	2.208.928.666	93,07	28,55	
		Hasil Survei Kepuasan ASN (indeks)	90				77		0		0,00		0		0,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)</i>					100	1.322.804.733	100	1.308.696.803	100,00	98,93	100	1.308.696.803			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN selama setahun (%)</i>					100	1.322.804.733	100	1.308.696.803	100,00	98,93	100	1.308.696.803			
I.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)</i>					100	98.750.850	100	98.500.000	100,00	99,75	100	98.500.000			
I.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Persentase Pakaian Dinas yang Terpenuhi (%)</i>					100	98.750.850	100	98.500.000	100,00	99,75	100	98.500.000			
I.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi (%)</i>					100	191.583.033	100	190.554.724	100,00	99,46	100	190.554.724			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Persentase kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (%)</i>					100	3.215.465	100	3.215.465	100,00	100,00	100	3.215.465			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (%)</i>					100	36.768.655	100	36.310.000	100,00	98,75	100	36.310.000			
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga (%)</i>					100	6.102.635	100	6.102.635	100,00	100,00	100	6.102.635			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (%)</i>					100	67.956.288	100	67.507.474	100,00	99,34	100	67.507.474			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)</i>					100	12.992.990	100	12.992.150	100,00	99,99	100	12.992.150			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (%)</i>					100	4.680.000	100	4.560.000	100,00	97,44	100	4.560.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%)</i>					100	59.867.000	100	59.867.000	100,00	100,00	100	59.867.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia (%)</i>					100	301.023.836	100	282.276.405	100,00	93,77	100	282.276.405			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Persentase kebutuhan pengiriman surat yang terpenuhi (%)</i>					100	600.000	100	104.000	100,00	17,33	100	104.000			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)</i>					100	71.098.836	100	71.097.405	100,00	100,00	100	71.097.405			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor (%)</i>					100	229.325.000	100	211.075.000	100,00	92,04	100	211.075.000			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi (%)</i>					100	327.865.458	100	327.185.234	100,00	99,79	100	327.185.234			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (%)</i>					100	279.315.765	100	278.923.334	100,00	99,86	100	278.923.334			
1.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebelair (%)</i>					100	2.090.000	100	2.080.000	100,00	99,52	100	2.080.000			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Persentase peralatan dan mesin yang terpelihara (%)</i>					100	22.511.148	100	22.481.900	100,00	99,87	100	22.481.900			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (%)					100	23.948.545	100	23.700.000	100,00	98,96	100	23.700.000			
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana (%)</i>	100	5.737.402.162			36,4	23.362.441.943		989.033.055		4,23		989.033.055	0,00	17,24	
		<i>Persentase korban terdampak bencana yang ditangani (%)</i>	100				100								0,00		
		<i>Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan (%)</i>	100				100								0,00		
1.05.03.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti (%)					100	23.306.891.943	100	933.538.055	100,00	4,01	100	933.538.055			
1.05.03.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia (%)					100	633.179.880	100	573.448.222	100,00	90,57	100	573.448.222			
1.05.03.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana (%)					100	22.633.840.063	100	320.224.833	100,00	1,41	100	320.224.833			
1.05.03.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana (%)					700	39.872.000	700	39.865.000	100,00	99,98	700	39.865.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.0 3.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang aktif (desa)					-	55.550.000		55.495.000		99,90	0	55.495.000			
1.05.0 3.04.0 1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan (dokumen)					1	55.550.000	1	55.495.000	100,00	99,90	1	55.495.000			
1.06	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL																Satuan polisi Pamong Praja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	12.990.717.291			80,01	3.957.173.950	77,84	3.834.562.900,99	97,29	96,90	77,84	3.834.562.901	90,51	29,52	
		Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan perangkat daerah (indeks)	90				77		80		103,90		80		88,89		
1.01.01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Gaji ASN dan Tunjangan yang diterima (%)					100	3.209.380.093	100	3.103.038.003	100,00	96,69	100	3.103.038.003			
1.01.01. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan (orang)					35	3.209.380.093	31	3.103.038.003	88,57	96,69	31	3.103.038.003			
1.01.01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (bulan)					12	99.854.666	12	93.349.382,00	100,00	93,49	12	93.349.382			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (bulan)					12	4.906.800	12	4.906.112	100,00	99,99	12	4.906.112			
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (bulan)					12	31.218.050	12	31.117.750	100,00	99,68	12	31.117.750			
1.01.01.06.03	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan (bulan)					12	8.463.150	12	8.044.395	100,00	95,05	12	8.044.395			
1.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)					12	12.770.626	12	8.315.500	100,00	65,11	12	8.315.500			
1.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)					12	3.600.000	12	3.600.000	100,00	100,00	12	3.600.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar dan dalam daerah yang terlaksanakan (bulan)					12	38.896.040	12	37.365.625	100,00	96,07	12	37.365.625			
		Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan (bulan)				12	12		100,00		12						
		Jumlah Rapat yang dilaksanakan (bulan)				12	12		100,00		12						
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa untuk penunjang kegiatan yang disediakan (bulan)					12	263.405.228	12	258.942.967,99	100,00	98,31	12	258.942.968			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)					12	500.000	12	273.500	100,00	54,70	12	273.500			
I.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik, telp. air dan internet (bulan)					12	50.553.880	12	46.607.552	100,00	92,19	12	46.607.552			
I.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa Keamanan kantor yang disediakan (orang)					4	212.351.348	4	212.061.915,99	100,00	99,86	4	212.061.916			
		Jumlah jasa pemeliharaan taman dan satwa kantor (tahun)					1		1		100,00		1				
		Jumlah penunjang Kinerja SKPD yang disediakan (bulan)						12		12		100,00		12			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara (bulan)					12	104.533.963	12	100.782.548	100,00	96,41	12	100.782.548			
I.01.01.09.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang terpelihara (bulan)					12	88.183.963	12	84.462.048	100,00	95,78	12	84.462.048			
I.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara (bulan)					12	500.000	12	495.000	100,00	99,00	12	495.000			
I.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer, printer dan peralatan kantor lainnya yang terpelihara (bulan)					12	9.320.000	12	9.320.000	100,00	100,00	12	9.320.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/rehab gedung kantor,kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung bangunan kantor yang terpelihara (bulan)					12	6.530.000	12	6.505.500	100,00	99,62	12	6.505.500			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (kali)					1	280.000.000	1	278.450.000	100,00	99,45	1	278.450.000			
1.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan (unit)					1	280.000.000	1	278.450.000	100,00	99,45	1	278.450.000			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Presentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social (bulan)</i>	90	2.557.427.208			98,95	894.264.638	98,95	884.915.560	100,00	98,95	98,95	884.915.560	109,94	34,60	
		<i>Presentase Desa/Kelurahan yang diberdayakan (bulan)</i>	19,42				15		15		100,00		15		77,24		
1.06.02.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan (desa/kel)					15	65.165.839	15	65.135.164	100,00	99,95	15	65.135.164			
1.06.02.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KPM Fakmis yang teridentifikasi untuk program Penanganan Fakmis (orang)					107	65.165.839	107	65.135.164	100,00	99,95	107	65.135.164			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah KPM PKH graduasi mandiri yang mendapatkan sosialisasi Prokus (orang)</i>					107		107		100,00		107				
		<i>Jumlah pendamping yang mendapatkan pembinaan (kali)</i>					20		20		100,00		20				
1.06.0 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kesos (orang)</i>					4	829.098.799	4	819.780.396	100,00	98,88	4	819.780.396			
1.06.0 2.03.0 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/ Kota	<i>Jumlah Janda Perintis yang Menerima Bantuan (orang)</i>					4	19.363.964	4	11.829.240	100,00	61,09	4	11.829.240			
		<i>Jumlah siswa setingkat SLTA yg hadir di pembinaan nilai kepahlawanan (orang)</i>					55		55		100,00		55				
1.06.0 2.03.0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kab/Kota	<i>Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kesos (orang)</i>					4	809.734.835	4	807.951.156	100,00	99,78	4	807.951.156			
		<i>Jumlah LKS yang sdh terdaftar mendapatkan bantuan Hibah Uang (orang)</i>					16		16		100,00		16				
1.06.0 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Presentase PSKS yang tertangani (%)</i>	5	3.195.574.644			100	1.274.239.673	100	1.250.181.426	100,00	98,11	100	1.250.181.426	2.000,00	39,12	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.06.0 4.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Sosial) yang ditangani					186	143.370.483	186	129.232.266	100,00	90,14	186	129.232.266			
1.06.0 4.01.0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat	Jumlah Eks Psikotik yang dibantu (orang) Jumlah jenazah terlantar yang ditangani (orang) Jumlah Urang Terlantar (OT) yang kehabisan bekal (orang) Jumlah DDGJ yang direhabilitasi (orang) Jumlah WTS yang mendapat bantuanm (orang) Jumlah DDHA (orang dengan HIV/AIDS) yang mendapat bantuan (orang)					60 6 20 30 20 50	143.370.483	60 6 20 30 20 50	129.232.266	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	90,14	60 6 20 30 20 50	129.232.266			
1.06.0 4.02	Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial yang tertangani (orang)					7	1.130.869.190	7	1.120.949.160	100,00	99,12	7	1.120.949.160			
1.06.0 4.02.0 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Panti yang dibantu (unit) Jumlah Panti yang dibina (unit)					16 16	201.532.980	16 0	199.155.340	100,00 0,00	98,82	16 0	199.155.340			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.06.0 4.02.0 7	Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	<i>Jumlah Disabilitas yg diberi bantuan (orang)</i>					990		990		100,00		990				
		<i>Jumlah Disabilitas dikirim untuk di rehabilitasi (orang)</i>					20	296.918.367	34	296.370.473	170,00	99,82	34	296.370.473			
		<i>Jumlah Disabilitas yang mendapat pembinaan (orang)</i>					200		0		0,00		0				
1.06.0 4.02.0 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	<i>Jumlah Anak Yatim piatu yang mendapat santunan/sembako (orang)</i>					1.496	537.760.043	1.496	536.831.251	100,00	99,83	1.496	536.831.251			
		<i>Jumlah Fakmis Penerima Bansos Uang (orang)</i>					120		119		99,17		119				
1.06.0 4.02.14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	<i>Jumlah Anak yang di Rehabilitasi (orang)</i>					50		0		0,00		0				
		<i>Jumlah LU yg diberi bantuan</i>					232	94.657.800	232	88.592.096	100,00	93,59	232	88.592.096			
		<i>Jumlah Remaja bermasalah yang mengikuti pelatihan (orang)</i>					20		24		120,00		24				
		<i>Jumlah anak yang mendapatkan hak pengasuhan (orang)</i>					30		12		40,00		12				
1.06.0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin (%)</i>	90	2.855.368.368			99,83	3.320.992.072	99,83	3.315.397.790	100,00	99,83	99,83	3.315.397.790	110,92	116,11	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.06.0 5.02	Pengelolaan data fakmis Cakupan Daerah Kab/ Kota	<i>Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang dikelola secara elektronik (orang)</i>					360.56 3	3.320.992.072	360.56 3	3.315.397.790	100,00	99,83	36056 3	3.315.397.790			
1.06.0 5.02.0 1	Pendataan Fakmis Cakupan Daerah Kab /Kota	<i>Jumlah keluarga miskin yang di data (KK)</i>					141.512	75.541.667	141.512	74.777.340	100,00	98,99	141512	74.777.340			
1.06.0 5.02.0 2	Pengelolaan Data Fakmis Cakupan Daerah Kab /Kota	<i>Jumlah data BDT yang diverifikasi dan Validasi (orang)</i>					93.353	45.189.005	93.353	44.376.750	100,00	98,20	93353	44.376.750			
		<i>Jumlah data peserta PBIN dan PBID yang Up To Date (orang)</i>					360.56 3		360.56 3		100,00		36056 3				
1.06.0 5.02.0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah keluarga yang terfasilitasi bantuan social (KK)</i>					47.650	3.200.261.400	22.491	3.196.243.700	47,20	99,87	22491	3.196.243.700			
		<i>Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) (orang)</i>					45.806		45.806		100,00		45806				
		<i>Jumlah pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP) . SLRT dan PKH yang dibina (orang)</i>					159		159		100,00		159				
1.06.0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana (%)</i>	100	1.777.699.623			99,52	2.338.641.577	99,52	2.327.465.382	100,00	99,52	99,52	2.327.465.382	99,52	130,93	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase Personil Tenaga yang dibina (%)</i>	100				100		100		100,00		100		100,00		
		<i>Persentase Korban Bencana Sosial yang difasilitasi (%)</i>					100		100		100,00		100		0,00		
1.06.0 6.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	<i>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani (orang)</i>					4.917	1.809.348.062	4.917	1.800.868.160	100,00	99,53	4917	1.800.868.160			
1.06.0 6.01.0 4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	<i>Jumlah Korban Paska Bencana Alam dan kebakaran yang tertangani (orang)</i>					255	1.809.348.062	255	1.800.868.160	100,00	99,53	255	1.800.868.160			
		<i>Jumlah Korban Bencana Sosial (Covid-19) yang dibantu (orang)</i>					4662		4662		100,00		4662				
		<i>Jumlah Kelompok Rentan yang dibantu (kelompok)</i>					36		36		100,00		36				
		<i>Jumlah personil Relawan Pelapor Perdamaian yang dibina (orang)</i>					2		2		100,00		2				
1.06.0 6.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/ Kota	<i>Jumlah Kegiatan KSB dan Relawan Tagana yang dilaksanakan (kali)</i>					12	529.293.515	12	526.597.222	100,00	99,49	12	526.597.222			
		<i>Jumlah relawan (KSB, Tagana, Pelapor) yang dibina (orang)</i>					62		62		100,00		62				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.06.0 6.02.0 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan TAGANA	<i>Jumlah Kegiatan Tagana dan KSB yang dilaksanakan (Sosialisasi Kebencanaan TMS, TTM, TMA) (kali)</i>					15.640	529.293.515	15.640	526.597.222	100,00	99,49	15640	526.597.222			
		<i>Jumlah Personil Tagana dan KSB yang dibina (orang)</i>				62		62		100,00		62					
2.07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA																Dinas Tenaga Kerja
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	13.255.145.964			80,01	4.169.777.421	83,61	4.058.259.603	104,50	97,33	83,61	4.058.259.603	97,22	30,62	
		<i>Prosentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (indeks)</i>	90				77		77		100,00		77		85,56		
1.01.01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah pemberian Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)</i>					14	3.540.333.836	14	3.463.450.531	100,00	97,83	14	3.463.450.531			
1.01.01. 02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah pemberian Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)</i>					14	3.540.333.836	14	3.463.450.531	100,00		14				
1.01.01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan (bulan)</i>					12	177.030.529	12	168.070.000	100,00	94,94	12	168.070.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)					1	3.018.730	1	2.987.500	100,00	98,97	1	2.987.500			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)					3	88.150.214	3	85.772.600	100,00	97,30	3	85.772.600			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)					2	9.062.460	2	7.766.500	100,00	85,70	2	7.766.500			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)					2	16.030.125	2	11.508.700	100,00	71,79	2	11.508.700			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)					24	3.300.000	24	2.901.000	100,00	87,91	24	2.901.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)					675	57.469.000	675	57.133.700	100,00	99,42	675	57.133.700			
I.01.01.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan (bulan)					12	355.422.176	12	330.693.302	100,00	93,04	12	330.693.302			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>					96	60.671.428	96	40.805.586	100,00	67,26	96	40.805.586			
1.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah (buah)</i>					15	31.974.695	15	28.283.800	100,00	88,46	15	28.283.800			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>					33	262.776.053	33	261.603.916	100,00	99,55	33	261.603.916			
1.01.01.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	<i>Jumlah Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i>					12	96.990.880	12	96.045.770	100,00	99,03	12	96.045.770			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)</i>					13	63.990.880	13	63.215.870	100,00	98,79	13	63.215.870			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)					1	33.000.000	1	32.829.900	100,00	99,48	1	32.829.900			
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)</i>	78	1.460.020.741			76	27.619.450	75	23.547.540	98,68	85,26	75	23.547.540	96,15	1,61	
2.07.04.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kab / Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang dilayani Bimbingan Jabatan (orang)					2.750	15.479.400	2.846	11.612.500	103,49	75,02	2846	11.612.500			
2.07.04.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sesuai prosedur. (orang)					2.000	15.479.400	1.380	11.612.500	69,00	75,02	1380	11.612.500			
2.07.04.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/ Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan (orang)					100	12.140.050	100	11.935.040	100,00	98,31	100	11.935.040			
2.07.04.05	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pelatihan Pengelolaan Edukasi reminton bagi keluarga TKI (%)					100	12.140.050	100	11.935.040	100,00	98,31	100	11.935.040			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Angka Sengketa Perusahaan per tahun</i>	80	1.125.187.500			80	104.204.550	100	99.448.250	125,00	95,44	100	99.448.250	125,00	8,84	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.07.0 5.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	<i>Persentase Persahaan yang menerapkan tatakeola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, Trukturla Skala dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. (%)</i>					5	48.493.000	5	46.403.250	100,00	95,69	5	46.403.250			
2.07.0 5.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	<i>Jumlah Syarat Kerja dan PP yang disyahkan dan PKB yang didaftarkan. (dokumen)</i>					10	18.493.000	10	18.493.000	100,00	100,00	10	18.493.000			
2.07.0 5.01.0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	<i>Jumlah Perusahaan yang telah mengikui program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (buah)</i>					605	30.000.000	605	27.910.250	100,00	93,03	605	27.910.250			
2.07.0 5.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan (%)</i>					100	55.711.550	250	53.045.000	250,00	95,21	250	53.045.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.07.0 5.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial (buah)</i>					10	55.711.550	25	53.045.000	250,00	95,21	25	53.045.000			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase lulusan pelatihan yang bekerja (%)</i>	78	2.739.886.638			76	853.479.090	76	746.642.400	100,00	87,48	76	746.642.400	97,44	27,25	
2.07.0 3.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi (kali)</i>					128	798.767.000	326	706.288.400	254,69	88,42	326	706.288.400			
2.07.0 3.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat (orang)</i>					128	798.767.000	326	706.288.400	254,69	88,42	326	706.288.400			
2.07.0 3.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Persentase Lembaga Pelatihan yang dilakukan Pembinaan (lembaga)</i>					30	28.212.090	33	21.489.000	110,00	76,17	33	21.489.000			
2.07.0 3.02.0 1	Pembinaan lembaga Pelatihan Kerja swasta	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan yang dibina (lembaga)</i>					8	28.212.090	9	21.489.000	112,50	76,17	9	21.489.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.07.0 3.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembinaan Perusahaan. (%)</i>					4	26.500.000	3,2	18.865.000	80,00	71,19	3,2	18.865.000			
2.07.0 3.05.0 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	<i>Jumlah perusahaan yang dibina produktifitasnya (buah)</i>					35	26.500.000	28	18.865.000	80,00	71,19	28	18.865.000			
2.08	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																Dinas PPKB, PPPA
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Nilai SAKIP DPD</i>	86	13.050.668.601			80,01	3.927.909.208	83,61	3.782.260.887	104,50	96,29	83,61	3.782.260.887	97,22	28,98	
		<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (indeks)</i>	90				77		83,7		108,70		83,7		93,00		
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)</i>					100	1.500.000	100	1.493.700	100,00	99,58	100	1.493.700			
1.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)</i>					19	1.500.000	19	1.493.700	100,00	99,58	19	1.493.700			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase gaji dan tunjangan yang terbayarkan (%)</i>					100	3.105.920.330	100	3.000.947.841	100,00	96,62	100	3.000.947.841			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemberian gaji dan tunjangan ASN (bulan)					14	3.105.920.330	14	3.000.947.841	100,00	96,62	14	3.000.947.841			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana penunjang kantor tersedia (%)					100	820.488.878	100	779.819.346	100,00	95,04	100	779.819.346			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Jasa Listrik, Internet dan Telepon (bulan)					12	820.488.878	12	779.819.346	100,00	95,04	12	779.819.346			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif (%)</i>	100	707.478.125			79,52	124.516.358	79,52	124.494.320	100,00	99,98	79,52	124.494.320	79,52	17,60	
2.08.02.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase focal poin DPD yang aktif (%)</i>					64,44	75.000.000	64,44	74.983.120	100,00	99,98	64,44	74.983.120			
2.08.02.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	<i>Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan ARG (%)</i>					29	75.000.000	29	74.983.120	100,00	99,98	29	74.983.120			
2.08.02.03	Penguatandan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif (lembaga)</i>					66	49.516.358	66	49.511.200	100,00	99,99	66	49.511.200			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.08.0 2.03.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkompeten (lembaga)</i>					250	49.516.358	250	49.511.200	100,00	99,99	250	49.511.200			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif (%)</i>	50	307.562.500			30	100.000.000	30	99.974.500	100,00	99,97	30	99.974.500	60,00	32,51	
2.08.06.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yg aktif (lembaga)</i>					90	100.000.000	90	99.974.500	100,00	99,97	90	99.974.500			
2.08.06.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terfasilitasi (lembaga)</i>					100	100.000.000	100	99.974.500	100,00	99,97	100	99.974.500			
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Rasio kekerasan terhadap anak</i>	13	533.970.814			15	173.613.758	6,32	172.586.620	42,13	99,41	6,32	172.586.620	48,62	32,32	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.08.0 7.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani (%)</i>					100	173.613.758	100	172.586.620	100,00	99,41	100	172.586.620			
2.08.0 7.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/ Kota	<i>Jumlah Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam satu tahun (kali)</i>					44	173.613.758	57	172.586.620	129,55	99,41	57	172.586.620			
2.09	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN																Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	13.116.776.366			75	4.000.843.840	76	3.916.043.373	101,33	97,88	76	3.916.043.373	88,37	29,86	
		<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (indeks)</i>	90				70		80		114,29		80		88,89		
1.01.01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bulan)</i>					12	3.534.729.855	12	3.491.765.476	100,00	98,78	12	3.491.765.476			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi pegawai (bulan)					12	3.534.729.855	12	3.491.765.476	100,00	98,78	12	3.491.765.476			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)					12	81.727.998	12	75.554.364	100,00	92,45	12	75.554.364			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)					12	2.484.763	12	2.476.700	100,00	99,68	12	2.476.700			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (bulan)					12	19.732.688	12	19.706.100	100,00	99,87	12	19.706.100			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (bulan)					12	8.709.768	12	8.469.300	100,00	97,24	12	8.469.300			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)					12	7.349.760	12	6.298.000	100,00	85,69	12	6.298.000			
I.01.01.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak Kantor (bulan)					12	5.880.019	12	5.655.500	100,00	96,18	12	5.655.500			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bulan)					12	37.571.000	12	32.948.764	100,00	87,70	12	32.948.764			
I.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)					12	69.365.415	12	69.365.415	100,00	100,00	12	69.365.415			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia (bulan)					12	69.365.415	12	69.365.415	100,00	100,00	12	69.365.415			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)					12	141.927.390	12	111.440.096	100,00	78,52	12	111.440.096			
1.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)					12	2.702.150	12	2.350.000	100,00	86,97	12	2.350.000			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Yang Dapat Termanfaatkan (bulan)					12	68.631.240	12	42.193.583	100,00	61,48	12	42.193.583			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)					12	70.594.000	12	66.896.513	100,00	94,76	12	66.896.513			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)					12	173.093.074	12	168.507.914	100,00	97,35	12	168.507.914			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapang yang dapat dimanfaatkan (bulan)					12	104.183.220	12	100.085.553	100,00	96,07	12	100.085.553			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Teeliharanya peralatan dan mesin lainnya (bulan)</i>					12	15.125.000	12	14.910.000	100,00	98,58	12	14.910.000			
1.01.01.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Teeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (bulan)</i>					12	53.784.854	12	53.512.361	100,00	99,49	12	53.512.361			
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<i>Tingkat Capaian Angka Kecukupan Protein (gr/org/hr)</i>	2.250	4.875.603.785			2100	880.800.245	2150	838.518.900	102,38	95,20	2150	838.518.900	95,56	17,20	
		<i>Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi (kal/org/hr)</i>					57		58		101,75		58				
2.09.03.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kab /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Stabilnya pasokan dan harga pangan (bulan)</i>					12	122.980.000	12	122.327.400	100,00	99,47	12	122.327.400			
2.09.03.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan	<i>Jumlah dokumen terkait harga pangan dan NBM yang dimanfaatkan (dokumen)</i>					2	47.590.000	2	47.466.200	100,00	99,74	2	47.466.200			
2.09.03.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	<i>Jumlah pangan pokok (beras) yg terdistribusikan melalui TTI (ton)</i>					150	75.390.000	161	74.861.200	107,33	99,30	161	74.861.200			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.09.0 3.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Terkelolanya cadangan pangan kabupaten (bulan)</i>					12	108.934.000	12	106.877.900	100,00	98,11	12	106.877.900			
2.09.0 3.02.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kab/Kota	<i>Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Yang Menerima Penyuluhan Dan Sosialisasi Tentang Lumbung Pangan (kelompok)</i>					10	72.234.000	10	70.474.600	100,00	97,56	10	70.474.600			
2.09.0 3.02.0 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah</i>					3	36.700.000	3,38	36.403.300	112,67	99,19	3,38	36.403.300			
2.09.0 3.04	Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG (%)</i>					100	648.886.245	90,18	609.313.600	90,18	93,90	90,18	609.313.600			
2.09.0 3.04.0 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun	<i>Jumlah Dokumen Terkait Konsumsi Pangan Yang Dapat Dimanfaatkan (dokumen)</i>					1	88.886.245	1	82.455.600	100,00	92,77	1	82.455.600			
2.09.0 3.04.0 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>Jumlah Lokasi Pekarangan Lestari (lokasi)</i>					60	560.000.000	60	526.858.000	100,00	94,08	60	526.858.000			
2.09. 05	Program pengawasan keamanan pangan	<i>Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman (%)</i>	100	177.426.655			100	37.117.755	100	32.030.480	100,00	86,29	100	32.030.480	100,00	18,05	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.09.0 5.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman (%)</i>					100	37.117.755	100	32.030.480	100,00	86,29	100	32.030.480			
2.09.0 5.01.0 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian mutu dan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Nomor Registrasi PSAT PDUK yang Diterbitkan (buah)</i>					6	37.117.755	6	32.030.480	100,00	86,29	6	32.030.480			
2.10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN																Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.0 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DA SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang terselesaikan (bidang)</i>	6	12.302.500.000			3	3.898.833.088	3	3.175.382.250	100,00	81,44	3	3.175.382.250	50,00	25,81	
2.10.0 5.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	<i>Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (bidang)</i>					3	3.898.833.088	3	3.175.382.250	100,00	81,44	3	3.175.382.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.10.0 5.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (kali)</i>					3	3.898.833.088	3	3.175.382.250	100,00	81,44	3	3.175.382.250			
2.11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																Dinas Lingkungan Hidup
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	40.907.123.327			8	12.828.992.007	CC	12.758.110.593		99,45		12.758.110.593	0,00	31,19	
		<i>Kepuasan ASN Terhadap pelayanan kesektarian Perangkat Daerah (indeks)</i>	90				100		100		100,00		100				
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dok)</i>					14	164.850.000	14	164.830.600	100,00	99,99	14	164.830.600			
1.01.01.01.02	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dok)</i>					14	164.850.000	14	164.830.600	100,00	99,99	14	164.830.600			
1.01.01.02	Administrasi keuangan perangkat Daerah	<i>Presentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (%)</i>					100	9.136.319.481	100	9.117.657.338	100,00	99,80	100	9.117.657.338			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.02.01	Penyedia Gaji dan tunjangan ASN	<i>Presentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (%)</i>					100	9.136.319.481	100	9.117.657.338	100,00	99,80	100	9.117.657.338			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase Peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi (%)</i>					100	3.527.822.526	100	3.475.622.655	100,00	98,52	100	3.475.622.655			
1.01.01.08.04	Jasa Penyedia Pelayanan Umum	<i>Presentase Peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi (%)</i>					100	3.527.822.526	100	3.475.622.655	100,00	98,52	100	3.475.622.655			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Presentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup (%)</i>	5	1.381.639.267			60	534.194.844	60	498.037.000	100,00	93,23	60	498.037.000	1.200,00	36,05	
2.11.02.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	<i>Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)</i>					2	534.194.844	2	498.037.000	100,00	93,23	2	498.037.000			
2.11.02.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	<i>Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun (dokumen)</i>					2	434.194.844	2	406.730.500	100,00	93,67	2	406.730.500			
2.11.02.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	<i>Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)</i>					2	100.000.000	2	91.306.500	100,00	91,31	2	91.306.500			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Presentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan (%)</i>	100	2.283.764.299			100	598.163.938	100	381.692.440	100,00	63,81	100	381.692.440	100,00	16,71	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.II.03.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	<i>Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang teratasi (%)</i>					100	283.149.160	100	206.275.050	100,00	72,85	100	206.275.050			
2.II.03.01.01	Koordinasi , sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air , Udara , dan Laut	<i>Persentase Limbah industri sesuai baku mutu (%)</i>				100	137.847.594	100	99.011.700	100,00	71,83	100	99.011.700				
		<i>Jumlah lokasi titik pantau (lokasi)</i>				20		20		100,00		20					
2.II.03.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<i>Jumlah Pembuatan biopari yang diadakan (lokasi)</i>				5	25.000.000	5	18.146.500	100,00	72,59	5	18.146.500				
		<i>Jumlah sumur resapan yang diadakan (unit)</i>				5		5		100,00		5					
2.II.03.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	<i>Persentase sarana dan prasarana yang tersedia (%)</i>				40	120.301.566	40	89.116.850	100,00	74,08	40	89.116.850				
2.II.03.02	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	<i>Persentase pencemaran yang bisa ditanggulangi (%)</i>				50	174.790.000	50	174.302.390	100,00	99,72	50	174.302.390				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.II.03.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah papan informasi yang diadakan (buah)					50	100.000.000	50	99.550.000	100,00	99,55	50	99.550.000			
2.II.03.02.03	Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan limbah yang dilaksanakan (kali)					10	74.790.000	10	74.752.390	100,00	99,95	10	74.752.390			
2.II.03.03	Pemulihan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Presentase pemulihan Lingkungan yang terlaksana (%)					50	140.224.778	5	1.115.000	10,00	0,80	5	1.115.000			
2.II.03.03.01	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan (kali)					12	140.224.778	1	1.115.000	8,33	0,80	1	1.115.000			
2.II.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN (KEHATI)	<i>Cakupan penghijauan wilayah potensi langsung dan sumber mata air (%)</i>	7	4.830.328.213			7	1.402.519.232	7	1.378.338.440	100,00	98,28	7	1.378.338.440	100,00	28,54	
		<i>Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di kelola</i>	22,9				22		22		100,00		22				
2.II.04.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman hayati yang terlaksana (%)					50	1.402.519.232	50	1.378.338.440	100,00	98,28	50	1.378.338.440			
2.II.04.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman yang terpelihara (lokasi)					18	966.055.484	18	952.089.550	100,00	98,55	18	952.089.550			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
		<i>Jumlah lampu Hias yang terpelihara (buah)</i>					18		18		100,00		18					
2.II.04.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman hayati Lainnya	<i>Jumlah satwa yang dipelihara dan di kembangkan (ekor)</i>					7	135.000.000	7	133.122.090	100,00	98,61	7	133.122.090				
2.II.04.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	<i>Jumlah Desa / Kelurahan berseri yang di bina (desa/ kel)</i>					3	301.463.748	3	293.126.800	100,00	97,23	3	293.126.800				
		<i>Jumlah Desa / Kelurahan Proklam yang dibina</i>					3		3		100,00		3					
2.II.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Presentase usaha / Kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan Limbahnya (%)</i>	100	70.716.549			100	14.220.360	100	14.220.000	100,00	100,00	100	14.220.000	100,00	20,11		
2.II.05.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	<i>Jumlah pelaku usaha yang melaporkan Limbah B3 (orang)</i>					10	14.220.360	10	14.220.000	100,00	100,00	10	14.220.000				
2.II.05.01.02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	<i>Diverifikasi dan dipantau (unit)</i>					15	14.220.360	15	14.220.000	100,00	100,00	15	14.220.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Presentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di terbitkan (%)</i>	100	80.756.250			100	10.000.000	100	5.827.500	100,00	58,28	100	5.827.500	100,00	7,22	
2.11.06.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah usaha yang memenuhi persyaratan Lingkungan (lembaga)</i>					10	10.000.000	10	5.827.500	100,00	58,28	10	5.827.500			
2.11.06.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	<i>Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)</i>					2	10.000.000	2	5.827.500	100,00	58,28	2	5.827.500			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Cakupan Masyarakat yang mendapatkan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)</i>	45	664.534.916			30	179.065.000	30	148.793.750	100,00	83,09	30	148.793.750	66,67	22,39	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.II.08.01	Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah akumulasi penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (kali)					20	179.065.000	20	148.793.750	100,00	83,09	20	148.793.750			
2.II.08.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan (kali)					5	179.065.000	5	148.793.750	100,00	83,09	5	148.793.750			
2.II.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Presentase penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)</i>	5	353.696.875			40	152.000.000	40	136.458.000	100,00	89,78	40	136.458.000	800,00	38,58	
2.II.09.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab / Kota	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup (orang)					3	152.000.000	3	136.458.000	100,00	89,78	3	136.458.000			
2.II.09.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kantor yang dinilai (kantor)				68	152.000.000	68	136.458.000	100,00	89,78	68	136.458.000				
		Jumlah pembinaan sekolah adiwiyata yang dilaksanakan (sekolah)				30		30		100,00		30					
		Jumlah peserta putra putri lingkungan hidup (orang)				100		100		100,00		100					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani (%)</i>	100	461.343.750			60	150.000.000	60	145.470.600	100,00	96,98	60	145.470.600	60,00	31,53	
2.11.10.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<i>Jumlah dokumen yang tersusun (dok)</i>					2	150.000.000	2	145.470.600	100,00	96,98	2	145.470.600			
2.11.10.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	<i>Jumlah dokumen yang di susun (dok)</i>					2	150.000.000	2	145.470.600	100,00	96,98	2	145.470.600			
12.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	<i>Presentase sampah yang tertangani</i>	50	8.611.447.850			40	2.207.240.829	40	2.081.181.173	100,00	94,29	40	2.081.181.173	80,00	24,17	
12.11.11.01	Pengelolaan Sampah	<i>Jumlah sarana yang dikelola (unit)</i>					1	2.207.240.829	1	2.081.181.173	100,00	94,29	1	2.081.181.173			
12.11.11.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan Pembatasan , Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	<i>Jumlah Kegiatan Pengurangan Sampah (kegiatan)</i>					4	5.631.350	4	4.432.000	100,00	78,70	4	4.432.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
12.11.11.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan . Pengumpulan . Pengangkutan . Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA /TPST /SPA Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah kendaraan operasional sampah yang terpelihara (unit)</i>					12	1.191.177.629	12	1.137.219.989	100,00	95,47	12	1.137.219.989			
12.11.11.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<i>Jumlah titik pantau yang terpelihara (lokasi)</i>					20	35.000.000	20	34.768.000	100,00	99,34	20	34.768.000			
12.11.11.01.07	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA /TPST/SPA Kab/ Kota	<i>Jumlah sarana prasarana TPA yang tersedia (unit)</i>					10	975.431.850	10	904.761.184	100,00	92,75	10	904.761.184			
2.11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah</i>	86	11.775.436.029			81	5.430.016.847	77	5.358.669.148	95,06	98,69	77	5.358.669.148	89,53	45,51	
		<i>Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan</i>	90												0,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN yang di terima (%)					100	3.476.631.233	100	3.445.742.698	100,00	99,11	100	3.445.742.698			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan (orang)					34	3.476.631.233	34	3.445.742.698	100,00	99,11	34	3.445.742.698			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang disediakan (bulan)					12	1.894.291.114	12	1.855.006.950	100,00	97,93	12	1.855.006.950			
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bulan)					12	4.993.450	12	4.675.933	100,00	93,64	12	4.675.933			
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (bulan)					12	470.697.431	12	469.862.500	100,00	99,82	12	469.862.500			
1.01.01.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan (bulan)					12	9.998.010	12	9.991.000	100,00	99,93	12	9.991.000			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)					15	31.516.900	15	31.400.638	100,00	99,63	15	31.400.638			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang sediakan (bulan)					12	17.655.225	12	17.651.800	100,00	99,98	12	17.651.800			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan (bulan)					12	2.805.000	12	2.700.000	100,00	96,26	12	2.700.000			
1.01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)					20	102.606.875	20	99.786.905	100,00	97,25	20	99.786.905			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar dan dalam daerah yang terlaksanakan					12	142.558.000	12	140.435.180	100,00	98,51	12	140.435.180			
1.01.01.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)					14	381.091.957	14	365.563.385	100,00	95,93	14	365.563.385			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)					15	349.276.309	15	347.376.224	100,00	99,46	15	347.376.224			
1.01.01.08	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan (bulan)					12	381.091.957	12	365.563.385	100,00	95,93	12	365.563.385			
1.01.01.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang di sediakan (bulan)					12	600.000	12	142.500	100,00	23,75	12	142.500			
1.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, telp. air dan internet (bulan)					12	95.582.360	12	92.082.448	100,00	96,34	12	92.082.448			
1.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan umum kantor (bulan)					12	58.494.500	12	57.777.000	100,00	98,77	12	57.777.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>					7	9.910.000	7	9.880.600	100,00	99,70	7	9.880.600			
I.01.01.01	Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah (DAK Non Fisik)	<i>Jumlah dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>					12	216.505.097	12	205.680.837	100,00	95,00	12	205.680.837			
I.01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	<i>Tersedianya dokumen RKA - SKPD (dokumen)</i>					5	10.012.690	5	5.011.280	100,00	50,05	5	5.011.280			
I.01.01.01.06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja	<i>Jumlah hak akses data (buah)</i>					12	10.877.007	12	8.579.007	100,00	78,87	12	8.579.007			
I.01.01.01.07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (bulan)</i>					12	195.615.400	12	192.090.550	100,00	98,20	12	192.090.550			
I.01.01.01.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	<i>Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan (kali)</i>					50	76.473.203	50	75.794.050	100,00	99,11	50	75.794.050			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media social (kali)					50	76.473.203	50	75.794.050	100,00	99,11	50	75.794.050			
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan (%)</i>	97	5.294.566.737			92	651.000.000	92	648.132.000	100,00	99,56	92	648.132.000	94,85	12,24	
2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan yang terkirim tepat waktu (dokumen)					43.097	651.000.000	43.097	648.132.000	100,00	99,56	43097	648.132.000			
2.12.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang terkirim (dokumen)					43.097	651.000.000	43.097	648.132.000	100,00	99,56	43097	648.132.000			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase data base kependudukan yang valid (%)</i>	100	768.906.250			94,8	287.933.500	94,8	287.878.199	100,00	99,98	94,8	287.878.199	94,80	37,44	
2.12.04.01	Pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	<i>Persentase data kependudukan yang tervalidasi (%)</i>					94,8	287.933.500	94,8	287.878.199	100,00	99,98	94,8	287.878.199			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.12.04.01.01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Pemenuhan kebutuhan akan update data kependudukan (%)					94,8	250.000.000	94,8	249.945.150	100,00	99,98	94,8	249.945.150			
2.12.04.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Alih media dokumen kependudukan dan pencatatan sipil					115	37.933.500	115	37.933.049	100,00	100,00	115	37.933.049			
2.12.04.01.02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Perjanjian kerjasama lintas DPD (dokumen)					10	0	7	0	70,00	0,00	7	0			
2.13	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	86	14.089.163.817			80,01	4.645.490.163	82,34	4.497.995.339	102,91	96,82	82,34	4.497.995.339	95,74	31,93	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	90				77		82,79		107,52		82,79		91,99		
1.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan pertanggungjawaban keuangan (dokumen)					20	49.047.000	23	42.134.750	115,00	85,91	23	42.134.750			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang terlaksana (%)					12	3.342.279.715	12	3.316.296.931	100,00	99,22	12	3.316.296.931			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengangfrakan gaji dan tunjangan ASN (bulan)					12	3.342.279.715	12	3.316.296.931	100,00	99,22	12	3.316.296.931			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan (bulan)					12	729.391.539	12	710.836.424	100,00	97,46	12	710.836.424			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)					12	5.241.699	12	5.066.500	100,00	96,66	12	5.066.500			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (unit)					19	149.628.775	19	148.445.000	100,00	99,21	19	148.445.000			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (bulan)					12	42.250.385	12	42.058.500	100,00	99,55	12	42.058.500			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)					12	255.356.680	12	252.375.697	100,00	98,83	12	252.375.697			
		Tersedianya Bahan Pembersih (bulan)				12	12		100,00		12						
		Tersedianya makan dan minum (bulan)				12	12		100,00		12						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Tersedianya pendukung peralatan computer (bulan)</i>					12		12		100,00		12				
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)</i>					12	50.000.000	12	49.242.520	100,00	98,49	12	49.242.520			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan (bulan)</i>					12	2.541.000	12	2.495.000	100,00	98,19	12	2.495.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terlaksananya rapat koordinasi, rapat dinas dan konsultasi dalam dan luar daerah (bulan)</i>					12	224.373.000	12	211.153.207	100,00	94,11	12	211.153.207			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (paket)</i>					1	72.863.000	1	71.225.000	100,00	97,75	1	71.225.000			
1.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)</i>					1	72.863.000	1	71.225.000	100,00	97,75	1	71.225.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)</i>					12	325.950.029	12	318.497.754	100,00	97,71	12	318.497.754			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar (bulan)</i>					12	85.349.962	12	82.052.269	100,00	96,14	12	82.052.269			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Tersedianya Jasa Keamanan" (orang)					3	240.600.067	3	236.445.485	100,00	98,27	3	236.445.485			
		Tersedianya Jasa Kebersihan (orang)					3		3		100,00		3				
		Tersedianya Jasa Penunjang Kinerja (tahun)					1		1		100,00		1				
		Tersedianya Jasa Publikasi (kali)					25		26		104,00		26				
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi (%)					100	125.958.880	100	110.229.480	100,00	87,51	100	110.229.480			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (bulan)					12	109.433.395	12	94.731.880	100,00	86,57	12	94.731.880			
1.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebelair (bulan)					12	210.000	12	205.000	100,00	97,62	12	205.000			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (bulan)					12	10.695.190	12	10.030.100	100,00	93,78	12	10.030.100			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)					12	5.620.295	12	5.262.500	100,00	93,63	12	5.262.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.13.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yang terbentuk (kerjasama)	17	312.975.908			16	94.153.200	14	92.884.510	87,50	98,65	14	92.884.510	82,35	29,68	
2.13.0 3.01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang terbentuk (unit)					1	94.153.200	-	92.884.510	0,00	98,65	0	92.884.510			
		Jumlah Kawasan Perdesaan (kawasan)						1		-							
2.13.0 3.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah lembaga Pasca PNPM Mpd yang terfasilitasi dalam kerjasama pembentukan BUMDesa bersama (lembaga)					1	89.342.100	1	88.181.300	100,00	98,70	1	88.181.300			
		Jumlah lembaga Pasca PNPM-Mpd wadah kerjasama antar Desa yang dibina (lembaga)						14		14		100,00		14			
2.13.0 3.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa terfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (desa)					4	4.811.100	4	4.703.210	100,00	97,76	4	4.703.210			
2.13.0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik (%)	0,84 8	10.407.340.852			62,6	3.353.116.493	62,6	2.773.470.966	100,00	82,71	62,6	2.773.470.966	7.382, 08	26,65	
		Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik (%)	1				70,7		70,7		100,00		70,7		7.070, 00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.0 4.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa (%)</i>					100	3.353.116.493	100	2.773.470.966	100,00	82,71	100	2.773.470.966			
		<i>Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu (%)</i>				100		100		100,00		100					
2.13.0 4.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi Desa (desa)</i>					124	4.552.500	124	4.544.400	100,00	99,82	124	4.544.400			
2.13.0 4.01.0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Desa yang dibina dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa (Desa)</i>					198	141.426.973	198	141.159.300	100,00	99,81	198	141.159.300			
2.13.0 4.01.0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa (desa)</i>					198	220.545.700	198	205.401.800	100,00	93,13	198	205.401.800			
		<i>Jumlah Regulasi Teknistentang Keuangan Desa (buah)</i>				4		4		100,00		4					
2.13.0 4.01.0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa yang telah melaksanakan updating data base Aparatur Desa (desa)</i>					198	2.293.543.200	198	1.810.251.900	100,00	78,93	198	1.810.251.900			
		<i>Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa (orang)</i>				213		213		100,00		213					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa yang disusun (Perda)</i>					4		6		150,00		6				
		<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi bantuan iuran jaminan kesehatan dari APBD Kabupaten (desa)</i>				198		198		100,00		198					
2.13.0 4.01.0 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa (desa)</i>				143	395.515.420	143	339.007.826	100,00	85,71	143	339.007.826				
2.13.0 4.01.12	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	<i>Jumlah Desa/Kel. yang telah dibina dalam updating profil Desa /Kel. (desa)</i>				206	43.300.500	206	43.265.000	100,00	99,92	206	43.265.000				
2.13.0 4.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	<i>Jumlah Desa yang difasilitasi pelepasan dan tukar menukar tanah Kas Desa (desa)</i>				1	38.580.000	1	19.534.740	100,00	50,63	1	19.534.740				
2.13.0 4.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	<i>Jumlah BPD yang dibina (lembaga)</i>				198	5.750.500	198	5.739.500	100,00	99,81	198	5.739.500				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.13.0 4.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang telah di evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten (desa)</i>					15	209.901.700	15	204.566.500	100,00	97,46	15	204.566.500			
2.13.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (%)</i>	69,7	5.340.380.720			54,6	1.425.709.484	56,8	1.415.578.231	104,03	99,29	56,8	1.415.578.231	81,49	26,51	
		<i>Persentase BUMDesa yang aktif (%)</i>	51,5				33,3		33,3		100,00		33,3		64,66		
		<i>Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif (%)</i>	73,7				56,7		56,7		100,00		56,7		76,93		
2.13.0 5.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desadan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan (%)</i>					53,8	1.425.709.484	79,2	1.415.578.231	147,21	99,29	79,2	1.415.578.231			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.0 5.01.0 2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lambaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, Karangtaruna). Lambaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Lembaga Posyandu yang Aktif (lembaga)</i>					580	51.356.200	580	50.493.850	100,00	98,32	580	50.493.850			
		<i>Jumlah LPKMD/K yang Aktif (lembaga)</i>					102		102		100,00		102				
		<i>Jumlah RT/RW yang Aktif (RT/RW)</i>					3.125		3.125		100,00		3125				
2.13.0 5.01.0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lambaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karangtaruna). Lambaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi penyelenggaraan TMMO (desa)</i>					1	147.279.724	1	146.693.550	100,00	99,60	1	146.693.550			
		<i>Jumlah peserta peningkatan kapasitas dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat (orang)</i>					75		30		40,00		30				
2.13.0 5.01.0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	<i>Jumlah BUMDesa yang di berdayakan (lembaga)</i>					66	539.262.720	198	537.381.345	300,00	99,65	198	537.381.345			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
		<i>Jumlah kajian regulasi yang mengatur tentang BUMDesa (kajian)</i>					1		1		100,00		1				
		<i>Jumlah Lembaga UED yang diberdayakan (lembaga)</i>					28		28		100,00		28				
		<i>Jumlah Pasar Desa yang diberdayakan (pasar Desa)</i>					40		40		100,00		40				
		<i>Jumlah UPK Berdu Taskin UPKu PPKM yang diberdayakan (lembaga)</i>					22		22		100,00		22				
		<i>Jumlah Desa yang mendapatkan Program JATIM PUSPA (desa)</i>					12		12		100,00		12				
		<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi BKK Provinsi (desa)</i>					15		15		100,00		15				
		<i>Jumlah BUMDesa yang di berdayakan (lembaga)</i>					66		198		300,00		198				
2.13.0 5.01.0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Terhnologi Tepat Guna	<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi inovasi TTG Desa (desa)</i>					15	72.939.250	15	72.315.113	100,00	99,14	15	72.315.113			
		<i>Jumlah lembaga HIPPAM yang di bina (lembaga)</i>					57		57		100,00		57				
		<i>Jumlah lembaga Tepian Hutan yang dibina (lembaga)</i>					15		15		100,00		15				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.0 5.01.0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pembinaan Gotong Royong Masyarakat (desa)					206	14.871.590	206	14.263.000	100,00	95,91	206	14.263.000			
2.13.0 5.01.0 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga PKK aktif yang dibina (lembaga)					150	600.000.000	206	594.431.373	137,33	99,07	206	594.431.373			
2.14	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																Dinas PPKB, PPPA
2.14.0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun (%)	100	743.243.235			100	135.331.600	100	132.270.660	100,00	97,74	100	132.270.660	100,00	17,80	
2.14.02 .02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data informasi kependudukan yang tersusun (%)					3	135.331.600	3	132.270.660	100,00	97,74	3	132.270.660			
2.14.02 .02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah dokumen data mikro keluarga tingkat Desa/Kelurahan (dokumen)					206	135.331.600	206	132.270.660	100,00	97,74	206	132.270.660			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	<i>Persentase pasangan usia subur yang tidak ber-KB karena Unmet Need (%)</i>	9,27	27.342.392.368			9,67	7.940.472.959	8,06	6.748.195.365	83,35	84,98	8,06	6.748.195.365	86,95	24,68	
		<i>Persentase masyarakat yang memahami program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) (%)</i>	63				53,51		58,93		110,13		58,93		93,54		
2.14.0 3.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program Bangga kencana melalui advokasi dan KIE (%)</i>					53,51	1.369.590.400	58,93	1.117.209.688	110,13	81,57	58,93	1.117.209.688			
		<i>Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangga kencana (%)</i>					100		100		100,00		100				
2.14.0 3.01.0 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Jumlah publikasi program Bangga kencana melalui media elektronik dan non elektronik (%)</i>					5	75.924.400	5	74.787.075	100,00	98,50	5	74.787.075			
2.14.0 3.01.0 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	<i>Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE Program Bangga kencana untuk kegiatan BUKB (%)</i>					100	192.426.000	100	179.996.570	100,00	93,54	100	179.996.570			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.0 3.01.0 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	<i>Persentase Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB di Kecamatan berjalan lancar (%)</i>					100	1.101.240.000	100	862.426.043	100,00	78,31	100	862.426.043			
2.14.0 3.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Persentase kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mandiri (%)</i>					26,8	2.588.120.300	26,8	2.576.530.200	100,00	99,55	26,8	2.576.530.200			
		<i>Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif (%)</i>					100		100		100,00		100				
2.14.0 3.02.0 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	<i>Jumlah kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang difasilitasi (%)</i>					1.306	1.599.320.300	1.306	1.597.030.200	100,00	99,86	1306	1.597.030.200			
2.14.0 3.02.0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif melaksanakan pembinaan program Bangga Kencana (%)</i>					1.306	988.800.000	1.306	979.500.000	100,00	99,06	1306	979.500.000			
2.14.0 3.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar (%)</i>					93,33	3.034.199.209	100	2.300.326.192	107,15	75,81	100	2.300.326.192			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.0 3.03.0 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan, Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan distribusi Alat dan obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (%)</i>					100	65.884.000	100	27.647.075	100,00	41,96	100	27.647.075			
2.14.0 3.03.0 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)</i>					34,5	1.486.750.000	35,69	811.189.460	103,45	54,56	35,69	811.189.460			
2.14.0 3.03.0 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (%)</i>					4	10.979.355	4	10.639.620	100,00	96,91	4	10.639.620			
2.14.0 3.03.0 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Persentase Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (%)</i>					100	1.231.688.000	100	1.218.563.187	100,00	98,93	100	1.218.563.187			
2.14.0 3.03.0 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (%)</i>					100	9.473.960	100	9.473.500	100,00	100,00	100	9.473.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.0 3.03.0 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	<i>Jumlah Faskes yang mampu memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak - hak Reproduksi (unit)</i>					28	50.000.000	31	49.622.800	110,71	99,25	31	49.622.800			
2.14.0 3.03.1 0	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar (unit)</i>					60	23.755.512	61,1	20.501.950	101,83	86,30	61,1	20.501.950			
2.14.0 3.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	<i>Persentase ketersediaan dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak (%)</i>					32	85.668.382	36,3	84.469.800	113,44	98,60	36,3	84.469.800			
2.14.0 3.03.1 2	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	<i>Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan (%)</i>					100	70.000.000	100	68.218.800	100,00	97,46	100	68.218.800			
2.14.0 3.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Persentase stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitrakerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana (%)</i>					37,6	948.563.050	40	754.129.285	106,38	79,50	40	754.129.285			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Persentase stakeholder/mitrakerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB (%)</i>					37,6		40		106,38		40				
2.14.0 3.04.0 1	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Persentase Komitmen dan peran serta stakeholders /mitrakerja yang mendukung operasional Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (%)</i>					2	47.603.050	2	46.484.585	100,00	97,65	2	46.484.585			
2.14.0 3.04.0 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>Jumlah Rumah Data kependudukan paripurna di kampung KB percantohan (unit)</i>					100	140.400.000	100	125.778.000	100,00	89,59	100	125.778.000			
2.14.0 3.04.0 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	<i>Persentase Kampung KB Aktif (%)</i>					7,1	760.560.000	6,29	581.866.700	88,59	76,51	6,29	581.866.700			
2.14.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun (%)</i>	6,8	692.015.625			40	1.071.393.083	40	916.319.955	100,00	85,53	40	916.319.955	588,24	132,41	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.04.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif (%)</i>					100	935.969.070	100	788.049.475	100,00	84,20	100	788.049.475			
2.14.04.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Persentase sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan sesuai rencana (%)</i>					188	280.000.000	188	276.453.100	100,00	98,73	188	276.453.100			
2.14.04.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah kelompok kegiatan kesejahteraan keluarga yang aktif (kelompok)</i>					100	48.569.070	100	44.284.555	100,00	91,18	100	44.284.555			
2.14.04.01.04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Persentase biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disediakan (%)</i>					50	607.400.000	50	467.311.820	100,00	76,94	50	467.311.820			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.04.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Persentase Kader Tribina yang aktif (%)</i>					45	135.424.013	45	128.270.480	100,00	94,72	45	128.270.480			
		<i>Persentase kelompok PIK-Remaja yang aktif (%)</i>															
2.14.04.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	<i>Jumlah kader Tribina yang aktif (orang)</i>					1590	135.424.013	1590	128.270.480	100,00	94,72	1590	128.270.480			
		<i>Jumlah kelompok PIK-Remaja yang aktif (kelompok)</i>					45		45		100,00		45				
2.15	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN																Dinas Perhubungan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Tersedianya program penunjangurusan Pemerintahan daerah Kabupten / Kota (%)</i>	86	19.538.391.637			100	1.312.923.041	100	1.085.992.364	100,00	82,72	100	1.085.992.364	116,28	5,56	
		<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	90				8		88						0,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>					100		100		100,00		100				
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase admistrasi keuangan Perangkat daerah yang terbayar (%)</i>					100	5.447.747.932	100	5.346.508.800	100,00	98,14	100	5.346.508.800			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan)</i>					12	5.447.747.932	12	5.346.508.800	100,00	98,14	12	5.346.508.800			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Prosentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)</i>					100	265.584.286	100	248.055.844	100,00	93,40	100	248.055.844			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar (bulan)</i>					12	7.160.000	12	7.057.800	100,00	98,57	12	7.057.800			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (bulan)</i>					12	78.170.851	12	78.081.264	100,00	99,89	12	78.081.264			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan</i>					12	53.601.300	12	39.072.440	100,00	72,89	12	39.072.440			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (bulan)</i>					12	25.995.135	12	25.409.000	100,00	97,75	12	25.409.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbayar (bulan)					12	6.804.000	12	6.504.000	100,00	95,59	12	6.504.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan (bulan)					12	93.853.000	12	91.931.340	100,00	97,95	12	91.931.340			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)					100	210.518.182	100	30.250.000	100,00	14,37	100	30.250.000			
1.01.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang tersedia (paket)					1	180.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipenuhi (unit)					4	30.518.182	4	30.250.000	100,00	99,12	4	30.250.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (%)					100	475.618.523	100	455.897.850	100,00	95,85	100	455.897.850			
1.01.01.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dilaksanakan (bulan)					12	5.997.700	12	5.980.000	100,00	99,70	12	5.980.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang terbayar tepat waktu (bulan)					12	91.748.608	12	86.536.630	100,00	94,32	12	86.536.630			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Perkantoran yang terpenuhi (bulan)					12	377.872.215	12	363.381.220	100,00	96,17	12	363.381.220			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100	361.202.050	100	351.788.670	100,00	97,39	100	351.788.670			
1.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan (bulan)					12	347.972.050	12	340.139.170	100,00	97,75	12	340.139.170			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia (unit)					4	13.230.000	4	11.649.500	100,00	88,05	4	11.649.500			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Prosentase Sarana Prasarana dan perlengkapan yang berfungsi baik (%)	95	53.071.986.683			75	17.308.295.600	75	16.221.049.077	100,00	93,72	75	16.221.049.077	78,95	30,56	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase kendaraan laik Jalan (%)</i>	100				90		91,5		101,67		91,5		91,50		
		<i>Prosentase Angka tertib Lalulintas (%)</i>	90				65		64		98,46		64		71,11		
2.15.02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Prosentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota (%)</i>					100	257.813.210	100	234.506.800	100,00	90,96	100	234.506.800			
2.15.02.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang dilaksanakan (dokumen)</i>					1	13.089.120	0	0	0,00	0,00	0	0			
2.15.02.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang dilaksanakan (dokumen)</i>					4	244.724.090	4	234.506.800	100,00	95,82	4	234.506.800			
2.15.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota</i>					0	242.271.070	0	211.410.530	0,00	87,26	0	211.410.530			
2.15.02.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	<i>Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan (%)</i>					100	242.271.070	100	211.410.530	100,00	87,26	100	211.410.530			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.15.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Prosentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir (%)</i>					100	634.560.350	100	602.997.780	100,00	95,03	100	602.997.780			
2.15.02.04.02	Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota (Gaji Parkir) (kali)</i>					100	634.560.350	100	602.997.780	100,00	95,03	100	602.997.780			
2.15.02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Prosentase Pengujian berkala kendaraan Bermotor (%)</i>					90	581.183.473	91,5	520.817.215	101,67	89,61	91,5	520.817.215			
2.15.02.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (unit)</i>					1	235.213.978	1	191.950.390	100,00	81,61	1	191.950.390			
2.15.02.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpenuhi (dok)</i>					8.182	229.800.000	6.700	227.500.000	81,89	99,00	6700	227.500.000			
2.15.02.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (unit)</i>					12	116.169.495	12	101.366.825	100,00	87,26	12	101.366.825			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.15.02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Prosentase Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (%)</i>					65	15.562.096.497	64	14.626.086.752	98,46	93,99	64	14.626.086.752			
2.15.02.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	<i>Jumlah Pengadaan Pemasangan, Perbaikan, Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas (paket)</i>					2	15.305.267.397	2	14.480.417.522	100,00	94,61	2	14.480.417.522			
2.15.02.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kab/Kota	<i>Jumlah Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan (kali)</i>					1	181.709.000	1	96.362.000	100,00	53,03	1	96.362.000			
2.15.02.06.05	Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	<i>Jumlah Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan (kali)</i>					4	75.120.100	4	49.307.230	100,00	65,64	4	49.307.230			
2.15.02.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab /Kota	<i>Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota (%)</i>					100	30.371.000	100	25.230.000	100,00	83,07	100	25.230.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.15.02.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Yang Dilaksanakan (dokumen)					10	30.371.000	10	25.230.000	100,00	83,07	10	25.230.000			
2.15.02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (trayek)					10	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0			
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (trayek)					10	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																Dinas Komunikasi dan Informatika
1.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86	14.711.198.508			77	8.402.710.964	77	5.733.104.995,47	100,00	68,23	77	5.733.104.995	89,53	38,97	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90				80,01		81,03		101,27		81,03		90,03		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (dokumen)					21	24.176.850	22	22.468.800	104,76	92,94	22	22.468.800			
I.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun (dokumen)					21	24.176.850	22	22.468.800.00	104,76	92,94	22	22.468.800			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah (bulan)					12	3.824.167.261	12	3.780.949.009	100,00	98,87	12	3.780.949.009			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)					12	3.824.167.261	12	3.780.949.009	100,00	98,87	12	3.780.949.009			
I.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan (kali)					150	3.634.811.750	70	1.033.683.292	46,67	28,44	70	1.033.683.292			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	<i>Jumlah sosialisasi peraturan perundangan bidang cukai yang diselenggarakan melalui tatap muka, media luar ruang, media social (kali)</i>					150	3.634.811.750	70	1.033.683.292	46,67	28,44	70	1.033.683.292			
		<i>Jumlah cetak kalender Pemkab Madiun (buah)</i>					1.700		1.700	100,00		1700					
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi (bulan)</i>					12	434.120.261	12	425.120.263	100,00	97,93	12	425.120.263			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)</i>					3	156.936.940	4	155.168.400	133,33	98,87	4	155.168.400			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Kebutuhan logistik kantor yang tersedia (bulan)</i>					12	147.614.483	12	147.196.945	100,00	99,72	12	147.196.945			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (bulan)</i>					12	7.088.438	12	6.952.510	100,00	98,08	12	6.952.510			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	<i>Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan (bulan)</i>					12	6.032.400	12	5.690.500	100,00	94,33	12	5.690.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan (bulan)					12	116.448.000	12	110.111.908	100,00	94,56	12	110.111.908			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia (unit)					3	6.825.924	2	4.105.000	66,67	60,14	2	4.105.000			
1.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia (unit)					3	6.825.924	2	4.105.000	66,67	60,14	2	4.105.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (bulan)					12	154.332.977	12	150.368.713	100,00	97,43	12	150.368.713			
1.01.01.08.02								55.621.932	12	52.289.601							
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon (bulan)					12	98.711.045	8	98.079.112	66,67	99,36	8	98.079.112			
1.01.01.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi) (orang)					8	324.275.941	12	316.409.918,47	150,00	97,57	12	316.409.918			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara (bulan)					12	175.753.855	12	169.416.971	100,00	96,39	12	169.416.971			
1.01.01.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (bulan)					12	21.754.811	19	20.558.768	158,33	94,50	19	20.558.768			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara (unit)					20	126.767.275	1	126.434.179,47	5,00	99,74	1	126.434.179			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)					1	126.767.275	1	126.434.179,47	100,00	99,74	1	126.434.179			
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan (%)</i>	100	1.639.125.900			100	527.970.232	100	500.627.200	100,00	94,82	100	500.627.200	100,00	30,54	
2.16.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun (kali)					300	527.970.232	1.644	500.627.200	548,00	94,82	1.644	500.627.200			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah (kali)</i>					150		106		70,67		106				
2.16.0 2.01.0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah informasi melalui media luar ruang (kali)</i>				50	213.032.800	94	192.605.000	188,00	90,41	94	192.605.000				
2.16.0 2.01.0 6	Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah Bimtek/Monev PPIID yang dilaksanakan (kali)</i>				1	33.120.472	1	31.667.200	100,00	95,61	1	31.667.200				
		<i>Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk (lembaga)</i>				15		15		100,00		15					
2.16.0 2.01.0 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah peserta yang ikut desiminasi informasi Pemerintah Daerah Sorang)</i>				75	281.816.960	109	276.355.000	145,33	98,06	109	276.355.000				
		<i>Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa (kali)</i>				150		106		70,67		106					
2.16.0 3	PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE (%)</i>	100	7.727.806.023		100	2.807.773.226	100	2.791.893.909	100,00	99,43	100	2.791.893.909	100,00	36,13		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
2.16.0 3.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah nama domain Perangkat Daerah (buat)</i>					53	1.531.274.626	53	1.528.426.609	100,00	99,81	53	1.528.426.609			
2.16.0 3.01.0 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<i>Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun (DPPD)</i>					53	1.531.274.626	53	1.528.426.609	100,00	99,81	53	1.528.426.609			
2.16.0 3.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus (%)</i>					100	1.276.498.600	100	1.263.467.300	100,00	98,98	100	1.263.467.300			
2.16.0 3.02.0 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah (DPPD)</i>					53	76.873.200	53	76.723.000	100,00	99,80	53	76.723.000			
		<i>Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government (dokumen)</i>					1		1		100,00		1				
		<i>Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK (orang)</i>					5		5		100,00		5				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.16.0 3.02.0 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	<i>Persentase Service Level Agreement (%)</i>					100	827.310.800	99	816.037.200	99,00	98,64	99	816.037.200			
2.16.0 3.02.0 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan (buah)</i>					3	372.314.600	8	370.707.100	266,67	99,57	8	370.707.100			
2.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	22.769.300.212			A	7.840.568.819	8	7.135.301.572		91,00		7.135.301.572	0,00	31,34	
		<i>Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah (%)</i>	90				80		80		100,00		80		88,89		
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai peraturan (%)</i>					100	15.000.000	100	11.914.850	100,00	79,43	100	11.914.850			
1.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun (dokumen)</i>					30	15.000.000	30	11.914.850	100,00	79,43	30	11.914.850			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi (%)</i>					100	5.729.157.206	100	5.639.466.728	100,00	98,43	100	5.639.466.728			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan (orang)</i>					69	5.729.157.206	69	5.639.466.728	100,00	98,43	69	5.639.466.728			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi (%)					100	677.452.761	100	418.126.183	100,00	61,72	100	418.126.183			
I.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang terlaksana (kali)					6	677.452.761	18	418.126.183	300,00	61,72	18	418.126.183			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi (%)					100	336.063.854	100	321.230.197	100,00	95,59	100	321.230.197			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia (bulan)					12	4.992.516	12	4.848.764	100,00	97,12	12	4.848.764			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (bulan)					12	59.343.955	12	59.070.000	100,00	99,54	12	59.070.000			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (bulan)					12	131.083.536	12	126.563.061	100,00	96,55	12	126.563.061			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (bulan)					12	19.999.847	12	16.697.372	100,00	83,49	12	16.697.372			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia (bulan)					12	8.724.000	12	7.340.000	100,00	84,14	12	7.340.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara (bulan)					12	111.920.000	12	106.711.000	100,00	95,35	12	106.711.000			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)					100	813.108.200	100	800.305.833	100,00	98,43	100	800.305.833			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia (bulan)					12	436.973.200	12	430.139.590	100,00	98,44	12	430.139.590			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia (bulan)					12	376.135.000	12	370.166.243	100,00	98,41	12	370.166.243			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (%)					100	269.786.798	100	265.487.978	100,00	98,41	100	265.487.978			
1.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)					7	171.790.080	7	170.804.329	100,00	99,43	7	170.804.329			
1.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara (bulan)					12	1.963.500	12	940.000	100,00	47,87	12	940.000			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara (bulan)					12	74.082.800	12	73.174.149	100,00	98,77	12	73.174.149			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)					2	21.950.418	2	20.569.500	100,00	93,71	2	20.569.500			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	35	226.212.219			0	0	0	0	35	0	0	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.17.03.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	<i>Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi (%)</i>					0	0	0	0	0	0	0	0			
2.17.03.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas (unit)</i>					0	0	0	0	0	0	0	0			
2.17.03.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah koperasi yang difasilitasi pemeriksaan kepatuhan (unit)</i>					0	0	0	0	0	0	0	0			
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang sehat (%)</i>	86	206.066.875			44,6	56.230.945	44,62	55.810.945	100,04	99,25	44,62	55.810.945	51,88	27,08	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.17.04.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang telah dinilai kesehatannya (%)</i>					14	56.230.945	23,62	55.810.945	168,71	99,25	23,62	55.810.945			
2.17.04.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah KSP-USP/KSPPS-USPPS yang telah difasilitasi penilaian kesehatan (unit)</i>					90	56.230.945	90	55.810.945	100,00	99,25	90	55.810.945			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)</i>	55	1.200.428.740			82	390.304.000	54,6	338.086.454	66,59	86,62	54,6	338.086.454	99,27	28,16	
2.17.05.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	<i>Persentase pengelola koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)</i>					49	217.704.188	47,98	187.782.004	97,92	86,26	47,98	187.782.004			
2.17.05.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<i>Jumlah SDM pengelola koperasi yang terfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM (orang)</i>					90	217.704.188	90	187.782.004	100,00	86,26	90	187.782.004			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.17.05.02	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	<i>Persentase SDM pengelola usaha yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)</i>					33	172.599.812	33	150.304.450	100,00	87,08	33	150.304.450			
2.17.05.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	<i>Jumlah SDM pengelola usaha mikro yang terfasilitasi melalui pelatihan usaha (orang)</i>					60	172.599.812	60	150.304.450	100,00	87,08	60	150.304.450			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi (%)</i>	73	405.828.719			7	96.298.296	7,87	96.296.665	112,43	100,00	7,87	96.296.665	10,78	23,73	
2.17.06.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	<i>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan (%)</i>					7	96.298.296	7,87	96.296.665	112,43	100,00	7,87	96.296.665			
2.17.06.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya (unit)</i>					30	96.298.296	30	96.296.665	100,00	100,00	30	96.296.665			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (%)</i>	1,81	1.453.443.750			0,74	43.905.747	1,08	43.256.840	145,95	98,52	1,08	43.256.840	59,67	2,98	
2.17.07.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Persentase pemberdayaan UM yang dilaksanakan (%)</i>					0,74	43.905.747	1,08	43.256.840	145,95	98,52	1,08	43.256.840			
2.17.07.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<i>Jumlah UM yang terdata (UM)</i>					125	43.905.747	226	43.256.840	180,80	98,52	226	43.256.840			
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM (%)</i>	0,25	777.903.633			0,18	294.815.680	0,25	168.329.500	138,89	57,10	0,25	168.329.500	100,00	21,64	
2.17.08.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Persentase pengembangan UM yang dilaksanakan (%)</i>					0,18	294.815.680	0,25	168.329.500	138,89	57,10	0,25	168.329.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.17.08.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UM yang difasilitasi pengembangan produk (UM)					200	294.815.680	236	168.329.500	118,00	57,10	236	168.329.500			
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	10.477.785.517			80,01	899.917.302	79,53	889.538.386	99,40	98,85	79,53	889.538.386	92,48	8,49	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90				77		79,09		102,71		79,09		87,88		
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu (%)					100	9.155.300	100	9.038.600	100,00	98,73	100	9.038.600			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun (dokumen)					15	9.155.300	15	9.038.600	100,00	98,73	15	9.038.600			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan (%)					100	2.561.870.919	100	2.548.362.632	100,00	99,47	100	2.548.362.632			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)					30	2.561.870.919	30	2.548.362.632	100,00	99,47	30	2.548.362.632			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum (%)					100	204.545.587	100	200.171.027	100,00	97,86	100	200.171.027			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi (%)					100	64.180.787	100	63.033.480	100,00	98,21	100	63.033.480			
I.01.01.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi (%)					100	7.732.750	100	7.670.000	100,00	99,19	100	7.670.000			
I.01.01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi (%)					100	44.215.050	100	44.020.376	100,00	99,56	100	44.020.376			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi (%)					100	88.417.000	90	85.447.171	90,00	96,64	90	85.447.171			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan (%)</i>					100	198.301.917	100	197.924.500	100,00	99,81	100	197.924.500			
1.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan (unit)</i>					2	198.301.917	5	197.924.500	250,00	99,81	5	197.924.500			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi (%)</i>					100	397.270.310	100	391.633.266	100,00	98,58	100	391.633.266			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi (%)</i>					100	137.004.200	100	131.367.160	100,00	95,89	100	131.367.160			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi (%)</i>					100	260.266.110	100	260.266.106	100,00	100,00	100	260.266.106			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (%)</i>					100	118.655.676	100	117.461.406	100,00	98,99	100	117.461.406			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Persentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik (%)</i>					100	97.708.431	100	96.702.019	100,00	98,97	100	96.702.019			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Persentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara (%)</i>					100	20.947.245	90	20.759.387	90,00	99,10	90	20.759.387			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi (Rp)	2E+12	248.907.286			1,4E+12	67.818.580	1,987E+12	67.057.750	141,93	98,88	1,99E+12	67.057.750	124,19	26,94	
2.18.03.01	Penyelenggaraan Promosi PM yg Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun (%)					50	67.818.580	60	67.057.750	120,00	98,88	60	67.057.750			
2.18.03.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan (event)					1	67.818.580	1	67.057.750	100,00	98,88	1	67.057.750			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan (hari)	10	536.106.381			14	215.393.035	14	213.429.400	100,00	99,09	14	213.429.400	140,00	39,81	
2.18.04.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan (%)					75	215.393.035	77	213.429.400	102,67	99,09	77	213.429.400			
2.18.04.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (%)					90	49.851.230	93	49.695.400	103,33	99,69	93	49.695.400			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
2.18.0 4.01.0 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	<i>Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti (%)</i>					100	165.541.805	100	163.734.000	100,00	98,91	100	163.734.000			
2.18.0 5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<i>Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (%)</i>	80	1.145.553.439			70	372.462.000	32,81	309.267.278	46,87	83,03	32,81	309.267.278	41,01	27,00	
2.18.0 5.01	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	<i>Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanamannya (%)</i>					50	372.462.000	44,62	309.267.278	89,24	83,03	44,62	309.267.278			
2.18.0 5.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya (orang)</i>					100	55.429.472	137	24.048.428	137,00	43,39	137	24.048.428			
2.18.0 5.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal (orang)</i>					280	276.269.287	320	256.744.100	114,29	92,93	320	256.744.100			
2.18.0 5.01.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya (orang)</i>					100	40.763.241	120	28.474.750	120,00	69,85	120	28.474.750			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
2.18.0 6	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	<i>Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan (%)</i>	10	241.804.899			10	78.599.148	8,56	78.333.630	85,60	99,66	8,56	78.333.630	85,60	32,40	
2.18.0 6.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan (kali)</i>					7.200	78.599.148	6.805	78.333.630	94,51	99,66	6805	78.333.630			
2.18.0 6.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	<i>Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun (kali)</i>					10	78.599.148	10	78.333.630	100,00	99,66	10	78.333.630			
2.19	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	10.769.567.818			A	3.350.108.801	86	3.188.454.021		95,17		3.188.454.021	0,00	29,61	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
	DAERAH KAB / KOTA.	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</i>	90				100		100		100,00		100		111,11		
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	<i>Persentase dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)</i>					100	150.700.000	100	150.700.000	100,00	100,00	100	150.700.000			
1.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)</i>					10	150.700.000	10	150.700.000	100,00	100,00	10	150.700.000			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	<i>Persentase Pegawai yang Terbayarkan Gajinya (%)</i>					100	3.199.408.801	100	3.037.754.021	100,00	94,95	100	3.037.754.021			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	<i>Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gajinya (%)</i>					24	2.490.082.426	24	2.348.097.582	100,00	94,30	24	2.348.097.582			
1.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan (bulan)</i>					10	709.326.375	10	689.656.439	100,00	97,23	10	689.656.439			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Persentase pemuda yang berprestasi (%)</i>	6	2.032.134.524			5	494.644.904	2,5	486.615.600	50,00	98,38	2,5	486.615.600	41,67	23,95	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.19.0 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	<i>Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)</i>					1.389	494.644.904	1.424	486.615.600	102,52	98,38	1424	486.615.600			
2.19.0 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	<i>Jumlah pemuda pelopor (orang)</i>					1	145.024.150	1	143.829.000	100,00	99,18	1	143.829.000			
2.19.0 2.01.0 9	Penyelenggaraan dan Seleksi Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	<i>Jumlah paskibraka yang terseleksi (orang)</i>					31	349.620.754	35	342.786.600	112,90	98,05	35	342.786.600			
2.19.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Persentase atlet yang berprestasi (%)</i>	37,0 5	3.146.001.325			2,54	1.173.250.000	3,5	1.141.747.907	137,80	97,31	3,5	1.141.747.907	9,45	36,29	
2.19.0 3.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.	<i>Jumlah atlet yg berprestasi (orang)</i>					10	958.250.000	14	942.331.907	140,00	98,34	14	942.331.907			
		<i>Jumlah sarana prasarana olahraga yg dipelihara (unit)</i>					1		2		200,00		2				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.19.0 3.03.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yg berprestasi (orang)					10	958.250.000	14	942.331.907	140,00	98,34	14	942.331.907			
2.19.0 3.04	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.	Persentase olahraga rekreasi yang dilaksanakan (%)					50	215.000.000	250	199.416.000	500,00	92,75	250	199.416.000			
2.19.0 3.04.0 4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan (buah)					2	215.000.000	5	199.416.000	250,00	92,75	5	199.416.000			
2.20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK																Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid (%)	90	1.289.586.619			85	334.501.390	85	333.356.109	100,00	99,66	85	333.356.109	94,44	25,85	
2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)					100	334.501.390	100	333.356.109	100,00	99,66	100	333.356.109			
		Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi (data)					1		1		100,00		1				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.20.0 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia (dokumen)					5	108.381.882	5	107.569.695	100,00	99,25	5	107.569.695			
2.20.0 2.01.0 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia (data)					36	226.119.508	36	225.786.414	100,00	99,85	36	225.786.414			
		Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun (dokumen)					1		3		300,00		3				
2.21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN																Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)</i>	100	372.256.740			100	87.625.850	100	75.284.700	100,00	85,92	100	75.284.700	100,00	20,22	
2.21.02 .01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi (%)</i>					100	39.435.900	100	32.140.700	100,00	81,50	100	32.140.700			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.21.02.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan (kali)					1	8.798.900	1	4.875.000	100,00	55,40	1	4.875.000			
2.21.02.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah (kali)					53	30.637.000	53	27.265.700	100,00	89,00	53	27.265.700			
2.21.02.01.05	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana yang diamankan (unit)					6	48.189.950	6	43.144.000	100,00	89,53	6	43.144.000			
2.21.02.01.06	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan (unit)					3	48.189.950	7	43.144.000	233,33	89,53	7	43.144.000			
2.22	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dilestarikan (%)	100	2.273.178.778			100	890.164.470	100	827.076.500	100,00	92,91	100	827.076.500	100,00	36,38	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.22.0 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan (%)					100	447.809.475	100	389.386.500	100,00	86,95	100	389.386.500			
2.22.0 2.02.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan (%)					10	408.309.475	10	349.886.500	100,00	85,69	10	349.886.500			
2.22.0 2.02.0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah seniman/seniwati yang ditingkatkan kompetensinya (orang)					1	39.500.000	1	39.500.000	100,00	100,00	1	39.500.000			
2.22.0 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina (lembaga)					950	442.354.995	950	437.690.000	100,00	98,95	950	437.690.000			
2.22.0 2.03.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Obyek Pemajuan lembaga adat yang dibina (obyek)					206	442.354.995	206	437.690.000	100,00	98,95	206	437.690.000			
2.22.0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah (%)	100	295.970.034			100	88.272.000	100	88.264.000	100,00	99,99	100	88.264.000	100,00	29,82	
2.22.0 4.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi (kali)					1	88.272.000	1	88.264.000	100,00	99,99	1	88.264.000			
2.22.0 4.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal yang tersusun (dokumen)					1	49.022.000	1	49.014.000	100,00	99,98	1	49.014.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.22.0 4.01.0 3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah peserta lawatan sejarah (orang)					50	39.250.000	50	39.250.000	100,00	100,00	50	39.250.000			
2.22.0 5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	12,77	111.512.500			4,44	82.372.480	3,06	79.757.480	68,92	96,83	3,06	79.757.480	23,96	71,52	
2.22.0 5.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (unit)					10	82.372.480	14	79.757.480	140,00	96,83	14	79.757.480			
2.22.0 5.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang terdaftar (obyek)					225	20.000.000	458	20.000.000	203,56	100,00	458	20.000.000			
2.22.0 5.01.0 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan (unit)					10	62.372.480	14	59.757.480	140,00	95,81	14	59.757.480			
2.23	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat	86				86	2.985.814.381	86	2.842.891.744	100	95,21327 789		2.842.891.744			
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (skor)	90				90		90								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)					100	2.276.886.348	100	2.166.771.850	100	95,16	100	2.166.771.850			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)					24	2.276.886.348	24	2.166.771.850	100	95,16	24	2.166.771.850			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)					100	325.241.971	100	317.682.173	100	97,68	100	317.682.173			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)					0	325.241.971	0	317.682.173	0	97,68	0	317.682.173			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan (%)					100	168.912.100	100	155.663.786	100	92,16	100	155.663.786			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai klasifikasi (unit)					2	168.912.100	2	155.663.786	100	92,16	2	155.663.786			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)					100	214.773.962	100	202.773.935	100	94,41	100	202.773.935			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)					12	214.773.962	12	202.773.935	100	94,41	12	202.773.935			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan terakreditasi (%)	3,37	10.403.718.968			2,02	287.518.881	2,76	285.614.100	136,63	99,34	2,76	285.614.100	81,90	2,75	
2.23.02.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah kab/Kota	Persentase Peningkatan kunjungan (%)					5	262.275.000	25,3	261.736.500	506,00	99,79	25,3	261.736.500			
2.23.02.01.02	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah kab/kota	Penambahan jumlah rak Buku (rak)					5	62.275.000	5	61.744.500	100,00	99,15	5	61.744.500			
2.23.02.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Penambahan jumlah koleksi buku (buku)					2.000	200.000.000	2.176	199.992.000	108,80	100,00	2176	199.992.000			
2.23.02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah kab/Kota	Nilai Budaya Kegemaran Membaca					60	25.243.881		23.877.600	0,00	94,59	0	23.877.600			
2.23.02.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah sasaran penerima manfaat (orang)						19.577.280		18.548.100		94,74	0	18.548.100			
2.23.02.02.05	Pemilihan Duta baca tingkat daerah kab/Kota	Keterpilihan terhadap seluruh peserta (orang)						5.666.601		5.329.500		94,05	0	5.329.500			
2.24	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Indeks Ketersediaan Arsip</i>	80	451.867.335			77	153.517.927	75,06	150.525.401	97,48	98,05	75,06	150.525.401	93,83	33,31	
2.24.02.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	<i>Persentase OPD yang memiliki daftar arsip Dinamis (%)</i>					25	28.944.720	28	27.569.500	112,00	95,25	28	27.569.500			
2.24.02.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<i>Jumlah OPD yang melaksanakan penyusutan arsip (opd)</i>					15	28.944.720	20	27.569.500	133,33	95,25	20	27.569.500			
2.24.02.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab /Kota	<i>Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik (%)</i>					85	58.958.075	100	58.626.300	117,65	99,44	100	58.626.300			
2.24.02.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip statis	<i>Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi, dipreservasi diolah dan dibuatkan akses arsipnya (arsip)</i>					500	58.958.075	4.785	58.626.300	957,00	99,44	4785	58.626.300			
2.24.02.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	<i>Jumlah Arsip statis yang masuk SIKN (arsip)</i>					35	65.615.132	35	64.329.601	100,00	98,04	35	64.329.601			
2.24.02.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	<i>Jumlah OPD yang mendapat pendampingan (OPD)</i>					20	65.615.132	35	64.329.601	175,00	98,04	35	64.329.601			
3.25	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)</i> <i>Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Daerah</i>	0,1	253.781.250			0,1	50.000.000	0,37	44.045.100	370,00	88,09	0,37	44.045.100	370,00	17,36	
3.25.03.01	Penyelenggaraan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)</i>					508.408	50.000.000	509.200	44.045.100	100,16	88,09	509.200	44.045.100			
3.25.03.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah benih ikan yang diperbantukan (ekor)</i>					55.450	50.000.000	55.450	44.045.100	100,00	88,09	55.450	44.045.100			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)</i>	1	439.631.362			1	201.036.545	1,92	191.451.400	192,00	95,23	1,92	191.451.400	192,00	43,55	
3.25.04.04	Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)</i>					3.578.985	201.036.545	3.611.570	191.451.400	100,91	95,23	3.611.570	191.451.400			
3.25.04.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT (unit)</i>					1	201.036.545	1	191.451.400	100,00	95,23	1	191.451.400			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.26	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA																Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Persentase peningkatan pengembangan daya tarik pariwisata yang dilaksanakan (%)</i>	5,6	7.198.105.145			3,2	2.247.858.238	18,4	2.165.136.596	575,00	96,32	18,4	2.165.136.596	328,57	30,08	
3.26.02.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.	<i>Persentase Jumlah kawasan yang dikembangkan dan dipelihara (%)</i>					25	1.151.350.000	100	1.147.390.500	400,00	99,66	100	1.147.390.500			
3.26.02.02.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	<i>Jumlah kawasan yang dikembangkan (kawasan)</i>					1	1.151.350.000	3	1.147.390.500	300,00	99,66	3	1.147.390.500			
3.26.02.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	<i>Persentase pengelolaan destinasi pariwisata yg dilaksanakan (%)</i>					4	946.508.238	6,4	869.021.096	160,00	91,81	6,4	869.021.096			
3.26.02.03.04	Pengadaan / Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	<i>Jumlah sarpras yang dipelihara dan dibangun di destinasi wisata (Unit)</i>					4	946.508.238	8	869.021.096	200,00	91,81	8	869.021.096			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.26.0 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah industri pariwisata yang dibina dan difasilitasi (industry)					20	150.000.000	45	148.725.000	225,00	99,15	45	148.725.000			
3.26.0 2.04.0 5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang dibina dan difasilitasi (industry)					20	150.000.000	45	148.725.000	225,00	99,15	45	148.725.000			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (%)	16	2.668.315.625			57,14	473.650.000	36,36	460.829.250	63,63	97,29	36,36	460.829.250	227,25	17,27	
3.26.0 3.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Parwisata Kab/Kota.	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti (%)					57,14	473.650.000	36,36	460.829.250	63,63	97,29	36,36	460.829.250			
3.26.0 3.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan (event)					8	373.650.000	8	361.564.000	100,00	96,77	8	361.564.000			
3.26.0 3.01.0 4	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama yang dihasilkan (dokumen)					3	100.000.000	6	99.265.250	200,00	99,27	6	99.265.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN																Dinas Pertanian dan Perikanan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	46.164.039.039			88	13.345.356.633	88	12.937.617.859		96,94		12.937.617.859	0,00	28,03	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	90				85		85		100,00		85		94,44		
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu (%)					100	21.335.000	100	20.296.300	100,00	95,13	100	20.296.300			
1.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku					12	21.335.000	14	20.296.300	116,67	95,13	14	20.296.300			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi (dokumen)					100	12.385.788.175	100	12.041.260.782	100,00	97,22	100	12.041.260.782			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang terpenuhi (bulan)					12	12.385.788.175	12	12.041.260.782	100,00	97,22	12	12.041.260.782			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)					100	309.783.750	100	289.049.069	100,00	93,31	100	289.049.069			
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)					12	7.000.000	12	6.979.000	100,00	99,70	12	6.979.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi					30.160.000		29.625.000	0,00	98,23	0	29.625.000				
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi (bulan)					12	15.440.000	12	15.405.000	100,00	99,77	12	15.405.000			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor yang tersedia (bulan)					12	110.033.500	12	108.476.900	100,00	98,59	12	108.476.900			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (bulan)					12	12.000.000	12	11.794.900	100,00	98,29	12	11.794.900			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi (bulan)					12	4.100.250	12	3.860.200	100,00	94,15	12	3.860.200			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan (bulan)					12	131.050.000	12	112.908.069	100,00	86,16	12	112.908.069			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi (%)					100	403.972.063	100	367.775.569	100,00	91,04	100	367.775.569			
I.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi (bulan)					12	6.111.643	12	5.604.100	100,00	91,70	12	5.604.100			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)					12	127.732.420	12	98.442.174	100,00	77,07	12	98.442.174			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan (bulan)					12	270.128.000	12	263.729.295	100,00	97,63	12	263.729.295			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara (%)					100	224.477.645	100	219.236.139	100,00	97,67	100	219.236.139			
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan (bulan)					12	126.509.650	12	122.596.289	100,00	96,91	12	122.596.289			
I.01.01.09.//	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)	Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan (bulan)					12	20.452.995	12	20.074.000	100,00	98,15	12	20.074.000			
I.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan (bulan)					12	62.515.000	12	61.650.850	100,00	98,62	12	61.650.850			
I.01.01.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran lainnya yang dilaksanakan (bulan)					12	15.000.000	12	14.915.000	100,00	99,43	12	14.915.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian (%)</i>	26,93	2.468.400.000			8,14	1.502.857.550	3,62	1.470.177.732	44,47	97,83	3,62	1.470.177.732	13,44	59,56	
3.27.02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian (kelompok)</i>					18	1.502.857.550	8	1.470.177.732	44,44	97,83	8	1.470.177.732			
3.27.02.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	<i>Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan (bibit)</i>					700	740.250.000	900	711.737.337	128,57	96,15	900	711.737.337			
3.27.02.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan (unit)</i>					18	762.605.000	1.472	758.440.395	8177,78	99,45	1472	758.440.395			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)</i>	5	6.261.706.012			3	5.490.715.767	4,5	5.473.741.830	150,00	99,69	4,5	5.473.741.830	90,00	87,42	
3.27.03.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan :</i>						3.777.715.000		3.764.939.500		99,66		3.764.939.500			
		<i>* pupuk</i>					37.650		46.907		124,59		46907				
		<i>* bibit</i>					1.543.960		1.543.960		100,00		1543960				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
3.27.0 3.01.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	<i>Jumlah subsidi harga pupuk (Rp.)</i>					350.000	2.000.000.000	274.200	1.999.535.500	78,34	99,98	274200	1.999.535.500			
		<i>Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan :</i>						1.777.715.000		1.765.404.000		99,31		1.765.404.000			
		<i>* Alsintan</i>					6		8		133,33		8				
		<i>* jalan produksi</i>					3		3		100,00		3				
		<i>* jaringan irigasi</i>					2		5		250,00		5				
3.27.0 3.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik (unit)</i>					1.950	1.713.000.767	1.878	1.708.802.330	96,31	99,75	1878	1.708.802.330			
3.27.0 3.02.0 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	<i>Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara (unit)</i>					5	1.554.232.000	2	1.551.810.000	40,00	99,84	2	1.551.810.000			
3.27.0 3.02.0 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	<i>Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik (buah)</i>					350	158.768.767	390	156.992.330	111,43	98,88	390	156.992.330			
3.27. 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian (%)</i>	99,06	594.644.875			99	95.800.000	100	95.550.450	101,01	99,74	100	95.550.450	100,95	16,07	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
3.27.0 5.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian (%)</i>					5,7	95.800.000	4,05	95.550.450	71,05	99,74	4,05	95.550.450			
3.27.0 5.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati (kelompok)</i>					45	95.800.000	104	95.550.450	231,11	99,74	104	95.550.450			
3.27. 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)</i>	8	8.124.594.706			5	3.595.859.574	17,94	3.501.507.657	358,80	97,38	17,94	3.501.507.657	224,25	43,10	
3.27.0 7.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah peningkatan kelas kelompok tani (kelompok Tani)</i>					128	3.595.859.574	136	3.501.507.657	106,25	97,38	136	3.501.507.657			
3.27.0 7.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	<i>Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek (orang)</i>					96	192.679.574	96	189.781.096	100,00	98,50	96	189.781.096			
3.27.0 7.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	<i>Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan (orang)</i>					400	1.149.430.000	490	1.138.110.552	122,50	99,02	490	1.138.110.552			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.27.0 7.01.0 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian (%)</i>					50	153.750.000	50	153.749.409	100,00	100,00	50	153.749.409			
3.27.0 7.01.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan (SL)</i>					15	2.100.000.000	15	2.019.866.600	100,00	96,18	15	2.019.866.600			
																	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.27. 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb) (%)</i>	70	1.424.779.382			70	377.864.800	83	377.167.400	118,57	99,82	83	377.167.400	118,57	26,47	
3.27.0 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kab/ Kota	<i>Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak (kali)</i>					15	227.884.800	15	227.273.400	100,00	99,73	15	227.273.400			
3.27.0 2.03.0 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	<i>Jumlah ternak yang mendapatkan bantuan pengobatan reproduksi peternakan (ekor)</i>					245	227.884.800	245	227.273.400	100,00	99,73	245	227.273.400			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Peternak anggota kelompok ternak yang dilatih dan dibina</i>					4		4		100,00		4				
3.27.0 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit ternak (kelompok)</i>					6	149.980.000	6	149.894.000	100,00	99,94	6	149.894.000			
3.27.0 2.05.0 5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	<i>Jumlah Kelompok Ternak Yang Mendapat Bantuan Bibit Ternak (kelompok)</i>					6	149.980.000	6	149.894.000	100,00	99,94	6	149.894.000			
3.27. 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase Kasus Kesehatan Hewan Yang Tertangani (%)</i>	100	830.248.689				156.669.000		152.102.400		97,09	0	152.102.400	0,00	18,32	
3.27.0 4.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani (%)</i>						156.669.000		152.102.400		97,09	0	152.102.400			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.27.0 4.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	<i>Jumlah sapi dan kambing yang mendapat pelayanan kesehatan hewan (ekor)</i>					3400	156.669.000	3439	152.102.400	101,15	97,09	3439	152.102.400			
3.27. 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Presentase Peningkatan Kualitas Peternak dan Pelaku Usaha Ternak (%)</i>	100	710.513.596			60	40.446.600	60	40.117.550	100,00	99,19	60	40.117.550	60,00	5,65	
3.27.0 7.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Presentase Peningkatan Kualitas Peternak dan Pelaku Usaha Ternak (%)</i>					60	40.446.600	60	40.117.550	100,00	99,19	60	40.117.550			
3.27.0 7.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	<i>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kelompok Ternak Dan Pelaku Usaha Peternakan (lembaga)</i>					15	40.446.600	15	40.117.550	100,00	99,19	15	40.117.550			
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN																Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM
3.30. 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan (%)</i>	40	216.873.750			20	38.000.000		36.513.089	0,00	96,09	0	36.513.089	0,00	16,84	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30.0 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Pengawasan distribusi B2 (%)</i>					20	38.000.000	25	36.513.089	125,00	96,09	25	36.513.089			
3.30.0 2.06.0 3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-2) maupun Produsen B2 (P-B2)	<i>Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap PA-B2 dan P-B2 yang dilaksanakan (kali)</i>					5	38.000.000	5	36.513.089	100,00	96,09	5	36.513.089			
3.30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan (%)</i>	35	5.385.573.156			55	1.748.741.365	55	1.728.719.349	100,00	98,86	55	1.728.719.349	157,14	32,10	
3.30.0 3.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan (%)</i>					55	1.017.033.150	55	1.003.597.650	100,00	98,68	55	1.003.597.650			
3.30.0 3.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan (unit)</i>					6	519.800.000	4	513.864.500	66,67	98,86	4	513.864.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
3.30.0 3.01.0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi (unit)					4	497.233.150	4	489.733.150	100,00	98,49	4	489.733.150			
3.30.0 3.01.0 3	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan (%)					50	731.708.215	50	725.121.699	100,00	99,10	50	725.121.699			
3.30.0 3.02.0 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya yang dibina (unit)					32	621.708.215	32	615.818.790	100,00	99,05	32	615.818.790			
3.30.0 3.02.0 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (kali)					30	110.000.000	14	109.302.909	46,67	99,37	14	109.302.909			
3.30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Persentase Koefisien variasi harga antar waktu (%)</i>	0,9	2.612.981.594			13	705.610.600	8,92	694.992.478	68,62	98,50	8,92	694.992.478	991,11	26,60	
3.30 04.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota	<i>Persentase terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya (%)</i>					70	17.060.600	80	16.908.500	114,29	99,11	80	16.908.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30 04.01. 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	<i>Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat yang di kendalikan</i>					16	17.060.600	16	16.908.500	100,00	99,11	16	16.908.500			
3.30 04.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	<i>Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)</i>					80	663.550.000	80	653.876.269	100,00	98,54	80	653.876.269			
3.30 04.02. 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Jumlah Komoditi yang di pantau di tingkat pasar (jenis)</i>					28	75.000.000	28	74.707.180	100,00	99,61	28	74.707.180			
3.30 04.02. 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota	<i>Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar (kali)</i>					23	588.550.000	23	579.169.089	100,00	98,41	23	579.169.089			
3.30 04.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	<i>Persentase pengawasan pupuk dan pestisida (%)</i>					100	25.000.000	100	24.207.709	100,00	96,83	100	24.207.709			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
3.30.04.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah distributor dan agen yang dipantau (lembaga)					25	25.000.000	25	24.207.709	100,00	96,83	25	24.207.709			
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Persentase peningkatan fasilitasi Produk Ekspor Unggulan (%)</i>	65	698.608.023			65	107.116.000	75	99.020.255	115,38	92,44	75	99.020.255	115,38	14,17	
3.30.05.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi bagi produk ekspor (kali)					4	107.116.000	3	99.020.255	75,00	92,44	3	99.020.255			
3.30.05.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang Nasional yang dilaksanakan (kali)					2	72.116.000	1	64.177.190	50,00	88,99	1	64.177.190			
3.30.05.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah Pelaksanaan Misi Dagang (kali)					2	35.000.000	2	34.843.065	100,00	99,55	2	34.843.065			
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Peningkatan perlindungan konsumen</i>	100	479.302.324			95	206.460.200	95	204.460.860	100,00	99,03	95	204.460.860	95,00	42,66	
3.30.06.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase peningkatan Pelaksanaan Metrologi legal (%)</i>					95	206.460.200	95	204.460.860	100,00	99,03	95	204.460.860			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30.0 6.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTP yang tera/tera ulang (unit)					4.000	166.031.200	6.220	164.067.730	155,50	98,82	6220	164.067.730			
3.30.0 6.01.0 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah wajib tera ulang yang mengikuti penyuluhan (orang)					150	40.429.000	150	40.393.130	100,00	99,91	150	40.393.130			
3.30. 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri (%)</i>	70	959.910.807			65	95.751.500		95.324.701	0,00	99,55	0	95.324.701	0,00	9,93	
3.30.0 7.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase penjualan produk dalam negeri (%)</i>					50	95.751.500	50	95.324.701	100,00	99,55	50	95.324.701			
3.30.0 7.01.0 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem informasi perdagangan yang tersedia (unit)					1	95.751.500	1	95.324.701	100,00	99,55	1	95.324.701			
3.31	URUSAN PEMERINTAH BIDANG INDUSTRI																Dinas Tenaga Kerja
3.31.0 2	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Jumlah rencana pembangunan industry (dokumen)</i>	1	628.077.139			1	174.156.355	1	157.186.850	100,00	90,26	1	157.186.850	100,00	25,03	
3.31.0 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (dokumen)</i>					1	174.156.355	1	157.186.850	100,00	90,26	1	157.186.850			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.31.0 2.01.0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mampu mengembangkan produk khas daerah (IKM)					30	74.156.355	40	61.543.850	133,33	82,99	40	61.543.850			
3.31.0 2.03	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	Jumlah Laporan hasil Koordinasi (laporan)					1	100.000.000	1	95.643.000	100,00	95,64	1	95.643.000			
3.31.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha. (%)	18,0 72	309.688.265			6,02	51.920.590	8,05	18.064.100	133,72	34,79	8,05	18.064.100	44,54	5,83	
3.31.0 3.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI (Dokumen)					50	51.920.590	40	18.064.100	80,00	34,79	40	18.064.100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.31.0 3.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Teintegrasi secara Elektronik.	<i>Jumlah IKM yang faham pengurusan Ijin Usaha Industri (IKM)</i>					50	51.920.590	40	18.064.100	80,00	34,79	40	18.064.100			
3.31.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Presentase IKM yang memanfaatkan SIINas (%)</i>	18,0 72	179.511.662			6,02	42.109.055	1,3	14.905.400	21,59	35,40	1,3	14.905.400	7,19	8,30	
3.31.0 4.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase updating Data Sistem Informasi Industri (%)</i>					68	42.109.055	68	14.905.400	100,00	35,40	68	14.905.400			
3.31.0 4.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	<i>Jumlah IKM yang memanfaatkan SIINas (IKM)</i>					50	42.109.055	34	14.905.400	68,00	35,40	34	14.905.400			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.32	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TRANSMIGRASI																Dinas Tenaga Kerja
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Transmigran Umum yang berhasil (%)</i>	100	190.930.853			100	26.514.500	0	21.437.750	0,00	80,85	0	21.437.750	0,00	11,23	
3.32.04.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	<i>Jumlah calon Transmigran yang diseleksi (orang)</i>					5	26.514.500	5	21.437.750	100,00	80,85	5	21.437.750			
3.32.04.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	<i>Jumlah calon transmigran siap Berangkat (orang)</i>					2	26.514.500	0	21.437.750	0,00	80,85	0	21.437.750			
4.01	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH																Bagian Umum
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	<i>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitasi (%)</i>	90	81.068.607.585			100	27.493.086.805	99,23	25.821.108.849	99,23	93,92	99,23	25.821.108.849	110,26	31,85	
		<i>Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Daerah (skor)</i>	100				80		80		100,00		80		80,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah (%)</i>					100	13.340.776.869	94,86	12.619.958.603	94,86	94,60	94,86	12.619.958.603			
1.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah dokumen pengelolaan Gaji dan tunjangan ASN Sekretariat Daerah (dokumen)</i>					20	13.340.776.869	20	12.619.958.603	100,00		20				
1.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	<i>Jumlah dokumentasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)</i>					16	808.663.625	14	777.492.720	87,50	96,15	14	777.492.720			
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun (dokumen)</i>					16	808.663.625	14	777.492.720	87,50	96,15	14	777.492.720			
1.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Prosentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah</i>					100	100.000.000	0	0							
1.01.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah dokumen pendataan dan pengolah Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah (dokumen)</i>					125	100.000.000	0	0							
1.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Prosentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah (%)</i>					100	3.686.577.489	98	3.617.146.289	98,00	98,12	98	3.617.146.289			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Daerah (buah)					20	34.996.209	20	34.648.675	100,00	99,01	20	34.648.675			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah (buah)					50	168.955.957	48	164.263.200	96,00	97,22	48	164.263.200			
								269.601.326	20	256.313.605							
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah (buah)					23	136.408.950	34	136.404.615	147,83	100,00	34	136.404.615			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor Sekretariat Daerah (buah)					35	417.091.596	7	389.088.507	20,00	93,29	7	389.088.507			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Daerah (jenis)					8	32.035.300	100	24.834.000	1250,00	77,52	100	24.834.000			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan bahan bacaan Sekretariat Daerah (buah)					120	28.081.580	4	26.387.900	3,33	93,97	4	26.387.900			
1.01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ketersediaan bahan/material Sekretariat Daerah (buah)					5	2.599.406.571	110	2.585.205.787	2200,00	99,45	110	2.585.205.787			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen laporan rapat koordinsai dan konsultasi Sekretariat Daerah (dokumen)					120	708.370.670	0	248.323.000	0,00	35,06	0	248.323.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan (%)</i>					100	450.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0			
I.01.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai klasifikasi (unit)</i>					2	258.370.670	2	248.323.000	100,00	96,11	2	248.323.000			
I.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Sekretariat Daerah (unit)</i>					2	4.124.336.061	100	4.000.839.064	5000,00	97,01	100	4.000.839.064			
I.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>					100	21.493.640	2	20.153.000	2,00	93,76	2	20.153.000			
I.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah jasa surat menyurat Sekretariat Daerah</i>					2	1.119.469.496	12	1.102.392.001	600,00	98,47	12	1.102.392.001			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Daerah (bulan)</i>					12	589.422.655	15	588.122.844	125,00	99,78	15	588.122.844			
I.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah (orang)</i>					15	2.393.950.270	5	2.290.171.219	33,33	95,66	5	2.290.171.219			
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (orang)</i>					20	2.755.198.265	94,42	2.601.477.981	472,10	94,42	94,42	2.601.477.981			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.09	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan (%)</i>					100	1.905.388.265	18	1.773.753.780	18,00	93,09	18	1.773.753.780			
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat Daerah (orang)</i>					20	64.960.000	2	63.559.100	10,00	97,84	2	63.559.100			
I.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah mebel Sekretariat Daerah yang terpelihara secara rutin/berkala</i>					2	784.850.000	2	764.165.101	100,00	97,36	2	764.165.101			
I.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sekretariat Daerah yang terpelihara secara rutin/berkala (unit)</i>					2	1.969.163.826	99,23	1.955.871.192	4961,50	99,32	99,23	1.955.871.192			
I.01.01.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Prosentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi (%)</i>					100	764.717.826		760.700.236	0,00	99,47	0	760.700.236			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%			
1.01.01.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi</i>					24	1.204.446.000	20	1.195.170.956	83,33	99,23	20	1.195.170.956				
																		Bagian Organisasi
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	<i>Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat</i>						656.077.996		403.778.736		61,54	0	403.778.736	0,00	0,00		
1.01.01.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan anjab	<i>Jumlah organisasi Perangkat Daerah yang tepat Ukuran dan fungsinya (DPD)</i>					53	117.157.139	53	113.119.668	100,00	96,55	53	113.119.668				
1.01.01.13.02	Fasilitas pelayanan publik dan tatalaksana	<i>Jumlah Perangkat Daerah memiliki inovasi pelayanan public (DPD)</i>					10	124.998.375	15	123.787.635	150,00	99,03	15	123.787.635				
1.01.01.13.03	Peningkatan kinerja dan RB	<i>Jumlah LKjIP perangkat daerah yang sesuai ketentuan. (dokumen)</i>					40	57.169.650	40	56.707.300	100,00	99,19	40	56.707.300				
1.01.01.13.04	Monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	<i>Jumlah DPD yang melakukan Survey IKM dengan Kategori mutu pelayanan BAIK</i>					19	109.999.732	19	109.924.000	100,00	99,93	19	109.924.000				
1.01.01.13.05	Koordinasi dan penyusunan laporan pemerintah	<i>Jumlah Dokumen Laporan yang tersusun sudah sesuai peraturan yang berlaku (dokumen)</i>					4	246.753.100	4	240.132.50	100,00	0,10	4	240.133				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	Bagian Hukum
4.01.0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	7	1.244.583.144			7	976.091.946	5	672.924.547	71,43	68,94	5	672.924.547	71,43	54,07	
4.01.0 2.03	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Jumlah legislasi produk hukum daerah yang diinformasikan pada JDH					115	200.000.000		162.173.440	0,00		0				
		Jumlah fasilitas kasus hukum (kali)					5	200.000.000		162.173.440	0,00		0				
4.01.0 2.03.0 1	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah (perda dan perbub) yang sesuai / harmonis dengan peraturan perundang undangan yang baru dan lebih tinggi (dokumen)					70	776.091.946	100	510.751.107	142,86	65,81	100	510.751.107			
4.01.0 2.03.0 2	Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah kasus hukum perdata, pidana dan TUN litigasi dan non litigasi yang tertangani (kasus)					5		3		60,00	#DIV/0!	3	0			
		Jumlah produk hukum daerah yang di upload pada JDH (dokumen)					45	179.625.000	65	166.231.954	144,44		65				
		Jumlah penyuluhan hukum terpadu (kali)					2	489.699.421	3	248.419.500	150,00		3				
		Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk (desa)					1	106.767.525	45	96.099.653	4500,00		45				
		Sosialisasi peraturan perundang undangan (kali)					3		0		0,00		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.01.0 5.01.0 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang di upload pada JDIH (dokumen)					45	106.767.525	45	96.099.653	100,00	90,01	45	96.099.653			
		Jumlah penyuluhan hukum terpadu (kali)					2		0		0,00		0				
		Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk (desa)					1		1		100,00		1				
		Sosialisasi peraturan perundang undangan (kali)					3		3		100,00		3				
																	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan (%)	100	11.032.681.453			100	4.969.566.211	100	4.666.325.500	100,00	93,90	100	4.666.325.500	100,00	42,30	
		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	95				85		100		117,65		100		105,26		
4.01.0 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang disahkan					12	4.969.566.211	15	4.666.325.500	125,00	93,90	15	4.666.325.500			
		Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi (kali)					3.554		10.174		286,27		10174				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
4.01.0 2.02.0 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	<i>Jumlah rumusan kebijakan bina mental spiritual yang dikeluarkan (dokumen)</i> <i>Jumlah fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual yang dilaksanakan (kali)</i>					6	2.574.380.115	9	2.481.930.500	150,00	96,41	9	2.481.930.500			
						3.554		10,174		286,27		10,174					
4.01.0 2.02.0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	<i>Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan (dokumen)</i>					4	2.355.348.850	4	2.146.335.000	100,00	91,13	4	2.146.335.000			
4.01.0 2.02.0 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	<i>Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan Masyarakat yang dikeluarkan (dokumen)</i>					2	39.837.246	2	38.060.000	100,00	95,54	2	38.060.000			
																	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.0 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan (%)</i>	100	1.479.378.701			100	469.546.000	99,39	466.664.270	99,39	99,39	99,39	466.664.270	99,39	31,54	
4.01.0 3.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sesuai ketentuan</i>					469.546.000		466.664.270		99,39		466.664.270				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
4.01.0 3.02.0 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan fasilitasi penyusunan program pembangunan (dokumen)					4	292.775.000	4	291.820.000	100,00	99,67	4	291.820.000			
4.01.0 3.02.0 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi program pembangunan (dokumen)					3	76.900.900	3	75.384.300	100,00	98,03	3	75.384.300			
4.01.0 3.02.0 3	Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan (dokumen)					3	99.870.100	3	99.459.970	100,00	99,59	3	99.459.970			
																	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01.0 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan (%)	100	979.849.042			100	469.546.000	99,39	466.664.270	99,39	99,39	99,39	466.664.270	99,39	47,63	
4.01.0 3.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sesuai ketentuan						469.546.000		466.664.270							
4.01.0 3.02.0 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang dibuat (dokumen)					4	292.775.000	4	291.820.000	100,00	99,67	4	291.820.000			
4.01.0 3.02.0 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang dibuat (dokumen)					3	76.900.900	3	75.384.300	100,00	98,03	3	75.384.300			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
4.01.0 3.02.0 3	Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (dokumen)					3	99.870.100	3	99.459.970	100,00	99,59	3	99.459.970			
																	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4.01.0 3	PROGRAM PEREKONDMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%)	4	1.103.243.444			3	758.708.448	3	671.400.021	100,00	88,49	3	671.400.021	75,00	60,86	
4.01.0 3.03	Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	Indek Tata Kelola Pengadaan					60	758.708.448	65	671.400.021	108,33	88,49	65	671.400.021			
4.01.0 3.03.0 1	Sub Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa	Optimalisasi Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (%)					100	5.000.000	100	3.518.000	100,00	70,36	100	3.518.000			
		Persentase nilai belanja pengadaan pada APBD yang diumumkan dalam SiRUP (%)					70		71		10,14		71				
		Persentase realisasi jumlah paket yang dilaksanakan tepat waktu melalui E-Tendering /E-Seleksi terhadap jumlah paket E-Tendering /E-Seleksi yang diumumkan pada aplikasi SiRUP (%)					100		100		100,00		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.01.0 3.03.0 3	Sub Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Tingkat kematangan UKPBJ Level Proaktif (level)</i>					7	748.000.000	7	664.032.021	100,00	88,77	7	664.032.021			
		<i>Pemenuhan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ)</i>					3		3		100,00		3				
		<i>Persentase Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa (dokumen)</i>					3		3		100,00		3				
		<i>Meningkatnya pengetahuan Non E-Tendering, Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelala bagi SDM di OPD</i>					240		240		100,00		240				
4.01.0 3.03.0 2	Sub Kegiatan Layanan Pengadaan barang Jasa Secara Elektronik	<i>Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (%)</i>					100	5.708.448	100	3.850.000	100,00	67,44	100	3.850.000			
		<i>Persentase penanganan permasalahan/ pengaduan pengguna sistem aplikasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti (%)</i>					100		100		100,00		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
		<i>Persentase penerapan E-Kontrak pada aplikasi SPSE untuk E-Tendering/E-Seleksi (%)</i>					100		100		100,00		100					
		<i>Persentase Status Paket Selesai pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring (E-Purchasing) (%)</i>					100		100		100,00		100					
																		Bagian Perekonomian Dan SDA
4.01.0 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan (%)</i>	100	2.662.409.956			100	1.585.242.300	100	1.508.738.600	100,00	95,17	100	1.508.738.600	100,00	56,67		
4.01.0 3.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan perekonomian daerah yang disahkan</i>					3	302.208.274	3	285.537.700	100,00	94,48	3	285.537.700				
4.01.0 3.02.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan BUMD yang dikeluarkan</i>					1	104.929.240	1	103.620.500	100,00	98,75	1	103.620.500				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan BLUD yang dikeluarkan (dokumen)</i>					1		1		100,00		1				
4.01.0 3.02.0 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dikeluarkan (dokumen)</i>					6	197.279.034	6	181.917.200	100,00	92,21	6	181.917.200			
		<i>Jumlah Operasi Bersama yang dilaksanakan (kali)</i>															
4.01.0 3.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan SDA yang disahkan (dokumen)</i>					2	1.283.034.026	2	1.223.200.900	100,00	95,34	2	1.223.200.900			
4.01.0 3.04.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Pertanian, Perikanan yang dikeluarkan (dokumen)</i>					1	1.272.731.268	1	1.217.350.200	100,00	95,65	1	1.217.350.200			
		<i>Jumlah Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai (kali)</i>					24		44		183,33		44				
		<i>Jumlah penerima BLT Tembakau yang diberikan (orang)</i>					600		577		96,17		577				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.01.03.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rumusan Kebijakan Energi dan Air yang dikeluarkan (dokumen)					1	10.302.758	1	5.850.700	100,00	56,79	1	5.850.700			
																	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah yang di fasilitasi (%)	100	2.371.103.247			100	1.007.437.600	100	910.934.494	100,00	90,42	100	910.934.494	100,00	38,42	
1.01.01.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan yang terselenggara (kegiatan)					305	1.007.437.600	305	910.934.494	100,00	90,42	305	910.934.494			
		Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pimpinan yang dirilis					240		240		100,00		240				
1.01.01.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan kegiatan Pimpinan					305	531.536.020	305	526.797.920	100,00	99,11	305	526.797.920			
1.01.01.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi komunikasi kegiatan Pimpinan					4	5.118.100	4	4.470.300	100,00	87,34	4	4.470.300			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pimpinan					305	470.783.480	305	379.666.274	100,00	80,65	305	379.666.274			
4.02	UNSUR SEKRETARIAT DPRD																Setwan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	98.288.566.958			8.984.463.051		8.069.257.599		89,81	0	8.069.257.599	0,00	8,21		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (skor)	90											0,00			
		Persentase penyelenggaraan administrasi DPRD (%)	100											0,00			
		Persentase layanan keuangan DPRD (%)	100											0,00			
		Persentase layanan kesejahteraan DPRD (%)	95											0,00			
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					80	17.184.100	66	9.882.300	82,50	57,51	66	9.882.300			
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)					4	7.184.100	4	381.000	100,00	5,30	4	381.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>					5	5.000.000	5	4.501.500	100,00	90,03	5	4.501.500			
I.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (kali)</i>					5	5.000.000	5	4.999.800	100,00	100,00	5	4.999.800			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)</i>					85	3.851.304.716	85	3.540.458.289	100,00	91,93	85	3.540.458.289			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>					12	3.513.804.716	12	3.405.408.289	100,00	96,92	12	3.405.408.289			
I.01.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SPKD	<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPKD (dokumen)</i>					7	337.500.000	7	135.050.000	100,00	40,01	7	135.050.000			
I.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)</i>					85	207.520.000	85	181.040.670	100,00	87,24	85	181.040.670			
I.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (kali)</i>					31	6.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>					31	20.000.000	31	12.065.000	100,00	60,33	31	12.065.000			
1.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (kali)</i>					24	181.520.000	24	168.975.670	100,00	93,09	24	168.975.670			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase meningkatnya administrasi umum perangkat daerah (%)</i>					85	1.018.725.273	85	880.144.055	100,00	86,40	85	880.144.055			
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (tahun)</i>					1	39.993.844	1	39.989.600	100,00	99,99	1	39.989.600			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (tahun)</i>					1	31.070.170	1	17.159.000	100,00	55,23	1	17.159.000			
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (tahun)</i>					1	66.662.800	1	49.028.000	100,00	73,55	1	49.028.000			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor (tahun)</i>					1	172.418.534	1	171.155.700	100,00	99,27	1	171.155.700			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan (tahun)</i>					1	134.200.825	1	97.798.300	100,00	72,87	1	97.798.300			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (buah)</i>					48	72.820.000	48	68.200.000	100,00	93,66	48	68.200.000			
1.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (kali)</i>					48	115.559.100	48	99.255.000	100,00	85,89	48	99.255.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bulan)</i>					12	386.000.000	12	337.558.455	100,00	87,45	12	337.558.455			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase meningkatnya ketersediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah (%)</i>					85	747.915.775	85	740.126.200	100,00	98,96	85	740.126.200			
1.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Tersedianya Mebel (unit)</i>					22	195.471.850	22	194.559.200	100,00	99,53	22	194.559.200			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (buah)</i>					48	552.443.925	48	545.567.000	100,00	98,76	48	545.567.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</i>					100	1.197.208.073	100	1.047.650.496	100,00	87,51	100	1.047.650.496			
1.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (buah)</i>					25	10.000.000	20	7.590.000	80,00	75,90	20	7.590.000			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (buah)</i>					36	248.910.000	33	189.679.196	91,67	76,20	33	189.679.196			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)</i>					12	938.298.073	12	850.381.300	100,00	90,63	12	850.381.300			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase meningkatnya persentase pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)</i>					80	1.944.605.114	80	1.669.955.589	100,00	85,88	80	1.669.955.589			
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (buah)</i>					5	465.279.830	5	428.197.769	100,00	92,03	5	428.197.769			
I.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (ubit)</i>					21	729.284.372	21	570.594.293	100,00	78,24	21	570.594.293			
I.01.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Mebel (kali)</i>					18	35.000.000	18	25.719.800	100,00	73,49	18	25.719.800			
I.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (kali)</i>					10	140.000.000	20	109.992.500	200,00	78,57	20	109.992.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>					2	524.343.442	2	501.876.227	100,00	95,72	2	501.876.227			
1.01.01.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>					2	50.697.470	2	33.575.000	100,00	66,23	2	33.575.000			
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah APBD (%)</i>	100	90.987.373.331			100	43.699.032.416	100	39.568.396.632	100,00	90,55	100	39.568.396.632	100,00	43,49	
		<i>Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah Non APBD (%)</i>	100				100		100		100,00		100		100,00		
		<i>Persentase fasilitas penganggaran dan pengawasan (%)</i>	100													0,00	
		<i>Persentase fasilitas tugas dan fungsi DPRD (%)</i>	100													0,00	
4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Ditetapkan (%)</i>					85	5.048.517.450	85	3.750.133.600	100,00	74,28	85	3.750.133.600			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
4.02.0 2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>					20.000.000	0	0,00	0	0						
4.02.0 2.01.0 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<i>Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (kali)</i>				14	1.410.795.500	14	1.304.415.600	100,00	92,46	14	1.304.415.600				
4.02.0 2.01.0 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (kali)</i>				10	2.928.300.800	10	1.938.764.000	100,00	66,21	10	1.938.764.000				
4.02.0 2.01.0 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	<i>Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik (laporan)</i>				4	247.500.000	4	247.500.000	100,00	100,00	4	247.500.000				
4.02.0 2.01.0 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	<i>Tesusunnya Tata Tertib DPRD (dokumen)</i>				1	441.921.150	1	259.454.000	100,00	58,71	1	259.454.000				
4.02.0 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase Jumlah Kebijakan Anggaran yang Ditetapkan tepat waktu (%)</i>				90	1.855.803.295		1.726.866.400	0,00	93,05	0	1.726.866.400				
4.02.0 2.02.0 1	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS (kali)</i>				2	193.779.750	2	190.025.000	100,00	98,06	2	190.025.000				
4.02.0 2.02.0 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (kali)</i>				2	230.080.565	2	215.624.500	100,00	93,72	2	215.624.500				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
4.02.0 2.02.0 3	Pembahasan APBD	<i>Terlaksananya Pembahasan APBD (kali)</i>					1	546.240.850	1	467.806.400	100,00	85,64	1	467.806.400			
4.02.0 2.02.0 4	Pembahasan APBD Perubahan	<i>Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan (kali)</i>					1	445.144.065	1	429.071.500	100,00	96,39	1	429.071.500			
4.02.0 2.02.0 5	Pembahasan Laporan Semester	<i>Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (kali)</i>					1	10.000.000	1	7.760.000	100,00	77,60	1	7.760.000			
4.02.0 2.02.0 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (kali)</i>					3	430.558.065	3	416.579.000	100,00	96,75	3	416.579.000			
4.02.0 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%)</i>					80	267.546.600		170.088.500	0,00	63,57	0	170.088.500			
4.02.0 2.03.0 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum (kali)</i>					2	14.454.000	2	12.610.000	100,00	87,24	2	12.610.000			
4.02.0 2.03.0 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (kali)</i>					3	14.454.000	3	4.757.500	100,00	32,91	3	4.757.500			
4.02.0 2.03.0 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat (kali)</i>					0	14.454.000	0	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
4.02.0 2.03.0 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian (kali)</i>					1	14.454.000	1	1.697.500	100,00	11,74	1	1.697.500			
4.02.0 2.03.0 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	<i>Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam</i>					0	14.454.000	0	0	0,00	0,00	0	0			
4.02.0 2.03.0 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan	<i>Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (kali)</i>					3	74.441.200	3	58.552.500	100,00	78,66	3	58.552.500			
4.02.0 2.03.0 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	<i>Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran (kali)</i>					4	29.502.100	4	16.587.500	100,00	56,22	4	16.587.500			
4.02.0 2.03.0 8	Pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (kali)</i>					3	91.333.300	3	75.883.500	100,00	83,08	3	75.883.500			
4.02.0 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan (%)</i>					85	2.951.097.875		2.281.507.082	0,00	77,31	0	2.281.507.082			
4.02.0 2.04.0 1	Orientasi DPRD	<i>Terselenggaranya Orientasi DPRD</i>					0	7.460.000	0	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.02.0 2.04.0 2	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Terlaksananya Pendalaman tugas DPRD (kali)</i>					8	1.001.305.000	8	446.799.690	100,00	44,62	8	446.799.690			
4.02.0 2.04.0 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	<i>Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (kali)</i>					75	1.404.548.310	75	1.403.308.392	100,00	99,91	75	1.403.308.392			
4.02.0 2.04.0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	<i>Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli (kelompok)</i>						60.000.000		0	0,00	0,00	0	0			
4.02.0 2.04.0 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	<i>Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi (orang)</i>					6	180.000.000	6	180.000.000	100,00	100,00	6	180.000.000			
4.02.0 2.04.0 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	<i>Terselenggaranya Hubungan Masyarakat (kali)</i>						22.132.000		21.600.000	0,00	97,60	0	21.600.000			
4.02.0 2.04.0 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	<i>Tersusunnya Rencana Kerja DPRD (dokumen)</i>					2	275.652.565	2	229.799.000	100,00	83,37	2	229.799.000			
4.02.0 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun</i>					80	27.491.040		6.328.600	0,00	23,02	0	6.328.600			
4.02.0 2.05.0 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	<i>Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD (kali)</i>					3	11.040.000	3	820.000	100,00	7,43	3	820.000			
4.02.0 2.05.0 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>					522	10.000.000	522	2.499.600	100,00	25,00	522	2.499.600			
4.02.0 2.05.0 3	Pelaksanaan Reses	<i>Terlaksananya Reses (kali)</i>					3	6.451.040	3	3.009.000	100,00	46,64	3	3.009.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
4.02.0 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase Kode Etik DPRD yang Disahkan (%)</i>					60	15.000.000		2.910.000	0,00	19,40	0	2.910.000			
4.02.0 2.06.0 1	Penyusunan Kode Etik DPRD	<i>Tersusunnya Kode Etik Tata Beracara DPRD (dokumen)</i>					1	10.000.000	1	2.910.000	100,00	29,10	1	2.910.000			
4.02.0 2.06.0 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD (</i>						5.000.000		0							
4.02.0 2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	<i>Jumlah Dokumen Kerjasama yang Disetujui (dokumen)</i>					1	10.000.000		0	0,00	0,00	0	0			
4.02.0 2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	<i>Terlaksananya Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (kali)</i>						10.000.000		0	0,00	0,00	0	0			
4.02.0 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase tugas DPRD yang terfasilitasi</i>					85	7.914.266.610		6.533.425.100	0,00	82,55	0	6.533.425.100			
4.02.0 2.08.0 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (kali)</i>					50	7.016.463.205	50	5.855.949.300	100,00	83,46	50	5.855.949.300			
4.02.0 2.08.0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	<i>Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD (laporan)</i>					1	251.010.805	1	208.669.000	100,00	83,13	1	208.669.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
4.02.0 2.08.0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (kali)</i>					15	29.507.500	15	15.525.000	100,00	52,61	15	15.525.000			
4.02.0 2.08.0 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<i>Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (kali)</i>					30	617.285.100	30	453.281.800	100,00	73,43	30	453.281.800			
1.01.01. 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Persentase layanan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan (%)</i>						25.556.041.446		25.076.063.350	0,00	98,12	0	25.076.063.350			
1.01.01. 15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	<i>Terselenggaranya Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (orang)</i>					45	25.021.140.771	45	24.649.186.350	100,00	98,51	45	24.649.186.350			
1.01.01. 15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	<i>Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (orang)</i>					45	359.400.675	44	298.386.000	97,78	83,02	44	298.386.000			
1.01.01. 15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	<i>Terlaksananya Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>					45	175.500.000	35	128.491.000	77,78	73,21	35	128.491.000			
1.01.01. 16	Layanan Administasi DPRD	<i>Presentase Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang Dilaksanakan (%)</i>						53.268.100		21.074.000	0,00	39,56	0	21.074.000			
1.01.01. 16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	<i>Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD (kali)</i>					12	15.736.600	12	2.000.000	100,00	12,71	12	2.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					17	37.531.500	17	19.074.000	100,00	50,82	17	19.074.000			
5.01	UNSUR PERENCANAAN																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
I.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	86	18.016.129.590			A	6.160.578.981	A	5.925.900.655	0,00	96,19	0	5.925.900.655	0,00	32,89	
		Nilai SAKIP PD	90				73,1		80,88		110,64		80,88		89,87		
I.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan (%)					100	192.494.870	100	173.956.222	100,00	90,37	100	173.956.222			
I.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)					8	192.494.870	8	173.956.222	100,00	0,00	8	173.956.222			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terpenuhi penggajiannya (%)					100	4.654.484.011	100	4.529.312.895	100,00	97,31	100	4.529.312.895			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gajinya (orang)						3.929.184.011		3.808.562.895		96,93		3.808.562.895			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gajinya (orang)					36	725.300.000	36	720.750.000	100,00	0,00	36	720.750.000			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia (%)					100	561.331.894	100	534.335.491	100,00	95,19	100	534.335.491			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (bulan)					12	10.441.860	12	10.183.000	100,00	97,52	12	10.183.000			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (buah)					13	131.838.344	13	129.923.500	100,00	98,55	13	129.923.500			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia (bulan)					12	6.451.060	12	5.170.500	100,00	80,15	12	5.170.500			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya Kebutuhan logistik kantor (bulan)					12	122.546.451	12	119.146.980	100,00	97,23	12	119.146.980			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang tersedia (buah)					3	15.787.486	3	14.159.800	100,00	89,69	3	14.159.800			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia					49	6.244.000	49	5.832.000	100,00	93,40	49	5.832.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan (kali)					250	268.022.693	243	249.919.711	97,20	93,25	243	249.919.711			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
		<i>Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan (kali)</i>					300		229		76.33	#DIV/0!	229	0			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang tercukupi v</i>				100	398.244.014	100	372.295.391	100,00	93,48	100	372.295.391				
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi (buah)</i>				3	109.385.630	3	90.686.055	100,00	82,90	3	90.686.055				
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang tersedia (orang)</i>				6	288.858.384	6	281.609.336	100,00	97,49	6	281.609.336				
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase sarana prasarana yang layak fungsi (%)</i>				100	354.024.192	100	316.000.656	100,00	89,26	100	316.000.656				
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)</i>				12	223.449.700	12	205.480.625	100,00	91,96	12	205.480.625				
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara (unit)</i>				37	44.990.000	37	34.870.000	100,00	77,51	37	34.870.000				
1.01.01.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara (unit)</i>				5	85.584.492	5	75.650.031	100,00	88,39	5	75.650.031				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
5.01.0 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan (%)</i>	100	3.708.031.697			100	1.196.758.153	100	1.157.571.422	100,00	96,73	100	1.157.571.422	100,00	31,22	
5.01.0 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)					6	834.614.782		819.729.950	0,00	98,22	0	819.729.950			
5.01.0 2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (kali)</i>					3	834.614.782	4	819.729.950	133,33	98,22	4	819.729.950			
5.01.0 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Data Informasi Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan (dokumen)</i>					6	128.716.678	3	126.666.572	50,00	98,41	3	126.666.572			
5.01.0 2.02.0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	<i>Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah yang Dikelola (dokumen)</i>					2	51.994.194	4	50.244.072	200,00	96,63	4	50.244.072			
5.01.0 2.02.0 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang dihasilkan (profil)</i>					2	76.722.484	2	76.422.500	100,00	99,61	2	76.422.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.0 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan (dokumen)</i>					3	233.426.693	2	211.174.900	66,67	90,47	2	211.174.900			
5.01.0 2.03.0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (laporan)</i>					3	233.426.693	3	211.174.900	100,00	90,47	3	211.174.900			
5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75% (%)</i>	100	7.044.264.793			80	530.114.480	80	508.061.920	100,00	95,84	80	508.061.920	80,00	7,21	
		<i>Persentase PD Bidang Ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75% (%)</i>	100			80	80		100,00		80		80,00				
		<i>Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75% (%)</i>	100			80	80		100,00		80		80,00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.0 3.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan (kali)</i>					15	175.189.005	15	170.141.200	100,00	0,00	15	170.141.200			
5.01.0 3.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (kali)</i>					7	7.196.000	7	7.178.000	100,00	0,00	7	7.178.000			
5.01.0 3.01.0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (kali)</i>					7	16.288.000	7	16.282.000	100,00	99,96	7	16.282.000			
5.01.0 3.01.0 4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang pemerintahan (dokumen)</i>					7	14.377.600	7	14.244.000	100,00	99,07	7	14.244.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.0 3.01.0 5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (kali)</i>					7	113.396.605	8	108.987.800	114,29	96,11	8	108.987.800			
5.01.0 3.01.0 6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (kali)</i>					8	2.246.800	8	2.246.400	100,00	99,98	8	2.246.400			
5.01.0 3.01.0 7	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>					8	9.154.000	8	9.153.000	100,00	99,99	8	9.153.000			
5.01.0 3.01.0 8	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang pembangunan Manusia (kali)</i>					8	12.530.000	8	12.050.000	100,00	96,17	8	12.050.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.0 3.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (kali)</i>					8	237.287.000	8	226.445.745	100,00	95,43	8	226.445.745			
5.01.0 3.02.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan (kali)</i>					14	237.287.270	14	226.445.645	100,00	95,43	14	226.445.645			
5.01.0 3.02.0 2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (kali)</i>					7	19.884.550	7	19.631.000	100,00	0,00	7	19.631.000			
5.01.0 3.02.0 3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (kali)</i>					7	2.671.200	7	2.671.000	100,00	99,99	7	2.671.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.0 3.02.0 4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang Perekonomian (dokumen)</i>					7	12.454.000	7	10.835.800	100,00	87,01	7	10.835.800			
5.01.0 3.02.0 5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (kali)</i>					7	61.073.870	7	60.687.870	100,00	99,37	7	60.687.870			
5.01.0 3.02.0 6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (kali)</i>					7	5.265.675	7	4.188.000	100,00	79,53	7	4.188.000			
5.01.0 3.02.0 7	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (kali)</i>					7	5.025.500	7	4.276.000	100,00	85,09	7	4.276.000			
5.01.0 3.02.0 8	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang SDA (dokumen)</i>					7	13.274.000	7	12.681.000	100,00	95,53	7	12.681.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.0 3.03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (kali)</i>					7	117.638.475	7	111.474.975	100,00	94,76	7	111.474.975			
5.01.0 3.03.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai ketentuan (kali)</i>					10	2.545.367.393	10	2.384.524.795	100,00	93,68	10	2.384.524.795			
5.01.0 3.03.0 2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (kali)</i>					5	1.727.110	5	1.022.500	100,00	59,20	5	1.022.500			
5.01.0 3.03.0 3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (kali)</i>					5	1.663.100	5	818.000	100,00	49,19	5	818.000			
5.01.0 3.03.0 4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang Perencanaan (dokumen)</i>					5	15.977.395	5	5.744.750	100,00	35,96	5	5.744.750			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.0 3.03.0 5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (kali)</i>					5	44.914.345	5	37.725.000	100,00	83,99	5	37.725.000			
5.01.0 3.03.0 7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (kali)</i>					5	1.092.367.673	5	1.061.613.662	100,00	97,18	5	1.061.613.662			
5.01.0 3.03.0 8	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang SDA (dokumen)</i>					5	14.445.160	5	14.341.000	100,00	99,28	5	14.341.000			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (dokumen)</i>					5	1.374.272.610	5	1.263.259.883	100,00	0,00	5	1.263.259.883			
5.02	UNSUR KEUANGAN																

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	Badan Pendapatan Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	23.533.855.596			83(A)	8.553.192.919	A	8.144.486.587	0,00	95,22	0	8.144.486.587	0,00	34,61	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90				80		80		100,00	0,00	80	0	88,89		
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan (orang)					50	7.267.525.582	55	6.918.847.445	110,00	95,20	55	6.918.847.445			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangan (orang)					50	7.267.525.582	55	6.918.847.445	110,00	95,20	55	6.918.847.445			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum					7	382.755.913	7	351.091.162	100,00	91,73	7	351.091.162			
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)					12	2.496.175	12	1.774.500	100,00	71,09	12	1.774.500			
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12	100.000.000	12	80.718.000	100,00	80,72	12	80.718.000			
1.01.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)					12	125.867.992	12	123.775.450	100,00	98,34	12	123.775.450			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan					3	33.353.836	3	28.806.200	100,00	86,37	3	28.806.200			
I.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					48	7.591.500	48	7.024.000	100,00	92,52	48	7.024.000			
I.01.01.06.07	Penyediaan bahan/material	Tersedianya bahan/material					12	3.325.410	12	405.000	100,00	12,18	12	405.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah (bulan)					12	110.121.000	12	108.588.012	100,00	98,61	12	108.588.012			
I.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah (paket)					1	14.917.625	1	12.620.000	100,00	84,60	1	12.620.000			
I.01.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Terselenggaranya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (paket)					1	14.917.625	1	12.620.000	100,00	84,60	1	12.620.000			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang (%)					100	736.953.499	100	725.818.848	100,00	98,49	100	725.818.848			
I.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (%)					100	500.000	100	101.000	100,00	20,20	100	101.000			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA, dan listrik (bulan)					12	181.792.148	12	178.981.949	100,00	98,45	12	178.981.949			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (14	554.661.351	15	546.735.899	107,14	98,57	15	546.735.899			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (unit)					5	151.040.300	8	136.109.132	160,00	90,11	8	136.109.132			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (orang)					5	106.452.955	8	100.362.131	160,00	94,28	8	100.362.131			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya (%)					100	35.948.550	100	32.749.201	100,00	91,10	100	32.749.201			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya (unit)					1	8.638.795	1	2.997.800	100,00	34,70	1	2.997.800			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan (%)	100	3.246.087.936			20,92	1.127.630.670	25,97	1.008.971.042	124,14	89,48	25,97	1.008.971.042	25,97	31,08	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.127.630.670		1.008.971.042		89,48		1.008.971.042				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.0 4.01.0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah dokumen pendataan obyek PAD (dokumen)</i>					1	223.289.150	1	155.101.480	100,00	69,46	1	155.101.480			
		<i>Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak</i>									0,00	0,00	0	0			
5.02.0 4.01.0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Jumlah peningkatan target pajak daerah (%)</i>					8	172.492.147	13	165.307.450	162,50	95,83	13	165.307.450			
5.02.0 4.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Jumlah desa yang dilakukan pemutakhiran (desa)</i>					2	224.492.603	2	219.514.350	100,00	97,78	2	219.514.350			
5.02.0 4.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Jumlah dokumen verifikasi piutang Sdokumen)</i>					1	7.022.500	1	4.425.500	100,00	63,02	1	4.425.500			
		<i>Jumlah pengajuan keberatan/pengajuan yang di verifikasi</i>									0,00	0,00	0	0			
5.02.0 4.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	<i>Jumlah desa yang melunasi PBB P2 (desa)</i>					85	315.705.534	58	281.376.199	68,24	89,13	58	281.376.199			
		<i>Jumlah pelunasan SPPT PBB P2</i>									0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
		<i>Jumlah SPPT PBB P2 yang di distribusikan</i>										0,00	0,00	0	0			
5.02.0 4.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilakukan (kali)</i>					2	184.628.736	206	183.246.063	10300,00	99,25	206	183.246.063				
		<i>Jumlah sarana pemungutan yang tercetak (unit)</i>					24		24		100,00	0,00	24	0				
																		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>nilai sakiq perangkat daerah</i>	86	104.005.115.820				31.845.965.308		26.977.376.717	0,00	84,71	0	26.977.376.717	0,00	25,94		
		<i>kepuasan asn terhadap pelayanan sekretariat pd</i>	90												0,00			
1.01.01.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Prosentase Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (%)</i>					157.242.628			140.728.900	0,00	89,50	0	140.728.900				
1.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)</i>					12	157.242.628	12	140.728.900	100,00	89,50	12	140.728.900				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase ketersediaan gaji, tunjangan ASN dan kebutuhan operasional ASN tang terpenuhi (%)</i>					100	29.990.143.031	100	25.323.632.921	0,00	84,44	100	25.323.632.921			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Laporan (laporan)</i>					12	29.796.357.381	12	25.167.035.706	100,00	84,46	12	25.167.035.706			
I.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>terlaksananya rakor dan konsultasi (kali)</i>					12	193.785.650	12	156.597.215	100,00	80,81	12	156.597.215			
I.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Prosentase aparatur penatausahaan Keuangan yang mengikuti pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah (%)</i>					50	10.000.000	50	0	0,00	0,00	50	0			
I.01.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan (orang)</i>					15	10.000.000	-	0	0,00	0,00	0	0			
I.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Prosentase ketersediaan sarana penunjang kinerja terpenuhi (%)</i>					100	421.803.081	100	364.299.101	100,00	86,37	100	364.299.101			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik (bulan)</i>					12	5.998.993	12	1.962.000	100,00	32,71	12	1.962.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor (buah)					12	63.566.215	12	62.326.000	100,00	98,05	12	62.326.000			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan, Jumlah snack, rapat tamu yang terpenuhi (bulan)					12	260.000.951	12	236.177.676	100,00	90,84	12	236.177.676			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan/ Fotocopy yang diadakan (bulan)					12	92.236.922	12	63.833.425	100,00	69,21	12	63.833.425			
I.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentasi kebutuhan operasional kantor yang terpenuhi (%)						633.147.498		553.132.546	0,00	87,36	0	553.132.546			
I.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen surat menyurat (bulan)					12	2.000.000	12	525.100	100,00	26,26	12	525.100			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah dokumen pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)					12	152.082.710	12	107.867.326	100,00	70,93	12	107.867.326			
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kebersihan, Resepsionis dan Keamanan Kantor yang tersedia (orang)					12	479.064.788	12	444.740.120	100,00	92,84	12	444.740.120			
I.01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan sarana penunjang kinerja dalam kondisi baik (%)						633.629.070		595.583.249	0,00	94,00	0	595.583.249			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin dan Pajak kendaraan dinas/jabatan (unit)</i>					37	321.536.000	37	289.579.249	100,00	90,06	37	289.579.249			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>terlaksananya pemeliharaan rutin alat kantor (bulan)</i>					12	122.893.070	12	118.239.000	100,00	96,21	12	118.239.000			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terpeliharanya gedung kantor (bulan)</i>					12	189.200.000	12	187.765.000	100,00	99,24	12	187.765.000			
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase DPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP (%)</i>	100	1.292.625.312.198				453.700.475.761		442.720.431.017	0,00	97,58	0	442.720.431.017	0,00	34,25	
5.02.02.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Prosentase penyusunan APBD dan P APBD tepat waktu (%)</i>					1.032.089.607		888.586.400	0,00	86,10	0	888.586.400				
5.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Rancangan Perda tentang APBD (dokumen)</i>					240	43.349.200	240	39.088.500	100,00	90,17	240	39.088.500			
5.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Rancangan Perubahan Perda tentang APBD (dokumen)</i>					240	37.187.400	240	33.402.500	100,00	89,82	240	33.402.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.0 2.01.0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD APBD Kabupaten Madiun (dokumen)					54	5.349.850	54	4.457.400	100,00	83,32	54	4.457.400			
5.02.0 2.01.0 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD APBD Kabupaten Madiun (dokumen)					54	5.112.800	54	4.627.000	100,00	90,50	54	4.627.000			
5.02.0 2.01.0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD APBD Kabupaten Madiun (dokumen)					54	7.500.000	54	7.500.000	100,00	100,00	54	7.500.000			
5.02.0 2.01.0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD APBD Kabupaten Madiun (dokumen)					54	10.382.000	54	10.275.000	100,00	98,97	54	10.275.000			
5.02.0 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah buku Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD (buku)					240	604.750.300	240	568.945.500	100,00	94,08	240	568.945.500			
5.02.0 2.01.0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD (buku)					240	238.920.787	240	220.290.500	100,00	92,20	240	220.290.500			
5.02.0 2.01.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi dan kebijakan Bidang Anggaran (dokumen)					6	79.537.270	6	0	100,00	0,00	6	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.0 2.01.10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan daerah</i>					-	0	-	0	0,00	0,00	0	0			
5.02.0 2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Prosentase pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang tepat waktu (%)</i>						417.602.190		401.772.400	0,00	96,21	0	401.772.400			
5.02.0 2.02.0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	<i>Jumlah koordinasi dan asistensi (kali)</i>					1	162.179.387	1	151.028.700	100,00	93,12	1	151.028.700			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.0 2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (laporan)</i>					4	159.500.338	4	155.312.700	100,00	97,37	4	155.312.700			
5.02.0 2.02.0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	<i>Jumlah laporan realisasi</i>					12	95.922.465	12	95.431.000	100,00	99,49	12	95.431.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.0 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Prosentase laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang terlaksana (%)</i>					229.015.258		220.656.290	0,00	96,35	0	220.656.290				
5.02.0 2.03.0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	<i>jumlah laporan realisasi APBD dan prognosis (laporan)</i>				2	7.809.692	2	7.333.600	100,00	93,90	2	7.333.600				
5.02.0 2.03.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<i>jumlah laporan prognosis dan realisasi APBD sesuai SAP (laporan)</i>				240	202.562.754	240	195.296.290	100,00	96,41	240	195.296.290				
5.02.0 2.03.0 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah regulasi (regulasi)</i>				1	18.642.812	1	18.026.400	100,00	96,69	1	18.026.400				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.0 2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Prosentase capaian hasil belanja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah tepat waktu (%)</i>						452.021.768.706		441.209.415.927	0,00	97,61	0	441.209.415.927			
5.02.0 2.04.0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Khusus</i>					1	404.891.296.000	1	404.023.465.509	100,00	99,79	1	404.023.465.509			
5.02.0 2.04.0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Terduga</i>					1	36.502.631.706	1	27.217.883.918	100,00	74,56	1	27.217.883.918			
5.02.0 2.04.1 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	<i>Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi (laporan)</i>					1	10.627.841.000	1	9.968.066.500	100,00	93,79	1	9.968.066.500			
5.02. 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase DPD yang tertib tata kelola barang milik daerah (%)</i>	100	8.113.949.983				3.396.711.121		2.161.969.715	0,00	63,65	0	2.161.969.715	0,00	26,65	
5.02.0 3.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Prosentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal (%)</i>						3.396.711.121		2.161.969.715	0,00	63,65	0	2.161.969.715			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.0 3.01.0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penggunaan dan pemanfaatan BMD					51	996.101.250	51	960.722.243	100,00	96,45	51	960.722.243			
5.02.0 3.01.0 6	Iventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah dokumen inventarisasi dan penghapusan asset (dokumen)					121	268.635.876	121	247.337.500	100,00	92,07	121	247.337.500			
5.02.0 3.01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pensertifikatan Tanah Milik Pemkab Madiun (sertifikat)					246	2.036.089.570	353	871.534.400	143,50	42,80	353	871.534.400			
5.02.0 3.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen rekonsiliasi neraca aktiva tetap (dokumen)					1	95.884.425	1	82.375.572	100,00	85,91	1	82.375.572			
5.03	UNSUR KEPEGAWAIAN																Badan Kepegawaian Daerah
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	14.192.733.014				3.360.367.489		3.230.908.951	0,00	96,15	0	3.230.908.951	0,00	22,76	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90												0,00		
1.01.01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji Pegawai (bulan)					12	3.360.367.489	14	3.230.908.951	116,67	96,15	14	3.230.908.951			
1.01.01 02.01	Gaji Pegawai	Terpenuhinya gaji Pegawai (bulan)					12	3.360.367.489	14	3.230.908.951	116,67	0,00	14	3.230.908.951			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06	Administrasi umum perangkat daerah	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat BKD</i>					92	943.547.628	99	928.958.604	107,61	98,45	99	928.958.604			
		<i>Nilai SAKIP A</i>				80		81,5		101,88	0,00	81,5					
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran yang dilaksanakan (bulan)</i>				12	8.047.611	12	8.047.500	100,00	100,00	12	8.047.500				
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)</i>				8	47.928.388	8	47.922.300	100,00	99,99	8	47.922.300				
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>				4	24.939.970	4	24.939.489	100,00	100,00	4	24.939.489				
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)</i>				4	41.894.765	4	41.867.000	100,00	99,93	4	41.867.000				
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)</i>				4	13.908.400	4	13.906.500	100,00	99,99	4	13.906.500				
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)</i>				12	6.480.000	12	6.417.000	100,00	99,03	12	6.417.000				
1.01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)</i>				4	58.569.136	4	58.107.000	100,00	99,21	4	58.107.000				
1.01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>				1	4.480.575	1	4.480.150	100,00	99,99	1	4.480.150				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)					1	50.062.000	1	50.061.624	100,00	100,00	1	50.061.624			
1.01.01.07	Pengadaan barang milik daerah Penunjang PD	Jumlah Peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (bulan)					12	110.050.600	12	108.405.000	100,00	0,00	12	108.405.000			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)					10	110.050.600	10	108.405.000	100,00	#VALUE!	10	108.405.000			
1.01.01.08	Penyedia jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Tenaga Penunjang (orang)					2	429.038.046	2	416.930.341	100,00	0,00	2	416.930.341			
1.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi (bulan)					12	1.000.000	12	762.000	100,00	76,20	12	762.000			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)					1	160.596.050	1	150.270.595	100,00	93,57	1	150.270.595			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)					1	267.441.996	1	265.897.746	100,00	99,42	1	265.897.746			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang PD	Jumlah Aset Yang terpelihara (laporan)					12	80.597.370	12	80.348.600	100,00	0,00	12	80.348.600			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)					14	31.995.415	14	31.908.600	100,00	99,73	14	31.908.600			
I.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (buah)					265	26.731.955	265	26.570.000	100,00	99,39	265	26.570.000			
I.01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)					2	21.870.000	2	21.870.000	100,00	100,00	2	21.870.000			
I.01.01.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah (RKA-RKA-P, DPA, DPA-P, Renstra, Renja, Renja Perubahan) (dokumen)					12	67.551.367	15	67.526.100	125,00	0,00	15	67.526.100			
I.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)					14	67.551.367	14	67.526.100	100,00	#VALUE!	14	67.526.100			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penetapan kebutuhan ASN (%)	100	11.966.680.351			100	3.909.527.441	100	3.896.890.365	100,00	0,00	100	3.896.890.365	100,00	32,56	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Persentase Mutasi jabatan sesuai kualifikasi (%)</i>	100				95		100		105,26	0,00	100	0	100,00		
		<i>Persentase kedisiplinan ASN (%)</i>	99				97		99		102,06	0,00	99	0	100,00		
		<i>Persentase Penilaian Kinerja ASN (%)</i>	100				100		100		100,00	0,00	100	0	100,00		
		<i>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (%)</i>	85				75		100		133,33	0,00	100	0	117,65		
5.03.0 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Prosentase Mutasi Jabatan sesuai Kualifikasi (%)</i>					95	587.414.578	100	584.789.016	105,26	99,55	100	584.789.016			
5.03.0 2.02.0 1	Pengelolaan Mutasi ASN							8.907.841		8.900.700	0,00	99,92	0	8.900.700			
5.03.0 2.02.0 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	<i>Jumlah Kenaikan pangkat tepat waktu (pegawai)</i>					900	66.806.524	1.035	66.204.800	115,00	99,10	1035	66.204.800			
5.03.0 2.02.0 3	Pengelolaan Promosi ASN	<i>Jumlah ASN yang mutasi sesuai kualifikasi (ASN)</i>					400	511.700.213	822	509.683.516	205,50	99,61	822	509.683.516			
5.03.0 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>fasilitasi administrasi pemberhentian, validasi sistem informasi kepegawaian, dan ASN yang diangkat sesuai formasi terpenuhi (%)</i>					100	1.238.657.193	100	1.234.712.149	0,00	99,68	100	1.234.712.149			
5.03.0 2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah data ASN yang dikelola melalui simpeg secara akurat (data)</i>					6.800	86.860.000	6.811	86.570.900	100,16	99,67	6811	86.570.900			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.03.0 2.01.0 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi yang tersusun (dokumen)					1	17.746.643	1	17.740.600	100,00	99,97	1	17.740.600			
5.03.0 2.01.0 4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen hasil pengadaan ASN (dokumen)					1	1.059.550.266	1	1.057.257.410	100,00	99,78	1	1.057.257.410			
5.03.0 2.01.0 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pelanggaran Disiplin Yang terselesaikan (ASN)					145	74.500.284	3	73.143.239	2,07	98,18	3	73.143.239			
5.03.0 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Prosentase ASN yang Mengikuti pengembangan Kompetensi (%)					100	2.076.207.170	100	2.070.161.900	100,00	99,71	100	2.070.161.900			
5.03.0 2.03.0 5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah CPNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (CPNS)					341	1.285.992.450	341	1.280.650.450	100,00	99,58	341	1.280.650.450			
5.03.0 2.03.0 9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Cakap dan Pengawas (ASN)					85	790.214.720	85	789.511.450	100,00	99,91	85	789.511.450			
		Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Perpajakan (PNS)					14		14		100,00	0,00	14	0			
5.03.0 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang melanggar Disiplin (ASN)					145	7.248.500	3	7.227.300	2,07	99,71	3	7.227.300			
5.03.0 2.04.0 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN Yang melanggar Disiplin (ASN)					145	7.248.500	3	7.227.300	2,07	99,71	3	7.227.300			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
5.04	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah (%)</i>	100	1.329.431.990			100	887.356.946	100	859.372.650	100,00	96,85	100	859.372.650	100,00	64,64	
		<i>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan (%)</i>	100											0,00			
5.05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan (rekom)</i>					2	461.198.996	2	448.996.160	100,00	97,35	2	448.996.160			
		<i>Jumlah data kelitbangan yang dipublikasikan (data)</i>															
5.05.02.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pemerintahan Umum yang dihasilkan (rekom)</i>					1	320.000.000	1	309.402.740	100,00	96,69	1	309.402.740			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
5.05.0 2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	<i>Jumlah data kelitbangan yang dikelola</i>					2	41.198.996	2	39.593.420	100,00	96,10	2	39.593.420			
5.05.0 2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	<i>Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan (naskah)</i>					1	100.000.000	1	100.000.000	100,00	100,00	1	100.000.000			
5.05.0 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan (rekom)</i>					1	223.199.655	1	212.084.980	100,00	95,02	1	212.084.980			
5.05.0 2.02.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Aspek-aspek Sosial yang Ditindaklanjuti (rekom)</i>					1	123.199.655	1	112.772.380	100,00	91,54	1	112.772.380			
5.05.0 2.02.0 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Pariwisata dihasilkan (rekom)</i>					1	100.000.000	1	99.312.600	100,00	99,31	1	99.312.600			
5.05.0 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan (rekom)</i>					1	91.700.345	1	88.715.410	100,00	96,74	1	88.715.410			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.05.0 2.03.0 9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan pemerintahan umum yang dihasilkan (rekom)					1	91.700.345	1	88.715.410	100,00	96,74	1	88.715.410			
5.05.0 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi yang Ditindak Lanjuti (%)					100	111.257.950		109.576.100	0,00	98,49	0	109.576.100			
5.05.0 2.04.0 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi yang terjaring dalam inovasi daerah Kabupaten Madiun (inovasi)					20	111.257.950	43	109.576.100	215,00	98,49	43	109.576.100			
		Jumlah Hasil-Hasil Kelitbangan yang Dipublikasikan melalui jurnal (jurnal)					10		10		100,00	0,00	10				
5.05	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH																Inspektorat
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP PD	86	15.013.444.353			80,01	5.603.165.145	80,01	5.272.097.352	100,00	0,00	80,01	5.272.097.352	93,03	35,12	
		Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Sekretariat PD	90				77		80		103,90	0,00	80	0	88,89		
1.01.01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan (%)					100	21.015.500	100	19.810.000	100,00	94,26	100	19.810.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja					8	21.015.500	8	19.810.000	100,00	94,26	8	19.810.000			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan (%)					100	4.208.361.410	100	3.991.916.803	100,00	94,86	100	3.991.916.803			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjagannya (orang)					45	4.208.361.410	45	3.991.916.803	100,00	94,86	45	3.991.916.803			
I.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi (%)					100	245.884.500	100	190.105.200	100,00	77,31	100	190.105.200			
I.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (orang)					30	245.884.500	30	190.105.200	100,00	77,31	30	190.105.200			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang terpenuhi (%)					100	478.782.662	100	454.444.280	100,00	94,92	100	454.444.280			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia (%)					100	6.216.100	100	245.000	100,00	3,94	100	245.000			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (unit)					8	57.618.670	8	55.819.500	100,00	96,88	8	55.819.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia (buah)					36	18.048.640	36	16.864.025	100,00	93,44	36	16.864.025			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tercukupi (bulan)					12	85.322.441	12	83.177.465	100,00	97,49	12	83.177.465			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia (buah)					3	15.255.613	3	12.818.773	100,00	84,03	3	12.818.773			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tercukupi (bulan)					12	5.262.198	12	3.652.000	100,00	69,40	12	3.652.000			
I.01.01.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (kali)					12	25.579.000	12	24.649.500	100,00	96,37	12	24.649.500			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan (kali)					60	265.480.000	60	257.218.017	100,00	96,89	60	257.218.017			
		Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan (kali)					310		310		100,00		310				
I.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi (%)					100	112.751.795	100	110.935.000	100,00	98,39	100	110.935.000			
I.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia (unit)					5	112.751.795	5	110.935.000	100,00	98,39	5	110.935.000			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tercukupi (%)						356.041.928		332.819.602	0,00	93,48	0	332.819.602			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi					12	5.387.500	12	1.679.000	100,00	31,16	12	1.679.000			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi (bulan)					12	120.574.140	12	103.340.208	100,00	85,71	12	103.340.208			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia (buah)					3	230.080.288	3	227.800.394	100,00	99,01	3	227.800.394			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi (%)					100	180.327.350	100	172.066.467	100,00	95,42	100	172.066.467			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (unit)					6	139.227.350	6	132.648.867	100,00	95,28	6	132.648.867			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara (unit)					60	41.100.000	60	39.417.600	100,00	95,91	60	39.417.600			
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase DPD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP memuaskan (unit)	100	1.846.471.474			80	814.344.271	30	736.292.778	37,50	90,42	30	736.292.778	30,00	39,88	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (%)</i>	100				90		90		100,00		90		90,00		
6.01.0 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Persentase PKPT yang dilaksanakan (%)</i>					100	701.328.671	100	646.997.178	100,00	92,25	100	646.997.178			
6.01.0 2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	<i>Jumlah OPD yang dinilai SAKIP (OPD)</i>					53	68.437.146	45	65.314.778	84,91	95,44	45	65.314.778			
6.01.0 2.01.0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen LHP yang terbit (dokumen)</i>					50	427.900.000	50	401.650.000	100,00	93,87	50	401.650.000			
6.01.0 2.01.0 3	Reviu Laporan Kinerja	<i>Jumlah Dokumen Riviur yang Terbit (dokumen)</i>					2	42.200.231	2	33.125.520	100,00	78,50	2	33.125.520			
6.01.0 2.01.0 4	Reviu Laporan Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Riviur yang Terbit (dokumen)</i>					1	32.202.255	1	31.122.880	100,00	96,65	1	31.122.880			
6.01.0 2.01.0 5	Pengawasan Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Desa yang Terbit (dokumen)</i>					60	44.298.650	60	40.345.500	100,00	91,08	60	40.345.500			
6.01.0 2.01.0 6	Kerjasama Pengawasan Internal	<i>Jumlah OPD yang dievaluasi (OPD)</i>					10	24.965.039	10	17.949.000	100,00	71,90	10	17.949.000			
6.01.0 2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti (Rekomendasi)</i>					93	61.325.350	93	57.489.500	100,00	93,75	93	57.489.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
		<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal (APIP) yang ditindaklanjuti (rekam)</i>					90		90		100,00		90				
6.01.0 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<i>Persentase PKPT yang dilaksanakan (%)</i>					100	113.015.600	100	89.295.600	100,00	79,01	100	89.295.600			
6.01.0 2.02.0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	<i>Persentase kerugian negara/daerah yang telah selesai (%)</i>					80	23.020.800	90	4.667.500	112,50	20,28	90	4.667.500			
6.01.0 2.02.0 2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	<i>Jumlah Kasus Pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti (kasus)</i>					12	89.994.800	12	84.628.100	100,00	94,04	12	84.628.100			
6.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Level Kapabilitas APIP atau Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan</i>	3	1.790.238.066			3	355.599.358	3	334.051.057	100,00	93,94	3	334.051.057	100,00	18,66	
		<i>Persentase Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku (%)</i>	100				100		100		100,00		100		100,00		
6.01.0 3.01	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Level Kapabilitas APIP</i>					3	99.993.000	3	93.372.000	100,00	93,38	3	93.372.000			
6.01.0 3.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan	<i>Jumlah Kebijakan Teknis yang terbit (kebijakan)</i>					1	99.993.000	1	93.372.000	100,00	93,38	1	93.372.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.01.0 3.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Persentase OPD yang dilakukan Pendampingan dan asistensi (%)</i>					50	255.606.358	50	240.679.057	100,00	94,16	50	240.679.057			
6.01.0 3.02.0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbit (dokumen)</i>					4	27.909.300	4	25.102.500	100,00	89,94	4	25.102.500			
6.01.0 3.02.0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Dokumen Penilaian Reformasi Birokrasi yang Terbit (dokumen)</i>					1	28.432.800	1	24.724.700	100,00	86,96	1	24.724.700			
6.01.0 3.02.0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Jumlah Unit Pelayanan yang Terawasi (unit)</i>					60	181.278.708	60	173.538.753	100,00	95,73	60	173.538.753			
6.01.0 3.02.0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<i>Jumlah OPD yang sudah Membangun Zona Integritas (OPD)</i>					5	17.985.550	5	17.313.104	100,00	96,26	5	17.313.104			
5.06	UNSUR KEWILAYAHAN																Kecamatan Dolopo
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	86	13.453.430.775			12	3.990.520.760	12	3.795.790.390	100,00	95,12	12	3.795.790.390	13,95	28,21	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
	DAERAH KAB / KOTA	Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	90												0,00		
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan (%)					12	3.498.507.041	12	3.359.514.857	100,00	96,03	12	3.359.514.857			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya (bulan)					12	3.498.507.041	12	3.359.514.857	100,00	96,03	12	3.359.514.857			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (bulan)					12	93.828.374	12	82.170.500	100,00	87,58	12	82.170.500			
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik (bulan)					12	5.324.565	12	5.324.300	100,00	100,00	12	5.324.300			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (bulan)					12	6.802.800	12	6.802.800	100,00	100,00	12	6.802.800			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (bulan)					12	31.393.709	12	28.986.100	100,00	92,33	12	28.986.100			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)					12	5.677.300	12	5.677.300	100,00	100,00	12	5.677.300			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan)					12	1.740.000	12	1.740.000	100,00	100,00	12	1.740.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bulan)</i>					12	42.890.000	12	33.640.000	100,00	78,43	12	33.640.000			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia (buah)</i>					4	23.451.835	4	23.375.000	100,00	99,67	4	23.375.000			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Tersedianya kebutuhan Peralatan dan mesin Kantor (unit)</i>					4	23.451.835	4	23.375.000	100,00	99,67	4	23.375.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)</i>					12	81.674.090	12	78.505.759	100,00	96,12	12	78.505.759			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya jasa komunikasi dan sumberdaya air (bulan)</i>					12	16.768.720	12	13.600.399	100,00	81,11	12	13.600.399			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)</i>					12	64.905.370	12	64.905.360	100,00	100,00	12	64.905.360			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan (bulan)</i>					12	124.470.024	12	84.812.324	100,00	68,14	12	84.812.324			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					12	68.590.780	12	58.972.374	100,00	85,98	12	58.972.374			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (bulan)</i>					12	7.982.250	12	7.982.250	100,00	100,00	12	7.982.250			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (bulan)</i>					12	47.896.994	12	17.857.700	100,00	37,28	12	17.857.700			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	100	671.756.483			4	28.086.000	4	28.086.000	100,00	100,00	4	28.086.000	4,00	4,18	
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan (kali)</i>					4	28.086.000	4	28.086.000	100,00	100,00	4	28.086.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan (kali)</i>					4	28.086.000	4	28.086.000	100,00	100,00	4	28.086.000			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>	100	2.889.700.944			6	17.303.750	6	17.303.750	100,00	100,00	6	17.303.750	6,00	0,60	
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa (kali)</i>					6	10.583.750	6	10.583.750	100,00	100,00	6	10.583.750			
7.01.03.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan (kali)</i>					6	10.583.750	6	10.583.750	100,00	100,00	6	10.583.750			
7.01.03.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (kegiatan)</i>					1	6.720.000	1	6.720.000	100,00	100,00	1	6.720.000			
7.01.03.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Terlaksananya Simulasi Peran Kader PKK dalam Pencegahan Stunting (simulasi)</i>					1	6.720.000	1	6.720.000	100,00	100,00	1	6.720.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			3	79.378.400	3	78.713.000	100,00	99,16	3	78.713.000	3,00	162,48	
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (kali)</i>					3	79.378.400	3	78.713.000	100,00	99,16	3	78.713.000			
7.01.04.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di wilayah Kec.	<i>Terlaksananya Patroli, posko Yustisi dalam Rangka Penguatan Penangan Covid-19 (kali)</i>					3	75.125.000,00	3	74.463.000	100,00	99,12	3	74.463.000			
7.01.04.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Kesos (kali)</i>					1	4.253.400	1	4.250.000	100,00	99,92	1	4.250.000			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	54.296.930			1	6.119.200	1	5.894.200	100,00	96,32	1	5.894.200	1,00	10,86	
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana (tahun)</i>					1	6.119.200	1	5.894.200	100,00	96,32	1	5.894.200			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 5.01.0 2	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Trantib dan Peringatan Hari Besar Nasional</i>					1	6.119.200	1	5.894.200	100,00	96,32	1	5.894.200			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	166.083.750			1	37.702.046	1	37.415.000	100,00	99,24	1	37.415.000	1,00	22,53	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</i>					1	37.702.046	1	37.415.000	100,00	99,24	1	37.415.000			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa (desa)</i>					9	37.702.046	9	37.415.000	100,00	99,24	9	37.415.000			
																	Kecamatan Madiun
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)</i>	100	11.456.066.125			1	3.502.257.482	1	3.120.384.948	100,00	89,10	1	3.120.384.948	1,00	27,24	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	205.510	1	0	100,00	0,00	1	0			
1.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)					1	205.510	1	0	100,00	0,00	1	0			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1	3.143.885.317	1	2.818.774.105	100,00	89,66	1	2.818.774.105			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1	3.143.885.317	1	2.818.774.105	100,00	89,66	1	2.818.774.105			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					1	105.406.537	1	75.379.950	100,00	71,51	1	75.379.950			
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1	2.446.000	1	1.879.000	100,00	76,82	1	1.879.000			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					1	4.750.000	1	4.232.000	100,00	89,09	1	4.232.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					1	6.762.815	1	2.445.800	0,00	36,17	1	2.445.800			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan					1	31.478.160	1	19.908.900	100,00	63,25	1	19.908.900			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					1	17.939.562	1	6.609.250	100,00	36,84	1	6.609.250			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan					1	1.980.000	1	1.885.000	100,00	95,20	1	1.885.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	40.050.000	1	38.420.000	100,00	95,93	1	38.420.000			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1	42.831.050	1	42.295.000	100,00	98,75	1	42.295.000			
1.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan					1	19.964.300	1	19.635.000	100,00	98,35	1	19.635.000			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					1	22.866.750	1	22.660.000	100,00	99,10	1	22.660.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>					1	121.652.958	1	115.121.133	100,00	94,63	1	115.121.133			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan</i>					1	36.026.514	1	29.494.701	100,00	81,87	1	29.494.701			
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>					1	85.626.444	1	85.626.432	100,00	100,00	1	85.626.432			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintahan Daerah</i>					1	88.276.110	1	68.814.760	100,00	77,95	1	68.814.760			
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>					1	71.106.710	1	51.929.760	100,00	73,03	1	51.929.760			
I.01.01.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>					1	17.169.400	1	16.885.000	100,00	98,34	1	16.885.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100	920.103.483			1	8.020.000	1	8.004.300	100,00	99,80	1	8.004.300	1,00	0,87	
7.01.02 .02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakann oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakann oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>					1	8.020.000	1	8.004.300	100,00	99,80	1	8.004.300			
7.01.02 .02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>					1	8.020.000	1	8.004.300	100,00	99,80	1	8.004.300			
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>	100	1.380.544.875			1	20.896.350	1	18.556.600	100,00	88,80	1	18.556.600	1,00	1,34	
7.01.0 3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					1	13.874.100	1	13.290.100	100,00	95,79	1	13.290.100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 3.01.0 2	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan</i>					1	2.865.000	1	2.431.000	100,00	84,85	1	2.431.000			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kerja Kecamatan</i>					1	11.009.100	1	10.859.100	100,00	98,64	1	10.859.100			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>					1	7.022.250	1	5.266.500	100,00	75,00	1	5.266.500			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan</i>					1	2.645.000	1	1.786.500	100,00	67,54	1	1.786.500			
7.01.0 3.03.0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>					1	4.377.250	1	3.480.000	100,00	79,50	1	3.480.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			1	65.950.000	1	40.316.400	100,00	61,13	1	40.316.400	1,00	83,22	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							65.950.000		40.316.400							
7.01.04.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>					1	65.950.000	1	40.316.400	100,00	61,13	1	40.316.400			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	32.616.080			1	8.791.800	1	7.353.000	100,00	83,63	1	7.353.000	1,00	22,54	
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>					1	8.791.800	1	7.353.000	100,00	83,63	1	7.353.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 5.01.0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Orang Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>					1	5.841.800	1	5.648.000	100,00	96,68	1	5.648.000			
7.01.0 5.01.0 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	<i>Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional</i>					1	2.950.000	1	1.705.000	100,00	57,80	1	1.705.000			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	477.856.811			1	53.339.500	1	43.591.750	100,00	81,73	1	43.591.750	1,00	9,12	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					1	53.339.500	1	43.591.750	100,00	81,73	1	43.591.750			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>						891.700		872.300	100,00	97,82		872.300			
7.01.0 6.01.0 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>						2.735.000		500.000	100,00	18,28		500.000			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>						42.643.800		37.949.200	100,00	88,99		37.949.200			
7.01.0 6.01.0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>						2.735.000		0	100,00	0,00		0			
7.01.0 6.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>						4.334.000		4.270.250	100,00	98,53		4.270.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	Kecamatan Wungu
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	15.185.598.754			A	251.119.321	A	224.500.747	0,00	89,40	0	224.500.747	0,00	1,48	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	90				90		85		94,44		85		94,44		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan (%)					100	3.898.204.314	100	3.205.668.736	100,00	82,23	100	3.205.668.736			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					12	3.898.204.314	12	3.205.668.736	100,00	82,23	12	3.205.668.736			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					1	91.016.746	1	83.776.919	100,00	92,05	1	83.776.919			
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi					1	5.070.000	1	5.059.000	100,00	99,78	1	5.059.000			
1.01.01.06.02	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi					1	22.029.572	1	21.799.189	100,00	98,95	1	21.799.189			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang terpenuhi					1	9.938.225	1	9.925.630	100,00	99,87	1	9.925.630			
I.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi					1	6.583.949	1	6.580.500	100,00	99,95	1	6.580.500			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terpenuhi					1	47.395.000	1	40.412.600	100,00	85,27	1	40.412.600			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	86.752.005	12	80.459.188	100,00	92,75	12	80.459.188			
I.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar					12	22.461.709	12	16.217.040	100,00	72,20	12	16.217.040			
I.01.01.08.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor					12	64.290.296	12	64.242.148	100,00	99,93	12	64.242.148			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					1	73.350.570	1	60.264.640	100,00	82,16	1	60.264.640			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terbayarkan</i>					1	73.350.570	1	60.264.640	100,00	82,16	1	60.264.640			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase terselenggaranya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)</i>	100	48.445.313			100	50.000.000	100	49.947.200	100,00	99,89	100	49.947.200	100,00	103,10	
7.01.04.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	<i>terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>					1	50.000.000	1	49.947.200	100,00	99,89	1	49.947.200			
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	<i>persentase terselenggaranya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>					1	50.000.000	1	49.947.200	100,00	99,89	1	49.947.200			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)</i>	100	48.445.313			100	1.405.500	100	744.000	100,00	52,93	100	744.000	100,00	1,54	
7.01.0 5.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	<i>terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</i>					1	1.405.500	1	744.000	100,00	52,93	1	744.000			
7.01.0 5.01.0 2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	<i>terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</i>					1	1.405.500	1	744.000	100,00	52,93	1	744.000			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)</i>	100	391.038.807			100	121.402.250	100	100.539.700	100,00	82,82	100	100.539.700	100,00	25,71	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<i>terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan terselenggaranya koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>					1	121.402.250	1	100.539.700	100,00	82,82	1	100.539.700			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<i>terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa</i>					1	15.741.950	1	13.332.700	100,00	84,70	1	13.332.700			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	<i>terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>					1	54.000.000	1	38.762.000	100,00	71,78	1	38.762.000			
7.01.0 6.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	<i>terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>					1	51.660.300	1	48.445.000	100,00	93,78	1	48.445.000			
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayann publik yang terselenggara (%)</i>	100	35.417.360			100	1.405.500	100	744.000	100,00	52,93	100	744.000	100,00	2,10	
7.01.02 .02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	<i>terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</i>					1	1.405.500	1	744.000	100,00	52,93	1	744.000			
7.01.02 .02.03	Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	<i>meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</i>					1	1.405.500	1	744.000	100,00	52,93	1	744.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terselenggara (%)</i>	100	2.769.893.942			100	32.110.300	100	20.379.000	100,00	63,47	100	20.379.000	100,00	0,74	
7.01.03.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	<i>terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>					1	32.110.300	1	20.379.000	100,00	63,47	1	20.379.000			
7.01.03.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	<i>meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</i>					1	32.110.300	1	20.379.000	100,00	63,47	1	20.379.000			
																	Kecamatan Kebonsari
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (%)</i>	100	6.166.612.894			100	1.844.154.458	98	1.736.805.022	98,00	94,18	98	1.736.805.022	98,00	28,16	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>					14	1.491.556	14	1.337.300	100,00	89,66	14	1.337.300			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku					14	1.491.556	14	1.337.300	100,00	89,66	14	1.337.300			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji pegawai yang dibayar					100	1.600.250.574	100	1.508.916.125	100,00	94,29	100	1.508.916.125			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji pegawai yang terpenuhi					100	1.600.250.574	100	1.508.916.125	100,00	94,29	100	1.508.916.125			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum yang dipenuhi					12	51.978.328	12	51.607.447	100,00	99,29	12	51.607.447			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat penerangan kantor yang tersedia					12	3.741.659	12	3.731.535	100,00	99,73	12	3.731.535			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang tersedia					12	30.112.865	12	30.112.857	100,00	100,00	12	30.112.857			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia					12	6.184.272	12	6.184.145	100,00	100,00	12	6.184.145			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak, penggandaan dan suvenir yang tersedia					12	7.979.532	12	7.978.910	100,00	99,99	12	7.978.910			
I.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.980.000	12	1.800.000	0,00	90,91	12	1.800.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia</i>					12	1.980.000	12	1.800.000	100,00	90,91	12	1.800.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Mamin rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia</i>					12	90.990.400	12	84.120.150	100,00	92,45	12	84.120.150			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Peralatan kantor yang tersedia</i>					6	38.492.100	6	38.324.000	100,00	99,56	6	38.324.000			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Peralatan kantor yang tersedia</i>					6	38.492.100	6	38.324.000	100,00	99,56	6	38.324.000			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>					12	97.415.580	12	87.943.985	100,00	90,28	12	87.943.985			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Listrik, Air dan telephone yang tercukupi</i>					12	36.464.080	12	35.443.985	100,00	97,20	12	35.443.985			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tenaga Kerja Non ASN siap pakai</i>					12	60.951.500	12	52.500.000	100,00	86,13	12	52.500.000			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</i>					100	73.045.875	100	72.910.685	0,00	99,81	100	72.910.685			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai</i>					12	58.340.095	12	58.204.905	100,00	99,77	12	58.204.905			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Sarana pendukung kantor siap pakai</i>					10	6.483.280	10	6.483.280	100,00	100,00	10	6.483.280			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi</i>					2	8.222.500	2	8.222.500	100,00	100,00	2	8.222.500			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik (%)</i>	100	9.416.026			100	6.461.500	100	6.456.500	100,00	99,92	100	6.456.500	100,00	68,57	
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan hasil survey masyarakat</i>					4	6.461.500	4	6.456.500	100,00	99,92	4	6.456.500			
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan hasil survey masyarakat</i>					4	6.461.500	4	6.456.500	100,00	99,92	4	6.456.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (%)</i>	100	92.331.831			100	19.276.950	100	18.645.660	100,00	96,73	100	18.645.660	100,00	20,19	
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah kegiatan bidang, olahraga, kepemudaan, kesehatan, keagamaan, Bansos dan lintas sektor yang terfasilitasi</i>					5	19.276.950	5	18.645.660	100,00	96,73	5	18.645.660			
7.01.03.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah kegiatan bidang g olahraga, kepemudaan, kesehatan, keagamaan, Bansos dan lintas sektor yang terfasilitasi</i>					5	19.276.950	5	18.645.660	100,00	96,73	5	18.645.660			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteramanan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			100	64.864.000	100	64.359.300	100,00	99,22	100	64.359.300	100,00	132,85	
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Koordinasi yang dilaksanakan</i>					100	64.864.000	100	64.359.300	100,00	99,22	100	64.359.300			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan					6	50.000.000	6	49.971.300	100,00	99,94	6	49.971.300			
7.01.04.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan					5	14.864.000	4	14.388.000	80,00	96,80	4	14.388.000			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	51.827.449			100	8.915.580	100	7.791.600	100,00	87,39	100	7.791.600	100,00	15,03	
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi kampung pesilat, kegiatan PHBN					2	8.915.580	1	7.791.600	50,00	87,39	1	7.791.600			
7.01.05.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi kampung pesilat, kegiatan PHBN					2	8.915.580	1	7.791.600	50,00	87,39	1	7.791.600			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	194.997.070			100	60.322.800	100	55.134.770	100,00	91,40	100	55.134.770	100,00	28,27	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang difasilitasi</i>					14	60.322.800	14	55.134.770	100,00	91,40	14	55.134.770			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>					14	6.322.800	14	6.138.000	100,00	97,08	14	6.138.000			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>					14	54.000.000	14	48.996.770	100,00	90,73	14	48.996.770			
																	Kecamatan Wonoasri
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik sesuai ketentuan (%)</i>		6.278.694.733			100	5.000.000	100	4.966.500	100,00	99,33	100	4.966.500	0,00	0,08	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai peraturan</i>					14	1.985.200	14	1.985.000	100,00	99,99	14	1.985.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					12	1.985.200	12	1.985.000		99,99		1.985.000			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan</i>					100	1.731.180.530	100	1.578.578.213	100,00	91,19	100	1.578.578.213			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					10	1.731.180.530	10	1.578.578.213	100,00	91,19	10	1.578.578.213			
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan umum yang tersedia</i>					100	93.361.669	100	87.718.921	100,00	93,96	100	87.718.921			
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>					12	3.423.800	12	3.423.500	100,00	99,99	12	3.423.500			
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>					2	16.190.515	2	16.087.500	100,00	99,36	2	16.087.500			
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>					12	3.902.500	12	3.902.500	100,00	100,00	12	3.902.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12	23.197.989	12	23.193.500	100,00	99,98	12	23.193.500			
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12	6.478.400	12	6.477.500	100,00	99,99	12	6.477.500			
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					24	3.675.000	24	3.675.000	100,00	100,00	24	3.675.000			
1.3.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12	4.925.000	12	4.920.500	100,00	99,91	12	4.920.500			
1.3.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	31.568.465	12	26.038.921	100,00	82,48	12	26.038.921			
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia					7	9.064.275	7	9.064.000	100,00	100,00	7	9.064.000			
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia					7	9.064.275	7	9.064.000	100,00	100,00	7	9.064.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupirah yang tercukupirah yang</i>					100	102.720.254	100	97.306.834	100,00	94,73	100	97.306.834			
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>					12	20.093.810	12	14.680.402	100,00	73,06	12	14.680.402			
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>					12	82.626.444	12	82.626.432		100,00		82.626.432			
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</i>					100	57.542.735	100	55.984.946	100,00	97,29	100	55.984.946			
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>					7	44.727.680	7	43.791.946	100,00	97,91	7	43.791.946			
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>					10	3.560.000	10	2.976.500	100,00	83,61	10	2.976.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	9.255.055	1	9.216.500	100,00	99,58	1	9.216.500			
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							5.000.000		4.966.500		99,33		4.966.500			
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas					4	5.000.000	4	4.966.500	100,00	99,33	4	4.966.500			
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana					4	5.000.000	4	4.966.500	100,00	99,33	4	4.966.500			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>	100	93.901.907			100	28.546.800	100	28.381.000	100,00	99,42	100	28.381.000	100,00	30,22	
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>					100	12.648.800	100	12.606.500	100,00	99,67	100	12.606.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 3.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah rapat koordinasi yang terselenggara</i>					3	2.121.500	3	2.086.500	100,00	98,35	3	2.086.500			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksana</i>					5	10.527.300	5	10.520.000	100,00	99,93	5	10.520.000			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah kader PKK yang aktif dan terampil</i>					10	15.898.000	10	15.774.500	100,00	99,22	10	15.774.500			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan</i>					2	4.989.600	2	4.945.500	100,00	99,12	2	4.945.500			
7.01.0 3.03.0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan</i>					1	4.307.200		4.285.500	0,00	99,50	0	4.285.500			
7.01.0 3.03.0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<i>Jumlah pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan</i>					2	4.169.000	2	4.133.000	100,00	99,14	2	4.133.000			
7.01.0 3.03.0 5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<i>Jumlah kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dilaksanakan</i>					1	2.432.200	1	2.410.500	100,00	99,11	1	2.410.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	48.445.313			100	100.332.930	100	100.033.000	100,00	99,70	100	100.033.000	100,00	206,49	
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana					100	100.332.930	100	100.033.000	100,00	99,70	100	100.033.000			
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang terlaksana					5	90.624.930	5	90.325.000	100,00	99,67	5	90.325.000			
		Jumlah kegiatan penanganan COVID-19 yang terlaksana					4		4		100,00		4				
7.01.04.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana					5	9.708.000	5	9.708.000	100,00	100,00	5	9.708.000			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	61.512.500			100	5.933.400	100	5.902.000	100,00	99,47	100	5.902.000	100,00	9,59	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 5.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana</i>					100	5.933.400	100	5.902.000	100,00	99,47	100	5.902.000			
7.01.0 5.01.0 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional	<i>Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan yang dilaksanakan</i>					2	5.933.400	2	5.902.000	100,00	99,47	2	5.902.000			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	183.811.653			100	58.447.500	100	57.039.750	100,00	97,59	100	57.039.750	100,00	31,03	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>					10	58.447.500	10	57.039.750	100,00	97,59	10	57.039.750			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan yang terlaksana</i>					3	6.196.500	3	6.187.500	100,00	99,85	3	6.187.500			
		<i>Jumlah rekomendasi APBDes yang terverifikasi sesuai dengan peraturan</i>					100		100		100,00		100				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 6.01.0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan asset desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset						1.251.000		1.240.000	0,00	99,12	0	1.240.000			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Jumlah penyelenggaraan pilkades dan pengisian perangkat desa yang terlaksana					6	51.000.000	6	49.612.250	100,00	97,28	6	49.612.250			
																	Kecamatan Saradan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Terselenggaranya Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)</i>		8.364.142.925			100	2.969.772.108	100	2.650.425.551	100,00	89,25	100	2.650.425.551	0,00	31,69	
1.01.01.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					1	2.475.821.086	1	2.172.993.616	100,00	87,77	1	2.172.993.616			
1.01.01.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>					1	2.475.821.086	1	2.172.993.616	100,00	87,77	1	2.172.993.616			
1.01.01.06	Administrasi umum perangkat daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>					1	136.463.129	1	128.354.448	100,00	94,06	1	128.354.448			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	<i>Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik</i>					1	12.970.100	1	11.892.410	100,00	91,69	1	11.892.410			
1.01.01.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>					1	15.048.550	1	15.025.000	100,00	99,84	1	15.025.000			
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>					1	93.484.929	1	91.134.548	100,00	97,49	1	91.134.548			
1.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>					1	13.045.550	1	8.402.490	100,00	64,41	1	8.402.490			
1.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>					1	1.914.000	1	1.900.000	100,00	99,27	1	1.900.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					1	131.920.801	1	130.971.820	100,00	99,28	1	130.971.820			
1.01.01.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>					1	81.724.000	1	80.294.376	100,00	98,25	1	80.294.376			
1.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	<i>Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air</i>					1	14.974.000	1	13.544.376	100,00	90,45	1	13.544.376			
1.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					1	66.750.000	1	66.750.000	100,00	100,00	1	66.750.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	15.627.800	1	15.275.000	100,00	97,74	1	15.275.000			
7.01.02.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	1.875.000	1	1.875.000	100,00	100,00	1	1.875.000			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							34.092.800		33.739.000		98,96		33.739.000			
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	1.875.000	1	1.875.000	100,00	100,00	1	1.875.000			
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	1.875.000	1	1.875.000	100,00	100,00	1	1.875.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat yang berkualitas					100	32.217.800	100	31.864.000	100,00	98,90	100	31.864.000			
7.01.0 2.02. 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset						15.627.800		15.275.000		97,74		15.275.000			
7.01.0 2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti					5	16.590.000	5	16.589.000	100,00	99,99	5	16.589.000			
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	61.512.500			4	4.850.000	4	3.707.200	100,00	76,44	4	3.707.200	4,00	6,03	
7.01.0 3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4.850.000		3.707.200		76,44		3.707.200			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan					4	4.850.000	4	3.707.200	100,00	76,44	4	3.707.200			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			3	15.200.000	3	15.190.000	100,00	99,93	3	15.190.000	3,00	31,35	
7.01.04.01	koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>					3	15.200.000	3	15.190.000	100,00	99,93	3	15.190.000			
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Bimtek Satlinmas, Patroli dan Yustisi dalam Rangka Penguatan Penangan Covid-19</i>					2	15.200.000	2	15.190.000	100,00	99,93	2	15.190.000			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	303.663.838			4	14.780.842	4	13.855.400	100,00	93,74	4	13.855.400	4,00	4,56	
7.01.06.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana</i>						102.745.842		92.437.590		89,97		92.437.590			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>					1	37.525.000	1	35.619.640	100,00	94,92	1	35.619.640			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	<i>Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa</i>					1	40.640.000	1	32.262.550	100,00	79,39	1	32.262.550			
7.01.0 6.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan</i>					2	9.800.000	2	9.800.000	100,00	100,00	2	9.800.000			
7.01.0 6.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan</i>					2	14.780.842	2	14.755.400	100,00	99,83	2	14.755.400			
																	Kecamatan Jiwan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan (%)</i>		8.612.517.180			100	9.221.900	100	9.140.000	100,00	99,11	100	9.140.000	0,00	0,11	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku					14	5.400.000	14	5.388.000	100,00	99,78	14	5.388.000			
I.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12	5.400.000	12	5.388.000	100,00	99,78	12	5.388.000			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpeenuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14	2.211.186.556	14	1.990.635.100	100,00	90,03	14	1.990.635.100			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					14	2.211.186.556	14	1.990.635.100	100,00	90,03	14	1.990.635.100			
I.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana					100	8.250.000	100	8.250.000	100,00	100,00	100	8.250.000			
I.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya					1	8.250.000	1	8.250.000	100,00	100,00	1	8.250.000			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum yang dipenuhi					12	87.499.540	12	86.345.340	100,00	98,68	12	86.345.340			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik					12	1.050.000	12	1.040.500	100,00	99,10	12	1.040.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor dan benda pos yang tersedia					12	10.057.500	12	9.990.000	100,00	99,33	12	9.990.000			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					12	7.795.000	12	7.790.590	100,00	99,94	12	7.790.590			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					12	7.065.250	12	6.514.250	100,00	92,20	12	6.514.250			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					12	1.980.000	12	1.800.000	100,00	90,91	12	1.800.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	59.551.790	12	59.210.000	100,00	99,43	12	59.210.000			
I.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia					7	33.791.505	7	33.253.000	100,00	98,41	7	33.253.000			
I.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya kebutuhan Peralatan dan mesin Kantor					7	33.791.505	7	33.253.000	100,00	98,41	7	33.253.000			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	91.499.004	12	87.347.421	100,00	95,46	12	87.347.421			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, Internet dan Telepon yang terpenuhi					12	21.722.560	12	19.520.989	100,00	89,87	12	19.520.989			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	<i>Tenaga Kerja Non ASN siap pakai</i>					12	69.776.444	12	67.826.432	100,00	97,21		67.826.432			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					12	127.011.500	12	126.311.722	100,00	99,45		126.311.722			
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					12	53.567.500	12	53.125.722	100,00	99,18		53.125.722			
I.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>					12	8.444.000	12	8.406.000	100,00	99,55		8.406.000			
I.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>					12	65.000.000	12	64.780.000	100,00	99,66		64.780.000			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							9.221.900		9.140.000		99,11		9.140.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana					2	7.125.900	2	7.105.000	100,00	99,71	2	7.105.000			
7.01.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan desa dalam Musrenbang yang diakomodir dalam pembangunan					30	4.650.000	30	4.635.000	100,00	99,68	30	4.635.000			
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peraturan desa yang tersusun dengan baik					14	2.475.900	14	2.470.000	100,00	99,76	14	2.470.000			
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas					6	2.096.000	6	2.035.000	100,00	97,09	6	2.035.000			
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti					5	2.096.000	5	2.035.000	100,00	97,09	5	2.035.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (%)</i>	100	48.666.845			100	25.280.900	100	25.029.000	100,00	99,00	100	25.029.000	100,00	51,43	
7.01.0 3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>					2	13.033.400	2	12.890.000	100,00	98,90	2	12.890.000			
7.01.0 3.01.0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<i>Jumlah Kader PKK yang terampil</i>					12	11.723.400	12	11.720.000	100,00	99,97	12	11.720.000			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>					2	1.310.000	2	1.170.000	100,00	89,31	2	1.170.000			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara</i>					100	12.247.500	100	12.139.000	100,00	99,11	100	12.139.000			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah kader PKK yang aktif dan terampil</i>					14	12.247.500	14	12.139.000	100,00	99,11	14	12.139.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			100	49.539.700	100	48.646.000	100,00	98,20	100	48.646.000	100,00	100,41	
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i>					100	49.539.700	100	48.646.000	100,00	98,20	100	48.646.000			
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>					6	46.828.000	6	45.941.000	100,00	98,11	6	45.941.000			
7.01.04.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i>					100	2.711.700	100	2.705.000	100,00	99,75	100	2.705.000			
7.01.04.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan</i>					5	2.711.700	5	2.705.000	100,00	99,75	5	2.705.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	56.160.913			100	17.779.100	100	17.594.000	100,00	98,96	100	17.594.000	100,00	31,33	
7.01.0 5.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>					100	17.779.100	100	17.594.000	100,00	98,96	100	17.594.000			
7.01.0 5.01.0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang terselenggara dengan baik</i>					1	11.298.300	1	11.180.000	100,00	98,95	1	11.180.000			
7.01.0 5.01.0 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan keagamaan yang terselenggara</i>					1	5.170.800	1	5.135.000	100,00	99,31	1	5.135.000			
7.01.0 5.01.0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah pertemuan tiga pilar yang terlaksana</i>					2	1.310.000	2	1.279.000	100,00	97,63	2	1.279.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	220.878.931			100	62.091.750	100	61.317.500	100,00	98,75	100	61.317.500	100,00	27,76	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana</i>					100	62.091.750	100	61.317.500	100,00	98,75	100	61.317.500			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>					14	7.350.000	14	7.350.000	100,00	100,00	14	7.350.000			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>					12	53.995.050	12	53.227.500	100,00	98,58	12	53.227.500			
7.01.0 6.01.01 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan</i>					2	746.700	2	740.000	100,00	99,10	2	740.000			
																	Kecamatan Geger
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Terselenggaranya Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>		7.765.579.293			14	2.501.605.255	14	2.386.425.652	100,00	95,40	14	2.386.425.652	0,00	30,73	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					14	2.133.921.029	14	2.043.382.129	100,00	95,76	14	2.043.382.129			
1.01.01.01.01	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>					14	2.133.921.029	14	2.043.382.129	100,00	95,76	14	2.043.382.129			
1.01.01.06	Administrasi umum perangkat daerah	<i>Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>					12	109.091.054	12	96.225.315	100,00	88,21	12	96.225.315			
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	<i>Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik</i>					12	5.999.918	12	5.975.100	100,00	99,59	12	5.975.100			
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>					12	7.222.565	12	7.163.815	100,00	99,19	12	7.163.815			
1.01.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>					12	37.427.421	12	35.271.200	100,00	94,24	12	35.271.200			
1.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>					12	10.584.150	12	10.132.700	100,00	95,73	12	10.132.700			
1.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>					12	1.980.000	12	1.800.000	100,00	90,91	12	1.800.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					12	45.877.000	12	35.882.500	100,00	78,21	12	35.882.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<i>Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>					7	33.619.788	7	33.378.400	100,00	99,28	7	33.378.400			
I.01.01.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	<i>Tersedianya kebutuhan Peralatan dan mesin Kantor</i>					7	33.619.788	7	33.378.400	100,00	99,28	7	33.378.400			
I.01.01.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>					12	94.812.105	12	91.918.758	100,00	96,95	12	91.918.758			
I.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	<i>Tersedianya jasa komunikasi dan sumberdaya air</i>					12	15.207.200	12	14.481.398	100,00	95,23	12	14.481.398			
I.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					12	79.604.905	12	77.437.360	100,00	97,28	12	77.437.360			
I.01.01.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan</i>					12	130.161.279	12	121.521.050	100,00	93,36	12	121.521.050			
I.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					12	63.874.750	12	55.942.770	100,00	87,58	12	55.942.770			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>					12	2.706.400	12	2.563.000	100,00	94,70	12	2.563.000			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>					12	63.580.129	12	63.015.280	100,00	99,11	12	63.015.280			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100	28.547.336			1	20.420.000	1	20.418.000	100,00	99,99	1	20.418.000	1,00	71,52	
7.01.02.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	20.420.000	1	20.418.000	100,00	99,99	1	20.418.000			
7.01.02.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	20.420.000	1	20.418.000	100,00	99,99	1	20.418.000			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>	100	180.358.033			2	47.812.603	2	47.056.004	100,00	98,42	2	47.056.004	2,00	26,09	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 3.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					2	43.980.163	2	43.276.004	100,00	98,40	2	43.276.004			
7.01.0 3.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	<i>Terlaksananya bimtek Verifikasi dan Penyusunan RAB Desa</i>					1	11.239.160	1	10.695.000	100,00	95,16	1	10.695.000			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan</i>					1	32.741.003	1	32.581.004	100,00	99,51	1	32.581.004			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	<i>Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>					1	3.832.440	1	3.780.000	100,00	98,63	1	3.780.000			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	<i>Terlaksananya Simulasi Peran Kader PKK dalam Pencegahan Stunting</i>					1	3.832.440	1	3.780.000	100,00	98,63	1	3.780.000			
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			2	69.185.240	2	68.598.000	100,00	99,15	2	68.598.000	2,00	141,60	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
7.01.04.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>					2	69.185.240	2	68.598.000	100,00	99,15	2	68.598.000			
7.01.04.01.01	Sinergritas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Bimtek Satlinmas, Patroli dan Yustisi dalam Rangka Penguatan Penangan Covid-19</i>					1	63.635.240	1	63.048.000	100,00	99,08	1	63.048.000			
7.01.04.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Kesos</i>					1	5.550.000	1	5.550.000	100,00	100,00	1	5.550.000			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	134.820.022			1	25.365.000	1	25.365.000	100,00	100,00	1	25.365.000	1,00	18,81	
7.01.05.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana</i>					1	25.365.000	1	25.365.000	100,00	100,00	1	25.365.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 5.01.0 2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Trantibdan Peringatan Hari Besar Nasional</i>					1	25.365.000	1	25.365.000	100,00	100,00	1	25.365.000			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	230.948.635			4	69.267.065	4	65.231.000	100,00	94,17	4	65.231.000	4,00	28,24	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</i>					4	69.267.065	4	65.231.000	100,00	94,17	4	65.231.000			
7.01.0 6.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	<i>Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa</i>					1	5.541.640	1	4.680.000	100,00	84,45	1	4.680.000			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>					1	5.754.000	1	5.754.000	100,00	100,00	1	5.754.000			
7.01.0 6.01.0 3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	<i>Terlaksananya bimtek Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Desa</i>					1	4.957.760	1	3.804.000	100,00	76,73	1	3.804.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	<i>Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa</i>					13	53.013.665	13	50.993.000	100,00	96,19	13	50.993.000			
																	Kecamatan Pilangkenceng
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Nilai SAKIP</i>	86	6.357.092.713			80	2.009.546.195		1.854.266.825	0,00	92,27	0	1.854.266.825	0,00	29,17	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi</i>					13	5.614.400	13	5.500.000	100,00	97,96	13	5.500.000			
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>					13	5.614.400	13	5.500.000	100,00	97,96	13	5.500.000			
1.01.01.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>					1	1.734.145.938	1	1.593.251.727	100,00	91,88	1	1.593.251.727			
1.01.01.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	<i>Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan</i>					1	1.734.145.938	1	1.593.251.727	100,00	91,88	1	1.593.251.727			
1.01.01.06	Administrasi umum perangkat daerah	<i>Jumlah pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana</i>					1	157.722.537	1	149.157.500	100,00	94,57	1	149.157.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	<i>Komponen Instalasi listrik yang tersedia</i>					1	6.785.790	1	5.895.000	100,00	86,87	1	5.895.000			
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Alat tulis kantor dan benda pos yang tersedia</i>					1	37.325.840	1	35.321.000	100,00	94,63	1	35.321.000			
1.01.01.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia</i>					12	7.777.000	12	7.630.000	100,00	98,11	12	7.630.000			
1.01.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Bahan Logistik Kantor yang tersedia</i>					12	50.675.307	12	49.625.000	100,00	97,93	12	49.625.000			
1.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Barang cetak, penggandaan dan souvenir yang tersedia</i>					12	11.578.600	12	11.550.000	100,00	99,75	12	11.550.000			
1.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Bahan Bacaan / surat kabar yang tersedia</i>					12	2.310.000	12	2.266.500	100,00	98,12	12	2.266.500			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	<i>Mamin rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia</i>					12	41.270.000	12	36.870.000	100,00	89,34	12	36.870.000			
1.01.01.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>					12	111.868.320	12	106.294.382	100,00	95,02	12	106.294.382			
1.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	<i>Listrik, air telpon yang tersedia</i>					12	24.448.320	12	19.531.166	100,00	79,89	12	19.531.166			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tenaga kerja non Asn siap pakai					12	87.420.000	12	86.763.216	100,00	99,25	12	86.763.216			
1.01.01.16.//	Belanja iuran Jaminan /Asuransi	Iuran asuransi yang dibayarkan					3	195.000	1	63.216	33,33	32,42	1	63.216			
1.01.01.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi					12	85.377.255	12	82.444.399	100,00	96,56	12	82.444.399			
1.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai					12	70.869.025	12	68.644.399	100,00	96,86	12	68.644.399			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Sarana pendukung kantor siap pakai					12	3.767.500	12	3.100.000	100,00	82,28	12	3.100.000			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Gedung dan Bangunan siap pakai					12	10.740.730	12	10.700.000	100,00	99,62	12	10.700.000			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan (%)</i>	100	37.634.578			6	12.236.400	6	11.660.000	100,00	95,29	6	11.660.000	6,00	30,98	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas					6	12.236.400	6	11.660.000	100,00	95,29	6	11.660.000			
7.01.02.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan dan hasil survey masyarakat					6	12.236.400	6	11.660.000	100,00	95,29	6	11.660.000			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>	100	138.252.973			100	57.346.910	100	55.210.000	100,00	96,27	100	55.210.000	100,00	39,93	
7.01.03.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	<i>Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>					100	51.392.860	100	49.330.000	100,00	95,99	100	49.330.000			
7.01.03.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	<i>Jumlah rapat koordinasi yang terselenggara</i>					2	19.072.320	2	17.600.000	100,00	92,28	2	17.600.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 3.01.0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah fasilitasi lomba desa yang terlaksana					1	1.988.580	1	1.890.000	100,00	95,04	1	1.890.000			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pendapatan yatim piatu, Lansia, ODGJ, Keluarga prasejahtera dan bintek yang terlaksana					1	30.331.960	1	29.840.000	100,00	98,38	1	29.840.000			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara					100	5.954.050	100	5.880.000	100,00	98,76	100	5.880.000			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Kader PKK yang aktif dan terampil					1	5.954.050	1	5.880.000	100,00	98,76	1	5.880.000			
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	48.445.313			100	71.288.870	100	68.864.000	100,00	96,60	100	68.864.000	100,00	142,15	
7.01.04 .01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana					100	71.288.870	100	68.864.000	100,00	96,60	100	68.864.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan					3	71.288.870	3	68.864.000	100,00	96,60	3	68.864.000			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	45.432.333			100	5.837.510	100	5.550.000	100,00	95,07	100	5.550.000	100,00	12,22	
7.01.05.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	<i>Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana</i>					100	5.837.510	100	5.550.000	100,00	95,07	100	5.550.000			
7.01.05.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang terselenggarakan dengan baik</i>					2	196.500	0	0	0,00	0,00	0	0			
7.01.05.01.04	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional	<i>Jumlah fasilitasi kampung pesilat yang terselenggara</i>					2	5.641.010	2	5.550.000	100,00	98,39	2	5.550.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	189.797.572			100	37.797.375	100	37.290.000	100,00	98,66	100	37.290.000	100,00	19,65	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</i>					100	37.797.375	100	37.290.000	100,00	98,66	100	37.290.000			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<i>Jumlah Desa yang tertib administrasi</i>					18	7.532.000	18	7.470.000	100,00	99,18	18	7.470.000			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan kepala Desa</i>					1	30.265.375	1	29.820.000	100,00	98,53	1	29.820.000			
																	Kecamatan Dagangan
1.01.01	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Kepuasan ASN Terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (%)</i>	90	8.086.156.597			100	2.606.998.454	98	2.343.008.635	98,00	89,87	98	2.343.008.635	108,89	28,98	
1.01.01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentasi Gaji & Tunjangan ASN yang terpenuhi</i>					100	2.345.301.049	100	2.085.760.930	100,00	88,93	100	2.085.760.930			
1.01.01. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Persentasi Gaji & Tunjangan ASN yang terpenuhi</i>					100	2.345.301.049	100	2.085.760.930	100,00	88,93	100	2.085.760.930			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia					100	77.805.638	100	76.655.260	100,00	98,52	100	76.655.260			
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Alat Penerangan Kantor yang tersedia</i>					12	2.419.200	12	2.419.200	100,00	100,00	12	2.419.200			
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan RumahTangga	<i>Peralatan Kebersihan yang tersedia</i>					12	1.578.400	12	1.578.400	100,00	100,00	12	1.578.400			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan kebutuhan lain, Natura dan makanan minuman</i>					12	28.488.900	12	28.479.910	100,00	99,97	12	28.479.910			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Barang cetak & Penggandaan yang tersedia</i>					12	3.853.138	12	3.852.500	100,00	99,98	12	3.852.500			
1.01.01.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	<i>Bahan cetak banner, karangan bunga, souvenir yang tersedia</i>					12	3.846.000		3.385.250	0,00	88,02	0	3.385.250			
1.01.01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu						0			0	0,00	0	0				
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana (Perjalanan biasa dan perjalanan dalam kota)</i>					12	37.620.000	12	36.940.000	100,00	98,19	12	36.940.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>					7	15.735.445	7	15.664.000	100,00	99,55	7	15.664.000			
1.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Pengadaa Almari Arsip dan Filling Cabinet yang terlaksana</i>					2	6.023.380	2	5.952.100	100,00	98,82	2	5.952.100			
1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Pengadaan Laptop yang terlaksana</i>					1	9.712.065	1	9.711.900	100,00	100,00	1	9.711.900			
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pelaksanaan Penyediaan Jasa</i>					1	58.483.322	1	57.633.341	100,00	98,55	1	57.633.341			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Listrik, Internet dan Telepon yang terpenuhi</i>					12	14.770.100	12	13.920.125	100,00	94,25	12	13.920.125			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tenaga Kerja Non ASN Siap Pakai</i>					12	43.713.222	12	43.713.216	100,00	100,00	12	43.713.216			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang milik Daerah yang terpelihara</i>					10	109.673.000	10	107.295.104	100,00	97,83	10	107.295.104			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai</i>					10	77.578.000	10	75.224.004	100,00	96,97	10	75.224.004			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana pendukung kantor siap pakai					12	7.095.000	12	7.071.100	100,00	99,66	12	7.071.100			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan layak pakai					2	25.000.000	2	25.000.000	100,00	100,00	2	25.000.000			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public (%)</i>	100	37.527.238			100	22.790.000	100	22.790.000	100,00	100,00	100	22.790.000	100,00	60,73	
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan hasil survey Kepuasan masyarakat					4	22.790.000	4	22.790.000	100,00	100,00	4	22.790.000			
7.01.02.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan hasil survey Kepuasan masyarakat					4	22.790.000	4	22.790.000	100,00	100,00	4	22.790.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase terselenggaranya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>					100	21.176.600	100	20.972.800	100,00	99,04	100	20.972.800			
7.01.0 3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi</i>					100	15.410.600	100	15.206.800	100,00	98,68	100	15.206.800			
7.01.0 3.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di desa</i>					4	5.394.000	4	5.394.000	100,00	100,00	4	5.394.000			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Koordinasi Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>					8	10.016.600	8	9.812.800	100,00	97,97	8	9.812.800			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Pelaksanaan Kegiatan PKK dan Bumdes</i>					4	5.766.000	4	5.766.000	100,00	100,00	4	5.766.000			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Pelaksanaan Kegiatan PKK dan Bumdes</i>					4	5.766.000	4	5.766.000	100,00	100,00	4	5.766.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase terselenggaranya program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>					100	66.850.200	100	64.775.450	100,00	96,90	100	64.775.450			
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>					12	66.850.200	12	64.775.450	100,00	96,90	12	64.775.450			
7.01.04.01.02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>					12	66.850.200	12	64.775.450	100,00	96,90	12	64.775.450			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase terselenggaranya program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	30.879.684			100	7.031.040	100	7.028.000	100,00	99,96	100	7.028.000	100,00	22,76	
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>					100	7.031.040	100	7.028.000	100,00	99,96	100	7.028.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 5.01.0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Pelaksanaan Fasilitasi dan koordinasi bidang sosial dan keagamaan</i>					6	5.231.040	6	5.228.000	100,00	99,94	6	5.228.000			
7.01.0 5.01.0 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<i>Tersedianya Umbul Umbul saat Pelaksanaan PHBN / HUT RI</i>					12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	100,00	100,00	12	1.800.000			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	607.221.639			100	160.036.080	100	158.691.175	100,00	99,16	100	158.691.175	100,00	26,13	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Pelaksanaan Fasilitasi</i>					1	160.036.080	1	158.691.175	100,00	99,16	1	158.691.175			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa yang Tertib Administrasi</i>					17	65.048.000	17	64.298.000	100,00	98,85	17	64.298.000			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi pelaksanaan Pilkades</i>					13	51.319.880	13	50.975.175	100,00	99,33	13	50.975.175			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 6.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Desa yang Terasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>					17	43.668.200	17	43.418.000	100,00	99,43	17	43.418.000			
																	Kecamatan Gemarang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			5.736.562.782				2.965.000		2.726.400	0,00	91,95	0	2.726.400	0,00	0,05	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					13	2.965.000	13	2.726.400	100,00	91,95	13	2.726.400			
1.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					13	2.965.000	13	2.726.400	100,00	91,95	13	2.726.400			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					-	1.588.775.228	-	1.360.483.134	0,00	85,63	0	1.360.483.134			
I.01.01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					-	1.588.775.228	-	1.360.483.134	0,00	85,63	0	1.360.483.134			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana					12	155.770.693	12	153.846.800	100,00	98,76	12	153.846.800			
I.01.01.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	69.705.920	12	67.885.000	100,00	97,39	12	67.885.000			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga					12	4.307.710	12	4.304.500	100,00	99,93	12	4.304.500			
I.01.01.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor					12	42.432.063	12	42.377.300	100,00	99,87	12	42.377.300			
I.01.01.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan					12	7.040.000	12	7.010.000	100,00	99,57	12	7.010.000			
I.01.01.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	1.815.000	12	1.800.000	100,00	99,17	12	1.800.000			
I.01.01.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	30.470.000	12	30.470.000	100,00	100,00	12	30.470.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					12	95.384.025	12	92.231.379	100,00	96,69	12	92.231.379			
I.01.01.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>					12	21.484.025	12	20.231.379	100,00	94,17	12	20.231.379			
I.01.01.07.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					12	73.900.000	12	72.000.000	100,00	97,43	12	72.000.000			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					12	74.697.415	12	74.085.125	100,00	99,18	12	74.085.125			
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					12	56.656.370	12	56.559.125	100,00	99,83	12	56.559.125			
I.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>					12	6.242.500	12	5.727.500	100,00	91,75	12	5.727.500			
I.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>					12	11.798.545	12	11.798.500	100,00	100,00	12	11.798.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tersedianya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	58.713.681			1	19.092.756	1	18.902.905	100,00	99,01	1	18.902.905	1,00	32,20	
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan					1	19.092.756	1	18.902.905	100,00	99,01	1	18.902.905			
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Hasil Survey Masyarakat					1	19.092.756	1	18.902.905	100,00	99,01	1	18.902.905			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	107.646.875			2	27.437.445	2	26.171.500	100,00	95,39	2	26.171.500	2,00	24,31	
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa						27.437.445		26.171.500	0,00	95,39	0	26.171.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan dan Terlaksananya Simulasi Peran Kader PKK dalam Pencegahan Stunting</i>					2	27.437.445	2	26.171.500	100,00	95,39	2	26.171.500			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			1	55.172.460	1	55.135.500	100,00	99,93	1	55.135.500	1,00	113,81	
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>					1	55.172.460	1	55.135.500	100,00	99,93	1	55.135.500			
7.01.04.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	<i>Terlaksananya Patroli dan Yustisi dalam Rangka Penguatan Penangan Covid-19</i>					1	55.172.460	1	55.135.500	100,00	99,93	1	55.135.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	15.378.125			2	5.000.000	2	4.882.500	100,00	97,65	2	4.882.500	2,00	31,75	
7.01.0 5.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>					2	5.000.000	2	4.882.500	100,00	97,65	2	4.882.500			
7.01.0 5.01.0 5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Kesos</i>					2	5.000.000	2	4.882.500	100,00	97,65	2	4.882.500			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	166.083.750			2	48.960.000	2	43.856.250	100,00	89,58	2	43.856.250	2,00	26,41	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>					2	48.960.000	2	43.856.250	100,00	89,58	2	43.856.250			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>					1	11.320.480	1	11.280.000	100,00	99,64	1	11.280.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa</i>					4	37.639.520	4	32.576.250	100,00	86,55	4	32.576.250			
																	Kecamatan Sawahan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Terselenggaranya Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</i>		8.032.703.361			14	2.274.930.220	14	2.055.063.742	100,00	90,34	14	2.055.063.742	0,00	25,58	
1.01.01.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					14	1.936.763.834	14	1.730.068.975	100,00	89,33	14	1.730.068.975			
1.01.01.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>					14	1.934.513.834	14	1.728.468.975	100,00	89,35	14	1.728.468.975			
1.01.01.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							2.250.000		1.600.000		71,11		1.600.000			
1.01.01.06	Administrasi umum perangkat daerah	<i>Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>					12	98.876.736	12	95.805.000	100,00	96,89	12	95.805.000			
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	<i>Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik</i>					12	5.266.500	12	5.000.000	100,00	94,94	12	5.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>					12	5.308.500	12	4.900.000	100,00	92,30	12	4.900.000			
1.01.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>					12	32.160.736	12	30.879.000	100,00	96,01	12	30.879.000			
1.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</i>					12	6.070.000	12	5.840.000	100,00	96,21	12	5.840.000			
1.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>					12	3.600.000	12	3.450.000	100,00	95,83	12	3.450.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>					12	46.471.000	12	45.736.000	100,00	98,42	12	45.736.000			
1.01.01.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<i>Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>					7	33.980.000	7	33.438.000	100,00	98,40	7	33.438.000			
1.01.01.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	<i>Tersedianya kebutuhan Peralatan dan mesin Kantor</i>					7	33.980.000	7	33.438.000	100,00	98,40	7	33.438.000			
1.01.01.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>					12	108.680.444	12	104.576.747	100,00	96,22	12	104.576.747			
1.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	<i>Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air</i>					12	25.754.000	12	22.263.525	100,00	86,45	12	22.263.525			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					12	82.926.444	12	82.313.222	100,00	99,26	12	82.313.222			
1.01.01.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan</i>					12	96.629.206	12	91.175.020	100,00	94,36	12	91.175.020			
1.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					12	64.992.241	12	61.786.520	100,00	95,07	12	61.786.520			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	<i>Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>					12	11.200.000	12	9.033.000	100,00	80,65	12	9.033.000			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>					12	20.436.965	12	20.355.500	100,00	99,60	12	20.355.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100	20.246.993			1	6.583.050	1	5.317.000	100,00	80,77	1	5.317.000	1,00	26,26	
7.01.02.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	6.583.050	1	5.317.000	100,00	80,77	1	5.317.000			
7.01.02.02.02	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	6.583.050	1	5.317.000	100,00	80,77	1	5.317.000			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>	100	62.446.506			2	22.577.425	2	22.090.000	100,00	97,84	2	22.090.000	2,00	35,37	
7.01.03.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					2	22.577.425	2	22.090.000	100,00	97,84	2	22.090.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan</i>					1	22.577.425	1	22.090.000	100,00	97,84	1	22.090.000			
7.01.0 3.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	<i>Terlaksananya bimtek Verifikasi dan Penyusunan RAB Desa</i>					1	20.303.680	1	22.577.425	100,00	111,20	1	22.577.425			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan</i>					1	20.303.680	1	22.577.425	100,00	111,20	1	22.577.425			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	<i>Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>					1	3.832.440	1	3.780.000	100,00	98,63	1	3.780.000			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	<i>Terlaksananya Simulasi Peran Kader PKK dalam Pencegahan Stunting</i>					1	3.832.440	1	3.780.000	100,00	98,63	1	3.780.000			
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			2	58.379.615	2	43.950.000	100,00	0,00	2	43.950.000	2,00	90,72	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>					2	58.379.615	2	43.950.000	100,00	0,00	2	43.950.000			
7.01.04.01.01	Sinergritas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Bimtek Satlinmas, Patroli dan Yustisi dalam Rangka Penguatan Penangan Covid-19</i>					1	50.000.000	1	35.750.000	100,00	0,00	1	35.750.000			
7.01.04.01.02	harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Kesos</i>					1	8.379.615	1	8.200.000	100,00	0,00	1	8.200.000			
7.01.04.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	125.000	1	0	100,00	0,00	1	0			
7.01.04.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah koordinasi Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang - undangan dan/atau kepolisian negaraRepublik Indonesia</i>					1	125.000	1	0	100,00	0,00	1	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	17.342.219			1	3.638.600	1	2.000.000	100,00	54,97	1	2.000.000	1,00	11,53	
7.01.0 5.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana</i>					1	3.638.600	1	2.000.000	100,00	54,97	1	2.000.000			
7.01.0 5.01.0 2	fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Trantib dan Peringatan Hari Besar Nasional</i>					1	3.638.600	1	2.000.000	100,00	54,97	1	2.000.000			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	331.852.664			4	125.172.945	4	81.012.500	100,00	64,72	4	81.012.500	4,00	24,41	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</i>					4	125.172.945	4	81.012.500	100,00	64,72	4	81.012.500			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<i>Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa</i>					1	24.414.610	1	18.865.000	100,00	77,27	1	18.865.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>					1	53.043.335	1	47.715.000	100,00	89,95	1	47.715.000			
7.01.0 6.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya bimtek Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa</i>					1	47.715.000	1	14.432.500	100,00	30,25	1	14.432.500			
7.01.0 6.01.0 3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	<i>Terlaksananya bimtek Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa</i>					1	4.957.760	1	3.804.000	100,00	76,73	1	3.804.000			
																	Kecamatan Mejayan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)</i>	100	15.647.552.374			42	4.015.050.116	42	3.702.619.493	100,00	92,22	42	3.702.619.493	0,00	23,66	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0	0	0	0	0,00	0,00	0	0			
I.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	3.831.786.280	-	3.542.949.875	0,00	92,46	0	3.542.949.875			
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					42	3.831.786.280	42	3.542.949.875	0,00	92,46	0	3.542.949.875			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	43.572.000	0	42.671.710	0,00	97,93	0	42.671.710			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					1	3.497.900	1	3.497.824	100,00	100,00	1	3.497.824			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan Logistik kantor					12	21.428.000	12	21.427.918	100,00	100,00	12	21.427.918			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					12	2.356.100	12	2.355.968	0,00	99,99	0	2.355.968			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan					12	3.180.000	12	3.180.000	0,00	100,00	0	3.180.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	13.110.000	12	12.210.000	100,00	93,14	12	12.210.000			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah					12	86.511.336	12	73.595.513	100,00	85,07	12	73.595.513			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan					12	31.766.300	12	18.998.009	0,00	59,81	0	18.998.009			
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan					1	54.745.036	1	54.597.504	100,00	99,73	1	54.597.504			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintah Daerah					12	53.180.500	12	43.402.395	0,00	81,61	0	43.402.395			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya					12	48.340.500	12	38.562.395	0,00	79,77	0	38.562.395			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						4.840.000		4.840.000	0,00	100,00	0	4.840.000			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100	64.059.733			12	20.828.200	12	20.827.775	0,00	100,00	0	20.827.775	0,00	32,51	
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik					12	20.828.200	12	20.827.775	0,00	100,00	0	20.827.775			
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat					1	20.828.200	1	20.827.775	0,00	100,00	0	20.827.775			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02 ./	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penenggaraan Pelayanan Publik					12	5.814.845	12	5.814.420	0,00	99,99	0	5.814.420			
7.01.02 ./	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat					1	15.013.355	1	15.013.355	0,00	100,00	0	15.013.355			
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan (%)</i>	100	5.300.648.903			12	74.526.194	12	74.525.914	100,00	100,00	12	74.525.914	12,00	1,41	
7.01.0 3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					12	60.114.694	12	60.114.694	0,00	100,00	0	60.114.694			
7.01.0 3.01.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi di wilayah Kerja Kecamatan					11	60.114.694	11	60.114.694	0,00	100,00	0	60.114.694			
7.01.0 3.01./ /	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kewilayah	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi di wilayah Kerja Kecamatan					11	31.209.004	11	31.209.004	0,00	100,00	0	31.209.004			
7.01.0 3.01./ /	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga							19.894.260		19.894.260	0,00	100,00	0	19.894.260			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 3.01./ /	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan</i>					1	9.011.430	1	9.011.430	0,00	100,00	0	9.011.430			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>					12	14.411.500	12	14.411.220	0,00	100,00	0	14.411.220			
3.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan</i>					1	14.411.500	1	14.411.220	0,00	100,00	0	14.411.220			
3.2.1/ /	Fasilitas Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Terlaksananya fasilitas Pembinaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>					2	5.217.640	2	5.217.360	100,00	99,99	2	5.217.360			
3.2.1/ /	Fasilitasi Pengembangan badan Usaha Milik Desa	<i>Terlaksananya fasilitas Pengembangan badan Usaha Milik Desa</i>					1	9.193.860	1	9.193.860	100,00	100,00	1	9.193.860			
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			1	85.428.800	1	85.428.425	100,00	100,00	1	85.428.425	1,00	176,34	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya dan Ketenteraman Umum serta Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Program-Program OPD</i>					1	85.428.800	1	15.169.820	100,00	17,76	1	15.169.820			
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Terlaksananya Penanganan COVID-19 di Tingkat Kecamatan</i>					1	65.169.900	1	65.169.525	100,00	100,00	1	65.169.525			
7.01.04.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Terlaksananya Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>					1	20.258.900	1	20.258.900	100,00	100,00	1	20.258.900			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)</i>	100	78.178.082			1	11.374.700	1	11.374.470	100,00	100,00	1	11.374.470	1,00	14,55	
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Perayaan Hari Besar Nasional dan hari Jadi Kabupaten Madiun</i>					1	11.374.700	1	11.374.470	100,00	100,00	1	11.374.470			
7.01.05.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<i>Terlaksananya Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>					1	7.498.300	1	7.498.190	100,00	100,00	1	7.498.190			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.05.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Kesos</i>					2	3.876.400	2	3.876.280	100,00	100,00	2	3.876.280			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	177.455.258			1	56.891.200	1	56.890.771	100,00	100,00	1	56.890.771	1,00	32,06	
7.01.06.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					1	54.100.300	1	54.110.170	100,00	100,02	1	54.110.170			
7.01.06.01	Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa	<i>Terlaksananya Pemilihan Kepala desa dan Pengisian Perangkat Desa</i>					1	54.100.300	1	54.110.170	100,00	100,02	1	54.110.170			
7.01.06.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					1	2.780.900	1	2.780.601	100,00	99,99	1	2.780.601			
7.01.06.01.03	Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa	<i>Terlaksananya Pemilihan Kepala desa dan Pengisian Perangkat Desa</i>					1	54.100.300	1	54.110.170	100,00	100,02	1	54.110.170			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	Kecamatan Kare
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)		6.534.108.922			12	1.930.832.270	12	1.972.832.270	100,00	102,18	12	1.972.832.270	0,00	30,19	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku					12	3.331.900	12	2.226.610	100,00	66,83	12	2.226.610			
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku					14	3.331.900	14	2.226.610	100,00	66,83	14	2.226.610			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpeuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.972.832.270		1.823.714.123		92,44		1.823.714.123			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						1.972.832.270		1.823.714.123		92,44		1.823.714.123			
1.01.01.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana					12	72.219.400	12	68.891.364	100,00	95,39	12	68.891.364			
1.01.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik					12	2.226.000	12	2.200.000	100,00	98,83	12	2.200.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					12	9.416.000	12	9.235.364	100,00	98,08	12	9.235.364			
1.01.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					12	33.876.800	12	32.034.000	100,00	94,56	12	32.034.000			
1.01.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					12	5.866.600	12	5.850.000	100,00	99,72	12	5.850.000			
1.01.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					12	2.310.000	12	2.275.000	100,00	98,48	12	2.275.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	9.637.400	12	9.266.500	100,00	96,15	12	9.266.500			
1.01.01.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	7.000.000	12	6.990.500	100,00	99,86	12	6.990.500			
1.01.01.06.07	Penyediaan bahan/material	Tersedianya Bahan/Material					12	1.886.600	12	1.040.000	100,00	55,13	12	1.040.000			
1.01.01.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangurusan Pemerintah Daerah yang tersedia					0			0	0,00	0,00	0	0			
1.01.01.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya kebutuhan Peralatan dan mesin Kantor					0			0	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	91.634.000	12	88.407.792	100,00	96,48	12	88.407.792			
I.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan sumberdaya air					12	14.384.000	12	11.157.792	100,00	77,57	12	11.157.792			
I.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	77.250.000	12	77.250.000	100,00	100,00	12	77.250.000			
I.01.01.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan					12	70.012.203	12	68.907.790	100,00	98,42	12	68.907.790			
I.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan					12	61.012.203	12	59.907.790	100,00	98,19	12	59.907.790			
I.01.01.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	12	3.000.000			
I.01.01.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya					1	6.000.000	1	6.000.000	100,00	100,00	1	6.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</i>	100	27.142.391			12	2.425.000	12	595.500	100,00	24,56	12	595.500	12,00	2,19	
7.01.02.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>					3	2.425.000	3	595.500	100,00	24,56	3	595.500			
7.01.02.02.02	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>						2.425.000		595.500	0,00	0,00	0	0			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</i>	100	65.135.432			8	21.177.950	8	19.723.100	100,00	93,13	8	19.723.100	8,00	30,28	
7.01.03.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>						21.177.950		19.723.100	0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
7.01.0 3.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	<i>Terlaksananya bimtek Verifikasi dan Penyusunan RAB Desa</i>						-		-	0,00	0,00	0	0			
7.01.0 3.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan</i>					1	21.177.950	1	19.723.100	100,00	93,13	1	19.723.100			
7.01.0 3.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	<i>Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>						0		0	0,00	0,00	0	0			
7.01.0 3.03.0 1	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	<i>Terlaksananya Simulasi Peran Kader PKK dalam Pencegahan Stunting</i>						0		0	0,00	0,00	0	0			
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100	48.445.313			1	76.136.500	1	75.947.800	100,00	99,75	1	75.947.800	1,00	156,77	
7.01.04 .01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>					1	76.136.500	1	75.947.800	100,00	99,75	1	75.947.800			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Bimtek Satlinmas, Patroli dan Yustisi dalam Rangka Penguatan Penangan Covid-19					5	73.124.500	5	73.042.000	100,00	99,89	5	73.042.000			
7.01.04.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksananya Rapatkoordinasi SeksiKesos					1	3.012.000	1	2.905.800	100,00	96,47	1	2.905.800			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	61.512.500			0		0		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.05.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana					0		0		0,00	0,00	0	0			
7.01.05.01.02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Terlaksananya Rapat Koordinasi SeksiTrantib dan Peringatan Hari Besar Nasional					0		0		0,00	0,00	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	244.399.620			8	76.484.050	8	76.012.275	100,00	99,38	8	76.012.275	8,00	31,10	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</i>						76.484.050		76.012.275	0,00	0,00	0	0			
7.01.0 6.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	<i>Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa</i>					0		0		0,00	0,00	0	0			
7.01.0 6.01.0 2	Pasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>					8	25.478.200	8	25.437.625	100,00	99,84	8	25.437.625			
7.01.0 6.01.0 3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	<i>Terlaksananya bimtek Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa</i>					0		0		0,00	0,00	0	0			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	<i>Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa</i>					4	51.005.850	4	50.574.650	100,00	99,15	4	50.574.650			
																	Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (%)</i>	100	7.348.387.680			91,86%	383.103.202	98,87 %	1.843.359.786	0,00	481,17	0,9887	1.843.359.786	0,99	25,09	
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>					14	2.052.961,00	14	1.763.985,00	100,00	85,92	14	1.763.985			
1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>					14	2.052.961,00	14	1.763.985,00	100,00	85,92	14	1.763.985			
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentasi gaji pegawai yang terpenuhi</i>					100	1.731.919.870	100	1.557.184.011	100,00	89,91	100	1.557.184.011			
1.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Persentasi gaji pegawai yang terpenuhi</i>					100	1.731.919.870	100	1.557.184.011	100,00	89,91	100	1.557.184.011			
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Pelaksanaan Administrasi umum</i>					1	142.003.508	1	140.346.680	100,00	98,83	1	140.346.680			
1.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Alat penerangkantor yang tersedia</i>					12	5.602.516	12	5.597.000	100,00	99,90	12	5.597.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.06.02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos dan peralatan kantor yang tersedia					12	44.106.339	12	44.077.500	100,00	99,93	12	44.077.500			
1.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia					12	8.285.075	12	8.277.850	100,00	99,91	12	8.277.850			
1.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak, penggandaan dansuvenir yang tersedia					12	8.500.000	12	8.499.800	100,00	100,00	12	8.499.800			
1.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia					12	5400000	12	5.250.000	100,00	0,00	12	5.250.000			
1.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mamin rapat . perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia					12	28.310.000	12	27.095.300	100,00	95,71	12	27.095.300			
1.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan Bahan Bakar dan Alat tulis kantor yang terpenuhi					12	41.799.578	12	41.549.230	100,00	99,40	12	41.549.230			
1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah					1	109.851.395	1	109.627.000	100,00	99,80	1	109.627.000			
1.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung kantor atau gedung lainnya	Sarpras gedung kantor yang tersedia					6	67.175.997	6	67.000.000	100,00	99,74	6	67.000.000			
1.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Peralatan Mebel yang tersedia					4	42.675.398	4	42.627.000	100,00	99,89	4	42.627.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89.728.299		88.875.985	0,00	99,05	0	88.875.985			
1.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, Air dan telephone yang tercukupi					12	25.872.929	12	25.020.625	100,00	96,71	12	25.020.625			
1.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kerja Non ASN siap pakai					12				0,00	#DIV/0!	0	0			
1.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah					1	63.855.370	12	63.855.360	1200,00	100,00	12	63.855.360			
1.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai					12	38.000.000		36.333.838	0,00	95,62	0	36.333.838			
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana pendukung kantor siap pakai					15	38.000.000	1	36.333.838	6,67	95,62	1	36.333.838			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan publik (%)	100	146.176.152			100	1.022.500	100	1.022.500	100,00	100,00	100	1.022.500	100,00	0,70	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan hasil survey masyarakat					4	1.022.500	4	1.022.500	100,00	100,00	4	1.022.500			
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan hasil survey masyarakat					4	1.022.500	4	1.022.500	100,00	100,00	4	1.022.500			
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							8.790.000		8.790.000		100,00		8.790.000			
7.01.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan desa dalam Musrenbang yang diakomodir dalam pembangunan					30	8.790.000	30	8.790.000	100,00	100,00	30	8.790.000			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)</i>	100	100.544.273			100	14.074.680	100	14.014.700	100,00	99,57	100	14.014.700	100,00	13,94	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah kegiatan bidang olahraga, kepemudaan, kesehatan, keagamaan, Bansos dan lintas sektor yang terfasilitasi</i>					5	14.074.680	5	14.014.700	100,00	99,57	5	14.014.700			
7.01.0 3.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah kegiatan bidang olahraga, kepemudaan, kesehatan, keagamaan, Bansos dan lintas sektor yang terfasilitasi</i>					5	14.074.680	5	14.014.700	100,00	99,57	5	14.014.700			
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase terselenggaranya program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum (%)</i>	100	48.445.313			100	32.186.805	100	31.358.000	100,00	97,43	100	31.358.000	100,00	64,73	
7.01.04 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	<i>Pelaksanaan Koordinasi</i>					1	30.550.625	1	30.131.000	100,00	98,63	1	30.131.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
7.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>					6	30.550.625	6	30.131.000	100,00	98,63	6	30.131.000			
7.01.04.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>					1	1.636.180	1	1.227.000	100,00	74,99	1	1.227.000			
7.01.04.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan/ atau kepolisian negara Republik Indonesia	<i>Jumlah koordinasi Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/ atau kepolisian negara Republik Indonesia</i>					2	1.636.180	4	1.227.000	200,00	74,99	4	1.227.000			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)</i>	100	35.016.667			100	4.680.500	100	4.680.500	100,00	100,00	100	4.680.500	100,00	13,37	
7.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							4.680.500		4.680.500	0,00	100,00	0	4.680.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.0 5.01.0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Sosial</i>					2	4.680.500	2	4.680.500	100,00	100,00	2	4.680.500			
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Terselenggaranya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	100	284.174.156			100	35.048.180	100	34.149.680	100,00	97,44	100	34.149.680	100,00	12,02	
7.01.0 6.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</i>					1	35.048.180	1	34.149.680	100,00	97,44	1	34.149.680			
7.01.0 6.01.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>					2	1.504.180	2	1.504.180	100,00	100,00	2	1.504.180			
7.01.0 6.01.0 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>					18	23.032.000	18	22.133.000	100,00	96,10	18	22.133.000			
7.01.0 6.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>					4	10.512.000	4	10.512.500	100,00	100,00	4	10.512.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%			
																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	9.128.614.775		80,01	2.974.745.951	68,05	2.847.481.704	85,05	95,72	68,05	2.847.481.704	79,13	31,19			
		Kepuasan ASN Terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (skor)	90			77			79,31		103,00		79,31		88,12			
1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				100	32.083.926	100	30.155.400	100,00	93,99	100	30.155.400					
1.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen PD yang sesuai dengan peraturan perundang-undang an yang berlaku (dokumen)				4	32.083.926	4	30.155.400	100,00	93,99	4	30.155.400					
1.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN Bakesbangpoldagri Kab. Madiun (orang)				27	2.141.216.956	22	2.080.839.091	81,48	97,18	22	2.080.839.091					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan (orang)					27	2.141.216.956	22	2.080.839.091	81,48	97,18	22	2.080.839.091			
I.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah (%)					100	320.021.303	100	300.506.098	100,00	93,90	100	300.506.098			
I.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik yg Disediakan (bulan)					12	19.289.134	12	18.956.100	100,00	98,27	12	18.956.100			
I.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (bulan)					12	137.959.775	12	133.523.300	100,00	96,78	12	133.523.300			
I.01.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (bulan)					12	31.087.450	12	30.442.500	100,00	97,93	12	30.442.500			
I.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik kantor yang Disediakan (bulan)					12	55.437.915	12	46.886.700	100,00	84,58	12	46.886.700			
I.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan penggandaan yang Disediakan (bulan)					12	17.352.929	12	12.494.640	100,00	72,00	12	12.494.640			
I.01.01.06.06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan (bulan)					12	3.000.100	12	2.820.000	100,00	94,00	12	2.820.000			
I.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (bulan)					12	55.894.000	12	55.382.858	100,00	99,09	12	55.382.858			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 * 100%		
I.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya kebutuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)</i>					12	13.750.000	12	12.904.500	100,00	93,85	12	12.904.500			
I.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah pengadaan mebel yang dilaksanakan (bulan)</i>					12	13.750.000	12	12.904.500	100,00	93,85	12	12.904.500			
I.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)</i>					12	281.970.516	12	256.432.024	100,00	90,94	12	256.432.024			
I.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Dibayarkan (bulan)</i>					12	89.830.850	12	71.512.376	100,00	79,61	12	71.512.376			
I.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan (bulan)</i>					12	192.139.666	12	184.919.648	100,00	0,00	12	184.919.648			
I.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (bulan)</i>					12	185.703.250	12	166.644.591	100,00	89,74	12	166.644.591			
I.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan (bulan)</i>					12	10.160.000	12	9.653.100	100,00	95,01	12	9.653.100			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
1.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Yang Dilaksanakan (bulan)</i>					12	137.003.250	12	121.201.491	100,00	88,47	12	121.201.491			
1.01.01.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	<i>Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Yang Dilaksanakan (bulan)</i>					12	8.540.000	12	8.340.000	100,00	97,66	12	8.340.000			
1.01.01.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Yang Dilaksanakan (bulan)</i>					12	30.000.000	12	27.450.000	100,00	91,50	12	27.450.000			
8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)</i>	100	626.492.200			100	114.954.000	100	112.514.997	100,00	97,88	100	112.514.997	100,00	17,96	
8.01.02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (kali)</i>					3	114.954.000	3	112.514.997	100,00	97,88	3	112.514.997			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.01.0 2.01.0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (orang)</i>					300	114.954.000	250	112.514.997	83,33	97,88	250	112.514.997			
8.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Indeks Demokrasi Indonesia (skor)</i>	85	3.308.047.973			75	1.077.660.978	75	1.076.352.676	100,00	99,88	75	1.076.352.676	88,24	32,54	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
8.01.0 3.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kali)</i>					3	1.077.660.978	3	1.076.352.676	100,00	99,88	3	1.076.352.676			
8.01.0 3.01.0 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah anggota Partai Politik yang mengikuti sosialisasi (parpol)</i> <i>Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik (parpol)</i>					16	1.077.660.978	16	1.076.352.676	0,00	99,88	0	1.076.352.676			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
8.01.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina (%)</i>	100	7.332.901.296			100	2.482.861.528	100	2.009.614.400	100,00	80,94	100	2.009.614.400	100,00	27,41	
8.01.0 4.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (organisasi)</i>					3	2.482.861.528	4	2.009.614.400	133,33	80,94	4	2.009.614.400			
8.01.0 4.01.0 3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah anggota Ormas yang dibina (orang)</i>					68	2.482.861.528	92	2.009.614.400	135,29	0,00	92	2.009.614.400			
		<i>Jumlah Ormas yang mendapatkan hibah (ormas)</i>					68		80		117,65	0,00	80	0			
8.01.0 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	<i>Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)</i>	100	622.600.000			100	111.261.700	100	108.839.160	100,00	97,82	100	108.839.160			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
8.01.0 5.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan (kali)</i>					3	11.261.700	3	108.839.160	100,00	97,82	3	108.839.160			
8.01.0 5.01.0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (orang)</i>					300	11.261.700	300	108.839.160	100,00	97,82	300	108.839.160			
8.01.0 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Indeks Keamanan Manusia (skar)</i>					75	1.919.995.400	75	1.892.135.500	100,00	98,55	75	1.892.135.500			
8.01.0 6.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah Pencegahan konflik sosial dengan baik (kali)</i>					30	1.919.995.400	36	1.892.135.500	120,00	98,55	36	1.892.135.500			
		<i>Jumlah Penanganan konflik Sosial sesuai dengan ketentuan (kali)</i>					45		40		88,89	0,00	40	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.01.0 6.01.0 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Informasi Potensi Gangguan / Konflik Yang Diperoleh (informasi)</i>					50	138.098.000	42	134.098.000	84,00	97,10	42	134.098.000			
8.01.0 6.01.0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah pencegahan konflik sosial dengan baik (kali)</i>					30	177.785.000	36	176.046.500	120,00	99,02	36	176.046.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1 (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9 / 4 *100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.01.0 6.01.0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan (kali)</i>					45	1.061.125.900	40	1.056.413.000	88,89	99,56	40	1.056.413.000			
8.01.0 6.01.0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Gangguan Konflik yang diatasi (kali)</i>					2	76.171.800	2	72.153.000	100,00	94,72	2	72.153.000			
8.01.0 6.01.0 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten (kali)</i>					4	466.814.700	9	453.425.000	225,00	97,13	9	453.425.000			

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2023 tidak terlepas dari Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Madiun yang merupakan kristalisasi dari isu strategis yang terjadi di setiap urusan serta berbagai dinamika yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal. Adapun Isu strategis yang diangkat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, pariwisata belum maksimal;
2. Pemerataan kualitas dan Aksesabilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Masih rendahnya Pertumbuhan dan Pemulihan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah;
4. Daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana;
5. Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian;
6. Pembenahan manajemen pemerintah dan kondusifitas.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 dimana memuat Visi Misi Bupati terpilih 2018 – 2023, serta merujuk pada isu strategis Kabupaten Madiun yang disinkronkan dengan prioritas Pusat, prioritas Provinsi Jawa Timur maka penekanan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis melalui :
 - a. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, sarana prasarana keselamatan jalan, irigasi)
 - b. Pembentukan kawasan industri
2. Pengembangan Produk-Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan Dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, melalui :

- a. Peningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknik pengolahan budidaya dan pengolahan perikanan, tanaman pangan dan tanaman perkebunan.
 - b. Peningkatan manajemen pariwisata
3. Kesiapsiagaan Bencana:
- a. Peningkatan upaya sistematis dalam penanggulangan bencana melalui manajemen resiko.
4. Penguatan Kelembagaan Ekonomi, melalui :
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - b. Penguatan jalur akses permodalan.
5. Membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar, melalui :
- a. Peningkatan sarana prasarana pengembangan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah berbasis digital;
 - b. Perluasan jaringan pemasaran produk lokal.
6. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui :
- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perluasan akses dan peningkatan pendidikan yang bermutu.
7. Peningkatan stabilitas daerah dan kualitas pelayanan publik, melalui:
- a. Peningkatan kualitas layanan publik;
 - b. Kondusifitas daerah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	1. Database anak tidak sekolah masih belum tersedia 2. Terdapat sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 anak 3. Aset sekolah terutama SD yang masih

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		<p>banyak belum tersertifikat</p> <p>4. Masih banyak sekolah yang kebutuhan gurunya belum terpenuhi</p> <p>5. Kompetensi guru yang perlu ditingkatkan</p>
2.	<p>Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan</p>	<p>1. Masih tingginya kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi (umur 0-12 bulan)</p> <p>2. Sistem rujukan pelayanan persalinan tidak sesuai standar.</p> <p>3. Pasangan Usia Subur (PUS) kurang memahami resiko hamil pada kondisi 4T (Terlalu Muda, Tua, Dekat, Banyak)</p> <p>4. Pengadaan obat dan vaksin terkendala barang yang tidak tersedia di pasaran.</p> <p>5. Peralatan kesehatan produk lama tidak bias dilakukan pemeliharaan karena sulit untuk mencari sparepart</p> <p>6. Cakupan SPM bidang kesehatan secara rata rata dari 12 indikator tergolong rendah dikarenakan terjadi pandemi covid-19 sehingga pelayanan menjadi tidak optimal selain itu pada perhitungan SPM nilai penyebut pada penghitungan SPM menggunakan nilai sasaran proyeksi sehingga cakupan menjadi lebih kecil dikarenakan jumlah sasaran riil lebih kecil daripada sasaran proyeksi.</p> <p>7. Semua program yang menggunakan sasaran data proyeksi maka cakupan pelaksanaan program cenderung kurang memenuhi target, dikarenakan sasaran riil lebih rendah.</p> <p>8. Pelaksanaan posyandu di masa pandemi Covid-19 tidak semua Posyandu memberi pelayanan sehingga tidak semua Balita terlayani kesehatannya sesuai standart. Pelaksanaan Posyandu mengacu pada Zonasi desa terkait kasus Covid-19</p> <p>9. Kegiatan skrining pada anak usia sekolah, Posbindu, skrining kanker rahim dan</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		<p>payudara mengalami kendala terfokus untuk menangani Covid-19 dan kurangnya sarana prasarana skrining</p> <p>10. Indikator pencapaian desa dengan STBM masih dibawah target yaitu 40% dikarenakan pemicuan 5 pilar stbm, dan verifikasi 5 pilar belum optimal dilaksanakan karena masih fokus untuk mengejar ODF pilar 1</p> <p>11. Penyediaan SDM pelayanan khusus masih belum tercukupi.</p> <p>12. Masih terbatasnya ruang rawat inap Paviliun untuk pemenuhan harapan masyarakat akan pelayanan eksklusif.</p> <p>13. Belum adanya bangunan gedung rawat inap yang sesuai standar sehingga sangat berpengaruh terhadap kepuasan pasien.</p>
3.	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Adanya rasionalisasi Anggaran Tahun 2021 menyebabkan turunnya capaian yang ditargetkan;</p> <p>2. Program Sumber Daya Air terdapat 4 kegiatan yang tidak terlaksana (3 dari sumber dana DAK dan 1 lokasi dari sumberdana IPDMIP karena rasionalisasi);</p> <p>3. Target pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga terampil tidak tercapai karena peserta tidak mengikuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p>
4.	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>1. Standar Pelayan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana dan Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan karena tidak ada kejadian;</p> <p>2. Penyerapan anggaran kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, terserap 81,44%.
5.	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat waktu tanggap kebakaran (Respon Time) yang masih belum terpenuhi 2. Terhambatnya koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama dengan trantib di wilayah dikarenakan Pandemi Covid-19 3. Masih kurangnya Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun 4. Permasalahan utama dari kurang optimalnya kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya maupun ketersediaan peralatan kesiapsiagaan yang memadai. Keterbatasan sumberdaya selain support anggaran juga karena sumberdaya manusia yang belum memadai.
6.	Urusan Pemerintah Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dari Dinas Kesehatan adalah perorangan sedangkan bantuan dari Dinas Sosial adalah 1 (satu) paket sembako untuk 1 (satu) KK . 2. Adanya data dobel nama dari Dinas Kesehatan. 3. Ada beberapa Kecamatan yang melakukan verifikasi tapi ada beberapa kecamatan yang belum melakukan verifikasi. 4. Pengambilan Sembako dan Berita Acara Penerimaan Sembako sering jeda terlalu lama sehingga menyulitkan Dinas untuk membuat laporan Distribusi ke Sekretaris Daerah
B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan. 2. Pandemi Covid-19 juga berakibat pada tingginya Angka Pengangguran di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 18,846

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		<p>orang, selain itu karena pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja.</p> <p>3. Program Hubungan Industrial dari target 80 % tercapai 100 % dikarenakan jumlah kasus yang masuk melebihi target karena Pengusaha dan pekerja kurang memahami peraturan perusahaan. dampak Pandemi menyebabkan keuangan perusahaan menurun sehingga tidak bisa memenuhi hak karyawannya.</p>
2.	<p>Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>1. Pemerintah Desa belum mampu melakukan PUG dan PPRG secara mandiri,</p> <p>2. Mendapatkan penghargaan KLA Kategori Madya yang ke-3 kalinya karena belum maksimalnya pengisian indikator-indikator KLA pada setiap klusternya serta kurangnya sarana prasarana dan kegiatan yang mendukung,</p> <p>3. Masih tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Madiun sebanyak 175 kasus Tahun 2020 (sipp.pa.madiunksab.go.id) dan angka stunting Tahun 2020 sebesar 16,9%,</p> <p>4. Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum teridentifikasi di pelayanan kesehatan dasar dan di pusat-pusat pelayanan,</p> <p>5. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan dan belum terminasi karena proses hukum masih berjalan.</p>
3.	<p>Urusan Pemerintah Bidang Pangan</p>	<p>Rata-rata jumlah konsumsi energi di Kabupaten Madiun pada Tahun 2021 adalah sebesar 1831,5 KKal/Kap/hr, Sedangkan rata-rata jumlah konsumsi protein sebesar 53,10 gram/kap/hr. Angka tersebut masih belum mencapai angka kecukupan energi yang dianjurkan sebesar 2.150 Kkal/hari untuk jumlah konsumsi energi (AKE) dan 57 gram/kap/hr untuk jumlah konsumsi protein</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		(AKP) , hal ini dikarenakan antara lain kurangnya porsi makan tiap anggota keluarga. Kurangnya porsi makanan dikarenakan karena banyak rumah tangga yang masih terdampak pandemi Covid-19 dimana terjadi penurunan pendapatan sehingga menyebabkan sebagian orang terutama dengan penghasilan rendah tidak mampu untuk menjangkau makanan bergizi. Akibat dari wabah ini juga berimplikasi luas, seperti kelancaran distribusi pangan, terbatasnya akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan lainnya yang dapat mengganggu ketahanan pangan masyarakat
4.	Urusan pemerintahan bidang pertanahan	Urusan Pertanahan yang merupakan kewenangan Kabupaten, dilaksanakan terakhir tahun 2021. Dengan ditetapkannya Kepmendagri 050-5889 tahun 2022, maka kewenangan kabupaten hanya sebatas kegiatan sengketa lahan.
5.	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuangan sampah oleh masyarakat sembarangan di pinggir2 jalan di wilayah kecamatan Wonoasri, Wungu, Kare, Dolopo, Geger, Mejayan, Saradan, Madiun dan Jiwan menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar dan bau yang menyengat di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. 2. Banyaknya masyarakat membuang pampers bayi di sungai-sungai menyebabkan banjir dikarenakan kurang kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah
6.	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Adanya di beberapa kegiatan tahun anggaran 2021 tidak dapat terserap 100% di antaranya pada kegiatan yang dibiayai oleh anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik
7.	Urusan	1. Target pembentukan BUMDesa bersama

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
	Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>belum terealisasi berkenaan dengan munculnya regulasi baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUMDesma serta Permendesa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd Menjadi BUMDesma.</p> <p>2. Desa yang terfasilitasi pengurusan pembentukan kawasan perdesaan dari 4 Desa yakni Desa Dagangan, Segulung, Tileng dan Mendak. Namun dari hasil pemetaan, koordinasi dan advokasi tidak semuanya representatif diusulkan untuk pembentukan kawasan perdesaan. Terdapat 3 Desa yakni Segulung, Tileng dan Mendak yang memiliki potensi pembentukan kawasan dengan tema kawasan wisata.</p> <p>3. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk kebijakan penyesuaian belanja daerah. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat terdampak rasionalisasi anggaran dan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan.</p>
8.	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>1. PUS yang ingin mendapatkan pelayanan KB MKJP masih terkendala akses pembiayaan, dan bagi peserta JKN tidak semua pelayanan KB dijamin oleh BPJS serta adanya biaya yang ditanggung peserta KB non MKJP,</p> <p>2. Masih rendahnya kesertaan KB Pasca Salin,</p> <p>3. Masih adanya kesertaan KB tradisional dan</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		<p>rendahnya KB MKJP yang berdampak pada tingginya drop out (putus pakai Kontrasepsi) dan unmet need,</p> <p>4. Minimnya jumlah penyuluh KB sehingga perbandingan antara penyuluh KB dan Desa idealnya 1 : 2 menjadi 1 : 4.</p>
9.	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Videotron masih tarik ulur terkait tuisi dan kewenangan dengan Dinas Kominfo. 2. Unit Kendaraan Dinas Operasional dengan spesifikasi khusus sudah tidak tersedia pada Dealer pada tahun pelaksanaan penganggaran. 3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai dari target 10 unit tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran.
10.	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	LPPL Puroboyo FM yang masih terkendala masalah perijinan;
11.	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2021 Jumlah Koperasi Aktif tercapai sejumlah 381 berdasarkan data ODS. Tolok ukur koperasi aktif adalah 2 (dua) tahun berturut-turut melaksanakan RAT. Sedangkan pelaksanaan RAT menjadi tolok ukur kesehatan koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program yang dilakukan telah mampu memberikan kontribusi pada kesehatan koperasi dan juga peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Progress revitalisasi koperasi non aktif menjadi aktif terkendala pembenahan manajemen kelembagaan, usaha, dan keuangan dalam koperasi belum tercapai serta masalah eksternal yang dihadapi oleh usaha koperasi sektor simpan pinjam dan sektor riil.

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		<p>2. Dengan adanya PPKM pada bulan Februari sampai dengan September pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro belum optimal. Utamanya pada pembinaan usaha mikro berupa pelatihan-pelatihan karena tidak dapat dilaksanakan dengan daring.</p>
12.	<p>Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal</p>	<p>Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, di antaranya:</p> <p>1. Sebagian besar perizinan telah diproses melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait persyaratan dan waktu proses perijinan yang telah diatur dalam sistem OSS RBA. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena adanya perubahan atas Perda yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		<p>karena <i>web traffic</i>, <i>server capacity</i> maupun seringnya <i>maintenance</i> dari pusat pada aplikasi tersebut.</p> <p>2. Permasalahan Regulasi atau kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. RDTR yang belum tersusun dan layanan LP2B yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Perubahan Perda terkait bangunan dan retribusi yang belum selesai disusun mengakibatkan berhentinya proses perizinan dan berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		<p>relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.</p> <p>3. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif, calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.</p> <p>4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal.</p> <p>5. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan layanan perizinan, sosialisasi, pendampingan maupun promosi investasi.</p>
13.	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	<p>1. Rendahnya produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian,</p> <p>2. Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga serta belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi olahraga dalam mewujudkan prestasi olahraga.</p>
14.	Urusan Pemerintah Bidang Statistik	<p>1. Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Madiun masih kurang;</p> <p>2. Terbatasnya kemampuan SDM Bidang Statistik.</p>
15.	Urusan Pemerintah	<p>1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ban dan Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
	Bidang Persandian	<p>Negara (BSrE BSSN) dengan Pemerintah Kabupaten Madiun Nomor : 046/268/402.103/2017 dan Nomor : PERJ.24 /LSN /SU /KH.02.01/07/2017 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sudah kedaluwarsa dan tidak berlaku.</p> <p>2. Tingginya tingkat insiden serangan siber yang terjadi di website OPD Pemerintah Kabupaten Madiun.</p>
16.	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kebudayaan belum maksimum 2. Pengelolaan Cagar Budaya belum maksimum 3. Kompetensi pelaku budaya masih perlu ditingkatkan
17.	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan	-
18.	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan	Adanya perubahan komponen dan sistem penilaian Audit Kearsipan Eksternal sesuai peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
C. Urusan Pilihan		
1.	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelayan perairan umum pada umumnya adalah nelayan sambilan, dan sebagian kecilnya hanya melakukan penangkapan ikan pada musim-musim tertentu, karena kondisi air yang surut ketika musim kemarau, 2. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, contohnya adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti setrum dan penggunaan jaring dengan lubang jaring yang kecil, 3. Kebutuhan benih ikan belum tercukupi, 4. Jumlah induk ikan terbatas,

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		5. Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga kerja).
2.	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum tercapainya jumlah kunjungan wisata sesuai harapan, karena pandemi yang masih terus berlanjut sehingga dilakukan penutupan tempat wisata hingga beberapa bulan, di samping itu, pengelola wisata juga terkendala pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di destinasi sehingga banyak sarana dan prasarana pariwisata yang rusak, pengunjung wisata juga terkendala peraturan yang ketat untuk bisa masuk ke destinasi setelah destinasi wisata dinyatakan dibuka.
3.	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, gedung, dan peruntukan lainnya mengancam eksistensi usaha pertanian 2. Minimnya inovasi dan belum maksimalnya teknologi pertanian dalam menjangkau petani baik karena kurangnya jumlah sarana maupun kurangnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologinya 3. Pemasaran produk hasil pertanian yang masih sangat tergantung kepada tengkulak sehingga petani kurang memiliki <i>bargaining power</i> dalam penjualan hasil panennya. 4. Kurangnya regenerasi petani sehingga petani Kabupaten Madiun masih didominasi oleh usia-usia lanjut yang kurang produktif
4.	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Sasaran sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalah pedagang kaki lima (PKL) dengan diberikan bantuan berupa <i>booth container</i> sebanyak 14 unit. Anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk membuat 14 booth container dikarenakan adanya kenaikan harga

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		material di pasaran.
5.	Urusan Pemerintah Bidang Industri	<p>Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa “Setiap Bupati / Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota”. Untuk itu Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota, termasuk Kabupaten Madiun untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan sektor industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Madiun</p>
6.	Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi	<p>Capaian Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi memang secara umum tidak berhasil, (capaian 0%). Keputusan Kepala Disnakertran Prov. Jatim No. 188/311/108.1/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Disnakertran Prov. Jatim No, 188/143/KPTS/108.1/2021 tanggal 1 April 2021 tentang penetapan program perpindahan dan penempatan transmigrasi provinsi Jatim Tahun 2021. Didalam lampiran tersebut Kabupaten Madiun dalam hal ini tidak termasuk dalam pemberangkatan</p>

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		transmigrasi. Selain Anggaran maupun kuota terjadi refocusing baik pusat maupun daerah untuk pemberangkatan transmigrasi secara menyeluruh Jawa Timur terjadi pengurangan Kuota untuk pemberangkatan calon transmigrasi.
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
1.	Sekretariat Daerah	-
2.	Sekretariat DPRD	-
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
1.	Unsur Perencanaan	
2.	Unsur Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi PBB P2 yang terkadang tidak terkoneksi dengan baik dengan Bank Persepsi, 2. Luasnya cakupan wilayah dan jumlah desa yang perlu dilakukan rekonsiliasi, 3. Kurang patuhnya perangkat desa terhadap kegiatan rekonsiliasi, 4. Status Obyek dan wajib pajak yang tidak jelas, 5. Ada identitas SPPT PBB P2 yang dobel, 6. Subyek pajak yang tidak dapat diidentifikasi, 7. Daluarsa penagihan, 8. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang daluarsa masa berlakunya karcis, 9. Belum adanya regulasi pemusnahan karcis, 10. Adanya perubahan regulasi penerbitan karcis,
3.	Unsur Kepegawaian	Untuk Capaian Indeks PIP tidak memenuhi target daeri target 80,5 tercapai 48,77 di karenakan perubahan regulasi BKN yang dulu penghitungan di lakukan secara mandiri mulai oktober 2021 bkn melarang untuk melakukan penghitungan PIP mandiri untuk Daerah sehingga dari target awal kurang memenuhi target . Sedangkan dalam penilaian BKN pusat terlihat nilai kompetensi sangat kurang

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		sehingga perlunya untuk meningkatkan nilai Kompetensi ASN melalui Diklat Worksoop ,sosialisasi Bintek sehingga perlunya peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Madiun , Dengan peningkatan Anggaran Diklat Sarana Prasana Diklat.
4.	Unsur penelitian dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan kajian dari Perangkat Daerah belum semua dapat diakomodir oleh bidang penelitian dan pengembangan, pada tahun 2021 ada 15 usulan kajian dari Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan kajian pada tahun 2021 ada 5 (lima), sedangkan 1 (satu) usulan kajian dilaksanakan tahun 2022. 2. Belum semua Perangkat Daerah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA)
E. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
1.	Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dari Jumlah OPD yang dinilai SAKIP dengan Target 53 OPD dapat terealisasi sebanyak 45 OPD atau sebesar 85%, hal ini dikarenakan untuk OPD pada Sekretariat Daerah evaluasi SAKIP dijadikan satu. 2. Dalam pencapaian hasil evaluasi SAKIP terhadap 45 OPD hanya 11 OPD yang hasilnya memuaskan, atau turun dari tahun 2020 sebanyak 14 OPD. Hal ini diakibatkan karena adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) 2018 – 2023 Kabupaten Madiun yang berimbas pada berubahnya Dokumen – dokumen yang dievaluasi pada penilaian SAKIP. 3. Waktu Penyusunan Dokumen SAKIP yang terlalu cepat berbarengan dengan penyusunan Perubahan Dokumen

No	URUSAN	DAFTAR PERMASALAHAN
		Pelengkap OPD 4. Kurangnya Pemahaman dalam Penyusunan Dokumen SAKIP karena adanya mutasi Pejabat Penyusun Program dan Laporan serta Pejabat Baru di OPD
F. Unsur Kewilayahan		
1.	Kecamatan	1. Kurangnya SDM di Kecamatan 2. Kurangnya Koordinasi dengan Pihak OPD yang terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan 3. Apabila ada kerusakan alat yang menyebabkan pelayanan kependudukan tidak bisa berjalan dengan optimal 4. Apabila ada masalah dengan jaringan internet yang menyebabkan terganggunya pelayanan 5. Adanya Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Tupoksi dan Aktivitas di tengah perjalanan. 6. Belum tercapainya target PBB yang disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak PBB terhadap waktu jatuh tempo PBB 7. Belum maksimalnya informasi aturan-aturan atau regulasi yang baru.
G. Unsur pemerintahan umum		
1.	Kesbangpoldagri	1. Potensi – potensi konflik antara Perguruan Silat, Remaja, Ormas, Agama dan aliran Kepercayaan serta suku/ras masih rawan muncul terutama pada saat pelaksanaan Pilkades Serentak. 2. Belum optimalnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial yang timbul di wilayah Kabupaten Madiun.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan Perekonomian Daerah mengacu dan harus selaras dengan Kebijakan Perekonomian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tahun 2023 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan RKP tahun 2023.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi mulai tahun 2014 serta pandemi Covid-19 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan". Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2018 -2023 merupakan dokumen perencanaan yang

memuat penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah. Arah Pembangunan dalam RPJMD tentunya mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur.

Kabupaten Madiun tidak termasuk 8 kabupaten/kota indek harga konsumen (IHK) di Provinsi Jawa Timur. PDRB ADHK Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah 13.372.329.000.000,00 hanya 0,8 % dari PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur. Sehingga secara indicator ekonomi makro di Kabupaten Madiun sangat dipengaruhi oleh kondisi rata-rata ekonomi makro di Jawa Timur. Oleh karena itu pendekatan Analisa dan pengambilan data tertentu release maupun proyeksi bisa menggunakan data outlook ekonomi 2022-2027 (hasil kajian BAPPEDA dengan Universitas Brawijaya Tahun 2021), ataupun dari rata-rata indikator ekonomi makro Provinsi Jawa Timur.

Kondisi perekonomian di daerah tidak terlepas dari kondisi makro regional, nasional maupun global yang dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain :

1. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir,
2. Pemulihan ekonomi global melambat seiring *upside risk* konflik Rusia-Ukraina,
3. Fluktuasi Harga komoditas dampak dari kebijakan CPO,

Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Pusat dan Daerah menurunkan target makro pembangunan dengan harapan masih bisa dicapai meskipun cukup pesimis. Faktanya, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp 4.325,4 triliun. Sementara itu pada triwulan III 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,28 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen. Sampai dengan triwulan III-2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,81 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,23 persen. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5,2% pada 2022 dan 5,1% pada 2023. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi program vaksinasi akan terus dilakukan dengan harapan sebagian besar provinsi bisa mencapai tingkat vaksinasi hingga 70% pada 2022 dan dengan catatan Indonesia tidak akan mengalami gelombang baru COVID-19 yang lebih parah. Selain itu, prediksi tersebut juga diasumsikan kebijakan moneter dan fiskal domestik akan tetap akomodatif serta pertumbuhan perdagangan global dan harga komoditas meningkat moderat di tengah pengetatan kondisi keuangan global. Konsumsi juga diperkirakan akan pulih lebih kuat karena tingkat vaksinasi sudah lebih luas sehingga akan meningkatkan konsumsi dan permintaan masyarakat.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia, yaitu sekitar 15% dari total penduduk. Disamping itu, kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap PDB nasional mencapai stabil pada angka sekitar 15%. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa perkembangan ekonomi Jawa Timur selaras dengan perkembangan ekonomi Indonesia, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dapat dijadikan dasar proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tabel 3.4. cukup variatif, dimana untuk tahun 2021 berkisar antara 4,4% hingga 5,8% sedangkan untuk tahun 2022 sekitar 4,8% hingga 6%. Maka, terdapat tiga skenario yang digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 dan 2022 yaitu proyeksi minimum, moderat, dan maksimum.

Perekonomian Kabupaten Madiun tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi menjadi minus (-) 1,69 persen. Masifnya pemerintah melakukan program vaksinasi khususnya vaksinasi ke 3 (tiga) atau biasa disebut vaksinasi Boster mendorong pemulihan ekonomi. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terjadi pada kategori industri khususnya industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat-obatan tradisional, kemudian kategori perdagangan besar eceran. Struktur perekonomian Kabupaten Madiun pada 2021 masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; dan industri pengolahan; serta informasi dan komunikasi sebesar. peranan lima lapangan usaha tersebut masih menjadi kekuatan perekonomian Kabupaten Madiun.

Nilai PDRB Kabupaten Madiun atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 19,76 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,84 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 0,01 triliun rupiah. Kenaikana nilai PDRB pada tahun 2021 ini dipengaruhi oleh naiknya produksi hampir diseluruh lapangan usaha, walaupun masih ada sedikit dampak akibat adanya pandemi Covid yang menghambat beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Madiun. Proyeksi Nilai PDRB dasar harga berlaku tahun 2022 diprediksi meningkat 20,99 triliun rupiah dan Nilai PDRB dasar harga konstan 13.93 triliun rupiah.

Laju inflasi Kabupaten Madiun tahun 2021 pada angka 2,00 naik dari tahun sebelumnya diangka 1,86. Hal ini menggambarkan keadaan stabilitas yang cukup terkendali, namun begitu kenaikan maupun penurunan inflasi di luar interval 2%-4% bisa sebagai indikasi melemahnya kemampuan daya beli masyarakat, Langkah langkah strategis kebijakan fiskal dan program kegiatan perlu dilakukan Pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi, penanganan masalah social dan Kesehatan.

Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diupayakan meningkat pada interval 3,5% - 4,5% hal ini cukup positif sehingga pertumbuhan nyata ekonomi per individu penduduk di Kabupaten Madiun yang dicerminkan oleh Pendapatan Perkapita dengan nilai

sebesar Rp. 27,85 juta, atau mengalami peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp. 1,64 juta. tahun 2022.

Tabel 3.1

Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022**
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	17.679.142,70	18.931.550,70	18.917.000,00	19.760.012,90	20.998.914,00
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	12.485.007,70	13.161.840,20	12.940.000,00	13.372.329,80	13.932.248,13
3	Inflasi	(%)	2,71	2,20	1,86	2,00	2,00 – 4,00
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	5,10	5,42	(-) 1,69	3,34	3,5 - 4,5
5	Pendapatan Perkapita	Rp	25.945.000,00	27.730.000,00	27.670.000,00	26.210.528,94	27.853.860,48

** Angka sementara proyeksi

Sumber Data : Bappeda Kab.Madiun (hasil koordinasi dengan BPS)

Dengan realisasi kinerja ekonomi tahun 2021 yang tumbuh 3,34 persen ditambah dengan kondisi tahun 2022 sebagian besar masyarakat sudah menerima vaksin dosis ke 2 (dua) maupun booster serta sudah dilonggarnya kebijakan PPKM makan diperkirakan ekonomi tahun 2023 akan segera pulih. Mengingat pemerintah daerah sudah banyak melakukan percepatan realisasi belanja dengan segera melaksanakan program yang telah disusun agar kinerja ekonomi ditahun 2022 dapat bergairah kembali, mengingat percepatan belanja pemerintah daerah baik melalui anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga.

Upaya Pemerintah Daerah untuk mengenjot hampir semua sektor produksi sudah mulai dirasakan hasilnya, mengingat sudah mulai longgarnya peraturan PPKM, namun begitu masih ada sektor yang mempunyai kontribusi besar dan masih bisa didorong dalam situasi seperti ini yaitu sector perdagangan khususnya perdagangan besar dan eceran kecuali mobil dan motor maupun UMKM sehingga dapat kembali mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta penguatan daya beli masyarakat, selain itu beberapa sektor masih perlu untuk diberikan dukungan agar bisa bertahan salah satunya adalah sektor industry kayu dan furniture mengingat kedua sektor tersebut masih mengalami kontraksi hingga masing-masing sebesar 8,31% negatif dan 1,57% negatif, termasuk juga sector perdagangan besar dan eceran kecuali mobil

dan motor, untuk itu pemerintah daerah agar memberikan dukungan agar sektor-sektor tersebut pada tahun 2022 dapat bergerak kembali.

Program vaksinasi booster yang sudah mulai berjalan diharapkan dapat memberikan angin segar untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat, namun memasuki tahun 2022, pada hampir setiap minggu kasus harian covid 19 di Kabupaten Madiun masih menunjukkan level antara 2 dan 3, sehingga mengganggu beberapa sektor ekonomi yang berupaya melakukan pemulihan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,19 persen dan 4,59 persen pada tahun 2023 maka beberapa upaya perlu dilakukan dengan harapan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023 dapat kembali tumbuh positif sehingga ekonomi kabupaten madiun akan mengalami recovery secara signifikan.

Selanjutnya, melalui peningkatan konsumsi masyarakat yaitu semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak, mengingat konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat telah disalurkan Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah Daerah juga mendorong konsumsi pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBD, konsumsi juga diarahkan untuk produk kearifan lokal sehingga memberikan *multiplier effects* yang signifikan pada penguatan ekonomi lokal.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 pemerintah daerah telah melakukan upaya menjaga distribusi pangan, agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, selain itu pemerintah pusat juga memberikan dukungan untuk menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM, antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro.

Seiring upaya pemerintah daerah untuk melakukan recovery ekonomi disaat pandemi *Covid-19*, sektor pangan merupakan salah satu sektor yang harus dijaga dan saat ini kontribusi PDRB pada sektor pertanian di kabupaten madiun berada pada kisaran 28%, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun. Terkait dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi di

Kabupaten Madiun diarahkan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan serta melakukan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan jaring sosial dengan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Kebijakan sektor pertanian dalam merespon *Covid-19* dalam menjaga ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau di Kabupaten Madiun dengan memperkuat intensitas pertanian dan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian memperbaiki logistik pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan mengurangi kelangkaan pangan dan disparitas bahan pokok pangan.

Tabel 3.2
Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Madiun
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun	
			2023***)	2024***)
1	PDRB (ADH Berlaku)	Rp.Juta	22.305.030,56	23.764.131,03
2	PDRB (ADH Konstan)	Rp.Juta	14.571.542,02	15.261.422,60
3	Inflasi (IHK)	(%)	1,56	1,73
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(%)	4,59	4,73
5	Pendapatan Perkapita	Rp.Ribu	29.229.000,00	31.145.000,00

***) = Angka proyeksi

Sumber Data : hasil koordinasi Bappeda Kab.Madiun dengan BPS

Sentimen dari faktor eksternal maupun internal sebagai dampak dari pandemic Covid-19 harus dikelola dengan baik agar pemulihan ekonomi di Kabupaten Madiun dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan dapat tumbuh hingga mencapai level 4,59% diperkirakan mencapai sekitar 22,3 triliun rupiah, mengingat peranan sektor ekonomi yang cukup dominan seperti perdagangan, industri serta jasa akan mengalami pemulihan hingga meningkatkan elastisitas tenaga kerja dan berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran, indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya sektor usaha yang sudah mulai melangsungkan usahanya walaupun dalam suasana PPKM serta

berjalannya pelaksanaan program vaksinasi booster yang menasar pada angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang diharapkan dapat kembali bekerja pada lapangan kerja terdampak pandemic *Covid-19* tersebut.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menjaga denyut usaha dengan strategi mengembangkan tatanan kegiatan ekonomi yang baru agar sektor penghasil barang (*tradables*) yang terdampak pandemi dapat terus berjalan mengingat pertumbuhan sektor tersebut untuk menjaga daya beli sehingga dapat menjaga kemampuan PAD.

Percepatan pembangunan di Caruban dapat dijadikan episentrum aktivitas perekonomian di Kabupaten Madiun, dengan harapan berdampak pada ekspansi bisnis di wilayah sebagai pusat pemerintahan, perkembangan kondisi ekonomi masih dihantui oleh pandemi diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa tahun kedepan sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun sampai pada tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran 4,73%. Melalui pertumbuhan tersebut total output perekonomian Kabupaten Madiun di tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 23,7 triliun rupiah. Peningkatan pembangunan ekonomi seharusnya sejalan dengan optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan kemakmuran masyarakat seperti pembangunan infrastruktur. Namun bila kita lihat struktur belanja daerah Kabupaten Madiun yang masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang jasa serta proporsi belanja modal masih relatif kecil, hal ini yang menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada perspektif jangka menengah perekonomian Kabupaten Madiun tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam dekade mendatang, mengingat beberapa hal. Pertama, peranan sektor ekonomi yang dominan (pertanian) belum bisa meningkatkan elastisitas penciptaan lapangan pekerjaan, fenomena ini dapat diindikasikan dengan kurangnya minat angkatan kerja pada kelompok usia 20 sampai dengan 34 tahun yang mau bekerja pada sektor pertanian, sehingga masih tingginya kelompok usia tersebut yang merantau keluar Kabupaten Madiun.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu bekerja keras lagi mengingat dampak pandemi ini dapat meningkatkan jumlah penduduk

miskin sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun naik kembali, karena sebagian besar keluarga di Kabupaten Madiun masih hidup sedikit di atas garis kemiskinan akan kembali terperosok kedalam garis kemiskinan. Dinamika perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah melalui instrumen distribusi dana perimbangan dan regulasi fiskal.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan diderivasikan dalam kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi antara lain karena ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan penanganan dan pemulihannya saat ini maupun tahun berikutnya sebagai akibat dari pandemi tersebut. Maka tema RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2023 yaitu "**Penguatan Daya Saing Daerah**", selaras dengan tema RKPD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "**Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro**" serta Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2023 yaitu " **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Perlu penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang mana selama ini pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta terbitnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengacu pada Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi tersebut merupakan tantangan yang sangat berat untuk tahun 2022 dan tahun 2023 serta tahun-tahun mendatang tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal APBN dan APBD akibat pandemik tersebut akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

1. Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) yang kurang taat akan kewajibannya membayar pajak/retribusi daerah dan terkena dampak covid-19.
2. Perlunya Penguatan database PBB-P2.
3. Penyesuaian Perda terkait Pajak dan Retribusi.
4. Perbaikan Sistem, sarana prasarana pendukung untuk mekanisme pembayaran pajak.
5. Penyesuaian Regulasi APBN Pemerintah Pusat ke Daerah

Berdasarkan permasalahan di atas maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan pelayanan pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan mengembangkan aplikasi yang sudah ada berupa aplikasi E-Pelayanan Mandiri untuk pengajuan pelayanan PBB secara Online, Aplikasi si Kampung untuk mewadahi pelayanan pajak daerah BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya non PBB-P2, selain itu juga disediakan nomor Whatsapp pelayanan terkait pajak daerah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pajak
2. Memperkuat database PBB P-2 dengan terus melakukan kegiatan mutasi, pemecahan dan pencarian objek pajak baru agar dapat memperluas tax base yang sudah ada dengan jalan pelayanan jemput bola ke 15 kecamatan. Selain itu juga Sinergi database dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait, misalnya dalam hal persyaratan perijinan sebagai bagian dari upaya pendataan dan pengawasan kepatuhan pajak PBB P-2 di Kabupaten Madiun sebagai implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Madiun
3. Review dan Penyusunan Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Perluasan kanal pembayaran pajak daerah bekerjasama dengan Bank RKUD sehingga masyarakat diberikan berbagai pilihan kemudahan tempat pembayaran pajak daerah
5. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Terkait Regulasi Kebijakan APBN untuk Pemerintah Daerah

Dengan startegi tersebut maka Kebijakan pendapatan daerah maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peningkatan Sinergitas di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah Penghasil ;
- c. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah;

- d. Sosialisasi dan kemudahan pembayaran pajak kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah ;
- e. Pemutakhiran data obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan kondisi terakhir;
- f. Optimalisasi kinerja Perusahaan Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- g. Peningkatan SDM Aparatur bidang Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi atas tunggakan PBB-P2 serta penagihan door to door kepada Wajib Pajak;
- i. Pengembangan Sistem digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

3.2.1.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Madiun.

Upaya-upaya yang rencana dilakukan Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah Tahun 2023 diarahkan pada :

1. Penguatan database PBB P-2 dengan terus melakukan kegiatan mutasi, pemecahan dan pencarian objek pajak baru agar dapat memperluas tax base dari yang sudah ada
2. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah lainnya ataupun retribusi daerah yang ada dan integrasi data dari wajib pajak yang sudah ada;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, dan peningkatan kualitas SDM pengelola;
4. Sinergi database dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang

terkait, misalnya dalam hal persyaratan perijinan sebagai bagian dari upaya pendataan dan pengawasan kepatuhan pajak PBB P-2 di Kabupaten Madiun sebagai implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Madiun

5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah serta regulasi terkait kebijakan APBN untuk Pemerintah Daerah;
6. Review dan Penyusunan Regulasi Baru yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilakukan perubahan sesuai dengan potensi, kondisi perekonomian dan regulasi yang ada;
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara Peningkatan pelayanan pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan pajak yang dapat melayani semua jenis pajak tidak hanya PBB P-2, dan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pajak dengan menyediakan nomor Whatsapp pelayanan terkait pajak daerah;
8. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

2. Memanfaatkan Potensi Pendapatan Daerah.

Pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Madiun melalui Sinergi database dengan Organisasi Perangkat Daerah

lainnya yang terkait dan peningkatan hubungan/kerjasama Antar Kabupaten/Kota.

3. Meningkatkan kinerja pelaporan dan evaluasi atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

Dalam dokumen RKPD Tahun 2023, target Pendapatan Daerah Rp. 1.846.542.467.178,00 mengalami penurunan 2,15% atau sebesar Rp. 40.505.293.721,00 jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebesar Rp. 1.887.047.760.899,00, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 249.138.433.169,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 284.453.196.941,00 mengalami penurunan Rp. 35.314.763.772,00 atau sebesar 12,41 %. Penurunan tersebut terinci sebagai berikut:

- 1) Hasil Pajak Daerah naik sebesar 1,14 % yaitu Rp. 870.000.000,00 berasal dari kenaikan PBB, Restoran dan Reklame;
- 2) Hasil Retribusi Daerah naik sebesar 47,38 % yaitu Rp. 4.565.937.300,00 terbesar berasal dari retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik sebesar 5,43 % karena Pendapatan dari PDAM, PD BPR dan PD Umbul yang mengalami kenaikan yaitu Rp. 429.888.722,00;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar 21,63 % yaitu Rp. 41.180.589.794,00 yang terbesar berasal dari penurunan Bunga Deposito dan BLUD RSUD DOLOPO.

- b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp. 1.591.404.034.009,00 dibanding tahun 2022 tidak mengalami perubahan atau tetap.

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diasumsikan tetap;
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah diasumsikan tetap.

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dibanding tahun 2022 sebesar 11.190.529.949,00 mengalami penurunan Rp. 5.190.529.949,00 atau sebesar 46,38 %, diasumsikan terdapat penurunan hibah dari Pemerintah Pusat.

Tabel 3.3
Realisasi Tahun 2018-2021 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun 2023

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021 (*)	Target Tahun 2022	Proyeksi /Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	219.041.431.266,71	229.206.394.170,37	258.211.505.535,08	333.154.568.459,37	284.453.196.941,00	249.138.433.169,00
a	Pajak Daerah	62.938254.446,60	68.639.241.664,04	69.642.788.090,22	78.598.486.074,89	76.472.700.000,00	77.342.700.000,00
b	Retribusi Daerah	30.818.197.044,02	9.725.917.059,00	8.759.612.040,00	7.990.997.700,00	9.636.587.350,00	14.202.524.650,00
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.769.704.455,70	6.290.894.932,17	7.537.159.212,28	7.602.655.088,65	7.914.918.850,00	8.344.807.572,00
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	119.515.275.320,39	144.550.340.515,16	172.271.946.192,58	238.962.449.595,83	190.428.990.741,00	149.248.400.947,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.550.720.314.776,00	1.654.485.204.009,00	1.434.671.556.713,00	1.607.585.219.548,00	1.591.404.034.009,00	1.591.404.034.009,00
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.286.346.821.945,00	1.305.223.591.072,00	1.174.980.529.263,00	1.456.250.985.632,00	1.477.983.568.000,00	1.477.983.568.000,00
b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	151.156.308.000,00	208.501.962.000,00	160.451.269.000,00	0,00	0,00	0,00
c	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	113.217.184.831,00	140.759.651.027,00	99.239.758.450,00	0,00	0,00	0,00
d	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	151.334.233.916,00	113.420.466.009,00	113.420.466.009,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	59.820.380.000,00	63.325.176.827,00	149.574.338.590,00	37.753.496.505,00	11.190.529.949,00	6.000.000.000,00
a	Pendapatan Hibah	55.515.400.000,00	58.678.762.774,00	65.875.038.590,00	37.753.496.505,00	11.190.529.949,00	6.000.000.000,00
b	Pendapatan Lainnya	4.304.980.000,00	4.646.414.053,00	83.699.300.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		1.829.582.126.042,71	1.947.016.775.096,37	1.842.457.400.838,08	1.978.493.284.512,37	1.887.047.760.899,00	1.846.456.309.402,00

Sumber : Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2021 BPKAD diolah Bappeda

(*) unaudited BPK Tahun 2021

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada money follow program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok perangkat daerah.

Arah kebijakan belanja Kabupaten Madiun pada prinsipnya digunakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun yaitu Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan prioritas pembangunan daerah. Dituangkan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah serta pemenuhan terhadap fungsi infrastruktur sebesar minimal 40% dari total belanja daerah dalam;
- b. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- c. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang telah ditetapkan;
- d. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (Specific Grant: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- f. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

Belanja daerah diprioritaskan fokus pada program-program yang akan dicapai, antara lain :

1. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan peningkatan layanan infrastruktur serta pembentukan

- kawasan industri;
2. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata;
 3. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
 4. Penguatan kelembagaan ekonomi;
 5. Pengembangan pasar.

Total rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.924.107.449.990,00 mengalami penurunan 2,10 % atau sebesar Rp. 41.207.932.257,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.965.315.382.247,00, dengan perincian sebagai berikut: (SESUAI Hasil inputan di SIPD)

a. Belanja Operasi;

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.261.709.147.451,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 1.307.813.807.361,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 46.104.659.910,00 atau sebesar 3,53 %. dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 711.488.216.734,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp. 420.397.569.163,00;
- 3) Belanja Subsidi dialokasikan sebesar Rp. 2.784.651.500,00;
- 4) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 123.128.710.054,00;
- 5) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 3.910.000.000,00;

b. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 264.997.871.539,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 235.651.143.886,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 29.346.727.653,00 atau sebesar 12,45 %. dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- 1) Belanja modal tanah tidak dialokasikan;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp. 61.454.991.425,00;
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan dialokasikan sebesar Rp. 98.396.037.926,00;
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dialokasikan sebesar Rp. 104.468.802.494,00;
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya dialokasikan sebesar Rp. 678.039.694,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 33.700.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.700.000.000 atau sebesar 25,82 %.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 372.400.431.000,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 388.150.431.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 15.750.000.000,00 atau sebesar 4,16 %.

Tabel 3.4
Realisasi Tahun 2018-2021 dan Target Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021 (*)	Target Tahun 2022	Proyeksi /Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELANJA OPERASI	1.462.018.199.562,83	1.583.094.187.373,90	1.520.686.285.886,77	1.241.716.368.749,17	1.307813.807.361,00	1.261.709.147.451,00
a	Belanja Pegawai	719.521.806.765,00	723.411.167.223,00	715.160.168.516,00	696.782.827.224,00	750.176.518.498,00	711.488.216.734,00
b	Belanja Barang	351.099.485.845,83	394.652.712.001,90	374.546.617.144,80	298.458.561.983,17	499.107.151.449,00	420.397.569.163,00
c	Belanja Subsidi	549.370.000,00	475.315.000,00	291.847.000,00	1.562.940.000,00	3.581.921.917,00	2.784.651.500,00
d	Belanja Hibah	72.895.360.112,00	37.887.072.396,00	35.642.112.629,00	37.076.064.642,00	51.050.654.272,00	123.128.710.054,00
e	Belanja Bantuan Sosial	8.357.850.000,00	11.887.938.750,00	11.089.100.000,00	7.835.974.900,00	3.987.561.225,00	3.910.000.000,00
f	Belanja Bantuan Keuangan	309.594.326.840,00	414.779.982.003,00	383.956.440.596,97	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL	291.642.038.611,80	357.952.659.653,67	254.429.829.266,14	183.413.874.591,70	235.651.143.886,00	264.997.871.539,00
a	Belanja Tanah	7.297.009.600,00	6.311.184.000,00	6.560.084.000,00	3.085.600.000,00	0,00	0,00
b	Belanja Peralatan dan Mesin	59.547.832.306,91	70.058.452.835,92	82.054.730.567,96	91.594.147.420,70	66.240.790.796,00	61.454.991.425,00
c	Belanja Bangunan dan Gedung	69.938.404.464,89	131.372.263.208,31	44.804.351.907,96	46.148.549.540,00	63.344.758.656,00	98.396.037.926,00
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.449.623.310,00	125.706.448.091,92	114.852.625.739,84	37.499.542.486,00	101.868.202.743,00	104.468.802.494,00
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.580.541.865,00	20.947.178.015,00	4.928.796.151,00	4.864.568.145,00	4.197.391.691,00	678.039.694,00
f	Belanja Aset Lainnya	846.627.065,00	3.557.133.502,52	1.229.240.900,00	221.467.000,00	0,00	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	802.998.320,00	1.442.922.500,00	17.643.313.484,00	27.217.883.918,00	33.700.000.000,00	25.000.000.000,00
a	Belanja Tidak Terduga	802.998.320,00	1.442.922.500,00	17.643.313.484,00	27.217.883.918,00	33.700.000.000,00	25.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	5.361.073.900,00	5.821.721.600,00	3.798.521.700,00	413.991.532.009,00	388.150.431.000,00	372.400.431.000,00
a	Bagi Hasil Pajak	4.460.800.900,00	4.880.423.600,00	3.078.357.700,00	9.968.066.500,00	9.212.317.000,00	9.212.317.000,00
b	Bagi Hasil Retribusi	900.273.000,00	941.298.000,00	720.164.000,00	404.023.465.509,00	0,00	0,00
c	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	378.938.114.000,00	363.188.114.000,00
T O T A L		1.759.824.310.394,00	1.948.311.491.127,57	1.796.557.950.336,91	1.866.339.659.267,87	1.965.315.382.247,00	1.924.107.449.990,00

Sumber : Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2021 BPKAD diolah Bappeda
(*) unaudited BPK Tahun 2021

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial ;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2022 diarahkan :

1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;

- b. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) untuk menambah Dana Cadangan;
 - c. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, dan provinsi;
 - d. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng ;
 - e. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat;
2. Dari Sisi Pengeluaran Daerah

Sumber pengeluaran daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- b. Peningkatan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kepada BUMD untuk memenuhi kebutuhan modal minimal BUMD sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber peningkatan PAD. Pemenuhan modal minimal BUMD juga harus disertai dengan peningkatan kinerja BUMD yang didukung oleh peraturan daerah yang baik dan pengelolaan BUMD oleh SDM yang profesional. Penyertaan modal kepada BUMD didasarkan pada:
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Dharma Purabaya;
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Perumda Obyek Wisata Umbul Square;
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Daerah.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 99.314.982.812,00 dibanding tahun 2022

sebesar Rp. 98.767.621.348,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 547.361.464,00 atau sebesar 0,55%.

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 21.750.000.000,00 dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 20.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 atau sebesar 11,90%. Secara umum maka penerimaan dan pembiayaan pada RKPD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Tahun 2018-2021 dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021 (*)	Target Tahun 2022	Proyeksi /Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	
1	Penerimaan Pembiayaan	114.184.891.727,18	172.034.096.691,26	165.739.380.660,06	207.138.749.161,00	98.767.621.348,00	99.314.982.812,00
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81.719.453.049,77	172.034.096.691,26	165.739.380.660,06	207.138.749.161,00	98.767.621.348,00	99.314.982.812,00
b	Pencairan Dana Cadangan	32.437.909,652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	27.529.025,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	21.024.224.000,00	20.500.000.000,00	21.750.000.000,00
a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
b	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	11.024.224.000,00	10.500.000.000,00	11.750.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	102.264.769.021,18	167.034.096.691,26	161.239.380.660,06	186.114.525.161,23	78.267.621.348,00	77.564.982.812,00

Sumber : Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018-2021 BPKAD diolah Bappeda

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun pada Tahun 2023 secara periodik dan normatif merupakan prioritas pembangunan pada tahun terakhir dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2023 selain berpijak pada beberapa ketentuan di atas, juga mengacu pada data permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis serta disinkronkan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2023 relevan dengan tujuan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah (PD) yang paling tinggi kontribusinya terhadap pencapaian target sasaran pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari Visi dan misi Kepala Daerah yang dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalnya. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sebagai upaya untuk menjamin aspek keberlanjutan perencanaan daerah, maka RKPD Kabupaten Madiun tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD tahun 2018 - 2023. Tujuan dan sasaran merupakan penterjemahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah, agar setiap program dan kegiatan yang dirumuskan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara detail, alur pemikiran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah “AYO APIK BARENG” yang merupakan seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Madiun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Madiun Tahun 2023

No	VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK		
	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai dengan meningkatkan	Membangun harmonisasi social yang berpondasi dari nilai religius dan kearifan lokal	Menguatkan karakteristik kebudayaan Terwujudnya nilai-nilai keagamaan dan gotong-royong dalam kehidupan masyarakat Terciptanya ketenteraman dan

No	VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK		
	MISI	TUJUAN	SASARAN
		kehidupan beragama, menguatkan budaya dan kearifan lokal	
2	Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan public	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk pelayanan publik	Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Meningkatnya inovasi pelayanan public berbasis transformasi digital Meningkatnya inovasi pelayanan public berbasis transformasi digital
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan	Meningkatnya daya saing ekonomi inklusif, mandiri dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian Terjaganya keseimbangan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya ketahanan bencana daerah Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

No	VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK		
	MISI	TUJUAN	SASARAN
4	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan nasional memperhatikan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa

modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional muncul untuk mendorong pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan tema RKP Nasional Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, terdapat tujuh prioritas Nasional :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, telah diseleraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun (2019-2024). Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki tugas memadukan antara kebijakan pemerintah nasional dengan kebijakan kabupaten/kota yang bersumber dari harapan atau aspirasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 di provinsi Jawa Timur untuk mempercepat program-program yang tersusun dalam RPJPD dan RPJMD Jawa Timur. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yaitu **“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”**. Ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;

4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum & peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang terdapat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, yang sinkron dengan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2023 menggunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat Nasional maupun Provinsi, dengan keterkaitan/hubungan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Hubungan RKP dengan Prioritas Pembangunan
Tahun 2023

	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN MADIUN
Tema	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro	Penguatan Daya Saing Daerah
Proritas	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Penguatan Kelembagaan Ekonomi
	Pengembangan wilayah untuk	Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam	1. Percepatan Pembangunan

	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN MADIUN
	mengurangi kesenjangan;	Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;	Infrastruktur Kawasan Strategis 2. Membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar
	SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
	Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Lokal;	-
	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;	Pengembangan Produk-Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan Dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Kesiapsiagaan Bencana
	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum & peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Penigkatan Stabilitas Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penyelarasan dengan RKP dan RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka RPKD Kabupaten Madiun tahun 2023 mengambil tema yaitu **“Penguatan Daya Saing Daerah”**. Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diseleraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2018-2023), sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Keselarasan Arah Kebijakan
Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023
dan Prioritas Pembangunan Daerah Dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2023

ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018- 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023
Penguatan Infrastruktur Kawasan Strategis Dan Pengembangan Pasar Mendukung Daya Saing Daerah Guna Meningkatkan Perekonomian	1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	1. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, sarana prasarana keselamatan jalan, irigasi) 2. Pembentukan kawasan industri
	2. Pengembangan Produk-Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan Dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknik pengolahan budidaya dan pengolahan perikanan, tanaman pangan dan tanaman perkebunan. 2. Peningkatan manajemen pariwisata
	3. Kesiapsiagaan Bencana	1. Peningkatan upaya sistematis dalam penanggulangan bencana melalui manajemen resiko.
	4. Penguatan Kelembagaan Ekonomi	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat; 2. Penguatan jalur akses permodalan.
	5. Membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar	1. Peningkatan sarana prasarana pengembangan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah berbasis digital; 2. Perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

	6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 2. Peningkatan pendidikan yang bernutu
	7. Peningkatan Stabilitas Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas layanan publik. 2. Kondusifitas daerah

Dalam rangka menjabarkan prioritas pembangunan daerah yang merujuk kepada penyelarasan dengan RKP dan RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka RPKD Kabupaten Madiun Tahun 2022 telah menetapkan program prioritas, indikator program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab, sebagai berikut :

Tabel 4.4.

Kesesuaian Prioritas Daerah, Program, Indikator Kinerja Program, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROPINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN						
		PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM P-RPJMD 2018-2023	PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Pengembangan Produk-Produk Olahan Hasil Pertanian, Perikanan Dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tehnik pengolahan budidaya dan pengolahan perikanan, tanaman pangan dan tanaman perkebunan	Pogram pengelolaan perikanan budidaya	Pogram pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	50,000,000	Dinas Pertanian Dan Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasanan Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasanan Hasil Perikanan	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan	50,000,000	Dinas Pertanian Dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	50,000,000	Dinas Pertanian Dan Perikanan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	1,335,830,433	Dinas Pertanian Dan Perikanan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana	7,633,498,000	Dinas Pertanian Dan Perikanan

				n Prasarana Pertanian	n Prasarana Pertanian	pertanian dalam kondisi baik		
				Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	286,500,000	Dinas Pertanian Dan Perikana
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	1.309.500.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				Program Kerawanan Pangan	Program Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	116,500,000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	109,000,000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
			Peningkatan Manajemen Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga
				Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif				
				Program peningkatan	Program peningkatan	Persentase pengembangan	906,500,000	Dinas Pariwisata

				daya tarik destinasi pariwisata	daya tarik destinasi pariwisata	daya tarik yang dilaksanakan		Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	1,195,900,000	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga
		Penguatan Kelembagaan Ekonomi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	490,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
				Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan pengembangan UMKM	250,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
		Penguatan Jalur Akses Permodalan		Program Pemberdayaan Dan perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah Diberdayakan dan dilindungi	175,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang mendapatkan ijin Usaha	51,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro
				Program Pengelolaan Sistem	Program Pengelolaan Sistem	Persentase IKM yang memanfaatkan	70,506,300	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan

				Informasi Industri Nasional	Informasi Industri Nasional	SIINas		Usaha Mikro
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pengembangan Pasar	Memperluas Jaringan Pemasaran Produk Lokal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	42,800,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan Sarana Prasarana Pengembangan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Digital	Program Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan aplikasi layanan SPBE	1,620,150,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan	17,838,045,809	Dinas Kesehatan, RSUD Dolopo, RSUD Caruban

						sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	542,103,000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Pendidikan Yang Bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang	173,103,484,361	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

						terakreditasi		
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan pelestarian Nilai-Nilai budaya lokal							
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Sarpras Keselamatan Jalan, Irigasi)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	15,464,075,464	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	10,823,827,485	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	15,528,243,428	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Persentase trotoar kondisi baik		
				Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	2,602,161,500	Dinas Perumahan Dan Permukiman
				Program Penataan Bangunan	Program Penataan Bangunan	Persentase bangunan dan lingkungan yang	7,191,469,962	Dinas Pekerjaan Umum Dan

				Dan Lingkungannya	Dan Lingkungannya	ditata		Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap	47,191,205,107	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Persentase jumlah jembatan kondisi baik		
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik	19,802,000,000	Dinas Perhubungan
			Pembentukan Kawasan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah rencana pembangunan industri	60,500,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Upaya Sistematis Dalam Penanggulangan Bencana Melalui Manajemen Risiko	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	1,298,142,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

				Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana	681.545.689	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Stabilitas Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	75,002,600	aman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	55,950,000	aman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Minat Investasi	95,000,000	aman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kondusifitas Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban	376,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam	

				Ketertiban Umum	Ketertiban Umum	umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan		<i>Negeri</i>
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Indeks Keamanan Manusia	1,108,696,5 20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

4.2.4. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan pemerintah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan

2. Kesehatan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Pemenuhan kebutuhan air minum sehari – hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten

- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :
- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pelayanan informasi rawan bencana
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban
6. Sosial
- Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
 - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Disamping prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada uraian terdahulu, peningkatan capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2023 . Program, kegiatan dan sub kegiatan harus mendukung pemenuhan SPM.

4.3. Pelaksanaan Pilkada Serentak

Pelaksanaan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 merupakan amanat Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 tentang Pilkada. Ketentuan tersebut menegaskan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Madiun akan berakhir di Tahun 2023. Terkait daerah yang akan mengalami kekosongan kepala daerah, diatur pada ketentuan pasal 201 Ayat (9) UU 10/2016, untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, maka akan ditunjuk penjabat Kepala Daerah.

Sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bagi daerah yang periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) berakhir pada tahun 2023 maka dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan (RKPD) yang akan digunakan pedoman adalah Rencana Pembangunan Daerah yang penyusunannya akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan RKPD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Disamping selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan pokok-pokok pikiran juga harus memperhatikan ketersediaan kapasitas riil anggaran.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD).

Untuk mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, RKPD 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan dukungan system informasi pemerintahan daerah (SIPD) secara elektronik sehingga dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan public pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2023 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun Anggaran 2021 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Adapun Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran (Rp),00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	617.282.447.805
2	Dinas Kesehatan	87.756.252.522
3	RSUD Caruban	103.955.643.608
4	RSUD Dolopo	72.517.756.812
5	Dinas PU dan Penataan Ruang	170.867.584.463
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.585.132.548
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11.558.037.666
8	Satuan Polisi Pamong Praja	8.903.175.477
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.643.694.200
10	Dinas Sosial	7.279.527.611
11	Dinas Tenaga Kerja	8.635.100.595
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	6.743.958.737
13	Dinas Lingkungan Hidup	19.649.432.689
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.281.757.677
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.056.279.715
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak	17.034.502.588
17	Dinas Perhubungan	28.751.531.744
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.085.023.477
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	12.717.069.137
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.253.497.933
21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	9.288.695.511
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.464.210.300
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	24.993.966.608
24	Bagian Administrasi Pemerintahan	834.064.070
25	Bagian Hukum	1.102.915.696

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran (Rp),00
26	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	700.000.000
27	Bag Kesejahteraan Rakyat	7.500.000.000
28	Bag Perekonomian	7.332.066.500
29	Bag Umum dan KDH dan WKDH	23.758.242.600
30	Bag Organisasi	612.680.921
31	Bag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.109.668.723
32	Bag Administrasi Pembangunan	598.226.925
33	Sekretariat DPRD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	58.535.814.327
34	Kecamatan Balerejo	2.556.130.418
35	Kecamatan Dagangan	2.885.364.271
36	Kecamatan Dolopo	4.085.612.421
37	Kelurahan Bangunsari Dolopo	600.000.000
38	Kelurahan Mlilir	600.000.000
39	Kecamatan Geger	2.708.026.399
40	Kecamatan Gemarang	1.968.777.984
41	Kecamatan Jiwan	2.911.323.000
42	Kecamatan Kebonsari	2.180.250.574
43	Kecamatan Kare	2.235.824.747
44	Kecamatan Madiun	3.844.011.761
45	Kelurahan Nglames	600.000.000
46	Kecamatan Mejayan	4.747.081.316
47	Kelurahan Bangunsari Mejayan	534.000.000
48	Kelurahan Krajan	541.500.000
49	Kelurahan Pandean	550.000.000
50	Kecamatan Pilangkenceng	2.204.340.938
51	Kecamatan Sawahan	2.737.409.168

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran (Rp),00
52	Kecamatan Saradan	2.912.271.087
53	Kecamatan Wungu	4.436.788.610
54	Kelurahan Wungu	600.000.000
55	Kelurahan Munggut	600.000.000
56	Kecamatan Wonoasri	2.241.306.974
57	Inspektorat	6.390.361.410
58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.057.623.396
59	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	435.888.186.253
60	PPKD BUD	
61	Badan Pendapatan Daerah	9.847.187.899
62	Badan Kepegawaian Daerah	7.851.018.876
JUMLAH ANGGARAN		1.881.702.356.687

Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 pada masing- masing Perangkat Daerah secara rinci adalah sebagai berikut:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	50 Unit	100 persen	6,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,966,400			
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	Kab. Madiun, Madiun, Nglames	86,00 nilai 90 nilai	75 Unit	100 persen	96,044,003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	86,00 nilai 90 nilai	95,587,525			
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	292,577,223	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,140,861,440			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												209,370,570,370		202,426,606,353	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												112,197,718,322		105,245,354,305	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2 Ruang	100 persen	389,839,150	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	389,839,150			
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	18 Ruang	100 persen	1,604,451,600	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1,604,451,600			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	5 Ruang	100 persen	949,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	949,600,000
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	7 Unit	100 persen	1,023,004,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1,023,004,000
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	25 Ruang	100 persen	16,192,903,102	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	9,240,538,885

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	5 Ruang	100 persen	485,700,625	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	485,700,825
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	7 Ruang	100 persen	600,054,525	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	600,054,525
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	12 Unit	100 persen	124,488,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	124,488,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1 Paket	100 persen	2,997,840,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2,997,840,400	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	500 Unit	100 persen	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	175,000,000	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	194 Paket	100 persen	28,638,441,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	28,638,441,050	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	406 Satuan Pendidikan	100 persen	380,041,805	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	380,041,805
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	15 Peserta Didik	100 persen	450,937,923	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	450,937,923
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1108 Orang	100 persen	10,749,299,952	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	10,749,299,952

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	500 Orang	100 persen	375,238,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	375,238,800
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	406 Satuan Pendidikan	100 persen	98,771,490	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	98,771,490
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	405 Satuan Pendidikan	100 persen	43,742,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	43,742,960,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	17 Orang	100 persen	77,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	77,500,000		
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	APK SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	17 Ruang	100 persen	3,141,645,900	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	3,141,645,900		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													58,497,708,808		58,497,708,808
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	7 Ruang	100 persen	2,528,892,576	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2,528,892,576		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	27 Lembaga	100 persen	6,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	6,600,000,000
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	60 Ruang	100 persen	10,352,532,054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	10,352,532,054
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2 Ruang	100 persen	337,185,576	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	337,185,576

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1 Ruang	100 persen	100,352,850	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	100,352,850
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	5 Ruang	100 persen	1,204,234,200	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1,204,234,200
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	14 Ruang	100 persen	3,793,337,730	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	3,793,337,730

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2 Ruang	100 persen	602,117,100	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	602,117,100
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	17 Unit	100 persen	2,538,044,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2,538,044,980
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	124 Paket	100 persen	3,445,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	3,445,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	400 Paket	100 persen	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	140,000,000		
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	12 Paket	100 persen	1,198,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1,198,020,000		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	17400 Peserta Didik	100 persen	222,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	222,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	600 Peserta Didik	100 persen	565,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	565,000,000
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	243 Orang	100 persen	2,584,175,892	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2,584,175,892
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	400 Orang	100 persen	271,837,300	Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	271,837,300

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	49 SMP	100 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	25,000,000		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	51 Satuan Pendidikan	100 persen	21,668,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	21,668,920,000		
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	51 Orang	100 persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	20,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	5 Unit	100 persen	2,459,147,500	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	2,459,147,500
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	5 Ruang	100 persen	493,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	493,948,000
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	7 Paket	100 persen	177,337,500	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	177,337,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	286 Paket	100 persen	100,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	100,100,000		
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	70 Unit	100 persen	473,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	473,000,000		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	0 Peserta Didik 19000 Peserta Didik	100 persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	300,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
																Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1731 Orang	100 persen	9,272,764,440	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	9,272,764,440											
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	0 Orang 300 Orang	100 persen	203,133,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	212,133,800											
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	691 Satuan Pendidikan	100 persen	12,963,280,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	12,963,280,000											

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	740 Orang	100 persen	83,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	83,000,000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							10,005,628,000						10,005,028,000
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1 Paket	100 persen	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 persen 62 persen	450,000,000
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	0 Peserta Didik 1200 Peserta Didik	100 persen	380,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	380,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	120 Orang	100 persen	555,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	555,000,000
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	30 Orang	100 persen	34,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	34,938,000
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	231 Satuan Pendidikan	100 persen	7,409,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	7,409,960,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	9 Satuan Pendidikan	100 persen	1,170,130,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	1,170,130,000
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Paket A/B/C	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	9 Orang	100 persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan 2. APS SD 3. Persentase lembaga SD terakreditasi A 4. APS SMP 5. Persentase lembaga SMP terakreditasi A 6. APS PAUD 7. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi 8. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	6,49 angka 100 angka 4,58 persen 100 angka 77,08 persen 100 angka 100 persen 62 persen	5,000,000
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					95,928,510				95,928,510			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					95,928,510				95,928,510			
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Prosentase dokumen kurikulum SD yang dilaksanakan 2. Prosentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD yang tersusun	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 persen	3000 Buku	1 dokumen	76,362,840	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Prosentase dokumen kurikulum SD yang dilaksanakan 2. Prosentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan	100 % 100 persen	76,362,840
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Prosentase dokumen kurikulum SD yang dilaksanakan 2. Prosentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD yang tersusun	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 persen	150 Orang	1 dokumen	19,565,670	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Prosentase dokumen kurikulum SD yang dilaksanakan 2. Prosentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan	100 % 100 persen	19,565,670
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					24,000,000				24,000,000			
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					24,000,000				24,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru murid SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,18 persen 99,32 persen	1 Dokumen	28 rasio	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	56,18 persen 99,32 persen	9,000,000
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru murid SD	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,18 persen 99,32 persen	1 Laporan	28 rasio	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	56,18 persen 99,32 persen	15,000,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								2,343,009,451					2,343,009,451
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								1,770,000,000					1,770,000,000
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,130,000,000					1,130,000,000
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Objek 36 Objek	1 Buah	1,030,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100 persen	1,030,000,000
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	1 Buah	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100 persen	100,000,000
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								335,000,000					335,000,000
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Objek	28 Buah	325,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100 persen	325,000,000
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 orang	28 Buah	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100 persen	10,000,000
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								305,000,000					305,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah lembaga adat yang dibina	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Objek	206 Lembaga	55,000,000	Dana Insentif Daerah	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100 persen	55,000,000
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah lembaga adat yang dibina	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 lembaga	206 Lembaga	250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	1. Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100 persen	250,000,000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							373,009,451			373,009,451		
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							373,009,451			373,009,451		
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	1. Cakupan pembinaan sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Orang	1 Kali	44,293,249	Dana Insentif Daerah	1. Cakupan pembinaan sejarah	100 persen	44,293,249
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	1. Cakupan pembinaan sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah pembinaan sejarah yang difasilitasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Dokumen	1 Kali	328,716,202	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	1. Cakupan pembinaan sejarah	100 persen	328,716,202
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							200,000,000			200,000,000		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							150,000,000			150,000,000		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,77 persen	20 Objek	10 Buah	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	1. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	12,77 persen	50,000,000
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	1. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,77 persen	10 Objek	10 Buah	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	1. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	12,77 persen	100,000,000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							50,000,000			50,000,000		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	1. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten yang dikelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,77 persen	20 Objek	20 Buah	50,000,000	Dana Insentif Daerah	1. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	12,77 persen	50,000,000
TOTAL												617,282,447,805			617,553,513,146		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Kewenangan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	1 Unit	100 persen	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	750,000,000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Kewenangan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	2 Unit	100 persen	567,655,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	567,655,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Kewenangan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	2 Unit	100 persen	2,412,098,619	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	68,779,619
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Kewenangan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	26 puskesmas 0 Paket	100 persen	2,816,364,892	Pajak Rokok DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	169,524,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Kewenangan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	35 Item	100 persen	2,032,257,246	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Kewenangan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	20 Unit	100 persen	50,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	50,000,000
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP Kewenangan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	312 paket	100 persen	169,524,000	Pajak Rokok DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	169,524,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							14,407,506,296				7,165,073,141		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	9159 Orang	100 persen	58,699,165	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	58,699,165

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Ibu bersalin tidak mampu yang nebdapat pelayanan persalinan sesuai standard Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu bersalin yang mendapat pelayanan sesuai standart	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	100 persen 0 Orang 100 Orang 100 persen	100 persen	422,227,390	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- BOKKB- Jaminan Persalinan Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	422,227,000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar presentase bayi baru lahir yangmendapat pelayanan kesehatan sesuai stadart	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang 100 Orang 100 persen	100 persen	20,701,660	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	25,000,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang	100 persen	76,911,080	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- BOKKB- BOK Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	80,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang 100 Orang 100 persen	100 persen	46,038,060	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	50,000,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang 100 persen	100 persen	50,748,140	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	70,000,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang	100 persen	34,163,588	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	34,163,588
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	239940 Orang	100 persen	50,000,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	70,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	17338 Orang	100 persen	50,000,000	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	50,000,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang	100 persen	50,000,000	Pajak Rokok		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang	100 persen	330,000,000			1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Penanganan KLB < 24 Jam	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Dokumen 100 %	100 persen	432,507,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Cakupan Desa yang melaksanakan Program STBM Cakupan Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	100 % 50 % 0 Dokumen	100 persen	645,235,331	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Cakupan Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani Cakupan Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya Cakupan Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	30 % 100 % 100 % 0 Dokumen	100 persen	50,000,000	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Cakupan Desa yang melaksanakan Program kab/kota Sehat Cakupan Desa yang melaksanakan Program STBM Cakupan Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Sesuai Peraturan Cakupan Keluarga yang menggunakan Jamban Sehat Cakupan Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan Cakupan TPM yang Memenuhi Syarat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	65 % 100 % 100 % 55 % 40 % 0 Dokumen	100 persen	74,061,340	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Cakupan Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani Cakupan Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya Cakupan Desa yang melaksanakan Program STBM Cakupan Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK Cakupan Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan Cakupan TPM yang memenuhi syarat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	30 % 100 % 100 % 50 % 37 % 0 Dokumen	100 persen	231,130,757	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	177,870,388
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Dokumen	100 persen	63,118,640	Pajak Rokok Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Dokumen	100 persen	50,000,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Orang 100 %	100 persen	80,000,000	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	1 Dokumen	100 persen	125,000,000	Pajak Rokok Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Dokumen	100 persen	614,934,638			1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	447,521,000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase masyarakat miskin yang menjadi PBID Persentase RS yg terakreditasi	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Dokumen 19 % 100 %	100 persen	10,300,000,000	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	2,764,796,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Unit 5 Unit	100 persen	248,131,000	DAK Non Fisik- BOKKB- Akreditasi Puskesmas		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	1 Unit	100 persen	153,898,507	Pajak Rokok Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	2,764,796,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM bidang Kesehatan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	2000 Keluarga	100 persen	150,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	150,000,000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					159,341,250				2,870,694,500				
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	0 Unit 26 Unit	100 persen	107,400,000	Pajak Rokok Dana Insentif Daerah		1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Prevalensi Balita Stunting 4. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas 5. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit 6. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	0 per 100.000 lahir hidup 0 per 1.000 lahir hidup 20,0 persen 79 persen 63 persen 81 persen	105,898,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang 42 Orang		886,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			1,110,060,000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,460,000	Dana Insentif Daerah			25,460,000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					127,238,814				0		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kefarmasian)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190 Orang 360 Orang		127,238,814	Dana Insentif Daerah			0
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					271,941,850				0		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					20,000,000				0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1. Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standart	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek Jumlah Toko Alkes yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Toko Alkes Jumlah Toko Obat yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Toko Obat	Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	0 Sarana 70 Sarana 5 Sarana 4 Sarana	100 persen	20,000,000	Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		1. Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standart	85 persen	0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								121,390,000					0
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang diterbitkan	Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	0 Dokumen 200 PIRT	100 persen	121,390,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	85 persen	0
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								15,698,600					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1. Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standart	Cakupan DAM yang memenuhi syarat Cakupan TPM yang memenuhi syarat Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan TPM yang memenuhi syarat	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	56 % 37 % 0 Dokumen	37 persen	15,698,600	Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan	1. Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standart	85 persen	0
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					114,853,250						0	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1. Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standart	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah sampel yang diuji	Presentase Sampel makanan Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji laboratorium yang memenuhi syarat	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	0 Unit 57 Sampel	70 persen	114,853,250	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standart	85 persen	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					542,103,000						0	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					542,103,000							0
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa siaga aktif purnama mandiri	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 persen	0 Dokumen	20 persen	542,103,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1. Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	21 persen	0
TOTAL										87,756,252,522						75,444,671,815	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,571,505,813			1,571,510,813		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										896,944,279			896,944,279	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										896,944,279			896,944,279
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Balerejo		100 Unit Kerja		896,944,279	Pendapatan dari BLUD			896,944,279	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										611,695,934			611,700,934	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										611,695,934			611,700,934
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		17,555,550	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			17,555,550	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		2,100,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,100,000	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		3,150,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,150,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		12,269,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,269,600	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		26,177,420	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			26,177,420	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		9,314,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,314,400	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang		14,700,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,700,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang		4,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,200,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen		168,640,384	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			168,640,384	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	39,882,300	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			39,882,300
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0 Dokumen	7,020,720	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			7,020,720
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen	39,881,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			39,881,400
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0 Dokumen	12,770,880	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,770,880
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	20,536,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,536,800
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					0 Dokumen	124,862,680	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			124,862,680
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	37,758,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			37,758,800
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					0 Keluarga	70,875,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			70,875,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							30,000,000				30,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							30,000,000				30,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					0 Orang	30,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			30,000,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							32,865,600				32,865,600	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							32,865,600				32,865,600	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	32,865,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			32,865,600
TOTAL												1,571,505,813				1,571,510,813	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Gantrung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,880,786,700		1,880,786,700		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,163,590,000		1,163,590,000	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,163,590,000		1,163,590,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Unit Kerja 0 Unit		1,163,590,000	Pendapatan dari BLUD			1,163,590,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										654,668,458		654,668,458	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										654,668,458		654,668,458
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		16,670,180	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			16,670,180
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		2,100,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,100,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		4,725,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,725,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		73,943,930	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			73,943,930
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		64,531,613	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			64,531,613
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		37,276,825	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			37,276,825
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		48,211,620	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			48,211,620

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Gantrung

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		1,050,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,050,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang 0 Unit		4,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,200,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		3,150,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,150,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		179,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			179,200,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen 0 Unit		21,257,250	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			21,257,250	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		38,054,340	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			38,054,340	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		12,566,850	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,566,850	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		28,179,750	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			28,179,750	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		18,875,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			18,875,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		10,918,120	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			10,918,120	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Gantrung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		40,945,820	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			40,945,820	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		33,062,160	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			33,062,160	
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Keluarga		15,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			15,750,000	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								30,000,000				30,000,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								30,000,000				30,000,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Orang		30,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			30,000,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								32,528,242				32,528,242	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								32,528,242				32,528,242	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Kebon Sari, Mojorejo		0 Dokumen		32,528,242	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			32,528,242	
TOTAL									1,880,786,700				1,880,786,700	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,958,692,408		1,958,692,408		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,210,000,000		1,210,000,000	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,210,000,000		1,210,000,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Geger, Geger		0 Unit Kerja		1,210,000,000	Pendapatan dari BLUD			1,210,000,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										748,692,408		748,692,408	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										748,692,408		748,692,408
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				451 Orang		75,570,738	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			75,570,738
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang		9,901,380	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,901,380
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				403 Orang		7,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			7,500,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1677 Orang		105,140,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			105,140,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4543 Orang		61,703,700	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			61,703,700
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8676 Orang		26,750,612	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			26,750,612
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1253 Orang		1,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,500,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				431 Orang		1,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				35 Laporan		2,625,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,625,000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				11941 Keluarga		9,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,000,000	
TOTAL									1,958,692,408				1,958,692,408	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kaibon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		973 Dokumen		76,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			76,200,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		398 Dokumen		31,371,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			31,371,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		137 Dokumen		22,049,900	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			22,049,900
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		253 Dokumen		25,450,701	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		280 Dokumen		25,457,187	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			25,457,187
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		520 Dokumen		39,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			39,000,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		192 Dokumen 192 Orang		15,757,300	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			15,757,300
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		167 Dokumen		14,819,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,819,400
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				50 Dokumen		40,828,269	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			40,828,269
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		332 Keluarga		24,900,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			24,900,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								25,000,000				25,000,000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								25,000,000				25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kaibon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		2 Orang		25,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			25,000,000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								22,357,321				22,357,321	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								22,357,321				22,357,321	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Geger, Kaibon		199 Dokumen		22,357,321	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			22,357,321	
TOTAL									1,818,998,413				2,361,647,712	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Miliir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,108,200,000					1,108,200,000		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							540,000,000				540,000,000		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							540,000,000				540,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							540,000,000	Pendapatan dari BLUD			540,000,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							562,061,600				562,061,600		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							562,061,600				562,061,600	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							23,114,065	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			23,114,065
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	9,314,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,314,400
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	1,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,800,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	64,125,360	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			64,125,360
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	42,615,385	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			42,615,385
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	36,629,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			36,629,400
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3,250,200	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,250,200
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	17,100,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			17,100,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	2,550,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,550,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Mlilir

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	1,350,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,350,000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	142,050,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			142,050,000		
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	2,700,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,700,000		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	14,835,840	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,835,840		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	8,268,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			8,268,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	15,163,500	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			15,163,500		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	11,550,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,550,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	90,976,490	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			90,976,490		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	35,968,960	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			35,968,960		
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				0 Dokumen	9,900,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,900,000		
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	28,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			28,800,000		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						6,138,400			6,138,400				
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6,138,400			6,138,400				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	6,138,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,138,400	
TOTAL									1,108,200,000				1,108,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bangunsari

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		186,969,774	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			186,969,774	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		32,110,696	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			32,110,696	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 Dokumen		11,721,789	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,721,789	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		19,590,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			19,590,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		20,767,323	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,767,323	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		28,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			28,200,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		83,420,903	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			83,420,903	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		44,460,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			44,460,000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		5,400,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,400,000	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Keluarga		71,100,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			71,100,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									33,616,574			33,616,574	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									33,616,574			33,616,574	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bangunsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari		100 Dokumen		33,616,574	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			33,616,574	
TOTAL									1,875,181,138				1,931,546,195	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	5,400,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,400,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	3,600,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,600,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	108,942,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			108,942,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	14,505,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,505,000
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	9,810,900	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,810,900
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	16,483,480	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			16,483,480
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	36,409,440	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			36,409,440
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	171,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			171,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	134,782,970	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			134,782,970
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	86,083,316	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			86,083,316
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						23,500,920				23,500,920	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						23,500,920				23,500,920	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					0 Orang	23,500,920	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			23,500,920				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												50,230,894				
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													50,230,894			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					0 Dokumen	50,230,894	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			50,230,894				
TOTAL																		2,596,266,740			2,589,249,740

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,857,854,840			1,850,061,480		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,084,932,000			1,084,932,000	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,084,932,000			1,084,932,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Dagangan, Jetis		100 Unit Kerja		1,084,932,000	Pendapatan dari BLUD			1,084,932,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										705,695,320			697,901,960	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										705,695,320			697,901,960
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								29,632,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			29,632,800
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								9,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								9,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		82,248,160	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			82,248,160
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								47,761,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			47,761,800
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								3,675,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,675,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								21,230,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			21,230,400
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								3,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,000,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								3,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								3,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				3,000,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								3,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				3,000,000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								199,230,500	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				199,230,500
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								48,553,560	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				45,628,000
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								29,766,440	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				22,561,440
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								19,271,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				19,271,400
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								3,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				3,000,000
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								10,650,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				10,650,000
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								3,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				6,000,000
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				750,000
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								93,886,460	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				93,223,660
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				750,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas					100 Dokumen		54,688,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			54,688,800	
1	02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			1,500,000	
1	02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			1,500,000	
1	02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							24,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			24,600,000	
1	02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							67,227,520				67,227,520	
1	02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							67,227,520				67,227,520	
1	02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							46,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			46,800,000	
1	02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							20,427,520	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			20,427,520	
TOTAL									1,857,854,840				1,850,061,480	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,683,249,700		1,683,249,700			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,063,000,000		1,063,000,000		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,063,000,000		1,063,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Kab. Madiun, Wungu, Wungu				1,063,000,000	Pendapatan dari BLUD			1,063,000,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										592,257,641		592,257,641		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										592,257,641		592,257,641	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		29,402,660	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			29,402,660
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		4,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,200,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		9,150,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,150,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		29,582,430	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			29,582,430
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		24,140,008	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			24,140,008
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		13,852,200	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			13,852,200
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		23,628,587	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			23,628,587
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 Dokumen		148,150,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			148,150,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen		57,422,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			57,422,800

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					100 Dokumen	18,313,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			18,313,800
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					100 Dokumen	29,730,813	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			29,730,813
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0 Dokumen	71,536,845	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			71,536,845
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					100 Dokumen					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					40 Orang	6,300,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,300,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					100 Dokumen	75,747,498	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			75,747,498
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					100 Dokumen	30,100,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			30,100,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					140 Keluarga	21,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			21,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							27,992,059				27,992,059	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							27,992,059				27,992,059	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					100 Orang	27,992,059	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			27,992,059
TOTAL												1,683,249,700				1,683,249,700	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Mojopurno

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	2,250,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	87,920,252	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	20,357,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	8,118,320	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	17,893,682	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	70,294,988	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	8,810,480	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	54,707,540	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	19,726,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	100,467,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						66,898,109				0	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						66,898,109				0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Mojopurno

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	66,898,109	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	
TOTAL									1,793,191,182				1,193,246,152	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3,047,088,616		3,014,685,316		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,281,436,616		2,281,436,616	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										2,281,436,616		2,281,436,616
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		100 Unit Kerja		2,281,436,616	Pendapatan dari BLUD			2,281,436,616
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										693,544,343		661,141,043	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										693,544,343		661,141,043
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		120 Orang		26,759,072	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			26,756,672
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		120 Orang		9,709,472	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			9,709,472
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		120 Orang		20,400,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,400,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		1945 Orang		16,559,072	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			16,559,072
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		4069 Orang		30,509,629	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			30,509,629
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		3807 Orang		12,278,268	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,277,368
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		41 Orang 0 Orang		3,600,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,600,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		40 Orang		600,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kare

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		20 Dokumen		191,413,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			191,413,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		16 Dokumen		83,667,355	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			83,667,355	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		6 Dokumen		11,925,016	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,925,016	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		7 Dokumen		30,531,610	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			30,531,610	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		0 Dokumen 9 Dokumen 0 Unit		66,809,872	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			66,809,872	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		0 Dokumen 1 Dokumen		20,631,334	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,631,334	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		40 Dokumen		89,328,683	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			89,328,683	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		8 Dokumen		42,821,960	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			42,821,960	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		1200 Keluarga		36,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,600,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										27,500,000			27,500,000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										27,500,000			27,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		2 Orang		27,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			27,500,000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								44,607,657				44,607,657	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								44,607,657				44,607,657	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Kare, Semua Kelurahan		10 Dokumen		44,607,657	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			44,607,657	
TOTAL									3,047,088,616				3,014,685,316	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					24,750,000				24,750,000				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan				24,750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			24,750,000
TOTAL										3,267,833,000				3,267,833,360			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,961,637,953			2,870,087,753		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,188,859,953			2,188,859,953	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										2,188,859,953			2,188,859,953
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Saradan, Sugihwaras		100 Unit Kerja		2,188,859,953	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,188,859,953	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										731,878,000			640,327,800	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										731,878,000			640,327,800
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		436 Orang		48,631,690	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			48,631,690	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		416 Orang		22,227,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			22,227,600	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		369 Orang		21,525,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			21,525,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		1617 Orang		63,588,480	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			63,588,480	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		1617 Orang		49,517,440	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			49,517,440	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		1210000 Orang		37,657,200	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			37,657,200	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		63 Orang		7,350,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			7,350,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		18 Orang		19,977,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			19,977,600	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		15 Orang		1,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Saradan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		500 Dokumen		193,194,500	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			193,194,500	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		110 Dokumen		25,131,550	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			25,131,550	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		30 Dokumen		13,898,720	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			13,898,720	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		60 Dokumen		4,950,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,950,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		150 Dokumen		45,264,620	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			45,264,620	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		113 Orang		25,985,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			25,985,400	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		150 Dokumen		59,928,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			59,928,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		16 Dokumen		33,800,200	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		385 Keluarga		57,750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							40,000,000				40,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							40,000,000				40,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		4 Orang		40,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			40,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							900,000				900,000		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							900,000				900,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								900,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			900,000	
TOTAL									2,961,637,953				2,870,087,753	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumpasari

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD													
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Saradan, Sumpasari		100 Persen		2,189,364,000	Pendapatan dari BLUD				2,189,364,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan Kab. Madiun, Saradan, Sumpasari		100 Orang		61,533,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB				46,860,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		51,564,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				51,430,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		4,050,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				4,050,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		12,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				12,500,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		32,705,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				32,705,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan				16,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				16,800,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumber Sari

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		7,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			7,200,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		7,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			7,200,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		17850000 Orang		17,850,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			17,850,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		4,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,800,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		185,600,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			185,600,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		36,425,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			36,425,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		4,288,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,059,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		8,700,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			8,700,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		132,246,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			145,282,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		10,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			10,200,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Orang		5,400,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Sumber Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		45,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			45,000,000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Dokumen		59,641,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			59,641,000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Saradan, Semua Kelurahan		100 Keluarga		40,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			40,500,000	
TOTAL									2,933,566,000				2,928,166,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,486,263,691			2,486,263,691		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,753,327,191			1,753,327,191	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,753,327,191			1,753,327,191
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng Pilangkenceng		0 Unit Kerja		1,753,327,191	Pendapatan dari BLUD			1,753,327,191
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										732,936,500			732,936,500	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										732,936,500			732,936,500
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		381 Orang		37,410,344	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			37,410,344
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		365 Orang		14,850,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,850,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		371 Orang		31,050,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			31,050,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Kenongorejo		1789 Orang		5,648,926	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,648,926
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		2239 Orang		49,999,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			49,999,800
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		5694 Orang 9 Unit		29,219,640	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			29,219,640
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		0 Unit 10 Orang		4,488,200	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,488,200
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		22 Orang		825,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			825,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Pilangkenceng

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		1285 Dokumen		183,234,125	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			183,234,125	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		188 Dokumen		25,298,680	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			25,298,680	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		31 Dokumen		15,120,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			15,120,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		56 Dokumen		13,873,120	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			13,873,120	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		0 Dokumen 203 Dokumen		82,589,945	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			82,589,945	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Pasien Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		100 Orang		16,473,120	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			16,473,120	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		439 Dokumen		92,913,200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			92,913,200	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		15 Dokumen		55,692,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			55,692,400	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan		495 Keluarga		74,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			74,250,000	
TOTAL											2,486,263,691			2,486,263,691				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Krebet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,229,907,750			2,215,178,350		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,562,259,000			1,562,259,000	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,562,259,000			1,562,259,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Pilangkenceng Krebet		0 Unit Kerja		1,562,259,000	Pendapatan dari BLUD			1,562,259,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										640,148,750			625,419,350	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										640,148,750			625,419,350
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				317 Orang		24,935,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			24,935,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				304 Orang		13,277,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			13,277,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				287 Orang		9,075,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1491 Orang		5,625,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang		21,843,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			21,814,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4735 Orang		16,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			16,200,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2562 Orang		24,300,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			24,300,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				490 Orang		20,250,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,250,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Krebet

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang		600,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			600,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang		2,824,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,824,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang		3,388,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,388,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen		166,986,410	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			166,986,410	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen		17,845,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			17,845,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen		20,982,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,982,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen		15,124,420	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			15,124,420	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen		41,423,520	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			41,423,520	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen		21,675,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			21,675,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang		3,600,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,600,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen		124,087,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			124,087,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Kreet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	46,508,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			46,508,000	
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					0 Keluarga	39,600,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			39,600,000	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								27,500,000				27,500,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								27,500,000				27,500,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					0 Orang	27,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			27,500,000	
TOTAL									2,229,907,750				2,215,178,350	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,089,422,500			2,084,097,500		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,337,000,000			1,337,000,000	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,337,000,000			1,337,000,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 Unit Kerja		1,337,000,000	Pendapatan dari BLUD			1,337,000,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										707,591,070			702,266,070	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										707,591,070			702,266,070
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		33,728,275	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			33,783,330
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		24,750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			24,750,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		16,350,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			16,350,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		19,771,670				19,937,220
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		69,660,279	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			69,328,244
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang		3,375,000				3,375,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		74,925,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			74,925,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		5,775,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,775,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		5,775,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		19,550,200	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			19,300,200	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		11,450,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,450,400	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Orang 100 persen		4,363,775	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,474,160	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Dokumen 100 persen		99,025,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			99,075,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		41,925,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			41,925,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		12,045,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,595,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		20,856,520	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			21,181,520	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		131,013,031	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			133,046,156	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		29,452,920	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			29,452,920	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		0 Dokumen 100 persen		60,249,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			58,991,920	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			1,800,000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			12,000,000	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		65 Keluarga		9,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			9,750,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							41,250,000					41,250,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							41,250,000					41,250,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		3 orang		41,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			41,250,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							3,581,430					3,581,430	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3,581,430				3,581,430			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan		100 persen		3,581,430	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,581,430
TOTAL								2,089,422,500				2,084,097,500				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Klecorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,714,158,492			1,714,158,492		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,150,801,692			1,150,801,692	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,150,801,692			1,150,801,692
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Mejayan, Klecorejo		0 Unit Kerja		1,150,801,692	Pendapatan dari BLUD			1,150,801,692
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										563,356,800			563,356,800	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										563,356,800			563,356,800
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								33,590,220	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			33,590,220
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				225 Orang		2,925,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,925,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				209 Orang		3,675,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,675,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1098 Orang		77,251,610	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			77,251,610
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1428 Orang		41,493,336	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			41,493,336
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3542 Orang		31,335,921	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			31,335,921
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				3095 Dokumen		140,839,200	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			140,839,200
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				57 Dokumen		25,061,948	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			25,061,948
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				16 Dokumen		20,145,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,145,600

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Klecorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					68 Dokumen	14,169,470	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,169,470
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					40 Dokumen	17,166,676	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			17,166,676
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					20 Dokumen	15,463,660	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			15,463,660
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					48 Orang	8,475,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			8,475,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					394 Dokumen	77,418,519	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			77,418,519
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					21 Paket	1,575,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,575,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					15 Dokumen	33,270,640	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			33,270,640
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					10 Laporan	1,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,500,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					5453 Keluarga	18,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			18,000,000
TOTAL												1,714,158,492				1,714,158,492	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD															
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan Kab. Madiun, Wonoasri, Wonoasri					1,526,145,009	Pendapatan dari BLUD DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				1,526,145,009
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		452 Orang			20,414,700	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				20,414,700
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		132 Orang			9,900,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				9,900,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		280 Orang			21,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				21,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		40 Orang			17,699,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				17,699,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		710 Orang			63,460,986	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				63,460,986
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		125 Orang			11,526,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				11,526,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		282 Orang			23,301,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				23,301,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		142 Orang			10,650,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				10,650,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		606 Dokumen		148,375,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			148,375,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		591 Dokumen		75,285,300	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			75,285,300
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		16 Dokumen		13,500,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			13,500,400
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		158 Dokumen		31,346,884	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			31,346,884
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		54 Dokumen		17,172,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			17,172,600
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		10 Dokumen		1,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,500,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		29 Orang		5,250,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,250,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		468 Dokumen		144,117,730	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			144,117,600
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		28 Dokumen		45,616,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			45,616,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		20 Laporan		3,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,000,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		250 Keluarga		37,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			37,500,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					52,139,100				52,139,100	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					52,139,100				52,139,100		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		21 Dokumen		52,139,100	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			52,139,100
TOTAL										2,278,899,709			2,278,899,579		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3,306,788,399			3,306,788,399				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,500,919,799			2,500,919,799				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					2,500,919,799			2,500,919,799				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo		0 Unit Kerja		2,500,919,799	Pendapatan dari BLUD			2,500,919,799
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					708,990,680			708,990,680				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					708,990,680			708,990,680				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				47,617,328	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB			47,617,328
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				12,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				12,300,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,300,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				12,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				25,748,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			25,748,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				1,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,500,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				29,791,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			29,791,400
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				25,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			25,200,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				200,256,672	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			200,256,672

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				62,337,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			62,337,400	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				18,254,280	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			18,254,280	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				33,277,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			33,277,800	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				11,875,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,875,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			750,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				12,750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,750,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				133,010,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			133,010,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				50,072,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			50,072,800	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				3,750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,750,000	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				16,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			16,500,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					31,200,000							31,200,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					31,200,000								31,200,000
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo		0 Orang		31,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			31,200,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					65,677,920							65,677,920	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					14,546,600				14,546,600			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo				14,546,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,546,600
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					51,131,320				51,131,320			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Balerejo, Balerejo		0 Dokumen		51,131,320	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			51,131,320
								TOTAL	3,306,788,399					3,306,788,399		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Simo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,521,869,248				1,460,969,248				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					923,180,748				923,180,748				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					923,180,748				923,180,748				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan					923,180,748	Pendapatan dari BLUD			923,180,748
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					598,688,500					537,788,500			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					598,688,500					537,788,500			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Kab. Madiun, Balerejo, Simo					118,532,455	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			118,532,455
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Kab. Madiun, Balerejo, Simo					62,700,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			62,700,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				Kab. Madiun, Balerejo, Simo					115,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			62,400,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan					14,512,320	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			10,584,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan					6,419,240	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,419,240
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan					5,925,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,925,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan					7,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			7,200,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan					6,546,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Simo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan				149,672,125	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			149,672,125	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan				40,275,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			40,275,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan				10,127,480	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			10,127,480	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan				1,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,500,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Kab. Madiun, Balerejo, Simo				45,078,880	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			45,053,200	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				Kab. Madiun, Balerejo, Simo				14,400,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,400,000	
TOTAL													1,521,869,248			1,460,969,248		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,269,237,249			28,669,134,204		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										704,023,249			0	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										704,023,249			0
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	704,023,249	Pendapatan dari BLUD			0	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										559,364,000			28,663,284,204	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										559,364,000			28,663,284,204
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan	256 Orang	28,132,052	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			28,132,052,256
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan	243 Orang	4,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,800,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan	249 Orang	4,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,800,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan	1202 Orang	63,319,772	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			63,319,772
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan	1058 Orang	20,362,862	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,362,862

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Madiun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		4219 Orang		30,110,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			30,110,400	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		171 Orang		1,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,800,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		980 Dokumen		141,303,500	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			141,303,500	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		110 Dokumen		32,737,590	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			32,737,590	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		31 Dokumen		17,805,430	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			17,805,430	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		41 Dokumen		12,963,520	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,963,520	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		25 Dokumen		39,783,234	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			39,783,234	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		80 Orang		5,400,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,400,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		30 Dokumen		50,100,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			50,100,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		26 Dokumen		47,145,640	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			47,145,640
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		392 Keluarga		58,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			58,800,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5,850,000						5,850,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5,850,000							5,850,000
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Madiun, Semua Kelurahan		26 Dokumen		5,850,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,850,000
TOTAL										1,269,237,249						28,669,134,204	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,140,617,805			1,140,617,805		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										541,125,705			541,125,705	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										541,125,705			541,125,705
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong		1 Unit Kerja		541,125,705	Pendapatan dari BLUD			541,125,705
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										553,242,100			544,492,100	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										553,242,100			544,492,100
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Madiun, Betek Kab. Madiun, Madiun, Sirapan Kab. Madiun, Madiun, Dimong Kab. Madiun, Madiun, Tulungrejo		100 Orang		20,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			20,000,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Madiun, Dimong		100 Orang		1,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Madiun, Dimong		100 Orang		5,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,000,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Madiun, Dimong		100 Orang		14,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,000,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		15,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			15,000,000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		5,000,000				5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		13,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			13,000,000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		5,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			5,000,000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang		5,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			5,000,000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			3,000,000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang		20,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			20,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang		3,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			3,500,000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100 Dokumen		75,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			75,000,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen		12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			12,000,000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				160 Dokumen		12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			12,000,000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				266 Dokumen		20,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			20,000,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Madiun, Dimong		1000 Dokumen		78,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			70,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				100 Dokumen	5,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,000,000
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	6,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,000,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Madiun, Madiun, Dimong			100 Orang	6,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,000,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	82,992,100	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			82,992,100
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	6,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Madiun, Madiun, Dimong			100 Dokumen	70,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			70,000,000
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Madiun, Madiun, Dimong			100 Keluarga	70,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			70,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					41,250,000				50,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					41,250,000				50,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Madiun, Madiun, Dimong			100 Orang	41,250,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			50,000,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5,000,000				5,000,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5,000,000				5,000,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Madiun, Madiun, Dimong			100 Dokumen	5,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Dimong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL									1,140,617,805				1,140,617,805	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,654,181,300			1,653,881,300		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										992,457,050			992,457,050	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										992,457,050			992,457,050
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Kab. Madiun, Sawahan, Kajang				992,457,050	Pendapatan dari BLUD			992,457,050
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										631,724,250			631,424,250	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										631,724,250			631,424,250
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		68,685,120	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			68,685,120
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		3,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			3,900,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		5,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			5,850,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		45,824,880	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			45,824,880
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		15,835,200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			15,535,200
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		11,113,957	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			11,113,957
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		4,270,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			4,270,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sawahan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		520,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			520,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		169,106,063	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			169,106,063	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		12,770,700				12,770,700	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		31,239,650	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			31,239,650	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		11,374,400	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,374,400	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		26,748,600	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			26,748,600	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		4,650,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,650,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		2,400,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,400,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		66,688,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			66,688,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		53,247,680	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			53,247,680	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Keluarga		97,500,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			97,500,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							30,000,000			30,000,000			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							30,000,000			30,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Orang		30,000,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			30,000,000	
TOTAL									1,654,181,300				1,653,881,300	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Klagenserut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,461,814,025			1,461,814,025		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										844,690,525			844,690,525	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										844,690,525			844,690,525
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Unit Kerja		844,690,525	Pendapatan dari BLUD			844,690,525	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										580,415,700			580,415,700	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										580,415,700			580,415,700
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		296 Orang		41,324,664	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			41,324,664	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				279 Orang		15,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			15,150,000	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		285 Orang		21,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			21,300,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		1372 Orang		82,883,232	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			82,883,232	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		16 Orang		23,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			23,400,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		700 Orang		6,026,272	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			6,026,272	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		22 Orang		8,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			8,700,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		4 Orang		900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Klagenserut

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		0 Dokumen 0 Unit		154,281,100	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			154,281,100	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		100 Dokumen		11,451,040	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			11,451,040	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		100 Dokumen		15,154,080	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			15,154,080	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		100 Dokumen		14,327,240	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,327,240	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		100 Dokumen		71,953,144	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			71,953,144	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		100 Dokumen		6,150,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			6,150,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		28 Orang		2,100,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2,100,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		796 Dokumen		43,599,840	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			43,599,840	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		0 Dokumen		36,665,088	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			36,665,088	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Madiun, Jiwan, Klagenserut		38 Laporan		1,800,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			1,800,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Klagenserut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					310 Keluarga	23,250,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			23,250,000	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								13,750,000				13,750,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								13,750,000				13,750,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Madiun, Jiwana, Klagenserut			0 Orang 1 Orang	13,750,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			13,750,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								22,957,800				22,957,800	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								22,957,800				22,957,800	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Jiwana, Klagenserut			351 Dokumen	22,957,800	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			22,957,800	
TOTAL									1,461,814,025				1,461,814,025	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										1,894,591,000			1,894,591,000		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,242,645,000			1,242,645,000	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,242,645,000			1,242,645,000
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja		1,242,645,000	Pendapatan dari BLUD			1,242,645,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										626,669,170			626,669,170	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										626,669,170			626,669,170
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		312 Orang		41,403,790	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			41,403,790
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		161 Orang		12,075,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,075,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		56 Orang		4,602,438	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,602,438
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		46 Orang		3,688,748	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			3,688,748
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		151 Orang		14,100,630	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			14,100,630
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		28 Orang		2,532,300				2,532,300
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		460 Orang		34,700,386	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			34,700,386
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		56 Orang		4,200,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,200,000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		60 Orang		4,700,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			4,700,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Jiwan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		52 Orang		4,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			4,100,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		110 Dokumen		161,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			161,300,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		494 Dokumen		41,746,574				41,746,574	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		4 Dokumen		5,973,580	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			5,973,580	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		47 Dokumen		6,420,230	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			6,420,230	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		3 Dokumen		27,406,710	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			27,406,710	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		3 Dokumen		18,303,600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			18,303,600	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		5 Dokumen		91,145,864	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			91,145,864	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		2 Dokumen		33,054,240	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			33,054,240	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		510 Keluarga		115,215,080	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			115,215,080	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						25,276,830					25,276,830		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12,471,600					12,471,600		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		3 Dokumen		12,471,600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			12,471,600	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12,805,230					12,805,230		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Madiun, Jiwan, Jiwan		4 Dokumen		12,805,230	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			12,805,230	
TOTAL									1,894,591,000				1,894,591,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											124,400,000,000					
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											100,000,000,000				
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											20,000,000,000			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah 3. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 4. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 5. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 6. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai 100 persen 80 persen 85 persen 85 persen	315 Orang/bulan	316 Orang/Bulan	19,211,483,183			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah 3. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 4. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 5. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 6. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	86,00 nilai 90 nilai 100 persen 80 persen 85 persen 85 persen	20,000,000,000
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD													80,000,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah 3. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 4. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 5. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 6. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai 100 persen 80 persen 85 persen 85 persen	1 Unit Kerja	1 unit kerja	80,000,000,000	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah 3. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 4. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 5. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 6. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	86,00 nilai 90 nilai 100 persen 80 persen 85 persen 85 persen	80,000,000,000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													24,300,000,000		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													24,300,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	1 Unit	1 unit	930,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	20,000,000,000
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	1 Unit	1 unit	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	200,000,000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	1 Unit	1 unit	200,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	1 Unit	1 unit	397,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	400,000,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	10 Unit	1 unit	2,719,763,925	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	3,000,000,000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	1 Paket	1 unit	196,571,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 78,00 persen 89,00 persen 92,00 persen	500,000,000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								100,000,000				100,000,000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								100,000,000				100,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Caruban

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	02	03	2.02	02			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Madiun, Mejayani, Bangunsari	100 persen	60 Orang	60 orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100 persen	100,000,000
TOTAL													103,955,643,608							124,400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Dolopo
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Dolopo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
													Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Terpenuhinya sarana sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit	Kab. Madiun, Dolopo, Dolopo	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	2 Unit	68 Persen	17,000,000,000	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	17,000,000,000							
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Terpenuhinya sarana sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit	Kab. Madiun, Dolopo, Dolopo	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	36 Unit	68 Persen	1,200,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	1,200,000,000							
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Terpenuhinya sarana sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit	Kab. Madiun, Dolopo, Dolopo	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	2 Unit	68 Persen	1,000,000,000	Dana Insentif Daerah		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	1,000,000,000							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Dolopo
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Terpenuhinya sarana sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit	Kab. Madiun, Dolopo, Dolopo	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	1 Unit	68 Persen	3,148,060,157	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar 2. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar 3. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar 4. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	100 persen 87,50 persen 97,83 persen 100 persen	3,148,060,157
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								100,000,000				0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								100,000,000				0	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase pemenuhan insentif nakes non ASN yang menangani Covid-19	Kab. Madiun, Dolopo, Dolopo	100 persen	75 orang	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100 persen	0
TOTAL									72,517,756,812				72,517,756,812	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										160,000,913,345		192,350,244,333				
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										13,979,789,656		13,980,522,373			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										84,521,735		84,521,767		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	0 Dokumen	100 %	84,521,735	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	84,521,767
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,923,803,406		10,923,803,406		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kebutuhan gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	107 Orang/bulan	100 persen	10,923,803,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,923,803,406
1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										11,544,000		11,525,000		
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan dokumen aset yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	100 persen	11,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	11,525,000
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										835,793,826		835,053,181		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	9,173,599	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,183,235
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	125,575,404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	125,066,430
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	23,980,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	23,826,700
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	233,496,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	232,351,167

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	43,788,299	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	43,788,299
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Dokumen	100 persen	63,056,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	64,114,350
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	100 persen	336,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	336,723,000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							64,195,230				64,867,432		
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		86,00 nilai 90 nilai	10 Unit	100 persen	64,195,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	64,867,432
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							896,556,800				896,890,064		
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	100 persen	164,237,004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	164,237,004
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	100 persen	732,319,796	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	732,653,060
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,163,374,659				1,163,861,523		
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	199,241,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	199,245,870
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	133,387,044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	133,053,780

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	31 Unit	100 persen	559,267,730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	560,000,000
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit 1 Unit	100 persen	9,136,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,150,460
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	262,341,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	262,411,413
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							25,216,414,464				31,999,971,319		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							3,403,388,578				4,300,000,000		
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	3 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	200,000,000
1	03	02	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	3 KM	100 %	2,177,061,534	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	3,000,000,000
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	1 KM	100 %	699,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	700,000,000
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	50 Orang	100 %	326,337,044	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	400,000,000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							21,813,025,886				27,699,971,319		
1	03	02	2.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	12 Titik	100 persen	2,817,400,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	3,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	7 KM	100 persen	9,752,339,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	15,000,000,000	
1	03	02	2.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	1 KM	100 persen	796,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	800,000,000	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	5 KM	100 persen	5,999,971,319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	5,999,971,319	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	3 KM	100 persen	1,632,817,762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	2,000,000,000	
1	03	02	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	1 KM	100 persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	400,000,000	
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.79 persen	374 DI	100 persen	413,896,995	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	84.79 persen	500,000,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							10,678,076,985				10,823,826,000			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							10,678,076,985				10,823,826,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpenuhi		2,69 persen	300 SR	100 persen	3,825,193,791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		1. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	2,69 persen	3,773,066,000
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	Jumlah SR yang dibangun	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpenuhi		2,69 persen	0 200 SR	100 persen	2,007,161,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		1. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	2,69 persen	1,740,760,000
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	Panjang jaringan perpipaan yang ditingkatkan	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpenuhi		2,69 persen	1685 Meter	100 persen	4,845,722,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		1. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	2,69 persen	5,310,000,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							4,853,550,768				4,707,800,242		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							4,853,550,768				4,707,800,242		
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1. Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang terpenuhi		8,64 persen	550 Rumah Tangga	100 persen	4,702,450,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	8,64 persen	4,556,700,000
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang terpenuhi		8,64 persen	1 Unit	100 persen	151,100,268			1. Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	8,64 persen	151,100,242
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							15,528,243,428				27,000,000,000		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							15,528,243,428				27,000,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				1 Km		12,070,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000,000		
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				6300 Meter		3,458,243,428				17,000,000,000		
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						2,602,161,500				2,770,527,650				
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						2,602,161,500				2,770,527,650				
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Panjang Jalan/saluran yang ditingkatkan)	Persentase Jumlah infrastruktur kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah yang ditingkatkan			50.78 persen	0 Sistem Jaringan 7 m	50.78 persen	2,602,161,500			1. Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	50.78 persen	2,770,527,650
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						7,890,969,962				15,609,989,715				
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						7,890,969,962				15,609,989,715				
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah sarpras dan gedung pemerintah kondisi baik sesuai rencana			100 persen	1 Dokumen	3.39 persen	171,950,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	100 persen	171,950,209
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sarpras dan gedung pemerintah kondisi baik sesuai rencana			100 persen	14 Dokumen	3.39 persen	712,098,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	100 persen	7,719,019,753
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Persentase jumlah sarpras dan gedung pemerintah kondisi baik sesuai rencana			100 persen	12 Unit	3.39 persen	7,006,921,753	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	100 persen	7,719,019,753
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						76,747,082,768				82,952,983,156				
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						76,747,082,768				82,952,983,156				
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				29,54 persen 86,61 persen	4 Dokumen		367,959,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar) Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar			29,54 persen 86,61 persen	1 Ruas 0 KM		1,235,628,126	Dana Insentif Daerah		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	1,310,240,939
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah jalan yang dilakukan rekonstruksi) Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			29,54 persen 86,61 persen	6 Ruas 0 KM		20,751,990,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	26,299,551,300
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah ruas jalan dan bangunan pelengkap jalan yang direhabilitasi atau ditingkatkan) Panjang Jalan yang Direhabilitasi			29,54 persen 86,61 persen	11 Ruas 0 KM		8,405,086,321	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	10,347,792,954

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah jalan yang dipelihara) Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				29,54 persen 86,61 persen	5 Lokasi 0 KM		18,026,692,340	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	14,500,000,000
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	Jumlah wilayah jalan yang dipelihara Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				29,54 persen 86,61 persen	15 Kecamatan 0 KM		9,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	10,500,000,000
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah jembatan yang dibangun) Panjang Jembatan yang Dibangun				29,54 persen 86,61 persen	1 Unit 0 M		8,100,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	8,800,000,000
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian) Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				29,54 persen 86,61 persen	3 Unit 0 M		5,815,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	7,341,950,000
1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah jembatan yang dilakukan pelebaran) Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran				29,54 persen 86,61 persen	1 Unit 0 M		2,211,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	1,650,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	(Jumlah Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi) Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			29,54 persen 86,61 persen	1 Unit 0 M		1,943,225,421	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	2,103,447,963
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			29,54 persen 86,61 persen	10 Dokumen		390,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap 2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	29,54 persen 86,61 persen	0
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								252,807,142					252,807,206
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								84,988,842					84,988,906
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi yang bersertifikat tenaga terampil		67.69 persen	60 Orang	100 persen	84,988,842	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	67.69 persen	84,988,906
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								56,277,207					56,277,207
1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase ketersediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang terpenuhi		67.69 persen	3 Dokumen	100 persen	56,277,207	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	67.69 persen	56,277,207
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								111,541,093					111,541,093
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Sosialisasi / bintek / workshop / lokakarya pembinaan jasa konstruksi yang diadakan	Persentase jumlah pelaksanaan seminar / sosialisasi / bimtek jasa konstruksi yang diadakan		67.69 persen	0 Laporan 2 Kali	100 persen	111,541,093	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	67.69 persen	111,541,093
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								2,251,816,672					2,251,816,672
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1,942,125,372					2,072,545,372
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen pendukung rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang terpenuhi		40 persen	1 Paket	100 persen	168,850,992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	40 persen	169,910,992

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen pendukung rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang terpenuhi		40 persen	0 Dokumen 8 Paket	100 persen	1,773,274,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	40 persen	1,902,634,380
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					309,691,300				179,271,300				
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase jumlah kajian teknis tata ruang yang dikeluarkan		40 persen	1 Paket	100 persen	309,691,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	40 persen	179,271,300
TOTAL											160,000,913,345			192,350,244,333				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										10,085,132,548		0			
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,585,132,548		0		
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41,281,738		0	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	5 Laporan	5 Dokumen	41,281,738	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,307,809,293		0	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		86,00 nilai 90 nilai	40 Orang/bulan	Dokumen	3,307,809,293	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										301,163,696		0	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai		12 Bulan	11,926,562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	7 Paket	12 Bulan	125,231,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Penyediaan administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	12 Bulan	33,123,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Penyediaan administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	2 Dokumen	12 Bulan	8,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	2 Laporan	12 Bulan	122,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						73,703,300				0		
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	2 unit	33,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		86,00 nilai 90 nilai	3 Unit	2 unit	40,403,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
1	04	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						658,963,213				0		
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		86,00 nilai 90 nilai	4 Laporan	12 Bulan	69,465,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		86,00 nilai 90 nilai	16 Laporan	12 Bulan	589,497,613	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
1	04	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202,211,308				0		
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah		86,00 nilai 90 nilai	5 Unit	12 Bulan	172,019,308	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah		86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	12 Bulan	30,192,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
1	04	02					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						450,000,000				0		
1	04	02	2.01				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						50,000,000				0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 2. Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana 3. Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah		4.86 persen 150 unit 100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 2. Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana 3. Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	4.86 persen 150 unit 100 persen	0
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							50,000,000						0
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 2. Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana 3. Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Dokumen Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tertangani		4.86 persen 150 unit 100 persen	15 Unit Rumah	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 2. Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana 3. Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	4.86 persen 150 unit 100 persen	0
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							350,000,000						0
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 2. Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana 3. Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		4.86 persen 150 unit 100 persen	1 Laporan	1 Dokumen	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani 2. Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana 3. Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	4.86 persen 150 unit 100 persen	0
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							4,544,140,000						0
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							4,544,140,000						0
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Kumuh yang tertangani		5,50 persen	245 Unit Rumah	15 Kecamatan	4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	5,50 persen	0
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1. Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Kumuh yang tertangani		5,50 persen	6.2 Ha	15 Kecamatan	544,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	5,50 persen	0
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							505,860,000						0
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							505,860,000						0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1. Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Rumah Terlayani PSU		73,00 persen	1 Dokumen	0.73 %	170,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	73,00 persen	0
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Rumah Terlayani PSU		73,00 persen	2 Lokasi	0.73 %	229,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	73,00 persen	0
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1. Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Rumah Terlayani PSU		73,00 persen	1 Laporan	0.73 %	105,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	73,00 persen	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										500,000,000		525,000,000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										200,000,000		225,000,000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota										200,000,000		225,000,000	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah yang tertangani		100 persen	1 Dokumen	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	100 persen	75,000,000
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah yang tertangani		100 persen	2 Berita Acara	100 %	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	100 persen	150,000,000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										0		0	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										0		0	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Terselesaikan		Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk kepentingan umum yang terselesaikan		6 Bidang		6 Bidang	0			1. Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Terselesaikan	6 Bidang	0
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG										95,000,000		95,000,000	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong										95,000,000		95,000,000	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1. Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah dokumen Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong		1 dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong	1 dokumen	95,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	1. Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong		1 dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0			1. Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong	1 dokumen	0
2	10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH								0					0
2	10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah								0					0
2	10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1. Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan		100 persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0			1. Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	100 persen	0
2	10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1. Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan		100 persen	0 Dokumen	1 Dokumen	0			1. Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	100 persen	0
2	10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								205,000,000					205,000,000
2	10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								205,000,000					205,000,000
2	10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1. Jumlah dokumen penatagunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah		1 dokumen	1 Laporan	5 Dokumen	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Jumlah dokumen penatagunaan tanah	1 dokumen	110,000,000
2	10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen penatagunaan tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Jumlah dokumen penatagunaan tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Jumlah dokumen penatagunaan tanah	1 dokumen	95,000,000
2	10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen penatagunaan tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah		1 dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	0			1. Jumlah dokumen penatagunaan tanah	1 dokumen	0
TOTAL										10,585,132,548					525,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										8,903,175,477		8,374,875,477			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,325,575,477		7,325,575,477		
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,384,629,286		5,384,629,286	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	63 Orang/bulan	Laporan	5,274,629,286	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,274,629,286
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan		86,00 nilai 90 nilai	6 Laporan	6 Laporan	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	110,000,000
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										190,000,000		190,000,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		86,00 nilai 90 nilai	70 Paket	70 paket	190,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	190,000,000
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										405,622,542		405,622,542	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		86,00 nilai 90 nilai	120 Paket	300 Paket	7,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	27,000,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		86,00 nilai 90 nilai	800 Paket	300 Paket	121,094,659	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	121,094,659
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		86,00 nilai 90 nilai	12 bulan	300 Paket	39,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	19,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		86,00 nilai 90 nilai	0 Paket	300 Paket	23,905,341	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	23,905,341

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	300 Paket	3,622,542	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,622,542
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		86,00 nilai 90 nilai	579 Orang/bulan	1000 Paket	211,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	211,000,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,087,809,993				1,087,251,532		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		86,00 nilai 90 nilai	24 Laporan	36 Laporan	157,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	157,000,000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		86,00 nilai 90 nilai	36 Laporan	36 Laporan	9,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	36 Laporan	921,809,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	921,251,532
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							257,513,656				258,072,117		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		86,00 nilai 90 nilai	12 bulan	12 Unit	257,513,656	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	258,072,117
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							1,022,800,000				494,500,000		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							624,800,000				357,500,000		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	100 Kasus	25 Kasus	190,000,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	190,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	5 Kasus	25 Kasus	16,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	16,000,000
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	15 Dokumen	25 Kasus	52,300,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	0
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	1 Dokumen	25 Kasus	35,000,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	35,000,000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	60 Orang	25 Kasus	165,000,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	0
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	2 Dokumen	25 Kasus	100,000,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	5 Unit	25 Kasus	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	0
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	2 Dokumen	25 Kasus	6,500,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	6,500,000
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan		100 persen 100 persen	0 Laporan	25 Kasus	10,000,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	10,000,000
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								336,000,000					75,000,000
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Penegakan perda dan perbub sesuai ketentuan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		100 persen 100 persen	75 kasus	6 Kegiatan	75,000,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	75,000,000
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		100 persen 100 persen	12 Laporan	6 Kegiatan	186,000,000	Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		100 persen 100 persen	12 Laporan	6 Kegiatan	75,000,000	Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	0
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							62,000,000						62,000,000
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	PPNS aktif		100 persen 100 persen	12 Laporan	15 Orang	62,000,000	Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan 2. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen	62,000,000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							554,800,000						554,800,000
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							500,800,000						500,800,000
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan non Kebakaran di Kabupaten Madiun		100 persen 100 persen	10 Dokumen	150 Kasus	30,000,000			1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	100 persen 100 persen	30,000,000
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan non Kebakaran di Kabupaten Madiun		100 persen 100 persen	50 Laporan	150 Kasus	210,000,000			1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	100 persen 100 persen	210,000,000
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan non Kebakaran di Kabupaten Madiun		100 persen 100 persen	50 Dokumen	150 Kasus	90,800,000			1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	100 persen 100 persen	90,800,000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan non Kebakaran di Kabupaten Madiun		100 persen 100 persen	5 Unit	150 Kasus	145,000,000	Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	100 persen 100 persen	145,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan non Kebakaran di Kabupaten Madiun		100 persen 100 persen	34 Orang	150 Kasus	25,000,000		1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	100 persen 100 persen	25,000,000	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							24,000,000					24,000,000	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				12 Desa/Kelurahan		24,000,000	Pajak Rokok- Penegakan Disiplin			24,000,000	
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							30,000,000					30,000,000	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		100 persen 100 persen	50 Laporan	50 Kasus	30,000,000		1. Persentase kasus kebakaran yang tertangani 2. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	100 persen 100 persen	30,000,000	
TOTAL												8,903,175,477			8,374,875,477			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
1	05	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	8 Laporan	100 persen	240,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	600,000						
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	80,398,836	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	87,898,836						
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	21,352,500	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	24,075,000						
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														350,403,584					351,191,085
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	16 Unit	100 persen	289,259,651	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	289,150,000						
1	05	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	35 Unit	100 persen	1,540,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,090,000						
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	10 Unit	100 persen	39,652,848	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	40,000,000						
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	19,951,085	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	19,951,085						
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														1,298,142,090				1,388,762,550	
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														250,000,000				250,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen	1 Dokumen	74 kejadian	250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 persen 100 persen 100 persen	250,000,000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					92,238,970				138,173,500				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen	60 Orang	100 persen	42,751,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 persen 100 persen 100 persen	42,751,500
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen	0 Dokumen	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 persen 100 persen 100 persen	0
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen	700 Orang	100 persen	49,487,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 persen 100 persen 100 persen	95,422,000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					825,874,050				825,874,050				
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen	10000 Orang	100 persen	825,874,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 persen 100 persen 100 persen	825,874,050
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					130,029,070				174,715,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah desa tangguh bencana yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen	1 Dokumen	16 desa	55,840,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 persen 100 persen 100 persen	99,715,000
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah desa tangguh bencana yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 100 persen	6 Dokumen	16 desa	74,188,670	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk 2. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani 3. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 persen 100 persen 100 persen	75,000,000
TOTAL									3,643,694,200					3,752,281,061

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										7,279,527,611		7,614,182,129			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,819,527,611		4,075,727,611		
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3,999,537		50,000,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Target Capaian SKPD		86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	86 Nilai Sakip	3,999,537	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	50,000,000
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,129,527,611		3,129,527,611	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji ASN		86,00 nilai 90 nilai	31 Orang/bulan	35 Orang	3,129,527,611	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,129,527,611
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										172,295,640		250,200,000	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	3,986,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	12 bulan	41,606,859	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	50,000,000
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	12 bulan	7,156,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	20,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,00 nilai 90 nilai	5 Paket	12 bulan	11,999,806	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	20,000,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,00 nilai 90 nilai	24 Dokumen	12 bulan	3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	4,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kegiatan dalam Setahun		86,00 nilai 90 nilai		12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,000,000
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kegiatan dalam Setahun		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	12 Bulan	3,001,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,000,000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								768,014,638					768,014,638
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)								135,852,934					135,852,934
1 06 02 2.01 01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	1. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah KPM yang terfasilitasi pemberdayaan sosial	Berdayanya Desa / Kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen 19,42 persen	0 Keluarga 100 KPM	41 Desa	135,852,934	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	90 persen 19,42 persen	135,852,934
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								632,161,704					632,161,704
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya keaktifan PSKS dan keluarga dalam Kegiatan Kesejahteraan Sosial		90 persen 19,42 persen	4 Keluarga	6 PSKS	28,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	90 persen 19,42 persen	28,300,000
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	Jumlah kemampuan potensi sumber kelembagaan masyarakat kabupaten Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya keaktifan PSKS dan keluarga dalam Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen 19,42 persen	4 PSKS 16 Lembaga	6 PSKS	603,861,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	90 persen 19,42 persen	603,861,704
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								1,010,439,673					1,010,439,673
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial								100,306,640					100,306,640
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1. Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah Eks Psikotik yang dibantu Jumlah Jenazah Terlantar yang Ditangani	Tertanganinya PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar, GEPENG di luar Pantii Asuhan)		5,00 persen	120 Orang 12 Orang	6 PPKS	100,306,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase PPKS yang tertangani	5,00 persen	100,306,640
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial								910,133,033					910,133,033

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1. Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana 2. Persentase personil Tangana yang dibina	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Korban Bencana Alam yang Tertangani Korban Bencana Sosial (kebakaran) yang tertangani	Tertanganinya KBA dan KBS		100 persen 100 persen	64 Orang 100 KK 15 KK	300 KK	141,678,722	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana 2. Persentase personil Tangana yang dibina	100 persen 100 persen	160,000,000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								539,866,967					600,000,000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana 2. Persentase personil Tangana yang dibina	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, TMS, TTM, TMA yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan KSB dan Tagana		100 persen 100 persen	12 Kegiatan 63 Orang	14 Kegiatan	539,866,967	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana 2. Persentase personil Tangana yang dibina	100 persen 100 persen	600,000,000
TOTAL									7,279,527,611				7,614,182,129	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										8,076,732,395		7,977,563,895			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,971,598,458		4,871,598,458		
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										102,560,000		2,560,000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujutnya Laporan Dokumen Kinerja SKPD		86,00 nilai 90 nilai	14 Dokumen	14 Dokumen	102,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,560,000
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,938,630,530		3,938,630,530	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		86,00 nilai 90 nilai	36 Orang/bulan	36 Orang	3,938,630,530	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,938,630,530
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										445,435,278		448,414,393	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan pendukung Operasional perkantoran.		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 Bulan	5,957,259	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,394,047
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan pendukung Operasional perkantoran.		86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	12 Bulan	119,093,739	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	128,030,736
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan pendukung Operasional perkantoran.		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 Bulan	8,621,171	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,184,383
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan pendukung Operasional perkantoran.		86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	12 Bulan	24,311,109	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	25,965,227
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan pendukung Operasional perkantoran.		86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	12 Bulan	25,420,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	17,800,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan pendukung Operasional perkantoran.		86,00 nilai 90 nilai	24 Dokumen	12 Bulan		3,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,180,000
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan pendukung Operasional perkantoran.		86,00 nilai 90 nilai	675 Laporan	12 Bulan		258,852,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	258,860,000
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								356,727,870						354,892,005
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	96 Laporan	12 Bulan		69,092,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	69,170,676
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	33 Laporan	12 Bulan		287,635,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	285,721,329
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								128,244,780						127,101,530
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		86,00 nilai 90 nilai	13 Unit	12 Bulan		97,649,184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	91,368,030
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		86,00 nilai 90 nilai	49 Unit	12 Bulan		21,715,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	19,233,500
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	12 Bulan		8,880,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	16,500,000
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								2,709,080,567						2,709,080,567
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								2,629,080,567						2,611,880,567

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		78 persen	357 Orang	72 %	2,629,080,567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	78 persen	2,611,880,567		
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							32,800,000						50,000,000		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1. Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		78 persen	12 Lembaga	72 %	32,800,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	78 persen	50,000,000		
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							47,200,000						47,200,000		
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78 persen	1 Dokumen	72 %	47,200,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	78 persen	47,200,000		
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							216,284,600						217,116,100		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							145,368,500						146,200,000		
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		78 persen	75 Orang	72 %	50,691,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78 persen	51,000,000		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		78 persen	500 Orang	72 %	47,133,750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78 persen	47,200,000		
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		78 persen	500 Orang	72 %	47,543,750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78 persen	48,000,000		
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							70,916,100						70,916,100		
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		78 persen	200 Orang	72 %	70,916,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78 persen	70,916,100		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							179,768,770						179,768,770		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							125,500,000						125,500,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1. Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WPK Online	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		80 angka	10 Perusahaan	72 %	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	80 angka	40,000,000	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1. Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		80 angka	1 Laporan	72 %	85,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	80 angka	85,500,000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							54,268,770				54,268,770			
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		80 angka	10 Laporan	72 %	54,268,770	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	80 angka	54,268,770	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							450,000,000				400,000,000			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							328,493,700				278,493,700			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							328,493,700				278,493,700			
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1. Jumlah rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM		1 dokumen	1 Dokumen	3.22 %	60,500,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN		1. Jumlah rencana pembangunan industri	1 dokumen	60,500,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Peningkatan IKM		1 dokumen	1 Dokumen	3.22 %	267,993,700	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN		1. Jumlah rencana pembangunan industri	1 dokumen	217,993,700	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							51,000,000				51,000,000			
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							51,000,000				51,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	03	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Persentase Peningkatan IKM		18,072 persen	1 Dokumen	3.22 %	51,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN	1. Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha	18,072 persen	51,000,000	
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							70,506,300					70,506,300	
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							70,506,300					70,506,300	
3	31	04	2.01	01		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1. Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Peningkatan IKM		18,072 persen	1 Dokumen	3.22 %	70,506,300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN	1. Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	18,072 persen	70,506,300	
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							108,368,200					108,368,200	
3	32	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							108,368,200					108,368,200	
3	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian							108,368,200					108,368,200	
3	32	04	2.01	01		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	1. Persentase transmigran umum yang berhasil	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		100 persen	2 Kepala Keluarga	72 %	108,368,200	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	1. Persentase transmigran umum yang berhasil	100 persen	108,368,200	
TOTAL													8,635,100,595					8,485,932,095	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										6,038,958,737		6,133,900,000			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,503,958,737		4,530,900,000		
2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,706,917,080		3,700,000,000	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		86,00 nilai 90 nilai	35 Orang/bulan	12 bulan	3,706,917,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,700,000,000
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										184,212,657		189,100,000	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,600,000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	70,000,000
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	6,156,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,500,000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	35,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	38,000,000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	6,360,657	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	7,000,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 bulan	65,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	66,000,000
2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										285,485,400		281,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 bulan		3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,500,000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 bulan		77,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	78,000,000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 bulan		205,085,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	200,000,000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								327,343,600						360,300,000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	4 Unit	12 bulan		120,093,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	141,000,000
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	100 Unit	12 bulan		9,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,000,000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	50 Unit	12 bulan		19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	19,300,000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	12 bulan		83,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	90,000,000
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	12 bulan		95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	100,000,000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1,309,500,000					1,372,000,000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								358,500,000					410,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah		2150 kal/org/hr	Laporan	12 bulan	58,500,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	80,000,000
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah		2150 kal/org/hr	Dokumen	12 bulan	200,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	220,000,000
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah		2150 kal/org/hr	Unit	12 bulan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	110,000,000
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								200,000,000			210,000,000		
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya cadangan pangan Kabupaten		2150 kal/org/hr	Laporan	12 bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	210,000,000
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								751,000,000			752,000,000		
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG		2150 kal/org/hr	Dokumen	100 %	91,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	92,000,000
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG		2150 kal/org/hr	Laporan	100 %	660,000,000	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pendapatan Bagi Hasil		1. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein	2150 kal/org/hr	660,000,000
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								116,500,000			120,000,000		
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								116,500,000			120,000,000		
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1. Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Daerah Rawan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tertangani		3 kecamatan	1 Laporan	3 kecamatan	116,500,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	3 kecamatan	120,000,000
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								109,000,000			111,000,000		
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								109,000,000			111,000,000		
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah		100 persen	15 Dokumen	12 bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	100 persen	46,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah		100 persen	1 Dokumen	12 bulan	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman	100 persen	65,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					705,000,000								770,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					145,000,000								150,000,000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					145,000,000								150,000,000
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1. Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb)	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Tersedianya Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah		70 persen	2.36 Ton	1 paket	145,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb)	70 persen	150,000,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					300,000,000							330,000,000	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian					300,000,000							330,000,000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangunnya prasarana peternakan		100 persen	1 Unit	2 paket	300,000,000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	100 persen	330,000,000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					180,000,000							200,000,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					100,000,000							110,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terjaminnya kesehatan hewan dalam daerah		100 persen	1 Laporan	12 bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	100 persen	110,000,000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					80,000,000							90,000,000	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner		100 persen	1 Laporan	15 kecamatan	80,000,000	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	100 persen	90,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					80,000,000							90,000,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					80,000,000							90,000,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		100 persen	1 Unit	15 kecamatan	80,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak	100 persen	90,000,000
TOTAL												6,743,958,737						6,903,900,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											19,649,432,689		20,160,603,350			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13,606,192,636		13,744,800,000		
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											168,850,000		169,000,000	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai peraturan berlaku	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	14 Laporan	14 dokumen	168,850,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	169,000,000
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,922,703,689		9,950,000,000	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	121 Orang/bulan	100 persen	9,922,703,689	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,950,000,000
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											449,350,422		458,800,000	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana ASN yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	2,396,625	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,000,000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana ASN yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	12 bulan	66,364,014	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	72,000,000
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana ASN yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	12 bulan	19,929,195	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	22,000,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana ASN yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	12 bulan	70,074,005	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	70,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana ASN yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	12 bulan	32,285,583	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	33,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana ASN yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	12 bulan	8,724,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,800,000
2	11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah sarana dan prasarana ASN yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Laporan	12 bulan	249,577,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	250,000,000
2	11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,832,720,650					2,910,000,000
2	11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 Persen	109,252,700	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	110,000,000
2	11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 Persen	2,723,467,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,800,000,000
2	11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								232,567,875					257,000,000
2	11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase peralatan sarana prasarana yang terpelihara	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Unit	100 persen	184,461,095	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	185,000,000
2	11 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase peralatan sarana prasarana yang terpelihara	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Unit	100 persen	9,284,215	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	17,000,000
2	11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase peralatan sarana prasarana yang terpelihara	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	15 Unit	100 persen	15,429,825	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	35,000,000
2	11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase peralatan sarana prasarana yang terpelihara	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	23,392,740	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	20,000,000
2	11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								740,528,059					761,000,000
2	11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								250,000,000					260,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	100 persen	260,000,000
2	11 02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						490,528,059			501,000,000			
2	11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	6 dokumen	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	100 persen	351,000,000
2	11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	6 dokumen	140,528,059	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	100 persen	150,000,000
2	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						857,116,200			896,000,000				
2	11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						530,476,566			546,000,000				
2	11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	Jumlah Titik Uji Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang teratasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	60 Titik 4 dokumen	100 %	175,175,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	100 persen	180,000,000
2	11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang teratasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 Dokumen	100 %	95,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	100 persen	96,000,000
2	11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang teratasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 Dokumen	100 %	260,301,566	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	100 persen	270,000,000
2	11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						196,399,200			215,000,000				
2	11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Persentase pencemaran yang bisa ditanggulangi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	70 %	100,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	100 persen	105,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Persentase pencemaran yang bisa ditanggulangi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	30 Titik	70 %	96,399,200	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	100 persen	110,000,000
2	11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							130,240,434			135,000,000			
2	11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase pemulihan lingkungan yang terlaksana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 Dokumen	70 %	130,240,434	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	100 persen	135,000,000
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							1,342,883,800			1,376,000,000			
2	11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							1,342,883,800			1,376,000,000			
2	11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air 2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keaneekaragaman hayati yang terlaksana terlaksana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen 22,9 ha	19 Ha	65 %	1,207,883,800	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air 2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	7 persen 22,9 ha	1,230,000,000
2	11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	1. Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air 2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keaneekaragaman hayati yang terlaksana terlaksana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen 22,9 ha	2 Ha	65 %	53,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air 2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	7 persen 22,9 ha	60,000,000
2	11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	1. Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air 2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Persentase pengelolaan keaneekaragaman hayati yang terlaksana terlaksana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen 22,9 ha	1 Unit	65 %	82,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air 2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	7 persen 22,9 ha	86,000,000
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							9,458,000			15,000,000			
2	11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3							9,458,000			15,000,000			
2	11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1. Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan Limbah B3	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15 Laporan	20 usaha	9,458,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	100 persen	15,000,000
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							30,000,000			35,000,000			
2	11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000			35,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	30 usaha	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	100 persen	35,000,000	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							157,065,000						160,803,350	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							157,065,000							160,803,350
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1. Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Jumlah akumulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen	5 Lembaga	20 kali	46,656,600	Pendapatan Bagi Hasil		1. Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	45 persen	35,000,000	
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1. Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah akumulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 persen	3 Dokumen	20 kali	110,408,400	Pendapatan Bagi Hasil		1. Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	45 persen	125,803,350	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							174,000,000						180,000,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							174,000,000						180,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 penerima	5 Entitas	5 buah	174,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	5 penerima	180,000,000	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							496,149,000						635,000,000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							496,149,000						635,000,000	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 Persen	496,149,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 persen	635,000,000	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							2,236,039,994						2,357,000,000	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah							2,236,039,994						2,357,000,000	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1. Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sarana yang dikelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	2 Laporan	1 unit	55,442,325	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase sampah yang tertangani	50 persen	60,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana yang dikelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	2000 Ton	1 unit	992,523,616	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase sampah yang tertangani	50 persen	1,000,000,000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1. Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah sarana yang dikelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	1 Kelompok	1 unit	526,729,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase sampah yang tertangani	50 persen	527,000,000
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1. Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah sarana yang dikelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	2 Dokumen	1 unit	41,248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase sampah yang tertangani	50 persen	50,000,000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Persentase sampah yang tertangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah sarana yang dikelola	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	2 Unit	1 unit	620,097,053	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase sampah yang tertangani	50 persen	720,000,000
TOTAL												19,649,432,689				20,160,603,350		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										6,281,757,677		5,990,573,247			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,828,881,234		4,732,657,677		
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,915,050		8,000,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan		86,00 nilai 90 nilai	6 Laporan	100 persen	7,915,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,000,000
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,781,757,677		3,781,757,677	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pegawai yang terpenuhi penggajiannya		86,00 nilai 90 nilai	34 Orang/bulan	100 persen	3,781,757,677	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,781,757,677
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										400,333,807		350,810,000	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	20 Paket	100 persen	5,108,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	20 Paket	100 persen	40,565,007	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	43,000,000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	20 Paket	100 persen	9,508,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,500,000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	15 Paket	100 persen	40,404,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	38,500,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	15 Paket	100 persen	21,738,585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	17,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
																		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	5 Dokumen			3,267,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,000,000											
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	20 Paket	100 persen	128,297,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	105,160,000												
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	250 Laporan	100 persen	151,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	129,150,000												
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								339,339,000					310,000,000												
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase kebutuhan sarana prasara baru yang tercukupi		86,00 nilai 90 nilai	15 Unit	100 persen	339,339,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	310,000,000												
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								299,535,700					282,090,000												
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan sarana prasara baru yang tercukupi		86,00 nilai 90 nilai	15 Laporan	100 persen	3,927,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	825,000												
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase kebutuhan sarana prasara baru yang tercukupi		86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	115,211,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	115,000,000												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi		86,00 nilai 90 nilai	15 Laporan	100 persen	11,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi		86,00 nilai 90 nilai	7 Laporan	100 persen	169,342,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	166,265,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							723,282,100			664,580,000			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							723,282,100			664,580,000			
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan 2. Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan		97 persen 97 persen	43097 Laporan	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan 2. Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan	97 persen 97 persen	200,000,000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1. Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan 2. Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan		97 persen 97 persen	10 Laporan	100 persen	523,282,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan 2. Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan	97 persen 97 persen	464,580,000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							148,345,986			148,345,570			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							148,345,986			148,345,570			
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil		100 persen	5 Layanan	100 persen	148,345,986	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100 persen	148,345,570
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							581,248,357			444,990,000			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							351,567,388			355,000,000			
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Lintas OPD		100 persen 100 persen	250 Dokumen	100 persen	259,097,388	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	100 persen 100 persen	260,000,000
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Lintas OPD		100 persen 100 persen	5 Dokumen	100 persen	12,390,000	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	100 persen 100 persen	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Lintas OPD		100 persen 100 persen	2 Laporan	100 persen	80,080,000	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	100 persen 100 persen	85,000,000
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					29,700,000				0				
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Persentase pengelolaan informasi Administrasi kependudukan		100 persen 100 persen	1 Dokumen	100 persen	29,700,000	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	100 persen 100 persen	0
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					164,748,145				54,750,000				
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi Administrasi kependudukan		100 persen 100 persen	100 Laporan	100 persen	110,000,000	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	100 persen 100 persen	0
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi Administrasi kependudukan		100 persen 100 persen	15 Laporan	100 persen	54,748,145	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase database kependudukan yang valid 2. Persentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	100 persen 100 persen	54,750,000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					35,232,824				35,240,000				
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				2 Laporan		35,232,824	Kurang Bayar DBH SDA				35,240,000
TOTAL										6,281,757,677				5,990,573,247				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										10,056,279,715		10,041,783,945			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,281,279,715		5,282,783,945		
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										140,614,200		124,154,078	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	19 Laporan	100 persen	140,614,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	124,154,078
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,556,279,715		3,556,279,715	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	40 Orang/bulan	100 persen	3,556,279,715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,556,279,715
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										779,741,547		847,754,330	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	10 paket	10,005,782	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,009,195
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	10 paket	119,935,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	122,006,600
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	10 paket	12,810,124	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	12,919,555
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	10 paket	225,703,288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	291,532,350
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	10 paket	54,830,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	54,830,630

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1080 Dokumen	10 paket	5,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,940,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	840 Laporan	10 paket	350,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	350,516,000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							9,435,000			9,350,000			
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	1 paket	9,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,350,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							557,034,986			543,174,572			
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	36 Laporan	12 bulan	186,974,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	186,974,900
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Laporan	12 bulan	370,060,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	356,199,672
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							238,174,267			202,071,250			
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	18 Unit	100 persen	124,044,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	124,044,300
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	60 Unit	100 persen	6,271,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,215,000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	30 Unit	100 persen	46,125,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,720,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	61,733,397	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	61,091,950
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA					160,841,050			160,841,050				
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa					160,841,050			160,841,050				
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang tertib administrasi kewenangan Desa sesuai regulasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15 Desa	198 Desa	10,841,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	100 persen	10,841,050
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Jumlah Desa yang tertib administrasi kewenangan Desa sesuai regulasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	198 Desa	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	100 persen	150,000,000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					125,000,000			105,000,000				
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa					125,000,000			105,000,000				
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1. Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDesa Bersama yang terbentuk dan Jumlah kawasan perdesaan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 kerja sama	16 Dokumen	2.1 BUMDesa dan kawasan	105,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk	17 kerja sama	105,000,000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah BUMDesa Bersama yang terbentuk dan Jumlah kawasan perdesaan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 kerja sama	1 Dokumen	2.1 BUMDesa dan kawasan	20,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk	17 kerja sama	0
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2,993,467,952			2,993,467,952				
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2,993,467,952			2,993,467,952				
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	1 Dokumen	100 %	25,179,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	25,179,740
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	1 Dokumen	100 %	223,485,456	Pajak Rokok	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	223,485,456

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	1 Dokumen	100 %	231,869,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	231,869,550
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	198 aparatur	100 %	31,727,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	31,727,500
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	1 Dokumen	100 %	41,122,290	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	41,122,290
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	3 Dokumen	100 %	2,251,201,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	2,251,201,200
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	2 Dokumen	100 %	46,220,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	46,220,960
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	198 Orang	100 %	27,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	27,960,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Persentase Desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,80 persen 100 persen	1 Dokumen	100 %	114,701,256	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	84,80 persen 100 persen	114,701,256
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,495,690,998					1,499,690,998

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,495,690,998				1,499,690,998						
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	1 Dokumen	73.2 persen	87,264,309	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	87,264,309
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	198 Lembaga	73.2 persen	101,514,544	Pajak Rokok		1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	105,514,544
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	5 Dokumen	73.2 persen	445,000,000	Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	445,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	4 Laporan	73.2 persen	105,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	105,000,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	1 Laporan	73.2 persen	156,912,145	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	156,912,145
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	1 Dokumen	73.2 persen	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif 2. Persentase BUMDesa yang aktif 3. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	69,70 persen 51,50 persen 73,7 persen	600,000,000
TOTAL										10,056,279,715						10,041,783,945		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										733,124,590		871,879,260			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										91,787,216		165,000,000		
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										39,137,500		75,000,000	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Focal Point OPD yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	45 Perangkat Daerah	77.77 persen	39,137,500	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	100 persen	75,000,000
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										23,050,000		40,000,000	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 Organisasi	66.66 persen	23,050,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	100 persen	40,000,000
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										29,599,716		50,000,000	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	207 Orang	71 lembaga	29,599,716	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	100 persen	50,000,000
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										164,094,260		164,094,260		
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										51,500,000		51,500,000	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 angka	12 Dokumen	100 persen	51,500,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan	14 angka	51,500,000
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										97,515,000		97,515,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 angka	25 Layanan	100 persen	97,515,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		1. Rasio kekerasan terhadap perempuan	14 angka	97,515,000
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								15,079,260					15,079,260
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif		14 angka	9 Dokumen	20 persen	15,079,260	Pendapatan Bagi Hasil		1. Rasio kekerasan terhadap perempuan	14 angka	15,079,260
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								136,163,994					150,000,000
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								136,163,994					150,000,000
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif		50 persen	5 Dokumen	150 lembaga	136,163,994	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	50 persen	150,000,000
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								341,079,120					392,785,000
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								61,450,000					61,450,000
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 angka	12 Dokumen	100 persen	61,450,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		1. Rasio kekerasan terhadap anak	13 angka	61,450,000
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								164,529,000					164,529,000
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 angka	25 Layanan	100 persen	164,529,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		1. Rasio kekerasan terhadap anak	13 angka	164,529,000
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								115,100,120					166,806,000
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terfasilitasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 angka	12 Dokumen	20 persen	76,806,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		1. Rasio kekerasan terhadap anak	13 angka	76,806,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terfasilitasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 angka	12 Dokumen	20 persen	38,294,120	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Rasio kekerasan terhadap anak	13 angka	90,000,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						16,301,377,998					17,406,954,000	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,223,248,118					4,606,230,000	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,000,000					2,000,000	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku		86,00 nilai 90 nilai	19 Laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,000,000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,166,278,588					3,400,000,000	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan yang terbayarkan		86,00 nilai 90 nilai	36 Orang/bulan	100 persen	3,166,278,588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,400,000,000
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						26,750,000					27,250,000	
2	14	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				26,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,250,000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						319,029,230					366,980,000	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase sarana prasarana kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	100 persen	104,073,546	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	110,000,000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase sarana prasarana kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	100 persen	21,864,729	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	25,000,000
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase sarana prasarana kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	100 persen	48,273,035	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
																		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase sarana prasarana kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	100 persen	14,787,420	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,000,000												
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase sarana prasarana kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	250 Dokumen	100 persen	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,980,000												
2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase sarana prasarana kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	18 Paket	100 persen	9,904,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,000,000												
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana prasarana kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	250 Laporan	100 persen	118,146,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	150,000,000												
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								452,496,792					540,000,000												
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana prasarana penunjang kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	4,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000												
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase sarana prasarana penunjang kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	63,970,800	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	65,000,000												
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase sarana prasarana penunjang kantor tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	13 Laporan	100 persen	384,525,992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	470,000,000												
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								256,693,508					270,000,000												
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase sarana prasarana penunjang kantor terpelihara	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	8 Unit	100 persen	147,806,829	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	150,000,000												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase sarana prasarana penunjang kantor terpelihara	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	50 Unit	100 persen	64,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	70,000,000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase sarana prasarana penunjang kantor terpelihara	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	44,556,679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	50,000,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					209,325,000				241,225,000			
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					7,455,200				20,000,000			
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1. Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Persentase siswa yang memperoleh informasi programkependudukan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	8 persen	7,455,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	100 persen	20,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					201,869,800				221,225,000			
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		45,644,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			65,000,000
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Laporan		60,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB			60,000,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		24,225,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB			24,225,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		72,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB			72,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					8,184,791,380				9,318,739,000			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					1,012,365,900				1,021,515,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Bangga Kencana melalui advokasi dan KIE, Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangga Kencana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	36 Organisasi	63.1 persen	4,375,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	4,375,000
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Bangga Kencana melalui advokasi dan KIE, Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangga Kencana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	1 Dokumen	63.1 persen	25,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	25,000,000
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Bangga Kencana melalui advokasi dan KIE, Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangga Kencana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	3 Dokumen	63.1 persen	70,640,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	70,640,000
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah publikasi program Bangga Kencana melalui media elektronik dan non elektronik	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Bangga Kencana melalui advokasi dan KIE, Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangga Kencana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	3 paket	63.1 persen	30,850,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	40,000,000
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Bangga Kencana melalui advokasi dan KIE, Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangga Kencana	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	15 Laporan	63.1 persen	234,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	234,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Bangsa Kencana melalui advokasi dan KIE, Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangsa Kencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	15 Laporan	63.1 persen	607,500,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	607,500,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBP	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Bangsa Kencana melalui advokasi dan KIE, Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangsa Kencana		9,27 persen 63,00 persen	11 Laporan	63.1 persen	40,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	40,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					3,408,500,000				3,413,800,000				
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mandiri. Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	2 Organisasi	35.99 persen	2,419,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	2,425,000,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mandiri. Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	1306 Orang	35.99 persen	988,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	988,800,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					3,186,758,200				4,278,674,000				
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar		9,27 persen 63,00 persen	12 Laporan	100 persen	13,500,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	13,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	38142 Orang	100 persen	998,174,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	998,174,000
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	4 Dokumen	100 persen	17,082,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	30,000,000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	4 Unit	100 persen	1,975,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	3,000,000,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	1 Laporan	100 persen	12,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	12,000,000
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	107281 Orang	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	20 Orang	100 persen	31,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	50,000,000
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	12 Laporan	100 persen	45,230,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	60,000,000
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	8836 Orang	100 persen	45,417,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	60,000,000
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	1610 Orang	100 persen	19,353,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	25,000,000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							577,167,280					604,750,000
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program bangga kencana. Persentase stakehoders/mitra kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	36 Organisasi	100.41 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	30,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
															Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program bangga kencana. Persentase stakehoders/mitra kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	31 Dokumen	100.41 persen	17,417,280	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	40,000,000									
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program bangga kencana. Persentase stakehoders/mitra kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,27 persen 63,00 persen	31 Kampung	100.41 persen	534,750,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need 2. Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9,27 persen 63,00 persen	534,750,000									
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							3,684,013,500						3,240,760,000									
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							3,634,260,000						3,165,760,000									
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,80 persen	7 Unit	75 persen	495,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)		1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	6,80 persen	1,500,000									
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif		6,80 persen	80 Orang	75 persen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	6,80 persen	60,000,000									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,80 persen	1885 Orang	75 persen	3,104,260,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	6,80 persen	3,104,260,000
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					49,753,500							75,000,000	
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kader Tribina yang aktif. Persentase Kelompok PIK Remaja yang aktif	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,80 persen	12 Laporan	78.77 persen	49,753,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	6,80 persen	75,000,000
TOTAL											17,034,502,588						18,278,833,260	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										28,751,531,744		54,176,000,000				
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,484,531,744		7,921,000,000			
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,000,000		5,000,000		
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		86,00 nilai 90 nilai	2 Dokumen	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,165,188,932		6,006,000,000		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	Prosentase admistrasi keuangan Perangkat daerah yang terbayar		86,00 nilai 90 nilai	65 Orang/Bulan	100 Persen	6,159,188,932	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,000,000,000
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase admistrasi keuangan Perangkat daerah yang terbayar		86,00 nilai 90 nilai	2 Dokumen 12 Bulan	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,000,000
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										65,000,000		66,000,000		
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Prosentase Admistrasi Kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan		86,00 nilai 90 nilai	2 Dokumen 12 Bulan	100 Prosen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,000,000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase Admistrasi Kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan		86,00 nilai 90 nilai	4 Orang	100 Prosen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	60,000,000
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Admistrasi Kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan		86,00 nilai 90 nilai	10 Orang	100 Prosen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										218,673,319		338,000,000		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Prosentase Admisitrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
																				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Prosentase Admisitrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	90,000,000															
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang dilaksanakan	Prosentase Admisitrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	60,000,000															
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Prosentase Admisitrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	20,553,319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	35,000,000															
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terbayar	Prosentase Admisitrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,000,000															
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Prosentase Admisitrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	103,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	130,000,000															
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								242,558,590					340,000,000															
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan barng milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 Persen	230,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	300,000,000															
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan barng milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	5 Unit	100 Persen	11,678,590	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	40,000,000															
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								557,498,613					708,000,000															
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Surat menyurat yang dilaksanakan	Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	6,992,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,000,000															

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Bulan	100 Persen	107,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	100,000,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang terpenuhi	Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	18 Orang	100 Persen	442,866,213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	600,000,000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							229,612,290			458,000,000			
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinzn kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket 12 Bulan	100 Persen	206,762,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	400,000,000
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	8 Unit 15 Buah	100 Persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,000,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	15 Unit	100 Persen	14,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	50,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							21,267,000,000			46,255,000,000			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							110,000,000			0			
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia		95 persen 100 persen 90 persen	12 Kali	95 Prosen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia		95 persen 100 persen 90 persen	2 Kali	95 Prosen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	0
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					18,332,000,000			44,400,000,000					
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (KPBU) Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia		95 persen 100 persen 90 persen	1 Kegiatan 0 Unit	95 Persen	10,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	20,000,000,000
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah operasional palang pintu keretaapi perlintasan yang terbayar Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan(Pemeliharaan Palang Pintu keretapi diperlintasan sebidang yang dilaksanakan	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia		95 persen 100 persen 90 persen	12 Orang 1 Kegiatan	95 Persen	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	400,000,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia		95 persen 100 persen 90 persen	1 Kegiatan	95 Persen	7,582,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	24,000,000,000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					120,000,000			0					
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang tersedia (Halte Shelter)	Prosentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang dilaksanakan		95 persen 100 persen 90 persen	1 Kegiatan	95 prosen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	0
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					625,000,000			0					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Gaji Parkir)	Prosentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		95 persen 100 persen 90 persen	100 Orang	90 Prosen	625,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	0
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								650,000,000					445,000,000
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		95 persen 100 persen 90 persen	1 Kegiatan	95 Persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	0
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		95 persen 100 persen 90 persen	4 Orang	95 Persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	75,000,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpenuhi	Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		95 persen 100 persen 90 persen	12 Bulan	95 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	250,000,000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		95 persen 100 persen 90 persen	12 Alat	95 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	120,000,000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								1,140,000,000					1,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		95 persen 100 persen 90 persen	2 Kegiatan	95 Persen	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	1,000,000,000
2	15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		95 persen 100 persen 90 persen	70 Kali	95 Persen	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	200,000,000
2	15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Prosentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		95 persen 100 persen 90 persen	4 Laporan	95 Persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	0
2	15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								40,000,000					50,000,000
2	15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Prosentase hasil Analisi dampak allu lintas (Andalalin) yang dilaksanakanDampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		95 persen 100 persen 90 persen	0 Dokumen 10 Dokumen	90 Persen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	50,000,000
2	15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								250,000,000					160,000,000
2	15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Prosentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia		95 persen 100 persen 90 persen	10 Bus	90 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	160,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Bus Sekolah)	Prosentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia		95 persen 100 persen 90 persen	2 Unit	90 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. persentase angka tertib lalu lintas	95 persen 100 persen 90 persen	0
TOTAL										28,751,531,744				54,176,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										8,556,523,477		8,984,349,652			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,314,373,477		6,630,092,152		
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										16,000,000		16,800,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	21 Dokumen	21 dokumen	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	16,800,000
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,022,491,858		4,223,616,451	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	42 Orang/bulan	12 Bulan	4,022,491,858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	4,223,616,451
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1,087,355,500		1,141,723,275	
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah diseminasi informasi publik terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	50 Orang	50 informasi	1,087,355,500	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,141,723,275
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										517,584,020		543,463,221	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi		86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	12 Bulan	169,659,554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	178,237,500
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	12 Bulan	157,590,446	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	165,375,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	12 Bulan	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	14,700,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	12 Bulan	6,334,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	6,650,721

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	12 bulan	292,265,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	306,878,250
2 16 02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							422,000,000				443,100,000	
2 16 02 2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							422,000,000				443,100,000	
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1. Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun dan mitra Pemerintah Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	75 Dokumen	500 informasi	247,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	100 persen	259,350,000
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	1. Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun dan mitra Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	500 informasi	69,284,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	100 persen	72,748,410
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1. Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun dan mitra Pemerintah Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	500 informasi	105,715,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	100 persen	111,001,590
2 16 03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							1,820,150,000				1,911,157,500	
2 16 03 2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							877,400,000				921,270,000	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Nama Domain Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	53 Perangkat Daerah	877,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100 persen	921,270,000
2 16 03 2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							942,750,000				989,887,500	
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Dokumen	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	100 persen	210,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 Perangkat Daerah	100 persen	34,259,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	100 persen	32,287,500
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					51,250,000				53,812,500				
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Sarana Prasarana yang diamankan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Perangkat Daerah	6 unit	51,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	100 persen	53,812,500
TOTAL										9,085,023,477				9,539,274,652				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										9,362,069,137		0					
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,679,669,137		0				
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										18,000,000		0			
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai peraturan		86,00 nilai 90 nilai	20 Laporan	100 persen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													6,352,845,206		0
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	68 Orang	100 persen	6,352,845,206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													8,208,200		0
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase administrasi barang milik daerah yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	1 Dokumen	70 persen	8,208,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													264,731,079		0
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	13 Paket	100 persen	6,207,805	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	53 Paket	100 persen	103,104,714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	100 persen	21,814,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	60 Dokumen	100 persen	6,744,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	693 Laporan	100 persen	126,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								793,854,822					0
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	300 Laporan	100 persen	460,048,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	333,806,042	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								242,029,830					0
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang memadai		86,00 nilai 90 nilai	7 Unit	100 persen	135,729,651	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memadai		86,00 nilai 90 nilai	116 Unit	100 persen	11,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memadai		86,00 nilai 90 nilai	50 Unit	100 persen	57,870,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang memadai		86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	36,495,121	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								100,000,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	17	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					50,000,000					0			
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin operasional koperasi yang diterbitkan		16 persen	2 Unit Usaha	6 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan	16 persen	0
2	17	02	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					50,000,000					0			
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan		16 persen	2 Unit Usaha	7 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan	16 persen	0
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					100,000,000					0			
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					100,000,000					0			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi		35 persen	25 Unit Usaha	35 persen	50,000,000	Pajak Rokok	1. Persentase koperasi yang berkualitas	35 persen	0
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi		35 persen	20 Unit Usaha	35 persen	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase koperasi yang berkualitas	35 persen	0
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					75,000,000					0			
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					75,000,000					0			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase koperasi yang sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang telah dinilai kesehatannya		86 persen	90 Unit Usaha	29 persen	75,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase koperasi yang sehat	86 persen	0
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					492,400,000					0			
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					225,000,000					0			
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan latihan		55 persen	90 Orang	49 persen	225,000,000	DAK Non Fisik-PK2UMK	1. Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 persen	0
2	17	05	2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					267,400,000					0			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan penerbitan izin usaha toko swalayan		40 persen	1 Dokumen	2 persen	25,000,000	Pajak Rokok		1. Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	40 persen	0	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					75,000,000								0	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	1. Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pengawasan distribusi B2 (Bahan Berbahaya)		40 persen	3 Laporan	20 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	40 persen	0	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1,547,000,000								0	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					852,000,000									0
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		35 persen	3 Unit	65 persen	350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	35 persen	0	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		35 persen	18 Unit	65 persen	502,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	35 persen	0	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					695,000,000								0	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan		35 persen	3 Dokumen	65 persen	620,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	35 persen	0	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan		35 persen	1 Dokumen	65 persen	75,000,000	Pajak Rokok		1. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	35 persen	0	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					908,000,000								0	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					105,000,000								0	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya		90 persen	4 Laporan	90 persen	42,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	90 persen	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya		90 persen	2 Laporan	90 persen	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	90 persen	0
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								718,000,000					0
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting		90 persen	12 Laporan	90 persen	100,000,000	Pajak Rokok		1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	90 persen	0
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting		90 persen	25 Laporan	90 persen	618,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	90 persen	0
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								85,000,000					0
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida		90 persen	4 Laporan	100 persen	85,000,000	Pajak Rokok		1. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	90 persen	0
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								175,000,000					0
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								175,000,000					0
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	1. Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persentase pelaksanaan promosi bagi ptdok ekspor		65 persen	4 Pelaku Usaha	4 persen	100,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan	65 persen	0
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1. Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Persentase pelaksanaan promosi bagi ptdok ekspor		65 persen	2 Pelaku Usaha	4 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan	65 persen	0
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								250,000,000					0
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								250,000,000					0
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1. Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal		100 persen	4100 Unit	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal	100 persen	0
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1. Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal		100 persen	50 Orang	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal	100 persen	0
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								375,000,000					0
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								375,000,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase penjualan produk dalam negeri		70 persen	4 UMKM	70 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	70 persen	0
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persentase penjualan produk dalam negeri		70 persen	3 UMKM	70 persen	25,000,000	Pajak Rokok		1. Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	70 persen	0
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1. Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase penjualan produk dalam negeri		70 persen	1 Dokumen	70 persen	300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	70 persen	0
TOTAL									12,717,069,137					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										4,253,497,933		4,004,994,000			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,591,351,333		3,386,600,000		
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										11,980,196		20,000,000	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		86,00 nilai 90 nilai	15 Laporan	100 %	11,980,196	Kurang Bayar DBH SDA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	20,000,000
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,587,103,933		2,590,000,000	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		86,00 nilai 90 (A)	30 Orang/bulan	100 %	2,587,103,933	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	86,00 nilai 90 (A)	2,590,000,000
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										59,552,166		150,000,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase kebutuhan administrasi/perengkapan kepegawaian yang dipenuhi		90 (A)	110 Paket	100 %	59,552,166	Kurang Bayar DBH SDA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)	150,000,000
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										235,029,910		142,500,000	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		86,00 nilai 90 nilai	5 Paket	100 %	80,106,404	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	100,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	100 %	40,853,398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	30,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		86,00 nilai 90 nilai	3 Paket	100 %	7,706,108	Kurang Bayar DBH SDA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	7,500,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		86,00 nilai 90 nilai	1 Dokumen	100 %	5,550,000	Kurang Bayar DBH SDA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		86,00 nilai 90 nilai	100 Laporan	100 %	100,814,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								125,466,963					0
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana pendukung yang diadakan		86,00 nilai 90 nilai	10 Unit	100 %	125,466,963	Kurang Bayar DBH SDA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								464,391,000					454,100,000
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 %	178,015,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	170,000,000
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 %	286,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	284,100,000
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								107,827,165					30,000,000
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		86,00 nilai 90 nilai	7 Unit	100 %	86,835,198	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		86,00 nilai 90 nilai	50 Unit	100 %	20,991,967	Kurang Bayar DBH SDA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	30,000,000
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								55,950,000					70,000,000
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								55,950,000					70,000,000
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan "		100 %	1 Dokumen	90 %	55,950,000	Kurang Bayar DBH SDA		Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100 %	70,000,000
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								95,000,000					0
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								95,000,000					0
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Minat Investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun		1600 Milyar	1 Dokumen	75 %	95,000,000	Kurang Bayar DBH SDA		1. Minat Investasi	1600 Milyar	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													110,000,000	
2	18 04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												110,000,000	
2	18 04	2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		10 hari kerja	3000 Pelaku Usaha	80 %	40,002,600	Kurang Bayar DBH SDA		Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	70,000,000
2	18 04	2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		10 hari kerja	3000 Orang	80 %	35,000,000	Kurang Bayar DBH SDA		Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	40,000,000
2	18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													393,394,000	
2	18 05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												393,394,000	
2	18 05	2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya		80 persen	350 Pelaku Usaha	70 %	351,306,860	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		1. Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM	80 persen	350,000,000
2	18 05	2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya		80 persen	20 Kegiatan Usaha	70 %	42,087,140	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		1. Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM	80 persen	43,394,000
2	18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL													45,000,000	
2	18 06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												45,000,000	
2	18 06	2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Persentase Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		10 persen	10 Dokumen	100 %	42,800,000	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10 persen	45,000,000
TOTAL											4,253,497,933					4,004,994,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										7,086,295,511		7,245,000,000		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,756,295,511		3,765,000,000	
2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										157,100,000		155,000,000
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		86,00 nilai 90 nilai		100 persen	157,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	155,000,000
2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,599,195,511		3,610,000,000
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan yang dilaksanakan		86,00 nilai 90 nilai		100 persen	2,729,082,426	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,730,000,000
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan yang dilaksanakan		86,00 nilai 90 nilai		100 persen	870,113,085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	880,000,000
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										930,000,000		960,000,000	
2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										930,000,000		960,000,000
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1. Persentase pemuda yang berprestasi	jumlah pemuda yang berprestasi		6,00 persen		78 orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase pemuda yang berprestasi	6,00 persen	110,000,000
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1. Persentase pemuda yang berprestasi	jumlah pemuda yang berprestasi		6,00 persen		78 orang	830,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase pemuda yang berprestasi	6,00 persen	850,000,000
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										2,400,000,000		2,520,000,000	
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										2,200,000,000		2,300,000,000
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1. Persentase atlet yang berprestasi	jumlah atlit yang berprestasi		37,05 persen		25 orang	2,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase atlet yang berprestasi	37,05 persen	2,300,000,000
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										200,000,000		220,000,000
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1. Persentase atlet yang berprestasi	jenis olahraga rekreasi yang dilaksanakan		37,05 persen		5 jenis	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase atlet yang berprestasi	37,05 persen	220,000,000
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										2,202,400,000		2,375,000,000		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										906,500,000		1,030,000,000	
3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										306,500,000		170,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan		Persentase jumlah kawasan yang dikembangkan dan dipelihara		5,6 persen		66 persen	306,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	5,6 persen	170,000,000		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								500,000,000				600,000,000		
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan		Persentase pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan		5,6 persen		5 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	5,6 persen	600,000,000		
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000				260,000,000		
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1. Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan		Persentase rekomendasi ijin usaha yang diberikan		5,6 persen		7 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	5,6 persen	260,000,000		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								1,195,900,000				1,225,000,000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								1,195,900,000				1,225,000,000		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1. Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan				16 persen			945,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	16 persen	950,000,000		
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1. Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan				16 persen			250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	16 persen	275,000,000		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								100,000,000				120,000,000		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								100,000,000				120,000,000		
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1. Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata 2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif		Persentase SDM pariwisata yang dibina		1,3 persen 17,7 persen		40 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata 2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,3 persen 17,7 persen	120,000,000		
										TOTAL	9,288,695,511					9,620,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											8,194,949,400		8,001,241,997		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,747,949,400		3,726,241,997	
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											19,849,000		30,000,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	0 Laporan	86 nilai	19,849,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	30,000,000
2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,787,440,084		2,787,440,084
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	24 Orang/bulan	100 %	2,787,440,084	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,787,440,084
2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											584,574,216		575,640,063
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	0 Paket	100 %	479,385,266	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	500,951,063
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	100 Laporan	100 %	105,188,950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	74,689,000
2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											223,610,000		221,960,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 %	223,610,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	221,960,000
2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											132,476,100		111,201,850

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	10 Unit	100 %	132,476,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	111,201,850
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					4,447,000,000			4,275,000,000				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					60,000,000			0				
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Persentase peningkatan kunjungan	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	3 Perpustakaan	10 persen	4,200,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	15 Perpustakaan	10 persen	15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	50 Orang	10 persen	15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Persentase peningkatan kunjungan	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	200 Eksemplar	10 persen	25,800,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4,387,000,000			4,275,000,000				
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Nilai budaya kegemaran membaca	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	15 Lokus	70 persen	34,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai budaya kegemaran membaca		3,37 unit	0 Perpustakaan	70 persen	4,275,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	4,275,000,000
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Nilai budaya kegemaran membaca	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	6 Orang	70 persen	7,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Nilai budaya kegemaran membaca	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	90 Perpustakaan	70 persen	60,000,000			1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejadiannya	Nilai budaya kegemaran membaca	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	3,37 unit	2 Orang	70 persen	11,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Perpustakaan Terakreditasi	3,37 unit	0
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									179,944,500				
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									120,760,500				
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									35,424,000				
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1. Indeks Ketersediaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Persentase OPD yang memiliki daftar arsip dinamis		80 indeks	50 Berkas	50 persen	35,424,200	Pendapatan Bagi Hasil		1. Indeks Ketersediaan Arsip	80 indeks	35,424,000
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1. Indeks Ketersediaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase OPD yang memiliki daftar arsip dinamis		80 indeks	250 Berkas	50 persen	26,905,900	Pendapatan Bagi Hasil		1. Indeks Ketersediaan Arsip	80 indeks	0
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Indeks Ketersediaan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki daftar arsip dinamis		80 indeks	53 Laporan	50 persen	46,964,650	Pendapatan Bagi Hasil		1. Indeks Ketersediaan Arsip	80 indeks	0
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									85,336,500				
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1. Indeks Ketersediaan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	80 indeks	100 Arsip	100 persen	85,336,500	Pendapatan Bagi Hasil		1. Indeks Ketersediaan Arsip	80 indeks	85,336,500
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									0				
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1. Indeks Ketersediaan Arsip	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah arsip statis yang masuk SIKN		80 indeks	100 Pengguna	70 Arsip	5,853,650	Pendapatan Bagi Hasil		1. Indeks Ketersediaan Arsip	80 indeks	0
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Ketersediaan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang masuk SIKN		80 indeks	53 Laporan	70 Arsip	9,592,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Indeks Ketersediaan Arsip	80 indeks	0
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									59,184,000				
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									59,184,000				
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1. Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan sesuai NSPK	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	80 indeks	200 Arsip	8 Kali	59,184,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	80 indeks	59,184,000
TOTAL												8,464,210,300			8,181,186,497			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,250,000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	100 persen	36,900,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	29,820,000
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	100 persen	11,378,240	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	14,677,100
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	100 persen	124,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	123,480,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	100 persen	7,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	7,350,000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	100 persen	4,400,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	4,620,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Laporan	100 persen	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	178,500,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							417,821,760					448,059,000	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dokumen penunjang ususan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Laporan	100 persen	5,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,250,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase dokumen penunjang ususan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	105,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
																				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase dokumen penunjang usuan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	312,821,760	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	337,809,000															
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											283,900,000			305,400,000														
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase dokumen aset daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	8 Unit	100 persen	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	141,750,000															
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase dokumen aset daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	45 Unit	100 persen	13,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	13,650,000															
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase dokumen aset daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	125,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	139,500,000															
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase dokumen aset daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Unit	100 persen	10,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,500,000															
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											1,335,830,433			1,297,625,000														
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											1,335,830,433			1,297,625,000														
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,93 persen	3 Laporan	272 kelompok	400,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	26,93 persen	420,000,000															
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,93 persen	2 Laporan	272 kelompok	935,830,433	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	26,93 persen	877,625,000															

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								7,633,498,000			7,976,113,000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								1,350,000,000			1,417,500,000		
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang diperbantukan : pupuk, bibit	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	12 Laporan	41.509 kg	1,350,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	5 persen	1,417,500,000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								6,283,498,000			6,558,613,000		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	16 Unit	2016 unit	1,656,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	5 persen	1,700,000,000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	1 Unit	2016 unit	125,198,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	5 persen	131,198,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	15 Unit	2016 unit	2,302,500,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	5 persen	2,417,625,000
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	2 Unit	2016 unit	249,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	5 persen	262,290,000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	3 Unit	2016 unit	600,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	5 persen	630,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	3 Unit	2016 unit	1,350,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	5 persen	1,417,500,000	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							50,000,000						52,500,000	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							50,000,000							52,500,000
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,06 persen	10 Ha	17.11 persen	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	99,06 persen	52,500,000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							556,500,000						584,325,000	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							556,500,000						584,325,000	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 persen	15 Unit	205 kelompok	150,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani	8 persen	157,500,000	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 persen	6 Unit	205 kelompok	300,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani	8 persen	315,000,000	
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 persen	12 Unit	205 kelompok	106,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani	8 persen	111,825,000	
TOTAL								24,993,966,608					25,567,732,275		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0001 Bagian Administrasi Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan														
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah rumusan kebijakan pemerintah daerah yang disahkan		100 persen	4 Dokumen	13 kebijakan	137,477,980	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	0
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah rumusan kebijakan pemerintah daerah yang disahkan		100 persen	5 Dokumen	13 kebijakan	442,146,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	0
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah rumusan kebijakan pemerintah daerah yang disahkan		100 persen	4 Dokumen	13 kebijakan	191,920,005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	0
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah														
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah rumusan kebijakan kerjasama daerah yang disahkan		100 persen	12 Dokumen	12 kebijakan	57,720,250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	0
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah rumusan kebijakan kerjasama daerah yang disahkan		100 persen	12 Laporan	12 kebijakan	4,799,025	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	0
TOTAL												834,064,070						0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0002 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH											1,102,915,696		501,441,388			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											1,102,915,696		501,441,388		
4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											1,102,915,696		501,441,388	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.Jumlah Legislasi Produk hukum daerah yang diinformasi-kan pada JDIH(target 130 produk hukum) dan 2. Jumlah Fasilitasi Kasus Hukum(target 5 kasus)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kebijakan	500 Dokumen	0 kasus	300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	7 kebijakan	300,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.Jumlah Legislasi Produk hukum daerah yang diinformasi-kan pada JDIH(target 130 produk hukum) dan 2. Jumlah Fasilitasi Kasus Hukum(target 5 kasus)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kebijakan	5 Kasus	0 kasus	581,373,396	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	7 kebijakan	0
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.Jumlah Legislasi Produk hukum daerah yang diinformasi-kan pada JDIH(target 130 produk hukum) dan 2. Jumlah Fasilitasi Kasus Hukum(target 5 kasus)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 kebijakan	500 Dokumen	0 kasus	221,542,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	7 kebijakan	201,441,388
TOTAL												1,102,915,696		501,441,388				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0003 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kebijakan	100 Dokumen	4 rumusan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	4 kebijakan	10,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Persentase jumlah rencana pengadaan dalam SIRUP dengan belanja pengadaan/belanja langsung pada APBD	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kebijakan	0 Dokumen 100 persen	4 rumusan	108,813,919	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	4 kebijakan	88,750,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Persentase rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kebijakan	0 Orang 100 persen	4 rumusan	581,186,081	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	2. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	4 kebijakan	301,250,000
TOTAL												700,000,000				400,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0005 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat														
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi 2. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang dilaksanakan	1. Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi (3825) 2. Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan rakyat yang di Sahkan (14)		95 % 100 persen	6 Dokumen 3825 Kegiatan	3825 Kegiatan	3,268,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi 2. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	95 % 100 persen	3,350,000,000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi 2. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1. Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi (3825) 2. Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan rakyat yang di Sahkan (14)		95 % 100 persen	4 Dokumen	3825 Kegiatan	501,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi 2. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	95 % 100 persen	510,000,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi 2. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1. Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi (3825) 2. Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan rakyat yang di Sahkan (14)		95 % 100 persen	4 Dokumen	3825 Kegiatan	3,730,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi 2. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	95 % 100 persen	3,750,000,000
TOTAL												7,500,000,000				7,610,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0006 Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian														
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rumusan perekonomian daerah yang di sahkan		100 persen	4 Dokumen	8 kebijakan	118,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	300,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rumusan perekonomian daerah yang di sahkan		100 persen	4 Laporan	8 kebijakan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	100,000,000
4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam														
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah rumusan kebijakan sumber daya alam yang di sahkan		100 persen	2 Dokumen	3 kebijakan	7,002,066,500	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	7,132,066,500
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah rumusan kebijakan sumber daya alam yang di sahkan		100 persen	1 Dokumen	3 kebijakan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	30,000,000
TOTAL												7,332,066,500						7,562,066,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga Setda	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	2 Paket 23 jenis	100 persen	55,565,658	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	31,032,500
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah bahan logistik kantor Sekretariat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	35 jenis 2 Paket	100 persen	202,679,229	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	202,713,770
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan Setda Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	8 jenis 2 Paket	100 persen	108,108,311	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	108,101,675
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah langganan bahan bacaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	2 Dokumen 120 eksemplar	100 persen	9,523,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	9,625,000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan bahan/material Sekretariat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	3 jenis 2 Paket	100 persen	104,295,594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	104,288,735
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah kunjungan tamu ke Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	95 tamu 2 Laporan	100 persen	23,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	23,100,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan rapat koordinsai dan konsultasi Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	100 dokumen 2 Laporan	100 persen	1,125,491,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	1,126,045,870
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	2 Dokumen	100 persen	2,121,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	3,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	2 Dokumen	100 persen	2,090,130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	0
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3,950,901,101			3,983,336,036		
4	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah jasa surat menyurat Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	5 jenis	100 persen	12,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	37,000,000
4	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	12 bulan	100 persen	952,947,674	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	952,947,674
4	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setda	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	0 Laporan 15 jenis	100 persen	420,993,495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	428,728,315
4	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	20 kelompok	100 persen	2,564,659,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	2,564,660,047
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,262,999,276			1,305,638,550		
4	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat Daerah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sekretariat Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	20 unit 4 unit 0 Unit	100 persen	1,098,039,276	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	1,141,017,150

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0007 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terfasilitasi	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	10 jenis	85 persen	590,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	90 nilai	590,354,000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang terfasilitasi	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	10 jenis	85 persen	464,766,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	90 nilai	464,766,000
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	9 bagian	85 persen	190,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	90 nilai	190,130,000
TOTAL									23,758,242,600					23,300,766,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0008 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	SEKRETARIAT DAERAH											612,680,921		612,680,921		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											612,680,921		612,680,921	
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi											612,680,921		612,680,921
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan fungsinya	1. Jumlah Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang disahkan(7 kebijakan),2. Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disahkan(4 kebijakan) dan 3.Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disahkan(4 kebijakan)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen	0 Dokumen 53 OPD	4 kebijakan	182,680,921	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kurang Bayar DBH SDA	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen 100 persen	182,680,921
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah perangkat daerah memiliki inovasi pelayanan publik	1. Jumlah Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang disahkan(7 kebijakan),2. Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disahkan(4 kebijakan) dan 3.Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disahkan(4 kebijakan)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen	0 Laporan 10 OPD	4 kebijakan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kurang Bayar DBH SDA	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen 100 persen	150,000,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah LKjIP Perangkat Daerah yang mengalami Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan	1. Jumlah Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang disahkan(7 kebijakan),2. Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disahkan(4 kebijakan) dan 3.Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disahkan(4 kebijakan)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen	0 Dokumen 40 Dokumen	4 kebijakan	164,442,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kurang Bayar DBH SDA	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen 100 persen	160,000,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah yang melakukan survei IKM dengan kategori mutu pelayanan BAIK	1. Jumlah Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang disahkan(7 kebijakan),2. Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disahkan(4 kebijakan) dan 3.Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disahkan(4 kebijakan)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen	0 Dokumen 19 OPD	4 kebijakan	60,000,000	Kurang Bayar DBH SDA	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen 100 persen	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0008 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen laporan yang tersusun sudah sesuai peraturan yang berlaku	1. Jumlah Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang disahkan(7 kebijakan),2. Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disahkan(4 kebijakan) dan 3.Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disahkan(4 kebijakan)	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen	0 Dokumen 4 Dokumen	4 kebijakan	55,557,650	Kurang Bayar DBH SDA	1. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan 4. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen 100 persen	60,000,000
TOTAL										612,680,921		612,680,921					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0009 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan														
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	6. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1.Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan pimpinan yang dirilis (260), 2. Jumlah kegiatan keprotokolan & Komunikasi pimpinan yang terselenggara (305 kegiatan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	305 Laporan	260 rilis	796,036,123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	100 persen	845,748,865
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan pimpinan yang dirilis (260), 2. Jumlah kegiatan keprotokolan & Komunikasi pimpinan yang terselenggara (305 kegiatan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	260 Laporan	260 rilis	20,805,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	100 persen	20,805,100
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan pimpinan yang dirilis (260), 2. Jumlah kegiatan keprotokolan & Komunikasi pimpinan yang terselenggara (305 kegiatan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	260 Laporan	260 rilis	292,827,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	100 persen	243,114,758
TOTAL												1,109,668,723			1,109,668,723			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.03.0010 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan														
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi pembangunan sesuai ketentuan		100 persen	4 Dokumen	10 dokumen	301,410,535	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	317,200,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pelaksanaan administrasi pembangunan sesuai ketentuan		100 persen	3 Laporan	10 dokumen	99,753,175	Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	110,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan administrasi pembangunan sesuai ketentuan		100 persen	3 Laporan	10 dokumen	197,063,215	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kurang Bayar DBH SDA		1. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100 persen	171,026,925
TOTAL												598,226,925					598,226,925	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					31 Orang		343,257,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				380,757,000
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,045,250,039					1,275,136,890
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket		28,416,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,987,494
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket		38,524,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51,025,585
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket		61,190,978	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				66,662,800
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket		202,347,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				228,631,519
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket		114,624,331	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,967,292
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					6 Dokumen		74,140,000					74,140,000
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					96 Laporan		108,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				140,398,200

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan	417,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			531,324,000	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								273,958,755				334,279,275	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15 Unit	128,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			116,508,995	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					12 Unit	145,328,755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			217,770,280	
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,288,339,056				1,300,167,769	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					120 Laporan	15,398,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,398,750	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					48 Laporan	277,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			290,100,000	
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan	995,464,306	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			994,669,019	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,979,087,714				2,042,390,165	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	682,051,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			501,924,775	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit		904,510,322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			698,801,652		
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000		
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit		140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140,000,000		
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit		130,313,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			360,661,015		
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit		92,212,212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			311,002,723		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						25,840,911,000				25,856,830,606				
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan		25,312,152,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,321,132,771		
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				180 Paket		400,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			445,697,835		
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang		127,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000		
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD						56,765,000				58,954,668				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD					12 Laporan		24,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,102,168
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					24 Laporan		32,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,852,500
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									23,457,608,021				24,988,239,176
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									4,852,185,200				5,020,400,500
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					8 Dokumen		17,507,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					8 Dokumen		1,837,347,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,950,900,500
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan					24 Dokumen		2,897,330,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,950,500,000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					2 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,000,000
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran									2,434,794,750				2,411,705,000
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS					1 Dokumen		308,753,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			290,100,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	306,621,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			290,100,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	726,330,650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			755,415,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	553,502,150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			555,540,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	539,587,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			520,550,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						546,956,500			552,230,163		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				8 Laporan	30,660,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			29,672,129
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	15,330,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,863,000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	15,330,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,863,000
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	15,330,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			14,052,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					2 Laporan	15,330,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13,068,000	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					1 Dokumen	88,361,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			90,720,234	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran								26,105,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			22,000,000	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	340,510,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			348,991,300	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							5,715,391,745				5,384,044,720		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					45 Dokumen	1,802,489,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,415,112,100	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan					12 Dokumen	995,405,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,138,432,350	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					4 Orang	102,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					6 Orang	180,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			180,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24 Dokumen		7,901,429,226	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,500,000,000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				8 Laporan		248,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				247,021,184
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen		29,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,704,155
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				6 Dokumen		610,586,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				650,000,000
TOTAL									58,535,814,327					60,573,590,012

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	1 Paket	12 bulan	15,740,341	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	16,000,000
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	1 Dokumen	12 bulan	5,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	5,500,000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	200 Laporan	12 bulan	207,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	215,000,000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								455,270,503					449,000,000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	36 Laporan	100 Persen	128,946,154	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	130,000,000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	3 Laporan	100 Persen	326,324,349	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	319,000,000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								286,602,005					297,000,000
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	44 Unit	80 Persen	213,449,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	212,000,000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	0 Unit 200 Unit	80 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	25,000,000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase barang milik daerah yang layak fungsi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 nilai	1 Unit	80 Persen	53,152,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	90 nilai	60,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,411,513,577				961,513,577	
5	01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								847,683,733				469,633,930	
5	01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah dokumen pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	1 Dokumen	6 Dokumen	259,983,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	0
5	01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah dokumen pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	1 Berita Acara	6 Dokumen	31,843,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	0
5	01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	3 Berita Acara	6 Dokumen	12,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	0
5	01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	1 Berita Acara	6 Dokumen	88,697,944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	83,157,825
5	01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah dokumen pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	1500 Usulan	6 Dokumen	21,465,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	21,465,360
5	01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah dokumen pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	0 Dokumen 4 Dokumen	6 Dokumen	433,053,794	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	365,010,745
5	01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								121,770,260				133,667,085	
5	01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Data Informasi Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	61 Orang	3 Data	100,898,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	57,478,086
5	01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Data Informasi Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	40 Buku	3 Data	20,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	76,188,999
5	01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								442,059,584				358,212,562	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
5	01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan		5,076,822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	5,077,000	
5	01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100 persen	4 Laporan	3 Laporan	436,982,762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 persen	353,135,562	
5	01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,733,469,574					1,481,576,000	
5	01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								301,112,831						21,576,000
5	01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	0 Dokumen	15 Urusan	13,422,000			1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0	
5	01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	0 Laporan 1 Dokumen	15 Urusan	22,655,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	10,788,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	0 Laporan 1 Dokumen	15 Urusan	25,308,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	10,788,000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	15 Urusan	12,006,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Dokumen	15 Urusan	10,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	15 Urusan	18,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	15 Urusan	28,855,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	15 Urusan	170,585,631	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Presentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							381,006,743						0
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Dokumen	14 Urusan	31,254,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	14 Urusan	6,198,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	0 Laporan	14 Urusan	20,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	0 Laporan	14 Urusan	95,931,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Dokumen	14 Urusan	133,680,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	14 Urusan	5,441,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	14 Urusan	6,847,233	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Laporan	14 Urusan	81,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase PD Bidang ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	0
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						1,051,350,000							1,460,000,000
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3. Presentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai ketentuan		100 persen	1 Dokumen	10 Urusan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Presentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%	100 persen	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan		100 persen	1 Laporan	2 Rekomendasi	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	100 persen	0
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan Baik	Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan		100 persen	1 Laporan	2 Rekomendasi	121,129,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	100 persen	0
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								218,884,247					225,000,000
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	1 Kajian	110,764,817	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	100 persen	115,000,000
5 05 02 2.02 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	1 Kajian	108,119,430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	100 persen	110,000,000
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								197,840,800					92,000,000
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	1 Rekomendasi	108,085,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	100 persen	0
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	Dokumen Analisis Capaian Indeks Kepuasan Infrastruktur Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 dokumen 0 Dokumen	1 Rekomendasi	89,755,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/diterbitkan/dipublikasikan	100 persen	92,000,000
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								202,162,198					0
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi Laporan	Persentase Inovasi yang Ditindaklanjuti	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Dokumen 35 dokumen	100 Persen	202,162,198	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	100 persen	0
TOTAL									10,057,623,396				4,557,759,447	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02	KEUANGAN												0					
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												0				
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0			
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Tepat Waktu		86,00 nilai 90 nilai	0 Laporan	100 persen	148,430,597	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Tepat Waktu		86,00 nilai 90 nilai	0 Laporan	100 persen	268,873,716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															0
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Gaji, Tunjangan ASN dan Kebutuhan Operasional yang Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Orang/bulan	100 Persen	28,903,128,481	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketersediaan Gaji, Tunjangan ASN dan Kebutuhan Operasional yang Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Dokumen	100 Persen	145,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															0
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur Penatausahaan Keuangan yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		86,00 nilai 90 nilai	0 Orang	100 Persen	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															0
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Kinerja Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Paket	100 Persen	6,046,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Kinerja Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Paket	100 Persen	117,852,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Kinerja Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Paket	100 Persen	398,854,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Kinerja Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Paket	100 Persen	96,038,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								706,883,690					0	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Kebutuhan Operasional Kantor yang Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Operasional Kantor yang Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Laporan	100 Persen	153,465,280			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Kebutuhan Operasional Kantor yang Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	0 Laporan	100 Persen	551,418,410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								659,507,401					0	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Ketersediaan Saarana Penunjang Kinerja Dalam Kondisi Baik		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	100 Persen	384,305,101	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Ketersediaan Saarana Penunjang Kinerja Dalam Kondisi Baik		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	100 Persen	150,327,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Ketersediaan Saarana Penunjang Kinerja Dalam Kondisi Baik		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	100 Persen	124,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								400,555,188,406					0
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,740,701,440					0
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	121,507,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	122,487,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	32,937,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	32,937,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	28,423,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	28,423,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	862,470,455	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	228,226,195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Dokumen	100 Persen	118,530,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan APBD dan P-APBD Tepat Waktu		100 persen	0 Orang	100 Persen	164,757,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					1,038,219,075				0				
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang Tepat Waktu		100 persen	12 Dokumen	100 Persen	158,713,145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang Tepat Waktu		100 persen	1 Dokumen	100 Persen	392,176,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang Tepat Waktu		100 persen	1 Dokumen	100 Persen	241,811,123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang Tepat Waktu		100 persen	4 Laporan	100 Persen	159,500,338	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang Tepat Waktu		100 persen	12 Dokumen	100 Persen	86,018,069	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					303,349,334				0				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Terlaksana		100 persen	2 Laporan	100 Persen	14,711,488	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Terlaksana		100 persen	240 Dokumen	100 Persen	232,758,234	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Terlaksana		100 persen	1 Dokumen	100 Persen	55,879,612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							397,472,918,557				0		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Capaian Hasil Belanja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu		100 persen	0 Laporan	100 Persen	363,260,601,557	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Capaian Hasil Belanja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu		100 persen	0 Laporan	100 Persen	25,000,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Hasil Belanja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu		100 persen	0 Laporan	100 Persen	9,212,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100 persen	0
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							3,828,181,848				0		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							3,828,181,848				0		
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal		100 persen	12 Laporan	100 Persen	1,143,148,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100 persen	0
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal		100 persen	121 Laporan	100 Persen	275,623,069	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal		100 persen	12 Laporan	100 Persen	2,366,114,708	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100 persen	0
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal		100 persen	1 Laporan	100 Persen	43,295,951	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	100 persen	0
TOTAL												435,888,186,253					0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02	KEUANGAN															
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	55 Orang/bulan	100 persen	6,861,754,854	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	4,161,375,176
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	100 persen	1,971,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,000,000
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi umum	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	3,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelayanan administrasi umum		86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	200,547,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	1 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	1 paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								709,845,382					548,928,860
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Laporan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan		173,809,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		535,536,082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				547,428,860
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								198,800,000					195,000,000
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	94,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	65,000,000
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		86,00 nilai 90 nilai	50 Unit	100 persen	34,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	65,000,000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		86,00 nilai 90 nilai	65 Unit	100 persen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	40,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	25,000,000
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1,487,517,685				1,430,117,491	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1,487,517,685					1,430,117,491
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	12 persen	127,044,203	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	127,346,460
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	12 persen	31,146,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	30,000,000
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Unit	12 persen	235,500,047	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	228,101,656
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah		100 persen	1 Laporan	12 persen	170,480,106	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	179,551,884
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	12 persen	98,931,607	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	100,000,000
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Layanan	12 persen	36,907,500	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	35,000,000
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase peningkatan target pajak daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	52000 Dokumen	12 persen	43,377,045	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	41,504,600
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah		100 persen	150000 Dokumen	12 persen	453,637,297	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	400,028,551
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah		100 persen	5000 Dokumen	12 persen	28,886,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	26,977,060

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1. Persentase peningkatan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah		100 persen	24 Dokumen	12 persen	261,607,280	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase peningkatan PAD	100 persen	261,607,280
TOTAL									9,847,187,899					7,699,323,527

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03	KEPEGAWAIAN											7,851,018,876		7,851,018,876		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,912,975,139		4,912,975,139	
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											125,985,000		125,985,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terpenuhi	Kab. Madiun, Mejayan, Mejayan	86,00 nilai 90 nilai	0 Dokumen 14 Dokumen	14 dok	125,985,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	125,985,000
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,740,367,489		3,740,367,489
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhi		86,00 nilai 90 nilai	37 Orang/bulan	12 Bulan	3,740,367,489	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,740,367,489
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											373,315,484		350,000,000
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	12 Bulan	10,018,916	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,000,000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	8 Paket	12 Bulan	56,546,161	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	50,000,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	12 Bulan	26,394,247	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	30,000,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	12 Bulan	50,191,114	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	75,000,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	12 Bulan	13,238,393	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	12 Bulan	3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Paket	12 Bulan	80,247,397	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	80,000,000
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 Bulan	4,961,256	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 Bulan	127,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	80,000,000
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								94,569,447					80,000,000
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan sarana yang tersedia	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	12 Bulan	50,050,677	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	80,000,000
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan sarana yang tersedia		86,00 nilai 90 nilai	10 Unit	12 Bulan	44,518,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								426,131,326					448,622,650
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Perkantoran	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 Bulan	149,851,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	183,622,650
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Perkantoran	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	12 Bulan	276,279,676	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	265,000,000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								152,606,393					168,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	14 Unit	12 Bulan	54,708,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	43,000,000
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	265 Unit	12 Bulan	41,716,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	45,000,000
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	12 Bulan	56,181,318	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	80,000,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2,938,043,737					2,938,043,737
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								1,117,291,064					1,117,291,064
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	fasilitasi administrasi pemberhentian, validasi sistem informasi kepegawaian, dan ASN yang diangkat sesuai formasi terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	3 Laporan	100 %	855,931,064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	855,931,064
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	fasilitasi administrasi pemberhentian, validasi sistem informasi kepegawaian, dan ASN yang diangkat sesuai formasi terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	1 Dokumen	100 %	124,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	124,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	fasilitasi administrasi pemberhentian, validasi sistem informasi kepegawaian, dan ASN yang diangkat sesuai formasi terpenuhi	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	10 Dokumen	100 %	136,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	136,860,000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					656,034,033			656,034,033					
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Prosentase Mutasi Jabatan sesuai Kualifikasi		100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	1 Dokumen	100 %	3,825,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	3,825,250
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Prosentase Mutasi Jabatan sesuai Kualifikasi		100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	1 Dokumen	100 %	90,460,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	90,460,600
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Prosentase Mutasi Jabatan sesuai Kualifikasi		100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	0 Dokumen	100 %	561,748,183	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	561,748,183
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN					1,118,500,000			1,118,500,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	1 Dokumen	85 %	224,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	224,000,000
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang memperoleh STTPP PKN Tingkat II Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tersedianya mesin genset	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan		100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	6 Orang 11 Orang 30 Orang 1 Unit	85 %	894,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	894,500,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								46,218,640					46,218,640
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Kinerja ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	2 Dokumen	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	25,000,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penilaian Kinerja ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	2 Laporan	100 %	21,218,640	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase penetapan kebutuhan ASN 2. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi 3. Persentase kedisiplinan ASN 4. Persentase Penilaian Kinerja ASN 5. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	100 persen 100 persen 99 persen 100 persen 85 persen	21,218,640
TOTAL													7,851,018,876					7,851,018,876

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								179,965,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							18,902,690					50,000,000	
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit		18,902,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							357,657,334					3,500,000	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		2,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,500,000
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								107,953,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								246,853,634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							179,877,550					40,000,000	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit		155,677,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit		24,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							749,374,755					850,000,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							579,374,755					650,000,000	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				50,000,000
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan		400,293,040	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				600,000,000
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja								25,014,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				0
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan		20,006,800	Pendapatan Bagi Hasil				0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					60 Laporan		19,268,955	Pendapatan Bagi Hasil			0
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk					3 Kesepakatan		29,692,960	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									40,099,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									170,000,000				200,000,000
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									20,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan		150,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			200,000,000
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									250,625,245				430,000,000
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan									20,020,000				30,000,000
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					1 Rekomendasi		20,020,000	Pendapatan Bagi Hasil			30,000,000
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi									230,605,245				400,000,000
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Reviu RKPd, Renja, RKA, dan DAK					7 LHR		15,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			200,000,000
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		1. Jumlah Laporan Reviu PMPRB 2. Jumlah Laporan Pengawasan LHKASN					11 LHR 1 LHR		25,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			200,000,000
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									160,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									30,605,245	Pendapatan Bagi Hasil			0
TOTAL										6,390,361,410				6,038,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase layanan umum yang tersedia		86,00 nilai 86,00 nilai	3 Paket	100 persen	8,687,811			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 86,00 nilai	0
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	persentase layanan umum yang tersedia		86,00 nilai 86,00 nilai	2 Dokumen	100 persen	5,400,000			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 86,00 nilai	0
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase layanan umum yang tersedia	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 86,00 nilai	3 Laporan	100 persen	19,643,194			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 86,00 nilai	0
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					0
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		86,00 nilai 86,00 nilai	1 Unit	100 persen	0			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 86,00 nilai	0
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 86,00 nilai	0 Unit 5 Unit	100 persen	0			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 86,00 nilai	0
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 86,00 nilai	7 Unit	100 persen	0			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 86,00 nilai	0
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104,742,000					0
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan		16,200,000					0
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan		1 Laporan		0					0
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan		2 Laporan		88,542,000					0
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								128,725,906					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan		8 Unit		7,622,970					0
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan		1 Unit		121,102,936					0
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3,500,000					0
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								3,500,000					0
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan		2 Laporan		1,750,000					0
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,750,000					0
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								13,428,540					0
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								11,746,000					0
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen		100 persen	5,796,000			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan		100 persen	2 Dokumen	100 persen	2,625,000			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan		100 persen	2 Laporan	100 persen	3,325,000			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1,682,540					0
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		presentasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara		100 persen		100 persen	1,682,540			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		presentasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen		100 persen	0			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat yang Disediakan	presentasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	100 persen	0			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	presentasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	18 Laporan	100 persen	0			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								5,425,000					0
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								1,750,000					0
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	presentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	3 Laporan	100 persen	1,750,000			1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	0
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								2,100,000					0
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah fasilitasi penegakan perda dan pengawasan perijinan		100 persen	2 Laporan	2 kegiatan	2,100,000			1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	0
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								1,575,000					0
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Presentase layanan ketenteraman dan ketertiban umum		100 persen	3 Laporan	100 persen	1,575,000			1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	0
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								3,150,000					0
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								3,150,000					0
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	0 Orang	100 persen	1,050,000			1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	0
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	50 Orang	100 persen	2,100,000			1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Balerejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19,624,485			0		
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								19,624,485			0		
7	01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	18 Dokumen	4 kegiatan	1,750,000			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	4 kegiatan	4,900,000			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	18 Dokumen	4 kegiatan	2,100,000			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana		100 persen	18 Dokumen	4 kegiatan	6,300,000			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	18 Dokumen	4 kegiatan	2,100,000			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	5 Dokumen	4 kegiatan	0			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	18 Dokumen	4 kegiatan	2,100,000			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Balerejo, Semua Kelurahan	100 persen	5 Dokumen	4 kegiatan	374,485			1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
TOTAL										2,556,130,418					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dagangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7																	
7	01																
7	01	01															
7	01	01	2.01														
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pemerintah sesuai Peraturan	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Laporan	9 dokumen	2,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.02														
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	26 Orang/bulan	100 persen	2,430,364,271	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,500,000,000
7	01	01	2.05														
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	0 Orang	100 persen	30,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	30,000,000
7	01	01	2.06														
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	2,453,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	1,956,903	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	29,860,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	50,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	4,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dagangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	7,544,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Laporan	100 persen	0			1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								57,804,500					60,000,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								56,120,000					60,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	56,120,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	60,000,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	0
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								1,684,500					0
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Fasilitasi Penegakan Perda dan Pengawasan Perijinan	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	2 kegiatan	1,684,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	0
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18,475,100					0
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								18,475,100					0
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kegiatan Peringatan Hari Besar Yang terlaksana	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Orang 1 tahun	100 Persen	13,047,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dagangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Dagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pertemuan Kampung Pesilat yang dilaksanakan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Orang 1 kegiatan	100 Persen	5,427,500	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	0
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Dokumen	100 Persen	0			1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							65,493,000					0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							65,493,000						0
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	57,940,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,047,500	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,047,500	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Madiun, Dagangan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,638,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	0
TOTAL												2,885,364,271				2,650,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10,339,650					15,900,940				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	10,339,650	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,900,940
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85,559,150					87,395,000				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupiah	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	20,009,150	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,290,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupiah	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	65,550,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	72,105,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78,821,100					86,317,000				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	8 Unit	100 persen	60,983,850	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	67,100,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	25 Unit	100 persen	7,468,250	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	8,217,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	5 Unit	100 persen	10,369,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	11,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				33,747,000					35,200,000				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				33,747,000					35,200,000				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	6 kegiatan	33,747,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	35,200,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				54,707,500					57,800,500				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				43,607,500					45,600,500				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen		100 persen	6,926,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	5,251,400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	13,471,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	14,818,100
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	23,210,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	25,531,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								11,100,000					12,200,000
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan				11,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,200,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								19,725,000					21,697,500
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								19,725,000					21,697,500
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	19,725,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	21,697,500
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								7,065,000					7,771,500
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								7,065,000					7,771,500
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	60 Orang	100 persen	7,065,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	7,771,500
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								34,140,000					37,545,200
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								34,140,000					37,545,200
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 persen	22,008,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	24,200,000
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Dolopo, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 persen	12,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	13,345,200
TOTAL									4,085,612,421					4,487,379,401

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Bangunsari Dolopo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tercukupi		86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	28,342,330	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	35,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tercukupi		86,00 nilai 90 nilai	6 Laporan	100 persen	99,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	90,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12,800,000					19,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	10,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								340,851,470					380,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								340,851,470					380,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Madiun, Dolopo, Bangunsari	100 persen	3 Unit	100 persen	99,996,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Bangunsari Dolopo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
																			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 persen	10 Pokmas / Ormas		100 persen	156,836,470	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	170,000,000												
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 persen	12 Laporan	100 persen		84,018,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	90,000,000												
													TOTAL	600,000,000					804,500,000												

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Dolopo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Mlilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan		100 persen	12 Pokmas / Ormas	100 persen	102,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	110,000,000
7	01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan		100 persen	4 Laporan	100 persen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	120,000,000
TOTAL										600,000,000					585,400,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Geger

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	69,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	70,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							19,915,155					10,000,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	7,540,155	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,000,000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	12,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							99,092,827					97,082,220	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	20,398,667	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	20,400,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	78,694,160	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	76,682,220
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							110,794,515					45,000,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	8 Unit	100 persen	65,794,600	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	25 Unit	100 persen	9,999,915	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Unit	100 persen	35,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	35,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6,138,000					6,138,000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							6,138,000					6,138,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Geger
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	6 kegiatan	6,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	6,138,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								31,664,800					0
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								19,434,800					0
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen		100 persen	7,365,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	6,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	5,931,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								12,230,000					0
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen		100 persen	12,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								38,231,400					0
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								38,231,400					0
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	38,231,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	0
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								9,758,800					0
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								9,758,800					0
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen	80 Orang	100 persen	9,758,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	0
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								9,207,000					9,207,000
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								9,207,000					9,207,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Geger
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	Kab. Madiun, Geger, Semua Kelurahan	100 persen	6 Dokumen	100 persen	9,207,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1.Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	9,207,000
TOTAL									2,708,026,399					2,520,571,399

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Gemarang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		300 Dokumen		1,980,000	Pendapatan Bagi Hasil				2,200,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		120 Laporan		39,024,000	Pendapatan Bagi Hasil				43,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							111,469,671						123,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		12 Laporan		33,469,671	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		12 Laporan		78,000,000	Pendapatan Bagi Hasil				86,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							66,177,920						73,300,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		7 Unit		53,570,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		20 Unit		5,335,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,200,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		4 Unit		7,272,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,100,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							5,000,000						5,500,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							5,000,000						5,500,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		1 Laporan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,500,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							40,000,000						47,000,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							14,379,900						18,500,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan				9,379,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				13,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Gemarang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Gemarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		2 Laporan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,500,000	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							25,620,100					28,500,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan				23,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			26,000,000	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		7 Laporan		2,120,100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2,500,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,995,410					3,200,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							2,995,410					3,200,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		7 Laporan		2,995,410	Pendapatan Bagi Hasil			3,200,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							9,645,250					16,100,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							9,645,250					16,100,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		50 Orang		9,645,250	Pendapatan Bagi Hasil			16,100,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							5,000,000					5,500,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							5,000,000					5,500,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Madiun, Gemarang, Semua Kelurahan		7 Dokumen		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,500,000	
TOTAL									1,968,777,984				2,173,355,782	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang disusun sesuai peraturan	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	14 Laporan	14 dokumen	615,796	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,670,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan		86,00 nilai 90 nilai	26 Orang/bulan	100 prosen	2,498,501,114	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,501,323,000
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan		100 Orang		30,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				40,000,000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 prosen	841,886	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,650,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 prosen	8,937,710	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,750,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 prosen	7,794,205	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,794,205
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 prosen	4,312,500	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	7,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 prosen	12,453,035	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,500,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	100 prosen	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 prosen	42,592,754	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	52,592,754
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0					45,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	4 Unit	100 prosen	0	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	45,000,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								111,694,000					135,450,074
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 prosen	23,736,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	38,736,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 prosen	87,958,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	96,714,074
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81,600,000					242,000,000
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Unit	100 prosen	70,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	77,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Unit	100 prosen	11,600,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	15,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Unit	100 prosen	0			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	150,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								15,527,500					27,027,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								6,527,000					16,527,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat Yang Berkualitas	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	6 kegiatan	6,527,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	16,527,000
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								9,000,500					10,500,000
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang Terkoordinasi Dengan Baik	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	1 kegiatan	9,000,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	10,500,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								35,580,000					43,120,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								23,953,000					27,620,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	14 Dokumen	100 prosen	11,661,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	12,500,000
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 prosen	1,205,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	2,620,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 prosen	11,087,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	12,500,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								11,627,000					15,500,000
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Terselenggara	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen		100 prosen	7,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	8,500,000
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Terselenggara	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen		100 prosen	1,179,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	2,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Terselenggara	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	3,108,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	4,500,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								16,267,000			17,500,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								16,267,000			17,500,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	16,267,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	17,500,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								17,922,250			27,500,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								17,922,250			27,500,000		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	100 persen	7,684,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	12,500,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	100 persen	8,928,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	10,500,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	4,500,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								24,703,250			34,788,250		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								24,703,250			34,788,250		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	11,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	12,500,000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	2,500,000
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	7,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	14,850,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jiwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	Kab. Madiun, Jiwan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 prosen	3,938,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	4,938,250
TOTAL									2,911,323,000					3,216,165,283

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kebonsari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang disusun sesuai peraturan	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	0 Dokumen 1 Unit	14 Dokumen	25,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	25,850,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Administrasi keuangan yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	30 Orang/bulan	100 persen	1,695,272,344	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,695,250,574
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Presentase Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	180 Orang	100 persen	30,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	30,000,000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	1,508,490	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,688,444
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	16,954,571	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	168,451,905
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	5,774,778	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	5,709,071
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	3,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,337,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kebonsari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Dokumen	100 persen	1,808,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,808,400
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Laporan	100 persen	48,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	38,040,700
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								98,950,756					98,361,590
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase jasa penunjang pemerintahan daerah	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	100 persen	26,190,756	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	26,229,370
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase jasa penunjang pemerintahan daerah	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	100 persen	72,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	72,132,220
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,300,170					67,878,850
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	3 Unit	100 persen	79,533,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	64,112,320
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	0 Unit 3 Unit	100 persen	3,766,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,766,530
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3,130,500					3,130,500
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								3,130,500					3,130,500
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	6 kegiatan	3,130,500	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	3,130,500
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								17,278,400					25,070,800
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								6,267,200					13,427,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kebonsari
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kebonsari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	100 persen	0 Laporan 1 Laporan	100 persen	6,267,200	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	13,427,500
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							11,011,200						11,643,300
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	100 persen	1 lembaga	100 persen	11,011,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	11,643,300
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							73,888,000						73,255,780
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							70,000,000						69,367,780
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah fasilitasi penegakan Perda dan Pengawasan Perijinan	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	2 Kegiatan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	69,367,780
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3,888,000						3,888,000
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan		2 Laporan		3,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,888,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							41,175,565						284,469,905
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							41,175,565						284,469,905
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	100 persen	400 Orang	100 persen	17,980,565	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	18,591,760
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Kebon Sari, Semua Kelurahan	100 persen	300 Orang	100 persen	11,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	11,160,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Kare
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan		14,384,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan		81,250,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53,000,000					0
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit		45,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit		2,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit		6,000,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2,425,000					0
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								2,425,000					0
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan		2,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								21,713,000					0
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								21,713,000					0
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan		21,713,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								23,305,000					0
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								23,305,000					0
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan		20,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Kare
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Kare

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1 Laporan		3,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								25,478,200					0
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								25,478,200					0
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen		25,478,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0
TOTAL									2,235,824,747				0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Madiun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tercukupinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bulan		40,721,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,850,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tercukupinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Bulan		88,392,000	Pendapatan Bagi Hasil			0
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									58,842,000				59,400,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya Operasional Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Bulan		45,643,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,400,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tercukupinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Paket		13,199,000	Kurang Bayar DBH SDA			15,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									5,543,000				6,000,000
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									4,888,000				5,000,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Tercukupinya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Bulan		4,888,000	Kurang Bayar DBH SDA			5,000,000
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									655,000				1,000,000
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Tercukupinya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					1 Kegiatan		655,000	Kurang Bayar DBH SDA			1,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									15,859,980				16,500,000
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									11,639,980				12,000,000
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Tercukupinya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1 Kegiatan		2,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Tercukupinya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1 Kegiatan		2,887,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Madiun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Madiun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Tercukupinya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan		5,962,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								4,220,000				4,500,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Tercukupinya Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Kegiatan		4,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,500,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2,860,000				2,900,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								2,860,000				2,900,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Tercukupinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Bulan		2,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,900,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								9,916,000				10,600,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								9,916,000				10,600,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Tercukupinya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 Kegiatan		6,196,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,800,000	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Tercukupinya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 Kegiatan		3,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,800,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								11,655,000				12,600,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								11,655,000				12,600,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Tercukupinya Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Kegiatan		655,000	Kurang Bayar DBH SDA			1,000,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Tercukupinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Bulan		7,440,000	Kurang Bayar DBH SDA			8,000,000	
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tercukupinya Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Kegiatan		3,560,000	Kurang Bayar DBH SDA			3,600,000	
TOTAL									3,844,011,761				3,765,800,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Madiun
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Nglames

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN																
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keberhasilan Dalam Bidang Pembangunan					100 %		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					100 %		341,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil				0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Nglames					100 %		158,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
TOTAL												600,000,000					0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Mejayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58,622,800				60,000,000					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan	12 Bulan	7 Unit	100 %	48,244,300	Pendapatan Bagi Hasil		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	12 Bulan	50,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan	12 Bulan	16 Unit	100 %	10,378,500	Pendapatan Bagi Hasil		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	12 Bulan	10,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					52,465,800				54,965,800				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					52,465,800				54,965,800				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang Terselenggara	Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Laporan	80 %	52,465,800	Pendapatan Bagi Hasil		Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara	12 Bulan	54,965,800
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100,000,000				100,000,000				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					76,800,500				76,800,500				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terkoordinasi	Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Laporan	80 %	76,800,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	12 Bulan	76,800,500
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					23,199,500				23,199,500				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan	12 Bulan		80 %	23,199,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana	12 Bulan	23,199,500
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					55,234,600				75,234,600				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					55,234,600				75,234,600				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi	Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Laporan	100 persen	55,234,600	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	75,234,600
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					55,000,000				55,000,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					55,000,000				55,000,000				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Semua Kelurahan	12 Bulan	11 Dokumen	80 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	12 Bulan	55,000,000
									TOTAL	4,747,081,316				4,811,685,168				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Mejayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Bangunsari Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase Layanan Umum Yang Tersedia	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	100 %	40 Persen	10,558,891	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Umum Yang Tersedia	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	100 %	40 Persen	22,508,959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Umum Yang Tersedia	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	0 Paket 100 %	40 Persen	6,779,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Tersedianya Logistik Kantor	Persentase Layanan Umum Yang Tersedia	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	100 %	40 Persen	16,542,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Umum Yang Tersedia		86,00 nilai 90 nilai		40 Persen	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	100 %	40 Persen	19,408,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	100 %	40 Persen	106,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Mejayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Bangunsari Mejayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	0 Unit 100 %	30 Persen	15,421,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Terpeliharanya Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	86,00 nilai 90 nilai	100 %	30 Persen	71,112,668	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							246,987,932					0
7 01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							246,987,932					0
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Terlaksananya Pembangunan Infastruktur Di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan Yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen	0 Unit 100 %	80 Persen	62,514,732	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan Yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen	100 %	80 Persen	116,823,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan Yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari	100 persen	0 Laporan 100 %	80 Persen	67,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							15,899,400					0
7 01 04 2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							7,949,700					0
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terlaksana		100 persen		30 Persen	7,949,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	0
7 01 04 7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							7,949,700					0
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Sinergitas TNI PoLRI dan Masyarakat		Kab. Madiun, Mejayan, Bangunsari		100 %		7,949,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				0
TOTAL									534,000,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Krajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Umum yang tersedia	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	40 Persen	11,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	12,520,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								89,975,280					91,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	40 Persen	14,975,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	16,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercukupi	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	1 Laporan	40 Persen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	75,000,000
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								14,383,950					15,502,660
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	30 Persen	2,418,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,502,660
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	30 Persen	11,965,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	13,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								335,112,750					359,094,040
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								335,112,750					359,094,040
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	100 persen	1 Unit	80 Persen	110,948,118	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	120,929,380
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	100 persen	1 Pokmas / Ormas	80 Persen	149,496,700	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	159,496,700
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	100 persen	1 Laporan	80 Persen	74,667,932	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	78,667,960
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								43,476,760					44,476,760
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								43,476,760					44,476,760

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Mejayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Krajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	100 persen	1 Laporan	30 Persen	17,899,560	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	19,699,560
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Krajan	100 persen	1 Laporan	30 Persen	25,577,200	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	24,777,200
TOTAL												541,500,000					579,620,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Mejayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0004 Kelurahan Pandean

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Mejayan, Pandean	86,00 nilai 90 nilai	4 Unit	30 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	4,800,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Mejayan, Pandean	86,00 nilai 90 nilai	12 Unit	30 Persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	14,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Mejayan, Pandean	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	30 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	50,000,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								234,000,000					234,000,000
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								234,000,000					234,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Pandean	100 persen	1 Unit	80 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Pandean	100 persen	5 Pokmas / Ormas	80 Persen	134,000,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	134,000,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,640,000					10,040,000
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,640,000					10,040,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Pandean	100 persen	12 Laporan	30 Persen	5,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	5,040,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kab. Madiun, Mejayan, Pandean	100 persen	4 Laporan	30 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	5,000,000
TOTAL									550,000,000					550,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pilangkenceng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase layanan umum yang tersedia	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Dokumen	100 persen	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	2,178,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan umum yang tersedia	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	42,500,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	42,500,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								108,715,320					108,700,149
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan yang tercukupidaerah	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	24,448,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	24,466,485
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan yang tercukupidaerah	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	84,267,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	84,233,664
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91,909,284					79,114,295
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	69,280,799	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	65,533,515
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Unit	100 persen	4,961,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,600,040
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	17,666,785	Pendapatan Bagi Hasil		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	9,980,740
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								7,685,085					10,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								7,685,085					10,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat yang Berkualitas	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	5 kegiatan	7,685,085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	10,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								42,759,937					41,400,000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								39,651,492					40,018,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pilangkenceng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	18 lembaga	100 persen	25,945,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	28,681,000
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	3,781,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	1,382,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	9,925,102	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	9,955,000
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								3,108,445					1,382,000
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		presentasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen		100 persen	3,108,445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	1,382,000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								11,809,200					11,920,800
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								11,809,200					11,920,800
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	11,809,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	11,920,800
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								7,698,530					7,754,825
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								7,698,530					7,754,825
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	presentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	100 persen	5,880,905	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	5,928,825
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	presentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	100 persen	1,817,625	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	1,826,000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								9,544,813					9,516,932
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								9,544,813					9,516,932

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pilangkenceng

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Presentasi fasilitasi administrasi pemerintahan desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Presentasi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksan	Kab. Madiun, Pilangkenceng Semua Kelurahan	100 persen	100 Persen 12 Dokumen	100 persen	9,544,813	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	9,516,932
TOTAL										2,204,340,938					2,207,902,488		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sawahan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Sawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01 02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								6,500,000	
7	01 02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								6,500,000	
7	01 02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kebutuhan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang terlaksana		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		13 Desa		6,107,600	Kurang Bayar DBH SDA		6,500,000
7	01 03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								15,000,000	
7	01 03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								15,000,000	
7	01 03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kebutuhan Peningkatan Efektivitaskan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang terlaksana		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		13 Desa		16,794,000	Kurang Bayar DBH SDA		15,000,000
7	01 04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								21,900,000	
7	01 04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								5,000,000	
7	01 04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Laporan		4,959,400	Kurang Bayar DBH SDA		5,000,000
7	01 04	7.03			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								16,900,000	
7	01 04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kebutuhan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kec. Sawahan		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		0 Laporan 12 bulan		16,875,300	Kurang Bayar DBH SDA		16,900,000
7	01 06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								21,600,000	
7	01 06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								21,600,000	
7	01 06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kebutuhan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana		Kab. Madiun, Sawahan, Semua Kelurahan		13 Desa		20,211,000	Kurang Bayar DBH SDA		21,600,000
TOTAL										2,737,409,168				2,746,309,168

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Saradan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan		20,493,000	Pendapatan Bagi Hasil			21,141,660	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Laporan		64,300,000	Pendapatan Bagi Hasil			63,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,962,900				61,809,750	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 bulan 0 Unit		61,962,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			61,809,750	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								21,152,400				35,332,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								21,152,400				0	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen		21,152,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								0				35,332,000	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,332,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								74,321,700				79,140,250	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								43,147,700				43,190,250	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 bulsan		43,147,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH			43,190,250	
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								31,174,000				35,950,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Saradan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Saradan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								31,174,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			35,950,000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								31,828,800				39,050,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								31,828,800				39,050,000	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Laporan 0 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			39,050,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 Orang		31,828,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								38,365,000				39,050,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								38,365,000				39,050,000	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen		38,365,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,050,000	
TOTAL									2,912,271,087				2,936,653,087	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Wungu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.06 01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan		30 Keluarga		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan		30 Keluarga		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan		30 Keluarga		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
7 01 03 2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan		30 Keluarga		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								0				14,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								0				14,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	7,000,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	7,000,000
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								51,587,800				33,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								51,587,800				33,000,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan	100 persen	70 Orang	100 persen	10,480,400	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	10,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Wungu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Wungu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan	100 persen	30 Orang	100 persen	5,792,400	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	5,000,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 persen	35,315,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	18,000,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							31,200,000						25,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							31,200,000							25,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	100 persen	31,200,000	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	20,000,000	
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Wungu, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	0	Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	5,000,000	
TOTAL								4,436,748,610					4,433,788,610		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Wungu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Wungu

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	100 persen	1,721,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	100 persen	4,778,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		86,00 nilai 90 nilai	0 Unit	100 persen	140,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							111,545,000					0			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							111,545,000						0		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen		111,545,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							135,220,000					0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							100,000,000					0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan di kelurahan		100 persen	0 Unit	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							35,220,000					0			
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								35,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
TOTAL												600,000,000					0			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Wungu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Munggut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Wungu, Munggut	86,00 nilai 90 nilai	2 Unit	100 persen	9,310,337	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Madiun, Wungu, Munggut	86,00 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	76,280,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								307,242,293					0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								307,242,293					0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Presentase kegiatan di Kelurahan	Kab. Madiun, Wungu, Munggut	100 persen	1 Unit	100 persen	245,551,593	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase kegiatan di Kelurahan	Kab. Madiun, Wungu, Munggut	100 persen	1 Pokmas / Ormas	100 persen	9,268,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Presentase kegiatan di Kelurahan	Kab. Madiun, Wungu, Munggut	100 persen	1 Laporan	100 persen	52,422,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	0
TOTAL									600,000,000				143,093,195	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Wonoasri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai peraturan	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Laporan	14 dokumen	10,675,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,000,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	17 Orang/bulan	100 Persen	1,811,306,974	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	1,811,306,974
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan		50 Orang		30,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			30,000,000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan umum yang tersedia	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 Persen	2,997,900	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan umum yang tersedia	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	2 Paket	100 Persen	12,250,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	10,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase layanan umum yang tersedia	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 Persen	2,998,550	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	3,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan umum yang tersedia	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	86,00 nilai 90 nilai	12 Paket	100 Persen	23,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	86,00 nilai 90 nilai	23,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Wonoasri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								18,280,394			10,000,000		
7	01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								18,280,394			10,000,000		
7	01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat yang berkualitas	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	6 Kegiatan	18,280,394	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	100 persen	10,000,000
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								43,221,716			44,000,000		
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								17,700,000			16,000,000		
7	01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen		100 Persen	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	6,000,000
7	01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	100 Persen	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	3,000,000
7	01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 Persen	6,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	7,000,000
7	01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								25,521,716			28,000,000		
7	01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen		100 Persen	12,571,716	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	15,000,000
7	01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen		100 Persen	9,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	6,000,000
7	01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang terselenggara	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 Persen	3,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	7,000,000
7	01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								28,750,000			29,000,000		
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								28,750,000			29,000,000		
7	01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Laporan	100 Persen	28,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	29,000,000
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								20,144,600			15,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Wonoasri
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Wonoasri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20,144,600				15,000,000					
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	50 Orang	100 Persen	14,981,600	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	10,000,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	50 Orang	100 Persen	5,163,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	5,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					35,853,673				30,000,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					35,853,673				30,000,000				
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 Persen	23,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	20,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 Persen	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	5,000,000
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kab. Madiun, Wonoasri, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 Persen	9,353,673	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	5,000,000
TOTAL									2,241,306,974								2,211,306,974	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan Dana untuk kebutuhan komponen instalasi listrik, peralatan kebutuhan kantor, penyediaan barang cetakan dan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 nilai 90 nilai	1 Paket	100 persen	18,629,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86 nilai 90 nilai	20,231,589
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan Dana untuk kebutuhan komponen instalasi listrik, peralatan kebutuhan kantor, penyediaan barang cetakan dan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD yang terpenuhi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 nilai 90 nilai	2 Laporan	100 persen	110,406,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86 nilai 90 nilai	99,996,000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								330,923,130					330,923,130
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 nilai 90 nilai	4 Laporan	100 persen	112,643,130	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86 nilai 90 nilai	112,643,130
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 nilai 90 nilai	12 Laporan	100 persen	218,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86 nilai 90 nilai	218,280,000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								198,399,400					198,399,400
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase ketersediaan anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah untuk Bakesbangpol	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 nilai 90 nilai	14 Unit	100 persen	10,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86 nilai 90 nilai	10,560,000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase ketersediaan anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah untuk Bakesbangpol	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 nilai 90 nilai	35 Unit	100 persen	148,989,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86 nilai 90 nilai	148,989,400
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase ketersediaan anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah untuk Bakesbangpol	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 nilai 90 nilai	1 Unit	100 persen	38,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	86 nilai 90 nilai	38,850,000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								297,767,150					297,767,150

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8	01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								297,767,150				297,767,150	
8	01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	300 Orang	3 kali	297,767,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	297,767,150
8	01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								2,941,632,552				2,941,632,552	
8	01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								2,941,632,552				2,941,632,552	
8	01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kab. Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 nilai	18 Orang	3 kali	2,941,632,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Indeks Demokrasi Indonesia	85 nilai	2,941,632,552
8	01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								2,805,671,629				2,805,671,629	
8	01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								2,805,671,629				2,805,671,629	
8	01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	68 Orang	68 orang	2,805,671,629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	100 persen	2,805,671,629
8	01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								282,639,500				277,942,700	
8	01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								282,639,500				277,942,700	
8	01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	300 Orang	3 kali	282,639,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil		1. Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	277,942,700

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								2,018,107,030				
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								2,018,107,030				
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Indeks Keamanan Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan dan pencegahan konflik Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 nilai	200 Orang	100 persen	322,135,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Indeks Keamanan Manusia	95 nilai	322,135,510
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Indeks Keamanan Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan dan pencegahan konflik Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 nilai	100 Orang	100 persen	1,108,696,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Indeks Keamanan Manusia	95 nilai	1,108,696,520
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Keamanan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan dan pencegahan konflik Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 nilai	1 Dokumen	100 persen	587,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1. Indeks Keamanan Manusia	95 nilai	587,275,000
TOTAL													11,558,037,666			11,540,834,720	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dipedomani pada RKPD Tahun 2023.

6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai ukuran capaian pembangunan daerah secara makro pada periode perencanaan tertentu. Adapun IKU Kabupaten Madiun Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Target Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,80
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,85
3	Angka Kemiskinan	%	11,80
4	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	72,20
5	Indeks Kesalehan Sosial	Skala	69,36

Sumber : P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

Tabel 6.2
Target Capaian Indikator Sasaran (*Impact*)
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian
1	Nilai Sakip	A
2	Opini Atas Audit BPK	WTP
3	Tingkat Maturitas SPIP	3,5
4	Indeks Profesionalitas Aparatur	81,50
5	Indeks SPBE	2,75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,20
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,11
8	Tingkat pengangguran terbuka	4,08
9	Pertumbuhan PDRB Sektor	5%

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian
	Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	
10	Spending Of Money (Pengeluaran Wisatawan)	355 milyar
11	Indeks Pembangunan Gender	92
12	Persentase Desa Mandiri	47,5%
13	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78
14	Indeks Resiko Bencana	158
15	Pengeluaran Per Kapita Makanan	Rp. 620.000
16	Indeks Kesehatan	0,80
17	Indeks Pendidikan	0,640
18	Persentase Budaya Daerah Yang Dilestarikan	100%
19	Indeks Toleransi	80,17
20	Indeks Solidaritas	88,37
21	Indeks Stabilitas	79,66

Sumber : P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Kunci pada RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Madiun

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
	Pertumbuhan Ekonomi		4,85	4,85
	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	persen	5	5
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72.20	72.20
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92.00	92.00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		4.08	4.08
	Angka Kemiskinan		11,80	11,80
A.2	Fokus Kesejahteraan Sosial			
A.2.1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan			
	APS SD		100	100
	APS SMP		100	100
	APS PAUD	persen	100	100
A.2.2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			
	Prevalensi Balita Stunting		20	20
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
B.1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
B.1.1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan			
	Indeks Pendidikan		0.640	0.640
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah		90	90
	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan		6.49	6.49
	Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	persen	100	100
	Persentase lembaga SD terakreditasi A	persen	4.58	4.58
	Persentase lembaga SMP terakreditasi A	persen	77.08	77.08
	Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi	persen	62	62
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah		90	90
	Prosentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan	persen	100	100
	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi	persen	56.18	56.18
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	persen	99.32	99.32
B.1.2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan			
	Dinas Kesehatan			
	Indeks Kesehatan		0.80	0.80
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Angka Kematian Ibu		0	0
	Angka Kematian Bayi	persen	0	0
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	persen	79	79
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit	persen	63	63
	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	persen	81	81
	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	persen	100	100
	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	persen	100	100
	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	persen	85	85
	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri		21	21
	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	persen	100	100
	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	persen	78	78
	Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	persen	89	89
	Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	persen	92	92
	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	persen	100	100
	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	persen	87.5	87.5
	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	persen	97.83	97.83
	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	persen	100	100
B.1.3	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	persen	4.86	4.86
	Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana	persen	100	100
	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program	persen	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Pemerintah Daerah			
	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	persen	5.50	5.50
	Prosentase kawasan kumuh baru yang tertangani		100	100
	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	persen	73.00	73.00
	Persentase Orang/Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Kecil	persen	3.00	3.00
B.1.4	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
	Indeks Stabilitas		79,66	79,66
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan	persen	100	100
	Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan	persen	100	100
	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	persen	100	100
	Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	persen	100	100
	Indeks Resiko Bencana		158	158
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk	persen	100	100
	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	persen	100	100
	Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	persen	100	100
B.1.5	Urusan Pemerintah Bidang Sosial			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	persen	90	90
	Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan	persen	19.42	19.42
	Persentase PPKS yang tertangani	persen	5.00	5.00
	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	90	90
	Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana	persen	100	100
	Persentase personil Tanaga yang dibina	persen	100	100
B.2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
B.2.1	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif		100	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan		14	14
	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif		50	50
	Rasio kekerasan terhadap anak		13	13
B.2.2	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan			
	Jumlah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Terselesaikan		6	6
	Jumlah dokumen pengelolaan tanah kosong		1	1
	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	persen	100	100
	Jumlah dokumen penatagunaan tanah		1	1
	Jumlah Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang Tereistribusi		15	15
	Persentase Penyelenggaraan Perizinan membuka tanah yang dikelola	persen	100	100
B.2.3	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup			
	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		65,11	65,11
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Tersusunnya dan terlaksananya dokumen perencanaan lingkungan hidup		5	5
	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	persen	100	100
	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air		7	7
	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola		22.9	22.9
	Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	persen	100	100
	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	persen	100	100
	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup		45	45
	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup		5	5
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	persen	100	100
	Persentase sampah yang tertangani	persen	50	50
B.2.4	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan	persen	97	97
	Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan	persen	97	97
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	persen	100	100
	Persentase database kependudukan yang valid	persen	100	100
	Prosentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	persen	100	100
B.2.5	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Persentase Desa Mandiri	persen	47.5	47.5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	persen	100	100
	Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk		17	17
	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik		84.80	84.80
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	persen	100.00	100.00
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	persen	69.7	69.7
	Persentase BUMDesa yang aktif	persen	51.5	51.5
	Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif	persen	73.7	73.7
B.2.6	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	persen	100	100
	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	persen	9.27	9.27
	Persentase masyarakat yang memahami program Bangkacencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	persen	63	63
	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	persen	6.80	6.80
B.2.7	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika			
	Indeks SPBE		2.75	2.75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	persen	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	persen	100	100
B.2.8	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase koperasi yang berkualitas.	persen	35	35
	Persentase koperasi yang sehat	persen	86	86
	Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	persen	55	55
	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi.	persen	73	73
	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	persen	1.81	1.81
	Persentase Peningkatan pengembangan UMKM	persen	0.25	0.25
	Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan.	persen	16	16
B.2.9	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase atlet yang berprestasi	persen	37.05	37.05
	Persentase pemuda yang berprestasi	persen	6.00	6.00
B.2.10	Urusan Pemerintah Bidang Statistik			
	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid	persen	90	90
B.2.11	Urusan Pemerintah Bidang Persandian			
	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	persen	100	100
B.2.12	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan			
	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	persen	100	100
	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	persen	100	100
	Cakupan pembinaan sejarah		100	100
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	persen	12.77	12.77
B.2.13	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Perpustakaan Terakreditasi	persen	3.37	3.37
B.2.14	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan			
	Indeks Ketersediaan Arsip		80	80
	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip		80	80
B.3	Urusan Pilihan			
B.3.1	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan			
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1	1
	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan	persen	2	2
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	0.1	0.1
B.3.2	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata			
	Pengeluaran Wisatawan	rupiah	355 milyar	355 milyar
	Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan	persen	5.6	5.6
	Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	persen	16	16
	Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata	persen	1.3	1.3
	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	persen	17.7	17.7
B.3.3	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	persen	26.93	26.93
	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	persen	99.06	99.06
	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik	persen	5	5
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	persen	8	8
B.3.4	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan			
	Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan	persen	40	40
	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	persen	35	35
	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	persen	90%	90%
	Persentase peningkatan fasilitasi Produk Ekspor Unggulan	persen	65	65
	Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal	persen	100	100
	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	persen	70	70
B.3.5	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian			
	Jumlah rencana pembangunan industri		1	1
	Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha	persen	18.07	18.07
	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	persen	18.07	18.07
B.3.6	Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi			
	Persentase transmigran umum yang berhasil	persen	100	100
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
B.4.1	Sekretariat Daerah			
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		86.20	86.20
	Indeks Reformasi Birokrasi		73.80	73.80
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitasi	persen	100	100
	Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	persen	100	100
	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan	persen	100	100
	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang di fasilitasi	persen	100	100
	Jumlah Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang hukum		7	7
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan	persen	100	100
	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi	persen	95	95
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	persen	100	100
	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan	persen	100	100
	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	persen	4	4
	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan	persen	100	100
B.4.2	Sekretariat Dewan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase penyelenggaraan administrasi DPRD	persen	100	100
	Persentase layanan keuangan DPRD	persen	100	100
	Persentase layanan kesejahteraan DPRD	persen	95	95
	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah APBD	persen	100	100
	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah Non APBD	persen	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan	persen	100	100
	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	persen	100	100
B.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
B.5.1	Perencanaan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	persen	100	100
	Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%	persen	100	100
	Persentase PD Bidang Ekonomidan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%	persen	100	100
	Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%	persen	100	100
B.5.2	Penelitian dan Pengembangan			
	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	persen	100	100
	Persentase pemanfaatan hasil kemitraan yang ditindaklanjuti /diterbitkan /dipublikasikan	persen	100	100
B.5.3	Keuangan			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	Opini atas Audit BPK		WTP	WTP
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	persen	100	100
	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	persen	100	100
	Badan Pendapatan Daerah			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase peningkatan PAD	persen	100	100
B.5.4	Kepegawaian			
	Indeks Profesionalitas Aparatur		81.5	81.5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase penetapan kebutuhan ASN	persen	100	100
	Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi	persen	100	100
	Persentase kedisiplinan ASN	persen	99	99
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	persen	100	100
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	85	85
B.5.5	Inspektorat			
	Nilai SAKIP	nilai	A	A
	Tingkat Maturitas SPIP		3.5	3.5
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A)	persen	100	100
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	persen	100	100
	Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan		3	3
	Persentase pendampingan, asistensi, dan verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku	persen	100	100
B.6	Unsur Pemerintahan Umum			
B.6.1	Unsur Kewilayahan			
	Kecamatan Balerejo			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Dagangan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Dolopo			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Geger			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Gemarang			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Jiwan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Kebonsari			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Kare			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Madiun			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Mejayan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa			
	Kecamatan Pilangkenceng			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Sawahan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Saradan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Wungu			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
	Kecamatan Wonoasri			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	persen	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persen	100	100
	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban	persen	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Umum			
	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persen	100	100
C	ASPEK DAYA SAING			
C.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
C.1.1	Urusan Pemerintah Bidang Pangan			
	Pengeluaran perkapita makanan	rupiah	620 ribu	620 ribu
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase petani/peternak yang memperoleh benih/bibit ternak yang bermutu	persen	80	80
	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi (kal/org/hr)		2250	2250
	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Protein (gr/org/hr)		60	60
	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	persen	100	100
	Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani	persen	54	54
	Persentase pangan segar aman yang telah diuji lab	persen	100	100
	Persentase Terpeliharanya Prasarana Peternakan	persen	100	100
	Persentase Peningkatan Kualitas Peternak	persen	100	100
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur			
C.2.1	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik	persen	95	95
	Persentase kendaraan laik jalan	persen	100	100
	Persentase angka tertib lalu lintas	persen	90	90
C.2.2	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		78	78
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi	persen	84.79	84.79
	Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	persen	2.69	2.69
	Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun	persen	8.64	8.64
	Persentase saluran drainase kondisi baik	persen	4.86	4.86
	Persentase trotoar kondisi baik	persen	3.83	3.83
	Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik	persen	50.78	50.78
	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi	persen	100	100
	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	persen	100	100
	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap	persen	29.54	29.54
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	persen	86.61	86.61
	Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	persen	67.69	67.69
	Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun	persen	40	40
D	Fokus Iklim Investasi			
D.1	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal			
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		86.20	86.20
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Minat Investasi		1,600	1,600
	Rata-rata waktu penyelesaian perijinan dan Non Perijinan		10	10
	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM	persen	80	80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja	
			Tahun 2023	Akhir Periode
1	2	3	4	5
	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	persen	100	100
	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	persen	10	10
D.2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
	Indeks Kesalehan Sosial		69,36	69,36
	Indeks Solidaritas		88,37	88,37
	Indeks Toleransi		80,17	80,17
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	100	100
	Indeks Demokrasi Indonesia		85	85
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	persen	100	100
	Indeks Keamanan Manusia		95	95
	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	100	100
D.3	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86.00	86.00
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		90	90
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	persen	78	78
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	78	78
	Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun		80	80

Sumber : P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

BAB VII

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2023, selain itu RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Madiun Tahun 2023
- b. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Madiun Tahun 2023;
- c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Dalam hal pelaksanaan RKPD tahun berjalan Kabupaten Madiun Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan maka akan dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan pada RKPD Perubahan tahun berjalan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Madiun, 8 Juli 2022

BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

